PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

NARASI
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

SK No 257168 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PEMUTAKHIRAN NARASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
1	Perubahan Gambar 2.1 dalam halaman 31	Gambar 2.1 Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 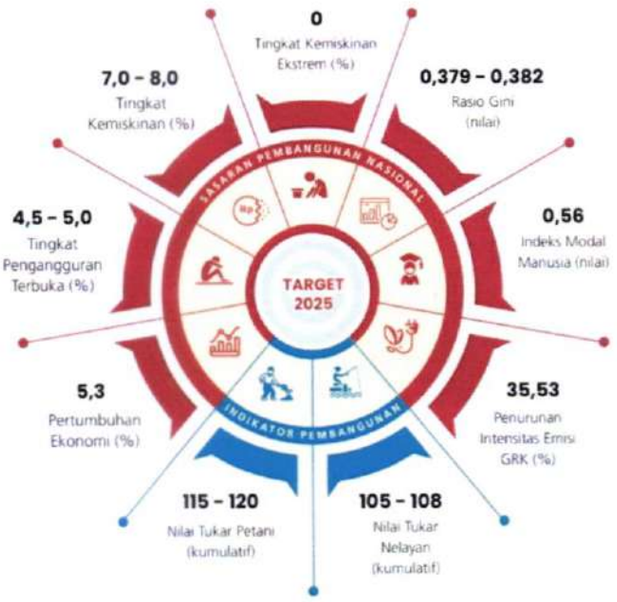 Keterangan: *) target menggunakan US$ 1,90 PPP sedangkan apabila menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5 – 1 persen.
2	Perubahan alinea pertama halaman 34	Sebagai tahapan pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan penjabaran tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, estafet pembangunan perlu dilakukan secara akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada RKP Tahun 2025 disusun 83 Kegiatan Prioritas Utama yang menjadi penekanan, termasuk di dalamnya delapan Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
3	Perubahan Gambar 2.4 dalam halaman 38	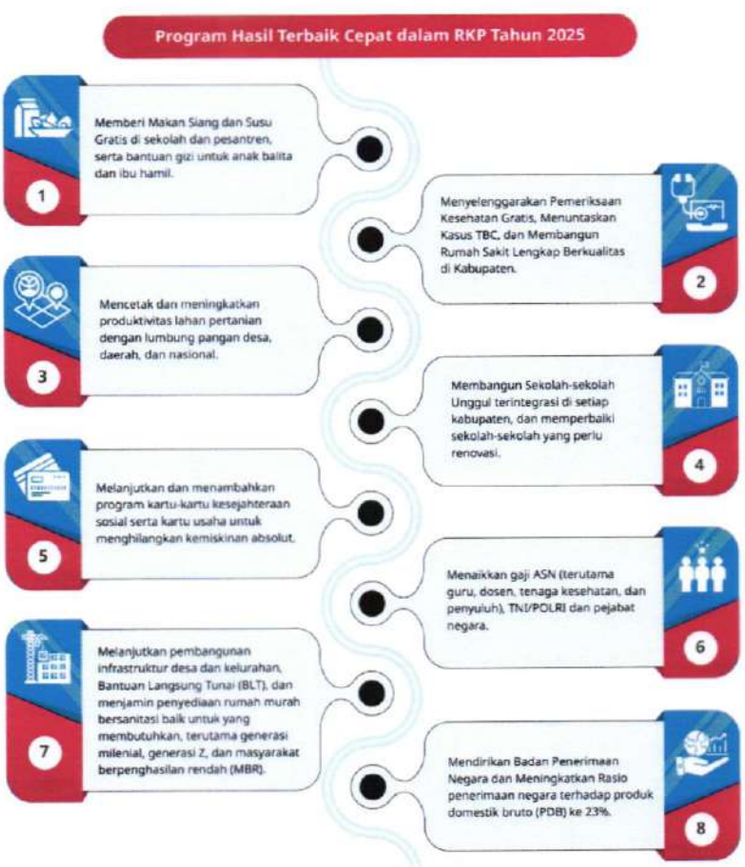
4	Perubahan alinea pertama dalam halaman 38	Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan *Gross National Income* per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$5.410 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
5	Perubahan Tabel 2.1 dalam halaman 38	Tabel 2.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, *yoy*): Akhir Periode	2,5±1,0[a]
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	16.000-16.900[b]
3	Cadangan Devisa (miliar USD)	162,40
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,78)[d]
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	20,8
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,2–4,3
8	Devisa Pariwisata (miliar USD)	17,10–18,30
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,36
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,24
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,26)[c] [d]
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)[c] [d]
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,15[c]
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	5,61
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.905,60
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	858,9

Keterangan: a) Kesepakatan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 7 Februari 2025; b) Mempertimbangkan perkembangan data Nilai Tukar Rupiah hingga April 2025; c) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; dan d) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

6	Perubahan alinea pertama dalam halaman 39	Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2025 sebesar 5,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5±1,0 persen (*yoy*) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp16.000–Rp16.900 per USD.
7	Perubahan alinea kedua dalam halaman 39	Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor akan menghadapi tantangan yang cukup berat disebabkan oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang memicu perang dagang sehingga meningkatkan ketidakpastian global. Kebijakan tersebut berimplikasi pada melemahnya permintaan terhadap ekspor serta disrupsi dalam rantai pasok global. Meskipun demikian, kinerja ekspor Indonesia tetap didorong untuk tumbuh melalui diversifikasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta memitigasi sektor yang terdampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Sementara impor akan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.
8	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 39	Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global, melalui strategi (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (2) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi *market intelligence, business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (3) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *free trade agreement* dan/atau *comprehensive economic partnership agreement*; (4) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (5) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan *database* informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; serta (6) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.
9	Perubahan alinea keempat dalam halaman 39	Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global melalui strategi (1) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah, (5) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah, (7) penguatan iklim

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, serta (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.
10	Perubahan alinea pertama dalam halaman 40	Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2025. Dalam upaya mendorong perekonomian, Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri diharapkan dapat meningkat menjadi sebesar Rp1.905,60 triliun disertai tingkat efisiensi investasi tecermin dari *Incremental Capital Output Ratio* yang diupayakan semakin menurun menjadi 6,2. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perbaikan iklim investasi secara signifikan, terutama terkait dengan kepastian berusaha dan perlindungan terhadap investor yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomi, di antaranya praktik korupsi dan pungutan liar (ditandai dengan turunnya Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia pada tahun 2024), maraknya praktik suap (berdasarkan temuan Enterprise Survey Indonesia tahun 2023 oleh Bank Dunia, serta lemahnya penegakan hukum yang ditandai dengan rendahnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga tahun 2024 (37 poin) yang jauh lebih rendah dari rata-rata global (44 poin). Oleh karena itu, beberapa upaya yang mendesak dalam rangka mendorong peningkatan investasi untuk memperkuat transformasi ekonomi antara lain (1) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (2) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menghadirkan kepastian berusaha; serta (3) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha.
11	Perubahan alinea kedua dalam halaman 40	Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Selain itu, pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas juga didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian pembangunan smelter di tahun 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema RKP Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas sehingga berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat. Selain itu, peningkatan upaya dan akses pelayanan kesehatan dapat mendorong konsumsi jasa kesehatan di masyarakat.
12	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 40	Sektor industri pengolahan pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh sebesar 5,5 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi produk domestik bruto industri pengolahan terhadap produk domestik bruto diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 20,8 persen di tahun 2025. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 antara lain (1) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2025, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi tembaga di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat; (2) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (3) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (4) keberlanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara yang akan mendorong permintaan besi-baja dalam negeri; serta (5) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang peningkatan upaya kesehatan, penanggulangan penyakit, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
13	Perubahan alinea pertama dalam halaman 41	Pada tahun 2025, rasio produk domestik bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,2–4,3 persen serta diiringi oleh peningkatan devisa pariwisata mencapai US$17,10–18,30 miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
14	Perubahan Tabel 2.2 dalam halaman 41	Tabel 2.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen)

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi Tahun 2024	Sasaran 2025
Pertumbuhan PDB		5,03	5,30
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran			
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,11	5,14
2	Konsumsi Pemerintah	6,61	6,66
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4,61	5,61
4	Ekspor Barang dan Jasa	6,51	6,95
5	Impor Barang dan Jasa	7,95	7,16
Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha			
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	2,20
2	Pertambangan dan Penggalian	4,90	5,52
3	Industri Pengolahan	4,43	5,50
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	4,77	5,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,56	2,05
6	Konstruksi	7,02	7,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	4,96
8	Transportasi dan Pergudangan	8,69	9,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	9,53
10	Informasi dan Komunikasi	7,57	7,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	6,52
12	*Real Estate*	2,50	2,45
13	Jasa Perusahaan	8,38	8,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,40	3,05
15	Jasa Pendidikan	3,75	3,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,11	8,91
17	Jasa lainnya	9,80	6,55

15	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 42	Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,36 persen Produk Domestik Bruto, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 10,24 persen Produk Domestik Bruto dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 2,11 persen Produk Domestik Bruto. Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan.
16	Perubahan alinea keempat dalam halaman 42	Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, percepatan implementasi *core tax system*, penguatan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penajaman *tax incentive* tepat sasaran untuk mendorong sektor prioritas, serta mendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi. Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak kebijakan diarahkan pada reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak sumber daya alam, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara, pemanfaatan aset barang milik negara, serta inovasi dan digitalisasi layanan.
17	Perubahan alinea keenam dalam halaman 42	Pada tahun 2025, Belanja Negara ditargetkan mencapai 14,89 persen Produk Domestik Bruto, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar 11,11 persen Produk Domestik Bruto dan Transfer ke Daerah sebesar 3,78 persen Produk Domestik Bruto. Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada implementasi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi), kesejahteraan sosial, percepatan dan pemerataan konektivitas, serta pelaksanaan transformasi ekonomi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal.
18	Perubahan alinea pertama dalam halaman 43	Defisit Anggaran ditargetkan sebesar 2,53 persen Produk Domestik Bruto disertai pengendalian *primary balance*, didukung oleh perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan baik dari utang dan non-utang yang dikelola secara *prudent* dan kredibel. Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain untuk (a) penyediaan infrastruktur yang berkualitas; (b) mendukung proyek-proyek yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda besar terhadap perekonomian; (c) optimalisasi peran Special Mission Vehicle, Badan Layanan Umum, dan Sovereign Wealth Funds untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi; (d) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pembiayaan ultra mikro, optimalisasi saldo anggaran lebih; serta (e) mendorong Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development* untuk mendukung prioritas pembangunan nasional.
19	Perubahan Tabel 2.3 dalam halaman 43	Tabel 2.3 Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2025 (Persen PDB)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi Sementara 2024	Sasaran 2025[a]
Pendapatan Negara	13,33	12,84	12,36
Penerimaan Perpajakan	10,31	10,08	10,24
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,93	2,62	2,11
Belanja Negara	14,94	15,13	14,89
Belanja Pemerintah Pusat	10,72	11,23	11,11
Tranfer ke Daerah	4,22	3,90	3,78
Keseimbangan Primer	0,49	(0,09)[b]	(0,26)[b]
Surplus/Defisit	(1,61)[b]	(2,29)[b]	(2,53)[b]
Pembiayaan Investasi	(0,43)[b]	(0,27)[b]	(0,64)[b]
Stok Utang Pemerintah	39,21	39,36	39,15

Keterangan: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan b) Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

20	Perubahan alinea keempat dalam halaman 43 dan alinea pertama dalam halaman 44	Stabilitas eksternal Indonesia akan semakin menguat pada tahun 2025 karena berhasil melewati periode krusial sebelumnya dengan baik, yaitu tahun politik dan transisi pergantian kepemimpinan. Pada tahun 2025, neraca perdagangan barang ditargetkan surplus sebesar US$34,99 miliar seiring dengan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor di tengah gejolak geopolitik melalui langkah negosiasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral, serta memitigasi sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. Adapun defisit neraca jasa-jasa ditargetkan mengalami penurunan menjadi US$18,52 miliar, dikontribusikan oleh peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang semakin signifikan ke Indonesia sehingga meningkatkan surplus neraca jasa perjalanan. Adapun defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US$35,71 miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal hasil investasi asing. Neraca pendapatan sekunder ditargetkan terus mencatat surplus yang cukup tinggi menjadi sebesar US$7,37 miliar, didorong oleh peningkatan keterampilan, jumlah negara penempatan, dan sektor lapangan penduduk migran Indonesia di luar negeri yang semakin kompetitif. Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial terus mengalami perkembangan yang baik sehingga ditargetkan dapat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		mencapai US$21,08 miliar. Peningkatan tersebut selaras dengan investasi langsung yang konsisten mencatat surplus dan ditargetkan mengalami kenaikan menjadi US$17,50 miliar, sejalan dengan keberlanjutan berbagai proyek strategis pemerintah dan iklim dunia usaha yang kondusif sehingga membuat para investor tetap percaya terhadap prospek perekonomian Indonesia. Adapun investasi portofolio diharapkan dapat terus berkembang mencapai US$11,85 miliar, sehingga membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2025, neraca keseluruhan ditargetkan akan menjadi US$9,20 miliar disertai dengan perkembangan cadangan devisa mencapai US$162,40 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.
21	Perubahan Tabel 2.4 dalam halaman 44	Tabel 2.4 Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2025 (Miliar USD)

Uraian	Sasaran 2025
Transaksi Berjalan	(11,87)
dalam persen PDB	(0,78)
Barang	34,99
Jasa-Jasa	(18,52)
Pendapatan Primer	(35,71)
Pendapatan Sekunder	7,37
Transaksi Modal dan Finansial	21,08
Investasi Langsung	17,50
Investasi Portofolio	11,85
Investasi Lainnya	(8,34)
Neraca Keseluruhan	9,20
Cadangan Devisa	162,40
dalam bulan impor	6,4

Keterangan: Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

22	Perubahan alinea pertama dalam halaman 45	Pada tahun 2025, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran 2,5±1,0 persen (*yoy*), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.000–Rp16.900 per USD. Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi nasional, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran).

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
23	Perubahan alinea kedua dalam halaman 45	Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2025 diarahkan untuk menjaga empat aspek pokok, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (a) pengelolaan permintaan dan kebijakan stabilisasi harga pangan melalui optimalisasi belanja negara dan daerah; (b) peningkatan produksi dalam negeri melalui akselerasi kawasan sentra produksi pangan serta pengelolaan cadangan dan tata niaga pangan; (c) penguatan infrastruktur dan konektivitas pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan; (d) perbaikan kualitas data pangan; (e) penguatan koordinasi tim pengendalian inflasi pusat dan daerah sejak proses perencanaan; serta (f) koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi *timing* maupun *sequencing* sehingga dapat meminimalisir dampaknya terhadap kenaikan inflasi.
24	Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman 45	Selanjutnya, komponen inflasi harga bergejolak dijaga terkendali dalam rentang 3,0–5,0 persen (*yoy*) melalui penyelesaian permasalahan struktural di antaranya (a) optimalisasi belanja negara dan daerah untuk penguatan infrastruktur, konektivitas, dan ketersediaan pasokan melalui subsidi ongkos angkut, bantuan sosial tepat sasaran, operasi pasar, dan pasar murah; (b) percepatan implementasi kawasan sentra produksi pangan; (c) percepatan dan perluasan digitalisasi pada sektor pertanian dari hulu ke hilir (peningkatan sumber daya manusia petani melalui literasi digital hingga pengelolaan pangan dan teknologi pascapanen); (d) penguatan hilirisasi komoditas dan diversifikasi pangan; (e) penguatan logistik melalui pemenuhan sarana prasarana konektivitas, penyediaan kewajiban pelayanan publik/*public service obligation* dan layanan angkutan perintis pada daerah tertinggal, terluar, terdepan dan perbatasan serta koridor utama yang terintegrasi dengan sentra logistik; (f) pengelolaan, perbaikan, dan integrasi data neraca pangan nasional; serta (g) penguatan sinergi antar kementerian/lembaga/daerah dalam perumusan kebijakan pengendalian inflasi.
25	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 45	Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (1) penguatan strategi operasi moneter yang *pro-market* untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter; (2) menetapkan tingkat suku bunga Bank Indonesia-*rate* yang optimal untuk menjangkar ekspektasi inflasi; (3) mendorong percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing untuk menarik aliran modal asing masuk; (4) mendorong percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional maupun lintas negara; serta (5) menerapkan kebijakan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong penyaluran kredit.
26	Perubahan alinea kelima dalam halaman 45	Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, pada tahun 2025, Wilayah Kawasan Timur Indonesia didorong untuk tumbuh lebih tinggi, sementara tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Kawasan Barat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Kawasan Barat Indonesia ditargetkan sebesar 5,0 persen, sedangkan Kawasan Timur Indonesia sebesar 6,2 persen.
27	Perubahan alinea pertama dalam halaman 46	Aktivitas perekonomian Wilayah Papua pada tahun 2025 akan didorong dengan penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi tanaman pangan dan perkebunan. Sejalan dengan hal tersebut, penyiapan pangan lokal sagu, jagung, ubi, dan padi dalam rangka pengembangan kemandirian pangan juga diharapkan dapat mendukung perekonomian Wilayah Papua. Selain itu, peningkatan infrastruktur konektivitas juga akan mendorong perekonomian Wilayah Papua melalui pengembangan Bandara Domine Eduard Osok, Bandara Wamena, serta peningkatan Jalan Trans Papua. Pengembangan kawasan pariwisata juga akan terus didorong, seperti pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi pariwisata bahari premium yang berkelanjutan serta penyiapan kawasan pariwisata rintisan baik berbasis pariwisata budaya, berbasis minat khusus, maupun berbasis pariwisata bahari. Di sisi industri, pertumbuhan industri pengolahan akan didukung oleh pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong, pengembangan hilirisasi industri tembaga di Papua Tengah, serta percepatan pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Kawasan Industri Fakfak. Pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 6,0 persen.
28	Perubahan alinea kedua dalam halaman 46	Berlanjutnya penguatan hilirisasi industri pertambangan nikel di Kawasan Industri Teluk Weda dan Kawasan Industri Pulau Obi pada tahun 2025 ditargetkan akan mendorong perekonomian Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 9,4 persen. Selain itu, penguatan kawasan pariwisata eksisting di Kabupaten Pulau Morotai, penyiapan kawasan pariwisata rintisan Banda Neira, penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi tanaman pangan dan perkebunan, serta penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi perikanan (komoditas cakalang-tongkol, udang, tuna, dan lobster) diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi Wilayah Maluku.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
29	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 46	Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama penggerak ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan tumbuh 6,8 persen pada tahun 2025. Beberapa provinsi di Sulawesi diharapkan tumbuh signifikan seiring dengan peningkatan kinerja industri melalui penguatan industri logam dasar serta hilirisasi industri nikel, kelapa, kakao, dan rumput laut. Implementasi proyek strategis nasional di Wilayah Sulawesi, seperti penyempurnaan pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan konektivitas juga diharapkan dapat mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan. Peningkatan produktivitas pertanian di beberapa provinsi juga terus didorong melalui pengembangan kawasan komoditas pertanian jagung, cabai, dan padi. Selain itu, pengembangan pariwisata juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Sulawesi, seperti penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang.
30	Perubahan alinea keempat dalam halaman 46	Percepatan pembangunan sarana prasarana Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan infrastruktur pendukungnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 5,8 persen pada tahun 2025. Selain itu, kinerja industri diharapkan terus meningkat di beberapa provinsi seiring dengan percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri bauksit, nikel, rumput laut, sawit, dan karet; penguatan industri dasar seperti industri kimia dasar; serta pengembangan industri teknologi menengah tinggi seperti industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi. Pengembangan dan operasionalisasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara yang telah dibangun juga diharapkan akan memberikan dorongan kinerja ekonomi Wilayah Kalimantan.
31	Perubahan alinea pertama dalam halaman 47	Perekonomian di Wilayah Bali–Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,4 persen, terutama didorong oleh aktivitas sektor jasa serta peningkatan nilai tambah sektor primer. Penyiapan pengembangan kawasan terintegrasi rumput laut di Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor primer. Kinerja industri juga diharapkan dapat meningkat didorong percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri tembaga dan rumput laut. Selain itu, perekonomian Wilayah Bali–Nusa Tenggara diharapkan dapat didorong dengan peningkatan aktivitas sektor jasa bernilai tambah tinggi melalui penguatan ekosistem

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pengembangan aplikasi dan gim serta penguatan ekosistem film, animasi, *visual arts*, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif di Bali. Pengembangan aktivitas pariwisata juga akan terus didorong, utamanya penataan bangunan kawasan destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas Lombok-Gili Tramena serta percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo.
32	Perubahan alinea kedua dalam halaman 47	Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 4,7 persen sebagai pusat pertumbuhan untuk hilirisasi komoditas primer unggulan (bauksit, kakao, kelapa, dan sawit), pengembangan industrialisasi perikanan, penguatan produktivitas industri makanan dan minuman, penguatan industri logam dasar, serta penguatan industri kimia dasar. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional, seperti Jalan Tol Trans Sumatera serta pengembangan Bandara *Hub* dan *Aerocity* Kualanamu diharapkan dapat menjadi pendorong dalam integrasi kawasan khususnya dalam penyaluran logistik antarprovinsi serta perdagangan internasional yang mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing investasi di Sumatera.
33	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 47	Pembangunan infrastruktur konektivitas jalan tol terus diperkuat di Pulau Jawa untuk mengatasi tingginya biaya logistik serta untuk meningkatkan daya saing investasi di Jawa, seperti pembangunan Jalan Pantai Selatan Jawa Timur, pembangunan Pelabuhan Patimban, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, serta pengembangan Bandara *Hub* Soekarno-Hatta, Bandara *Hub* Juanda, dan Bandara *Hub* New Yogyakarta International Airport Kulon Progo. Selain itu, aktivitas jasa juga terus ditingkatkan melalui penyelesaian Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan serta penguatan ekosistem pengembangan aplikasi dan gim serta ekonomi kreatif. Industrialisasi juga akan terus didorong melalui hilirisasi industri komoditas (tembaga, bauksit, sawit, kelapa, dan rumput laut), pengembangan industri alat angkut termasuk *electronic vehicle* dan kedirgantaraan, pengembangan industri elektronik dan digital, hingga pengembangan industri kimia hilir dan farmasi. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,1 persen.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
34	Perubahan Gambar 2.5 dalam halaman 48	Gambar 2.5 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2025
35	Perubahan alinea pertama dalam halaman 48	Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, dibutuhkan total investasi sebesar Rp7.593,42 triliun dengan rincian sebagai berikut.
36	Perubahan Tabel 2.5 dalam halaman 48	Tabel 2.5 Kebutuhan Investasi Tahun 2025

No	Uraian	*Share* (Persen)	Nilai (Triliun Rp)
1	Investasi Pemerintah	5,43	412,39
2	Investasi BUMN	5,41	411,00
3	Investasi Swasta/Masyarakat	89,16	6.770,03
Total Kebutuhan Investasi			7.593,42

37	Perubahan alinea kedua dalam halaman 48	Kebutuhan investasi pada Tabel 2.5 akan dipenuhi oleh sumber pembiayaan investasi yang berasal dari pembiayaan investasi pemerintah, pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara, dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Pembiayaan investasi Badan Usaha Milik Negara bersumber dari dana internal Badan Usaha Milik Negara dan pembiayaan investasi swasta/masyarakat yang berasal dari pembiayaan kredit perbankan, penerbitan saham, dan penerbitan obligasi korporasi. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan investasi swasta/masyarakat. Secara rinci sumber pembiayaan investasi dapat dilihat pada Tabel 2.6.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
38	Perubahan Tabel 2.6 dalam halaman 49	Tabel 2.6 Sumber Pembiayaan Investasi Tahun 2025 Uraian — *Share* (Persen) (1) Pembiayaan Investasi Pemerintah — 5,43 (2) Pembiayaan Investasi BUMN (2.1) Dana Internal BUMN — 3,57 (3) Pembiayaan Investasi Swasta/Masyarakat — 91,00 (3.1) Kredit Perbankan (*flow*) — 11,93 (3.2) Penerbitan Saham — 0,91 (3.3) Penerbitan Obligasi Korporasi — 2,10 (3.4) Dana Internal Masyarakat — 76,06
39	Perubahan alinea pertama dalam halaman 49	Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan tema RKP tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitasnya sebagai agen pembangunan melalui peningkatan kinerja regulator dan operator Badan Usaha Milik Negara, peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan.
40	Perubahan alinea kedua dalam halaman 49	Sejalan dengan hal di atas, rencana investasi Badan Usaha Milik Negara diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti kesehatan, hilirisasi, swasembada pangan, energi dan air, perumahan dan infrastruktur, transformasi digital, serta sektor-sektor lain yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
41	Perubahan alinea keempat dalam halaman 50	Saat ini, terdapat 109 rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025. Rencana investasi tersebut merupakan kelanjutan investasi pada RKP Tahun 2024 yang diidentifikasi berlanjut pada tahun 2025 serta penambahan usulan rencana investasi dari Badan Usaha Milik Negara di bawah koordinasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Keuangan pada tahun 2025, dengan jumlah Badan Usaha Milik Negara yang terlibat sebanyak 65. Rencana investasi Badan Usaha Milik Negara yang mendukung prioritas pembangunan nasional juga mendukung pencapaian 14 dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
42	Perubahan Gambar 2.6 dalam halaman 50	Gambar 2.6 Gambaran Umum Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional 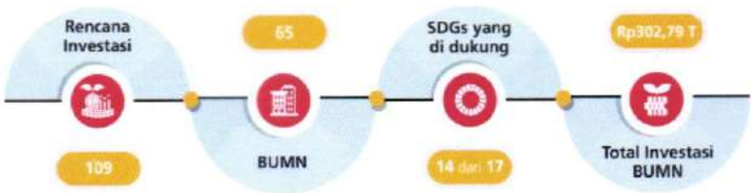 Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 2025.
43	Perubahan Gambar 2.7 dalam halaman 51	Gambar 2.7 Sebaran Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 2025.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
44	Perubahan Tabel 2.7 dalam halaman 51 dan 52	

Tabel 2.7
Identifikasi Rencana Investasi Badan Usaha Milik Negara yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi BUMN (Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Swasembada Pangan	5
	Swasembada Energi	18
	Swasembada Air	5
	Ekonomi Digital	3
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	1
	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	1
	Pembangunan Rendah Karbon	1
	Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	1
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	23
	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	15
	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	1
	Pendalaman Sektor Keuangan	1
	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	5
	Rencana Investasi BUMN Selaras dengan PN 3	4
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Penguatan Kapasitas Ketahanan Kesehatan	1
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	12
	Optimalisasi *Backbone* Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	2
	Rencana Investasi BUMN Selaras dengan PN 5	1
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	1
	Pembangunan Ibu Kota Nusantara	2
	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	6
Total		109

Sumber: Badan Usaha Milik Negara terkait dan hasil identifikasi Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 2025.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
45	Perubahan alinea kedua dalam halaman 52 dan alinea pertama dalam halaman 53	Seiring meningkatnya target pertumbuhan ekonomi serta terbatasnya pendanaan pembangunan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maupun investasi Badan Usaha Milik Negara, dukungan investasi swasta yang dapat mendorong pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional menjadi semakin penting. Sebagaimana tema RKP Tahun 2025, Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, iklim berusaha dan investasi perlu ditingkatkan sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi berkualitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, penciptaan tenaga kerja, pengembangan inovasi dan teknologi, serta yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Kontribusi investasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan investasi untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kebutuhan investasi swasta ditargetkan berkisar sebesar 89,16 persen dari total investasi atau senilai Rp6.770,03 triliun pada tahun 2025.
46	Perubahan Gambar 2.8 dalam halaman 53	Gambar 2.8 Gambaran Umum Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional Sumber: Kementerian PPN/Bappenas

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
47	Perubahan Gambar 2.9 dalam halaman 54	Gambar 2.9 Sebaran Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional di Seluruh Indonesia 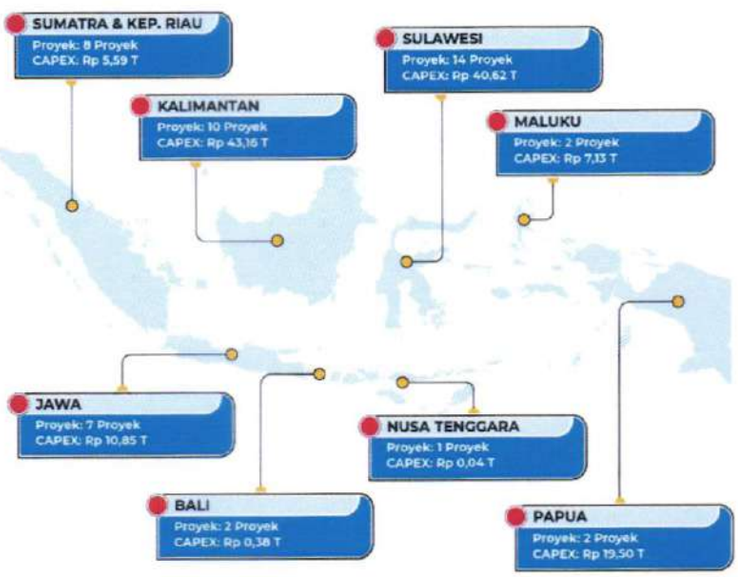 Sumber: Kementerian PPN/Bappenas.
48	Perubahan Tabel 2.8 dalam halaman 54 dan 55	Tabel 2.8 Rencana Investasi Swasta yang Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi Swasta (Proyek)
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Swasembada Energi	9
	Swasembada Pangan	1
	Swasembada Air	1
	Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	2
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	2
	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	7

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Jumlah Investasi Swasta (Proyek)
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	17
	Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	6
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	1
TOTAL		46

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, per 4 Februari 2025.

49	Penambahan alinea sebelum Subbab 3.1 Nomenklatur Prioritas Nasional 1 dalam halaman 56	Bab ini menjelaskan sasaran utama dan arah kebijakan pada masing-masing prioritas nasional. Selain itu, dicantumkan *highlight* intervensi kebijakan yang menjabarkan kegiatan prioritas utama pada masing-masing prioritas nasional. Intervensi kebijakan secara keseluruhan dari masing-masing prioritas nasional dituangkan dalam matriks pembangunan yang tidak terpisahkan dari narasi ini. Bab ini juga memuat kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang menjabarkan kebutuhan regulasi dan kelembagaan di masing-masing prioritas nasional.
50	Perubahan Subbab 3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1 dalam halaman 56	3.1.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1 Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 1

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia			
1	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 (2023)	81,69–85,23
2	Indeks Hak Asasi Manusia	2,70 (2023)	2,75

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).

51	Perubahan Subbab 3.1.2 Arah Kebijakan dalam	3.1.2 Arah Kebijakan Untuk mendukung tercapainya sasaran terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, dilaksanakan serangkaian arah kebijakan (1) penguatan ideologi Pancasila,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	halaman 56	wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional; (2) penguatan komunikasi publik dan media; (3) penguatan lembaga demokrasi; (4) penguatan kesetaraan masyarakat sipil; serta (5) pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM.
52	Perubahan Subbab 3.1.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 56 sampai dengan 62	3.1.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 1, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut. (1) Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) sebagai upaya mendukung terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri, di antaranya tergambar pada (a) kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku menjadi 3,18; (b) persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers menjadi 66,00 persen; (c) persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik menjadi 64,00 persen; (d) persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat menjadi 66,00 persen; (e) persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers menjadi 70,50 persen; (f) persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan menjadi 69,50 persen; dan (g) jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang jurnalistik dan pers sebanyak 690 orang pada tahun 2025. Untuk mewujudkan penguatan pers dan media massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan kapasitas lembaga pers, (b) peningkatan kompetensi dan etika insan pers, serta (c) penyehatan media arus utama.
53	Perubahan Subbab 3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 62 sampai dengan 63	3.1.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia" pada tahun 2025 sebagai upaya mendukung penataan regulasi nasional, yaitu (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyusunan Revisi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik didorong oleh berbagai permasalahan dalam

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, seperti isu kelembagaan, klasifikasi informasi, hak dan kewajiban pemohon informasi, serta sanksi hukum. Selain itu, terdapat ambiguitas fungsi Komisi Informasi Pusat antara peran kuasi yudikatif (penyelesaian sengketa informasi publik) dan kuasi eksekutif, yang mengakibatkan banyaknya hambatan dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
54	Perubahan Subbab 3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas 2 dalam halaman 63 sampai dengan 65	3.2.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 Untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan			
1	Asia Power Index (*Military Capability*)	15,7	16
2	Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)	65,6	65,7
3	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 (2020)	67,5
4	*Global Cybersecurity Index*	100	100
5	Indeks Keamanan Laut Nasional	59	60
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
6	Indeks Ketahanan Pangan	71,2[a]	73,2
7	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	0,67	2,20
8	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)[b]	8,27	7,21
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
9	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77
10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)[b]	13,2 (2023)	20,0
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)			
11	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48 (2022)	3,50
12	Kapasitas tampungan air (m^3/kapita)[b]	59,59	59,31
13	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)[b]	24 (2020)	39,20
14	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)[b]	10,21 (2023)	12,5

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan			
15	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	3 (2023)	3
16	Indonesia *Blue Economy Index* (IBEI)	34,25 (2023)	38,76
17	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau			
18	Indeks Ekonomi Hijau	60,37 (2023)	68,34
19	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)[b]	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)
20	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)[b]	17,47 (2023)	18,37
21	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)[b]	28,53 (2023)	26,67
22	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,44
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,53[c]	76,49
24	Indeks Kualitas Udara[b]	90,13[c]	78,53
25	Indeks Kualitas Air[b]	54,78	72,02
26	Indeks Kualitas Lahan[b]	61,95	77,97
27	Indeks Kualitas Air Laut[b]	81,67	81,02

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)
Keterangan: a) sangat sementara, b) indikator tingkat Program Prioritas/Kegiatan Prioritas, c) perhitungan menggunakan metode lama

55 Perubahan Subbab 3.2.2 Arah Kebijakan dalam halaman 65

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui (a) pembangunan postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan; (c) komponen cadangan dan komponen pendukung; (d) intelijen dan keamanan dalam negeri; (e) keamanan siber, sandi, dan sinyal; (f) keamanan laut dan hidro-oseanografi; (g) keamanan dan ketertiban masyarakat; (h) profesionalisme pelayanan kepolisian; dan (i) diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.

(2) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan melalui swasembada pangan.

(3) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan melalui swasembada energi. (4) Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus), dilaksanakan melalui swasembada air. (5) Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) ekonomi syariah, (b) ekonomi digital, dan (c) pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. (6) Terwujudnya transformasi ekonomi hijau, dilaksanakan melalui (a) ekosistem ekonomi sirkular; (b) pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik; (c) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang; (d) reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir; (e) pembangunan rendah karbon; (f) pekerjaan hijau/*green jobs*, dan (g) pengelolaan hutan lestari.
56	Perubahan Subbab 3.2.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 65 sampai dengan 80	3.2.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. (1) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ lumbung pangan Kalimantan Tengah sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah, di antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras kawasan sentra produksi pangan Kalimantan Tengah menjadi 196.984 ton dan (b) peningkatan luas panen padi kawasan sentra produksi pangan Kalimantan Tengah menjadi 146.806 hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan Tengah, (b) *on farm* kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan Tengah, dan (c) *off farm* kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Kalimantan Tengah. (2) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan, di antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		menjadi 65.724 ton dan (b) peningkatan luas panen padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Sumatera Selatan menjadi 28.568 hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatera Selatan dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan, (b) *on farm* kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan, dan (c) *off farm* Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan Sumatera Selatan. (3) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi dan luas panen padi di Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan, di antaranya tergambar pada (a) peningkatan produksi beras Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi 109.308 ton dan (b) peningkatan luas panen padi Kawasan Sentra Produksi Pangan Papua Selatan menjadi 75.621 hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan dapat dilaksanakan melalui (a) geospasial kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan, (b) *on farm* kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan, dan (c) *off farm* kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan Papua Selatan. (4) Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya sebagai upaya mendukung peningkatan produksi bahan pangan utama, di antaranya tergambar pada (a) lahan baku sawah yang dicetak menjadi 42 ribu hektare dan (b) luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman menjadi 6,9 ribu hektare. Untuk mewujudkan pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan luas lahan pertanian (ekstensifikasi), (b) peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi), dan (c) infrastruktur pendukung Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan lainnya. Upaya pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/lumbung pangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan melalui pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah. (5) Pengembangan pangan hewani sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi bahan pangan hewani dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan, di antaranya tergambar pada (a) produksi daging menjadi 4,96 juta ton, (b) produksi telur menjadi 7,43 juta ton, (c) produksi susu menjadi 855,57 ribu ton, dan (d) persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan pengembangan pangan hewani dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, (b) implementasi praktik peternakan modern, (c) penguatan pascapanen dan hilirisasi produk hasil ternak, serta (d) pengendalian dan penanggulangan penyakit ternak dengan pendekatan satu kesehatan.
		(6) Pengembangan pangan lokal dan nabati sebagai upaya mendukung meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati, diantaranya tergambar pada (a) produksi padi menjadi 54,45 juta ton; (b) produksi jagung menjadi 21,48 juta ton; (c) produksi aneka kacang menjadi 540,28 ribu ton; (d) produksi buah dan sayur menjadi 30,66 juta ton; (e) produksi sorgum menjadi 18,21 ribu ton; (f) produksi ubi jalar menjadi 1.517.449 ton; (g) produksi kedelai menjadi 370.359 ton; dan (h) produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, dan singkong) menjadi 450.000 ton. Untuk mewujudkan pengembangan pangan lokal dan nabati dapat dilaksanakan melalui (a) input dan pendukung pengembangan pangan lokal dan nabati, (b) *on farm* pengembangan pangan lokal dan nabati, (c) *off farm* pengembangan pangan lokal dan nabati, dan (d) ketahanan pangan melalui perhutanan berbasis masyarakat.
		(7) Fortifikasi dan biofortifikasi pangan sebagai upaya mendukung meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi, di antaranya tergambar pada (a) jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi menjadi 3 komoditas dan (b) persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan menjadi 20 persen. untuk mewujudkan fortifikasi dan biofortifikasi pangan dapat dilaksanakan melalui (a) fasilitasi produksi dan distribusi pangan terfortifikasi dan (b) pengembangan kawasan padi biofortifikasi.
		(8) Pengembangan pangan akuatik (*blue food*) sebagai upaya untuk mendukung meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat, di antaranya tergambar pada (a) volume produksi ikan budi daya menjadi 6,75 juta ton; dan (b) volume produksi perikanan tangkap menjadi 6,19 juta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		ton. Untuk mewujudkan pengembangan pangan akuatik (*blue food*) dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan input produksi perikanan budi daya; (b) pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; (c) pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat; (d) penguatan tata kelola mendukung transformasi perikanan budi daya; (e) pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan; (f) peningkatan kapasitas kelembagaan usaha kelautan dan perikanan; (g) peningkatan kapasitas pendampingan/penyuluhan masyarakat kelautan dan perikanan; (h) peningkatan perlindungan terhadap pelaku usaha kelautan dan perikanan; serta (i) peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, sistem rantai dingin, dan logistik pengolahan. (9) Konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan sehingga air tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan mendatang, di antaranya tergambar pada (a) Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan menjadi 12,65 juta hektare dari *baseline* 12,7 juta hektare, dan (b) Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan sejumlah 60 mata air. Untuk mewujudkan konservasi sumber daya air dapat dilaksanakan melalui (a) perlindungan dan pelestarian sumber air; (b) pengawetan air; (c) peningkatan kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi; (d) rehabilitasi dan pemulihan ekosistem *mangrove*; (e) penyelamatan mata air kritis; serta (f) pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air. (10) Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir dan meningkatkan jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala, di antaranya tergambar pada (a) akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan menjadi 39,20 persen, (b) kapasitas SPAM terbangun menjadi 281.795 liter/detik, (c) akses air minum jaringan perpipaan menjadi 31-persen, (d) persentase *Non Revenue Water* (NRW) PDAM menjadi 32 persen, (e) kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 100 kabupaten/kota, serta (f) kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 50 persen. Untuk mewujudkan pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan SPAM, (b) pengelolaan SPAM, serta (c) pengawasan kualitas air minum.
		(11) Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD dan meningkatkan keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD, di antaranya tergambar pada (a) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik menjadi 211 kabupaten/kota, (b) meningkatnya kapasitas IPAL yang terbangun melalui pembangunan sambungan rumah menjadi 684.782 sambungan rumah, (c) meningkatnya rumah tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala mencapai 11 persen, (d) meningkatnya persentase kabupaten/kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL, (e) berkurangnya *idle capacity* IPLT menjadi 70 persen, (f) berkurangnya *idle capacity* IPAL menjadi 64 persen, dan (g) meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan LLTT menjadi 21 kabupaten/kota. Untuk mewujudkan penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS dapat dilaksanakan melalui (a) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; (b) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; (c) peningkatan, optimalisasi, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik; (d) pemantauan dan inspeksi kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik; dan (e) pengembangan manajemen layanan sanitasi (air limbah domestik).
		(12) Peningkatan penyediaan energi sebagai upaya meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi, meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi, meningkatnya pasokan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri; diantaranya tergambar pada (a) jumlah *lifting* minyak bumi menjadi 605 ribu Barrel of Oil Per Day, (b) jumlah *lifting* gas bumi menjadi 1.005 ribu Barrel Oil Equivalent Per Day, (c) jumlah produksi batu bara menjadi 717 juta ton, dan (d) realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri menjadi 100 persen. Untuk mewujudkan peningkatan penyediaan energi dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan cadangan dan produktivitas energi, dan (b) pemenuhan kebutuhan dalam

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		negeri.
		(13) Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi sebagai upaya meningkatnya akses terhadap gas bumi, meningkatnya akses terhadap bahan bakar minyak, meningkatnya akses terhadap listrik dan meningkatnya keterjangkauan energi, di antaranya tergambar pada (a) jumlah sambungan rumah jaringan gas kota yang dibangun melalui skema BUMN menjadi 100.000 sambungan rumah (kumulatif), (b) jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi menjadi 22.550 kilometer, (c) jumlah volume penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi menjadi 19,41 juta kiloliter, (d) jumlah volume penyaluran bahan bakar minyak nonsubsidi menjadi 35,16 juta kiloliter, (e) jumlah pelanggan listrik (kumulatif) menjadi 95.256 ribu pelanggan, (f) deviasi harga jual eceran bahan bakar minyak menjadi 0 persen, (g) disparitas harga jual eceran BBM Solar (jenis BBM tertentu) menjadi 49 persen, dan (h) disparitas harga jual eceran bensin (jenis BBM khusus penugasan) menjadi 22 persen. Untuk mewujudkan perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan penyaluran dan layanan gas bumi, (b) peningkatan penyaluran dan layanan bahan bakar minyak, (c) peningkatan penyaluran dan layanan listrik, serta (d) pengawasan dan penyaluran energi yang disubsidi.
		(14) Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan ditujukan untuk mendorong transisi dari energi fosil ke energi bersih melalui pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi. Sasaran yang akan dicapai mencakup peningkatan (a) konsumsi biofuel menjadi 13,50 juta kiloliter, (b) produksi listrik energi terbarukan menjadi 50.739 Gigawatt *hour*, dan (c) penurunan intensitas energi final menjadi 0,97 setara barrel minyak/miliar rupiah. Untuk mewujudkan penguatan implementasi transisi energi berkeadilan dapat dilaksanakan melalui (a) diversifikasi menuju energi bersih, (b) peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan, (c) pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, (d) perluasan pemanfaatan biofuel, dan (e) peningkatan efisiensi dan konservasi energi.
		(15) Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut; diantaranya tergambar pada (a) volume produksi garam menjadi 2,25 juta ton, (b) produktivitas lahan garam rakyat menjadi 83 ton/hektare, (c) utilisasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		industri pengolahan garam industri menjadi 52,50 persen, (d) utilisasi industri pengolahan hasil laut menjadi 45 persen, dan (e) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi garam menjadi 7,37 triliun rupiah. Untuk mewujudkan pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan garam industri terintegrasi, (b) penguatan sarana dan prasarana industri garam, (c) pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan.
		(16) Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan data kualitas air sungai dan danau, meningkatkan kualitas air permukaan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran air di sektor industri; diantaranya tergambar pada (a) ketersediaan status mutu daerah aliran sungai dan danau menjadi 190 data, (b) jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu menjadi 5 lokasi, (c) jumlah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan skor indeks risiko lingkungan hidup sektor air menjadi 5 kabupaten/kota, dan (d) jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu menjadi 2.940 industri. untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau dapat dilaksanakan melalui (a) pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air sungai dan danau, (b) peningkatan kualitas air melalui pengelolaan air limbah, (c) peningkatan sarana prasarana pengujian kualitas air, dan (d) pengendalian pencemaran air di sektor industri.
		(17) Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu sebagai upaya untuk mendukung penurunan sampah residu yang masuk di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu, diantaranya tergambar pada (a) timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah sebesar 24 persen (termasuk 16 persen terdaur ulang), (b) tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu yang dioperasikan secara *sanitary landfill*/tingkat pengontrolan penuh, (c) volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut sebesar 18 ton. Untuk mewujudkan peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di tempat pemrosesan akhir/lahan urug residu dapat dilaksanakan melalui (a) penyediaan dan optimalisasi fasilitas pengolahan sampah, (b) pembinaan dan pengawasan teknis pengumpulan dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pengangkutan sampah, (c) pembinaan dan pengawasan tempat pemrosesan akhir *sanitary landfill*, (d) pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan (e) penanganan sampah dari badan air.
		(18) Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan sebagai upaya untuk meningkatkan sampah yang dikelola dan meningkatkan jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total berbasis masyarakat), diantaranya tergambar pada (a) persentase sampah yang dikelola menjadi 51,21 persen, dan (b) jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 sanitasi total berbasis masyarakat) menjadi 30 kabupaten/kota. Untuk mewujudkan perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan kebijakan, pendanaan, dan kelembagaan pengelolaan sampah; (b) pengembangan data dan sistem informasi persampahan; (c) pembinaan dan pengawasan sistem pengelolaan sampah; (d) pengembangan inovasi dan standardisasi teknologi tepat guna pengelolaan sampah; dan (e) perubahan perilaku untuk pemilahan sampah.
		(19) Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest* sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*, yang tergambar pada persentase perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri menjadi 100 persen. untuk mewujudkan transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest* dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan alpalhankam *spend to invest* matra darat, (b) pengembangan alpalhankam *spend to invest* matra laut, dan (c) pengembangan alpalhankam *spend to invest* matra udara.
		(20) Penguatan faktor pendukung ekonomi digital sebagai upaya meningkatkan pengembangan ekonomi digital dalam mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto, yang tergambar pada (a) proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer 83 persen, (b) peningkatan tenaga kerja sektor teknologi informasi dan komputer (kumulatif) 3,21 persen. Untuk mewujudkan penguatan faktor pendukung ekonomi digital dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan sumber daya manusia digital dan digitalisasi masyarakat; (b) penguatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		infrastruktur dan pelindungan keamanan data; (c) riset dan pengembangan ekosistem ekonomi digital; dan (d) pengembangan regulasi, pendanaan, dan iklim bisnis.
		(21) Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya sebagai upaya meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital, di antaranya tergambar pada (a) indeks transformasi digital nasional pilar bisnis menjadi 40,215; (b) tingkat kesuksesan startup digital nasional *(success rate startup digital)* menjadi 6 persen; (c) jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 menjadi 87 perusahaan; dan (d) kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB menjadi 4,3 persen. Untuk mewujudkan penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan industri dan perangkat digital, (b) penguatan pengembangan ekonomi digital usaha mikro, kecil, dan menengah, (c) pengembangan digitalisasi perdagangan, (d) pengembangan keuangan dan perbankan digital, (e) pengembangan digitalisasi pertanian dan perikanan, (f) pengembangan media digital, (g) pengembangan digitalisasi transportasi dan pariwisata, (h) pelayanan kesehatan digital, (i) pengembangan digitalisasi pendidikan, (j) percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, serta (k) pengembangan digitalisasi sektor energi dan lingkungan.
		(22) Pengelolaan susut dan sisa pangan sebagai upaya mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan serta mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali, di antaranya tergambar pada (a) persentase penurunan susut pangan menjadi 3-5 persen, dan (b) persentase pangan yang terselamatkan menjadi 3-5 persen. Untuk mewujudkan pengelolaan susut dan sisa pangan dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan kebijakan dan standar susut dan sisa pangan; (b) peningkatan infrastruktur dan sarana pangan pertanian, perikanan, dan peternakan; dan (c) peningkatan sarana, prasarana, dan kerja sama penyelamatan pangan.
		(23) Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik sebagai upaya meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan dan meningkatnya pengelolaan keamanan hayati (*biosafety* dan *biosecurity*), di

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		antaranya tergambar pada (a) jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi menjadi 15 produk (kumulatif), (b) jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi menjadi 50 produk, dan (c) jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati (*biosafety* dan *biosecurity*) menjadi 44 rekomendasi kebijakan (kumulatif). Untuk mewujudkan peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan bioprospeksi, bioteknologi, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik; dan (b) pengelolaan keamanan hayati (*biosafety and biosecurity*). (24) Peningkatan kualitas ekosistem gambut dilakukan melalui optimalisasi ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut serta pemulihan lahan gambut untuk mendukung pembangunan rendah karbon, di antaranya tergambar pada (a) Indeks Kualitas Ekosistem Gambut menjadi 64,15 dan (b) jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut menjadi 245 industri. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas ekosistem gambut dapat dilaksanakan melalui (a) pengelolaan data dan informasi ekosistem gambut dan (b) pemulihan ekosistem gambut mencakup pembangunan infrastruktur pembasahan, rehabilitasi vegetasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (25) Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa merupakan upaya untuk meningkatkan ketahanan kawasan Pantura Jawa terhadap daya rusak air termasuk pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan dengan pengembangan kawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini tergambar pada (a) perlindungan 200 hektare kawasan Pantura Jawa dari risiko daya rusak air, (b) penambahan kapasitas prasarana air baku sebesar 0,2 m3/detik, (c) peningkatan akses air minum jaringan perpipaan menjadi 31,5 persen, dan (d) 32 kabupaten/kota memiliki instalasi pengolahan air limbah domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik. Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa dilaksanakan melalui (a) pengendalian daya rusak air, (b) penyediaan air baku dan air minum, (c) pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, (d) pemantauan penurunan muka tanah, (e) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan (f) pengembangan kawasan.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
57	Perubahan Subbab 3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 80 sampai dengan 82	3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, diperlukan kerangka regulasi sebagai berikut (1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber Penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber didasari oleh salah satu cerminan dinamika ancaman keamanan nasional yaitu peningkatan jumlah serangan siber berbentuk *malware* ke Indonesia. Penggunaan dan pemanfaatan ruang siber di segala aktivitas saat ini dapat berpotensi buruk jika disalahgunakan oleh aktor yang tidak bertanggung jawab. Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber ini akan mengisi kekosongan hukum terhadap kebutuhan pengaturan terkait pembangunan dan penjaminan sistem keamanan dan ketahanan siber di Indonesia yang saat ini masih bersifat sektoral. (2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pangan Nasional merupakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ini diperlukan untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. (3) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Cendrawasih Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. (4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Laut Utara Papua

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Rancangan Peraturan Presiden merupakan amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengintegrasikan tata ruang darat dan laut, serta meningkatkan potensi ekonomi laut yang berada di kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut berkelanjutan, mempermudah investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
		(5) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Selat Sunda Rancangan Perpres ini disusun sebagai payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Selat Sunda untuk mendukung pengembangan ekonomi di kawasan Selat Sunda yang merupakan *hub* konektivitas Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. RTR KSN Selat Sunda juga mengakomodir strategi-strategi pengurangan risiko bencana tinggi, seperti gempa bumi dan tsunami. Rancangan Perpres ini mendukung sasaran pembangunan sebagai alat operasionalisasi RTRWN dan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah, serta sebagai alat koordinasi/sinkronisasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang di kawasan yang memiliki arti strategis dalam perspektif nasional.
		(6) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Nasional Jagoi Babang Rancangan Perpres ini disusun sebagai payung hukum untuk pengaturan pemanfaatan ruang kawasan Jagoi-Babang yang berpotensi sebagai pintu gerbang ekonomi perbatasan Indonesia dan Malaysia dengan tetap mempertimbangkan aspek pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan. Rancangan Perpres ini mendukung sasaran pembangunan dengan mengatur penguatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui pemberian perizinan berusaha yang dilakukan secara terintegrasi menggunakan sistem Online Single Submission (OSS).
		Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru", antara lain: (1) Penataan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan Platform Transformasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Sampah Rumah Tangga (2) Pembentukan kelembagaan operator layanan persampahan yang terpisah dari regulator; dan (3) Penataan dan pengelolaan aset sarana dan prasarana persampahan.
58	Perubahan Subbab 3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 dalam halaman 82 sampai dengan 83	3.3.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3 Untuk mengawal keberhasilan proses pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 3

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan			
1	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	43,0 (2019)	46,5
Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB			
2	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	170,5 (2023)	188,5
3	Aset Perbankan/PDB (%)	57,2 (2023)	66,9
4	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8,0
5	Aset Asuransi/PDB (%)[a]	9,0 (2023)	9,1
6	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	55,9 (2023)	57,8
7	Total Kredit/PDB (%)	33,9 (2023)	37,8
8	Inklusi Keuangan (%)	88,7 (2023)	91,0
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
9	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	24,50	35,00
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	0,97	1,10
11	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,06	3,10
12	Rasio Kewirausahaan (%)	3,08	3,10
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
13	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,2–4,3
14	Devisa Pariwisata (Miliar USD)	16,71	17,1–18,3
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
15	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77 (2023)	7,3–7,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah).
Keterangan: a) Komponen perhitungan aset asuransi sudah mencakup asuransi sosial dan asuransi wajib.

59	Perubahan Subbab 3.3.2 Arah Kebijakan dalam	3.3.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 3, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	halaman 83 sampai dengan 84	(1) Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dilaksanakan melalui (a) pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda, serta (b) peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik. (2) Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB, dilaksanakan melalui pendalaman sektor keuangan. (3) Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas, dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi. (4) Meningkatnya nilai tambah pariwisata, dilaksanakan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (5) Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif, dilaksanakan melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
60	Perubahan Subbab 3.3.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 84 sampai dengan 91	3.3.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. (1) Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital sebagai upaya mendukung meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital di antaranya tergambar pada (a) Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat menjadi 52,065; (b) Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah menjadi 53,67; (c) kapasitas pusat data per kapita menjadi 0,85 watt per kapita; dan (d) Indeks Ruang Digital Kondusif menjadi 3. Untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan ekosistem digital dapat dilaksanakan melalui (a) peningkatan infrastruktur pendukung layanan publik digital; (b) peningkatan layanan masyarakat dan pemanfaatan ruang digital; (c) pengembangan regulasi, kelembagaan, tata kelola, dan pendanaan; (d) riset dan pengembangan ekosistem digital; (e) pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *superplatform*; serta (f) pengembangan dan pemanfaatan *emerging technology*. (2) Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya sebagai upaya mendukung peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal dan merata, serta peningkatan pemanfaatan tenaga listrik. Hal ini di antaranya tergambar pada (a) panjang jaringan transmisi tenaga listrik bertambah 2.152 kilometer sirkuit; (b)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		kapasitas gardu induk bertambah 1.510 Mega Volt Ampere; (c) panjang jaringan distribusi tenaga listrik bertambah 11.714 kilometer sirkuit; (d) kapasitas gardu distribusi bertambah 1.949 Mega Volt Ampere; (e) rasio elektrifikasi nasional menjadi 99,85 persen; (f) SAIDI/SAIFI Nasional menjadi 5,38 jam/ pelanggan/tahun/4,07 kali/pelanggan/tahun; serta (g) susut jaringan menjadi 8,72 persen. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya dapat dilaksanakan melalui (a) pembangunan jaringan transmisi dan interkoneksi dalam dan antar pulau *(super grid)*, (b) pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan, dan (c) digitalisasi infrastruktur ketenagalistrikan. (3) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan diantaranya tergambar pada (a) PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi Rp22,02 triliun; (b) pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi Rp23,67 triliun; (c) devisa pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi US$718,37 juta; (d) tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi 3.280.514 orang (Jawa Tengah) dan 454.432 orang (Daerah Istimewa Yogyakarta); (e) investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan menjadi Rp1,19 triliun. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan diwujudkan melalui (a) aksesibilitas pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (b) pengembangan atraksi berbasis pelestarian kearifan budaya Jawa dan ziarah, termasuk *event* berkualitas dan warisan geologi, di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (c) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (d) pengembangan keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (e) pemasaran pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; (f) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan; serta (g) keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. (4) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Lombok-Gili Tramena sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok-Gili Tramena diantaranya tergambar pada (a) PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lombok-Gili Tramena menjadi Rp2,43 triliun; (b) pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena menjadi Rp14,85 triliun; (c) devisa pariwisata Lombok-Gili Tramena menjadi US$800,60 juta; (d) tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena menjadi 544.460 orang; serta (e) investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena menjadi Rp5,598 triliun. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena diwujudkan melalui (a) aksesibilitas pariwisata Lombok-Gili Tramena; (b) pengembangan atraksi termasuk *event* berkualitas dan warisan geologi Lombok-Gili Tramena; (c) pembangunan sarana prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Lombok-Gili Tramena; (d) pengembangan keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata Lombok-Gili Tramena; (e) pemasaran pariwisata Lombok-Gili Tramena; (f) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena; (g) keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Lombok-Gili Tramena, serta (h) fasilitasi kawasan ekonomi khusus. (5) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba diantaranya tergambar pada (a) PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Danau Toba menjadi Rp2,418 triliun; (b) pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba menjadi Rp2,05 triliun; (c) devisa pariwisata Danau Toba menjadi US$ 163,91 juta; (d) tenaga kerja pariwisata Danau Toba menjadi 1.199.556 orang; serta (e) investasi sektor pariwisata Danau Toba menjadi Rp513,03 miliar. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba diwujudkan melalui (a) aksesibilitas pariwisata Danau Toba; (b) pengembangan atraksi termasuk *event* berkualitas dan warisan geologi Danau Toba; (c) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang pariwisata Danau Toba; (d) pengembangan keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata Danau Toba; (e) pemasaran pariwisata Danau Toba; (f) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Danau Toba; serta (g) keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Danau Toba.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(6) Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo sebagai upaya mendukung meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo diantaranya tergambar pada (a) PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Labuan Bajo menjadi Rp42,889 miliar; (b) pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo menjadi Rp1,175 triliun; (c) devisa pariwisata Labuan Bajo menjadi US$ 283,52 juta; (d) tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo menjadi 304.910 orang; serta (e) investasi sektor pariwisata Labuan Bajo menjadi Rp663,82 miliar. Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo diwujudkan melalui (a) aksesibilitas pariwisata Labuan Bajo; (b) pengembangan atraksi termasuk *event* berkualitas dan warisan geologi Labuan Bajo; (c) pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata Labuan Bajo; (d) pengembangan keterampilan sumber daya manusia dan layanan pariwisata Labuan Bajo; (e) pemasaran pariwisata Labuan Bajo; (f) pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Labuan Bajo; serta (g) keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Labuan Bajo.
		(7) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim sebagai upaya mendukung meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim diantaranya tergambar pada (a) pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim menjadi 6,7–7,0 persen; (b) pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim menjadi 6,0–10,0 persen; serta (c) jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim menjadi 187 ribu orang. Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim diwujudkan melalui (a) pengembangan riset dan inovasi subsektor aplikasi dan gim, (b) pengembangan pendidikan subsektor aplikasi dan gim, (c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan subsektor aplikasi dan gim, (d) penyediaan infrastruktur subsektor aplikasi dan gim, (e) pengembangan sistem pemasaran subsektor aplikasi dan gim, serta (f) pengembangan insentif subsektor aplikasi dan gim. Pelaksanaan strategi tersebut difokuskan pada provinsi prioritas yang meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Aceh, Maluku, dan Papua.
		(8) Pengembangan Koperasi Sektor Produksi sebagai upaya mendukung meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi tergambar pada proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		total volume usaha koperasi menjadi 8,35 persen. Pengembangan Koperasi Sektor Produksi diwujudkan melalui (a) pengembangan usaha koperasi, (b) peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi, serta (c) penguatan kapasitas sumber daya manusia dan reputasi koperasi; serta (d) penguatan sistem pengawasan koperasi. Pelaksanaan strategi tersebut juga ditujukan untuk pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mendukung upaya pemerataan ekonomi di desa serta mewujudkan swasembada pangan.
61	Perubahan Subbab 3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 91	3.3.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kerangka kelembagaan sebagai pendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional 3 "Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi", antara lain: (1) Penguatan Badan Pengelola (Badan Otorita Pariwisata) di Destinasi Pariwisata Prioritas; (2) Penguatan Tata Kelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup dalam rangka mengelola Dana Pariwisata Berkualitas/Indonesia *Quality Tourism Fund*; dan (3) Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi.
62	Perubahan Subbab 3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 dalam halaman 92 sampai dengan 93	3.4.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4 Untuk mengawal keberhasilan proses pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Tabel 3.4
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 4

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22[1]	9,33
2	Harapan lama sekolah (tahun)	13,21[1]	13,32
3	Rata-rata nilai PISA		
	(a) Membaca	359 (2022)[2]	396
	(b) Matematika	366 (2022)[2]	404
	(c) Sains	383 (2022)[2]	416
4	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:		
	(a) Literasi Membaca	63,06	64,89
	(b) Numerasi	55,92	57,36
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)[c]	31,45 (2023)[2]	33,94
6	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	10,15 (2023)	11,11
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,30 (2023)[2]	66,78
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			
8	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72,13 (2023)[2]	74,43
9	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	2,11[4]	2,11
10	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)[c]	189 (2020)[2]	122
11	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)[c]	21,50 (2023)[3]	18,8
12	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)[c]	387 (2023)[3]	329
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)[c]	98,42[7]	98,6
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif			
14	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89
15	Indeks Perlindungan Anak[a]	68,29 (2023)	70,19
16	Indeks Pembangunan Pemuda[3]	60,59 (2023)	65,16
17	Indeks Ketimpangan Gender	0,447 (2023)[2]	0,430
18	Indeks Pembangunan Gender	91,85 (2023)[2]	92,02–92,11
19	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	92,94 (2023)	94
20	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	68,42 (2023)	69
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja			
21	Peringkat Indeks Inovasi Global	54	53
22	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50–5,00
23	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)[c]	0,28 (2020)	0,30
24	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)[c]	56,42	56,30 – 58,80

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
25	Peringkat pada *SEA Games*	3 (2023)	2 – 4
26	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	9,04[1]	10,36–11,45[1]

Keterangan: a) merupakan indeks dengan pembaruan indikator penyusun, b) merupakan indeks dengan pembaharuan konsep dan indikator penyusun dan c) merupakan 45 indikator utama pembangunan dalam RPJPN yang bukan di level Prioritas Nasional 1) Susenas, BPS; 2) BPS; 3) OECD; 4) BKKBN; 5) Kemenkes; 6) WHO; 7) DJSN

63 Perubahan Subbab 3.4.2 Arah Kebijakan dalam halaman 93 sampai dengan 94

3.4.2 Arah Kebijakan

Pembangunan dan pembentukan modal manusia bertujuan untuk memastikan setiap individu, terlepas dari karakteristik dan latar belakangnya, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi di setiap tahapan siklus kehidupan, dengan dukungan dari keluarga yang berkualitas dan masyarakat yang kondusif. Tujuan ini dapat terwujud apabila setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk menikmati manfaat pembangunan, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata akan dicapai melalui (a) percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; (c) pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas; (d) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (e) penguatan sistem tata kelola pendidikan; (f) penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan bidang *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic* (STEAM); serta (g) penguatan budaya literasi untuk kreativitas dan inovasi;

(2) Terwujudnya kesehatan untuk semua akan dicapai melalui (a) peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat untuk seluruh siklus kehidupan; (b) pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi; (c) pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat termasuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya upaya kesehatan jiwa, pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan antara lain produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula dan lemak, penguatan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), serta penyehatan lingkungan; (d) penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; dan (e) penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola; (3) Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif akan dicapai melalui (a) peningkatan ketangguhan keluarga; (b) peningkatan kualitas perlindungan anak; (c) peningkatan kualitas pemuda; (d) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan; serta (e) peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia; (4) Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja akan dicapai melalui (a) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, (b) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, dan (c) pengembangan manajemen talenta nasional (MTN); (5) Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat akan dicapai melalui (a) peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan (b) pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif.
64	Perubahan Subbab 3.4.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 94 sampai dengan 119	3.4.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 4, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut: (1) Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai upaya mendukung tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan prasekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak, yang ditunjukkan pada Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD menjadi 36,61 persen. Untuk mewujudkan perluasan layanan pendidikan anak usia dini, dilaksanakan melalui (a) penyediaan bantuan operasional satuan PAUD, dan (b) penyediaan bantuan afirmatif untuk PAUD. (2) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas sebagai upaya mendukung tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas, di antaranya ditunjukkan pada (a) persentase satuan pendidikan formal

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dan nonformal yang memenuhi standar nasional pendidikan sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif menjadi 31,14 persen; dan (b) persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi standar nasional pendidikan sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif menjadi 46,08 persen. Untuk mewujudkan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, dilaksanakan melalui (a) revitalisasi prasarana pendidikan dan pembangunan satuan pendidikan baru serta (b) revitalisasi sarana pendidikan. (3) Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah sebagai upaya mendukung tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di antaranya ditunjukkan pada (a) jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal menjadi 496.810 anak, dan (b) jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren menjadi 261.297 anak. Upaya pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah, dilaksanakan melalui (a) pembinaan dalam pencegahan anak tidak sekolah, dan (b) penanganan anak tidak sekolah. (4) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul sebagai upaya meningkatkan daya saing di tingkat global yang ditunjukkan pada (a) pembangunan 4 sekolah unggul, dan (b) pembinaan 12 sekolah unggul transformasi. Untuk mewujudkan pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, dilaksanakan melalui (a) pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, serta (b) pembinaan sekolah unggul transformasi. (5) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (misalnya pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja sebagai upaya mendukung terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran di antaranya ditunjukkan pada (a) peningkatan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik menjadi 40,22 persen; dan (b) peningkatan provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik menjadi 80,85 persen. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru dilaksanakan melalui (a) pemenuhan dan pendistribusian pendidik dan tenaga

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		kependidikan, (b) pemenuhan kesejahteraan afirmatif pendidik dan tenaga kependidikan dalam memenuhi kekurangan guru, (c) perencanaan dan kebijakan penyediaan guru aparatur sipil negara, (d) peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (e) peningkatan kesejahteraan guru agama berbasis kinerja, (f) peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan berbasis kinerja, serta (g) pendampingan pembelajaran untuk pendidik dan tenaga kependidikan. (6) Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi sebagai upaya meningkatkan relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi di antaranya tergambar pada (a) rasio APK Pendidikan Tinggi berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya) menjadi 0,46; (b) jumlah provinsi dengan APK Pendidikan Tinggi di atas 31% menjadi 23 provinsi; (c) rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan menjadi 12,5 bulan; (d) rasio *outbound* per *inbound* mahasiswa menjadi 7,20 persen; serta (e) persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi menjadi 32,99 persen. Upaya mewujudkan peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi, dilaksanakan melalui (a) penyaluran bantuan pembiayaan pendidikan tinggi yang tepat sasaran; (b) pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi berbasis teknologi; (c) inovasi dan perluasan layanan pendidikan tinggi; (d) penguatan kurikulum dan pembelajaran pendidikan tinggi; serta (e) pendidikan karakter, peningkatan kemampuan interpersonal, dan mobilitas akademik mahasiswa. (7) Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi memiliki tujuan di antaranya untuk meningkatkan peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi di Perguruan Tinggi yang tergambar pada (a) jumlah lembaga pengelola penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat prioritas yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 lembaga; meningkatnya peran Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi yang tergambar pada (a) jumlah desain BRIDA/ekosistem daerah yang optimal sebanyak 2 lembaga di Provinsi DK Jakarta dan Kota Depok sebagai *pilot project*; serta meningkatnya peran *Science Techno Park* (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi di antaranya tergambar pada (a) jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 5 lembaga, (b) jumlah penerimaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		STP berbasis iptek dan inovasi menjadi 50 milyar rupiah, (c) jumlah startup binaan yang produktif sebanyak 2 startup. Untuk mewujudkan peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi, maka langkah-langkah yang dilakukan meliputi (a) pengembangan kapasitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) pengabdian masyarakat berbasis pemanfaatan iptek dan inovasi, (c) pengembangan layanan dan fasilitasi BRIDA/ekosistem daerah, (d) pengembangan *hub* inovasi sektoral dan tematik, (e) pengembangan kapasitas *Science Techno Park* (STP), serta (f) *Start up* yang mendapatkan fasilitasi inkubasi.
		(8) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional seni budaya sebagai upaya meningkatkan rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non-ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia di antaranya ditunjukkan pada (a) peningkatan keterlibatan jumlah talenta seni budaya dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional menjadi 111 talenta seni budaya; (b) peningkatan penyelenggaraan jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional menjadi 7 festival dan pameran seni budaya; serta (c) persentase lembaga, sanggar, dan komunitas untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan menjadi 32,76 persen. Untuk mewujudkan pengembangan Manajemen Talenta Nasional seni budaya, dilaksanakan melalui (a) pembinaan talenta seni budaya, (b) penyelenggaraan ajang seni dan festival seni budaya, serta (c) pemberian penghargaan untuk talenta seni budaya.
		(9) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional riset dan inovasi sebagai upaya mendukung terciptanya sumber daya manusia iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional di antaranya tergambar pada (a) rasio sumber daya manusia iptek per satu juta penduduk menjadi 1.265 sumber daya manusia iptek/1 juta penduduk, (b) jumlah sumber daya manusia iptek masuk ke dalam pemeringkatan *world's top 2% scientists* menjadi 99 orang, serta (c) raihan olimpiade sains dan teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa menjadi 144 peraih. Untuk mewujudkan pengembangan Manajemen Talenta Nasional Riset dan Inovasi, dapat dilaksanakan melalui (a) memperluas kumpulan bakat (*talent pool*) dan akuisisi talenta riset dan inovasi, (b) memperkuat pembinaan serta fasilitasi talenta riset dan inovasi, (c) meningkatkan sarana

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		prasarana esensial manajemen talenta, (d) meningkatkan sinergi pendanaan dan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, serta (e) meningkatkan apresiasi talenta riset dan inovasi.
		(10) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional olahraga sebagai upaya mendukung terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global, di antaranya tergambar pada (a) provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandardisasi menjadi 18 provinsi, (b) kabupaten/kota dengan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar yang terbentuk menjadi 29 kabupaten/kota, (c) persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah menjadi 15 persen, (d) persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat menjadi 15 persen, (e) jumlah perolehan medali pada *Asian Youth Games* menjadi 1-2 medali, serta (f) jumlah perolehan medali pada *Asian Youth Para Games* menjadi 12-15 medali. Untuk mewujudkan pengembangan Manajemen Talenta Nasional olahraga, dilaksanakan melalui (a) pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, serta (b) pengembangan tata kelola Manajemen Talenta Nasional olahraga.
		(11) Penurunan kematian ibu dan anak sebagai upaya mendukung meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar di antaranya tergambar pada (a) persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi 88 persen, (b) persentase kabupaten/kota dengan Rumah Sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif sesuai standar menjadi 25 persen, (c) persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar sesuai standar menjadi 20 persen, (d) persentase kabupaten/kota dengan *case fatality rate direct obstetric* (eklampsi dan pendarahan postpartum) <1 persen menjadi 25 persen, (e) persentase antenatal care 6 kali (K6) menjadi 80 persen, (f) cakupan antenatal care sesuai standar (12T) menjadi 63 persen, (g) persentase anemia pada ibu hamil menjadi 26 persen, (h) persentase calon pengantin yang mendapat skrining kesehatan menjadi 50 persen, (i) angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* 15-19 menjadi 18 persen, (j) cakupan kunjungan nifas lengkap sesuai standar menjadi 35 persen, (k) persentase Keluarga

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Berencana pasca persalinan menjadi 57 persen, (l) angka kematian neonatal menjadi 9,2 per 1.000 kelahiran hidup, (m) angka kematian bayi menjadi 12,62 per 1.000 kelahiran hidup, (n) cakupan kunjungan neonatal lengkap sesuai standar menjadi 91 persen, serta (o) cakupan imunisasi bayi lengkap menjadi 80 persen. Untuk mewujudkan penurunan kematian ibu dan anak, dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, (b) penguatan pelayanan promotif dan preventif ibu dan anak, serta (c) penguatan tata kelola penurunan kematian ibu dan anak. (12) Pencegahan dan penurunan *stunting* yang berfokus pada mencegah kasus baru, melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan oleh kelompok sasaran, di antaranya tergambar pada (a) prevalensi *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita menjadi 8 persen, (b) persentase bayi lahir *premature* (<37 minggu) menjadi 11 persen, (c) persentase ibu hamil kurang energi kronis menjadi 15 persen, (d) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu eksklusif menjadi 73 persen, (e) persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan air susu ibu eksklusif menjadi 61 persen, (f) persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping air susu ibu menjadi 73 persen, (g) persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan menjadi 50 persen, serta (h) persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1.000 hari pertama kehidupan menjadi 75 persen. Untuk mewujudkan pencegahan dan penurunan *stunting*, dilaksanakan melalui (a) penguatan intervensi spesifik *stunting*, dan (b) penguatan intervensi sensitif *stunting*. (13) Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya mendukung deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit bagi masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia, di antaranya tergambar pada (a) persentase kabupaten/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80 persen menjadi 40 persen, (b) persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir menjadi 65 persen, (c) persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah menjadi 50 persen, (d) persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja menjadi 20 persen, (e) persentase penduduk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa menjadi 35 persen, serta (f) persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia menjadi 50 persen. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis, dilaksanakan melalui (a) skrining kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia; dan (b) penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis.
		(14) Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai upaya mendukung terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi, di antaranya tergambar pada (a) persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 10 persen, (b) persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 11 persen, (c) persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 11 persen, (d) persentase siswa pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/raudhatul athfal/busthanul athfal/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (e) persentase siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (f) persentase siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (g) persentase siswa sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (h) persentase siswa sekolah luar biasa yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 24 persen, (i) persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi menjadi 2 persen, (j) persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik menjadi 50 persen, serta (k) persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik menjadi 50 persen. Untuk mewujudkan pemberian makan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dapat dilakukan melalui (a) penyediaan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; (b) penyediaan makanan bergizi bagi siswa dan santri; serta (c) promosi dan edukasi gizi dan pangan.
		(15) Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi sebagai upaya mendukung terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi, di antaranya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		tergambar pada (a) sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional terdiri dari 1 sistem, (b) jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar mencapai 5.000 unit, serta (c) persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan mencapai 100 persen. Untuk mewujudkan penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi, dapat dilakukan melalui (a) pengembangan sistem dan tata kelola pelayanan makanan bergizi, (b) pengembangan sarana dan prasarana pelayanan makanan bergizi, serta (c) penguatan intervensi pendukung pemberian makan bergizi. (16) Penuntasan TBC sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran pengendalian penyakit TBC, di antaranya tergambar pada (a) cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC) mencapai 90 persen, (b) angka keberhasilan pengobatan TBC (TB *Succes Rate*) mencapai 90 persen, (c) cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah mencapai 72 persen, serta (d) pasien TBC yang memulai Pengobatan (*Enrollment rate* TBC) mencapai 95 persen. Untuk mewujudkan penuntasan TBC, dilakukan melalui (a) peningkatan upaya pencegahan TBC, (b) intensifikasi penemuan kasus, serta (c) pengobatan TBC. (17) Eliminasi penyakit kusta & schistosomiasis sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pengendalian kedua penyakit tersebut, di antaranya tergambar pada (a) proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas mencapai 86 persen, (b) penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu mencapai 90 persen, (c) proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru mencapai <5 persen, serta (d) cakupan pemberian obat pencegahan massal untuk *schistosomiasis* mencapai 87,2 persen. Untuk mewujudkan eliminasi penyakit kusta & *schistosomiasis*, dapat dilakukan melalui (a) pengendalian penyakit kusta, dan (b) pengendalian penyakit schistosomiasis, yang berfokus pada upaya pencegahan, penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan. (18) Investasi pelayanan kesehatan primer sebagai upaya mendukung meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer di setiap jenjang hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat termasuk peran kader kesehatan, di antaranya tergambar pada (a) persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar menjadi 30 persen, (b)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		persentase kabupaten/kota dengan minimal 75 persen posyandu siklus hidup yang aktif menjadi 25 persen, (c) persentase puskesmas yang mencapai target Indikator Nasional Mutu menjadi 10 persen, (d) persentase puskesmas memiliki sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar menjadi 40 persen, (e) persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi 50 persen, serta (f) persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas menjadi 35 persen. Untuk mewujudkan investasi pelayanan kesehatan primer, dilaksanakan melalui (a) peningkatan kapasitas dan peran puskesmas, (b) pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, serta (c) pengembangan layanan kesehatan primer yang inklusif. (19) Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia termasuk mengembangkan pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak, di antaranya tergambar pada (a) persentase provinsi dengan rumah sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, ginjal sesuai standar menjadi 40 persen; (b) persentase kabupaten/kota dengan rumah sakit yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, ginjal sesuai standar menjadi 20 persen; (c) persentase rumah sakit yang mencapai target Indikator Nasional Mutu menjadi 8 persen; (d) kabupaten/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani rumah sakit kapal sesuai standar menjadi 27 kabupaten/kota; (e) jumlah kabupaten/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas menjadi 75 kabupaten/kota; (f) persentase rumah sakit pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar menjadi 45 persen; (g) kabupaten/kota dengan rumah sakit umum daerah tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C menjadi 22 kabupaten/kota; serta (h) jumlah rumah sakit pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian menjadi 5 rumah sakit. Untuk mewujudkan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		sulit akses, dilaksanakan melalui (a) peningkatan kualitas pelayanan rujukan, (b) pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, serta (c) penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan di daerah sulit akses. (20) Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan sebagai upaya mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia penyediaan, pemenuhan, dan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, di antaranya tergambar pada (a) jumlah kabupaten/kota dengan sumber daya manusia kesehatan puskesmas sesuai standar menjadi 19 kabupaten/kota, (b) jumlah kabupaten/kota dengan jenis dokter spesialis pada rumah sakit sesuai standar menjadi 270 kabupaten/kota, (c) rasio dokter spesialis menjadi 0,19 per 1.000 penduduk, (d) persentase sumber daya manusia kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan menjadi 15 persen, serta (e) persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul menjadi 14,82 persen. Untuk mewujudkan produksi dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, akan dilaksanakan melalui (a) peningkatan produksi sumber daya manusia kesehatan, (b) peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan, serta (c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan.
65	Perubahan Subbab 3.4.4 Kerangka Regulasi dalam halaman 120 sampai dengan 121	3.4.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas" sebagai berikut: (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021. Rencana Aksi menurut Perpres tersebut perlu diperbarui dan membutuhkan formulasi kebijakan baru yang mempertimbangkan dinamika implementasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah. Selain itu,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		berdasarkan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat ketidakselarasan antara capaian Kabupaten/Kota Layak Anak dan capaian Indeks Perlindungan Anak yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam indikator pembentuk keduanya. Untuk itu perlu adanya perubahan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Layak Anak sehingga penyesuaian peraturan turunan lainnya dapat merujuk pada Rancangan Peraturan Presiden tersebut. Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung Program Prioritas Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak, dengan Kegiatan Prioritas Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak, serta dengan indikator kegiatan prioritas terkait Jumlah kabupaten/kota dengan peringkat dalam Kabupaten/Kota Layak Anak.
66	Perubahan Subbab 3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 dalam halaman 121	3.5.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5 Untuk mengawal keberhasilan pembangunan hilirisasi dan industri berbasis sumber daya alam dalam meningkatkan nilai tambah dalam negeri, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 3.5 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 5

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan			
1	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,98	20,80
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
2	Biaya Logistik (% PDB)	14,29 (2022)	13,52
3	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3 (2023)	29,4
4	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7 (2023)	21,7

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

67	Perubahan Subbab 3.5.2 Arah Kebijakan dalam halaman 121 sampai dengan 122	3.5.2 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 5, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan yang dilaksanakan melalui (a) pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor dan (b) pengembangan aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. (2) Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang dilaksanakan melalui (a) optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional; (b) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; (c) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global; serta (d) optimalisasi investasi strategis Danantara.
68	Perubahan Subbab 3.5.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 122 sampai dengan 132	3.5.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 5, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut: (1) Pengembangan hilirisasi nikel dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi industri olahan nikel menjadi 33,64 juta ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi nikel menjadi sebesar 44,10 triliun rupiah. Dalam rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel dapat dilaksanakan melalui, (i) pengembangan industri *stainless steel*; (ii) pengembangan industri *nickel sulfate*, katoda, dan *battery precursor* berbasis nikel; (iii) pengembangan industri *battery pack* berbasis NMC (nikel, mangan, kobalt); (iv) tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi; (v) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri nikel; serta (vi) harmonisasi kebijakan industri nikel. (2) Pengembangan hilirisasi tembaga dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi industri olahan tembaga menjadi 1.195 ribu ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi tembaga menjadi sebesar 45,93 triliun rupiah. Dalam rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga dapat dilaksanakan melalui (i) tata kelola industri tembaga dan ketersediaan bahan baku, (ii) pengembangan industri hilir/antara olahan tembaga, serta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(iii) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri tembaga.
		(3) Pengembangan hilirisasi bauksit dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi industri olahan bauksit menjadi 6,27 juta ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi bauksit menjadi sebesar 11,78 triliun rupiah. Dalam rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit dapat dilaksanakan melalui (i) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri bauksit, (ii) pengembangan industri hilir/antara olahan bauksit, (iii) dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri bauksit, serta (iv) harmonisasi kebijakan industri bauksit.
		(4) Pengembangan hilirisasi timah dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi industri olahan timah menjadi 142,1 ribu ton/tahun, dan (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi timah menjadi sebesar 0,51 triliun rupiah. Dalam rangka terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah dapat dilaksanakan melalui (i) tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah; (ii) peningkatan penerapan standardisasi di industri timah, (iii) peningkatan adopsi teknologi tinggi untuk pengolahan timah, (iv) dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri timah, serta (v) peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk timah di pasar domestik dan global.
		(5) Pengembangan hilirisasi kelapa sawit dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit, di antaranya tergambar pada (a) produksi kelapa sawit menjadi 239.646.870 ton, (b) ragam produk hilir sawit sebanyak 208 produk, (c) produksi bahan baku *crude palm oil* dan *crude palm kernel oil* menjadi 53.021.870 ton, (d) rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku menjadi 92,3 persen, serta (e) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi kelapa sawit menjadi 1,49 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit dapat dilaksanakan melalui (i) peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas bahan baku, (ii) *sustainability* dan *traceability*, (iii) pengembangan industri *biofuel*, (iv) pengembangan industri

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		oleokimia, (v) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri sawit, serta (vi) *rebranding* produk sawit Indonesia yang berkelanjutan.
		(6) Pengembangan hilirisasi kelapa dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa, di antaranya tergambar pada (a) produktivitas kelapa menjadi 1,13 ton/hektare, (b) produksi kelapa menjadi 2.880.690 ton, (c) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi kelapa menjadi 0,39 triliun rupiah, serta (d) utilisasi industri pengolahan kelapa menjadi 55 persen. Dalam rangka mewujudkan peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa dapat dilaksanakan melalui (i) perbaikan data perkelapaan (budi daya dan pengolahan), (ii) peningkatan produksi dan penyebaran benih unggul, (iii) peningkatan produktivitas kelapa, (iv) peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk, (v) peningkatan sentra industri kecil menengah pengolahan kelapa, (vi) peningkatan investasi industri pengolahan kelapa, (vii) integrasi rantai pasok di dalam negeri dan ekspor, serta (viii) peningkatan riset dan inovasi kelapa.
		(7) Pengembangan hilirisasi rumput laut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut, di antaranya tergambar pada (a) volume produksi rumput laut menjadi 11,64 juta ton, (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi rumput laut menjadi 0,51 triliun rupiah, serta (c) utilisasi industri pengolahan rumput laut ditargetkan mencapai 53,76 persen. Dalam rangka mewujudkan peningkatan nilai tambah dan daya saing industri rumput laut akan dilaksanakan dengan (i) peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut (ii) pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut; (iii) penelitian dan pengembangan budidaya rumput laut spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, dan pakan ternak); (vi) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (v) fasilitasi pembiayaan dan investasi.
		(8) Pengembangan industri kimia dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah industri kimia, di antaranya tergambar pada (a) kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batu bara menjadi 60.234,97 ribu ton; (b) pertumbuhan produk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		domestik bruto bahan kimia dan barang dari bahan kimia menjadi 6,08 persen; (c) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi minyak bumi menjadi 34,45 triliun rupiah; serta (d) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi gas bumi menjadi 20,23 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan nilai tambah industri kimia peningkatan nilai tambah industri kimia dilaksanakan melalui (i) megaproyek industri kimia dasar, (ii) revitalisasi industri pupuk untuk mendukung swasembada pangan, (iii) gasifikasi batu bara, (iv) dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri kimia, (v) tata kelola kebijakan pengembangan industri kimia dan bahan galian nonlogam, (vi) peningkatan daya saing sektor industri kimia dan bahan galian nonlogam, serta (vii) pengembangan produk sektor industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam. (9) Pembangunan industri semikonduktor dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan industri semikonduktor, diantaranya tergambar pada (a) pertumbuhan produk domestik bruto industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik menjadi 3,0 persen, dan (b) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi pasir silika menjadi 1,42 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan industri semikonduktor dilaksanakan melalui (i) penyiapan rantai pasok industri semikonduktor, (ii) peningkatan sumber daya manusia industri semikonduktor, serta (iii) riset dan pengembangan semikonduktor. (10) Pengembangan industri dirgantara dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan industri dirgantara, yang tergambar pada utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya menjadi 50 persen. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan industri dirgantara dilaksanakan melalui (i) penguatan industri pesawat terbang, komponen, dan rantai pasok kedirgantaraan; (ii) peningkatan sumber daya manusia, riset dan inovasi kedirgantaraan; (iii) penguatan regulasi dan tata kelola kedirgantaraan; (iv) peningkatan jasa kedirgantaraan; serta (v) pengembangan dan pemanfaatan satelit. (11) Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil, diantaranya tergambar

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pada (a) pertumbuhan produk domestik bruto Industri tekstil dan pakaian jadi menjadi 3,50 persen, (b) produktivitas tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil menjadi 60,34 juta rupiah per orang per tahun, serta (c) penyerapan tenaga kerja industri tekstil dan produk tekstil sebesar 3.918.787 orang. Dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil dilaksanakan melalui (i) penguatan rantai pasok, (ii) penguatan sumber daya manusia dan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif, (iii) penyediaan energi bersih dan terbarukan yang andal dan bersaing, (iv) adopsi teknologi 4.0 dan teknologi rendah emisi, (v) optimalisasi riset dan inovasi, (vi) peningkatan akses terhadap lembaga pembiayaan, (vii) pengembangan *sustainable textile* dan tekstil budaya lokal, (viii) penguatan *branding* produk tekstil dan peningkatan ekspor, (ix) peningkatan pangsa pasar di *e-commerce* dan pemanfaatan pengadaan barang/jasa, serta (x) kebijakan tata niaga impor dan pemberantasan impor ilegal.
		(12) Penguatan industri logam dasar, besi dan baja dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar, besi dan baja, di antaranya tergambar pada (a) pertumbuhan produk domestik bruto industri logam dasar menjadi 9,01 persen; (b) utilisasi industri logam dasar menjadi 59 persen; serta (c) nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi industri logam dasar, besi dan baja menjadi 10,17 triliun rupiah. Dalam mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja dilaksanakan melalui (i) ketersediaan bahan baku industri logam dasar yang berkualitas dan kompetitif, (ii) kepastian pasokan dan harga energi untuk industri logam dasar, (iii) peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri besi-baja, (iv) pengembangan industri *special steel*, (v) penerapan dekarbonisasi industri di industri logam dasar, serta (vi) optimalisasi penerapan standardisasi di industri logam dasar.
		(13) Pengembangan KEK Sei Mangkei dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang tergambar pada nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei menjadi 6,03 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan konektivitas simpul transportasi; (ii) pengembangan sarana prasarana pendukung (energi, perumahan, pengolahan persampahan/limbah, air bersih); (iii) peningkatan investasi kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. (14) Pengembangan KIT Batang dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri Terpadu Batang yang tergambar pada nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di Kawasan Industri Terpadu Batang menjadi 4,14 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri Terpadu Batang dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan konektivitas simpul transportasi, (ii) pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan dan pengolahan persampahan/limbah), (iii) peningkatan investasi kawasan, (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. (15) Pengembangan KI Weda Bay dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri Weda Bay yang tergambar pada nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di Kawasan Industri Weda Bay menjadi 349,49 triliun rupiah. Dalam rangka mewujudkan peningkatan aglomerasi industri di Kawasan Industri Weda Bay dilaksanakan melalui (i) pembangunan/pengembangan infrastruktur jalan/jembatan dan konektivitas simpul transportasi; (ii) pengembangan sarana prasarana pendukung (perumahan, kesehatan, air bersih, dan pengolahan persampahan/limbah); (iii) peningkatan investasi kawasan; (iv) pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok; serta (v) penyediaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
69	Penghapusan Subbab 3.5.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 132 sampai dengan 133	(dihapus)
70	Perubahan Subbab 3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 dalam halaman 133	3.6.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6 Untuk mengawal keberhasilan proses membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.
71	Perubahan Subbab 3.6.2 Arah Kebijakan	3.6.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 6, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 6

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan			
1	Tingkat kemiskinan (%) [a]	8,57	7,0–8,0
2	Tingkat kemiskinan ekstrem (%)	1,47	0[b]
3	Proporsi penduduk kelas menengah (%)	17,13	17,50
4	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)[c][e]	29,77 (semester I)	32,15
5	Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan			
6	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	65,25	67,00
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
7	Persentase desa mandiri (%)[d]	22,85	23,29
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi			
8	Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)	56,56 (2022)	57,29
9	Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)[c]	44,13 (2022)	44,35

Keterangan: a) angka per September 2024; b) target menggunakan US$ 1,90 PPP sedangkan apabila menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5 – 1 persen; c) indikator merupakan 45 indikator RPJPN Tahun 2025–2045, namun tidak menjadi indikator pada level Prioritas Nasional; d) sesuai perhitungan dan proyeksi Indeks Desa 2024; dan e) Asumsi semesta pekerja di tahun 2025 (proyeksi) yang dapat mengikuti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 132,8 juta pekerja. Dalam perhitungan capaian, semesta pekerja berdasarkan data Sakernas bulan Agustus tahun berjalan dan data kepesertaan berbasis NIK.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	dalam halaman 134	(1) Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dilaksanakan melalui (a) pemanfaatan sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); (b) perlindungan sosial adaptif dan inklusif; serta (c) peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif; (2) Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui percepatan penyediaan perumahan dan permukiman; (3) Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan dicapai melalui peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan; (4) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dilaksanakan melalui (a) pembangunan perkotaan berkelanjutan dan (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara.
72	Perubahan Subbab 3.6.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 134 sampai dengan 142	3.6.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. (1) Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi dan terdigitalisasi, di antaranya tergambar pada (a) peningkatan persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial nontunai menjadi 65 persen; (b) persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan menjadi 8 persen; serta (c) jumlah keluarga penerima Kartu Kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera mencapai 400 ribu keluarga pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui Kartu Kesejahteraan tersebut dapat dilaksanakan melalui (a) bantuan keluarga, pendidikan, dan kesehatan; (b) bantuan energi dan pangan; serta (c) penyediaan bantuan dan layanan sosial yang inklusif, termasuk penguatan peran desa dan kolaborasi non pemerintah melalui program Desa Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera, serta pengembangan Sekolah Rakyat sebagai sarana pendidikan afirmatif. (2) Peningkatan daya saing melalui Kartu Usaha Produktif dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah yang tergambarkan pada peningkatan proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap mencapai 4,1 persen. Dalam rangka mewujudkan peningkatan daya saing melalui Kartu Usaha Produktif tersebut dapat dilaksanakan melalui (a) penatakelolaan kartu usaha dan (b) peningkatan kapasitas dan daya saing.

(3) Peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif yang tergambarkan melalui jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 1.000.000 jiwa pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif tersebut dapat dilaksanakan melalui (a) penguatan kapasitas kerja dan (b) penguatan kewirausahaan afirmatif.

(4) Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dengan

(a) terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, tergambarkan pada (i) luas area kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun mencapai 800-850 hektar; (ii) persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara mencapai 20 persen; (iii) persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; (iv) cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50 persen; (v) indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan Ibu Kota Nusantara menjadi 0,74. Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan:

(i) perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya;

(ii) pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara;

(iii) pembangunan hunian/rumah tangga layak,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara;

(iv) pembangunan sarana prasarana pendukung Ibu Kota Nusantara; serta

(v) pembangunan aksesibilitas dan konektivitas Ibu Kota Nusantara.

(b) Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, tergambarkan pada (i) jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang; dan (ii) cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara yang mencapai 25 persen. Untuk terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara, dilakukan:

(i) pemindahan ASN/hankam ke Ibu Kota Nusantara; serta

(ii) penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas Ibu Kota Nusantara.

(5) Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum di antaranya tergambarkan pada (a) jumlah unit rumah baru yang terbangun mencapai 476 unit dan (b) jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 38.504 unit. Dalam rangka mewujudkan fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut dapat dilaksanakan melalui (a) fasilitasi pembangunan rumah baru; (b) pengembangan perumahan dan permukiman; (c) fasilitasi peningkatan kualitas rumah; dan (d) penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan pada perumahan tapak.

(6) Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa sebagai upaya mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa. Hal ini tergambar pada (a) rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman menjadi 22 persen; (b) rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman menjadi 6 persen; (c) persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan menjadi 26,12 persen; dan (d) persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni menjadi 24,81 persen. Dalam rangka pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		tersebut dilaksanakan melalui (a) penguatan pembangunan layanan dasar kesehatan desa; (b) peningkatan utilitas dasar desa; dan (c) peningkatan konektivitas desa.
73	Perubahan Subbab 3.6.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 143	3.6.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 6 "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan" sebagai berikut: (1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan lintas wilayah dan sektoral yang termasuk dalam cakupan kawasan aglomerasi (Pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi akan memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menjadi prioritas untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi (Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024). Rancangan Peraturan Presiden ini mendukung Program Prioritas Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan, dengan Kegiatan Prioritas Pembangunan Wilayah Metropolitan.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
74	Perubahan Subbab 3.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 dalam halaman 144 sampai dengan 145	3.7.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7 Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.7
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional			
1	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 (2023)	0,69
2	Indeks Persepsi Korupsi	37	38
3	Indeks Materi Hukum	0,60 (2023)	0,51
4	Indeks Integritas Nasional	71,53	74,52
5	Indeks Integritas Partai Politik	62,83	63,00–64,99
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani			
6	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional[a]	69,98	71,38
7	Indeks Pelayanan Publik	4,02	3,68[b]
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,12	3,00[c]
9	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	93	93,5
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba			
10	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73 (2023)	1,70
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan			
11	*Return on Asset* (ROA) BUMN (%)	3,14 (2023)	3,21
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan			
12	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	12,84	12,36
13	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,08	10,24
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			
14	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5 ± 1,0

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024 (diolah)

Keterangan: a) Angka baseline dan target merupakan proyeksi nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan akan dimutakhirkan, b) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, c) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

75	Perubahan Subbab 3.7.2 Arah Kebijakan	3.7.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	dalam halaman 145	(1) Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) reformasi politik dan tata kelola pemilu; (b) reformasi hukum; (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang; (d) penguatan kelembagaan, pelayanan, dan penegakan hukum; serta (e) transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. (2) Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan (a) penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara; (b) pemerintah digital; (c) transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan; (d) penataan desentralisasi dan otonomi daerah; serta (e) pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, termasuk pekerja migran Indonesia. (3) Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dilaksanakan melalui arah kebijakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. (4) Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan dilaksanakan melalui arah kebijakan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Negara. (5) Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diwujudkan dengan serangkaian arah kebijakan (a) optimalisasi pendapatan negara, (b) optimalisasi belanja negara, serta (c) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. (6) Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diwujudkan dengan pengendalian inflasi yang dilaksanakan utamanya melalui pengendalian komponen inflasi harga bergejolak.
76	Perubahan Subbab 3.7.3 Intervensi	3.7.3 *Highlight* Intervensi Kebijakan Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 7, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	Kebijakan dalam halaman 146 sampai dengan 151	signifikan dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut. (1) Pencegahan tindak pidana korupsi sebagai upaya mendukung terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat, di antaranya tergambar pada peningkatan nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas Nasional) menjadi 89,17. Untuk mewujudkan pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan melalui (a) revitalisasi pencegahan tindak pidana korupsi serta (b) sistem pencegahan korupsi di sektor peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik. (2) Peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja aparatur sipil negara sebagai upaya mendukung terwujudnya kesejahteraan aparatur sipil negara yang adil, layak, dan kompetitif, di antaranya tergambar pada (a) aspek penggajian, penghargaan, dan disiplin Indeks Sistem Merit menjadi 67 persen dan (b) aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit menjadi 61 persen. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep *total reward* berbasis kinerja aparatur sipil negara dapat dilaksanakan melalui (a) penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi aparatur sipil negara serta (b) penerapan sistem manajemen kinerja aparatur sipil negara. (3) Transformasi digital layanan publik prioritas sebagai upaya mendukung terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu, di antaranya tergambar pada peningkatan jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik menjadi 10 layanan. Untuk mewujudkan transformasi digital layanan publik prioritas dapat dilaksanakan melalui (a) pengembangan layanan publik prioritas berbasis digital, (b) penguatan tata kelola layanan perizinan berusaha, (c) penguatan layanan administrasi pemerintahan, serta (d) transformasi pelayanan pertanahan. (4) Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan sebagai upaya mendukung tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak, di antaranya tergambar pada (a) persentase penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi menjadi 90 persen, (b) persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan orang pribadi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		berdasarkan target yang ditetapkan menjadi 100 persen, serta (c) Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara menjadi 100 persen. Untuk mewujudkan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dapat dilaksanakan melalui (a) implementasi sistem informasi inti perpajakan *(core tax)* dan interoperabilitas dengan sistem informasi *stakeholder* terkait, menuju *data-driven*, (b) simplifikasi proses bisnis dan kelembagaan serta penguatan kebijakan, (c) tata kelola ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan (termasuk *sin tax*), serta (d) peningkatan kepatuhan perpajakan. (5) Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai upaya mendukung terciptanya dukungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang optimal, di antaranya tergambar pada rasio capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap target yang ditetapkan menjadi 90-100 persen. Untuk mewujudkan intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilaksanakan melalui (a) pembenahan tata kelola penerimaan sumber daya alam minyak dan gas, (b) pembenahan tata kelola penerimaan sumber daya alam nonmigas yang bernilai tambah tinggi, (c) pembenahan tata kelola penerimaan nonsumber daya alam, (d) pembenahan tata kelola pengelolaan aset, serta (e) inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan kepatuhan.
77	Perubahan Subbab 3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dalam halaman 152 sampai dengan 154	3.7.4 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Kebutuhan regulasi pada Prioritas Nasional 7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" sebagai berikut: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Revisi Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akan mengatur terkait pembaharuan substansi terhadap proses bisnis pailit khususnya penataan terhadap aspek-aspek hubungan perikatan dalam hal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Rancangan Undang-Undang ini mendukung sasaran pembangunan guna meningkatkan kepercayaan investor. (2) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya (a) masih terdapat ketentuan United Nation Convention Against Corruption yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. (3) Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jaminan Benda Bergerak sangat penting mengingat adanya kebutuhan masyarakat akan jaminan atas benda bergerak yang efisien, serta belum adanya produk hukum terintegrasi yang menyebabkan ketidakpastian hukum terkait penjaminan benda bergerak. Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Benda Bergerak bertujuan mengintegrasikan berbagai jenis jaminan kebendaan yang saat ini tersebar pengaturannya seperti jaminan fidusia, gadai, dan resi gudang.
78	Perubahan Subbab 3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 dalam halaman 155	3.8.1 Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8 Dalam upaya memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pada tahun 2025 dirumuskan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 8

No	Sasaran dan Indikator	*Baseline* 2024	Target 2025
Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	62,85 (2021)	65,49
2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77
3.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13 (2023)	58,39
Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
4.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,140 (2022)	0,137

79	Perubahan Subbab 3.8.2 Arah Kebijakan	3.8.2 Arah Kebijakan Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 8, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	dalam halaman 155	(1) Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju, dilaksanakan melalui (a) penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat; dan (b) pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa. (2) Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dilaksanakan melalui (a) pembangunan berketahanan iklim, dan (b) pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna.
80	Perubahan Subbab 3.8.3 Intervensi Kebijakan dalam halaman 155 sampai dengan 163	3.8.3 Intervensi Kebijakan Sebagai upaya simultan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 8 dan upaya penyeimbangan antara nilai-nilai agama, kebudayaan, dan lingkungan alam yang menjadi aspek fundamental dalam proses pembangunan, terdapat Kegiatan Prioritas Utama yang memiliki dampak signifikan dan mempunyai daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut. (1) Penguatan karakter dan jati diri bangsa, bertujuan untuk mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang tergambar pada peningkatan penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya menjadi 36,71 persen. Untuk mendukung pencapaian penguatan karakter dan jati diri bangsa dilaksanakan dengan (a) penguatan etika sosial budaya untuk membentuk masyarakat yang harmonis, rukun, dan berkeadaban; (b) penguatan etika politik dan pemerintahan untuk melembagakan sistem demokrasi yang substantif dan partisipatif, serta mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pelayanan; (c) penguatan etika ekonomi dan bisnis sebagai landasan transformasi ekonomi untuk mendorong produktivitas dan daya saing bangsa; (d) penguatan etika hukum yang berkeadilan untuk menjamin kepastian hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan; (e) penguatan etika keilmuan untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, dan inovatif; dan (f) penguatan etika lingkungan sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan. (2) Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan, sebagai upaya mendukung terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan. Hal ini tergambar pada (a) peningkatan penduduk yang bekerja di bidang seni budaya menjadi 0,49 persen dan (b) pengembangan satu kawasan pemajuan kebudayaan. Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan dilaksanakan melalui (a) pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional dan (b) pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan. (3) Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditargetkan akan meningkat menjadi 55. Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut dilaksanakan melalui (a) pengembangan kawasan pesisir tangguh, (b) peningkatan ketahanan perikanan terhadap perubahan iklim, (c) pembangunan prasarana pengaman pantai, dan (d) penyediaan sarana bantu navigasi pelayaran/rambu suar.
81	Perubahan Infografis Target Pertumbuhan, Kontribusi, dan Tema Pembangunan Per Wilayah Pulau Tahun 2025 dalam halaman 164 sampai dengan 165	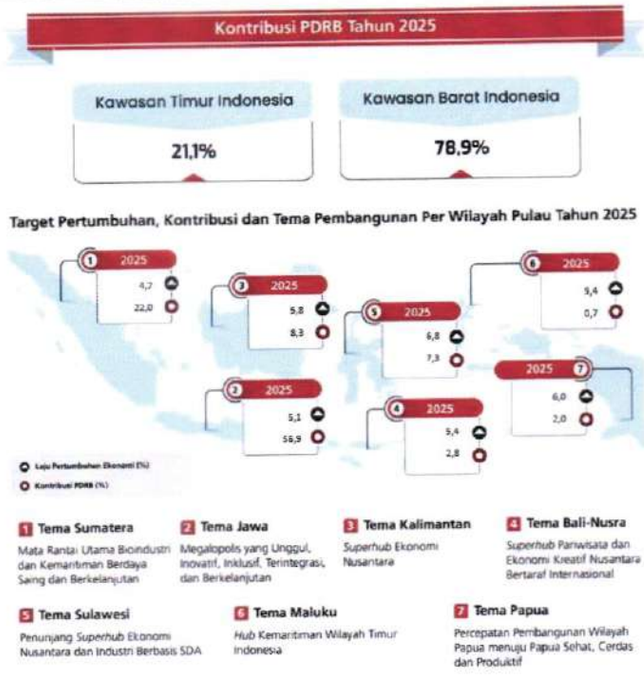

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
82	Perubahan Infografis Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah dalam halaman 166	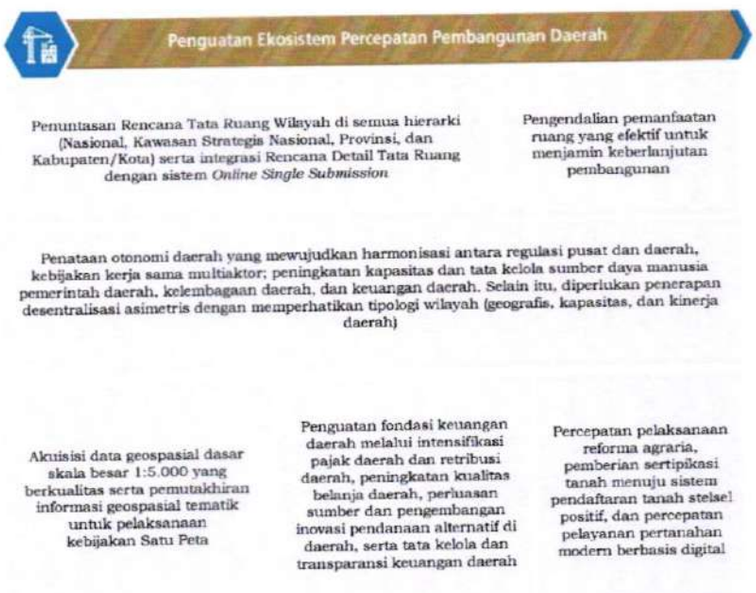
83	Perubahan Infografis Infrastruktur dan Layanan Dasar dalam halaman 166	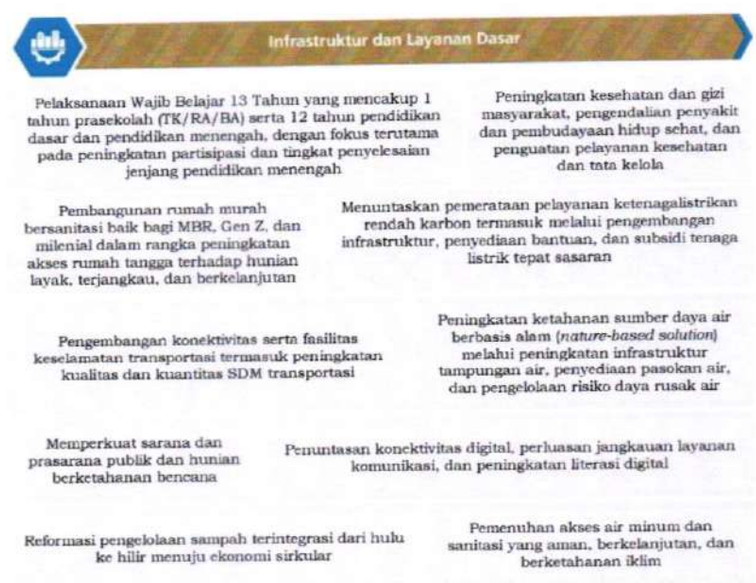

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
84	Perubahan Infografis Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi dalam halaman 167	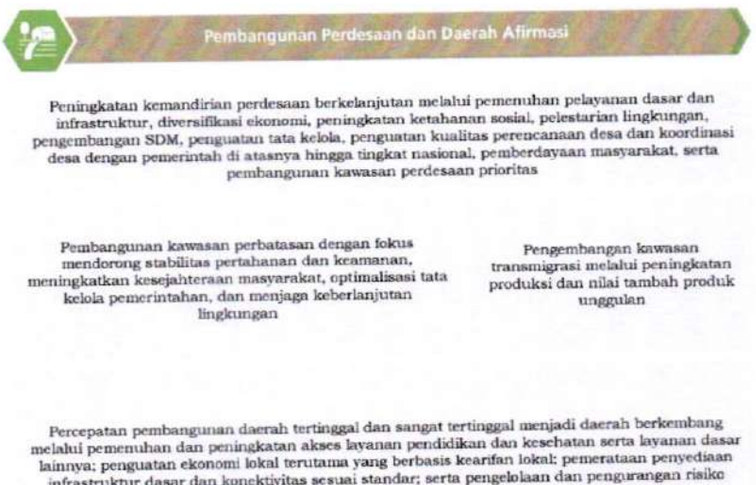
85	Perubahan Infografis Pengelolaan Pusat Pertumbuhan dalam halaman 167	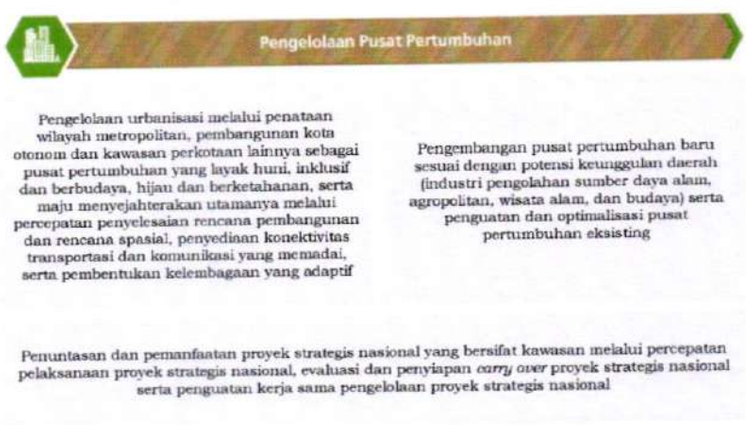

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
86	Perubahan Subbab 4.2.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatera Tahun 2025 dalam halaman 168	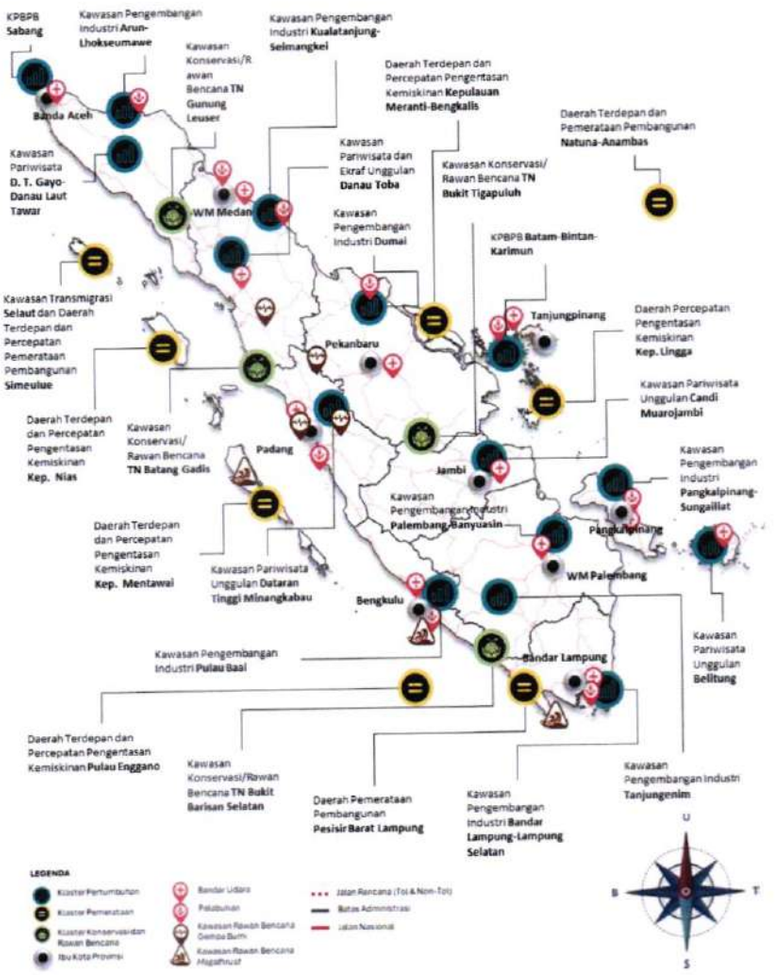
87	Perubahan Subbab 4.2.2 Provinsi Aceh dalam halaman 169 sampai dengan 171	4.2.2 Provinsi Aceh Sasaran Pembangunan Provinsi Aceh

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	4,3	46,2	1,1	12,00-13,00	0,290-0,293	0,57	36,08	82,89	4,60-5,28

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Banda Aceh-Jantho dan KPBPB Sabang	• Pengembangan KPBPB Sabang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan *globally connected*, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kota Banda Aceh • Kab. Aceh Besar • Kota Sabang	○ Pengembangan Pelabuhan CT-3 dan CT-1 Sabang ○ Penguatan industri transportasi laut di Sabang ○ Pengembangan Sabang *Integrated Special Tourism Zone* ○ *Urban renewal* Kota Tua Sabang ○ Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota ○ Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Sabang • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Banda Aceh-Jantho, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual • Pembangunan jalan *missing link* Jantho–Keumala • Penguatan Sabang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Banda Aceh
		Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe • Kota Lhokseumawe • Kab. Aceh Utara • Kab. Bireuen • Kab. Aceh Besar	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, industri kimia, dan industri energi dan *green hydrogen*) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi lanjutan gas bumi, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti olefin, aromatik, DME • Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukeuh • Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe • Pengembangan kota agropolitan Lhokseumawe • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Lhokseumawe–Bireuen
		Kawasan Perkotaan Takengon dan Kawasan Pariwisata dan Dataran Tinggi Gayo-Danau Laut Tawar • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah • Kab. Gayo Lues	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Takengon, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Takengon • Pengembangan kawasan pariwisata DT Gayo-Danau Laut Tawar melalui peningkatan 6A kepariwisataan secara holistik • Penataan kawasan *waterfront* Danau Laut Tawar di Takengon

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Penuntasan pembangunan jalan ruas Geumpang–Pameu • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota
		Kawasan Perkotaan Meulaboh • Kab. Aceh Barat	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Meulaboh, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan terminal *multipurpose* Pelabuhan Meulaboh • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota
		Kawasan Perkotaan Langsa • Kota Langsa	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Langsa, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan kota agropolitan Langsa
		Kawasan Perkotaan Subulussalam • Kota Subulussalam	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Subulussalam, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Subulussalam • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi Jalan ruas Bakongan–Subulussalam
		Kawasan Swasembada Pangan Pesisir Utara Aceh • Kab. Aceh Besar • Kab. Pidie • Kab. Pidie Jaya • Kab. Bireuen • Kab. Aceh Utara • Kab. Aceh Timur • Kab. Aceh Tamiang	• Pembangunan Jaringan Irigasi, pada D.I. Alue Ubay, D.I. Jambo Aye • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Alue Ubay, D. I. Krueng Pase, D. I. Jambo Aye, D. I. Krueng Tiro, • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian pasar, melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Pengembangan kawasan sentra produksi garam di Pidie, Aceh Utara, dan Pidie Jaya • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *Andaman-North Sumatera Basin* • Pengembangan *broodstock center* udang • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: o Kab. Aceh Besar: Mesjid Raya o Kab. Pidie: Batee, Kota Sigli, Simpang Tiga o Kab. Pidie Jaya: Panteraja, Meurah Dua, Ulim o Kab. Bireuen: Kuala o Kab. Aceh Utara: Dewantara, Samudera, Lapang, Baktiya Barat o Kota Lhokseumawe: Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat o Kab. Aceh Timur: Madat, Nurussalam, Darul Aman, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa, Peureulak Barat, Peureulak, Peureulak Timur, Rantau Selamat, Birem Bayeun o Kota Langsa: Langsa Barat
		Kawasan Swasembada Air dan Energi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Bener Meriah • Kab. Aceh Tengah	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Laut Tawar dan DAS Peusangan • Revitalisasi Danau Laut Tawar
		Kawasan Swasembada Pangan dan Energi Pesisir Barat Aceh • Kab. Aceh Jaya • Kab. Aceh Barat • Kab. Nagan Raya • Kab. Aceh Barat Daya	• Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Tutut (Kab. Aceh Barat dan Kab. Nagan Raya) • Pengembangan gasifikasi batu bara • Pembangunan jaringan irigasi pada D. I. Lhok Guci, D. I. Susoh • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian pasar, melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian • Preservasi Jalan ruas Bts. Kota Banda Aceh – Calang • Kawasan Perdesaan Budidaya Perikanan Air Tawar Terpadu Kab. Nagan Raya
		Kawasan Afirmasi Simeulue (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Simeulue	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pala) • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Selaut • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Dataran Tinggi Gayo • Kab. Aceh Tengah • Kab. Bener Meriah	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Pesisir Timur Aceh dan Pesisir Barat-Selatan Aceh • Pesisir Timur: Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Tamiang • Pesisir Barat-Selatan: Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, Kab. Nagan Raya, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Selatan, Kab. Aceh Singkil	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Konservasi TN Gunung Leuser • Kab. Gayo Lues • Kab. Aceh Barat Daya • Kab. Aceh Tenggara • Kab. Aceh Selatan	• Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi • Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan
		Provinsi Aceh	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah serta 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Malikussaleh melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan Penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; ○ Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan ○ Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTA dan PLTBm) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan ekonomi syariah, melalui: ○ Pengembangan Industri Halal ○ Peningkatan Ekspor Halal dan Kerja sama Ekonomi Syariah Internasional ○ Penciptaan Ekosistem UMKM Halal ○ Penguatan Keuangan Syariah ○ Penguatan Dana Sosial Syariah • Penguatan pendidikan Islam bertaraf global, melalui: ○ Peningkatan kualitas pendidikan dayah dan pendidikan keagamaan ○ Rekognisi lulusan pendidikan keagamaan dan pendidikan dayah/pesantren ○ Penguatan penjaminan mutu pendidikan keagamaan dan pendidikan dayah/pesantren • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Optimalisasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk mendukung kesejahteraan di wilayah perkebunan yang berlandaskan budaya dan potensi lokal. • Memperluas akses infrastruktur dan layanan dasar bagi kelompok miskin dan rentan di wilayah terpencil di Provinsi Aceh. • Memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana seperti tsunami, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi. • Memperkuat akses pendidikan bagi kelompok miskin dan rentan melalui program bantuan pembiayaan pendidikan, seperti beasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP), serta insentif bagi siswa dari keluarga kurang mampu, terutama di daerah dengan angka partisipasi sekolah rendah. • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. • Meningkatkan komplementaritas bantuan sosial dan subsidi agar lebih terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.
88	Perubahan Subbab 4.2.3 Provinsi Sumatera Utara dalam halaman 172 sampai dengan 175	Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Wilayah Metropolitan Medan dan Kawasan Pengembangan Industri Medan-Binjai-Deli Serdang • Kota Medan • Kota Binjai • Kab. Deli Serdang	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Medan, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Medan ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Medan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Medan, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS • Penataan Kota Lama Kesawan • Pengembangan Aeropolis Kualanamu • *Medan Urban Traffic Improvement Project* • Pengembangan koridor industri Medan-Binjai-Deli Serdang (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri perikanan, industri kimia, serta industri logam dasar dan baja) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta • produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Pengembangan pusat inkubasi kewirausahaan dan UMKM di kawasan *Deli Sport City* • Pengendalian banjir Sungai Badera dan Selayang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual
		Kawasan Pengembangan Industri Kuala Tanjung–Sei Mangkei • Kab. Batubara • Kab. Simalungun	• Pengembangan koridor industri Kuala Tanjung–Sei Mangkei (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri kimia, hilirisasi bauksit, serta industri logam dasar besi dan baja) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan *aluminium ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit *aluminum alloy*, katalis alumina, komposit aluminium • Pengembangan KEK Sei Mangkei • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pengembangan Kota Penyangga Inderapura (Kab. Batubara) (rumah sakit, pasar modern, terminal bus) • Pengembangan Kota Penyangga Perdagangan (Kab. Simalungun) (pasar modern, terminal bus) • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara–Riau • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota
		Kawasan Pariwisata Unggulan Danau Toba dan Kawasan Perkotaan Balige (Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba) • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Simalungun	• Peningkatan 6A Pariwisata dan *urban renewal* di Parapat-Ajibata, Balige, Baktiraja, Pangururan, Silalahi-Paropo, Merek, dan Ambarita-Tomok • Pengembangan Kawasan Terpadu *Sibandan Special Tourism Zone* • Pengembangan rintisan PSDKU (Program Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah, serta Pusat Riset Kebudayaan Bertaraf Internasional • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Balige, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan Kawasan Perdesaan Ajibata • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Pematangsiantar–Parapat–Balige–Siborongborong • Pengembangan kota agropolitan Balige • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi Jalan Bts. Kota Tarutung–Bts. Kota Sibolga–Bts. Kab. Tapteng/Tapsel–Batangtoru–Jalan Sudirman/Merdeka (Padang Sidempuan), ruas Dairi–Dolok Sanggul–Siborongborong • Pengembangan kawasan *geopark* yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan *geopark*
		Kawasan Perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan • Kota Sibolga • Kab. Tapanuli Tengah	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sibolga-Pandan-Padangsidimpuan, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kota Padangsidimpuan	• Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga • Pengembangan Pelabuhan Sibolga • Pengembangan kota agropolitan Padangsidimpuan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi Jalan Bts. Kota Tarutung–Bts. Kota Sibolga–Bts. Kab. Tapteng/Tapsel–Batangtoru–Jalan Sudirman/Merdeka (Padang Sidempuan)
		Kawasan Perkotaan Rantauprapat • Kab. Labuhanbatu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rantauprapat, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Rantauprapat • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Penyiapan Jalan Tol Rantauprapat–Kisaran
		Kawasan Perkotaan Kabanjahe • Kab. Karo	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kabanjahe, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Kabanjahe–Berastagi • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Lawe Pakam (Bts. Prov. Aceh)–Kuta Buluh–Bts. Kota Sidikalang–Bts. Kota Kabanjahe
		Kawasan Swasembada Pangan Sumatera Timur • Kab. Langkat • Kab. Deli Serdang • Kab. Serdang Bedagai • Kab. Simalungun • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Kota Medan	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Bandar Sidoras D.I. perkotaan, dan D.I. Sei Ular. • Pembangunan jaringan Irigasi pada, D.I. Wampu, D.I. Silau Bunut • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani serta pengendalian kepastian pasar melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Kab. Langkat: Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Berandan Barat, Gebang, Tanjung Pura ○ Kab. Serdang Bedagai: Tanjung Beringin, Bandar Khalipah ○ Kab. Batu Bara: Sei Suka ○ Kab. Asahan: Silau Laut, Sei Kepayang Timur
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Utara • Kab. Toba • Kab. Samosir • Kab. Humbang Hasundutan • Kab. Tapanuli Utara • Kab. Dairi • Kab. Karo • Kab. Pakpak Bharat • Kab. Tapanuli Tengah	• Pengembangan KSPP Sumatera Utara melalui: ○ Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan infrastruktur; ○ Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output*: penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian; ○ Pengembangan kawasan secara *off farm*, dengan *output*: penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Toba dan Sub-DAS Asahan • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Batang Angkola-Batang Gadis • Kab. Tapanuli Selatan • Kab. Mandailing Natal	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Batang Angkola • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Batang Gadis dan Danau Siais • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Kepulauan Nias (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Gunungsitoli • Kab. Nias	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi jalan Lingkar dan Trans Nias • Pengembangan Pelabuhan Gunungsitoli • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan perkebunan (kelapa dan pisang)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Nias Utara* • Kab. Nias Barat • Kab. Nias Selatan • Kota Gunungsitoli Keterangan: *) Daerah Tertinggal	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Gunungsitoli, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di rumah sakit umum daerah provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan tipe rumah sakit dari tipe D menjadi C di rumah sakit umum daerah Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat • Peningkatan 6A Pariwisata di Telukdalam, Kep. Hinako, Lahewa-Tureloto, Kep. Batu • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Asahan-Labuhanbatu-Padanglawas • Kab. Asahan • Kab. Labuhanbatu • Kab. Labuhanbatu Utara • Kab. Labuhanbatu Selatan • Kab. Padanglawas • Kab. Padanglawas Utara	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Asahan-Tanjung Balai • Kota Tanjung Balai • Kab. Asahan	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Tanjung Balai • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Nias Utara • Kab. Nias Utara	• Pengembangan pelabuhan perikanan modern yang terintegrasi dengan industrialisasi/hilirisasi perikanan di Lahewa • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Batang Gadis dan TN Gunung Leuser • TN Batang Gadis: Kab. Mandailing Natal • TN Gunung Leuser: Kab. Langkat	• Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Sumatera Utara	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		Provinsi Sumatera Utara	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan ke satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan Penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik; ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; ○ Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi ○ Pencegahan dan Penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM) ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Memperkuat reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. • Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana. • Peningkatan kewirausahaan afirmatif melalui pengembangan pendidikan/pelatihan vokasi berbasis industri manufaktur dan pengolahan, sertifikasi, serta kemitraan dengan dunia usaha. • Perluasan akses modal usaha, peningkatan produktivitas berbasis teknologi, serta fasilitasi akses pasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di sektor pertanian dan perkebunan. • Perluasan infrastruktur dan layanan dasar bagi kelompok miskin dan rentan di daerah terpencil melalui pengembangan akses jalan, listrik desa, air bersih, serta layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah perbukitan dan pedalaman.
89	Perubahan Subbab 4.2.4 Provinsi Sumatera Barat dalam halaman 175 sampai dengan 178	Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 4,7 | 60,2 | 1,3 | 4,50–5,10 | 0,274–0,279 | 0,59 | 52,62 | 77,95 | 5,37–5,76 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Padang–Pariaman • Kota Padang • Kota Pariaman • Kab. Padang Pariaman	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Padang–Pariaman, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan koridor industri rintisan Padang–Pariaman (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, dan industri transportasi laut dan galangan kapal) • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus • Preservasi jalan ruas Padang–Painan–Kambang • Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Padang–Pariaman • Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual
Kawasan Pariwisata Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau (termasuk Kawasan Perkotaan Bukittinggi–Padang Panjang dan Kawasan Perkotaan Solok–Sawahlunto) • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi-Padang panjang dan Solok–Sawahlunto, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Peningkatan 6A Pariwisata, *urban renewal*, dan pembangunan pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang panjang • Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi • Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung • Pengembangan Kawasan Terpadu Kandi di Sawahlunto

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kota Bukittinggi • Kota Padang panjang • Kota Solok • Kota Sawahlunto • Kota Payakumbuh	• Penataan *waterfront* Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru • Pembangunan *Fly Over* Sitinjau Lauik • Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Kawasan Perdesaan Agribisnis Pamako, Kab. Agam • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh melalui pembiayaan SBSN
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dataran Tinggi Minangkabau • Kab. Tanah Datar • Kab. Agam • Kab. Solok • Kab. Solok Selatan • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Sijunjung • Kab. Pasaman	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Panti Rao • Pembangunan jaringan Irigasi, pada D.I Batang Sinamar • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi dan peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung) • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Padang Pariaman • Kab. Pasaman Barat	• Pembangunan jaringan Irigasi pada DI Sawah Laweh Tarusan • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Batang Anai • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut (Kab. Pesisir Selatan) • Pengembangan sentra produksi perikanan
		Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Mentawai	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pembangunan jalan Trans Mentawai • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kelapa dan sagu), hasil hutan kayu dan bukan kayu dan perikanan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru Pasaman Barat • Kab. Pasaman Barat	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Kerinci–Seblat • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Solok Selatan	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami di Sumatera Barat	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Provinsi Sumatera Barat	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM, terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan ○ Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM) ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Minangkabau (ABS-SBK), melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Penguatan ekonomi syariah, melalui: ○ Pengembangan industri halal ○ Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional ○ Penciptaan ekosistem UMKM halal ○ Penguatan keuangan syariah ○ Penguatan dana sosial syariah • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan. • Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi. • Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha. • Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan. • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
90	Perubahan Subbab 4.2.5 Provinsi Riau dalam halaman 178 sampai dengan 180	Sasaran Pembangunan Provinsi Riau LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025 | 3,9 | 176,4 | 5,1 | 5,19–6,19 | 0,318–0,324 | 0,57 | 46,88 | 71,85 | 3,95–5,00 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Kota Pekanbaru • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekanbaru, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pengembangan koridor industri Pekanbaru–Dumai • Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Pekanbaru • Pembangunan Jalan Tol Lingkar Barat Pekanbaru (Menghubungkan Tol Pekanbaru–Dumai, Tol Pekanbaru–Padang, dan Tol Pekanbaru–Rengat) • Peningkatan 6A pada koridor pariwisata Muaratakus–Pekanbaru–Siak (revitalisasi dan penataan *Waterfront* Sungai Siak di Pekanbaru dan Siak Sri Inderapura, revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muaratakus, serta *urban renewal* Kota Tua Pekanbaru dan Kawasan Istana Siak) • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang dan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat–Jambi
Kawasan Perkotaan Dumai dan Kawasan Pengembangan Industri Dumai • Kota Dumai	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Dumai, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Pengembangan koridor industri Pekanbaru–Dumai (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri tekstil dan produk tekstil) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Dumai • Pengembangan Pelabuhan Dumai • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pembangunan Jalan Tol Dumai–Kotapinang–Rantauprapat–Kisaran • Preservasi jalan ruas dalam Kota Dumai • Pembangunan pipa transmisi gas bumi Sumatera Utara–Riau • Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai
		Kawasan Perkotaan Rengat • Kab. Indragiri Hulu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rengat, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Rengat–Jambi • Preservasi jalan ruas Rengat–Teluk Kuantan dan Rengat–Tembilahan • Pengembangan Kota Agropolitan Rengat
		Kawasan Swasembada Energi Riau	Peningkatan cadangan dan produktivitas migas *Central Sumatera Basin*, pada: • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kep. Meranti
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Indragiri • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. R. Kuala Sebatu • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi dengan penguatan kesehatan hewan • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Indragiri dan DAS Gaung • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Kepulauan Meranti-Bengkalis (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Kep. Meranti • Kab. Bengkalis	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Penguatan Pulau Rangsang sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (sagu dan kelapa) dan perikanan • Preservasi Jalan Trans Bengkalis • Penguatan Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Bengkalis • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Kep. Meranti: Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Rangsang
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kelapa Rokan-Siak-Kampar-Indragiri • Kab. Rokan Hilir • Kab. Rokan Hulu • Kab. Bengkalis • Kab. Kampar • Kab. Pelalawan • Kab. Siak • Kab. Indragiri Hulu • Kab. Indragiri Hilir • Kab. Kuantan Singingi	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit, karet, dan kelapa) • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Bangko, Sinaboi
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi	• Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Perikanan Tembilahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Biru Rokan Hilir dan Indragiri Hilir • Kab. Rokan Hilir • Kab. Indragiri Hilir	• Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana Zamrud, TN Tesso Nilo, dan TN Bukit Tigapuluh • Zamrud: Kab. Siak • TN Tesso Nilo: Kab. Pelalawan • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hilir	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi perubahan iklim
		Provinsi Riau	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Riau melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat • Penguatan ekonomi syariah, melalui: ○ Pengembangan industri halal ○ Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional ○ Penciptaan ekosistem UMKM halal ○ Penguatan keuangan syariah ○ Penguatan dana sosial syariah • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Riau, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. • Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui: ○ Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, terutama di daerah tertinggal dan perbatasan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Peningkatan Layanan Kesehatan, melalui: ○ Peningkatan fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan bayi ○ Penanganan penyakit menular seperti TBC dan penyakit tidak menular seperti diabetes serta hipertensi, yang sering menyerang masyarakat miskin. • Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, melalui: ○ Implementasi Bantuan Sosial Adaptif, yang memungkinkan bantuan sosial lebih fleksibel dalam merespons kondisi ekonomi masyarakat. ○ Reformasi Jaminan Sosial Nasional, agar kelompok miskin dan rentan lebih terlindungi dari risiko kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. ○ Digitalisasi sistem bantuan sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. ○ Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui identifikasi kelompok masyarakat miskin dan rentan
91	Perubahan Subbab 4.2.6 Provinsi Jambi dalam halaman 181 sampai dengan 183	Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi LPE (%) · PDRB per Kapita (Rp juta) · Kontribusi PDRB Provinsi (%) · Tingkat Kemiskinan (%) · Rasio Gini · Indeks Modal Manusia · Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) · IKLH Daerah · TPT (%) 2025: 4,8 · 92,2 · 1,5 · 6,30-6,80 · 0,337-0,341 · 0,56 · 78,50 · 73,71 · 4,27-4,38 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Jambi dan Kawasan Pariwisata dan Unggulan Candi Muarojambi • Kota Jambi • Kab. Muaro Jambi	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi • Peningkatan 6A pada kawasan pariwisata Candi Muarojambi (Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Percandian Muarojambi dan peningkatan Jalan Nasional akses Situs Percandian Muarojambi) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Jambi–Sengeti–Kualatungkal, Jambi–Muarabulian, dan Jambi–Muarasabak • Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Jambi • Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muarojambi • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif
Kawasan Perkotaan Bangko • Kab. Merangin	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			◦ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ◦ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ◦ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin–Bangko–Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin–Sarolangun–Bts. Prov. Sumsel
		Kawasan Perkotaan Sungaipenuh • Kota Sungaipenuh	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sungaipenuh, melalui: ◦ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ◦ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ◦ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan Kota Agropolitan Sungaipenuh • Preservasi jalan ruas Sungai Penuh–Siulak Deras/Letter W–Bts. Prov. Sumbar
		Kawasan Perkotaan Muarabungo • Kab. Bungo	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muarabungo, melalui: ◦ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ◦ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ◦ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin–Bangko–Bts. Kab. Sarolagun/Kab. Merangin–Sarolangun–Bts. Prov. Sumsel
		Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Tanjung Jabung Timur • Kab. Muaro Jambi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. R. Parit Pudin • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Pengembangan sentra produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan peluasan akses layanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			sistem resi gudang; serta pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan sentra produksi perikanan
		Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Batanghari • Kab. Tanjung Jabung Barat • Kab. Muaro Jambi • Kab. Batanghari • Kab. Bungo • Kab. Tebo • Kab. Sarolangun	• Pembangunan jaringan irigasi pada DI Batang Asai • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-DAS Batang Tebo • Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muara Enim, Formasi Air Benakat, dan Formasi Sinamar • Pengembangan gasifikasi batubara • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bukit Barisan Tengah Jambi • Kab. Kerinci • Kab. Merangin • Kota Sungaipenuh	• Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-DAS Batang Merangin-Tembesi • Pembangunan Bendungan Merangin • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Sei Siulak Deras • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pengembangan Bandara Depati Parbo
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Kelapa Tanjung Jabung	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas Perkebunan, pada: Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Tanjung Jabung Timur
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Karet Cekungan Batanghari	• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri, pada: ○ Kab. Muaro Jambi ○ Kab. Bungo ○ Kab. Tebo ○ Kab. Tanjung Jabung Barat ○ Kab. Tanjung Jabung Timur ○ Kab. Batanghari ○ Kab. Merangin

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Duabelas, TN Bukit Tigapuluh, TN Berbak dan Sembilang, dan TN Kerinci-Seblat • TN Bukit Duabelas: Kab. Batanghari, Kab. Tebo • TN Bukit Tigapuluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat • TN Berbak dan Sembilang: Kab. Tanjung Jabung Timur, Kab. Muaro Jambi • TN Kerinci-Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, Kota Sungaipenuh	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Peningkatan layanan peringatan dini • Pengembangan Kawasan Perdesaan Mina-Agrowisata VII Koto Ilir (Kab. Tebo)
		Provinsi Jambi	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Jambi melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit menular lainnya ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, melalui: ○ Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif melalui Kartu Kesejahteraan ○ Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan ○ Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTA) ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola pemerintahan digital ○ Penguatan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Jambi, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Penguatan ekonomi syariah, melalui: ○ Pengembangan industri halal ○ Peningkatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional ○ Penciptaan ekosistem UMKM halal ○ Penguatan keuangan syariah ○ Penguatan dana sosial syariah • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jambi, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi Kartu Kesejahteraan untuk memastikan kelompok miskin dan rentan memiliki akses terhadap bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial • Perluasan layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, termasuk program permakanan, layanan *home care*, dan pemberdayaan berbasis komunitas • Peningkatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi petani, pekebun, dan nelayan untuk memperluas usaha produktif serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran • Peningkatan efektivitas dan integrasi bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, dan bantuan sosial lainnya agar lebih tepat sasaran dan terhubung dengan program pemberdayaan ekonomi
92	Perubahan Subbab 4.2.7 Provinsi Sumatera Selatan dalam halaman 183 sampai dengan 186	Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 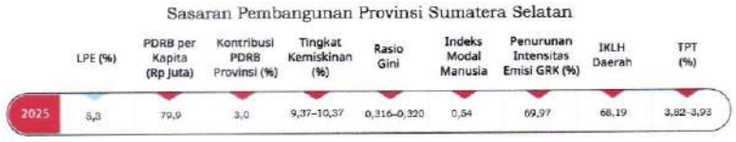 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. Lokasi Prioritas — *Highlight* Indikasi Intervensi Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan — • Pengembangan dan penataan Wilayah Metropolitan Palembang, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan Wilayah Metropolitan Palembang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Industri Palembang-Banyuasin • Kota Palembang • Kab. Banyuasin • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ilir	○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* ○ Penataan Kawasan Strategis di Wilayah Metropolitan Palembang • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di Wilayah Metropolitan Palembang • Pembangunan Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi dan Jalan Tol Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Lahat • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan (Kab. Ogan Ilir), dan Telang (Kab. Banyuasin) • Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/*New Palembang* • Pengembangan koridor industri Palembang-Banyuasin (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri perikanan, dan hilirisasi rumput laut) • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Optimalisasi dan efisiensi pabrik Pusri III-B • Pengembangan dan pembangunan Kilang Minyak Bumi Plaju • Pembangunan *Fly Over* Sudirman
		Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim • Kab. Muara Enim	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Enim, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kawasan industri di Tanjung Enim (sektor industri prioritas: industri kimia dan industri energi) • Pengembangan industri gasifikasi/hilirisasi batubara di Tanjung Enim • Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon aktif, syngas, metanol, *dimethyl ether* • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Bts. Kota Lahat-Muara Enim-Simpang Sugih Waras • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kikim (Kab. Lahat)
		Kawasan Perkotaan Baturaja • Kab. Ogan Komering Ulu	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Baturaja, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. III dr. Noesmir Baturaja • Preservasi jalan ruas Prabumulih–Beringin–Bts. Kab. Ogan Komering Ulu–Baturaja • Pengembangan Kota Agropolitan Baturaja
		Kawasan Perkotaan Lubuklinggau • Kota Lubuklinggau	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Lubuklinggau, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Lubuk Linggau–Bts. Prov. Bengkulu • Pengembangan Kota Agropolitan Lubuklinggau
		Kawasan Swasembada Pangan Ogan-Komering-Banyuasin • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur	• Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Komering • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I.R. Sugihan, D.I.R. Telang • Pengembangan KSPP Sumatera Selatan • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Kawasan Swasembada Pangan Musi Hulu • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kota Pagar Alam	• Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Lematang • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D.I. Air Lakitan • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
		Kawasan Swasembada Air dan Energi Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur • Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	• Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Musi, serta pada Sub-DAS Ogan dan Sub-DAS Komering • Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muara Enim dan Formasi Air Benakat • Pengembangan gasifikasi batubara • Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pengembangan SPAM terintegrasi Hulu ke Hilir • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Petata (Kab. Penukal Abab Lematang Ilir) • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Penukal Abab Lematang Ilir • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Ogan Komering Ulu Selatan
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, Kopi, dan Kelapa Cekungan Musi • Kab. Musi Rawas • Kab. Musi Rawas Utara • Kab. Empat Lawang • Kab. Lahat • Kab. Muara Enim • Kab. Banyuasin • Kab. Musi Banyuasin • Kab. Ogan Komering Ilir • Kab. Ogan Ilir • Kab. Ogan Komering Ulu • Kab. Ogan Komering Ulu Timur	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	
		Kawasan Komoditas Unggulan Banyuasin Ekonomi Biru • Kab. Banyuasin	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Sungsang • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan, TN Berbak dan Sembilang, dan TN Kerinci-Seblat • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Ogan Komering Ulu Selatan • TN Berbak dan Sembilang: Kab. Banyuasin • TN Kerinci-Seblat: Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Musi Rawas, Kota Lubuklinggau	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
		Provinsi Sumatera Selatan	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan madrasah ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Sriwijaya melalui pembiayaan SBSN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Sumatera Selatan, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba • Pendalaman sektor keuangan, melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, melalui: ○ Pengembangan koperasi sektor produksi ○ Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif ○ Pengembangan kewirausahaan • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan • Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi • Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha • Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan, dan pemutakhiran data penerima bantuan dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
93	Perubahan Subbab 4.2.8 Provinsi Bengkulu dalam halaman 186 sampai dengan 189	Sasaran Pembangunan Provinsi Bengkulu LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 4,6 | 52,1 | 0,5 | 12,00–12,50 | 0,327–0,332 | 0,54 | 57,74 | 71,27 | 3,30–3,41 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		Kawasan Perkotaan Bengkulu dan Kawasan Pengembangan Industri Pulau Baai • Kota Bengkulu	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bengkulu, melalui: o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pembangunan Pelabuhan Pulau Baai • Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu *fatty acid*, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Pembebasan Lahan Jalan Tol Bengkulu–Lubuklinggau • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Pulau Baai Bengkulu • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di Kawasan Perkotaan Bengkulu (PHTC) • Pengendalian banjir Kota Bengkulu
		Kawasan Perkotaan Manna • Kab. Bengkulu Selatan	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Manna, melalui: o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Preservasi jalan ruas Tais-Manna-Bts. Prov. Sumatera Selatan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan Kota Agropolitan Manna
		Kawasan Swasembada Air dan Energi Bukit Barisan Tengah Bengkulu • Kab. Lebong • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang	• Rehabilitasi jaringan Irigasi pada D.I. Air Ketahun • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ketahun, DAS Lais, DAS Lemau, DAS Bengkulu, DAS Nelas, dan Danau Tes • Peningkatan cadangan dan produktivitas batu bara pada Formasi Lemau • Pengembangan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
		Kawasan Swasembada Pangan Mukomuko-Bengkulu Utara-Seluma-Bengkulu Selatan • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Seluma • Kab. Bengkulu Selatan	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Air Seluma • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Lagita (Kab. Bengkulu Utara) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani, Kab. Bengkulu Selatan • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan
		Kawasan Afirmasi Pulau Enggano (Daerah Terdepan dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Bengkulu Utara	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan (kelapa) dan perikanan • Peningkatan 6A *ecotourism* di Kawasan Hutan Enggano • Peningkatan 6A *cultural tourism* Enggano • Penguatan Pulau Enggano sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Komoditas Unggulan Sawit, Karet, dan Kopi, Utara Bengkulu • Kab. Mukomuko • Kab. Bengkulu Utara • Kab. Rejang Lebong • Kab. Kepahiang	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Kerinci-Seblat • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Kaur • TN Kerinci-Seblat: Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Rejang Lebong, Kab. Lebong	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Pengamanan Pantai Kritis Kab. Kaur
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Bengkulu	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		Provinsi Bengkulu	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Penguatan infrastruktur di perguruan tinggi, yaitu: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Curup melalui pembiayaan SBSN ○ Pembangunan rumah sakit pendidikan di Universitas Bengkulu melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Bengkulu, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha untuk mendukung kesejahteraan di wilayah perkebunan yang berlandaskan budaya dan potensi lokal • Memperluas akses infrastruktur dan layanan dasar bagi kelompok miskin dan rentan di wilayah terpencil dan pulau-pulau sekitar Sumatera • Mendorong partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengembangan kawasan perkotaan dan industri di Bengkulu • Memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana seperti banjir, tsunami, erupsi gunung berapi, dan gempa bumi • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
94	Perubahan Subbab 4.2.9 Provinsi Lampung dalam halaman 189 sampai dengan 191	

Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	4,9	34,6	2,3	9,50–10,00	0,318–0,321	0,55	62,79	70,99	3,86–4,00

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dan Kawasan Pengembangan Industri Bandar Lampung-Lampung Selatan • Kota Bandar Lampung • Kab. Lampung Selatan • Kab. Tanggamus	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bandar Lampung, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan koridor industri Bandar Lampung–Lampung Selatan (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, dan hilirisasi sawit) • Hilirisasi kelapa, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan, dan karbon aktif • Pengembangan Pelabuhan Panjang • Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Lematang–Pelabuhan Panjang • Perencanaan dan penyiapan pembangunan Interkoneksi Sumatera–Jawa • Pengembangan Kawasan Kota Baru Lampung
Kawasan Perkotaan Menggala • Kab. Tulang Bawang	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Menggala, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Tulang Bawang Barat (*hinterland* Kawasan Perkotaan Menggala) • Pengembangan Kota Agropolitan Menggala
Kawasan Perkotaan Kotabumi • Kab. Lampung Utara	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Kotabumi, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Preservasi jalan ruas Kotabumi–Terbanggi Besar dan Kotabumi–Bukit Kemuning–Blambangan Umpu • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan Kota Agropolitan Kotabumi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Perkotaan Liwa • Kab. Lampung Barat	• Pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Liwa, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan Kota Agropolitan Liwa
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Mesuji-Tulang Bawang • Kab. Mesuji • Kab. Way Kanan • Kab. Tulang Bawang • Kab. Tulang Bawang Barat • Kab. Lampung Utara	• Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Way Kanan, Sub-DAS Way Kiri, Sub-DAS Way Rarem, Sub-DAS Way Besai, dan Sub-DAS Way Umpu • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Seputih-Sekampung • Kab. Lampung Tengah • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pringsewu • Kab. Pesawaran • Kab. Tanggamus	• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Way Sekampung • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Seputih, DAS Sekampung, DAS Garuntang, dan DAS Way Jepara • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Afirmasi Pesisir Barat Lampung (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pesisir Barat	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perkebunan • Peningkatan 6A pariwisata di Pesisir Barat • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Kab. Pesisir Barat
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pesisir Timur Lampung • Kab. Lampung Timur • Kab. Tulang Bawang • Kab. Lampung Selatan	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuhan Maringgai • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Komoditas Unggulan Kopi dan Kelapa Lampung Barat-Selatan • Kab. Lampung Timur • Kab. Lampung Selatan • Kab. Pesawaran • Kab. Tanggamus • Kab. Lampung Barat	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Konservasi dan Rawan Bencana TN Bukit Barisan Selatan dan TN Waykambas • TN Bukit Barisan Selatan: Kab. Lampung Barat, Kab. Pesisir Barat • TN Waykambas: Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		Provinsi Lampung	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Metro Lampung melalui pembiayaan SBSN ○ Pembangunan RS PTN di Universitas Lampung melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana ○ pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM) ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Lampung, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta penguatan program perlindungan sosial yang lebih adaptif • Pemberdayaan UMKM dan penguatan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan melalui bantuan alat, pupuk, serta mengembangkan hilirisasi produk, mempermudah akses permodalan, dan mendorong digitalisasi UMKM • Peningkatan akses dan fasilitas layanan pendidikan dengan memperluas bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin, meningkatkan aksesibilitas ke sekolah, serta meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik terutama di daerah pedesaan • Peningkatan akses dan fasilitas layanan kesehatan dengan memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat miskin, meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, alat kesehatan dan obat), serta meningkatkan jumlah tenaga kesehatan terutama untuk daerah terpencil • Meningkatkan akses jalan dan transportasi untuk mempermudah kegiatan perekonomian dan menjangkau layanan dasar

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
95	Perubahan Subbab 4.2.10 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam halaman 192 sampai dengan 194	Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	2,8	73,2	0,5	3,93–4,50	0,239–0,242	0,56	54,55	76,66	3,98–4,33

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Pangkalpinang dan Kawasan Pengembangan Industri Pangkalpinang-Sungailiat • Kota Pangkalpinang • Kab. Bangka	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pangkalpinang, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan koridor industri Pangkalpinang–Sungailiat (sektor industri prioritas: hilirisasi timah dan bauksit, dan hilirisasi kelapa sawit) • Hilirisasi timah, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar timah, yaitu solder, timah lembaran, dan *alloy* dasar, serta produk hilirisasi lanjutan timah solder premium, timah paduan, material konstruksi, *microchips*, baterai • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan *aluminium ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit *aluminium alloy*, katalis alumina, komposit aluminium, material pesawat • Pengembangan Pelabuhan Pangkalbalam • Preservasi jalan ruas Namang–Koba–Bts. Kab. (Bangka Tengah/Selatan)–Air Bara–Toboali–Sadai • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Sungailiat • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Pangkalpinang (PHTC)
Kawasan Pariwisata Unggulan Belitung, Kawasan Perkotaan Tanjungpandan , dan KEK Tanjung Kelayang (Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka-Belitung) • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur	• Peningkatan 6A Pariwisata dan *urban renewal* di Tanjungpandan, KEK Tanjung Kelayang, Gantung, dan Manggar • Pengembangan Kampung Andalan Mandiri Pusat Inovasi Terpadu (KAMPIT), Kabupaten Belitung Timur • Preservasi jalan ruas Lingkar Belitung, Tanjungpandan–Simpang Renggiang–Manggar, Simpang Renggiang–Gantung, dan Gantung–Manggar (preservasi jalan ruas Perawas–Badau– Bts. Kab. Belitung/Belitung Timur • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Tanjungpandan, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Tanjungpandan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Swasembada Pangan Bangka Selatan • Kab. Bangka Selatan	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi-pada D.I. Rias • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang (Kab. Bangka Selatan) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Kawasan Komoditas Unggulan Timah, Bauksit, dan Lada Bangka • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat • Kab. Bangka Tengah • Kab. Bangka Selatan	• Peningkatan tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri timah dan bauksit • Peningkatan penerapan standardisasi di industri timah dan bauksit • Peningkatan adopsi teknologi tinggi untuk pengolahan timah dan bauksit • Dekarbonasi industri dan ekonomi sirkular di industri timah dan bauksit • Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan
		Kawasan Konservasi TN Gunung Maras • Kab. Bangka • Kab. Bangka Barat	• Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan
		Kawasan Konservasi *Geopark* Belitung • Kab. Belitung • Kab. Belitung Timur	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		c. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: a. Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak b. Pencegahan dan penurunan *stunting* c. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro d. Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: a. Penuntasan TBC b. Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa c. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik d. Penyehatan lingkungan e. Pencegahan dan penurunan *stunting* dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil f. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis g. Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana h. Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba i. Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: a. Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan b. Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: a. Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan b. Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: a. Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi b. Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik c. Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* d. Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: a. Perluasan infrastruktur digital b. Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, melalui: ○ Penguatan tata kelola ekonomi biru ○ Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir ○ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan ○ Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan ○ Penguatan industri transportasi laut ○ Pengembangan pariwisata berbasis bahari ○ Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru • Peningkatan produktivitas perikanan, melalui: ○ Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap ○ Pengembangan *input* produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya ○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat ○ Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan ○ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan ○ Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan pra-bibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Penyediaan akses pembiayaan dan subsidi melalui Kartu Usaha bagi nelayan kecil, guna mendukung permodalan, modernisasi alat tangkap, dan peningkatan hasil tangkapan • Pengolahan hasil perikanan dan hilirisasi industri kelautan, untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan membuka lapangan kerja di sektor pengolahan ikan • Pengembangan koperasi dan kelompok usaha perikanan berbasis komunitas, guna memperkuat daya tawar nelayan dan meningkatkan akses pasar • Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
96	Perubahan Subbab 4.2.11 Provinsi Kepulauan Riau dalam halaman 194 sampai dengan 197	

Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,3	171,2	1,6	4,40–4,90	0,321–0,324	0,62	1,00	73,28	6,08–6,47

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Batam dan KPBPB Batam, Kawasan Perkotaan Tanjung Pinang dan KPBPB Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Balai Karimun dan KPBPB Karimun • Kota Batam • Kota Tanjung Pinang • Kab. Bintan • Kab. Karimun	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Batam dan kawasan perkotaan Tanjung Pinang, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan koridor industri Batam–Bintan–Karimun (sektor industri prioritas: industri semikonduktor, industri dirgantara, industri transportasi laut dan galangan kapal, hilirisasi bauksit, hilirisasi rumput laut, industri timah, industri berteknologi tinggi, industri hijau, dan industri halal) • Pengembangan Pelabuhan Batuampar dan Pelabuhan Kabil • Pengembangan Kawasan Terpadu *Rempang Ecocity* • Pengembangan Kawasan Terpadu *Galang Maritime City* • Pengembangan KEK Batam *Aero Technic*, KEK Nongsa, KEK Sekupang, KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang, KI Bintan *Inti Industrial Estate*, dan KI-KI lainnya di BBK • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan Batam (PHTC) • Pembangunan Closing Dam Piayu • Pembangunan Bendungan Estuari Galang-Galang Baru • Pengembangan CBD-TOD Teluk Tering–Batam Center • Pengembangan kawasan pariwisata Batam-Bintan (pengembangan Kawasan MICE dan *Urban Tourism* Batam Center, pengembangan Kawasan *Integrated Tourism Zone* Lagoi, dan pengembangan *grey tourism*) • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Karimun: Meral Barat, Tebing, Karimun ○ Kota Batam: Belakang Padang ○ Kab. Bintan: Bintan Utara, Telok Sebong, Gunung Kijang, Bintan Pesisir • Pengembangan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau, terutama di Batam (KEK Kesehatan Internasional Batam/KEK Sekupang dan KEK Nongsa) dan Bintan (Kawasan Lagoi) • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAL dr. Midiyato Suratani (Kota Tanjung Pinang) • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
Kawasan Swasembada Energi Natuna • Kab. Natuna	• Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *West Natuna Basin* (*producing basin*) • Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *East Natuna Basin* (*discovery basin*)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Peningkatan cadangan dan produktivitas migas pada *South Natuna Basin (unexplored basin)*
		Kawasan Afirmasi Lingga (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lingga	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertambangan (bauksit), perikanan, dan perkebunan (kelapa) • Hilirisasi bauksit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar bauksit, yaitu SGA, CGA, dan aluminium *ingot*, serta produk hilirisasi lanjutan bauksit aluminium *alloy*, katalis alumina, komposit aluminium • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Afirmasi Natuna-Anambas (Daerah Terdepan dan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Natuna • Kab. Kepulauan Anambas	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Preservasi jalan Trans Natuna dan Anambas • Penguatan Natuna dan Anambas sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan pariwisata bahari • Penguatan PKSN Perbatasan Prioritas Ranai • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Peningkatan tipe RS dari tipe D menjadi C di RSUD Tarempa Kepulauan Anambas • Pemenuhan layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas, yaitu: ○ Kab. Kep. Anambas: Jemaja Barat, Jemaja, Siantan Selatan, Siantan Utara, Kute Siantan
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Natuna-Anambas • Kab. Natuna • Kab. Kep. Anambas	• Rehabilitasi jaringan Irigasi D.I. Jemaja • Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pering, dan Pelabuhan Perikanan Tarempa • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Kab. Natuna • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan hilirisasi rumput laut
		Kawasan Konservasi *Geopark* Natuna • Kab. Natuna	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem
		Provinsi Kepulauan Riau	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana STAIN Kepulauan Riau melalui pembiayaan SBSN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru, melalui: ○ Penguatan tata kelola ekonomi biru ○ Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir ○ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan ○ Pengembangan industri berbasis sumber daya laut dan perairan ○ Penguatan industri transportasi laut ○ Pengembangan pariwisata berbasis bahari ○ Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru • Penguatan keamanan laut di Kepulauan Riau, melalui: ○ Penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan ○ Kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* ○ Peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar • Peningkatan produktivitas perikanan, melalui: ○ Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap ○ Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya ○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat ○ Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan ○ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan ○ Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan Melayu Riau, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan berbasis data kependudukan, integrasi layanan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas, serta memperkuat perlindungan sosial di lokasi rawan bencana • Peningkatan kewirausahaan afirmatif melalui fasilitasi permodalan usaha, pengembangan koperasi, serta peningkatan akses pasar melalui digitalisasi dan penguatan rantai pasok khususnya di bidang perikanan • Peningkatan akses layanan dasar di pulau-pulau terpencil melalui pengembangan layanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan infrastruktur dasar untuk mendorong konektivitas antarpulau

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
97	Perubahan Subbab 4.3.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Jawa Tahun 2025 dalam halaman 197	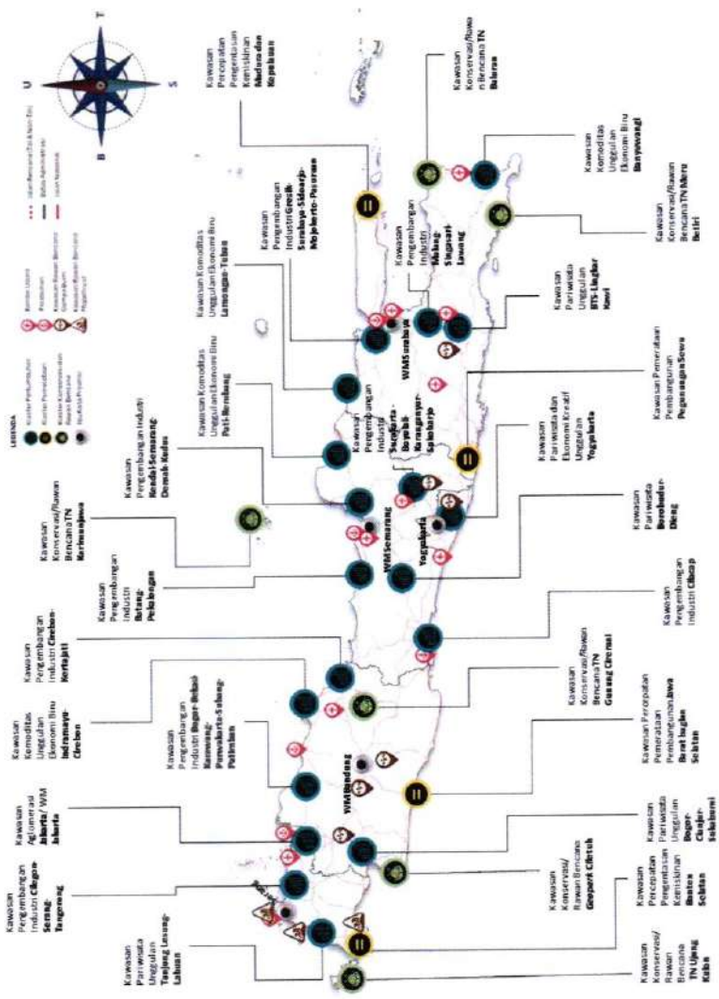
98	Perubahan Subbab 4.3.2 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam halaman 198 sampai dengan 200	Sasaran Pembangunan Provinsi DKI Jakarta LPE (%): 5,1 (2025) PDRB per Kapita (Rp juta): 371,2 Kontribusi PDRB Provinsi (%): 16,7 Tingkat Kemiskinan (%): 3,55–3,85 Rasio Gini: 0,425–0,430 Indeks Modal Manusia: 0,65 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%): 14,65 IKLH Daerah: 51,34 TPT (%): 5,54–6,40 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Aglomerasi Jakarta/WM Jakarta • Provinsi DKI Jakarta	• Pemantapan dan penataan Kawasan Aglomerasi Jakarta, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jakarta (Dewan Kawasan Aglomerasi) ○ Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi, yang merupakan masterplan penataan Kawasan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Cianjur • Provinsi Banten: Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Aglomerasi Jakarta, serta rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Depok (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Jakarta/KA Jakarta, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan Greater Jakarta Integrated Transit Based Living Area, melalui: ○ Persiapan Pembangunan MRT Jakarta Timur-Barat Fase 1 *Trase* Tomang–Medan Satria ○ Persiapan Pembangunan Jalan Tol Sawangan–Selabenda ○ Pembangunan Jalan Tol *JORR Elevated* Cikunir–Ulujami • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Universitas Indonesia • Pengembangan SPALD Perkotaan DKI Jakarta • Pengembangan Destinasi Regeneratif *Greater Jakarta*, yang berfokus kepada peningkatan *event* MICE dan/atau forum internasional yang diselenggarakan di Kawasan Aglomerasi Jakarta • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Jakarta-Tangerang *International Business Corridor* dan Jakarta *Global City Urban Tourism (Central-South)* • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Pusat, Kota Adm. Jakarta Selatan • Provinsi Banten: Kota Tangerang Selatan, Kab. Tangerang	• Pembangunan MRT Fase 2A Bundaran HI-Kota • Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai • Pengembangan *Central Station Manggarai* • Pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Ruas Semanan-Grogol–Sunter–Kelapa Gading • Pengembangan TOD Blok M, Dukuh Atas, dan Lebak Bulus • Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal–Teluk Naga–Rajeg–Balaraja • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Northern Coast New Economic Hub dan Jakarta *Global City Urban Tourism (North)* • Provinsi DKI Jakarta: Kota Adm. Jakarta Utara • Provinsi Banten: Kab. Tangerang • Provinsi Jawa Barat: Kab. Bekasi	• Persiapan pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut pesisir utara Jakarta (Penyelesaian NCICD Fase A Kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah, dan Swasta) • Pengembangan *New Priok Container Terminal* Tahap 2 (NPCT2) dan Tahap 3 (NPCT3) • Pengembangan Kawasan Ancol (Bagian *Northern Coast New Economic Corridor*) • Pengembangan pelabuhan perikanan modern dan industri perikanan terintegrasi PPS Nizam Zachman dan PPN Muara Angke • Pembangunan Jalan Tol *Harbour Toll Road II* • Revitalisasi Kota Tua Jakarta dan *Heritage Port Sunda Kelapa* • Pengembangan koridor industri Cilincing-Tarumajaya • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Konservasi TN Kepulauan Seribu • Kab. Adm. Kep. Seribu	• Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati
		Provinsi DKI Jakarta	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: o Perluasan layanan pendidikan anak usia dini o Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran o Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: o Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: o Penuntasan TBC o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa o Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik o Penyehatan lingkungan o Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil o Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis o Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana o Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba o Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi Kartu Kesejahteraan untuk memastikan kelompok miskin memiliki akses terhadap bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi • Peningkatan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan pemanfaatan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan target yang lebih akurat • Perluasan akses layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, termasuk skema permakanan dan peningkatan aksesibilitas layanan publik • Optimalisasi program Jakpreneur untuk mendukung pengembangan usaha berbasis komunitas dan kewirausahaan sosial di lingkungan perkotaan • Penguatan layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan gelandangan-pengemis, dengan penyediaan layanan rehabilitasi berbasis komunitas

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
99	Perubahan Subbab 4.3.3 Provinsi Jawa Barat dalam halaman 201 sampai dengan 204	

Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,1	59,8	12,8	5,85-6,46	0,383-0,390	0,57	6,61	61,06	6,42-6,99

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pengembangan Industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang-Patimban • Kota Bekasi • Kab. Bekasi • Kab. Bogor • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Subang	• Pengembangan koridor industri Bogor–Bekasi–Karawang–Purwakarta–Subang–Patimban (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, industri semikonduktor, industri dirgantara, industri kimia, dan industri logam dasar besi dan baja • Pembangunan Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan • Pembangunan Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban • Pembangunan Pelabuhan Patimban • Pengendalian banjir Sungai Cipamingkis • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Optimalisasi dan efisiensi pabrik NPK Phonska 3 dan 4 di Cikampek • Pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang • Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Singaperbangsa Karawang melalui pembiayaan SBSN
Kawasan Perkotaan Bogor-Sukabumi dan Kawasan Pariwisata Unggulan Bogor-Sukabumi-Cianjur • Kota Bogor • Kab. Bogor • Kota Sukabumi • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bogor-Sukabumi, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pembangunan Jalan Tol Ciawi–Sukabumi • Proses perencanaan pembangunan Jalan Tol Sukabumi–Cianjur–Ciranjang–Padalarang • Penyiapan Pembangunan Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3B (Semplak-Salabenda) • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Institut Pertanian Bogor • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Bogor • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata: Palabuhanratu, Puncak, Taman Bumi Ciletuh, Gunungpadang • *Urban renewal* pada kota-kota wisata: Bogor dan Sukabumi • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Gunungpadang • Pengembangan KEK Lido • Pengembangan Kota Agropolitan Sukabumi • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RS Tk. III Salak dr. H. Sadjiman (Kota Bogor)
WM Bandung dan Kawasan	• Pemantapan dan penataan WM Bandung, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Bandung

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Pengembangan Industri Cekungan Bandung, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bandung dan Sekitarnya • Kota Bandung • Kab. Bandung • Kab. Bandung Barat • Kota Cimahi	○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* ○ Penataan kawasan strategis di Wilayah Metropolitan Bandung • Pengembangan Kawasan Perkotaan Jatinangor (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Bandung, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah, dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pembangunan sistem angkutan umum massal perkotaan di perkotaan Bandung • Perencanaan dan persiapan pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta–Surabaya • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Institut Teknologi Bandung • Pengembangan sarana dan prasarana serta kapasitas SDM Universitas Pendidikan Indonesia melalui pembiayaan PHLN • Pengembangan koridor industri Cekungan Bandung (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, industri kimia, industri semikonduktor, serta industri tekstil dan produk tekstil) • Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata Geowisata dan Artefak Gua Pawon (Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat), serta revitalisasi kawasan purbakala Situs Gua Pawon • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata: Tangkuban Perahu dan Rancaupas-Pangalengan • *Urban renewal* pada kota-kota wisata, Lembang dan Ciwidey • Preservasi jalan ruas Soreang–Ciwidey–Rancaupas–Rancabali • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di WM Bandung (PHTC) • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Kawasan Perkotaan Cirebon dan Kawasan Pengembangan Industri Cirebon-Kertajati • Kota Cirebon • Kab. Cirebon • Kab. Majalengka	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cirebon, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan koridor industri Cirebon–Kertajati (sektor industri prioritas: industri dirgantara) • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang • Pengembangan Kertajati *Aerocity* • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya • Pengembangan Kota Agropolitan Cirebon

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Perkotaan Tasikmalaya • Kota Tasikmalaya	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Tasikmalaya, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Persiapan pembangunan jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya • Pengembangan kota agropolitan Tasikmalaya
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Priangan Barat • Kab. Bogor • Kab. Sukabumi • Kab. Cianjur	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Cipamingkis dan D. I. Ciletuh • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Kali Bekasi, DAS Angke-Pesanggrahan, dan DAS Cimandiri • Pembangunan Bendungan Cibeet • Pembangunan Bendungan Cijurey • Penetapan wilayah panas bumi di Kabupaten Cianjur • Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Citaman Sakti (Kab. Sukabumi) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citarum-Cimanuk-Cisanggarung • Kab. Bekasi • Kab. Karawang • Kab. Purwakarta • Kab. Bandung Barat • Kab. Bandung • Kab. Subang • Kab. Indramayu • Kab. Sumedang	• Pembangunan jaringan irigasi pada D.I. Cikawung • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Jatiluhur, D. I. Rentang, D. I. Cihea, D. I. Cikeusik, D. I. Seuseupan, D.I. Bendung Carian, D.I. Rengrang • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Revitalisasi sentra/kluster komoditas unggulan air payau di pantai utara • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Citarum, DAS Cipunagara, DAS Cimanuk, DAS Kali Cilet, DAS Kali Pangkalan, DAS

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Cirebon • Kab. Kuningan • Kab. Majalengka	Cisanggarung, DAS Cipager, DAS Kali Kesunean, Waduk Jatiluhur, Waduk Cirata, Waduk Saguling, Waduk Jatigede, Waduk Darma, Waduk Sadawarna, Waduk Cipancuh, Situ Lembang, Situ Patenggang, Situ Cisanti, dan Situ Cipanunjang-Cileunca • Pembangunan kilang minyak bumi Balongan • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Citanduy-Ciwulan-Cilaki • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Ciamis • Kab. Pangandaran	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Manganti dan D. I. Lakbok Utara • Pembangunan pengaman Pantai Bojongsalawe • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan perikanan • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau, terutama pada DAS Ciwulan, DAS Citanduy, DAS Cijulang, Situ Bagendit, Situ Gede • Pengembangan Kawasan Perdesaan Industri Bambu Kreatif Selaawi (Kab. Garut) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Garut • Kab. Tasikmalaya • Kab. Cianjur	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan • Peningkatan 6A pariwisata di Santolo, Leuweung Sancang, dan Bojonglarang Jayanti • Peningkatan/pembangunan jalan ruas Garut–Cikajang–Pameungpeuk, Cidaun–Ciwidey–Soreang, Sindangbarang, dan jalan lintas selatan Jawa Barat • Penguatan balai uji teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer di Pameungpeuk, serta penguatan kawasan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			Pameungpeuk sebagai kawasan pertahanan dan keamanan matra udara • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota
		Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Cirebon-Majalengka • Kab. Cirebon • Kab. Majalengka	• Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu) • Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu) • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu) • Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu)
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Indramayu-Cirebon • Kab. Cirebon • Kab. Indramayu	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Eretan dan PPN Kejawanan • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Indramayu–Cirebon
		Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak, TN Gede-Pangrango, TN Ciremai, dan *Geopark* Ciletuh • TN Halimun-Salak: Kab. Bogor, Kab. Sukabumi • TN Gede-Pangrango: Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Sukabumi • TN Ciremai: Kab. Kuningan, Kab. Majalengka • *Geopark* Ciletuh: Kab. Sukabumi	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana • Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana
		Kawaaan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Barat	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		Provinsi Jawa Barat	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba; ○ Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan-(PLTM) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik–dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jawa Barat, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pendalaman sektor keuangan, melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Peningkatan akses pangan bergizi, melalui: ○ Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pangan bergizi melalui penguatan program subsidi pangan dan bantuan sosial pangan ○ Pengembangan sektor pertanian berbasis agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan petani miskin • Pendidikan inklusif dan berkualitas, melalui: ○ Revitalisasi sekolah dan peningkatan akses pendidikan untuk anak-anak miskin dan penyandang disabilitas. ○ Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ○ Pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dengan pendekatan berbasis komunitas dan digitalisasi sistem pendidikan • Peningkatan layanan kesehatan, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Program pencegahan dan penurunan *stunting* melalui edukasi gizi, layanan kesehatan gratis, dan intervensi dini bagi anak-anak berisiko ○ Meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dengan memperbanyak fasilitas kesehatan dan tenaga medis di daerah pelosok • Peningkatan akses air bersih dan sanitasi di perkampungan miskin untuk mengurangi risiko penyakit yang berkaitan dengan lingkungan • Pengembangan sektor industri untuk penyediaan lapangan kerja, melalui: ○ Optimalisasi kawasan industri Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta-Subang untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat miskin ○ Peningkatan pelatihan vokasi dan sertifikasi tenaga kerja agar masyarakat miskin lebih mudah mendapatkan pekerjaan di sektor industri ○ Pemberdayaan UMKM dan industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi ketimpangan sosial • Percepatan digitalisasi dan literasi keuangan, melalui: ○ Penyediaan pelatihan literasi keuangan bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan ○ Digitalisasi sistem perbankan dan pemberian akses kredit usaha mikro untuk mendorong wirausaha di kelompok masyarakat miskin • Peningkatan akses internet dan infrastruktur digital di daerah tertinggal agar masyarakat dapat memanfaatkan ekonomi digital
100	Perubahan Subbab 4.3.4 Provinsi Jawa Tengah dalam halaman 204 sampai dengan 207	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 4,9 | 50,9 | 8,2 | 9,00–9,66 | 0,362–0,367 | 0,62 | 0,32 | 75,68 | 4,42–4,81 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus • Kota Semarang • Kota Salatiga • Kab. Semarang • Kab. Kendal • Kab. Demak • Kab. Kudus	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Semarang, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Semarang ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di WM Semarang melalui layanan BRT dan layanan kereta komuter • Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak • Penyiapan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan di WM Semarang, termasuk penerapan NBS, SIH3, dan FEWS • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Semarang • Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta–Surabaya • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang • Pengembangan koridor industri Kendal–Semarang–Demak–Kudus (sektor industri prioritas: industri nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, industri logam dasar besi dan baja, industri kimia, industri tekstil dan produk tekstil) • Hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, molase, bagasse, serta produk hilirisasi lanjutan tebu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik • Pengembangan KI Seafer (Kab. Kendal) • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Demak • Pengembangan Pelabuhan *New Tanjung Mas-Kendal Seaport* • Pembangunan Tanggul Pantai/Laut Kendal–Semarang–Demak dan Pengembangan Kawasan Pesisir Semarang–Demak • *Urban renewal* Kota Tua Semarang • Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi di kawasan perkotaan WM Semarang (PHTC) • Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal) • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang • Kota Pekalongan • Kab. Pekalongan • Kab. Batang • Kab. Tegal	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Pekalongan–Batang, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Pengembangan koridor industri Batang (sektor industri prioritas: hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, industri logam dasar besi dan baja, industri kimia, industri semikonduktor, hilirisasi nikel, serta industri tekstil dan produk tekstil) • Pengembangan KIT Batang, termasuk infrastruktur pendukungnya seperti jalan, sistem penyediaan air baku dan air minum, telekomunikasi, *dry port*, pelabuhan, dan sebagainya • Pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang • Pengembangan kota agropolitan Pekalongan
		Kawasan Perkotaan Surakarta dan Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo • Kota Surakarta • Kab. Boyolali • Kab. Karanganyar • Kab. Sukoharjo	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Surakarta, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan SPAM Regional Wosusokas • Pengembangan koridor industri Surakarta–Boyolali–Karanganyar–Sukoharjo (sektor industri prioritas: industri tekstil dan produk tekstil) • Pembangunan Jalan Tol Kartasura–Klaten–Yogyakarta • Pengembangan Kota Agropolitan Surakarta • Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Surakarta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Pariwisata Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar • Kota Surakarta • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar	• *Urban renewal* Kota Tua Surakarta dan revitalisasi Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegara • Peningkatan 6A Pariwisata pada *hotspot* pariwisata: Sangiran, Tawangmangu, dan Cetho–Sukuh
		Kawasan Perkotaan Purwokerto • Kab. Banyumas	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Purwokerto, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan Kota Agropolitan Purwokerto
		Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap • Kab. Cilacap	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilacap, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Preservasi jalan ruas Cilacap–Kebumen–Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah) • Pengembangan Kota Agropolitan Cilacap • Pengembangan Pelabuhan Cilacap • Pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap • Pengembangan koridor industri (sektor industri prioritas: industri kimia, industri semen dan bahan konstruksi) • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Cilacap melalui pembiayaan SBSN
		Kawasan Perkotaan Rembang • Kab. Rembang	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Rembang, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan pelabuhan perikanan • Preservasi jalan ruas Rembang–Blora • Persiapan pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban • Pengembangan Kota Agropolitan Rembang
		Kawasan Pariwisata Borobudur-Dataran Tinggi Dieng (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) • Kota Magelang • Kab. Magelang • Kab. Wonosobo • Kab. Temanggung	• Peningkatan 6A Pariwisata Kawasan Borobudur • Peningkatan 6A Pariwisata, pada Dataran Tinggi Dieng dan Kompleks Percandian Dieng dan Museum Kaliasa • *Urban renewal* Kota Wisata Magelang, Wonosobo, dan Temanggung • Pengembangan Kawasan Perdesaan Margomarem (Kab. Wonosobo) • Pembangunan Jalan Tol Bawen–Magelang–Yogyakarta • Preservasi jalan ruas Borobudur–Wonosobo–Banjarnegara–Purbalingga–Purwokerto • Preservasi jalan ruas Wonosobo–Parakan–Temanggung–Secang • Preservasi jalan ruas Pemalang–Pekalongan–Batang–Weleri

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Banjarnegara	• Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RST Tk. II dr. Soedjono (Kota Magelang) • Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Tingal
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tuntang-Serang-Lusi-Juwana • Kab. Semarang • Kab. Demak • Kab. Jepara • Kab. Kudus • Kab. Pati • Kab. Grobogan • Kab. Blora • Kab. Rembang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Glapan, D. I. Klambu, D. I. Jragung • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, dan Waduk Kedungombo • Pembangunan Bendungan Karangnongko • Pembangunan Bendungan Cabean • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Dieng-Serayu-Bogowonto • Kab. Wonosobo • Kab. Banjarnegara • Kab. Purbalingga • Kab. Banyumas • Kab. Cilacap • Kab. Kebumen • Kab. Purworejo	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Singomerto, D. I. Serayu, D. I. Wadaslintang, dan D.I. Slinga • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau • Pembangunan Bendungan Bener • Pengembangan pabrik ekstraksi litium dari fluida panas bumi di Dataran Tinggi Dieng • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Pemali-Comal • Kab. Brebes • Kab. Tegal • Kab. Pemalang • Kab. Pekalongan • Kab. Batang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Waduk Malahayu, dan D. I. Gung • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Wawar/Medono, DAS Bogowonto, Waduk Wadaslintang, Waduk Sempor, dan Waduk Mrica • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Tengah • Kab. Wonogiri • Kab. Sukoharjo • Kab. Klaten • Kab. Boyolali • Kab. Sragen • Kab. Karanganyar • Kab. Blora	• Pembangunan jaringan Irigasi D.I. Pidekso • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu, Waduk Gajahmungkur, dan Waduk Cengklik • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng • Kab. Rembang • Kab. Pati • Kab. Blora • Kab. Sragen	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Pati-Rembang • Kab. Pati • Kab. Rembang	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Bajomulyo dan PPN Tasik Agung • Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Cilacap • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pati-Rembang • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Cilacap • Kab. Cilacap	• Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Pati dan Rembang • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi rumput laut
		Kawasan Afirmasi Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Brebes	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian dan peternakan • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Konservasi TN Merbabu • Kab. Magelang • Kab. Boyolali • Kab. Semarang	• Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		Kawasan Konservasi TN Karimunjawa • Kab. Jepara	• Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		Kawasan Konservasi *Geopark* Kebumen • Kab. Kebumen	• Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan • Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi • Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Provinsi Jawa Tengah	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Jenderal Soedirman melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Walisongo Semarang melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana UIN Salatiga melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kudus melalui pembiayaan SBSN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pendalaman sektor keuangan, melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak • Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, melalui penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas • Perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dan nelayan melalui Kartu Usaha, guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian • Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya • Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
101	Perubahan Subbab 4.3.5 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam halaman 208 sampai dengan 210	Sasaran Pembangunan Provinsi D.I Yogyakarta Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. **Lokasi Prioritas** Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Yogyakarta, dan Kawasan Aerotropolis YIA (bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan) • Kota Yogyakarta • Kab. Sleman • Kab. Kulonprogo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul ***Highlight* Indikasi Intervensi** • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Yogyakarta, melalui: o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pembangun Pantai Congot Kab. Kulon Progo • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Klaten–Kartasura • Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Magelang–Bawen • Persiapan pembangunan Jalan Tol Yogyakarta–Kulonprogo (YIA) • *Urban Renewal* Kota Tua Yogyakarta, Kotagede, dan Revitalisasi Keraton Yogyakarta, Pura Pakualaman, dan Kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Universitas Gadjah Mada • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta–Bantul–Parangtritis, Yogyakarta–Kaliurang, Yogyakarta–Wonosari • Pengembangan Kawasan Aerotropolis YIA (*Yogyakarta International Airport*) • Peningkatan 6A Pariwisata, terutama pada *hotspot* pariwisata: o Percandian Prambanan–Sewu o Keraton Ratu Boko o Kaliurang–Merapi o Pantai selatan Bantul–Kulonprogo

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Perbukitan Menoreh ○ *Geopark* Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul ○ Kasongan–Selarong ○ Imogiri • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Kawasan Swasembada Pangan dan Air Progo-Opak • Kab. Sleman • Kab. Kulon Progo • Kab. Gunungkidul • Kab. Bantul	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Kalibawang • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan) • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra perikanan • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Serang, DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Bribin • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah SPAM Kamijoro Kabupaten Kulon Progo • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Gunungkidul	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, listrik), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: pertanian hortikultura dan peternakan • Peningkatan 6A pariwisata di *Geopark* Gunung Sewu, termasuk pantai-pantai dan sistem geomorfologi karst Gunungkidul • Pembangunan jalan lintas selatan Gunungkidul–Wonogiri • Peningkatan/preservasi jalan ruas Yogyakarta–Wonosari–Semanu–Pracimantoro
		Kawasan Konservasi TN Gunung Merapi • Kab. Sleman	• Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di D. I. Yogyakarta	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		Provinsi DI Yogyakarta	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah 12 Tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah, melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia ○ Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pendalaman sektor keuangan, melalui: ○ Penguatan peran perbankan ○ Penguatan peran sektor keuangan nonbank ○ Peningkatan inklusi dan literasi keuangan • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. • Pemberdayaan komunitas lokal dalam sektor pariwisata, melalui program desa wisata berbasis budaya, pelatihan keterampilan, dan penguatan ekosistem ekonomi kreatif • Peningkatan akses modal dan pelatihan bagi UMKM ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan, dengan dukungan program pendampingan berbasis komunitas • Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya • Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
102	Perubahan Subbab 4.3.6 Provinsi Jawa Timur dalam halaman 210 sampai dengan 213	Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Bangkalan • Kab. Pasuruan	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Surabaya, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Surabaya ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan RTH ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan ○ Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan Kawasan Perkotaan Gresik (tematik kota industri) sebagai kota satelit dari WM Surabaya, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Surabaya dan pengembangan *Surabaya Regional Railway Line* Fase 1 • Persiapan pembangunan Jalan Tol Surabaya *East Ring Road* (Bandara Juanda-Kenjeran) • Persiapan pembangunan Jalan Tol Gresik–Lamongan–Tuban • Pengembangan *World Class Research University* berbasis potensi wilayah pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember • Pengembangan koridor industri Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan (sektor industri prioritas: hilirisasi nikel, hilirisasi timah, hilirisasi kelapa, hilirisasi rumput laut, hilirisasi sawit, industri tekstil dan produk tekstil industri kimia, hilirisasi tembaga, industri logam dasar, besi, dan baja) • Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Pengembangan KEK Gresik dan pengembangan KI i-Sentra@Lamongan • Pembangunan Pabrik Amonia Urea III Petrokimia Gresik (PKG) • Pembangunan Pabrik *Soda Ash* Petrokimia Gresik (PKG) • *Urban Renewal* Kota Tua Surabaya • Revitalisasi Kawasan Purbakala Situs Keraton Majapahit Trowulan • Pengembangan SPALD Perkotaan Kab. Gresik • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
Kawasan Perkotaan Malang-Batu, Kawasan Pengembangan Industri Malang-Singasari-Lawang, dan Kawasan Pariwisata Unggulan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Malang-Batu, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • *Urban Renewal* Kota Wisata Batu • Pengembangan koridor industri Malang–Singasari–Lawang (sektor industri prioritas: industri tekstil dan produk tekstil)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Bromo-Tengger-Semeru dan Lingkar Kawi (Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru) • Kota Malang • Kota Batu • Kab. Malang • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Blitar	• Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan balai latihan kerja sesuai kebutuhan industri wilayah dan kebutuhan keahlian industri di negara penempatan pekerja migran Indonesia sesuai *job order* • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Malang Melalui Pembiayaan SBSN • Pengembangan KEK Singasari • Pengembangan Kota Agropolitan Malang–Batu • Peningkatan 6A Pariwisata Malang–Bromo–Tengger–Semeru • Preservasi jalan ruas Malang–Batu dan Malang–Bromo • Pembangunan infrastruktur pengendalian sedimen dan lahar Gunung Semeru • Pembinaan melalui pelatihan kapasitas SDM Pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan • Pengurangan risiko bencana Gunung Semeru
		Kawasan Perkotaan Kediri • Kota Kediri • Kab. Kediri	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Kediri, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Kediri • Pembangunan Jalan Tol Kertosono–Kediri • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Kediri–Tulungagung–Trenggalek dan Kediri–Tulungagung–Blitar
		Kawasan Perkotaan Madiun • Kota Madiun • Kab. Madiun • Kab. Magetan	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Madiun, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan Kota Agropolitan Madiun • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Madiun–Magetan dan Madiun–Ponorogo–Pacitan • Pengembangan Kawasan Industri Ngawi, sebagai *hinterland* dari Kawasan Perkotaan Madiun • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RSAU dr. Efram Harsana (Kab. Magetan) • Revitalisasi Sarana dan Prasarana Politeknik Negeri Madiun Melalui Pembiayaan SBSN
		Kawasan Perkotaan Jember • Kab. Jember	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jember, melalui: ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan kota agropolitan Jember • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember–Bondowoso–Situbondo, dan Jember–Lumajang
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Bengawan Solo Jawa Timur • Kab. Pacitan • Kab. Ponorogo • Kab. Magetan • Kab. Madiun • Kab. Ngawi • Kab. Bojonegoro • Kab. Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Gresik	• Pembangunan jaringan Irigasi pada D.I. Tugu • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan pada D. I. Asin Bawah, D.I. Bendo, dan D. I. Pacal • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Kali Madiun, Sub-DAS Bengawan Solo Hilir, DAS Grindulu, DAS Prumpung, DAS Kali Lamong, dan DAS Kali Corong, Waduk Pacal, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Prijetan, dan Telaga Sarangan • Pengembangan kilang minyak bumi GRR Tuban • Pembangunan kilang olefin di Tuban • Pengembangan *biofuel* dari metanol dan etanol di Bojonegoro • Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gresik-Lamongan-Tuban-Rembang • Preservasi jalan ruas Bojonegoro–Babad–Lamongan–Gresik dan Tuban–Babad • Pengembangan kawasan prioritas organik bernutrisi Lereng Gunung Lawu (Kab. Karanganyar) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Brantas • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Nganjuk • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo • Kab. Tulungagung	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada D. I. Delta Brantas, D.I. Bendung Jatimlerek, D.I. Siman, dan D. I. Waduk Bening • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Pengembangan sentra/kawasan perikanan • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Trenggalek	• Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub-DAS Brantas Hulu, Sub-DAS Lekso, Sub-DAS Konto, Sub-DAS Brangkal, Waduk Karangkates, Waduk Widas, Waduk Selorejo • Peningkatan operasi dan pemeliharaan bendungan-bendungan pada DAS Brantas • Pembangunan Bendungan Bagong • Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata pertanian terpadu Kecamatan Gondang (Kab. Mojokerto) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Lumajang • Kab. Jember • Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso • Kab. Banyuwangi	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Baru dan D.I Bajulmati • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS Sampean, dan DAS Tempuran-Kedungbajul • Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi • Pembangunan jaringan perpipaan (mendukung Sebaif Grati) • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, serta peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) • Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Madura melalui pembiayaan SBSN
		Kawasan Afirmasi Madura dan Kepulauan (Percepatan Pengentasan Kemiskinan) dan Kawasan Perkotaan Sumenep	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Preservasi jalan lintas selatan Madura dan jalan lintas utara Madura • Pengembangan jaringan/daerah irigasi baru di WS Madura

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	

		• Kab. Bangkalan
		• Kab. Sampang
		• Kab. Pamekasan
		• Kab. Sumenep
			• Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan dan peternakan
			• Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam
			• *Replacement* fasilitas Pelabuhan Sapudi
			• Peningkatan fasilitas Pelabuhan Keramaian (Pulau Masalembu)
			• Peningkatan fasilitas Pelabuhan Panarukan
			• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sumenep, melalui:
			  ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
			  ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
			  ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan
			• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota
			• Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
			• Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan

		Kawasan Afirmasi Pegunungan Sewu Jawa Timur (Pemerataan Pembangunan) • Kab. Pacitan • Kab. Trenggalek	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Penyelesaian pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur dan preservasi jalan lintas selatan Wonogiri–Pacitan–Trenggalek–Tulungagung, serta jalan ruas Ponorogo–Pacitan dan Ponorogo–Trenggalek • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan, pertanian, dan perkebunan • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang • Kab. Malang • Kab. Blitar • Kab. Kediri • Kab. Jombang • Kab. Mojokerto • Kab. Sidoarjo	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan
		Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda • Kab. Lumajang • Kab. Jember	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Situbondo • Kab. Bondowoso	
		Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Pegunungan Kendeng-Lingkar Lawu • Kab. Ngawi • Kab. Magetan	
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Trenggalek-Tulungagung • Kab. Trenggalek • Kab. Tulungagung	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Tamperan dan PPN Prigi • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pacitan, Trenggalek, dan Tulungagung • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan *input* produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Lamongan-Tuban • Kab. Lamongan • Kab. Tuban	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Brondong dan PPP Bulu • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Lamongan dan Tuban
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Sumenep • Kab. Sumenep	• Pengembangan pelabuhan perikanan Pelabuhan Perikanan Pasongsongan • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Sumenep • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi rumput laut
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Banyuwangi • Kab. Banyuwangi	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Muncar • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya, terutama pada komoditas lobster air laut yang memiliki nilai jual tinggi (*high-value commodity*)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya air payau dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan • Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi rumput laut
		Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru • Kab. Pasuruan • Kab. Probolinggo • Kab. Malang • Kab. Lumajang Kawasan Konservasi TN Meru Betiri • Kab. Jember • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi TN Alas Purwo • Kab. Banyuwangi Kawasan Konservasi TN Baluran • Kab. Situbondo	• Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi • Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi • Peningkatan layanan peringatan dini
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sesar Darat di Jawa Timur	• Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
		Provinsi Jawa Timur	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Penguatan infrastruktur perguruan tinggi, yaitu: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Kediri melalui pembiayaan SBSN ○ Pengembangan rumah sakit pendidikan di Universitas Brawijaya melalui pembiayaan PHLN ○ Pengembangan kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim melalui pembiayaan PHLN • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penuntasan TBC ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Pemetaan potensi energi baru dan terbarukan • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Optimalisasi perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif melalui: ○ Peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial berbasis data tunggal kemiskinan ○ Peningkatan cakupan jaminan sosial bagi pekerja rentan ○ Penguatan program agar lebih adaptif dalam kedaruratan seperti bencana alam, nonalam, serta perubahan iklim • Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program keterampilan kerja dan kewirausahaan ○ Peningkatan kesempatan kerja bagi penduduk miskin utamanya di wilayah kantong kemiskinan ○ Akses pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja ○ Fasilitasi akses pembiayaan inklusif dan modal usaha bagi kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan skala dan daya saing bisnis • Peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar dengan mengutamakan wilayah kantong kemiskinan seperti penyediaan rumah sakit terpadu di wilayah Madura
103	Perubahan Subbab 4.3.7 Provinsi Banten dalam halaman 214 sampai dengan 217	Sasaran Pembangunan Provinsi Banten LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 5,3 | 75,1 | 4,0 | 4,50-5,50 | 0,344-0,365 | 0,56 | 43,36 | 66,92 | 6,87-7,24 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Cilegon-Serang, Kawasan Pengembangan Industri Cilegon-Serang-Tangerang , dan *Jakarta-Tangerang*	• Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Cilegon–Serang, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Pengembangan koridor industri Cilegon–Serang–Tangerang (sektor industri prioritas: hilirisasi timah, hilirisasi kelapa,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		International Business Corridor • Kota Cilegon • Kota Serang • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kota Tangerang • Kota Tangerang Selatan	hilirisasi kelapa sawit, industri kimia, industri logam dasar, besi, dan baja, serta industri tekstil dan produk tekstil) • Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (kelapa sawit), dan pengembangan Kawasan Industri Krakatau *Industrial Estate* Cilegon (industri kimia dan logam dasar) • Hilirisasi lanjutan sawit bioplastik, bioavtur, *graphene*, dan surfaktan • Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas • Pengembangan Pelabuhan Ciwandan–Cigading • Perencanaan dan penyiapan pembangunan Interkoneksi Sumatera–Jawa • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD provinsi dan kabupaten/kota • Preservasi Jalan Merak–Batas Kota Cilegon • Pengembangan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten (KEK BSD) • Pembangunan Jalan Tol Serpong–Balaraja • Pembangunan Jalan Tol Kamal–Teluk Naga–Rajeg–Balaraja • Pengembangan kawasan perdesaan prioritas Kab. Serang • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Kawasan Pariwisata Unggulan Labuan-Tanjung Lesung	• Peningkatan 6A pariwisata di KEK Tanjung Lesung dan *urban renewal* Labuan • Preservasi jalan ruas Panimbang-Labuan, Panimbang–Tanjunglesung, dan Panimbang–Sumur–Ujungkulon (via pesisir) • Pengembangan pelabuhan perikanan PPP Labuan • Pembangunan Jalan Tol Serang–Rangkasbitung–Panimbang
		Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Banten • Kab. Serang • Kab. Tangerang • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang	• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, pada D. I. Cisadane, D. I. Ciujung, D. I. Cidurian, dan D.I. Cibaliung • Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Ciujung, DAS Cibanten, DAS Cidurian–Cimanceuri, DAS Cibungur–Ciliman, DAS Cibaliung, serta DAS Cikadubuluh–Cipuntenageung–Cibama • Pembangunan *Interbasin Transfer System* Banten • Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Banten Selatan	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		(Percepatan Pengentasan Kemiskinan) • Kab. Lebak • Kab. Pandeglang	distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan: perikanan, pertanian tanaman pangan, dan pertanian hortikultura • Peningkatan 6A pariwisata di Sawarna dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy (Baduy Luar) • Peningkatan/pembangunan jalan ruas Panimbang–Muarabinuangeun, Muarabinuangeun–Malingping–Bayah–Sawarna–Palabuhanratu, Cikulur–Ciboleger • Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD dan kabupaten/kota • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan
		Kawasan Konservasi TN Ujung Kulon • Kab. Pandeglang Kawasan Konservasi TN Halimun-Salak • Kab. Lebak	• Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan
		Provinsi Banten	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, termasuk penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan intervensi pendukung lainnya • Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui: ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Perluasan penggunaan kendaraan listrik dan pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan • Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi • Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha • Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
104	Perubahan Subbab 4.4.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Bali-Nusa Tenggara Tahun 2025 dalam halaman 217	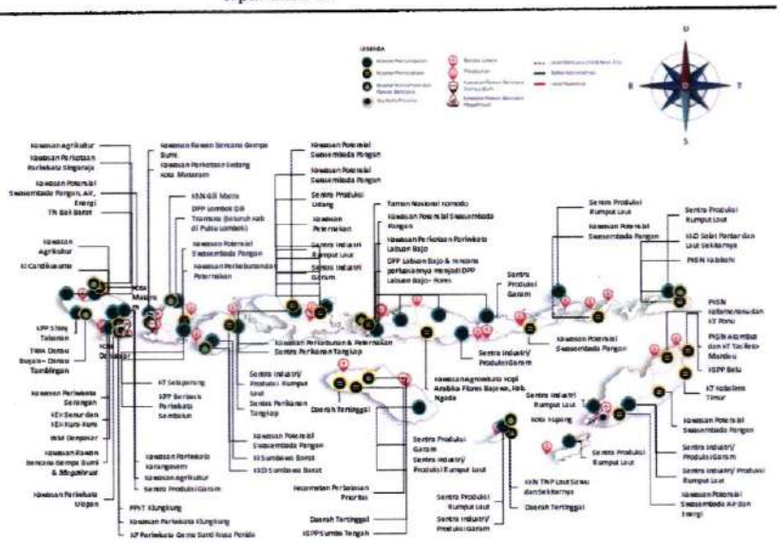
105	Perubahan Subbab 4.4.2 Provinsi Bali dalam halaman 218 sampai dengan 220	Sasaran Pembangunan Provinsi Bali LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025 | 5,7 | 72,6 | 1,4 | 3,37-3,93 | 0,355-0,359 | 0,61 | 5,36 | 76,19 | 1,87-2,35 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		WM Denpasar • Kota Denpasar • Kab. Badung • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar	• Peningkatan kualitas dan penataan WM Denpasar, melalui: ○ Pembentukan kelembagaan pengelolaan WM Denpasar ○ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu ○ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan • Penyusunan *metropolitan statistical area* • Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan WM Denpasar • Bali *Beach Conservation Project II* • Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi unggulan di tingkat regional pada Universitas Pendidikan Ganesha melalui revitalisasi sarana dan prasarana yang dibiayai SBSN • Pengembangan Pelabuhan Benoa (BMTH *Development Area 2*) • Pengembangan KEK Sanur • Pengembangan KEK Kura-Kura Bali • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Singapadu–Sanur–Benoa • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Mengwi–Canggu • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Bali (Destinasi Pariwisata Regeneratif Bali) • Kota Denpasar • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Gianyar • Kab. Bangli • Kab. Klungkung • Kab. Karangasem	• Peningkatan 6A pariwisata pada *hotspot* pariwisata Bali: ○ Ubud–Tegallalang–Payangan (Ulapan) ○ Kintamani–Danau Batur ○ Besakih–Gunung Agung ○ Singaraja–Lovina (termasuk *urban renewal* kawasan perkotaan Singaraja menuju kota pariwisata pusaka) ○ Bedugul–Kuta–Canggu–Sanur–Nusadua ○ TNBB–Menjangan–Pemuteran ○ Amuk–Candidasa ○ Nusapenida • Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk–Mengwi • Perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Tol Singapadu–Ubud–Gianyar–Bangli–Kintamani–Bandara Internasional Bali Baru/Bali Utara–Singaraja • Pengembangan kawasan pariwisata Ulapan, termasuk perencanaan dan persiapan pembangunan Jalan Lingkar Ulapan • Pembangunan pusat kebudayaan Bali di Klungkung • Kawasan perdesaan Shiny Tabanan • Pengurangan risiko bencana gunung api di Gunung Agung • Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual
		Rintisan Kawasan Pengembangan Industri Candikusuma-Pengambengan • Kab. Jembrana	• Penguatan dan integrasi pendidikan/pelatihan dengan kebutuhan industri pada SMKN 2 Negara dan BLK Jembrana
		Kawasan Swasembada	• Rehabilitasi dan Peningkatan D. I. Tukad Saba dan D. I. Tukad Yeh Hoo

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Pangan, Air, dan Energi Bali-Nusapenida • Kab. Badung • Kab. Buleleng • Kab. Jembrana • Kab. Tabanan • Kab. Gianyar • Kab. Tabanan • Kab. Karangasem • Kab. Klungkung	• Peningkatan daya guna lahan pertanian • Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas peternakan melalui pengembangan kawasan terintegrasi • Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati • Konservasi sumber daya air, dengan *output*: pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial • Peningkatan pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Badung, DAS Ayung, DAS Yeh Penet-Yeh Empas, DAS Oos-Petanu-Pakerisan, DAS Loloan, DAS Unda, DAS Daya, DAS Saba, Danau Buyan, Danau Beratan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur • Pembangunan PLTS Bali Timur • Pengembangan sentra/kawasan produksi perikanan dan pengembangan *broodstock center* udang di Kab. Karangasem • Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan penyediaan prasarana produksi, peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pascapanen • Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama • Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru Jembrana • Kab. Jembrana	• Pengembangan pelabuhan perikanan PPN Pengambengan • Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Jembrana • Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap • Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya • Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat • Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan • Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan • Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		Kawasan Komoditas Unggulan Kopi Bangli-Buleleng • Kab. Bangli • Kab. Buleleng Kawasan Komoditas Unggulan Anggur Buleleng • Kab. Buleleng	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan • Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		Kawasan Afirmasi Nusapenida (Daerah Terdepan dan Percepatan Pemerataan Pembangunan) • Kab. Klungkung	• Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi dan listrik perdesaan), serta peningkatan ketahanan air, energi, dan pangan • Peningkatan ketahanan bencana • Pemberdayaan aktivitas ekonomi *high value* unggulan • Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			• Penguatan Pulau Nusapenida sebagai kawasan pertahanan dan keamanan lintas matra dalam rangka peningkatan kekuatan TNI di sekitar ALKI-2 • Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Pemanfaatan sumber daya biota laut dan ekosistem pesisir secara berkelanjutan • Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan • Kawasan Perdesaan Pariwisata Gema Santi Nusapenida
		Kawasan Konservasi TN Bali Barat • Kab. Jembrana • Kab. Buleleng Kawasan Konservasi TWA Gunung Batur-Bukit Payang • Kab. Bangli Kawasan Konservasi TWA Danau Buyan-Danau Tamblingan • Kab. Tabanan • Kab. Buleleng	• Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati • Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan dan satwa • Penguatan pengelolaan hutan lestari • Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan • Perlindungan dan pengamanan hutan

		Provinsi Bali	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
			• Pemberian makan bergizi di sekolah, madrasah, dan dayah/pesantren, serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
			• Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), melalui:
			  ○ Perluasan layanan pendidikan anak usia dini
			  ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan
			  ○ Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran
			  ○ Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
			• Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui:
			  ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak
			  ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil
			  ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro
			  ○ Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis
			• Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui:
			  ○ Penuntasan TBC

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik ○ Penyehatan lingkungan ○ Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ○ Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah, dan penanganan bencana ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi • Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui: ○ Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan ○ Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan • Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, melalui: ○ Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan ○ Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA • Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui: ○ Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTS) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Penerapan jaringan cerdas (*smart grid*) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi ○ Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik ○ Penerapan *Internet of Things* (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara *real-time* ○ Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Percepatan transformasi digital, melalui: ○ Perluasan infrastruktur digital ○ Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital ○ Pembangunan jaringan *broadband* hingga ke pelosok • Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan infrastruktur pemerintahan digital ○ Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN ○ Digitalisasi layanan publik prioritas ○ Pengembangan ekosistem layanan publik digital • Penguatan reformasi hukum, melalui: ○ Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) ○ Penanggulangan judi dan penyelundupan ○ Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ○ Penguatan pengawasan dan penindakan imigrasi • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan, melalui: ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya ○ Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan ○ Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pengembangan layanan kesejahteraan sosial berbasis komunitas bagi lansia dalam mendukung kesejahteraan di provinsi yang memasuki *aging population* • Penguatan layanan home care dan kesehatan geriatri yang berorientasi pada pencegahan penyakit kronis dan peningkatan kualitas hidup lansia, terutama di daerah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan • Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
106	Perubahan Subbab 4.4.3 Provinsi Nusa Tenggara Barat halaman 221 sampai dengan 223	Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan DPP Lombok Gili-Tramena • Kota Mataram • Kab. Lombok Utara • Kab. Lombok Barat • Kab. Lombok Tengah • Kab. Lombok Timur	• Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas destinasi pariwisata khususnya wisata petualangan pada kawasan prioritas (DPP Lombok - Gili Tramena), melalui: ○ Peningkatan jalan nasional, dengan *output*: Preservasi Jalan Kuta–Senggol dan Bill Mandalika ○ Pengembangan atraksi (alam, budaya, buatan) termasuk berbasis geologi Lombok-Gili Tramena, dengan *output*: *event* MICE dalam negeri, pendukungan *event* daerah, pelaksanaan kegiatan (*events*) nasional dan internasional, jejaring destinasi pariwisata di wilayah Destinasi II yang dikembangkan, dokumen perencanaan daerah pariwisata di wilayah destinasi II yang terpadu, desa wisata yang dikembangkan, koordinasi strategis perencanaan dan pengembangan *Geopark* Rinjani ○ Pengembangan kawasan *geopark* yang diwujudkan melalui penguatan tata kelola kelembagaan, optimalisasi pendanaan dan implementasi rencana induk pengembangan *geopark* ○ Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan *output*: fasilitasi dan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM pariwisata, SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, sertifikasi SDM bidang pariwisata ○ Pemasaran pariwisata Lombok–Gili Tramena, dengan *output*: publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus, promosi terpadu (pameran, perjalanan wisata pengenan, dan kerja sama dengan maskapai dan *wholesaler*)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata Lombok-Gili Tramena, dengan *output*: fasilitasi akses pembiayaan pasar modal, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata, koordinasi implementasi *Blue, Green, Circular Economy* pada usaha pariwisata, penerapan pariwisata berkelanjutan di Destinasi Pariwisata
			○ Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus dengan, dengan *output*: pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK, peningkatan investasi kerja sama komunikasi dan sistem informasi di KEK, pelayanan investasi administrator KEK tipe A
			○ Pengurangan emisi GRK sektor pengelolaan sampah oleh pemerintah pusat, dengan *output*: bank sampah induk yang terbangun, fasilitas pengelolaan sampah spesifik, dan instalasi pengolahan air limbah
			○ Pemanfaatan secara berkelanjutan dan pengelolaan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
		Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram • Kota Mataram	• Pembangunan perkotaan nonwilayah metropolitan Kota Mataram, melalui: ○ Pembangunan kawasan perkotaan sedang ○ Pembangunan dan peningkatan SPAM ○ Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik Kota Mataram
		Kawasan Industri Sumbawa Barat • Kab. Sumbawa Barat	• Pengembangan aglomerasi industri di Kawasan Industri Sumbawa Barat, melalui: ○ Perencanaan dan perizinan KI Sumbawa Barat ○ Penataan ruang dan pengembangan konektivitas simpul transportasi KI Sumbawa Barat ○ Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan/jembatan Pal IV - KM 70, sarana prasarana perumahan/kesehatan/air bersih/listrik/pengolahan persampahan dan limbah ○ Peningkatan investasi kawasan dan pengembangan usaha serta rantai pasok ○ Penyediaan pendidikan dan pelatihan SDM ○ Peningkatan investasi hilirisasi tembaga
		Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Hasil Perkebunan • Kab. Lombok Timur • Kab. Dompu • Kab. Lombok Utara • Kab. Sumbawa	• Pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi tembakau (Kab. Lombok Timur), tebu (Kab. Dompu), kelapa (Kab. Lombok Utara), kopi (Kab. Sumbawa), melalui: ○ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Peningkatan daya saing produk perkebunan yang disertai peningkatan industri pengolahan hasil perkebunan, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan perkebunan produk hilir, fasilitas pusat penyediaan bahan baku industri tempurung dan sabut kelapa, neraca komoditas perkebunan, pengembangan industri pengolahan perkebunan, pendampingan pembiayaan usaha mikro, peningkatan peluang investasi, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi ○ Hilirisasi komoditas unggulan dan peningkatan ekspor, dengan *output*: kawasan perkebunan, kawasan kopi dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kopi internasional, kawasan kakao, hilirisasi industri pengolahan kakao dan coklat, kebun sumber benih, penanganan organisme pengganggu tumbuhan, sarana dan prasarana pengolahan dan pascapanen, sertifikasi produk ○ Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya pertanian
		Pengembangan Kawasan Peternakan	• Pengembangan kawasan peternakan melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Lombok Tengah • Kab. Lombok Timur • Kab. Sumbawa • Kab. Dompu • Kab. Bima	○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani ○ Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan mendukung penguatan kawasan peternakan
		Kawasan Sentra Garam Rakyat • Kab. Bima • Kab. Lombok Timur • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok Barat	• Pengembangan kawasan sentra garam, melalui: ○ Pengembangan garam industri terintegrasi ○ Penguatan sarana dan prasarana industri garam ○ Peningkatan produktivitas garam rakyat
		Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok Timur • Kab. Bima • Kab. Lombok Tengah • Kab. Lombok Barat	• Pengembangan sentra budidaya dan hilirisasi rumput laut, melalui: ○ Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut ○ Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi dan penguatan sumber daya manusia ○ Peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui peningkatan produktivitas budidaya rumput laut ○ Pengembangan industri dan hilirisasi rumput laut ○ Fasilitasi pembiayaan dan investasi serta penelitian ○ Pengembangan budidaya rumput spesies baru dan inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, dan pakan ternak)
		Sentra Produksi Berbasis Komoditas Udang • Kabupaten Sumbawa • Kabupaten Bima • Kabupaten Lombok Timur • Kabupaten Sumbawa Barat • Kabupaten Lombok Utara	• Pengembangan sentra akuakultur khususnya udang, melalui: ○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat di Kabupaten Sumbawa ○ Pengembangan akuakultur komoditas udang
		Pengembangan Kawasan Sentra Berbasis Perikanan Tangkap • Kab. Lombok Timur • Kab. Sumbawa • Kab. Dompu	• Penyiapan kawasan prioritas pengembangan kelautan dan perikanan pada sentra berbasis perikanan tangkap, melalui: ○ Pengembangan kelembagaan dan sarana prasarana produksi perikanan tangkap ○ Pembangunan industri pengolahan ikan
		Pengembangan Pangan Lokal • Kab. Sumbawa • Kab. Lombok Timur • Kab. Dompu • Kab. Bima	• Penguatan kemandirian daerah melalui pengembangan pangan lokal Sumbawa berbasis pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, melalui: ○ Pengembangan pangan lokal dan nabati, dengan *output*: peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH) ○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat ○ Penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen dan pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan koperasi sektor produksi, dengan *output*: peningkatan peran dan kapasitas kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi
		Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata Sembalun • Kabupaten Lombok Timur	• Pengembangan kawasan perdesaan prioritas berbasis pariwisata Sembalun, melalui: ○ Peningkatan produktivitas perdesaan, dengan *output*: fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan promosi produk unggulan, pengembangan obyek wisata desa dan perdesaan, fasilitasi penguatan tata kelola destinasi di desa wisata ○ Pengembangan fasilitas pendukung perdesaan, dengan *output*: sarana prasarana perdagangan, pelayanan dasar, konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi) ○ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi) ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
		Kawasan Transmigrasi Selaparang • Kabupaten Lombok Timur	• Pengembangan kawasan transmigrasi Selaparang di Kab. Lombok Timur, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman ○ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian ○ Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi ○ Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital
		Kawasan Konservasi • Kawasan Konservasi Nasional Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara • Kawasan Konservasi Daerah Gili Balu, Kabupaten Sumbawa Barat	• Pengembangan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K) di KKN Gili Matra, melalui: ○ Pengelolaan KKPWP3K untuk peningkatan efektivitas konservasi
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi • Kota Mataram	• Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Kota Mataram, melalui: ○ Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan *output*: peta kawasan rawan bencana gempabumi, peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensitymeter* dan *accelerograph* melalui *Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project* (IDRIP), peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui IDRIP, layanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui sekolah lapang gempabumi (SLG) wilayah timur ○ Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Provinsi Nusa Tenggara Barat	• Pengembangan kawasan pariwisata, melalui: ○ Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan *output*: preservasi jalan koridor logistik Trans Lombok pada Bayan Sembalun dan Pemenang Bayan serta Jalan Trans Sumbawa Simpang Negara-Sumbawa Besar dan perlengkapan jalan, rambu sungai, dan danau ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital • Peningkatan pengelolaan ekosistem, kawasan konservasi perairan dan pesisir, melalui: ○ Peningkatan ketahanan pesisir dan laut, dengan *output*: pengamanan pesisir 3 (tiga) Gili ○ Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil/terluar ○ Pengembangan kawasan pesisir tangguh dan pengendalian pemanfaatan ruang laut ○ Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, ○ Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi dengan *output*: penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), pengendalian kebakaran di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB) ○ Konservasi sumber daya air di DAS Dodokan Moyosari dengan *output* (i) penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; (ii) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; serta (iii) rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif • Pengelolaan risiko bencana banjir dan bencana alam lainnya di daerah berisiko tinggi serta pengelolaan tampungan air serbaguna, melalui: ○ Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dengan *output*: pembangunan pengendalian banjir Kota Bima ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan D.I. Bintang Bano serta rehabilitasi D.I. Pengga, D.I. Batu Bulan, D.I. Remening Kompleks, dan D.I. Mamak-Kakiang • Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses dan bidang pendidikan serta penguatan sumber daya manusia sesuai kebutuhan DUDI bidang pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui: ○ Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output*: layanan kerja sama nasional dan internasional, sertifikasi profesi, pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi bidang pertanian/perikanan/pariwisata/industri, kemitraan antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, satuan pendidikan yang selaras

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Mataram melalui pembiayaan SBSN • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui: ○ Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui: ○ Penguatan intervensi spesifik *stunting*, dengan *output*: Ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, Pendampingan kesehatan ibu hamil dan balita bermasalah gizi, Pelatihan pencegahan *stunting*, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi (*weight faltering, underweight*, gizi kurang), Infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial ○ Peningkatan upaya pencegahan TBC, pengendalian penyakit HIV/AIDS, malaria, dan kusta, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit, masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian ○ Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang didukung dengan penjaminan kesejahteraan ○ Peningkatan gizi, dengan *output*: pelaksanaan deteksi dini masalah gizi sebelum *stunting* terjadi serta pemberian tata laksananya, implementasi Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu, serta Penambahan Vitamin) • Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui: ○ Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional (JKN) ○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan *output*: pelatihan layanan kanker, jantung, strok, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak (KJSU-KIA), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, dan alat kesehatan layanan kanker terpadu ○ Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan • Pengembangan dan peningkatan pelabuhan/bandara serta sarana dan prasarana transportasi laut/udara dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		penyeberangan untuk penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis, melalui: ○ Pembangunan dan penguatan pelabuhan serta infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pembangunan fasilitas Pelabuhan Laut Kilo (MYC 2025–2026) ○ Penyediaan PSO dan layanan nonkomersil serta muatan barang angkutan laut tetap dan teratur, dengan *output*: layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, layanan angkutan tol laut prioritas nasional, layanan angkutan ternak prioritas nasional, layanan angkutan rede prioritas nasional, layanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru prioritas nasional • Penyediaan air minum, perumahan dan kawasan permukiman, serta peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, melalui: ○ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh ○ Pengembangan dan pengelolaan SPAM, dengan *output*: pembangunan SPAM kabupaten/kota, pembangunan SPAM regional, peningkatan SPAM kabupaten/kota, peningkatan SPAM regional, perluasan SPAM kabupaten/kota ○ Pengawasan kualitas air minum, dengan *output*: infrastruktur air minum berbasis masyarakat, tenaga terlatih pengawasan kualitas air minum, daerah yang menerapkan kebijakan tata kelola air minum, sanitasi, perumahan dan kawasan permukiman ○ Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output*: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah • Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, melalui: ○ Pengembangan ekosistem pendukung energi bersih, dengan *output*: percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon, monitoring tingkat komponen dalam negeri bidang aneka energi baru dan terbarukan ○ Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTU dan PLTM) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat, melalui: ○ Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan ○ Penguatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahiq yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan standar pelayanan minimal (SPM) ○ Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		kewirausahaan sosial, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, dan bantuan alat dan mesin pertanian prapanen ○ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam
107	Perubahan Subbab 4.4.4 Provinsi Nusa Tenggara Timur halaman 224 sampai dengan 227	Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	4,0	23,5	0,6	15,32-15,82	0,319-0,324	0,48	61,82	80,02	2,49-2,99

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat) dengan rencana perluasan menjadi DPP Labuan Bajo-Flores (Kab. Manggarai*, Kab. Ngada*, Kab. Ende*) Keterangan: *) Indikasi *key tourism area* (KTA) perluasan	• Penguatan kawasan pariwisata prioritas *existing* berkelanjutan (DPP Labuan Bajo) dan perluasannya di Pulau Flores melalui: ○ Peningkatan aksesibilitas pariwisata ○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: dukungan pelaksanaan *event* daerah, nasional, dan internasional ○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: SPALD, SPAM, pengolahan sampah berbasis 3R, infrastruktur kelistrikan, dan revitalisasi pasar rakyat ○ Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata ○ Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: promosi investasi dan promosi destinasi terpadu ○ Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta peningkatan akses pembiayaan modal ○ Peningkatan pelestarian adat, sumber daya alam, dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, perlindungan jalur jelajah satwa Komodo, penyediaan jalur evakuasi bencana, pembangunan rambu suar dan sarana bantu navigasi pelayaran, serta pengadaan ambulans laut
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat)	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo melalui: ○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota ○ Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: SPAM, SPALD, infrastruktur listrik dan TIK, PSU bidang perumahan, pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Rumput Laut)	• Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas rumput laut dengan dukungan kontribusi produksi dari kabupaten sekitarnya melalui: ○ Penguatan sentra produksi rumput laut

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Sentra Industri: • Kab. Kupang dan Kota Kupang • Kab. Sumba Timur Sentra Produksi: • Kab. Kupang • Kab. Sumba Timur • Kab. Rote Ndao • Kab. Sabu Raijua • Kab. Alor • Kab. Flores Timur	○ Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk rumput laut, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan, diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak), penyediaan peralatan/mesin pendukung pengolahan, sertifikat mutu produk, pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes, serta perluasan ekspor dan promosi produk ○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: pendidikan vokasi perikanan dan kelautan, penerapan kurikulum *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta peningkatan kapasitas untuk pengembangan produksi yang berkelanjutan ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas (*smart fisheries village*), serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan ○ Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pengembangan pelabuhan pendukung industri rumput laut, pembangunan jalan termasuk jalan akses Pelabuhan Maritaing (Erana-Maritaing), dan infrastruktur TIK ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk rumput laut, serta penerapan teknologi digital
		Kawasan Komoditas Unggulan (Komoditas Garam) Sentra Industri: • Kab. Sabu Raijua • Kab. Kupang • Kab. Nagekeo Sentra Produksi: • Kab. Sabu Raijua • Kab. Kupang • Kab. Nagekeo • Kab. Sumba Timur • Kab. Ende	• Penguatan sentra produksi serta penyiapan pengembangan sentra industri garam terintegrasi melalui: ○ Peningkatan produksi garam konsumsi dan garam industri ○ Pengembangan industri dan tata niaga/pemasaran garam konsumsi dan garam industri, dengan *output*: lahan garam yang terfasilitasi ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: korporasi petambak garam yang dikembangkan ○ Peningkatan sarana prasarana pendukung serta pengembangan inovasi teknologi ○ Peningkatan kapasitas peningkatan produksi hijau dan berkelanjutan
		• Kota Kupang (perikanan) • Kab. Sumba Timur (perikanan) • Kab. Manggarai Barat (pariwisata)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, Politeknik, dan BLK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan, pelatihan berkualitas, serta revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri berkelanjutan ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM Dikti dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *Digital Talent Scholarship*, dan pelatihan keterampilan digital dasar
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • KSPP Sumba Tengah (Kab. Sumba Tengah) • KSPP Belu (Kab. Belu)	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Belu dan KSPP Sumba Tengah melalui: ○ Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan infrastruktur ○ Pengembangan kawasan secara *on-farm*, dengan *output*: penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian ○ Pengembangan kawasan secara *off-farm*, dengan *output*: penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Manggarai Barat* (padi, pangan akuatik) • Kab. Manggarai* (padi, sapi, pangan akuatik) • Kab. Manggarai Timur* (padi, pangan akuatik) • Kab. Sikka* (pangan akuatik) • Kab. Lembata* (babi) • Kab. Timor Tengah Selatan* (jagung dan sapi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan kawasan pertanian, pangan akuatik/*bluefood* berbasis perikanan tangkap laut, dan peternakan melalui: ○ Penguatan produksi pertanian dan pangan hewani, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, areal pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan, penyaluran input komoditas peternakan termasuk hijauan pakan ternak, pengembangan kawasan bibit ternak unggul dan tahan iklim, penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan termasuk layanan kesehatan dan vaksin hewan ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian, peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan, serta pembangunan embung pertanian dan jaringan irigasi ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, penyediaan akses pembiayaan dan subsidi melalui Kartu Usaha bagi nelayan kecil, guna mendukung permodalan, modernisasi alat tangkap, dan peningkatan hasil tangkapan, pengembangan koperasi dan kelompok usaha perikanan berbasis komunitas, serta guna memperkuat daya tawar nelayan dan meningkatkan akses pasar
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Manggarai* • Kab. Kupang* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** • Kab. Timor Tengah Selatan** Keterangan:	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	
		Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Belu* • Kab. Kupang* • Kab. Nagekeo* Kawasan Rawan Air: • Kab. Manggarai Timur** • Kab. Sumba Barat Daya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki IRBI kekeringan tinggi dan merupakan lokasi prioritas atau super prioritas ketahanan iklim bidang air	• Peningkatan ketahanan air dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan melalui: a. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) b. Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Mbay dan Bendungan Manikin c. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi melalui: pembangunan D.I. Baing, serta Rehabilitasi D.I. Mena, D.I. Wae Mantar, dan D.I. Netemnanu d. Penyelamatan mata air, dengan *output*: rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air dan pengawetan sumber daya air • Penguatan kawasan rawan air dilakukan melalui penyediaan sumber air baku alternatif, dengan *output*: peningkatan kapasitas tampungan alami sumber daya air, pembangunan embung dan pengeboran sumber air di daerah terpencil rawan air
		Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal: • Kab. Sumba Tengah (pariwisata, padi, dan jagung) • Kab. Sumba Barat Daya (pariwisata dan jambu mete) • Kab. Sabu Raijua (kambing)	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: a. Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui Kartu Usaha. Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran b. Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta pariwisata, dengan *output*: pengembangan desa wisata, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: • PKSN Kefamenanu, serta Kec. Biboki Monleu, Naibenu, Mutis, dan Musi (Kab. Timor Tengah Utara) • PKSN Atambua, serta Kec. Lasiolat, Lamaknen Selatan, Tasifeto Barat, dan Nanaet Duabesi (Kab. Belu) • PKSN Kalabahi, serta Kec. Pantai Timur (Kab. Alor)	• Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, penguatan perlindungan, sarana dan prasarana komoditas pertanian, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, dan peningkatan akses pembiayaan modal ○ Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: penyusunan dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, fasilitasi kampung siaga bencana, dan pembinaan masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan
		Kecamatan Perbatasan Prioritas: • Kec. Lamboya dan Lamboya Barat (Kab. Sumba Barat) • Kec. Ngadu Ngala, Karera, Pinu Pahar, Tabundung, Katala Hamu Lingu (Kab. Sumba Timur) • Kec. Amfoang Timur, Kupang Barat, Nekamese, Amarasi Barat, Amarasi Selatan, Amarasi Timur (Kab. Kupang) • Kec. Nunkolo, Kot Olin, Kualin (Kab. Timor Tengah Selatan) • Kec. Landu Leko, Rote Timur, Pantai Baru, Rote Selatan, Lobalain, Rote Barat Daya, Rote Barat, Ndao Nuse (Kab. Rote Ndao) • Kec. Kodi Balaghar (Kab. Sumba Barat Daya) • Kec. Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara, Raijua (Kab. Sabu Raijua)	

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Kec. Kobalima Timur (Kab. Malaka)
	Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan kawasan transmigrasi: ○ KT. Ponu (Kab. Timor Tengah Utara) ○ KT Tasifeto–Mandeu (Kab. Belu) ○ KT Kobalima Timur (Kab. Malaka)
	Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • Kawasan Agrowisata Kopi Arabika Flores Bajawa - Kab. Ngada	• Pengembangan kawasan perdesaan agrowisata berbasis komoditas Kopi Flores Bajawa melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: penyediaan rumah layak huni, peningkatan SPAM, SPALD, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R ○ Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik, serta penyediaan moda transportasi desa ○ Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan dan penataan destinasi wisata lokal, serta pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agrowisata dan produk ekonomi kreatif berbasis komoditas kopi ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agrowisata
	• Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Belu (PKSN Atambua dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Malaka (Kecamatan	• Penyiapan sarana, prasarana, dan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan dasar dan menengah melalui: ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan ke satuan pendidikan ○ Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berkualitas, dengan *output*: model kurikulum yang adaptif dan kontekstual; pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan dan jaminan kesejahteraan tenaga pendidik berkualitas, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian program Indonesia pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK dengan *output* pelatihan dan sertifikasi bidang TIK

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur	
		• Kab. Sumba Barat (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Rote Ndao (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sabu Raijua (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Timor Tengah Selatan (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Sumba Tengah (Daerah Tertinggal) • Kab. Sumba Barat Daya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Kupang (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Manggarai Timur • Kab. Alor (PKSN Kalabahi dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	• Pemerataan dan peningkatan akses serta kualitas fasilitas dan layanan kesehatan melalui: ○ Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan, dengan *output*: pembangunan jalan, serta penyediaan moda transportasi layanan kesehatan bergerak ○ Peningkatan kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; serta penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, dengan *output*: pembinaan terkait layanan primer dan rujukan, pembinaan dan pendampingan layanan kesehatan bergerak, serta implementasi layanan telemedisin ○ Penguatan pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, didukung dengan penjaminan kesejahteraan
		Penanganan Penyakit TBC: • Kab. Malaka • Kab. Sumba Barat • Kab. Sumba Timur • Kab. Sabu Raijua Penanganan Penyakit Malaria: • 12 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan penemuan aktif TBC ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD
		Penanganan Penyakit Rabies: • Kab. Timor Tengah Selatan • Kab. Sikka • Kab. Ende	○ Eliminasi penyakit rabies, dengan *output*: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan obat hewan, serta operasional vaksinasi hewan
		Penanganan penyakit Kusta: Provinsi Nusa Tenggara Timur	
		Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 573 (perbatasan perairan dengan Timor Leste dan Australia)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama dalam pemberantasan IUU Fishing pada perbatasan perairan dan kerja sama dengan negara-negara tetangga untuk pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) melalui: ○ Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antar pihak dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste dan Australia ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta *illegal, unreported, unregulated* (IUU)*fishing* ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)
		Kawasan Konservasi: • TN Komodo (Kab. Manggarai Barat) • CA Wae Wuul (Kab. Manggarai Barat) • KKD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya (Kab. Alor) • TWAL Tujuh Belas Pulau (Kab. Ngada) • CA Riung (Kab. Ngada) • KKN TNP Laut Sawu dan Sekitarnya (10 Kab. di Prov. NTT)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi ○ Pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pendukung
		Provinsi Nusa Tenggara Timur	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antar pulau melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: Jalan Trans Flores, Trans Timor, dan Trans Sumba, penanganan jalan daerah dan jalan 3TP, dan jalan akses simpul transportasi ○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: Pelabuhan Kupang, Nun Baun Sabu, Wae Kelambu, Raijua, Lewoleba, Salura, Marapokot, Seba, Ndao, Baranusa, dan Wini, serta jaringan pelayaran dan sarana kapal RoRo

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: Bandara El Tari ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan konektivitas perkotaan ○ Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta kekurangan energi kronis pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output:* talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
108	Perubahan Subbab 4.5.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Kalimantan Tahun 2025 dalam halaman 228	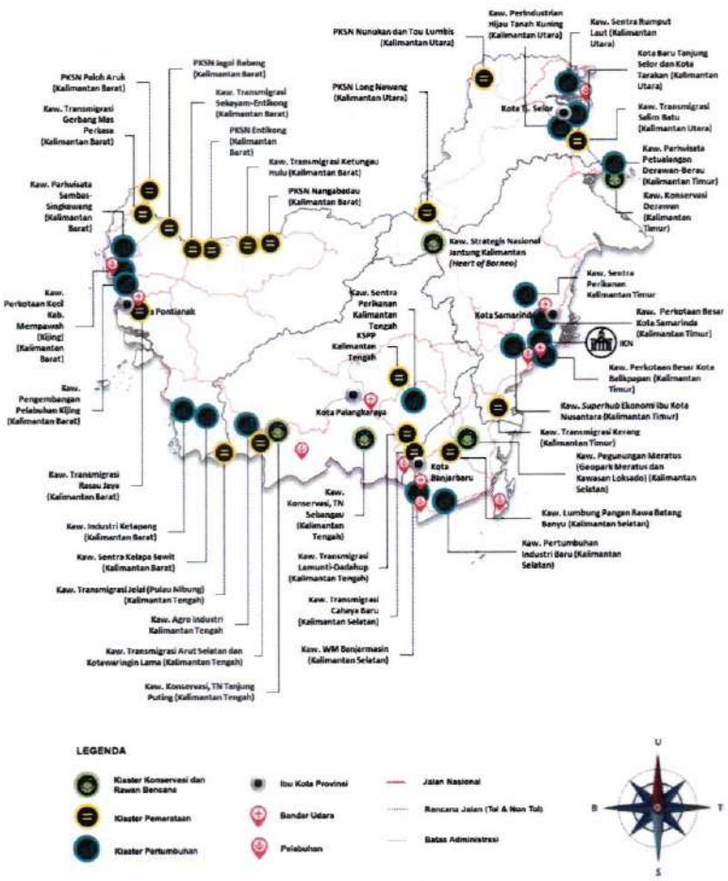
109	Perubahan Subbab 4.5.2 Provinsi Kalimantan Barat halaman 228 sampai dengan 230	Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,3	56,6	1,4	5,65-6,13	0,315-0,321	0,51	67,73	77,51	4,73-4,86

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang: • Kabupaten Sambas • Kabupaten Singkawang • Kabupaten Bengkayang	• Pengembangan kawasan pariwisata Sambas-Singkawang, melalui: o Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Perkotaan Kecil: • Kabupaten Mempawah	• Pembangunan perkotaan nonwilayah metropolitan melalui pembangunan kawasan perkotaan kecil, melalui: o Penyusunan masterplan pengembangan dan penataan kawasan yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu untuk kawasan perkotaan dan kota kecil o Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun o Penataan kawasan perkotaan dengan fokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau serta pemenuhan layanan dasar air minum o Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau o Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
		Kawasan Industri Ketapang: • Kabupaten Ketapang	• Hilirisasi dan penguatan produktivitas pusat-pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya, melalui: o Tata kelola industri dan ketersediaan bahan baku industri bauksit o Pengembangan industri hilir nikel, tembaga dan bauksit, dengan *output*: industri smelter/pemurnian/pengolahan logam dasar beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan bauksit, standar dalam rangka mendukung ekspor o Peningkatan penerapan standardisasi di industri bauksit, dengan *output*: standar dalam rangka mendukung ekspor dan fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi industri smelter logam bukan besi dan turunannya o Peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga kerja di industri bauksit, dengan *output*: mahasiswa dan lulusan program DII, DIII dan DIV reguler o Jaminan ketersediaan bahan baku industri sawit dan kelapa yang berkualitas, dengan *output*: peningkatan produktivitas sektor hulu dengan *output* kriteria standar CPI untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit o Pengembangan industri hilir sawit dan kelapa dengan *output*: fasilitasi investasi industri kelapa sawit dan pendampingan penerapan industri 4.0 di sektor industri hasil hutan dan perkebunan o Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang, dengan *output*: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang, pengembangan Bandar Udara Pangsuma, pembangunan jalan akses Bandara Singkawang o Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat o Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat o Perluasan layanan penyiaran digital
		Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing: • Kabupaten Mempawah • Kabupaten Landak • Kota Pontianak • Kota Singkawang	• Pengembangan infrastruktur dan kawasan perkotaan di sekitar Pelabuhan Kijing melalui: o Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Pontianak o Pengembangan bandara, dengan *output*: pendampingan KPBU lokasi Bandara Singkawang dan pengembangan Bandar Udara Pangsuma, Kapuas Hulu o Pembangunan jalan nasional, dengan *output*: pembangunan jalan akses Pelabuhan Kijing o Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan *output*: Jalan Kawasan Prioritas Nangatayap–Sungai Kelik–Siduk dan jalan strategis Dermaga Ferry–Teraju

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan, dengan *output*: pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Kota Pontianak
		Kawasan Sentra Kelapa Sawit • Kabupaten Ketapang • Kabupaten Sanggau	• Pengembangan kawasan sentra kelapa sawit, melalui: ○ Peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit dan kualitas bahan baku, dengan *output*: kriteria standar CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit ○ *Sustainability* dan *Traceability*, dengan *output*: fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan Lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir dan penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit ○ Pengembangan industri *biofuel*, dengan *output*: pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (*Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel*) berbahan baku *technical oil* ○ Pengembangan industri oleokimia dan *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit disertai *rebranding* dan promosi produk sawit berkelanjutan ○ Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit, dengan *output*: *Pilot Plant Fraksionasi Multipurpose* TKKS ○ *Rebranding* produk sawit berkelanjutan, dengan *output*: promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri
		Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya	• Pengembangan kawasan perdesaan terpadu Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi) ○ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet dan telekomunikasi) ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
		Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP): • PKSN Paloh Aruk, Kabupaten Sambas • PKSN Jagoi Babang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siding), Kabupaten Bengkayang • PKSN Entikong, Kabupaten Sanggau • PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Puring Kencana), Kabupaten Kapuas Hulu	• Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Paloh Aruk, PKSN Jagoi Babang, PKSN Entikong, PKSN Nangabadau dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM satu harga ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN, preservasi Jalan dan Jembatan Tebas–Sambas–Tanah Hitam/Tj. Harapan Nanga Era–Bts Kaltim, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, penguatan perbenihan komoditas pertanian, dan pembangunan pengembangan irigasi perpipaan pertanian ○ Penataan ruang dan penanggulangan bencana di kawasan perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara ○ Penguatan tata kelola pemerintahan di kawasan perbatasan, dengan *output*: pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara di Kab. Sintang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Ketungau Hulu), Kabupaten Sintang	
		Kawasan Transmigrasi (KT)	• Pengembangan kawasan transmigrasi: ○ KT Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya ○ KT Gerbang Mas Perkasa, Kabupaten Sambas ○ KT Sekayam-Entikong, Kabupaten Sanggau ○ KT Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang
		Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan *(Heart of Borneo)* • Kabupaten Kapuas Hulu • Kabupaten Sintang • Kabupaten Melawi	• Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: ○ Rehabilitasi ekosistem mangrove dengan *output*: rehabilitasi hutan mangrove ○ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi ○ Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi dengan *output*: penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), pengendalian kebakaran di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB)
		Provinsi Kalimantan Barat • Lokasi Prioritas Penduduk Termiskin (Kabupaten Melawi)	• Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif dan pemenuhan infrastruktur dasar di daerah afirmasi melalui: ○ Pembangunan konektivitas dan peningkatan akses layanan dasar untuk wilayah terisolasi dan kemiskinan tertinggi ○ Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ○ Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan
		Provinsi Kalimantan Barat	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan dan penguatan pelatihan vokasi serta kualitas pendidikan untuk menciptakan SDM unggul dan mendorong perekonomian lokal melalui: ○ Penguatan pelatihan vokasi, dengan *output*: pelatihan vokasi di sektor strategis, sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan fasilitasi dan bantuan lembaga pelatihan ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan • Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: ○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: peningkatan kompetensi Rumah Sakit (RS) dalam layanan kanker, jantung, strok, dan uro-nefrologi (KJSU) dan layanan kesehatan ibu dan anak; pemenuhan sarana,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan ibu-anak, kanker, jantung, strok, ginjal di RS sesuai standar; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS ○ Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output*: pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu ○ Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer • Pencegahan dan penurunan *stunting* serta kematian ibu dan anak serta pengendalian dan penuntasan TBC, penyakit menular, dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Penguatan intervensi spesifik *stunting* dengan *output*: Ibu Hamil yang mendapat makanan tambahan dari *Buffer Stock*, balita yang mendapat makanan tambahan dan, daerah yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita ○ Peningkatan upaya pencegahan TBC dengan *output*: masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC ○ Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, dengan *output*: penurunan kematian ibu dan anak, pencegahan dan penurunan *stunting*, pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta penyelenggaraan jaminan sosial ○ Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan *output*: penuntasan TBC ○ Seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar ○ Penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Hilirisasi Kelapa, melalui: ○ Peningkatan produksi dan penyebaran benih unggul, dengan *output*: produksi benih tanaman perkebunan ○ Peningkatan produktivitas kelapa (budidaya dan pengolahan), dengan *output*: penerapan GAP (*Good Agriculture Practices*) dan pertanian regeneratif ○ Perbaikan data perkelapaan (budidaya dan pengolahan), dengan *output*: neraca komoditas kelapa dan produk turunannya ○ Peningkatan diversifikasi produk dan daya saing produk, dengan *output*: pengembangan industri pengolahan kelapa produk hilir (MCT dan SAF) dan restrukturisasi mesin/peralatan ○ Peningkatan sentra IKM pengolahan kelapa, dengan *output*: pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro ○ Peningkatan investasi industri pengolahan kelapa, dengan *output*: peningkatan peluang investasi di sektor industri ○ Integrasi rantai pasok dalam negeri, dengan *output*: Forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sektor hulu-hilir industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar ○ Peningkatan riset dan inovasi kelapa, dengan *output*: pembinaan optimalisasi pemanfaatan teknologi di industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar • Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pembangunan infrastruktur pembangkit listrik ○ Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: ○ Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam ○ Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi) ○ Penguatan pascapanen pangan nabati, dengan *output:* sarana pascapanen tanaman perkebunan • Swasembada air, melalui: ○ Konservasi sumber daya air di DAS Kapuas dengan *output*: penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air
110	Perubahan Subbab 4.5.3 Provinsi Kalimantan Tengah halaman 231 sampai dengan 233	Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah LPE (%) / PDRB per Kapita (Rp Juta) / Kontribusi PDRB Provinsi (%) / Tingkat Kemiskinan (%) / Rasio Gini / Indeks Modal Manusia / Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) / IKLH Daerah / TPT (%) 2025: 5,0 / 84,6 / 1,0 / 4,11–4,61 / 0,311–0,315 / 0,55 / 76,00 / 76,34 / 3,32–3,91 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Agroindustri Kalimantan Tengah • Kabupaten Kotawaringin Barat • Kabupaten Kotawaringin Timur	• Pengembangan pusat-pusat industri dan hilirisasi industri sumber daya hayati (sawit dan kelapa) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan, melalui: ○ Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas bahan baku komoditas sawit dan kelapa, dengan *output:* penetapan kriteria standar *crude palm oil* (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit dan peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri hasil perkebunan; penyebaran benih unggul; peningkatan riset dan inovasi kelapa; peningkatan kualitas dan kuantitas produksi benih tanaman perkebunan; penerapan *good agricultural practices* (GAP) dan pertanian regeneratif ○ Pengembangan industri oleokimia dan *biofuel* berbasis minyak sawit disertai *rebranding* dan promosi produk sawit berkelanjutan ○ Peningkatan diversifikasi dan daya saing produk, dengan *output*: pengembangan produk hilir dan restrukturisasi mesin/peralatan perkebunan industri pengolahan kelapa, fasilitasi sertifikasi produk, disertai bimbingan teknis pengembangan produk dan kemasan ○ Peningkatan sentra industri kecil menengah (IKM) pengolahan kelapa dan investasi industri pengolahan kelapa, dengan *output*: pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro dan keberlanjutan investasi disertai restrukturisasi mesin/peralatan industri
Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Tengah • Kota Palangkaraya • Kabupaten Kapuas • Kabupaten Barito Utara	• Pengembangan kawasan sentra perikanan Kalimantan Tengah khususnya untuk komoditas gabus, nila, dan patin melalui: ○ Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap (PUD) ○ Penyediaan input produksi perikanan ○ Peningkatan kualitas, mutu dan daya saing hasil perikanan ○ Penguatan kapasitas dan perlindungan terhadap masyarakat, kelembagaan dan kewirausahaan perikanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah: • Kabupaten Pulang Pisau • Kabupaten Kapuas	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang didukung kawasan transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas, melalui: ○ Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output:* pembangunan dan pengembangan infrastruktur ○ Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output:* penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian ○ Pengembangan kawasan secara *off farm*, dengan *output:* penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani
		Kawasan Transmigrasi (KT)	• Pengembangan kawasan transmigrasi: ○ Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup di Kabupaten Kapuas ○ Kawasan Transmigrasi Jelai (Pulau Nibung) di Kabupaten Sukamara ○ Kawasan Transmigrasi Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat
		Kawasan Konservasi Kalimantan Tengah: • Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat • Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya	• Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis aset alam di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya dengan pelibatan mitra lokal, melalui: ○ Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan, dengan *output:* optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output:* penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output:* penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB); Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB); dan Pengendalian kebakaran di kawasan suaka alam (KSA), Kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB)
		Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) • Kabupaten Katingan • Kabupaten Gunung Mas • Kabupaten Murung Raya • Kabupaten Barito Utara	• Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan Tengah termasuk *Heart of Borneo* disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana, melalui: ○ Pengendalian kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan, dengan *output:* penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta operasi modifikasi cuaca untuk aksi dini bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ○ Peningkatan kualitas ekosistem gambut, dengan *output:* pemulihan dan restorasi lahan gambut, pengelolaan data informasi kesatuan hidrologis gambut (KHG), dan peningkatan layanan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut ○ Peningkatan kualitas ekosistem mangrove, dengan *output:* rehabilitasi hutan mangrove ○ Pelaksanaan penataan aset reforma agraria, dengan *output:* inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam rangka pelepasan kawasan hutan untuk redistribusi tanah ○ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi
		Provinsi Kalimantan Tengah	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Penguatan infrastruktur konektivitas jalan dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: ○ Preservasi jalan dan jembatan Batas Prov.Kalbar–Kudangan–Penopa–Sp.Runtu ○ Preservasi jalan dan jembatan Pangkalan Lada–Asam Baru–Palantaran–Kasongan ○ Preservasi jalan dan jembatan Ruas Benangin–Bts.Kaltim ○ Preservasi jalan dan jembatan Lingkar Luar P.Raya–Sp.Bereng Bengkel–Jabiren–Pulang Pisau ○ Preservasi jalan dan jembatan Sp.Rabambang–Sp.Sei Asem, Sp.Rabambang–Kuala–Kurun ○ Preservasi jalan dan jembatan Pulang Pisau–Bts.Kapuas–Bts.Prov.Kalsel ○ Preservasi Jalan Palangka Raya–Bagugus–Bukit Batu ○ Preservasi Jalan Sp.Malawaken (Muara Teweh)–Kandui ○ Preservasi Jembatan Khusus Pilse Slab Nusa ○ Penggantian Jembatan (Sei Lenggana, Sei Sebajang) • Penguatan kualitas pendidikan secara merata dan berdaya saing disertai peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: ○ Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah pada seluruh jenjang pendidikan ○ Revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Palangka Raya melalui pembiayaan SBSN ○ Revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Palangka Raya melalui pembiayaan SBSN ○ Pelatihan vokasi di sektor strategis, dengan *output:* pelatihan vokasi di sektor strategis ○ Peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan *output:* peningkatan kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri ○ Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan *output:* pengembangan pengajaran berbasis pabrik *(teaching factory)* • Penyediaan pasokan air berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan lokal, melalui: ○ Penyediaan air baku kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan kawasan terpencil, dengan *output*: pembangunan air baku Kotawaringin Barat ○ Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan lokal, dengan *output:* rehabilitasi DIR Handil Rakyat, DIR Unit Belanti, DIR Dadahup, dan DIR Katingan ○ Konservasi sumber daya air di DAS Kahayan, dengan *output:* penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; dan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air • Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk ○ Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Perluasan jaringan telekomunikasi, akses internet cepat, dan layanan penyiaran digital disertai pengembangan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan digitalisasi masyarakat • Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan kesehatan, dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output:* peningkatan kompetensi rumah sakit (RS) dalam layanan kanker, jantung, strok, dan uro-nefrologi (KJSU) dan layanan kesehatan ibu dan anak (KIA); pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) untuk pelayanan ibu-anak, kanker, jantung, strok, ginjal di RS sesuai standar; dan pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk RS ○ Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output:* pemenuhan alat kesehatan di unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar, pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar, dan revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat di puskesmas pembantu ○ Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan *output:* penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer • Pengembangan permukiman dan pemenuhan akses air minum, sanitasi aman, serta pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan inklusif, melalui: ○ Pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir ○ Peningkatan utilitas dasar perdesaan, dengan *output:* peningkatan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan air limbah domestik • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya dan pengendalian penyakit menular, melalui: ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output:* pengadaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria; pembinaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria; fasilitasi dan pembinaan pencegahan dan pengendalian malaria ○ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output:* penerapan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi, balita, ibu, dan bayi baru lahir, fasilitasi dan pembinaan: gerakan orang tua asuh cegah *stunting* (GENTING), implementasi 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), dan penganekaragaman pangan • Optimalisasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif serta inklusif dengan perwujudan data tunggal sosial ekonomi nasional, melalui: ○ Penggunaan satu basis data tunggal sosial ekonomi nasional untuk perbaikan akurasi penyasaran program-program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan ○ Peningkatan cakupan dan kualitas bantuan sosial dan subsidi yang sesuai dengan kondisi kerentanan (mencakup PKH, sembako, PBI JKN, bantuan pangan, subsidi LPG, dan bantuan/subsidi lainnya) ○ Perbaikan mekanisme penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial yang terintegrasi dan terdigitalisasi ○ Koordinasi pelaksanaan dan penyelenggaraan program jaminan sosial pusat dan daerah ○ Peningkatan layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia berbasis komunitas ○ Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output:* peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha keluarga penerima manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
111	Perubahan Subbab 4.5.4 Provinsi Kalimantan Selatan halaman 234 sampai dengan 236	

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,3	71,5	1,3	3,44–3,94	0,307–0,311	0,57	75,97	72,32	3,86–4,25

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin: • Kota Banjarmasin • Kota Banjarbaru • Kabupaten Banjar • Kabupaten Barito Kuala • Kabupaten Tanah Laut	• Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, melalui: ○ Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional, dengan *output*: bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur ○ Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan *output*: jalan non-status yang dikembangkan di kawasan transmigrasi di Kabupaten Barito Kuala, subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin ○ Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan *output*: *pilot project* kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin ○ Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan *output*: pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana ○ Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan *Transit Oriented Development* (TOD) ○ Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan *output*: daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antardaerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di wilayah metropolitan, daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di wilayah metropolitan, daerah yang dikuatkan tata kelola *smart city*-nya di wilayah metropolitan, dan daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada wilayah metropolitan ○ Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output*: *Metropolitan Statistical Area*
Kawasan Pertumbuhan Industri Baru: • Kabupaten Tanah Laut • Kabupaten Tanah Bumbu • Kabupaten Kotabaru	• Pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, melalui: ○ Pengembangan hilirisasi nikel, dengan *output*: industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel beserta turunannya yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya, kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel, perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi, industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor sektor industri hilirisasi nikel, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor, industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri ○ Pengembangan hilirisasi kelapa sawit, dengan *output*: kriteria *standar* CPO untuk peningkatan kualitas bahan baku industri

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			kelapa sawit, peralatan fasilitas laboratorium/*workshop*/layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim, fasilitasi peningkatan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit melalui pembentukan lembaga sertifikasi (LS) ISPO Hilir, penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - *hydrogenated vegetable oil/sustainable aviation fuel)* berbahan baku *technical oil*, fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (*biofuel)* dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional, serta kebijakan pembangunan rendah karbon (PRK) dan penurunan gas rumah kaca (GRK) sektor industri
		Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: • Kabupaten Barito Kuala • Kabupaten Banjar • Kabupaten Tapin • Kabupaten Hulu Sungai Selatan • Kabupaten Hulu Sungai Tengah • Kabupaten Hulu Sungai Utara • Kabupaten Tabalong	• Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: ○ Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, dengan *output:* sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk yang dikembangkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara ○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani ○ Peningkatan ketersediaan pangan, dengan *output:* ekstensifikasi kawasan pertanian
		Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP): • Kawasan Agropolitan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu • KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten Tabalong • KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar	• Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan rincian *output*: fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM, sarana puskesmas, pustu dan posyandu (SOPHI), fasilitasi program P4GN bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa, desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting*, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif, sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan ○ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan rincian *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama, OM BTS 4G/*lastmile*, sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya) ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa
		Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala: • KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala	• Pengembangan kawasan transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman ○ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi ○ Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
	Kawasan Pegunungan Meratus (*Geopark* Meratus dan Kawasan Loksado): • Kabupaten Hulu Sungai Utara • Kabupaten Hulu Sungai Tengah • Kabupaten Hulu Sungai Selatan • Kabupaten Tabalong • Kabupaten Tanah Laut • Kabupaten Banjar • Kabupaten Kotabaru • Kabupaten Tapin	• Pengembangan ekowisata kelas dunia di *Geopark Geosite* Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, melalui: ○ Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di *Geopark Geosite* Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja ○ Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan *Geopark* Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya ○ Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), pengendalian kebakaran di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB)
	Provinsi Kalimantan Selatan	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: ○ Pembangunan jembatan laut Pulau Kalimantan ○ Pembangunan jalan nasional, dengan *output:* pelebaran jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)–Serapat–Batas Kota Banjarmasin ○ Peningkatan dan pemeliharaan jalan nasional, dengan *output:* preservasi pemeliharaan rutin Jalan Ruas Walangsi-Kaparkias dan Pagatan– Batulicin ○ Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, dengan *output:* layanan angkutan laut perintis prioritas nasional ○ Pengembangan pelabuhan logistik di Pulau Laut, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan • Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output:* ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer-stock*, dan kegiatan koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita ○ Intensifikasi penemuan kasus, pengobatan, serta peningkatan upaya pencegahan, dengan *output:* pemberian obat dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, serta NSPK pencegahan dan pengendalian TBC ○ Eliminasi penyakit tropis terabaikan, dengan *output:* peningkatan kapasitas SDM, pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis, serta *assessment* eliminasi penyakit tropis (kusta) ○ Pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit malaria, dengan *output:* layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria ○ Pengendalian penyakit menular lainnya, dengan *output* NSPK pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS • Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: ○ Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin ○ Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD ○ Pembinaan mutu RS untuk mencapai akreditasi paripurna ○ Pembiayaan JKN/KIS melalui bantuan masyarakat, dengan *output:* cakupan penduduk yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dalam JKN/KIS ○ Pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten, melalui: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan • Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, melalui: ○ Penguatan pendidikan menengah vokasi melalui penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri serta peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK ○ Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan • Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, melalui: ○ Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output:* sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian pengawasan penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan penyelenggara sertifikasi elektronik induk (PSrE) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial ○ Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, dengan *output:* penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non-alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran ○ Pelaksanaan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam memberikan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok miskin dan rentan ○ Peningkatan keterpaduan Kartu Kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi, sehingga penerima manfaat yang memenuhi syarat dapat mengakses program peningkatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		keterampilan dan bantuan modal usaha untuk mendorong kemandirian ekonomi ○ Penguatan akses permodalan melalui Kartu Usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal untuk memperluas akses pembiayaan dan pendampingan usaha ○ Pengembangan program pelatihan vokasi berbasis industri dan keterampilan digital, yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan peluang kerja bagi angkatan kerja muda dan kelompok rentan ○ Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran • Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui: ○ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output:* talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan ○ Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko ○ Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan, dengan *output:* peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda, dan peningkatan kewirausahaan pemuda ○ Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas, dengan *output:* penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial ○ Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia, dengan *output:* lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial • Perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya, melalui: ○ Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan ○ Pencegahan dan penanganan anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya ○ Penguatan data, koordinasi, dan kapasitas kelembagaan terkait perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya • Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana melalui: ○ Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan *output:* penguatan instrumen peringatan dini bencana • Konservasi sumber daya air di DAS Barito, dengan *output:* penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; serta rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan
112	Perubahan Subbab 4.5.5 Provinsi Kalimantan Timur halaman 237 sampai	Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 6,3 | 218,1 | 3,9 | 4,24–5,05 | 0,310–0,321 | 0,59 | 40,82 | 80,20 | 4,69–5,14 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
	dengan 240	Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
		Kawasan Pariwisata Petualangan Derawan-Berau • Kabupaten Berau	• Pengembangan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, melalui: ○ Pengembangan klaster pariwisata di sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: penyusunan rencana induk/masterplan penataan dan pengembangan di kawasan Pariwisata Berau untuk mendukung pengembangan pariwisata di sekitar IKN dan pengembangan *Tourist Information Center* sebagai pusat informasi terintegrasi terkait aktivitas pariwisata ○ Pengembangan infrastruktur dan konektivitas serta layanan transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandara Maratua, jalan koridor logistik, jembatan koridor logistik, pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*) dan perlengkapan jalan, rambu sungai dan danau ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi, infrastruktur distribusi tenaga listrik dan listrik pedesaan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital
		Kawasan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara • Kota Samarinda • Kota Balikpapan • Kota Bontang • Kabupaten Penajam Paser Utara • Kabupaten Kutai Kartanegara • Kabupaten Kutai Timur	• Pengembangan kawasan *superhub* ekonomi di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, melalui: ○ Pengembangan klaster pariwisata di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: pengembangan objek wisata desa dan perdesaan, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi II yang terpadu, serta fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi di wilayah destinasi II, serta *event meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) dalam negeri yang didukung ○ Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang meliputi (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner ○ Pengembangan kawasan peruntukan industri di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara ○ Pengembangan dan peningkatan jaminan ketersediaan bahan baku yang terstandardisasi pada agroindustri hilir kelapa sawit dan rumput laut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan *output*: kriteria standar *crude palm oil* (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit, fasilitasi investasi hilir kelapa sawit, dan ketertelusuran keberlanjutan produk hilir kelapa sawit, penguatan standarisasi untuk hilirisasi sawit, pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - *hydrogenated vegetable oil/ sustainable aviation fuel*) berbahan baku *technical oil*, promosi produk dan perkebunan sawit Indonesia yang berkelanjutan terutama di luar negeri, peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, promosi produk rumput laut skala internasional, pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani dan pengadaan asuransi pertanian ○ Penguatan serta peningkatan teknologi dan inovasi yang terstandardisasi di industri dasar (kimia dasar), dengan *output*: rekomendasi dan regulasi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis minyak bumi, fasilitasi percepatan pembangunan industri petrokimia berbasis gas bumi, fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas *coal to ammonia* di Kutai Timur pendampingan implementasi sektor industri, gasifikasi batubara di Kutai Timur, rekomendasi kebijakan percepatan peningkatan nilai tambah batubara, pengembangan dan pembangunan kilang minyak bumi (Kilang Balikpapan), pengembangan Lapangan Gendalo, Gandang dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			Bangka *Indonesia deepwater development project* (IDD), percepatan pelaksanaan kegiatan penyimpanan karbon dan penyediaan serta permintaan produk turunan ○ Fasilitasi pengembangan industri padat karya terampil, dengan *output*: pengembangan sektor industri aneka, layanan pemberdayaan penyuluh, rekomendasi kebijakan penumbuhan dan pengembangan industri tekstil, kulit, dan alas kaki serta layanan hak kekayaan intelektual (HKI) ○ Peningkatan produksi pangan nabati ○ Preservasi pada sejumlah jalan/jembatan koridor logistik sekitar IKN dengan *output*: preservasi jalan dan jembatan Ruas Petung–Riko–ITCI–Sepaku–Semoi Dua–Samboja, Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Loa Janan–Tenggarong–Senoni–Kotabangun–Muara Leka–Muara Muntai–Sp. Blusuh ○ Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: pengembangan pelabuhan ○ Optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (Kota Balikpapan) ○ Pengembangan transportasi berkelanjutan, dengan *output*: pengembangan angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan *buy the service* (BTS) di Kota Balikpapan
		Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar Samarinda dan Balikpapan • Kota Samarinda • Kota Balikpapan	• Pembangunan perkotaan nonwilayah metropolitan melalui pembangunan kawasan perkotaan besar Samarinda dan Balikpapan, dengan *output*: ○ Bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi ○ Penataan kawasan prioritas pada Kota Samarinda (blok teras Samarinda-zona kota tua) ○ Pembangunan fasilitas pendidikan politeknik pariwisata di Samarinda untuk mendukung pengembangan pariwisata di IKN dan sekitarnya ○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) di Kota Balikpapan
		Kawasan Sentra Perikanan Kalimantan Timur • Kabupaten Kutai Kartanegara	• Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budi daya dan revitalisasi tambak rakyat
		Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • Kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara	• Pengembangan kawasan agroekowisata Separi Sejahtera Tenggarong Seberang, Kab. Kutai Kartanegara melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, sarana dan prasarana perdagangan desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan ○ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/*lastmile*, dan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa dan pengembangan BUMDesa

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan dan pengembangan, penguatan tata kelola desa wisata dan penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim
			○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa dan integrasi sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD
			○ Peningkatan produktivitas desa wisata, dengan *output*: pemeliharaan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan
		Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Long Apari dan Kec. Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu • Kec. Maratua, Kabupaten Berau	• Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output* di antaranya: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM satu harga, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan jalan daerah tertinggal, jalan perbatasan dan akses kawasan PLBN: pembangunan Jalan Tering-Long Bagun (Sp. Long Hubung/Tering-Long Bagun 6, 7 Dan 8), pembangunan jembatan koridor logistik, dan pengembangan Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau
		Kawasan Transmigrasi (KT)	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser
		Kawasan Konservasi Derawan • Kabupaten Berau	• Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui: ○ Pengelolaan daya rusak air dengan *output*: Pengaman Pantai AURI Balikpapan ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan *output*: pembangunan DI Kaubun serta rehabilitasi DIR Petung, DIR Sebakung, DI Pesap, dan DI Tanah Abang ○ Pemanfaatan data dalam pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: data dan informasi ekosistem dan data dan informasi konservasi biota perairan ○ Peningkatan sarana pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggaraan konservasi biota perairan ○ Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: kerja sama jejaring dan kemitraan konservasi ekosistem, kawasan konservasi perairan yang operasional dan *oceans for prosperity project* -LAUTRA ○ Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelola kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: kelompok masyarakat penggerak konservasi dan pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya
		Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) • Kabupaten Berau	• Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di wilayah Kalimantan Timur disertai peningkatan upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Kutai Timur • Kabupaten Kutai Kartanegara • Kabupaten Mahakam Ulu • Kabupaten Kutai Barat	○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), pengendalian kebakaran di kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB) ○ Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dengan *output*: modeling pengembangan produk bioekonomi ○ Konservasi sumber daya air di DAS Mahakam Berau, dengan *output* (i) penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; (ii) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan; serta (iii) rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif ○ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi
		Provinsi Kalimantan Timur	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, melalui: ○ Pengelolaan sarana dan prasarana sektor logistik yang berkelanjutan, dengan *output*: layanan angkutan penyeberangan perintis • Penerapan ekonomi sirkular dari sumber sampah rumah tangga dan sejenisnya secara partisipatif (hulu) beserta penanganannya (hilir), melalui: ○ Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik dan persampahan • Penguatan konektivitas listrik terutama bagi rumah tangga yang tidak mampu atau berada di daerah afirmasi serta implementasi transisi energi, melalui: ○ Peningkatan dan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan dengan pemanfaatan energi rendah karbon, dengan *output*: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ○ Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk ○ Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) • Penguatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan sarana dan prasarana dasar termasuk pelayanan kesehatan pada daerah afirmasi dan 3T ○ Pembangunan konektivitas udara, dengan *output*: pembangunan Bandara Ujoh Bilang (Kabupaten Mahakam Ulu) ○ Pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten, dengan *output*: peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Mahakam Ulu • Perwujudan swasembada sektor pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim, melalui: ○ Peningkatan produksi pangan nabati dan pemberdayaan ekonomi ○ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan ○ Pemanfaatan pupuk organik untuk pertanian, dengan *output*: desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan ○ Penguatan penyediaan bahan pangan nabati ○ Peningkatan produksi pangan nabati dan modernisasi jaringan irigasi guna peningkatan pemberdayaan ekonomi • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		malaria dan HIV/AIDS) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), melalui: ○ Penguatan intervensi spesifik *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock* ○ Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan sebagai upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, layanan survei faktor risiko dan layanan pencegahan penyakit TBC ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian, sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) menuju eliminasi dan layanan survei faktor risiko penyakit malaria ○ Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian serta layanan survei faktor risiko penyakit HIV/AIDS ○ Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pencegahan dan pengendalian serta tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian penyakit kusta • Penguatan kapasitas pelayanan kesehatan dan tata kelola pelayanan kesehatan, melalui: ○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya, fasilitasi pengelolaan proyek penguatan rumah sakit layanan kanker, jantung, strok, dan *uro-nefrologi* (KJSU) dan pengembangan layanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok dan sistem rujukan berbasis komputer di seluruh kabupaten/kota ○ Peningkatan kualitas pelayanan rujukan, dengan *output*: NSPK mutu dan akreditasi rumah sakit • Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, melalui: ○ Tata kelola dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, pengendalian pengawasan penyelenggara sistem elektronik (PSE) dan penyelenggara sertifikasi elektronik induk (PSrE) dan pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial ○ Penyaluran bantuan sosial adaptif dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan, penyaluran cadangan pangan pemerintah, penyediaan elpiji tiga kg yang tepat sasaran dan pemberian perlindungan kerja melalui fasilitasi PBI Jamsostek dan jaminan kehilangan pekerjaan ○ Mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. ○ Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, melalui penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas ○ Perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dan nelayan melalui kartu usaha, guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian ○ Digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha ○ Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran • Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi, dan pengembangan bidang STEAM, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja berupa pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK) yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat, melalui: ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Sarana dan prasarana perguruan tinggi (PT) vokasi, dengan *output*: gedung, bangunan dan prasarana pendidikan tinggi yang ditingkatkan kapasitasnya ○ Penguatan pendidikan menengah vokasi melalui penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, peningkatan kapasitas pendidik SMK, peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. ○ Revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Pertanian Negeri Samarinda melalui pembiayaan SBSN • Pengelolaan risiko dan mitigasi bencana alam yang efisien dan tepat guna, melalui: ○ Mitigasi bencana di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara, dengan *output*: koordinasi, pelayanan publik lainnya dan dukungan teknis bidang lingkungan hidup penanggulangan bencana ○ Pelaksanaan bantuan kebencanaan, dengan *output*: analisis pengembangan strategi penanggulangan bencana ○ Pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan *output*: koordinasi bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana serta pelayanan publik lainnya bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana ○ Peningkatan kapasitas aparat pemerintah penanggulangan bencana, dengan *output*: pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan bencana (PB), daerah yang menerapkan SPM sub-urusan bencana, pendidikan dan pelatihan teknis PB bagi fasilitator nasional dan bimbingan teknis peningkatan kapasitas dalam penanganan pengungsi ○ Penyusunan dokumen penanggulangan bencana, dengan *output*: analisis pengembangan strategi, rekomendasi kebijakan dan analisis strategi penanggulangan bencana ○ Peningkatan keandalan bangunan berketahanan bencana, dengan *output*: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pascabencana, penataan bangunan kawasan rawan bencana dan daerah yang difasilitasi dalam percepatan dan pengendalian pelaksanaan bangunan gedung (PBG) berketahanan bencana • Pengembangan kawasan dan pelestarian warisan budaya serta tanah ulayat masyarakat adat melalui pembinaan talenta seni budaya, dengan *output*: warisan budaya yang diregistrasi nasional dan ditetapkan dan warisan budaya yang dilindungi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
113	Perubahan Subbab 4.5.7 Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara halaman 257 sampai dengan 245	

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	6,3	218,1	3,9	4,24–5,05	0,310–0,321	0,89	40,82	80,20	4,60–5,14

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Catatan:
Sasaran Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara masih menjadi bagian dari perhitungan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan *Superhub* Ibu Kota Nusantara (IKN) • Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) • Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) • Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)	• Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara, melalui: o Perencanaan dan penataan ruang kawasan inti Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dengan *output*: Rencana Pengembangan Kawasan (RPK)/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Perdesaan, pengadaan tanah, serta rekomendasi kebijakan percepatan pemindahan ibu kota negara. o Pembangunan gedung/perkantoran, dengan *output*: bangunan gedung dan penataan kawasan (terutama komplek perkantoran legislatif dan yudikatif), penyusunan *guideline* pengelolaan ruang terbuka, penyusunan dokumen *Level of Service* (LoS), dukungan teknis bidang pengelolaan gedung, kawasan dan perkotaan, OM *(operations maintenance)* gedung perkantoran, pengendalian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang bangunan gedung dan penataan kawasan IKN. o Pembangunan hunian/rumah tangga layak, terjangkau, dan berkelanjutan, dengan *output*: Rumah Susun ASN dan Hankam (terutama hunian legislatif dan yudikatif), hunian/perumahan umum, serta operasional dan pemeliharaan. o Pembangunan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan dan perluasan sistem pengolahan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah domestik, sistem pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTS), pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, penyediaan infrastruktur gas bumi, dukungan teknis bidang sarana dan prasarana dasar, serta operasional dan pemeliharaan instalasi dan jaringan, embung, kawasan, dan persampahan. o Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, dengan *output*: jaringan jalan akses menuju IKN (Jalan Tol Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan–Tol Balikpapan–Samarinda, Jalan Tol Seksi 3A-1 Segmen Karang Joang–KKT Kariangau, Jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karang Joang–KKT Kariangau, Jalan Tol Seksi 3B-2 Segmen KKT Kariangau–Sp. Tempadung, Jalan Tol Seksi 5B Segmen Jembatan P. Balang–Sp. Riko, Jalan Tol Seksi 6A Segmen Riko–Rencana *Outer Ring Road* IKN, Jalan Bypass Pasar Sepaku, Jalan Akses Bandara IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II), jaringan jalan dan *multi utility tunnel* (MUT) dalam KIPP, bandara IKN, layanan angkutan umum massal perkotaan di KIPP, studi identifikasi jalur kereta api perkotaan KIPP–IKN Barat–IKN Timur 1–IKN Timur 2–IKN Utara dan IKN Barat–IKN Timur 2, serta operasional dan pemeliharaan *intelligent transport system* (ITS) dan jalan yang terbangun o Pemindahan ASN/Hankam, dengan *output*: diseminasi informasi pemindahan ibu kota negara, pengamanan ibu kota negara, rekomendasi kebijakan pengelolaan aset dalam rangka pemindahan, koordinasi pelaksanaan pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara, serta rekomendasi kebijakan pengawalan/pengendalian desain sistem pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara. o Penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas, dengan *output*: sistem informasi kota cerdas, kebijakan pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan terkait dengan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan tata kelola ekosistem digital, penyusunan kebijakan keamanan sistem informasi kawasan IKN, rekomendasi pengawalan/pengendalian pembangunan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi di Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan SSOC IKN.
		• Pembangunan sosial, *superhub* ekonomi, dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara, melalui: ○ Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: pembinaan ekonomi, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta pembangunan sarana prasarana strategis ekonomi (pasar). ○ Peningkatan investasi, dengan *output*: penyusunan kebijakan skema pendanaan, promosi pendanaan, penyusunan rekomendasi kebijakan skema *tax incentive*, promosi bidang investasi dan kemudahan berusaha, promosi kegiatan IKN di luar negeri, dukungan penjaminan BUMN, serta rekomendasi kebijakan kemudahan berusaha dan investasi. ○ Pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar, dengan *output*: penyusunan rencana induk *superhub* ekonomi, rencana induk destinasi pariwisata Ibu Kota Nusantara desa wisata yang dikembangkan, fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi, sertifikasi SDM bidang ekonomi kreatif, pembangunan–fasilitasi kerja sama daerah mitra, serta promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. ○ Peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan *output*: penyusunan kajian pembangunan manusia, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat ○ Pembangunan kesehatan, dengan *output*: pembinaan pengendalian dan layanan mitigasi penemuan kasus dalam upaya percepatan eliminasi malaria, bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk pencegahan dan penurunan *stunting*, penyusunan masterplan kesehatan, penyediaan fasilitas rumah sakit dan sarana kesehatan lainnya, serta pembangunan sarana prasarana strategis kesehatan (puskesmas). ○ Pembangunan pendidikan, dengan *output*: penyusunan masterplan pendidikan, pembangunan sarana prasarana strategis pendidikan, serta peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, dengan *output*: tata kelola lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup kepada usaha dan/atau kegiatan di wilayah IKN, pemantauan kualitas lingkungan hidup, pelayanan persetujuan lingkungan di wilayah IKN, AMDAL kawasan, kajian risiko bencana IKN, pembentukan dan pembinaan kelompok masyarakat tangguh bencana serta kearifan lokal, pembangunan jaringan proteksi kebakaran, penyediaan sarana, pelayanan publik, dukungan teknis bidang lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, serta operasional aktivitas penanggulangan bencana. ○ Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan, dengan *output*: bantuan peralatan pascapanen di satuan permukiman dan pusat SKP pada kawasan transmigrasi di wilayah sekitar, basis data pangan, bibit kultur jaringan hortikultura unggulan, lahan pertanian berkelanjutan, pelayanan penyuluhan pertanian, pertanian konservasi, pertanian regeneratif, dan rendah karbon yang dikembangkan, studi kelayakan percetakan sawah di IKN, serta pengembangan KSPP dengan teknologi pertanian konservasi.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
114	Perubahan Subbab 4.5.6 Provinsi Kalimantan Utara halaman 240 sampai dengan 242	Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan • Kota Tarakan • Kabupaten Bulungan	• Pengembangan Kota Baru Tanjung Selor dan Kota Tarakan, melalui: o Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) o Penyediaan sarana dan prasarana air minum, air limbah domestik, dan persampahan o Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk meningkatkan ketahanan pangan, melalui: pembangunan D.I. Lembudud dan rehabilitasi DIR Sepunggur o Pengembangan sarana prasarana produksi perikanan tangkap serta kampung/sentra nelayan di Kota Tanjung Selor, dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya o *On Farm* di Kota Tanjung Selor, dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian di satuan permukiman dan pusat SKP o Pembangunan dan pengembangan bandara di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Juwata o Penguatan kewirausahaan afirmatif di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan sentra perikanan tangkap yang ditingkatkan fasilitasnya o Pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di Kota Tarakan, dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang o Pengembangan kawasan konservasi mangrove, dengan *output*: hutan mangrove dan bekantan
Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning: • Kabupaten Bulungan	• Pengembangan Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, melalui: o Peningkatan investasi kawasan, dengan *output*: pembentukan *eco industrial park* (KI berwawasan lingkungan), *investment project ready to offer* (IPRO) bidang jasa dan kawasan, peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada bidang jasa dan kawasan, penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal o Pengembangan kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: pengembangan IKM logam, mesin, elektronika, dan alat angkut yang mendapatkan fasilitasi perluasan akses pasar o Pengembangan pembangunan PLTA Kayan Terintegrasi, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital o Pengembangan Kawasan Industri Kalimantan *industrial park* Indonesia o Penambahan penerbangan umum dan perintis o Peningkatan/perbaikan jalan akses ke lokasi sumber daya dan kawasan (Kawasan Tj. Selor, KIPI Tanah Kuning): preservasi jalan dan jembatan Bts. Bulungan–Tj. Selor, preservasi jalan dan jembatan Tj. Selor–Sp. 3 Tj. Palas–Sekatak Buji o Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Sentra Rumput Laut • Kabupaten Nunukan	• Pengembangan kawasan dan sentra rumput laut, melalui: ○ Pengembangan industri dan hilir rumput laut, dengan *output*: peningkatan kapasitas produksi rumput laut kering, dan promosi produk rumput laut skala internasional ○ Peningkatan produktivitas budidaya rumput laut, dengan *output*: pengembangan skema penjualan petani ke pabrik pengolahan melalui platform digital yang meningkatkan harga jual di tingkat petani ○ Fasilitasi pembiayaan dan investasi ○ Penelitian dan pengembangan budidaya rumput spesies baru serta inovasi teknologi untuk diversifikasi produk rumput laut (karagenan, agar-agar, biostimulan, nutraseutikal, pakan ternak) ○ Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau hilirisasi rumput laut
		Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Krayan Selatan, Kec. Krayan, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sei Menggaris, Kec. Sebatik Tengah, Kec. Krayan Tengah, Kec. Krayan Timur, dan Kec. Krayan Barat), Kabupaten Nunukan • PKSN Long Nawang dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kayan Hilir dan Kec. Bahau Hulu), Kabupaten Malinau • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tana Lia), Kab. Tana Tidung	• Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Nunukan, PKSN Tou Lumbis, PKSN Long Nawang dan kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: Pembangunan Jalan Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Pembangunan Jalan Malinau–Semamu 1 & 2, Preservasi Jalan dan Jembatan Simpang Tiga Apas–Simanggaris–Tugu Batas Negara (Serudong), Preservasi Jalan dan Jembatan Simpang Tiga Pos Gabungan Batas Negara–Sei Ular, Preservasi Jalan dan Jembatan Malinau–Long Semamu, Preservasi Jalan dan Jembatan dalam Kota Nunukan, peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin, Kab. Bulungan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar ○ Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM satu harga ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan, pembangunan Jalan Malinau-Semamu 1 dan 2, preservasi jalan dan jembatan Simpang Tiga Apas-Simanggaris-Tugu Batas Negara (Serudong), preservasi jalan dan jembatan Simpang Tiga Pos Gabungan Batas Negara-Sei Ular, preservasi jalan dan jembatan Malinau-Long Semamu, preservasi jalan dan jembatan dalam Kota Nunukan, peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin, Kab. Bulungan, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar ○ Penataan ruang dan penanggulangan bencana di kawasan perbatasan, dengan *output*: dokumen harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN), penguatan desa/kelurahan tangguh bencana, dan penguatan instrumen peringatan dini bencana
		Kawasan Transmigrasi (KT) • KT Salim Batu, Kabupaten Bulungan	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman ○ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: penyediaan bantuan sarana produksi pertanian ○ Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) • Kabupaten Nunukan • Kabupaten Malinau	• Pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem termasuk *Heart of Borneo* di Wilayah Kalimantan Utara, melalui: ○ Pengembangan energi terbarukan berbasis bioenergi ○ Konservasi komoditas pertanian dan praktik pertanian berkelanjutan ○ Pelaksanaan penataan aset reforma agraria ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB), kawasan pelestarian alam (KPA), dan taman buru (TB) ○ Konservasi sumber daya air di DAS Mahakam Berau dengan *output* (i) penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; (ii) rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; serta (iii) rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif
		Provinsi Kalimantan Utara	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Penguatan pengembangan pangan nabati, hilirisasi komoditas pertanian strategis/unggulan serta modernisasi dan digitalisasi pertanian yang adaptif dan inklusif, melalui: ○ Penguatan pascapanen pangan nabati ○ Sertifikasi dan peredaran benih nabati ○ Jaminan ketersediaan bahan baku bioindustri agro ○ Adopsi teknologi pertanian, dengan *output*: penerapan teknologi pertanian • Penguatan konektivitas (konektivitas jalan dan udara) dan pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah 3TP, melalui: ○ Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik preservasi jalan dan jembatan Mensalong–Sp. Tiga Apas, preservasi jalan dan jembatan Sp. 4 Malinau–Mensalong–Tau Lumbis, preservasi jalan dan jembatan Tj. Selor–Sp. 3 Tj. Palas–Sekatak Buji–Sekatak Buji–Malinau, jalan akses simpul transportasi Lingkar Pulau Sebatik ○ Penanganan konektivitas jalan/jembatan non lintas utama, dengan *output*: pengembangan jalan koridor logistik serta pembangunan jembatan koridor logistik (*backbone*) • Swasembada energi serta penguatan konektivitas dan transisi energi listrik, melalui: ○ Peningkatan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan ○ Pembangunan jaringan distribusi dan listrik pedesaan ○ Pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk ○ Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, melalui: pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTA) dan pembangunan infrastruktur jaringan transmisi • Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, pengendalian penyakit menular (TBC dan malaria), melalui: ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output*: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan intervensi sensitif *stunting*, dengan *output*: pengembangan infrastruktur air minum berbasis masyarakat ○ Intensifikasi penemuan kasus dan pengobatan TBC, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit TB di Kota Tarakan ○ Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS di Kota Tarakan ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria di Kota Tarakan • Penguatan kualitas pendidikan dengan fokus terutama pada peningkatan partisipasi dan tingkat penyelesaian jenjang pendidikan menengah, melalui: ○ Pelatihan vokasi di sektor strategis ○ Peningkatan kualitas infrastruktur sosial, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Nunukan melalui pembiayaan SBSN ○ Peserta didik penerima bantuan operasional satuan pendidikan pendidikan anak usia dini (PAUD), dengan *output*: penyediaan bantuan operasional pendidikan (BOP) kepada siswa raudlatul athfal (RA)/PAUD ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pengentasan kemiskinan terutama di daerah afirmasi 3T, melalui: ○ Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ○ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: siswa SMA/SMK/MA/Sederajat penerima PIP, gerakan pangan murah yang dilaksanakan ○ Penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif • Penguatan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan, melalui: ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi peserta didik, dengan *output*: penyediaan bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M ○ Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat ○ Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
115	Perubahan Subbab 4.6.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sulawesi Tahun 2025 dalam halaman 245	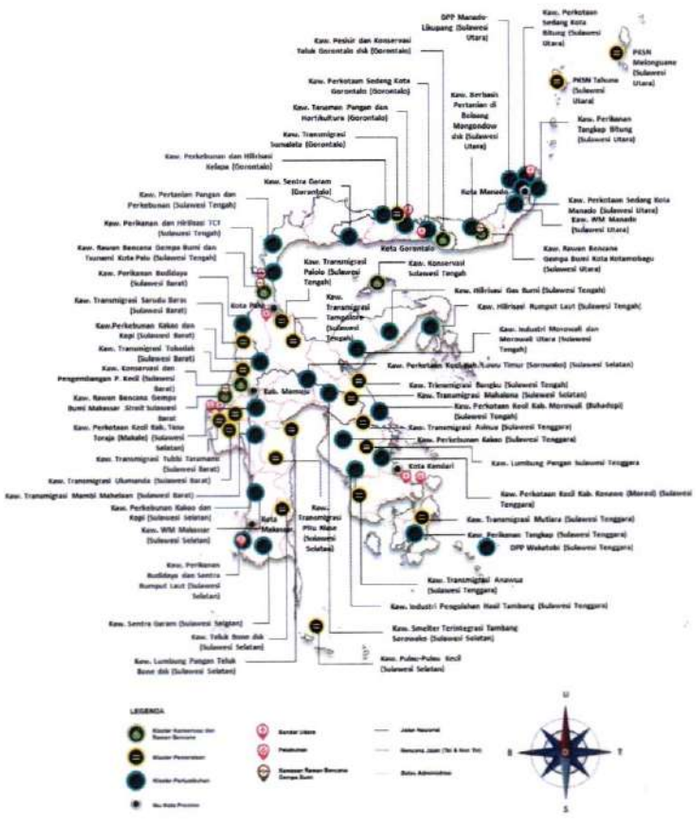
116	Perubahan Subbab 4.6.2 Provinsi Sulawesi Utara halaman 246 sampai dengan 249	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp Juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,4	74,6	0,9	5,59–8,19	0,339–0,352	0,52	54,90	78,71	5,01–5,86

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Destinasi Pariwisata Prioritas Manado–Likupang: • Kota Bitung • Kota Manado • Kota Tomohon • Kabupaten Minahasa • Kabupaten Minahasa Utara	• Percepatan pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: o Pengembangan aksesibilitas pariwisata dan konektivitas layanan transportasi, dengan *output:* pembangunan jalan mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Manado–Likupang, dan preservasi jalan ruas Airmadidi–Bts. Kota Tondano o Pengembangan atraksi (alam, bahari, budaya, buatan), dengan *output:* pengadaan *event* skala daerah, nasional, dan internasional, penerapan rencana aksi destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan pengadaan *event meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas penunjang, dengan *output:* Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta pembangunan fasilitas Pelabuhan P. Bangka-Kahuku ○ Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata, dengan *output:* pelatihan keterampilan SDM pariwisata, peningkatan kapasitas SDM pengelola destinasi wisata, sertifikasi SDM, dan pengembangan Politeknik Negeri Manado ○ Pemasaran pariwisata, dengan *output:* publikasi, promosi terpadu, pameran, kerja sama dengan maskapai, dan promosi wisata minat khusus ○ Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi, dengan *output:* fasilitas akses pembiayaan digital dan pasar modal berkualitas, rantai pasok industri, promosi investasi pariwisata, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, akses pembiayaan *startup*, transformasi digital industri, standardisasi usaha, koordinasi implementasi *blue, green, circular economy* pada usaha pariwisata, dan fasilitasi kawasan ekonomi khusus (KEK) ○ Peningkatan keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana, dengan *output:* penataan Kawasan Tondano, koordinasi dan penguatan tata kelola destinasi, serta pelaksanaan operasi SAR
		Wilayah Metropolitan Manado • Kota Bitung • Kota Manado • Kota Tomohon • Kabupaten Minahasa • Kabupaten Minahasa Utara	• Pembangunan Wilayah Metropolitan Manado yang berkelanjutan dalam sistem perkotaan nasional, melalui: ○ Pengembangan SPALD Perkotaan Kota Manado ○ Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan hijau yang berkelanjutan, dengan *output:* pembangunan jalan perkotaan dan jalan lingkar Manado *Outer Ring Road* ○ Peningkatan ketangguhan bencana, pengelolaan risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan *output:* pengendalian banjir Sungai Sario, Sungai Tikala, dan Sungai Tondano ○ Peningkatan layanan perkotaan dan kualitas lingkungan ○ Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan tata kelola perkotaan, dengan *output:* pengembangan desa wisata, *pilot project* kerja sama antardaerah dan multipihak dalam pembiayaan pembangunan perkotaan, penilaian Indeks Maturasi Perkotaan lintas K/L secara terpadu, penguatan *smart city*, kelembagaan pengelola WM Manado, dan advokasi dalam penerapan PP Perkotaan ○ Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output: Metropolitan Statistical Area*
		Kawasan Perkotaan Sedang • Kota Manado • Kota Bitung	• Pembangunan perkotaan nonwilayah metropolitan melalui pembangunan kawasan perkotaan sedang Kota Manado dan Bitung, dengan *output:* ○ Pembangunan dan peningkatan SPAM ○ Peningkatan layanan konektivitas transportasi ○ Penguatan instrumen peringatan dini bencana ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
		Kawasan Perikanan Tangkap Bitung • Kota Bitung	• Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Bitung, melalui: ○ Pengembangan pelabuhan perikanan utama Bitung yang berwawasan lingkungan *(eco fishing port)* ○ Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan *output:* sarana penyimpanan, gudang beku, sarana distribusi logistik, alat penangkapan ikan, dan kendaraan pemasaran ikan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan, dengan *output:* diklat pemberdayaan masyarakat, tata kelola budidaya ikan air laut, peningkatan eksportir kelautan perikanan baru, pemantauan sosial ekonomi masyarakat kelautan perikanan, pelatihan petugas kesyahbandaran, dan pendampingan pelaku sektor industri makanan, laut, dan perikanan ○ Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan, dengan *output:* pengembangan klaster ikan nila salin, sentra produksi rumput laut berbasis kawasan, promosi usaha, temu bisnis pada pameran produk di dalam negeri dan internasional, investasi strategis kelautan perikanan termasuk komoditas Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT) dan ikan Tilapia terpadu, peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, serta kerja sama internasional bidang kelautan dan perikanan
	Kawasan Berbasis Pertanian di Bolaang Mongondow dan sekitarnya: • Kabupaten Bolaang Mongondow Utara • Kabupaten Bolaang Mongondow • Kabupaten Minahasa Selatan • Kota Kotamobagu • Kota Tomohon	• Pengembangan industrialisasi berbasis komoditas unggulan pertanian yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow dan sekitarnya, melalui: ○ Penguatan akses pasar komoditas pertanian dan turunannya, dengan *output:* sertifikasi dan pengembangan produk mutu pestisida, pupuk dan produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utama termasuk komoditas kelapa, serta pengembangan koridor logistik Worotican-Poigar ○ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output: integrated corporation agriculture resources empowerment*, pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif ○ Pengembangan kawasan peternakan dan peningkatan kualitas pangan hewani, dengan *output:* pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani, penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen dan pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah, dan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan mendukung penguatan kawasan peternakan ○ Peningkatan ekspor produk pertanian melalui pengembangan koperasi, promosi, dan kerja sama, dengan *output:* peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, rekomendasi kebijakan terkait harga patokan ekspor produk pertanian dan kehutanan, *prototyping, piloting project,* dan *business plan* industri suplemen kapsul vitamin A (*betacarotene*), vitamin E (*tocopherol*) alami berbasis minyak sawit, promosi dan temu bisnis pada pameran berskala internasional dalam rangka peningkatan ekspor produk industri makanan, kerja sama pengembangan ekspor produk primer, dan kerja sama perdagangan dalam forum organisasi kelapa internasional ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan *output:* rehabilitasi D.I. Dataran Kotamobagu dan D.I. Sangkub
	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • KPP MAPALUS, Kabupaten Minahasa	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas MAPALUS, Kabupaten Minahasa, melalui: ○ Penyediaan layanan dasar, dengan *output:* pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan jaringan distribusi, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ○ Peningkatan aksesibilitas, dengan *output:* pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/*lastmile* dan akses internet ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output:* pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal pariwisata, dengan *output:* preservasi dan resiliensi adat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim ○ Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis *digital*, dengan *output:* pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD
		Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kecamatan Perbatasan Prioritas • PKSN Tahuna dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Kendahe), Kabupaten Kepulauan Sangihe • PKSN Melonguane dan Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Damau, Kec. Pulutan, dan Kec. Nanusa), Kabupaten Kepulauan Talaud • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Siau Barat, Kec. Siau Barat Utara) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Likupang Barat, Kec. Wori) Kabupaten Minahasa Utara • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Tatapan, Kec. Tenga, Kec. Sinonsayang) Kabupaten Minahasa Selatan • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolaang Timur) Kabupaten Bolaang Mongondow • Kecamatan Perbatasan Prioritas (Kec. Bolangitang Barat, dan Kec.	• Pembangunan kawasan perbatasan di PKSN Tahuna, PKSN Melonguane, dan Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, dan pengawasan pelaksanaan BBM satu harga ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan, dengan *output*: *replacement* fasilitas Pelabuhan Matutuang, Kabupaten Kepulauan Sangihe, layanan angkutan laut perintis prioritas nasional, dan pengembangan kawasan pala

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Pinogaluman) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
		Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sulawesi Utara • Kota Kotamobagu	• Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa bumi Sulawesi Utara, melalui: ○ Pengelolaan multiancaman bencana geologi dan pengembangan mitigasi berbasis alam, dengan *output:* peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan *accelerograph* melalui Indonesia *disaster resilience initiatives project* (IDRIP), perapatan stasiun Indonesia *continuously operating reference station* (Ina-CORS), peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi ○ Peningkatan keandalan infrastruktur berketahanan bencana seismik, dengan *output:* rekomendasi ketahanan bangunan dan penataan bangunan kawasan rawan bencana ○ Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dengan *output:* layanan pemulihan sosial, ekonomi, sumberdaya alam dan lingkungan di daerah pascabencana
		Provinsi Sulawesi Utara	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Penguatan layanan transportasi dan infrastruktur konektivitas integrasi ekonomi dan logistik, melalui: ○ Peningkatan layanan konektivitas laut dan integrasi *hinterland* dengan simpul utama, dengan *output:* Pelabuhan Perikanan Utama Bitung, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Miangas, serta pelabuhan lainnya di pulau terluar yang berwawasan lingkungan ○ Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output:* pembangunan Jalan Strategis-Jalan Manado *Outer Ringroad* III, pengembangan pelabuhan, *replacement* fasilitas Pelabuhan Matutuang, *replacement* fasilitas laut Pelabuhan Kotabunan, preservasi Jalan Bts Kota Tahuna–Naha, Bts Kota Tahuna–Tamako (Kepulauan Sangihe) • Perluasan jangkauan pelayanan energi di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui: ○ Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ○ Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi hulu ke hilir, ○ Pemenuhan akses sanitasi aman ○ Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, perluasan akses dan interkoneksi layanan listrik terisolasi (*isolated grid*) , dengan *output:* pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTU), pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T, dan peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari ○ Pemerataan jaringan telekomunikasi, internet cepat, dan adopsi digital ke seluruh wilayah serta adopsi *digital* di berbagai layanan publik, dengan *output:* penyediaan fiber optik pada daerah (kecamatan) di kawasan prioritas, OM BTS 4G / *lastmile*, OM akses internet, layanan publik bidang telekomunikasi, fasilitasi literasi *digital*, portal layanan administrasi, pendampingan *smart city*, pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian, perikanan, dan logistik, fasilitasi digital *technopreneur*, pengendalian PSE, akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta fasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama • Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, penurunan *stunting*, dan akses kesehatan reproduksi perempuan, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Percepatan penurunan dan penguatan intervensi spesifik serta sensitif *stunting*, dengan *output:* ibu hamil dan balita yang mendapat *buffer stock*, kegiatan *surveilans* gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, pelatihan *stunting*, kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan *stunting*, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, dan keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, dengan *output:* daerah yang fasilitasi terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, vaksin lainnya dan logistik penunjang vaksinasi, model kurikulum yang adaptif dan kontekstual, bantuan pengembangan peningkatan mutu UKS/M ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif, dengan *output:* pembinaan lembaga dalam penerapan kesehatan kerja, tenaga kesehatan yang ditingkatkan kapasitas terkait kesehatan kerja, dan sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia, dengan *output:* penguatan program dalam mendukung indikator usia produktif dan lansia, koordinasi pelayanan kelompok rentan, sosialisasi kesehatan lansia, sistem informasi kesehatan usia produktif dan lansia, dan fasilitasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan upaya kesehatan produktif dan lansia ○ Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan *output:* peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi (kespro) dan KB, fasyankes yang terpenuhi ketersediaan alat/obat kontrasepsi (Alokon), PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja, fasilitasi, intensifikasi dan integrasi pelayanan KBKR di wilayah khusus, dan bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender (*stunting*/AKI, perubahan iklim, kespro) • Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Penuntasan TBC, dengan *output:* obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TB, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, dan layanan informasi dan edukasi TBC ○ Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output:* koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS dan layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output:* obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria dan layanan informasi dan edukasi malaria ○ Pengendalian penyakit kusta, dengan *output:* layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia dan daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah ○ Pengendahan penyakit rabies, dengan *output:* kemitraan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* • Penguatan akses pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses, melalui: ○ Penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan ekosistem digital di daerah sulit akses, dengan *output:* implementasi layanan *telemedicine*, pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, serta RS kapal ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan *output:* pemenuhan ketersediaan 40 obat esensial dalam JKN, instalasi farmasi kabupaten/kota yang menerapkan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar, dan peningkatan ABGCI dalam peningkatan akses obat inovatif

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan kapasitas dan peran puskesmas, dengan *output:* koordinasi manajemen puskesmas dalam penguatan integrasi layanan primer, tenaga kesehatan yang diorientasi/dilatih manajemen puskesmas, tenaga kesehatan yang diorientasi/diberikan pelatihan (SOPHI), dan pelatihan terkait layanan primer dan rujukan ○ Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan peningkatan peran kader kesehatan, dengan *output:* revitalisasi posyandu, sarana puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan posyandu (SOPHI), pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pemantauan wilayah dengan pendekatan keluarga ○ Pengembangan layanan unggulan dan rujukan kesehatan, dengan *output:* pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota, serta peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur ○ Peningkatan dan pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan profesional terutama di daerah sulit akses dan afirmasi, dengan *output:* akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer, pendayagunaan dokter spesialis (SDM), dan peningkatan kompetensi melalui program *fellowship* • Pengembangan sarana dan prasarana, perluasan akses pendidikan sektor strategis, dan penguatan sumber daya manusia yang siap di dunia usaha dan dunia industri, melalui: ○ Pengembangan sarana, prasarana, perluasan akses pendidikan menengah, tinggi dan vokasi sektor strategis, pengembangan bidang *science, technology, engineering, art, and math* (STEAM), peningkatan daya saing riset dan inovasi di berbagai bidang, dengan *output:* penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan, revitalisasi sarana dan prasarana Politeknik Negeri Manado dan Politeknik Negeri Nusa Utara, bangunan pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi industri yang ditingkatkan kapasitasnya, satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja, sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi, serta program studi dengan inovasi pembelajaran digital dan berkualitas ○ Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output:* SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non-aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem 3 *in* 1 (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, pelatihan vokasi industri *upskilling* dan *reskilling* ○ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output:* talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pengentasan kemiskinan, peningkatan ketangguhan keluarga, dan integrasi bantuan sosial yang adaptif dengan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif yang inklusif untuk seluruh masyarakat terutama kelompok miskin, rentan, lansia yang memasuki *aging population* dengan *output:* penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non-alam yang mendapat bantuan ○ Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, dengan *output:* lembaga posyandu yang ditingkatkan kapasitasnya dalam implementasi 6 SPM, kelompok masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang sosial budaya dan kelembagaan di daerah lambat tumbuh, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terpusat berbasis masyarakat • Peningkatan ketangguhan bencana di perkotaan, pesisir pantai, dan pulau-pulau kecil terluar, dengan *output:* ○ Pembangunan pengaman Pantai Amurang dan Pantai Batu Pinagut ○ Peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensity meter* dan *accelerograph* melalui IDRIP ○ Penyusunan peta geologi gunung api dan kawasan rawan bencana geologi, ○ Dokumen harmonisasi Rperpres RDTR KPN ○ Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Penguatan perencanaan kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA), taman buru (TB), dan konservasi sumber daya air di DAS Tondano • Konservasi sumber daya air di DAS Tondano, dengan *output:* ○ Penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat ○ Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan stakeholder lainnya utamanya di das yang dipulihkan ○ Rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif
117	Perubahan Subbab 4.6.3 Provinsi Sulawesi Tengah halaman 249 sampai dengan 252	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025 | 11,2 | 135,8 | 1,8 | 10,50–10,80 | 0,298–0,302 | 0,51 | 77,96 | 81,78 | 2,28–2,94 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Morowali • Kabupaten Morowali	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Kecil berbasis industri di Kabupaten Morowali (Bahodopi), dengan *output*: ○ Ruang Terbuka Publik (RTP) Bahomakmur dan Keurea ○ Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ○ Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara	• Penguatan hilirisasi industri berbasis mineral di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Morowali • Kabupaten Morowali Utara	○ Pengembangan Kawasan Industri (KI) Indonesia Huabao Industrial Park, Kawasan Industri Morowali, dan Kawasan Industri Stardust ○ Pengembangan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Morowali dan pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali ○ Peningkatan investasi kawasan, dengan *output*: penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal, percepatan rencana proyek strategis di bidang jasa dan kawasan, pengembangan dan penataan kawasan industri, serta pendampingan pemenuhan dan kepatuhan kawasan industri terhadap regulasi yang berlaku ○ Pengembangan kemitraan usaha pelebaran jalan akses Bandar Udara Morowali dan rantai pasok, dengan *output*: kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka, fasilitasi sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangan, pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar di KI Prioritas, dan inkubasi bisnis untuk pembentukan wirausaha industri ○ Penyediaan pendidikan dan pelatihan, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Tadulako melalui pembiayaan SBSN ○ Pengembangan Industri Komoditas Utama Hilirisasi, dengan *output*: penguatan industri logam berbasis pengolahan komoditas nikel, (Industri Katoda, Industri MHP, dan Nikel Sulfat) ○ Pembangunan industri baterai, dengan output: fasilitasi industri dalam rangka peningkatan investasi dan ekspor serta perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi ○ Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan *output*: fasilitasi industri dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri serta peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan restrukturisasi mesin/peralatan sentra IKM dan UPT logam, mesin, elektronika, dan alat angkut ○ Pengembangan industri stainless steel, dengan *output*: monitoring dan evaluasi perkembangan industri, fasilitasi peningkatan investasi dan ekspor, serta fasilitasi dan pendampingan peningkatan daya tahan industri ○ Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional, dengan *output*: penurunan emisi Gas Rumah Kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, dan sertifikasi industri hijau ○ Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan *output*: penguatan standardisasi untuk hilirisasi
		Kawasan Hilirisasi Gas Bumi Sulawesi Tengah • Kabupaten Banggai	• Pengembangan Kawasan Hilirisasi Gas Bumi di Kabupaten Banggai, melalui: ○ Peningkatan penyediaan dan layanan gas bumi, dengan *output*: fasilitasi pembangunan infrastruktur regasifikasi gas bumi dan *Liquefied Natural Gas* (LNG) terminal serta dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi ○ Transformasi kebijakan ekosistem investasi dan hilirisasi, dengan *output*: fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi serta penyusunan rencana aksi nasional hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi
		Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan Sulawesi Tengah	• Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan dan Perkebunan di Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Sigi • Kabupaten Donggala • Kabupaten Poso • Kabupaten Parigi Moutong • Kabupaten Buol • Kabupaten Tolitoli	○ Penguatan konektivitas jalan, dengan *output*: preservasi ruas jalan Tolai–Sausu di Kabupaten Parigi Moutong dan Tagolu–Tentena di Kabupaten Poso ○ Pemanfaatan sarana prasarana pendukung produksi pertanian ○ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), Dampak Perubahan Iklim (DPI), dan gangguan lainnya kawasan pertanian ○ Peningkatan mutu produk, dengan *output*: sertifikasi produk mutu pestisida ○ Penguatan regenerasi petani ○ Pengembangan teknologi pertanian ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: rehabilitasi DI Sausu, DI Mentawa, dan DI Gumbasa ○ Penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen dan pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah ○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani ○ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, melalui: pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta pengembangan kewirausahaan
		Kawasan Perikanan dan Hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) • Kabupaten Parigi Moutong • Kabupaten Donggala • Kabupaten Morowali • Kabupaten Banggai Laut • Kabupaten Banggai Kepulauan	• Pengembangan kawasan perikanan dan hilirisasi Tongkol, Cakalang, Tuna (TCT) di Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: ○ Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: pengembangan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan ○ Penguatan konektivitas udara ○ Pengembangan input produksi perikanan ○ Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha dan pendampingan masyarakat kelautan dan perikanan ○ Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, melalui: pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta pengembangan kewirausahaan
		Kawasan Hilirisasi Rumput Laut Sulawesi Tengah • Kabupaten Banggai Kepulauan	• Pengembangan kawasan sentra hilirisasi rumput laut di Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui: ○ Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: pengembangan Pelabuhan Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan ○ Pengembangan industri hilir rumput laut
		Kawasan Perdesaan Prioritas • Kawasan Perdesaan Salangkaba, Kabupaten Morowali	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Salabangka, di Kecamatan Bungku Selatan dan Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, melalui: ○ Penyediaan layanan dasar, dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ○ Peningkatan aksesibilitas, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan, pengembangan OM BTS 4G/*Lastmile* dan akses internet ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal ekowisata, dengan *output*: preservasi dan resiliensi adat istiadat budaya lokal, pengembangan interaksi pemajuan budaya di wilayah adat, penguatan tanggap bencana dan resiliensi desa terhadap bencana iklim ○ Peningkatan kapasitas tata kelola dan kelembagaan berbasis digital, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi Sistem Informasi Desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD
		Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Paleleh Barat, Kec. Gadung, Kec. Bokat, Kec. Biau, dan Kec. Karamat, Kabupaten Buol • Kec. Toli-Toli Utara, Kec. Dako Pemean, dan Kec. Dampal Utara, Kabupaten Toli-Toli	• Pembangunan kawasan perbatasan di Kecamatan Perbatasan Prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas
		Kawasan Transmigrasi (KT)	• Pengembangan kawasan transmigrasi: ○ KT Tampolore, Kabupaten Poso ○ KT Bungku, Kabupaten Morowali ○ KT Palolo, Kabupaten Sigi
		Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah • Taman Nasional Lore Lindu, Kabupaten Sigi • Taman Nasional Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una • Kabupaten Banggai • Kabupaten Banggai Kepulauan • Kabupaten Banggai Laut • Kabupaten Tolitoli	• Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional (TN) Lore Lindu serta Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di TN Togean, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, dan Kabupaten Tolitoli, melalui: ○ Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penyusunan kebijakan penguatan pengelolaan areal dengan keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), fasilitasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati untuk peningkatan efektivitas pengelolaan, serta pemulihan ekosistem daratan yang terdegradasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, serta pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir serta pengendalian pemanfaatan ruang laut, dengan *output*: penyusunan kebijakan verifikasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di daerah serta pembangunan sistem monitoring dan pengendalian pemanfaatan ruang laut ○ Pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil ○ Penguatan tata kelola industri, wisata bahari, dan jasa kelautan berkelanjutan, dengan *output*: fasilitasi pemetaan potensi biofarmakologi dan pemanfaatan air laut, penyusunan kebijakan berusaha jasa kelautan serta pengelolaan wisata bahari

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove, pemulihan padang lamun/terumbu karang serta penyediaan prasarana rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil ○ Penguatan dan pengelolaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: fasilitasi dan perlindungan pemanfaatan ruang laut bagi masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan penguatan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Palu • Kota Palu	• Pengelolaan kawasan rawan bencana gempa Palukoro, Matano, dan Saluki di Kota Palu, melalui: ○ Pelayanan peringatan dini multiancaman bencana dan peningkatan infrastruktur, dengan *output*: penguatan instrumen peringatan dini dan sistem informasi bidang kebencanaan ○ Peningkatan kemampuan adaptif masyarakat dalam menghadapi bencana, dengan *output*: peningkatan kapasitas masyarakat dalam penguatan tanggap bencana, fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam, serta pembinaan penguatan *respond system* peringatan dini bencana berbasis masyarakat ○ Peningkatan infrastruktur, dengan *output*: penataan bangunan dan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL)* ○ Retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik ○ Penerapan *nature-based solution* dan *gray infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami
	Provinsi Sulawesi Tengah	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pengembangan kawasan sentra produksi garam, melalui: ○ Pengembangan garam industri terintegrasi ○ Penguatan sarana dan prasarana industri garam ○ Pengembangan korporasi petambak garam • Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, melalui: ○ Penguatan infrastruktur konektivitas laut, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Bungin dan Pelabuhan Salakan ○ Penguatan infrastruktur konektivitas jalan, dengan *output*: pembangunan jalan Akses Utama Huntap Petobo dan Huntap Donggala, rekonstruksi Jalan Rajamoili–Cut Moili (*coast area*) dalam rangka pelaksanaan *Infrastructure Reconstruction Sector Loan* (IRSL) • Pengembangan infrastruktur perumahan dan permukiman termasuk penyediaan air minum, listrik, telekomunikasi/internet, dan layanan sanitasi, melalui: ○ Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terintegrasi dari hulu ke hilir ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dan digitalisasi masyarakat, serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, melalui: pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM dan PLTMG), pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ○ Peningkatan kapasitas dan pendanaan pendorong pengelolaan sampah, dengan *output*: penerapan tata kelola persampahan di daerah, penyediaan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dukungan untuk peningkatan proporsi pajak

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dorongan daerah dalam melakukan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) ○ Perubahan perilaku untuk pemilahan sampah, dengan *output*: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan di satuan pendidikan formal, serta fasilitasi dan pembinaan implementasi 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, melalui: ○ Tata Kelola registrasi sosial ekonomi, dengan *output*: koordinasi strategis penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pengendalian PSE (Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik) dan PSrE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk), serta pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial ○ Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan *output*: penerapan sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data terpadu kesejahteraan sosial, data dan informasi ketersediaan pangan, data pengadaan tanah, serta data dan informasi pendidikan dan kebudayaan ○ Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, dengan *output*: penyediaan bantuan iuran PBI JKN, bantuan sosial bersyarat bagi keluarga, KIP Kuliah, cadangan pangan pemerintah, dan elpiji 3 kg yang tepat sasaran • Penguatan ekonomi, melalui: ○ Program Kartu Usaha dengan *output*: pelatihan, penguatan kapasitas, akses permodalan, dan pendampingan yang tersebar di berbagai sektor dengan tujuan untuk kemandirian dan mengurangi kemiskinan ○ Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pemula, dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan • Eliminasi penyakit endemik *Schistosomiasis* di Kabupaten Sigi dan Kabupaten Poso serta peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Pengendalian penyakit *Schistosomiasis*, dengan *output*: penyediaan layanan pemantauan untuk pencegahan dan pengendalian *Schistosomiasis*, pembinaan program pengendalian *Schistosomiasis*, serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan ○ Pencegahan dan penurunan *stunting*, dengan *output*: penyediaan makanan tambahan dari *Buffer Stock* untuk balita, pelaksanaan pemantauan gizi dan KIA, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan/non-kesehatan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, fasilitasi dan pembinaan kepada daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, penerapan konvergensi pencegahan dan penurunan *stunting* di daerah, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan nonkesehatan terkait upaya perbaikan status gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan *output*: penyediaan layanan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar serta penguatan deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis, dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: ○ Pembangunan rumah sakit lengkap, dengan *output*: pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok dan sistem rujukan berbasis kompetensi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan *output*: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, serta penyediaan RS Kapal di wilayah kepulauan ○ Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan *output*: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, serta pelatihan strategis SDM kesehatan di RS Pemerintah ○ Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan *output*: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, serta pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) • Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pengembangan bidang STEAM, penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: ○ Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan *output*: dukungan terhadap SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (*teaching factory*), dukungan terhadap SDM dalam mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri, fasilitasi SMK agar *link and match* dengan industri, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, serta inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • Penguatan pendidikan dasar, menengah, tinggi dan pengembangan bidang STEAM, penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: ○ Penguatan pendidikan menengah vokasi, dengan *output*: dukungan terhadap SMK yang mengembangkan pengajaran berbasis pabrik (*teaching factory*), dukungan terhadap SDM dalam mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri dan program kelas industri, fasilitasi SMK agar *link and match* dengan industri, peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi, serta inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja • Pelestarian dan pemajuan ekosistem kebudayaan, melalui: ○ Pemberdayaan masyarakat dan komunitas adat, dengan *output*: pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) serta pengembangan wilayah adat sebagai ruang interaksi pemajuan kebudayaan ○ Perlindungan hutan adat dan tanah ulayat, dengan *output*: penyelenggaraan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan bagi satuan pendidikan formal, penyediaan data inventarisasi tanah ulayat, dan pendaftaran tanah ulayat • Perwujudan swasembada air melalui konservasi sumber daya air di DAS Palu Poso, dengan *output*: penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan; serta rehabilitasi mangrove

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
118	Perubahan Subbab 4.6.4 Provinsi Sulawesi Selatan halaman 252 sampai dengan 255	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,5	78,8	8,2	7,36–7,89	0,371–0,376	0,53	37,00	77,60	3,80–4,10

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
Kawasan Wilayah Metropolitan Makassar dan sekitarnya • Kota Makassar • Kabupaten Maros • Kabupaten Gowa • Kabupaten Takalar • Kota Pare-Pare • Kabupaten Barru	• Peningkatan kualitas Wilayah Metropolitan Makassar (Mamminasata) dan sekitarnya yang berkelanjutan, melalui: o Peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya, termasuk di pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan *output*: penataan kawasan strategis di Wilayah Metropolitan Makassar, serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang pendidikan dan kesehatan o Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan untuk mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan, dengan *output*: penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual yang meliputi (a) penguatan ekosistem pemampu ekonomi kreatif; (b) penguatan ekosistem film, animasi, video, dan musik; (c) penguatan ekosistem fesyen dan kriya; (d) penguatan ekosistem aplikasi dan gim; serta (e) penguatan ekosistem kuliner, digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya, *digital talent scholarship*, pengembangan UIN Alauddin Makassar, penguatan rumah sakit pendidikan di Universitas Hasanuddin, pembangunan gedung PTK Islam Negeri melalui SBSN serta sarana dan prasarana bidang pendidikan Poltekpar Makassar o Penguatan konektivitas dan pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang terintegrasi dengan TOD, dengan *output*: penyelenggaraan layanan kereta api perintis lintas Makassar–Parepare (KA Makassar–Parepare), pembangunan jalan perkotaan, pengembangan angkutan umum massal perkotaan di Kota Makassar, pembangunan terminal penumpang Tipe A Mandai, pembangunan jalan perkotaan, peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan o Peningkatan kapasitas dan tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas dan terpadu, serta pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola WM Makassar, dengan *output*: daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP Perkotaan pada Wilayah Metropolitan, daerah yang dikuatkan tata kelola *smart city*-nya o Pengembangan infrastruktur dan prasarana olahraga, khususnya Stadion Sudiang, dengan *output*: peningkatan prestasi dan sarana prasarana olahraga melalui pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana prasarana olahraga o Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan. o Kerja sama antar daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan antardaerah melalui pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah (*transboundary management*) dan lintas pemerintahan (*fragmented government*) serta penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan *output*: pertemuan teknis di daerah dengan pemangku kepentingan dan kesepakatan pemasaran produk perikanan di dalam negeri, *export center* Makassar, serta pengawasan, kerja sama, penguatan, dan koordinasi kegiatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			perdagangan lingkup regional, nasional dan internasional sesuai dengan komoditas unggulan ○ Peningkatan manajemen risiko dan pengendalian banjir di perkotaan, dengan *output*: peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25–50 tahunan ○ Peningkatan cadangan dan produktivitas energi, dengan *output*: North Hub Development Project Selat Makassar ○ Penguatan industri transportasi laut, terutama di Kota Makassar, dengan *output*: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, serta pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan ○ Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil Kota Makassar, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, Oceans for Prosperity Project–LAUTRA ○ Pengembangan data berbasis kawasan fungsional sebagai basis perencanaan untuk perkotaan, dengan *output*: *Metropolitan Statistical Area*
		Kawasan Perkotaan Kecil • Kabupaten Luwu Timur • Kabupaten Tana Toraja	• Pembangunan perkotaan nonwilayah metropolitan melalui pembangunan kawasan perkotaan kecil, dengan *output*: ○ Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Bantuan peralatan/sarana
		Kawasan Smelter Terintegrasi Tambang Sorowako • Kabupaten Luwu Timur	• Pengembangan kawasan dan hilirisasi nikel di smelter terintegrasi tambang Sorowako, Luwu Timur, melalui: ○ Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan *output*: rekomendasi keprospekan sumber daya mineral, kebijakan rencana produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, tingkat implementasi P3DN dan peningkatan TKDN pada subsektor pertambangan mineral, serta hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri ○ Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri nikel yang sejalan dengan dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Industri Nikel Nasional untuk mewujudkan komitmen *Net Zero Emissions* (NZE) nasional, dengan *output*: penurunan emisi gas rumah kaca, pengkajian kebutuhan standar industri hijau, penerapan transisi energi dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemanfaatan teknologi dan pendampingan pencegahan pencemaran industri, sertifikasi industri hijau, fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi, serta kebijakan penguatan industri logam berbasis nikel ○ Hilirisasi industri berbasis mineral penting, terutama nikel, dengan *output*: hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri, industri smelter/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi termonitor dan terevaluasi, serta fasilitasi industri pengolahan sisa hasil produksi smelter nikel
		Kawasan Perkebunan Kopi dan Kakao • Kabupaten Toraja Utara • Kabupaten. Luwu	• Pengembangan sentra perkebunan, terutama kopi di Toraja Utara dan kakao di Luwu, Luwu Utara, dan Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan melalui: ○ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, dengan *output*: fasilitasi hilirisasi investasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Luwu Utara • Kabupaten Pinrang	
		Kawasan Perikanan dan Sentra Rumput Laut • Kabupaten Takalar • Kabupaten Pangkajene Kepulauan	• Pengembangan sentra perikanan budidaya dan rumput laut Kabupaten Takalar dan Pangkajene Kepulauan, melalui: ○ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan) ○ Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut ○ Hilirisasi, peningkatan rantai nilai, promosi, dan penguatan sumber daya manusia, dengan *output*: fasilitasi investasi hilirisasi industri, penguatan kapasitas petani, pengembangan biostimulan berbasis rumput laut, dukungan pembiayaan, rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut dan kewirausahaan pemuda, memperkuat koperasi rumput laut, serta pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut ○ Pengembangan input produksi rumput laut
		Kawasan Sentra Garam • Kabupaten Takalar • Kabupaten Jeneponto • Kabupaten Pangkajene Kepulauan	• Pengembangan kawasan sentra garam industri, melalui: ○ Pengembangan korporasi petambak garam ○ Pengembangan garam industri terintegrasi ○ Penguatan sarana dan prasarana industri garam
		Kawasan Lumbung Pangan Teluk Bone dan sekitarnya • Kabupaten Luwu Timur • Kabupaten Luwu • Kabupaten Luwu Utara • Kabupaten Wajo • Kabupaten Bone • Kabupaten Sinjai • Kabupaten Bulukumba • Kabupaten Sidenreng Rappang • Kabupaten Pinrang	• Penguatan swasembada pangan serta pengembangan ekonomi biru di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya, melalui: ○ Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian ○ Peningkatan sarana prasarana, dengan *output*: pengembangan lahan pertanian produktif, alat dan mesin pertanian, pembangunan DI Gilireng dan DI Baliase serta rehabilitasi DI Kelara Karalloe, DI Pamukkulu, DI Saddang, dan DI Tinco ○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani ○ Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan ○ Pengembangan input produksi, sarana prasarana, kawasan berbasis unggulan, penguatan dan tata kelola perikanan budidaya ○ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan ○ Pengembangan budidaya komoditas unggulan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin), nila, dan rumput laut (Karagenan, Tepung Agar-Agar, Biostimulan) ○ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan ○ Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan ○ Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, dengan *output*: pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta pengembangan kewirausahaan
		Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) • KPP Agrowisata Gurilla, Kabupaten Barru	• Peningkatan Kawasan Perdesaan Prioritas Gurilla, melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi), dengan *output*: pemenuhan akses layanan kesehatan, pembangunan sarana pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur air

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			minum berbasis masyarakat, pembangunan jaringan distribusi, pembangunan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat ○ Peningkatan aksesibilitas desa (jalan, internet, dan telekomunikasi), dengan *output*: perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator, peningkatan pasokan tenaga listrik 24 jam/hari, OM BTS 4G/*Lastmile*, serta sarana prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan ○ Pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pengembangan sarana dan prasarana perdagangan, pengembangan obyek wisata, fasilitasi BUMDesa, promosi dan hilirisasi komoditas berbasis produk unggulan, pendampingan desa, dan pengembangan BUMDesa ○ Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya), dengan *output*: penguatan perbenihan komoditas pertanian desa wisata di wilayah destinasi II yang dikembangkan, pengembangan, dan penguatan tata kelola desa wisata ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa, dengan *output*: pengembangan Akademi Desa 4.0, pengembangan desa cerdas, penerapan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital, pengembangan sistem indeks desa, serta integrasi sistem informasi desa berbasis Prodeskel/Epdeskel dengan SIPD ○ Peningkatan ketahanan sosial dan lingkungan perdesaan, dengan *output* penguatan desa tanggap bencana dan peningkatan resiliensi adat istiadat, serta budaya nilai lokal
		Kawasan Transmigrasi (KT)	• Pengembangan kawasan transmigrasi: ○ KT Mahalona, Kawasan Luwu Timur ○ KT Pitu Riase, Kawasan Sidenreng Rappang
		Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan • Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan • Kabupaten Kepulauan Selayar	• Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di Kawasan Pulau-Pulau Kecil Sulawesi Selatan (Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kepulauan Selayar), melalui: ○ Pemenuhan SPAM, sistem pengelolaan air limbah dan sanitasi, dengan *output*: pemenuhan akses air minum aman dengan pengembangan spam terintegrasi hulu ke hilir, dan pemenuhan akses sanitasi aman ○ Penguatan konektivitas laut, dengan *output*: peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan, pembangunan kapal patroli, peningkatan fasilitas Pelabuhan Laut Lampia, Kalatoa, dan Jinato ○ Pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, dengan *output*: sarana pendukung penyelenggara konservasi ekosistem, pengelolaan kawasan yang ditingkatkan kompetensinya, dan Oceans for Prosperity Project-LAUTRA ○ Penguatan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan, dengan *output*: terpenuhinya sarana dan prasarana bidang kesehatan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan; pemenuhan obat, vaksin, dan alat kesehatan; serta implementasi layanan *telemedicine*
		Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya • Kabupaten Luwu Timur • Kabupaten Luwu • Kabupaten Luwu Utara • Kabupaten Wajo	• Pemerataan kawasan di Kawasan Teluk Bone dan sekitarnya , melalui: ○ Pemenuhan infrastruktur dan pelayanan dasar, dengan *output*: terpenuhinya akses dan pelayanan terkait energi, air minum, sanitasi, dan persampahan ○ Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi, dengan *output*: *replacement* fasilitas Pelabuhan Larea-Rea Sinjai, peningkatan fasilitas Pelabuhan Lampia, pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Bone • Kabupaten Sinjai • Kabupaten Bulukumba • Kabupaten Enrekang • Kota Palopo	Pelabuhan Sinjai, pengembangan Bandar Udara Arung Palakka-Bone
		Provinsi Sulawesi Selatan	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Penguatan konektivitas udara, laut, jalan, dan darat, melalui: ○ Pengembangan jaringan bandara terpadu, dengan *output*: Bandar Udara Sultan Hasanuddin; angkutan udara perintis penumpang, termasuk di Seko, Sorowako, serta Tanatoraja ○ Pembangunan dan pengembangan konektivitas perairan, dengan *output*: pengembangan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan laut; layanan angkutan perintis laut dan penyeberangan perintis menuju Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara ○ Pembangunan, peningkatan, dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: pembangunan dan preservasi jalan nasional di jalan lintas provinsi ruas Koppe–Taccipi–Bts. Kota Watampone dan Ujung Lamuru–Koppe; dan ruas Bts. Kota Jeneponto–Bts. Kota Bantaeng, pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, dan pengembangan terminal Tipe A • Pemenuhan pelayanan dasar di wilayah perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan wilayah 3T, melalui: ○ Pembangunan tampungan air untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, dengan *output*: pembangunan Bendungan Jenelata ○ Pembangunan serta pemenuhan akses SPAM Terintegrasi, dan pemenuhan akses sanitasi aman, dengan *output*: pemenuhan akses air minum aman dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ○ Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, dengan *output*: pembangunan infrastruktur pembangkit listrik (PLTM dan PLTA), pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk, serta pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, perluasan layanan penyiaran digital • Penguatan pelayanan, sumber daya manusia, dan tata kelola kesehatan, melalui: ○ Pengembangan unit pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output:* pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi; peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di Kab. Toraja Utara; serta penyediaan dan optimalisasi sarana posyandu, puskesmas, dan rumah sakit ○ Peningkatan kesediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan *output*: pemenuhan dan peningkatan alat kesehatan, industri obat, vaksin, dan alkes yang didampingi dalam pelaksanaan riset dan uji klinik ○ Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan, dengan *output*: penugasan khusus, pelatihan, dan bantuan pendidikan SDM kesehatan ○ Peningkatan pemanfaatan, inovasi teknologi, dan pelayanan kesehatan digital, dengan *output*: transformasi digital, implementasi layanan *telemedicine*, dan lembaga yang menggunakan pendekatan biomedis dan genom kesehatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), pencegahan dan penurunan *stunting* serta kematian ibu dan anak melalui: ○ Penuntasan TBC, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC, purwarupa alat deteksi penyakit, masyarakat mendapatkan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, serta layanan informasi dan edukasi TBC ○ Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: koordinasi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS, serta layanan deteksi dini dan respons kejadian penyakit menular ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: obat dan perbekalan kesehatan program pengendalian malaria, serta layanan informasi dan edukasi malaria ○ Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: layanan surveilans dan deteksi dini kusta dan frambusia, serta daerah mendapat pembinaan program kusta dan frambusia di daerah ○ Pengendalian penyakit rabies, dengan *output*: kemitraan pencegahan dan pengendalian *zoonosis* ○ Penguatan intervensi spesifik *stunting*, terutama di Jeneponto, Tanatoraja, dan Takalar, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*, tenaga kesehatan/nonkesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting*, kegiatan surveilans gizi dan KIA, fasilitasi dan pembinaan terkait upaya perbaikan status gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita, serta kampanye dan penyebarluasan informasi pencegahan *stunting* ○ Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi perempuan, dengan *output* peningkatan pelayanan kespro dan KB, fasyankes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon), PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan edukasi kespro dan gizi bagi remaja, serta bimtek dan supervisi dalam pelaksanaan program kesehatan dan lingkungan yang responsif gender (*stunting*/AKI, perubahan iklim, kespro) • Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan, melalui: ○ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap dan budi daya ○ Penguatan logistik, pemasaran, dan sistem rantai dingin produk perikanan ○ Pengembangan pangan akuatik ○ Peningkatan daya saing sumber daya manusia pembudidaya dan penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan ○ Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, dengan *output*: pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif, serta pengembangan kewirausahaan ○ Penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen, serta pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah ○ Perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dan nelayan melalui kartu usaha, guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian • Pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan, perluasan akses pendidikan sektor strategis, penguatan pendidikan tinggi, pengembangan bidang STEAM, serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja, melalui: ○ Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan *output*: sarana dan prasarana

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pendidikan vokasi dan perguruan tinggi yang direvitalisasi maupun dibangun ◦ Penguatan pendidikan menengah vokasi melalui penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, peningkatan kapasitas pendidik/instruktur vokasi, serta peningkatan peran dan kerja sama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi. ◦ Penguatan sumber daya manusia dan peningkatan peran dalam industri yang berbasis sektor unggulan daerah, dengan *output:* SDM yang mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, pelatihan pertanian bagi aparatur dan non-aparatur, sertifikasi profesi bidang pertanian, Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, pendidikan menengah dan tinggi vokasi pertanian, mahasiswa dan lulusan program di kerja sama industri, pendidikan vokasi kelautan dan perikanan, kemitraan antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, pengembangan kerja sama pelatihan, inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja, pengembangan kurikulum dan metode pelatihan, penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi, tenaga kerja industri kompeten lulusan diklat sistem *3 in 1* (pelatihan, sertifikasi, dan kompetensi), program kelas industri, fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, serta pelatihan vokasi • Perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui: ◦ Pengembangan tata kelola Regsosek, dengan *output*: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan *data center*; penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data ◦ Penguatan JKN dan penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN; koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah; keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah; KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako; penyediaan elpiji 3 kg yang tepat sasaran; subsidi listrik; bantuan logistik untuk korban bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial; peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha; serta penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ◦ Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan *output*: gerakan pangan murah yang dilaksanakan, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan ◦ Optimalisasi pemanfaatan kartu kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak ◦ Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas • Penguatan ekosistem budaya berbasis *urban heritage*, *rural heritage*, pemanfaatan cagar budaya di kawasan karst (*Geopark* Maros Pangkep), dan revitalisasi budaya bahari, serta pengembangan teknologi tradisional Kapal Pinisi (Kabupaten Bulukumba), melalui: ◦ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah berkelas internasional, dengan *output*: pengelolaan terpadu festival seni

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		budaya daerah berkelas internasional (salah satunya Festival *Geopark* Maros Pangkep) dan peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan ○ Pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan, dengan *output*: cagar budaya, ODCB, dan OPK yang dilestarikan, serta desa pemajuan kebudayaan ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: data dan informasi warisan budaya ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal berbasis *urban heritage*, dengan *output*: koleksi, cagar budaya nasional, dan benda budaya yang dikelola; pengelolaan terpadu cagar budaya di kawasan pemajuan kebudayaan pada kawasan karst; serta pengembangan budaya bahari dengan pengembangan teknologi tradisional kapal pinisi • Peningkatan ketahanan dan penanganan bencana serta penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengendalian risiko bencana di daerah rawan bencana, dengan *output*: pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan pengamanan pesisir pantai, pengembangan ruang terbuka hijau dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana, serta koordinasi dan penyusunan dokumen penanggulangan bencana ○ Pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan bencana, dengan *output*: penguatan desa/kelurahan tangguh bencana ○ Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan *output*: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata ○ Konservasi sumber daya air di DAS Jeneberang Saddang, dengan *output:* penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan; serta rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan ○ Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, serta pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: sarana SAR *rafting boat*, prasarana SAR, pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana • Pengembangan nilai tambah dan kompleksitas industri, termasuk hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mineral, pertanian dan perikanan dengan pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya, melalui: ○ Penguatan industri transportasi laut, dengan *output*: pengembangan industri galangan kapal sebagai industri berteknologi tinggi, penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan, serta pengembangan mutu dan daya saing industri perkapalan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut, dengan *output*: pengembangan garam industri terintegrasi, penguatan sarana dan prasarana industri garam, serta pengembangan produk olahan laut dan bioprospeksi sumber daya kelautan ○ Peningkatan produktivitas budi daya rumput laut untuk peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku dalam rangka pengembangan hilirisasi rumput laut, dengan *output*: bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut–Ocean for Prosperity–Infrastructure for Coral Reef Areas ○ Industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dengan *output*: penguatan rantai pasok industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur pengisian daya, pengembangan ekosistem EV, serta penerapan ekonomi sirkular pada industri baterai ○ Tata kelola dan pengembangan industri dan ketersediaan bahan baku industri nikel, tembaga, bauksit, dengan *output*: kebijakan dan inisiatif terkait penguatan industri logam, hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral, peningkatan daya saing dan produktivitas industri, serta pengawasan dan fasilitasi standar produk ○ Pengembangan industri hilir, jaminan ketersediaan bahan baku, peningkatan adaptasi teknologi, riset inovasi, dan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut dan komoditas unggulan lainnya, dengan *output*: peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan teknologi dan pembibitan tanaman unggul, fasilitasi investasi hilirisasi industri, serta penguatan kapasitas petani ○ Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan riset/inovasi industri padat karya terampil dan pengembangan industri *medium-high technology*, dengan *output*: verifikasi kemampuan industri kosmetik; penguatan rantai pasok sektor kimia, farmasi, dan tekstil; pengembangan bahan baku obat; penyederhanaan perizinan impor; penyempurnaan kebijakan impor untuk mendukung ketersediaan bahan baku; serta fasilitasi industri *mold and dies*
119	Perubahan Subbab 4.6.5 Provinsi Sulawesi Tenggara halaman 256 sampai dengan 258	Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. Lokasi Prioritas — *Highlight* Indikasi Intervensi Destinasi Pariwisata Prioritas: • Kabupaten Wakatobi • Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi dengan implementasi *blue, green, circular economy*, melalui: ○ Pengembangan aksesibilitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi, dengan *output:* aksesibilitas pariwisata ○ Pengembangan atraksi termasuk *event* berkualitas dan warisan Geologi Wakatobi, dengan *output:* pendukungan *event* daerah, pelaksanaan kegiatan nasional dan internasional, provinsi yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata, serta jejaring destinasi pariwisata di Sulawesi Tenggara yang dikembangkan ○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas Pariwisata Wakatobi ○ Pengembangan keterampilan SDM dan layanan pariwisata Wakatobi, dengan *output:* SDM pariwisata yang memperoleh pelatihan untuk pembekalan kerja, serta masyarakat yang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		memperoleh fasilitasi dan pembinaan peningkatan kapasitas SDM ○ Pemasaran Pariwisata Wakatobi, dengan *output:* publikasi, promosi terpadu, konten promosi wisata minat khusus, jejaring promosi wisata minat khusus ○ Pengembangan industri, usaha masyarakat dan investasi Pariwisata Wakatobi, dengan *output:* fasilitasi akses pembiayaan digital, pembiayaan *startup*, pembiayaan pasar modal, dan pembiayaan pariwisata berkualitas, rantai pasok industri pariwisata, advokasi dan pendampingan peningkatan realisasi investasi, promosi investasi pariwisata, transformasi digital industri pariwisata, dan penerapan pariwisata berkelanjutan ○ Keamanan, keselamatan, dan kemitigasian bencana Wakatobi, dengan *output:* pelaksanaan operasi SAR Kota Kendari
	Kawasan Perkotaan Kecil Kabupaten Konawe: • Kabupaten Konawe (Morosi)	• Pengembangan kawasan perkotaan kecil berbasis industri di Kabupaten Konawe, melalui: ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi dengan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi melalui sektor ketenagakerjaan ○ Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi dengan penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Penataan kawasan perkotaan dengan fokus pemenuhan layanan dasar air minum ○ Peningkatan kualitas lingkungan melalui pemenuhan layanan persampahan ○ Penanganan air limbah domestik dan penyediaan ruang terbuka hijau
	Kawasan Industri Pengolahan Hasil Tambang Sulawesi Tenggara • Kabupaten Konawe • Kabupaten Kolaka	• Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri pengolahan berbasis mineral dan sumber daya alam (nikel dan logam dasar) di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka, melalui: ○ Pengembangan infrastruktur jalan/jembatan, dengan *output:* jalan *shortcut* Kawasan Industri Konawe dan Jembatan Tabanggele–Pebunooha ○ Pengembangan industri *stainless steel*, dengan *output:* hasil monitoring pembangunan fasilitas pengolahan pemurnian mineral dalam negeri ○ Pengembangan industri nikel sulfat, dengan *output:* industri *smelter*/pemurnian/pengolahan nikel hidrometalurgi yang termonitor dan terevaluasi perkembangannya ○ Pembangunan industri *battery precursor* berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt), dengan *output:* industri *battery precursor* berbasis NMC yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ○ Pengembangan industri katoda berbasis nikel, dengan *output:* industri katoda nikel yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ○ Pengembangan industri *battery pack* berbasis NMC, dengan *output:* industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri ○ Tata kelola industri nikel serta ketersediaan bahan baku dan energi, dengan *output:* rekomendasi keprospekan sumber daya mineral ○ Dekarbonisasi industri dan ekonomi sirkular di industri nikel yang sejalan dengan dokumen peta jalan dekarbonisasi industri nikel nasional untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emissions (NZE) nasional

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Harmonisasi kebijakan industri nikel, dengan *output:* kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel ○ Peningkatan penerapan standardisasi di industri nikel, dengan *output*: standar dalam rangka mendukung ekspor dan pengawasan produk ○ Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dengan *output*: fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri ○ Peningkatan utilisasi kapasitas terpasang industri besi-baja (industri *steel slab*, industri *steel plate*, industri *steel* HRC, industri *steel* CRC, industri *steel pipe*, dan industri *coated steel*), dengan *output*: industri logam dalam negeri yang terfasilitasi dalam pemenuhan kebutuhan logam infrastruktur untuk IKN ○ Pengembangan industri *special steel*, dengan *output:* industri *special steel* yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi ○ Keselamatan lalu lintas angkutan jalan, dengan *output:* pembangunan jalan akses KI Konawe ○ Pengembangan Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industrial Park, Kawasan Industri Virtue Dragon Nickel Industry, dan Kawasan Industri Stardust ○ Pembangunan/revitalisasi sentra IKM sebagai rantai pasok industri sedang-besar yang ada di KI/KEK prioritas
	Kawasan Perkebunan Kakao Sulawesi Tenggara • Kabupaten Kolaka Utara • Kabupaten Kolaka Timur	• Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan, melalui: ○ *On farm* penguatan produksi komoditas pertanian bahan baku industri prioritas, dengan *output:* kawasan kakao, area penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, alat dan mesin pertanian prapanen subsektor perkebunan
	Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara • Kota Kendari • Kota Bau Bau • Kabupaten Buton • Kabupaten Muna • Kabupaten Bombana • Kabupaten Kolaka • Kabupaten Muna Barat	• Pengembangan Kawasan Perikanan Tangkap Sulawesi Tenggara sebagai ekonomi biru berkelanjutan di Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Muna Barat, melalui: ○ Pengelolaan sarana prasarana produksi perikanan tangkap, dengan *output*: alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang tersalurkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan-*eco fishing port* ○ Penguatan logistik, pemasaran dan sistem rantai dingin produk perikanan, dengan *output*: sarana penyimpanan produk kelautan perikanan; sarana distribusi logistik produk kelautan perikanan; serta gudang beku dan kelengkapannya ○ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan, dengan *output*: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kelautan perikanan yang difasilitasi akses pembiayaan dan kemitraan usaha, wirausaha kelautan perikanan yang ditumbuhkan dan/atau dibina, UMKM kelautan perikanan yang difasilitasi dalam inkubasi bisnis, pelaku usaha yang difasilitasi pembinaan diversifikasi produk bernilai tambah, eksportir kelautan perikanan baru yang ditumbuhkan, promosi usaha dan investasi kelautan perikanan, lembaga usaha kelautan perikanan yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan usaha; dan pengembangan hilirisasi komoditas Ikan TCT (Tuna-Cakalang-Tongkol) yaitu Ikan Beku, Ikan Olahan dan Kaleng, Tepung Ikan, Minyak Ikan, Gelatin dan Kolagen ○ Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern dan berkelanjutan, dengan *output*: pelabuhan perikanan terintegrasi dan bertaraf internasional yang dikembangkan, pelabuhan perikanan terluar dan/atau berwawasan lingkungan yang dikembangkan, pelabuhan perikanan UPT pusat dan PP perintis yang ditingkatkan fasilitasnya untuk mendukung penangkapan ikan terukur

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan klaster ikan nila salin, dengan *output*: ikan konsumsi air tawar hasil budi daya yang diproduksi, sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat, benih ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat ○ Revitalisasi tambak dan hilirisasi udang, dengan *output*: klaster kawasan revitalisasi tambak udang dan bandeng, benih udang yang disalurkan ke masyarakat, irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif, sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat, pengembangan komoditas udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin)
		Kawasan Lumbung Pangan Sulawesi Tenggara • Kabupaten Bombana • Kabupaten Kolaka Timur • Kabupaten Konawe Selatan • Kabupaten Konawe	• Pengembangan lumbung pangan Sulawesi Tenggara dengan hilirisasi komoditas pertanian unggulan yang berkelanjutan, melalui: ○ Penerapan teknologi dan penyediaan bahan baku bioindustri agro, dengan *output*: kawasan kakao, kawasan karet, sarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan, serta prasarana pascapanen dan pengolahan tanaman perkebunan ○ Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan ○ Peningkatan produksi dan pascapanen pangan nabati, dengan *output*: alat dan mesin pertanian, serta jaringan irigasi tersier yang direhabilitasi ○ Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani, dengan *output*: Penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen, serta pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah
		Kawasan Transmigrasi • KT Asinua, Kabupaten Konawe • KT Anawua, Kabupaten Kolaka • KT Mutiara, Kabupaten Muna	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Asinua di Kabupaten Konawe, Kawasan Transmigrasi Anawua di Kabupaten Kolaka, dan Kawasan Transmigrasi Mutiara di Kabupaten Muna, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur permukiman dengan *output*: sistem drainase dan sarana permukiman ○ Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan *output*: bantuan sarana produksi pertanian ○ Redistribusi dan legalisasi tanah transmigrasi, dengan *output*: fasilitasi pengurusan sertipikat hak milik atas tanah transmigrasi ○ Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil, dengan *output*: perpindahan dan penempatan transmigran
		Provinsi Sulawesi Tenggara	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: ○ Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu, dengan *output*: rekomendasi tata kelola bidang budi daya rumput laut, bibit rumput laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat, sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat, infrastruktur kawasan budi daya rumput laut–Ocean for Prosperity–Infrastructure for Coral Reef Areas, dan klaster rumput laut berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat ○ Pengembangan industri hilir rumput laut, dengan *output*: fasilitasi investasi industri rumput laut bernilai tinggi (karagenan (polisakarida), agar, kosmetik, *biofuel*, dan bioplastik) serta pengembangan biostimulan berbasis rumput laut ○ Peningkatan rantai nilai rumput laut, dengan *output*: memperkuat koperasi rumput laut untuk memperkuat posisi tawar petani rumput laut serta pengembangan jaringan infrastruktur pengolahan di dekat sentra produksi rumput laut

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut, dengan *output*: pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan ○ Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan *output*: insentif fiskal bagi petani yang menggunakan bibit berkualitas dan menerapkan teknik ramah lingkungan, serta penyediaan skema kredit mikro dengan bunga rendah bagi petani dan pelaku usaha rumput laut • Pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai melalui: ○ Penguatan rantai pasok industri di dalam negeri (termasuk IKM), dengan *output:* hilirisasi grafit untuk mendukung ekosistem industri *Electric Vehicle* (EV) Nasional; fasilitasi dan pendampingan teknologi dan *skill-set* bagi IKM *tier* 2 dan *tier* 3 untuk transisi ke teknologi EV ○ Pengembangan infrastruktur pengisian daya, dengan *output:* insentif untuk investasi SPKLU dan insentif untuk mendorong peningkatan daya listrik rumah tangga ○ Pengembangan ekosistem industri EV dan KBLBB yang terfasilitasi investasi, dengan *output:* penyesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi untuk transisi ke arah industri, serta perjanjian perdagangan untuk kemudahan bahan baku litium, mangan, dan kobalt ○ Penerapan ekonomi sirkular pada industri baterai, dengan *output:* fasilitasi investasi untuk industri baterai *recycling* • Peningkatan konektivitas dan layanan transportasi Provinsi Sulawesi Tenggara, melalui: ○ Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut, dengan *output*: pengembangan fasilitas Pelabuhan Lapuko dan pengembangan fasilitas Pelabuhan Raha ○ Penanganan konektivitas jalan mendukung wilayah tertinggal dan perbatasan, dengan *output:* Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan Provinsi Sulawesi Tenggara di Pulau Buton Mataompana–SP.3 Bure KM. 1,40/SP.3 Jalan Hasanudin–Jalan Pahlawan ○ Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, dengan *output*: pembangunan sistem angkutan umum massal ○ Pembangunan, peningkatan, dan preservasi jalan serta peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: peningkatan keselamatan angkutan darat dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, preservasi jalan pada ruas Bts. Kab. Kolaka/Kab. Bombana–Boepinang, Wolo–Bts. Kota Kolaka, Boepinang–Bambaea, peningkatan dan preservasi jalan daerah, terminal barang dan penumpang, serta pembangunan terminal barang internasional • Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan wilayah, melalui: ○ Pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) ○ Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital ○ Pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan • Pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan, melalui: ○ Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM ○ Percepatan pemenuhan akses sanitasi aman untuk berkelanjutan dan berketahanan iklim masyarakat, dengan *output*: pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domesik (SPALD) ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan Bendung DI Laiba, serta rehabilitasi DI Ameroro, DI Wawotobi, dan DI Walay • Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk penuntasan TBC, pengendalian penyakit menular lainnya, pencegahan dan penurunan *stunting*, serta bantuan pangan bergizi bagi ibu hamil dan balita, melalui: ○ Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, NSPK pelayanan kesehatan bergerak, penetapan fasyankes pelaksana pelayanan telemedisin, peningkatan RSUD tipe D menjadi C, dan penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN ○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, termasuk untuk menekan angka kematian ibu dan anak, dengan *output*: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Strok, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak), peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA, fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA, pemenuhan SPA dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA, fasilitasi dan pembinaan lembaga, serta alat kesehatan layanan kanker terpadu ○ Peningkatan produksi SDM kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan PPDS, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, serta bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan ○ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*, tenaga kesehatan/non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, penyediaan PMT bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting* ○ Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), dengan *output*: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria; bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan *reagen*, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS; tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian, layanan *skrining mobile* dan fasyankes, layanan pencegahan dan pengendalian, serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC; alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik *Multi Drug Therapy* (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pasca pengobatan • Penguatan dan pengembangan bidang STEAM serta penguatan pendidikan vokasi dan produktivitas tenaga kerja yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal, melalui: ○ Pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan perguruan tinggi berbasis teknologi, dengan *output*: sarana perguruan tinggi yang direvitalisasi, prasarana perguruan tinggi yang dibangun, serta pemenuhan sarana dan prasarana sekolah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pelatihan vokasi di sektor strategis yang didukung penjaminan mutu pendidikan, dengan *output*: pelatihan vokasi bidang pertanian dan perikanan, penjaminan mutu satuan pendidikan, dokumen *tracer study*, rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sektor industri, pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran, serta standar pelatihan berbasis kompetensi ○ Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: pengembangan pusat keunggulan SMK, pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan, pendampingan peningkatan mutu, dan pengembangan pengajaran berbasis pabrik, SDM mengikuti pendidikan menengah kejuruan industri, program kelas industri, serta fasilitasi pendampingan *link and match* SMK dengan industri ○ Peningkatan kapasitas pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum DUDI untuk guru kejuruan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan • Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta reformasi dan integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, melalui: ○ Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan *output*: bantuan kelompok usaha ekonomi masyarakat dan pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan ○ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan revitalisasi dana sosial keagamaan, dengan *output*: keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan, masyarakat miskin dan rentan yang mendapat program Kartu Usaha Afirmatif (KUA), serta lembaga amil zakat dan nadzir wakaf yang dibina dan diperkuat literasi program pengentasan kemiskinan ○ Pengembangan tata kelola Regsosek, dengan *output*: koordinasi strategis registrasi sosial ekonomi dan jaringan komunikasi data dan *data center*, penguatan regulasi, monitoring dan pemutakhiran data hingga tingkat desa yang terintegrasi dengan SIPD, pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan penataan sumber daya manusia untuk pemanfaatan data ○ Penguatan JKN dan perlindungan sosial adaptif, dengan *output*: penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN, koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, dan korban bencana sosial dan non-alam yang mendapat bantuan ○ Pelaksanaan bantuan energi dan pangan, dengan *output*: gerakan pangan murah yang dilaksanakan, stabilisasi pasokan dan harga pangan ○ Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan nasional secara inklusif dengan *output*: pembinaan kelompok pekerja bukan penerima upah dalam pemahaman program jaminan sosial tenaga kerja; fasilitasi dialog regulasi bidang jaminan sosial tenaga kerja, sosialisasi program jaminan kehilangan pekerjaan bagi pelaku hubungan industrial, nelayan yang diidentifikasi identitasnya dalam rangka perlindungan nelayan ○ Penyediaan layanan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya dengan *output*: layanan atas pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak, lanjut usia yang mendapatkan bantuan permakanan, penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan permakanan dan anak YAPI yang mendapatkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan, dengan *output*: program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) • Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui: ○ Peningkatan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dengan *output*: rekomendasi kebijakan PDRD, daerah dengan proporsi PDRD terhadap PAD meningkat, dan basis data potensi PDRD ○ Ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non-utang yang inovatif, dengan *output*: penatausahaan BMD secara wajar, proporsi kontribusi BUMD yang meningkat, dan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) ○ Pengembangan instrumen pembiayaan utang daerah, dengan *output*: daerah yang difasilitasi dalam menerbitkan obligasi/sukuk daerah dan memanfaatkan pinjaman daerah • Swasembada air melalui konservasi sumber daya air di DAS Sampara dengan *output*: penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif, dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan, serta rehabilitasi mangrove
120	Perubahan Subbab 4.6.6 Provinsi Gorontalo halaman 259 sampai dengan 261	Sasaran Pembangunan Provinsi Gorontalo 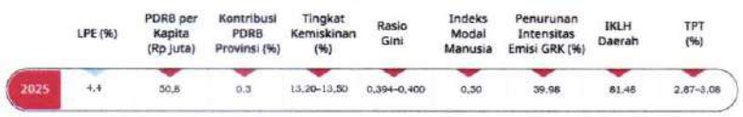 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo • Kota Gorontalo	Pembangunan Perkotaan Nonwilayah Metropolitan Kota Gorontalo, melalui: • Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang Kota Gorontalo, dengan *output*: ○ Pembangunan dan peningkatan SPAM ○ Penguatan instrumen peringatan dini bencana ○ Penyediaan dan peningkatan layanan konektivitas transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan perkotaan yang akan dibangun ○ Penyediaan ruang terbuka hijau ○ Penguatan peran kawasan perkotaan dalam skala regional untuk pemerataan ekonomi melalui penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Pengendalian banjir Sungai Bolango
Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura • Kabupaten Gorontalo • Kabupaten Gorontalo Utara • Kabupaten Boalemo • Kabupaten Pohuwato	• Pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Gorontalo, melalui: ○ Pengembangan kawasan hortikultura dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung penyediaan bahan pangan nabati ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan DI Randangan serta rehabilitasi DI Randangan dan DI Alopohu ○ Pembangunan tampungan air untuk meningkatkan kapasitas tampungan air dengan *output*: pembangunan Bendungan Bulango Ulu ○ Penguatan infrastruktur konektivitas penunjang logistik, dengan *output*: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kabupaten Bone Bolango	Paguyaman–Tabulo, Isimu–Paguyaman, dan layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis ○ Penguatan SDM pertanian dan pengembangan praktik pertanian berkelanjutan, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat perdesaan, rumah pengolah pupuk organik, dan pengembangan lahan pertanian produktif
		Kawasan Perkebunan dan Hilirisasi Kelapa • Kabupaten Gorontalo • Kabupaten Gorontalo Utara	• Pengembangan kawasan perkebunan dan hilirisasi kelapa, melalui: ○ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan
		Kawasan Sentra Garam • Kabupaten Pohuwato	• Pengembangan kawasan sentra garam, melalui: ○ Pengembangan garam industri terintegrasi ○ Penguatan sarana dan prasarana industri garam
		Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Gentuma Raya, Kec. Tomilito, Kec. Ponelo Kepulauan, Kec. Anggrek, Kec. Monano, Kec. Sumalata Timur, Kec. Biau, dan Kec. Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara	• Pembangunan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui pemenuhan layanan dasar di kawasan perbatasan, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga, dan pembangunan jalan daerah tertinggal dan perbatasan Isimu–Paguyaman
		Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata di Kabupaten Gorontalo Utara
		Kawasan Pesisir dan Konservasi Teluk Gorontalo, dsk • Kota Gorontalo • Kabupaten Gorontalo • Kabupaten Bone Bolango • Kabupaten Boalemo • Kabupaten Pohuwato	• Penguatan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Teluk Gorontalo dan sekitarnya melalui: ○ Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan ○ Pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem, dengan *output*: rekomendasi penetapan status *Geopark* nasional dan pengembangan pola pendanaan pengembangan *geopark* ○ Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: sarana SAR *rafting boat*, prasarana SAR, pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana
		Provinsi Gorontalo	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Konservasi sumber daya air di DAS Bone Bolango dengan *output*: penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif, dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan; serta rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan • Pengembangan permukiman yang didukung dengan pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas dan jaringan listrik, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) terintegrasi hulu ke hilir ○ Pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah ○ Penerapan ekonomi sirkular secara partisipatif, dengan *output*: fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah berbasis 3R, pemanfaatan teknologi *recycling* plastik daur ulang, pembangunan dan pembinaan bank sampah induk dan masyarakat pengelola sampah ○ Pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) ○ Pembangunan infrastruktur gardu induk ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat ○ Perluasan layanan penyiaran digital • Penguatan konektivitas dan layanan transportasi yang integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung aktivitas ekonomi melalui: ○ Penguatan konektivitas jalan, dengan *output*: peningkatan jalan dan jembatan koridor logistik Paguyaman–Tabulo dan Isimu–Paguyaman ○ Layanan konektivitas perairan melalui pelayaran perintis • Penguatan kapasitas ketahanan, pelayanan, dan tata kelola pelayanan kesehatan melalui: ○ Penyediaan dan penguatan pelayanan kesehatan bergerak dan digital, dengan *output*: pembinaan dan pendampingan pelaksanaan layanan kesehatan bergerak, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan kesehatan bergerak; penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) pelaksana pelayanan telemedisin; peningkatan RSUD tipe D menjadi C; dan penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ○ Pengembangan layanan unggulan berbasis kompetensi, dengan *output*: pelatihan layanan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Strok, Uronefrologi, serta Kesehatan Ibu dan Anak); peningkatan kompetensi RS dan alat kesehatan pelayanan KIA; fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pelayanan KIA; pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) dan pengampuan untuk pelayanan KJSU-KIA; fasilitasi dan pembinaan lembaga; serta alat kesehatan layanan kanker terpadu ○ Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak ○ Peningkatan produksi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, dengan *output*: rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), bantuan program pendidikan SDM kesehatan, beasiswa dokter spesialis, penyusunan kebijakan pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, pembinaan RS penyelenggara pendidikan utama, sarana kesehatan penunjang PPDS dan subspesialis, dan bantuan biaya pendidikan program studi/profesi/spesialis/subspesialis dengan wajib penempatan • Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular (TBC, HIV/AIDS, malaria), eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta pencegahan dan penurunan *stunting* melalui: ○ Pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, obat dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		perbekalan program pengendalian, serta data dan informasi malaria ○ Pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: bahan dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, pelayanan pengobatan, paket penyediaan alat dan *reagen*, serta obat dan perbekalan program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS ○ Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian; layanan *skrining mobile* dan fasyankes; layanan pencegahan dan pengendalian; serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC ○ Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian; penyediaan obat dan logistik *Multi Drug Therapy* (MDT), pendampingan dan pemantauan pengobatan; pemberian obat pencegahan; dan pemantauan penderita kusta pascapengobatan ○ Penguatan intervensi spesifik dan sensitif *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*, tenaga kesehatan/nonkesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, serta layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting* • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal melalui: ○ Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: fasilitasi pendampingan *link and match* SMK dengan industri ○ Peningkatan kapasitas pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum dunia kerja dunia usaha (DUDI) untuk guru kejuruan, *upskilling* dan *reskilling* pendidik dan tenaga kependidikan, inovasi model pembelajaran vokasi berbasis dunia kerja ○ Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pengentasan kemiskinan dengan perwujudan data tunggal sosial ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat melalui: ○ Penguatan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahik yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang mengikuti pengembangan perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ○ Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, serta bantuan alat dan mesin pertanian prapanen ○ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: penerima bantuan iuran PBI JKN, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, mahasiswa yang mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan elpiji 3kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam • Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas perikanan dan peternakan, melalui: ○ Pengembangan sarana penunjang logistik, prasarana perikanan tangkap, dan sistem rantai dingin produk perikanan ○ Peningkatan daya saing sumber daya manusia penyedia jasa logistik, kelembagaan, usaha kelautan dan perikanan

<table>
<tr><th>No</th><th>Perihal Perubahan</th><th>Pemutakhiran RKP Tahun 2025</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
○ Kerja sama perluasan pasar, pengembangan koperasi, serta rantai pasok ekspor produk perikanan
○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani
○ Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan mendukung penguatan kawasan peternakan
</td></tr>
<tr><td>121</td><td>Perubahan Subbab 4.6.7 Provinsi Sulawesi Barat halaman 261 sampai dengan 263</td><td>
Sasaran Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat
<table>
<tr><th></th><th>LPE (%)</th><th>PDRB per Kapita (Rp juta)</th><th>Kontribusi PDRB Provinsi (%)</th><th>Tingkat Kemiskinan (%)</th><th>Rasio Gini</th><th>Indeks Modal Manusia</th><th>Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)</th><th>IKLH Daerah</th><th>TPT (%)</th></tr>
<tr><td>2025</td><td>4,9</td><td>45,5</td><td>0,3</td><td>9,00-9,73</td><td>0,345-0,349</td><td>0,51</td><td>61,65</td><td>84,82</td><td>1,41-2,00</td></tr>
</table>
Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.
<table>
<tr><th>Lokasi Prioritas</th><th>Highlight Indikasi Intervensi</th></tr>
<tr><td>Kawasan Perkebunan Kakao dan Kopi
• Kabupaten Polewali Mandar
• Kabupaten Majene
• Kabupaten Mamasa
• Kabupaten Pasangkayu
• Kabupaten Mamuju Tengah</td><td>• Pengembangan kawasan pertanian dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung pangan nabati dan hilirisasi melalui:
○ Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dengan output: penguatan hilir peternakan melalui pendampingan dan pelatihan pascapanen dan pengolahan mendukung peningkatan nilai tambah
○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan output: pembangunan DI Kalukku, serta rehabilitasi DI Malunda dan DI Maloso
○ Pengelolaan daya rusak air dengan output: pengendalian banjir Sungai Kalukku dan Sungai Lumu
○ Pembangunan tampungan air untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, dengan output: pembangunan Bendungan Budong-Budong
○ Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani</td></tr>
<tr><td>Kawasan Perikanan Budidaya
• Kabupaten Polewali Mandar
• Kabupaten Mamuju</td><td>• Pengembangan komoditas perikanan budidaya, melalui:
○ Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat, dengan output: pengadaan benih serta revitalisasi tambak, pengembangan klaster komoditas unggulan, pengembangan sistem rantai dingin produk kelautan perikanan, serta pengembangan sarana dan input produksi budidaya
○ Pengembangan input produksi perikanan budi daya, dengan output: produksi calon induk ikan air payau, ikan air laut, dan udang (Udang Beku, Udang Olahan, Chitin Chitosan, Glukosamin)</td></tr>
<tr><td>Kawasan Transmigrasi (KT)</td><td>• Pengembangan Kawasan Transmigrasi:
○ KT Ulumanda, Kabupaten Majene
○ KT Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar
○ KT Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah
○ KT Sarudu Baras, Kabupaten Pasangkayu
○ KT Mambi Mehalaan, Kabupaten Mamasa</td></tr>
<tr><td>Kawasan Konservasi dan Pengembangan Pulau Kecil
• Kabupaten Mamuju</td><td>• Pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pada kawasan konservasi perairan dan ekosistem pesisir, melalui:
○ Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan wisata kawasan konservasi perairan, dengan output: kawasan konservasi perairan yang operasional, pengelola kawasan konservasi yang ditingkatkan kompetensinya, destinasi wisata alam yang</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dikembangkan sarprasnya, dan fasilitasi usaha ekonomi produktif masyarakat dalam pemanfaatan jasa wisata ○ Peningkatan infrastruktur berketahanan bencana dan layanan peringatan dini bencana, dengan *output*: sarana SAR *rafting boat*, prasarana SAR, pembangunan ekosistem aksi dini, penguatan instrumen peringatan dini bencana, penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat, dan penataan bangunan kawasan rawan bencana ○ Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil ○ Pengelolaan wisata alam dan wisata bahari secara berkelanjutan ○ Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari ○ Peningkatan kapasitas usaha dan investasi sektor pariwisata bahari
	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Makassar *Strait* Sulawesi Barat • Kabupaten Majene • Kabupaten Polewali Mandar • Kabupaten Mamuju • Kabupaten Pasangkayu	• Pengelolaan risiko bencana kawasan rawan bencana gempa bumi di Makassar *Strait*, melalui: ○ Peningkatan upaya pencegahan, mitigasi dan resiliensi masyarakat terhadap bencana, dengan *output*: penyusunan peta kawasan rawan bencana gempa bumi, penyediaan peralatan monitoring dampak akibat gempa bumi dengan peralatan *intensitymeter* dan *accelerograph* melalui Indonesia *Disaster Resillience Initiatives Project* (IDRIP), penyediaan peralatan monitoring gempabumi dan tsunami melalui IDRIP, fasilitasi dan pelayanan informasi gempa bumi dan tsunami melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG) wilayah timur ○ Pendampingan penanganan kedaruratan bencana, dengan *output*: penerapan layanan pemerintah saat tanggap darurat dan pascabencana, bantuan kepada korban bencana alam berupa bantuan logistik tanggap darurat, dan terselenggaranya operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemadaman darat ○ Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana gempa bumi, dengan *output*: terpasangnya instrumen peringatan dini, persentase kecepatan informasi iklim dan kualitas udara, serta terlaksananya pembinaan penguatan respons sistem peringatan dini bencana berbasis masyarakat ○ *Retrofit* atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik ○ Penerapan *nature-based solution* dan *gray infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami
	Provinsi Sulawesi Barat	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Penguatan swasembada air, melalui konservasi sumber daya air di DAS Karama, dengan *output*: penyediaan benih berkualitas, bibit berkualitas, bibit produktif dan bibit hasil pemberdayaan masyarakat; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya utamanya di DAS yang dipulihkan dan imbuhan mata air; rehabilitasi daerah imbuhan mata air secara vegetatif; rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di DAS yang dipulihkan; serta rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis di DAS yang dipulihkan • Peningkatan kualitas ekosistem gambut, melalui: ○ Pemulihan lahan gambut, dengan *output*: pemulihan lahan gambut di areal penggunaan lainnya, pelaksanaan Program Gambut Lestari, Program Desa Mandiri Peduli Gambut, dan penilaian kinerja lingkungan untuk pengelolaan ekosistem gambut ○ Pengelolaan data dan informasi lahan gambut, dengan *output*: penyediaan data dan informasi kesatuan hidrologis gambut • Pengembangan hilirisasi rumput laut, melalui: ○ Jaminan ketersediaan bahan baku industri rumput laut yang berkualitas melalui peningkatan produktivitas sektor hulu,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dengan *output:* penyaluran bibit dan sarana budidaya rumput laut ○ Peningkatan kapasitas tenaga kerja di industri rumput laut, dengan *output:* pelatihan dan pendampingan pengolah rumput laut terkait praktik produksi dan pelatihan manajemen usaha rumput laut dengan memprioritaskan peran perempuan ○ Peningkatan dukungan finansial bagi pembudidaya rumput laut, dengan *output:* fasilitasi investasi dan permodalan pembudidaya dan industri rumput laut • Pengembangan industri mesin dan perlengkapan, melalui: ○ Peningkatan adopsi teknologi, riset, dan inovasi bidang pertanian dan perkebunan, dengan *output*: purwarupa budi daya tanaman yang dihasilkan, purwarupa budidaya ternak yang dihasilkan, purwarupa hilirisasi produk pertanian yang dihasilkan, kelompok tani yang mendapatkan diseminasi melalui percontohan teknologi pertanian, kelompok tani yang terfasilitasi program IPDMIP • Penguatan layanan transportasi, infrastruktur konektivitas (konektivitas jalan, konektivitas darat, konektivitas laut, serta konektivitas udara) dan sarana penunjang logistik untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, melalui: ○ Peningkatan keselamatan angkutan darat, dengan *output*: pengembangan/pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan daerah yang menyusun rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan ○ Pembangunan jaringan distribusi dan terisolasi serta listrik pedesaan, dengan *output*: peningkatan pasokan tenaga listrik dan pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T ○ Peningkatan fasilitas Pelabuhan Mamuju • Peremajaan kota (*urban renewal*) secara inklusif dan terpadu, serta pemenuhan sarana dan prasarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi aman, dan pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir berbasis teknologi tepat guna, penguatan infrastruktur ketenagalistrikan, serta penguatan dan perluasan infrastruktur telekomunikasi, melalui: ○ Pemenuhan akses air minum aman terintegrasi dari hulu ke hilir ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan SPAM ○ Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif, dengan *output*: rehabilitasi daerah irigasi multikomoditas ○ Peningkatan penyediaan dan layanan listrik, dengan *output*: pembangunan infrastruktur transmisi dan interkoneksi tenaga listrik serta infrastruktur gardu induk, dan pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital • Percepatan pengentasan kemiskinan dengan perwujudan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyaluran bantuan sosial adaptif, serta pemberdayaan masyarakat terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi, melalui: ○ Revitalisasi dana sosial keagamaan untuk pengentasan kemiskinan, dengan *output*: penyelarasan data mustahik dan data kemiskinan regsosek, pembinaan dan penguatan lembaga amil zakat dan nadzir wakaf, lembaga dana amal Paramita, lembaga amal kasih Katolik, dan lembaga amal sosial kristiani terkait program pengentasan kemiskinan, pembedayaan rumah tangga miskin melalui kampung ZISWAF ○ Penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dengan *output*: pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial, mustahik yang diselaraskan datanya, dan aparatur yang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		mengikuti pengembangan perencanaan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ○ Penguatan kewirausahaan afirmatif untuk kemandirian masyarakat, dengan *output*: peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kewirausahaan sosial, pelaku usaha yang mendapat akses pembiayaan, serta bantuan alat dan mesin pertanian prapanen ○ Penyaluran bantuan sosial yang adaptif, dengan *output*: pemberian bantuan iuran PBI JKN, pemberian bantuan sosial bersyarat, penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi mahasiswa, KPM yang memperoleh bantuan sosial sembako, penyediaan elpiji 3kg yang tepat sasaran, subsidi listrik, dan bantuan logistik korban bencana alam • Penguatan sistem tata kelola pendidikan vokasi (SMA, SMK dan Politeknik) untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertanian dan perkebunan, melalui: ○ Penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik dan pendidik, dengan *output*: pendampingan dalam rangka menuntaskan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi pada ekosistem pendidikan di kabupaten/kota ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri, dengan *output*: pendampingan peningkatan mutu dan pengajaran berbasis pabrik (*teaching factory*) di SMK ○ Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK, dengan *output*: pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja bagi guru kejuruan, pengembangan inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja ○ Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK, dengan *output*: dan fasilitasi sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja • Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), melalui: ○ Peningkatan kapasitas puskesmas dan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan serta pelayanan kesehatan di daerah sulit akses, dengan *output*: pengukuran dan pelaporan mutu puskesmas, penyediaan sarana, pemenuhan alat kesehatan, peningkatan keterampilan kader kesehatan, pemantauan keaktifan posyandu, revitalisasi posyandu dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan pelayanan berbasis gugus pulau di wilayah kepulauan, serta pembinaan RS kapal di wilayah kepulauan ○ Peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan, dengan *output*: akselerasi rekomendasi produksi dokter dan dokter spesialis, bantuan program pendidikan SDM kesehatan, pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan, dan pelatihan strategis SDM kesehatan di RS pemerintah ○ Penguatan tata kelola dan kepesertaan JKN, dengan *output*: koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah, pemberian bantuan iuran PBI JKN, serta pemberian bantuan iuran kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) ○ Penurunan kematian ibu dan anak melalui seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit, melalui: ○ Penguatan intervensi spesifik *stunting* dan sensitif *stunting*, dengan *output*: ibu hamil dan balita yang mendapat makanan tambahan dari *buffer stock*, tenaga kesehatan/nonkesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya, infrastruktur air minum

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		berbasis masyarakat, keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat, Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi, dan layanan imunisasi pendukung pencapaian *stunting* - Peningkatan upaya pencegahan TBC, dengan *output*: tenaga kesehatan terlatih untuk pencegahan dan pengendalian; layanan skrining *mobile* dan fasyankes; layanan pencegahan dan pengendalian; serta alat, bahan, dan paket vaksin TBC - Pengendalian penyakit kusta, dengan *output*: dukungan penyediaan alat, bahan, dan tenaga terlatih pencegahan/pengendalian, penyediaan obat dan logistik MDT, pendampingan dan pemantauan pengobatan, pemberian obat pencegahan, dan pemantauan penderita kusta pascapengobatan
122	Perubahan Subbab 4.7.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Maluku Tahun 2025 dalam halaman 264	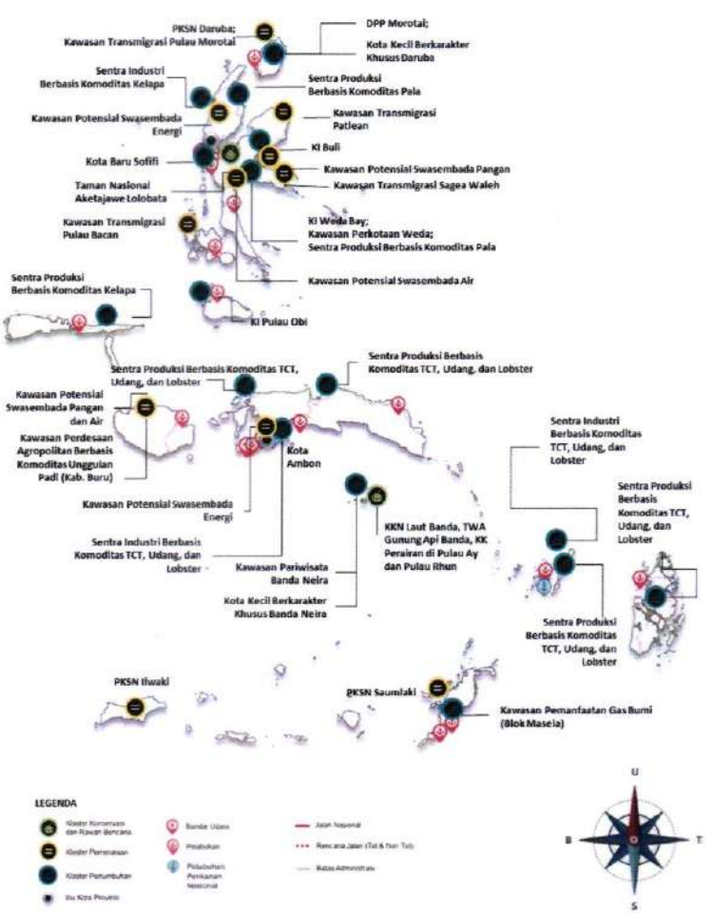

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
123	Perubahan Subbab 4.7.2 Provinsi Maluku halaman 265 sampai dengan 268	Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	5,3	34,1	0,3	13,01–13,51	0,282–0,287	0,49	42,88	82,43	5,55–6,03

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata Banda Neira (Kab. Maluku Tengah)	• Pengembangan kawasan pariwisata Banda Neira di Kab. Maluku Tengah melalui: o Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: penanganan jalan daerah, serta peningkatan fasilitas pelabuhan dan dermaga o Peningkatan daya tarik pariwisata alam, sejarah, dan budaya Banda, dengan *output*: pengembangan desa wisata; pengembangan atraksi wisata budaya; penyediaan prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan; pendukungan *event* daerah; pembangunan pusat informasi kepariwisataan, termasuk konten peta wisata (*tourism map*) yang berkualitas; serta pemanfaatan cagar budaya dan aset sejarah o Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: penyediaan akomodasi dan restoran yang berkualitas, kios cinderamata, pengembangan pasar tematik wisata, serta penyediaan layanan kesehatan wisatawan o Pengembangan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: fasilitasi dan pembinaan masyarakat lokal yang tersertifikasi di bidang pariwisata, serta penguatan tata kelola desa wisata dan kampung adat o Penguatan dan perluasan promosi dan pemasaran, dengan *output*: promosi terpadu secara nasional dan internasional, serta pembangunan jaringan pengetahuan dan media rekonstruksi diplomasi budaya jalur rempah o Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: peningkatan akses pembiayaan; literasi bisnis dan mutu produk IKM/UMKM; pembentukan dan pembinaan BUMDesa serta koperasi berbasis pariwisata, perikanan, dan perkebunan
Kawasan Pertumbuhan: • Blok Masela (Kab. Kepulauan Tanimbar)	• Percepatan pemanfaatan gas bumi untuk industri di Kab. Kepulauan Tanimbar (Blok Masela) melalui: o Penyiapan wilayah kerja pengembangan, dengan *output*: penetapan wilayah kerja pengembangan gas bumi dan wilayah keprospekan migas o Pengembangan infrastruktur dan teknologi pengolahan dan pemanfaatan gas bumi, dengan *output*: pembangunan jaringan gas bumi, sarana prasarana produksi pemanfaatan gas bumi, serta penyiapan pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas o Penyiapan kapasitas SDM, dengan *output*: pembangunan sarana prasarana dan program studi pendidikan tinggi vokasi berbasis industri migas o Penyiapan pembangunan sarana dan prasarana luar kawasan, dengan *output*: pembangunan SPAM, SPALD, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik, serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik
Kawasan Pertumbuhan: • Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda	• Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Banda Neira, melalui: o Penataan ruang kota, dengan *output*: penetapan RDTR dan RTBL; serta penataan lanskap dan pembangunan fasilitas rekreasi, termasuk diantaranya penyediaan wayfinding, pembangunan promenade sepanjang pantai, pengembangan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Neira (Kab. Maluku Tengah)	shared-street, street furniture, dan manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan ○ Peningkatan citra kota, dengan *output*: pemanfaatan cagar budaya (*adaptive reuse*) sesuai *branding* kawasan; serta penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya di dalam dan luar negeri ○ Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, drainase; pengelolaan sampah berbasis 3R; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; perluasan layanan penyiaran digital; penyediaan akses internet dan listrik berbasis EBT; serta penyediaan fasilitas asrama pendidikan ○ Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi, pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan ○ Peningkatan tata kelola pelayanan publik, dengan *output*: pengembangan unit pelayanan terpadu satu atap yang transparan dan akuntabel, serta penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) digital
		Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Perkotaan Sedang Ambon (Kota Ambon)	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Ambon, melalui: ○ Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan ○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penguatan branding kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota ○ Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan dan peningkatan jalan, transportasi umum massal perkotaan, SPAM, SPALD, infrastruktur listrik dan TIK; pengelolaan sampah berbasis 3R; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Peningkatan kualitas dan pengembangan perguruan tinggi unggulan di tingkat regional, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana Universitas Pattimura melalui pembiayaan SBSN
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang tongkol, udang, dan lobster) Sentra Industri • Kota Ambon • Kota Tual Sentra Produksi • Kab. Maluku Tengah • Kab. Seram Bagian Barat • Kab. Maluku Tenggara	• Penyiapan pengembangan sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster melalui: ○ Penguatan sentra produksi perikanan ○ Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan ○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri, dengan *output*: penerapan kurikulum link and match dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: perluasan akses permodalan dan literasi bisnis bagi pelaku IKM dan UMKM, dengan skema pembiayaan berbasis kartu usaha untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha ○ Peningkatan sarana prasarana pendukung ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Kepulauan Aru	
		• Kota Ambon (perikanan) • Kota Tual (perikanan) • Kab. Maluku Tengah (pariwisata) • Kab. Kepulauan Tanimbar (industri migas)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, serta revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi serta tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja ○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *digital talent scholarship*, serta pelatihan keterampilan digital dasar
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Buru* (padi, pangan akuatik) • Kab. Maluku Tengah* (padi, kedelai, pangan akuatik) • Kab. Maluku Tenggara* (ubi, rumput laut) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan budi daya dan perikanan tangkap, melalui: ○ Penguatan produksi pertanian dan perikanan, dengan *output*: pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, pengembangan sarana dan input produksi perikanan budi daya ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan perikanan ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi dan peningkatan sistem logistik pangan lokal ○ Penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kota Ambon* • Kab. Seram Bagian Barat* Kawasan Rendah elektrifikasi: • Kab. Seram Bagian Timur** • Kab. Kepulauan Aru** Keterangan:	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi, dengan *output*: penetapan dan penawaran wilayah panas bumi ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		*) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
		Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Buru* • Kab. Maluku Tengah* • Kab. Kepulauan Tanimbar* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui: ○ Peningkatan kapasitas tampungan air, dengan *output*: pembangunan Bendungan Way Apu ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan DI Way Apu System dan DI Samal Kiri, serta rehabilitasi DI Way Apu dan DI Geren Meten ○ Pengendalian daya rusak air, dengan *output*: pengendalian banjir dan sedimen di Kab. Seram Bagian Barat
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung: • PKSN Saumlaki, serta Kec. Tanimbar Selatan dan Kec. Tanimbar Utara (Kab. Kepulauan Tanimbar) • PKSN Ilwaki (Kab. Maluku Barat Daya) Kecamatan Perbatasan Prioritas: • Kec. Kei Besar Selatan, Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan Barat (Kab. Maluku Tenggara) • Kec. Aru Tengah Timur, Aru Tengah Selatan, Aru Selatan Timur, Sir-Sir (Kab. Kepulauan Aru) • Kec. Pulau Dullah Selatan (Kota Tual)	• Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki dan Ilwaki, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan konektivitas; serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengembangan sentra perikanan budi daya terutama di PKSN

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • Kawasan Perdesaan Agropolitan berbasis Komoditas Unggulan Padi (Kab. Buru)	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Waeapo Agropolitan berbasis komoditas unggulan padi melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R; serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif ○ Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan; peningkatan akses internet dan listrik; serta penyediaan moda transportasi desa ○ Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan
		Penguatan sekolah berpola asrama dan sekolah terbuka: • Kab. Buru Selatan • Kab. Kepulauan Aru • Kab. Maluku Barat Daya (PKSN Ilwaki) • Kab. Kepulauan Tanimbar (PKSN Saumlaki) Penguatan sekolah terbuka: • Kab. Maluku Tenggara • Kota Tual	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama, sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/paket A, SMP/paket B, SMA/paket C, dan SMK; serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital dengan penyediaan perpustakaan dan modul *e-learning* ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan *output*: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, serta pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian upskilling dan reskilling kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
		• Kab. Buru • Kab. Buru Selatan • Kab. Seram Bagian Timur • Kab. Kepulauan Aru (Kecamatan Perbatasan Prioritas)	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), melalui: ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; peningkatan RS tipe D menjadi C; pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi; pengadaan peralatan kesehatan dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Maluku Barat Daya (PKSN Ilwaki) • Kab. Kepulauan Tanimbar (Kecamatan Perbatasan Prioritas dan PKSN Saumlaki) • Kota Tual (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	pendukungnya untuk rumah sakit; penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*; serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung *telemedicine* ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan *output*: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan dan keselamatan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan
		Penanganan Penyakit TBC: • Kab. Maluku Tenggara • Kab. Maluku Tengah • Kab. Kepulauan Aru • Kota Tual Penanganan Penyakit Malaria: 8 kabupaten di Provinsi Maluku Penanganan Penyakit Rabies: • Kab. Kepulauan Tanimbar • Kab. Maluku Tengah • Kab. Seram Bagian Barat • Kab. Maluku Barat Daya • Kota Ambon Penanganan Penyakit Kusta: Provinsi Maluku	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC; serta layanan penemuan aktif TBC ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Eliminasi penyakit rabies, dengan output: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan serta penyediaan obat hewan
		• WPP 714 (perbatasan perairan dengan Timor Leste) • WPP 715 (perbatasan perairan dengan Australia)	• Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama, serta pemberantasan praktik *illegal, unreported and unregulated* (IUU) *fishing*, melalui: ○ Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga, seperti Timor Leste dan Australia ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: perawatan armada serta revitalisasi sarpras pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP)
		Kawasan Konservasi: • KKN Laut Banda, TWA Gunung Api Banda, KK Perairan di Pulau Ay dan Pulau Rhun (Kab. Maluku Tengah) • KKD Pulau Kei Kecil (Kab. Maluku Tenggara) • KK Perairan Buano (Kab. Seram Bagian Barat) • KK Kepulauan Aru bagian Tenggara (Kab. Kepulauan Aru) • KK Perairan Kepulauan Lease (Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah) • KKD Kep. Babar (Kab. Maluku Barat Daya - calon KKD baru) • KKD Wetar (Kab. Maluku Barat Daya - calon KKD baru) • KKD Buru Selatan (Kab. Buru Selatan - calon KKD baru)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi dan penguatan perencanaan kawasan konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Pengembangan potensi *geopark* di TWA Gunung Api Banda, dengan *output*: fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat
		Provinsi Maluku	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau, melalui: ○ Peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Seram dan Kepulauan Aru; penanganan jalan daerah dan jalan 3T di antaranya pada Pulau Kei Besar dan Kepulauan Aru; serta peningkatan jalan mendukung akses pelabuhan laut (Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Amahai) ○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Dobo, Pelabuhan Mahaleta, Pelabuhan Eray, Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Namrole, Pelabuhan Banda Eli, dan Pelabuhan Sofyanin; pelayaran kapal Ro-Ro; penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis; serta pengembangan Pelabuhan Ambon sebagai simpul transhipment ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandara Pattimura dan penerbangan perintis mendukung konektivitas wilayah perairan ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, di antaranya di Kawasan Banda Neira, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya; pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; perlindungan warisan budaya; fasilitasi peningkatan penulisan sejarah lokal; monitoring dan evaluasi pelestarian cagar budaya, aset sejarah, dan budaya; penyelenggaraan *event* diplomasi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan (OPK); serta pelestarian objek diduga cagar budaya (ODCB) dan OPK ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan event film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi, kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, serta diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting* • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan nature-based solutions, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan output: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pengentasan kemiskinan, melalui: ○ Program kartu usaha yang memberikan akses peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penguatan kewirausahaan afirmatif dalam mendukung kemandirian dan penurunan kemiskinan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Mendukung penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan inklusif kepada kelompok miskin dan rentan melalui kartu kesejahteraan ○ Penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran
124	Perubahan Subbab 4.4.4 Provinsi Maluku Utara halaman 268 sampai dengan 271	Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Utara

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	12,2	80,0	0,5	4,95–5,15	0,280–0,297	0,48	86,35	80,36	3,80–4,00

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • KI Buli, Kab. Halmahera Timur • KI Weda Bay, Kab. Halmahera Tengah • KI Pulau Obi, Kab. Halmahera Selatan	• Optimalisasi pusat pertumbuhan eksisting dan percepatan hilirisasi industri nikel di KI Weda Bay, KI Pulau Obi, dan KI Buli, melalui: ○ Perencanaan, perizinan, dan tata ruang KI Pulau Obi, dengan *output*: percepatan penerapan sistem perizinan terpadu ○ Pembangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan di sekitar KI Buli dan KI Pulau Obi, dengan *output*: peningkatan jalan ruas 035 Weda–Sagea, preservasi jalan akses Maba–Kawasan Industri, preservasi Jalan Sofifi–Weda, pembangunan jalan lingkar Pulau Obi, pengembangan pelabuhan, peningkatan kapasitas air baku, SPAM, pengembangan SPALD, sistem pengelolaan sampah, akses internet, jaringan listrik tegangan menengah, sarana pemadam kebakaran, pembangunan hunian pekerja, serta pengembangan fasilitas kesehatan primer ○ Penguatan hilirisasi pertambangan dan turunannya, dengan *output*: pengembangan smelter pengolahan nikel dan hasil pengolahan sisa industri ○ Peningkatan investasi dan promosi ekspor, dengan *output*: fasilitasi investor dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri ○ Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; pengembangan UMKM; serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang ○ Penyediaan SDM berkualitas, dengan *output*: pendidikan vokasi industri dan pelatihan vokasi industri serta fasilitas pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri ○ Penerapan dekarbonisasi dan ekonomi sirkular di industri pengolahan nikel dan turunannya, dengan *output*: percepatan dekarbonisasi dan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor industri untuk pemenuhan *enhanced* NDC dan menuju *net zero economy*, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung dekarbonisasi industri
Kawasan Pertumbuhan: • DPP Morotai, Kab. Pulau Morotai (termasuk PKSN Daruba)	• Penguatan kawasan pariwisata prioritas eksisting di DPP Morotai, melalui: ○ Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pengembangan penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis dan pembangunan Jembatan Sofi–Wayabula untuk mendukung logistik DPP Morotai ○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: penataan kawasan koridor Daname dan Nunuhu, serta pelaksanaan kegiatan (*event*) festival Pulau Morotai

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: optimalisasi SPAM, pengelolaan air limbah, serta akses internet ○ Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pembinaan, pelatihan, dan pembekalan kerja SDM pariwisata, serta manajemen kunjungan wisata ○ Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: kerja sama pariwisata dengan negara-negara pasifik dan mikronesia, serta promosi investasi dan promosi destinasi terpadu ○ Pengembangan industri, usaha masyarakat, dan investasi pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa; peningkatan akses pembiayaan modal; serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka sebagai bahan baku industri dan bahan penunjang ○ Peningkatan pelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa
		Kawasan Pertumbuhan: • Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba (Kab. Pulau Morotai)	• Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Daruba melalui: ○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota ○ Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, pengelolaan sampah berbasis 3R; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; perluasan layanan penyiaran digital; serta pembangunan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran ○ Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: pembangunan jalan akses simpul transportasi Popjetuer-Batugoyang, serta pengembangan bandar udara dan pelabuhan
		Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Perkotaan Industri Weda (Kab. Halmahera Tengah)	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Industri Weda dan penataan kawasan perkotaan di sekitar KI Weda Bay melalui: ○ Peningkatan sarana prasarana dasar perkotaan dan penataan infrastruktur perkotaan di sekitar kawasan industri, dengan *output*: peningkatan sistem pengendalian banjir (*urban flood control system*); pengembangan konsolidasi lahan; pembangunan saluran drainase jalan primer dan sekunder; pembangunan SPAM, SPALD, dan sistem pengelolaan sampah; pengembangan fasilitas kesehatan primer; serta pembangunan RTH dan ruang terbuka publik ○ Penguatan peran kawasan, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan ○ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: preservasi jalan akses Kawasan Industri Weda-Mafa-Matuting- Saketa ○ Pengelolaan masyarakat hukum adat di luar kawasan, dengan *output*: perlindungan dan penguatan kapasitas masyarakat hukum adat, serta penetapan hutan adat
		Kawasan Pertumbuhan: • Kota Sofifi (Kota Tidore Kepulauan)	• Pengembangan Kota Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara melalui: ○ Pembangunan pusat pemerintahan, dengan *output*: pembangunan bangunan gedung kantor (Polda, Kanwil BPN, BPTD, KOREM TNI-AD, LANAL TNI-AL, Kejaksaan Tinggi, BPKP, PUPR, dan hunian ASN/TNI/Polri)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas simpul transportasi, dengan *output*: peningkatan jalan akses simpul transportasi Bandara Kuabang Kao dan Loleo Oba, serta penataan dan peningkatan Pelabuhan Sofifi ○ Peningkatan infrastruktur perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM skala kota, SPALD, dan pengelolaan sampah; pengembangan kawasan perdagangan; serta pembangunan Embung Sofifi dan dermaga polisi air
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kelapa) Sentra Industri • Kab. Halmahera Barat Sentra Produksi • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Kepulauan Sula	• Pengembangan kawasan perkebunan, melalui: ○ Peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Pengembangan agroindustri, tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan *output*: pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, serta revitalisasi pasar rakyat ○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian, dan peningkatan gudang SRG dengan *Warehouse Management System* (WMS) ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan ekspor dan investasi serta peningkatan akses pembiayaan modal ○ Pelaksanaan reforma agraria, dengan *output*: pemberian redistribusi tanah, salah satunya yang berasal dari kawasan hutan, yang disertai dengan bantuan pemberdayaan masyarakat penerima tanah ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian) terkait riset hilirisasi produk perkebunan
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas pala) Sentra Produksi • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Utara	• Pengembangan kawasan perkebunan, melalui: ○ Peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan jalan usaha tani, peningkatan gudang SRG dengan *Warehouse Management System* (WMS), penyediaan sarana pertanian, serta penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen ○ Peningkatan kualitas SDM ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk dengan *output*: pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDesa, serta revitalisasi pasar rakyat ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: peningkatan akses pembiayaan modal ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan inovasi obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan berbasis rempah
		• Kab. Halmahera Barat (perkebunan) • Kab. Halmahera Tengah (industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Selatan (pariwisata serta industri dan pertambangan) • Kab. Halmahera Timur (industri	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata dan industri, serta pertambangan dan penggalian) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, revitalisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi, serta peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		dan pertambangan) • Kab. Pulau Morotai (pariwisata)	○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: pendidikan tinggi dan vokasi yang mendapatkan akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan, serta satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan dunia kerja
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Halmahera Utara* (padi) • Kab. Halmahera Timur* (padi, kedelai, dan pangan akuatik) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan budi daya dan perikanan tangkap, melalui: ○ Penguatan produksi pangan dan perikanan, dengan *output*: pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tanaman pangan, serta pengembangan sarana dan input produksi perikanan budi daya ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pengembangan dan penguatan inkubator koperasi, serta peningkatan sistem logistik pangan lokal
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Halmahera Utara* • Kab. Halmahera Selatan* Kawasan Rendah elektrifikasi: • Kab. Pulau Taliabu** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi melalui: ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
		Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Halmahera Tengah*	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil melalui: ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan DI Tilope dan DI Tutiling Meja, serta rehabilitasi DI Akedaga dan DI Opiyang Mancalele

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi	
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan PKSN dan Wilayah Pendukung • PKSN Daruba, serta Kec. Morotai Utara (Kab. Pulau Morotai) Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Patani Utara (Kab. Halmahera Tengah) • Kec. Maba Utara (Kab. Halmahera Timur)	• Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sentra perkebunan terintegrasi terutama di PKSN, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, peningkatan rehabilitasi, intensifikasi, dan peremajaan kawasan kelapa, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan, layanan validasi dan verifikasi pupuk, perluasan kebun sumber benih bahan tanam komoditi perkebunan, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis
		Kawasan Afirmasi - Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi: ○ KT Sagea Waleh (Kab. Halmahera Tengah) ○ KT Pulau Bacan (Kab. Halmahera Selatan) ○ KT Patlean (Kab. Halmahera Timur) ○ KT Pulau Morotai (Kab. Pulau Morotai)
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • Kawasan Perdesaan Agropolitan Kabupaten Halmahera Barat	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Halmahera Barat melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, sistem drainase, dan pengelolaan sampah berbasis 3R; serta pelaksanaan bantuan sosial adaptif ○ Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan, peningkatan akses internet dan listrik; serta penyediaan moda transportasi desa ○ Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa dan pala, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan dan pelaksanaan bantuan sosial adaptif
		Penguatan sekolah berpola asrama: • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Penguatan sekolah terbuka:	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan sekolah berpola asrama dan sistem pembelajaran jarak jauh, termasuk sekolah terbuka, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan, dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Halmahera Selatan • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas)	SD/paket A, SMP/paket B, SMA/paket C, dan SMK, pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah setempat, dengan *output*: pengembangan kurikulum dan sistem penjaminan mutu pendidikan, serta pengembangan model kurikulum yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
		• Kab. Kepulauan Sula • Kab. Pulau Taliabu • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Tengah (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Pulau Morotai (PKSN Daruba dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Halmahera Timur (Kecamatan Perbatasan Prioritas) Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, termasuk peningkatan kualitas RS dan pengembangan pendekatan khusus layanan kesehatan di daerah sulit akses termasuk pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), melalui: ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; peningkatan RS tipe D menjadi C; pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, strok, dan sistem rujukan berbasis kompetensi; pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit; penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*; serta peningkatan infrastruktur TIK untuk mendukung *telemedicine* ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer dan pelayanan kesehatan bergerak, serta pendayagunaan dokter spesialis ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak, dengan *output*: penyediaan moda transportasi berbasis perairan yang terintegrasi dengan moda transportasi eksisting ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga kesehatan
		Penanganan Penyakit TBC: • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur Penanganan Penyakit Malaria:	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, serta peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, serta peningkatan layanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur • Kab. Pulau Taliabu	pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Eliminasi penyakit rabies, dengan *output*: penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan obat hewan, serta operasional vaksinasi hewan
		Penanganan Penyakit Rabies: • Kab. Halmahera Barat • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Selatan • Kab. Halmahera Utara • Kab. Halmahera Timur • Kab. Pulau Morotai • Kota Ternate	
		Penanganan Penyakit Kusta: Provinsi Maluku Utara	
		• Provinsi Maluku Utara • Kab. Halmahera Tengah • Kab. Halmahera Timur • Kab. Kepulauan Sula • Kab. Pulau Taliabu	• Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan pada fokus mencegah kasus baru dengan peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi, dengan pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi, kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi; serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat; serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan
		• WPP 716 (perbatasan perairan dengan Filipina) • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)	• Peningkatan kerja sama antarpihak dan penguatan regulasi, terutama di pulau-pulau belum bernama serta pemberantasan praktik *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* melalui: ○ Penyiapan kolaborasi dan kerja sama antarpihak dengan negara-negara tetangga seperti Filipina dan Palau ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: operasionalisasi lembaga pengelola perikanan wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing*. ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan
		Kawasan Konservasi: • Taman Nasional Aketajawe Lolobata (Kab. Halmahera Tengah, Kab. Halmahera Timur, dan Kab. Tidore Kepulauan) • Suaka Margasatwa Goa Bukimoruru (Kab. Halmahera Tengah)	Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi ○ Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi, dengan *output*: penyiapan kawasan hutan konservasi untuk implementasi nilai ekonomi karbon ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	• Cagar Alam Pulau Obi (Kab. Halmahera Selatan) • KKD Pulau Mare (Kota Tidore Kepulauan)	
	Provinsi Maluku Utara	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat intra dan antarpulau, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3T, dengan *output*: penanganan jalan daerah dan jalan 3TP pada ruas Kao - Boso–Sidangoli (Dermaga Ferry)–Sp. Dodinga–Bobaneiga–Ekor ○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan dan rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Sofifi, Pelabuhan Gita, dan Pelabuhan Daruba; dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Mangga Dua, pelayaran kapal Ro-Ro, serta penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta layanan penyiaran digital • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya; pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta event prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output:* talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan
125	Perubahan Subbab 4.8.1 Pokok-Pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Papua Tahun 2025 dalam halaman 271	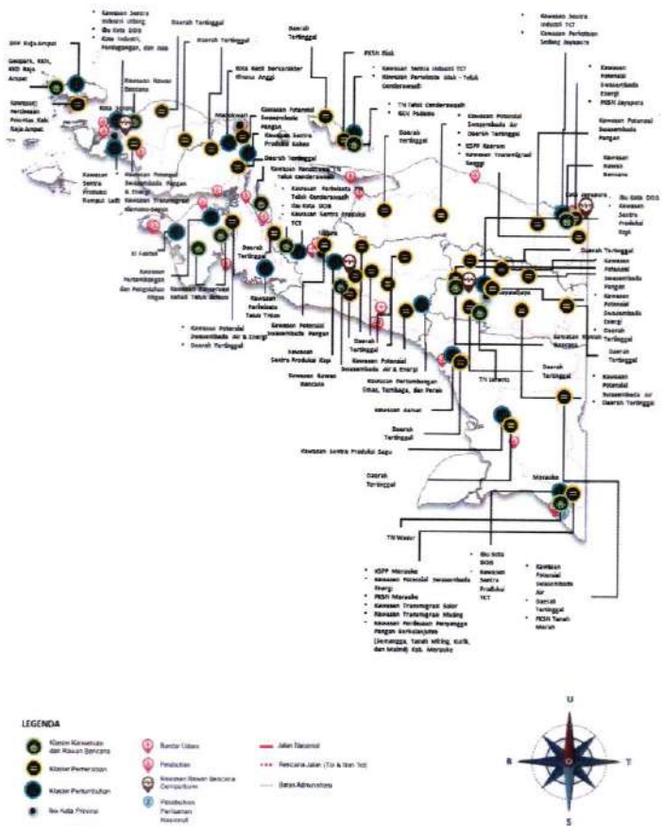
126	Perubahan Subbab 4.4.4 Provinsi Papua halaman 272 sampai dengan 225	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025: 4,4 | 85,8 | 0,4 | 16,00-16,80 | 0,380-0,383 | 0,44 | 59,28 | 82,19 | 6,00-6,40 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata Biak–Teluk	• Penyiapan kawasan pariwisata Biak–Teluk Cenderawasih di Kab. Biak Numfor, melalui: ○ Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Cenderawasih (Kab. Biak Numfor)	○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah dan pengembangan desa wisata ○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan SPAM dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ○ Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan bumkam, serta digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif, untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya
		Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura (Kota Jayapura)	• Pengembangan Kawasan Perkotaan Sedang Jayapura, melalui: ○ Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) ○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penguatan *branding* kawasan dan penguatan promosi daya tarik kota ○ Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ○ Peningkatan sarana prasarana pelayanan dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, SPAM, SPALD, infrastruktur listrik dan TIK; pengelolaan sampah berbasis 3R; perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat; serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua dengan pembiayaan SBSN
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Industri • Kota Jayapura • Kab. Biak Numfor Sentra Produksi • Kota Jayapura • Kab. Biak Numfor • Kab. Jayapura • Kab. Kepulauan Yapen • Kab. Waropen	• Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: ○ Penguatan sentra produksi perikanan ○ Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan ○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dan nelayan dengan kartu usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian ○ Peningkatan sarana prasarana pendukung ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Jayapura (perikanan) • Kab. Biak Numfor (perikanan dan pariwisata) • Kota Jayapura (perikanan) • Kab. Kepulauan Yapen (perikanan) • Kab. Waropen (perikanan)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan dan pariwisata) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Keerom	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kab. Keerom yang didukung dengan Kawasan Transmigrasi Senggi, melalui: ○ Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan infrastruktur ○ Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output*: penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian ○ Pengembangan kawasan secara *off farm*, dengan *output*: penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ○ Peningkatan layanan perintis udara dalam rangka mendukung KSPP Keerom
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Jayapura* (padi dan pangan akuatik) • Kab. Biak Numfor* (pangan akuatik) • Kota Jayapura* (padi dan pangan akuatik) • Kab. Kepulauan Yapen* (pangan akuatik) • Kab. Sarmi* (pangan akuatik) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan tangkap, melalui: ○ Penguatan produksi, dengan *output*: pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: peningkatan sarana dan prasarana penangkapan ikan ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kota Jayapura*	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Mamberamo Raya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Supiori** • Kab. Kepulauan Yapen** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM), penyiapan pembangunan pabrik *ethanol* dalam rangka industrialisasi energi, pemetaan potensi EBT lainnya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), serta pembangunan sistem transmisi dan interkoneksi tenaga listrik ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Perluasan akses energi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) berbasis hidro dan potensi daerah setempat lainnya dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui: ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T yang dapat dialirkan melalui pembangunan sistem mikrogrid berbasis energi terbarukan
		Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Jayapura* • Kab. Mamberamo Raya* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, terutama di pulau-pulau kecil, melalui: ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: rehabilitasi DI Lereh ○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • Kab. Mamberamo Raya (sagu dan kakao) • Kab. Waropen (kakao dan kelapa) • Kab. Supiori (kelapa) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak; peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas; peningkatan komplementaritas program bantuan sosial dengan kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi dan kartu usaha; serta penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan, dan pemutakhiran data penerima bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian terintegrasi, dengan *output*: pengembangan UMKM lokal

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung • PKSN Jayapura (Kota Jayapura) • PKSN Biak, Kec. Aimando Padaido, Kec. Padaido, Kec. Oridek, Kec. Biak Utara, Kec. Yawosi, Kec. Warsa, Kec. Bondifuar (Kab. Biak Numfor) Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Sawai (Kab. Mamberamo Raya) • Kec. Pantai Timur, Kec. Sarmi Timur, Kec. Sarmi Selatan, Kec. Sarmi, Kec. Pantai Barat (Kab. Sarmi) • Kec. Towe, Kec. Waris (Kab. Keerom) • Kec. Supiori Utara, Kec. Supiori Barat, Kec. Kepulauan Aruri (Kab. Supiori)	• Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura dan Biak, serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: peningkatan pelabuhan perikanan di lokasi SKPT (SKPT Jayapura dan SKPT Biak) yang dikelola dan operasional sesuai standar, penyaluran sarana budidaya ikan ke masyarakat, serta peningkatan kapasitas masyarakat di bidang kelautan dan perikanan di kawasan perbatasan
		Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Senggi ○ KT Senggi (Kab. Keerom)
		Pengembangan sekolah terbuka: • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal) • Kab. Jayapura	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kota Jayapura (PKSN Jayapura)	○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA
		Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Mamberamo Raya (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kota Jayapura (PKSN Jayapura)	○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
		Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Keerom (Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Waropen (Daerah Tertinggal)	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memprioritaskan Orang Asli Papua, dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; serta pengadaan peralatan kesehatan dan pendukungnya untuk rumah sakit
		Layanan Unggulan RS: • Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	
		Pengendalian penyakit TBC: • Kab. Jayapura • Kab. Kepulauan Yapen • Kab. Biak Numfor • Kab. Sarmi • Kab. Waropen • Kab. Supiori	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, serta layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD
		Pengendalian penyakit malaria:	○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Keerom • Kab. Jayapura • Kab. Sarmi • Kab. Mamberamo Raya • Kab. Waropen • Kab. Kepulauan Yapen • Kab. Biak Numfor • Kab. Supiori • Kota Jayapura Pengendalian penyakit Kusta dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua	faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
		Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* pada WPP 717, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan ○ Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua ○ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
		Kawasan Konservasi: • TN Teluk Cendrawasih (Kab. Biak Numfor, Kab. Supiori, Kab. Waropen, dan Kab. Kepulauan Yapen) • TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Raya, Kab. Jayapura, dan Kab. Keerom) • KKN Padaido (Kab. Biak Numfor)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
		Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • Kota Jayapura	• Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat terhadap mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pemberian pembinaan dalam adaptasi perubahan iklim

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan *nature-based solution* dan *gray infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami, serta *retrofit* atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik
			○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar
			○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
		Provinsi Papua	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
			• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui:
			○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: pembangunan jembatan strategis, penanganan jalan daerah, serta pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas Jalan Jayapura–Wamena
			○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: *replacement* fasilitas Pelabuhan Sarmi di Kab. Sarmi, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Padaido dan Pelabuhan Pulau Owi di Kab. Biak Numfor, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Serui di Kab. Kepulauan Yapen, pembangunan fasilitas Pelabuhan Marsram di Kab. Supiori, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis
			○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura
			○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan
			○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi
			○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat
			• Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui:
			○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan
			○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya
			○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event*, film, dan musik berbasis budaya lokal
			○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
			• Penguatan percepatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui:
			○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua
			○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru dengan peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi dengan pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* dengan berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak dengan peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah, dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, serta pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil (KAT) ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat, dengan output: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) ○ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga, melalui: ○ Pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan
127	Perubahan Subbab 4.8.3 Provinsi Papua Barat halaman 275 sampai dengan 278	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2025	11,2	148.1	0.4	19.62-20.12	0,370-0,380	0.47	1.06	82.89	3.75-4.06

Keterangan:
LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • KI Fakfak (Kab. Fakfak)	• Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di KI Fakfak dan percepatan hilirisasi industri petrokimia dalam memperkuat industri pupuk dalam negeri, melalui: ○ Perencanaan, perizinan, dan tata ruang kawasan industri, dengan *output*: penyusunan masterplan dan studi kelayakan, serta percepatan penerapan sistem perizinan terpadu
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata Teluk Triton (Kab. Kaimana)	• Penyiapan kawasan pariwisata Teluk Triton di Kab. Kaimana, melalui: ○ Peningkatan aksesibilitas pariwisata ○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah dan pengembangan desa wisata ○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan SPAM dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan serta pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
		Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi (Kab. Teluk Bintuni)	• Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri dengan hilirisasi industri berbasis SDA (minyak dan gas bumi) berorientasi ekspor di Kab. Teluk Bintuni, melalui: ○ Pengembangan Lapangan Ubadari, *Carbon Capture, Utilization, and Storage* (CCUS), *Compression* (UCC Project), serta pengembangan Lapangan Gas Asap, Kido, dan Merah (AKM) ○ Peningkatan investasi dan ekspor ○ Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka ○ Peningkatan SDM berkualitas, dengan *output*: fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri serta pelatihan vokasi industri ○ Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan migas
		Kawasan Pertumbuhan: • Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi (Kab. Pegunungan Arfak)	• Pengembangan Kota Kecil Berkarakter Khusus Anggi, melalui: ○ Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis Warmare–Anggi ○ Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), pembangunan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat, perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, serta perluasan layanan penyiaran digital ○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penataan kawasan, penguatan *branding* kawasan, serta penguatan promosi daya tarik kota
		Kawasan Komoditas Unggulan (komoditas kakao) Sentra Produksi • Kab. Manokwari Selatan	• Pengembangan kawasan perkebunan, melalui: ○ Peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk; fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil; pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa; serta revitalisasi pasar rakyat ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: pengembangan kelembagaan ekonomi petani dan peningkatan akses pembiayaan modal
		• Kab. Manokwari Selatan (perkebunan) • Kab. Kaimana (pariwisata) • Kab. Pegunungan Arfak (pariwisata) • Kab. Fakfak (industri pengolahan) • Kab. Teluk Bintuni (industri pengolahan)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan pelatihan vokasi) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, pariwisata, serta industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi, serta peningkatan tenaga kependidikan vokasi yang berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja ○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *digital talent scholarship*, dan pelatihan keterampilan digital dasar ○ Peningkatan kapasitas SDM usia produktif sesuai dengan kompetensi kerja yang diperlukan dunia usaha/dunia kerja, penciptaan lapangan kerja, dan fasilitasi usaha
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan • Kab. Manokwari* (padi dan pangan akuatik) • Kab. Manokwari Selatan* (padi) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan pangan akuatik/ *blue food* berbasis perikanan tangkap (tuna-cakalang-tongkol), melalui: ○ Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, pemberian pupuk bersubsidi, penyaluran benih ikan air laut ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan koperasi berbasis komoditas di kalangan kelompok strategis, penyusunan tata kelola dan strategi distribusi logistik, pengembangan kampung nelayan dan desa perikanan cerdas *(smart fisheries village)*, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan ○ Peningkatan swasembada pangan berkelanjutan dan berbasis pengelolaan sumber daya alam, dengan *output*: penggunaan benih atau bibit tanaman pangan berketahanan iklim, pengembangan *agroforestry* dalam menjaga keseimbangan ekosistem, serta mengembangkan sistem *zero-waste agriculture*
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Manokwari* • Kab. Teluk Bintuni* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Pegunungan Arfak** • Kab. Teluk Wondama** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), pemetaan potensi EBT lainnya, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin gas (PLTMG) ○ Perluasan akses energi, dengan *output*: pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) berbasis hidro dan potensi daerah setempat lainnya, serta pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik ○ Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan, melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T dengan pembangunan sistem mikrogrid berbasis energi terbarukan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	
		Kawasan Potensial Swasembada Air • Kab. Teluk Bintuni* • Kab. Kaimana* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: ○ Rehabilitasi hutan dan lahan di daerah imbuhan mata air ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dengan *output*: pembangunan DI Bomberay dan DI Wariori, serta rehabilitasi DI Aimasi ○ Peningkatan kapasitas tampungan air alami ○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
		Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • Kab. Manokwari Selatan (kakao) • Kab. Teluk Bintuni (udang dan kepiting) • Kab. Teluk Wondama (perikanan dan rumput laut) • Kab. Pegunungan Arfak (hortikultura dan pariwisata Danau Anggi Giji dan Anggi Gida) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, serta pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ○ Pemberian layanan dasar kepada kelompok rentan yang telantar, meliputi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan tuna sosial dalam mendukung akses rehabilitasi sosial dan pemenuhan SPM bidang sosial ○ Pemberian perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif dengan Kartu Kesejahteraan yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi dengan pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, serta penataan pariwisata rintisan, dengan *output*: pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, serta pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan dengan program Kartu Usaha Afirmatif (KUA) ○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
		Pengembangan Sekolah Terbuka dan Sekolah Sepanjang Hari: • Kab. Pegunungan Arfak (daerah tertinggal) Pengembangan Sekolah Berpola Asrama:	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik , dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Teluk Wondama (daerah tertinggal) • Kab. Manokwari	SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga termiskin, serta wilayah dengan ketersediaan sekolah yang rendah
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan: • Seluruh Kabupaten di Provinsi Papua Barat	○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan untuk meningkatkan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak; serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; serta pembinaan terkait layanan primer dan rujukan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		Pengendalian Penyakit Malaria: • Kab. Manokwari • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Teluk Wondama • Kab. Fakfak • Kab. Kaimana	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, serta layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Pengendalian Penyakit TBC: • Kab. Teluk Bintuni • Kab. Manokwari Selatan • Kab. Pegunungan Arfak	faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS
		Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Barat	
		Pemberantasan IUU Fishing: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing*, melalui ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan, dengan *output*: Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional dan pemberantasan perburuan liar, pembalakan liar, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, serta *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan, dengan *output*: pembangunan prasarana serta perawatan armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) ○ Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua ○ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum batas wilayah laut
		Kawasan Konservasi: • TN Teluk Cenderawasih (Kab. Teluk Wondama) • Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Fakfak)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
		Provinsi Papua Barat	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong ruas Jalan Windesi–Ambuni dan preservasi ruas Jalan Mameh-Windesi (Werabur), pembangunan jalan akses Bandar Udara Rendani, penanganan jalan daerah, serta peningkatan layanan angkutan jalan perintis ○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan fasilitas Pelabuhan Manokwari di Kab. Manokwari, pengembangan fasilitas Pelabuhan Teluk Patipi dan Pelabuhan Fakfak di Kab. Fakfak, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Bintuni dan Pelabuhan Babo di Kab. Teluk

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Bintuni, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Oransbari di Kab. Manokwari Selatan, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Rendani di Kab. Manokwari, serta pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: ○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru dengan peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi dengan pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya ○ Peningkatan akses air minum serta sanitasi layak dan aman, dengan *output*: peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* dengan berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, dengan peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat • Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta rehabilitasi ekosistem mangrove ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyelamatan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) • Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga, melalui pengembangan sistem pembinaan prabibit, bibit, dan talenta potensial bidang olahraga, dengan *output*: talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, serta peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
128	Perubahan Subbab 4.8.4 Provinsi Papua Tengah halaman 278 sampai dengan 281	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. **Lokasi Prioritas** — ***Highlight* Indikasi Intervensi** Kawasan Pertumbuhan: • Ibu Kota Daerah Otonomi Baru (Kab. Nabire) • Pengembangan Kab. Nabire sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Tengah, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan ○ Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan ○ Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah ○ Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Penataan kawasan Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Pariwisata TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) • Penyiapan kawasan pariwisata TN Teluk Cendrawasih di Kab. Nabire, melalui: ○ Peningkatan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan jalan daerah ○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah dan pengembangan desa wisata

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan amenitas pariwisata, dengan *output*: pembangunan SPAM dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) ○ Pengembangan usaha masyarakat, dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam, serta digitalisasi pemasaran produk ekonomi kreatif untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing usaha kecil dalam industri pariwisata dan budaya
		Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan pertambangan emas-tembaga-perak (Kab. Mimika)	• Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri dengan hilirisasi industri berbasis SDA (emas, tembaga, dan perak) berorientasi ekspor di Kab. Mimika, melalui: ○ Peningkatan investasi dan ekspor ○ Fasilitasi kemitraan usaha dan rantai pasok, dengan *output*: penguatan partisipasi pada forum terkait produk industri dan pertambangan; pengembangan inkubator bisnis untuk pembentukan wirausaha industri; serta peningkatan kerja sama sektor industri kecil, menengah, dan aneka ○ Peningkatan SDM berkualitas, dengan *output*: fasilitasi pendampingan SMK yang *link and match* dengan industri, serta pelatihan vokasi industri yang relevan dengan kebutuhan DUDI ○ Penguatan implementasi penanganan kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan, dengan *output*: reklamasi pascatambang
		Kawasan Komoditas Unggulan: (komoditas kopi) Sentra Produksi • Kab. Paniai • Kab. Dogiyai • Kab. Puncak Jaya	• Pengembangan kawasan perkebunan, melalui: ○ peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pendampingan/penerapan sertifikasi/pengembangan produk, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan dengan pengembangan UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDesa, serta revitalisasi pasar rakyat ○ Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan pertanian, dengan *output*: perluasan akses pembiayaan bagi petani, perkebunan, dengan Kartu Usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas tuna cakalang-tongkol) Sentra Produksi • Kab. Nabire • Kab. Mimika	• Penguatan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: ○ Penguatan sentra produksi ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk ○ Peningkatan kualitas SDM ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan, dengan *output*: perluasan akses pembiayaan bagi nelayan dengan kartu usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan
		• Kab. Mimika (pertambangan) • Kab. Paniai (perkebunan) • Kab. Dogiyai (perkebunan)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perkebunan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, revitalisasi sarana dan prasarana perguruan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Puncak Jaya (perkebunan) • Kab. Nabire (pariwisata)	tinggi, serta revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja ○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *digital talent scholarship*, dan pelatihan keterampilan digital dasar
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Nabire* (padi dan pangan akuatik) • Kab. Mimika* (padi, sagu, dan pangan akuatik) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pertanian tanaman (sagu) serta pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan tangkap, melalui: ○ Peningkatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu ○ Pengembangan sarana dan input produksi perikanan budi daya ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan, dengan *output*: penyuluhan pertanian untuk kelompok pelaku utama, serta mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan ○ Penguatan kawasan pertanian terintegrasi dengan penguatan diversifikasi pangan
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Nabire* • Kab. Mimika* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Puncak Jaya** • Kab. Intan Jaya** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pemetaan potensi EBT lainnya, serta pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	bukan listrik yang tinggi	
	Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Nabire* • Kab. Mimika* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: ○ Peningkatan kapasitas tampungan melalui pembangunan embung dan tampungan air lainnya ○ Pengembangan dan pengelolaan irigasi melalui rehabilitasi DI Kalibumi ○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • Kab. Paniai (kopi) • Kab. Dogiyai (kopi) • Kab. Deiyai (kopi) • Kab. Puncak (kopi) • Kab. Puncak Jaya (kopi) • Kab. Intan Jaya (kopi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; optimalisasi kartu kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan; pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak; peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui kartu usaha; serta penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan, dan pemutakhiran data penerima bantuan dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ○ Peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan *output*: penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan *output*: pengembangan UMKM lokal, fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis, serta perluasan akses pembiayaan bagi petani melalui kartu usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian ○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
	Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: • Kec. Mimika Barat, Kec. Mimika Timur, Kec. Mimika Timur Jauh, dan Kec. Jita (Kab. Mimika)	• Pengembangan kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas serta peningkatan akses internet dan listrik, pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga ○ Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap warga masyarakat di lokasi rawan bencana, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
	Pengembangan Sekolah Terbuka dan Sekolah Berpola Asrama: • Kab. Intan Jaya (daerah sangat tertinggal) • Kab. Puncak (daerah sangat tertinggal) Pengembangan Sekolah Terbuka: • Kab. Dogiyai (daerah tertinggal) • Kab. Deiyai (daerah sangat tertinggal) • Kab. Intan Jaya (daerah sangat tertinggal) • Kab. Puncak (daerah sangat tertinggal) • Kab. Puncak Jaya (daerah sangat tertinggal) Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari: • Kab. Paniai (daerah sangat tertinggal) Pengembangan Sekolah Berpola Asrama: • Kab. Nabire • Kab. Intan Jaya (daerah sangat tertinggal) • Kab. Puncak (daerah sangat tertinggal) Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan: Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, pemberian beasiswa afirmasi menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan pada satuan pendidikan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual Wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Tengah ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK	
	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine*	

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Layanan Unggul RS: Seluruh Kab./Kota	○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes, penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat, serta pembinaan terkait layanan primer dan rujukan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, serta jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		Pengendalian Penyakit Malaria: • Kab. Paniai • Kab. Dogiyai • Kab. Intan Jaya • Kab. Deiyai • Kab. Puncak • Kab. Puncak Jaya • Kab. Nabire • Kab. Mimika Pengendalian Penyakit TBC: • Kab. Paniai • Kab. Nabire Pengendalian Kusta dan HIV/AIDS: Provinsi Papua Tengah	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan layanan pencegahan, serta pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data dan informasi HIV/AIDS
		Pemberantasan IUU *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau) • WPP 718 (perbatasan perairan dengan Australia)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan ○ Pelibatan tokoh adat, agama, dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua ○ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, dengan *output*: fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir peduli keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum batas wilayah laut
		Kawasan Konservasi: • TN Teluk Cenderawasih (Kab. Nabire) • TN Lorentz (Kab. Mimika, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Intan Jaya, dan Kab. Paniai)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), serta penanganan kasus tindak pidana LHK P21 ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• TN Mamberamo Foja (Kab. Puncak dan Kab. Puncak Jaya)	pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
		Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Tengah Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • Kab. Deiyai	• Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, serta *retrofit* atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, dan penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang
		Provinsi Papua Tengah	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis dan jalan trans, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong ruas Jalan Wagete-Timika, Mulia-Sinak, Ilu-Mulia-Enarotali, serta Karubaga-Ilu-Mulia ○ Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan layanan angkutan penyeberangan perintis ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang, angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang, serta angkutan udara perintis kargo ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, benda budaya, serta perlindungan warisan budaya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan percepatan pencegahan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya melalui: ○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri; serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta komunikasi perubahan perilaku terutama perilaku pemberian makan ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Penyehatan lingkungan dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, dengan *output*: peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah, dan penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru ○ Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) ○ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
129	Perubahan Subbab 4.8.5 Provinsi Papua Pegunungan halaman 281 sampai dengan 284	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Pegunungan LPE (%) | PDRB per Kapita (Rp Juta) | Kontribusi PDRB Provinsi (%) | Tingkat Kemiskinan (%) | Rasio Gini | Indeks Modal Manusia | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | IKLH Daerah | TPT (%) 2025 | 4,9 | 19,3 | 0,1 | 30,00–31,00 | 0,377–0,383 | 0,43 | 89,28 | 83,53 | 1,78–2,10 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. Lokasi Prioritas | *Highlight* Indikasi Intervensi Kawasan Pertumbuhan: • Ibu Kota Daerah Otonom Baru (Kab. Jayawijaya) • Pengembangan Kab. Jayawijaya sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Pegunungan, dengan *output*: pembangunan sarana dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan ○ Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan ○ Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah dengan *output*: pembangunan jalan Trans Papua Jayapura–Wamena ○ Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Penataan kawasan
		Kawasan Komoditas Unggulan: (Komoditas kopi) Sentra Produksi • Kab. Jayawijaya • Kab. Lanny Jaya • Kab. Tolikara	• Pengembangan kawasan perkebunan, melalui: ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, informasi pasar, promosi dan pemasaran, fasilitasi dan pembinaan peningkatan digitalisasi bagi usaha kecil, pengembangan gerakan ekonomi kerakyatan dengan pengembangan IKM/UMKM, koperasi berbasis komoditas, dan BUMDesa, serta revitalisasi pasar rakyat ○ Peningkatan kualitas dan penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan dengan *output*: penjaminan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan dan pendaftaran HAKI, serta peningkatan dan perluasan akses pembiayaan modal bagi petani dan pekebun dengan kartu usaha guna meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian ○ Peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian)
		• Kab. Jayawijaya (perkebunan) • Kab. Lanny Jaya (perkebunan) • Kab. Tolikara (perkebunan)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah perkebunan sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, serta revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik, dengan *output*: peningkatan mutu dan kompetensi SDM pendidikan tinggi dan tenaga kependidikan vokasi berstandar industri ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja, dengan *output*: akselerasi peningkatan kualitas kelembagaan pada pendidikan tinggi dan vokasi, serta peningkatan kemitraan satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja ○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *digital talent scholarship*, dan pelatihan keterampilan digital dasar
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Jayawijaya* (padi, ubi, hortikultura, dan babi)	• Penguatan kawasan potensial swasembada pangan dan peternakan (babi), melalui: ○ Penguatan produksi, dengan *output*: penguatan input komoditas peternakan ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	○ Penguatan tata kelola kawasan pertanian melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia
	Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Jayawijaya* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Pegunungan Bintang** • Kab. Yalimo** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	• Peningkatan ketahanan energi terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan, melalui: ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
	Kawasan Potensial Swasembada Air	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD): ○ Kab. Pegunungan Bintang* ○ Kab. Yahukimo* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas air tinggi
	Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • Kab. Jayawijaya* (kopi dan pariwisata budaya Lembah Baliem) • Kab. Yahukimo* (kopi) • Kab. Tolikara* (kopi) • Kab. Nduga* (kopi) • Kab. Lanny Jaya* (kopi) • Kab. Yalimo* (kopi) • Kab. Mamberamo Tengah* (kopi)	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; mengoptimalkan pemanfaatan kartu kesejahteraan agar kelompok miskin dapat memperoleh manfaat dari bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak; peningkatan kualitas layanan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas, dengan penyediaan permakanan, layanan *home care*, dan program pemberdayaan komunitas; peningkatan komplementaritas program bantuan sosial melalui kartu kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi dan kartu usaha, serta penguatan pemanfaatan, mekanisme pengaduan dan pemutakhiran data penerima

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Pegunungan Bintang* (kopi) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	bantuan, dengan menggunakan data sosial ekonomi terpadu untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi dengan pengembangan sentra pertanian dan penataan pariwisata rintisan, dengan *output*: pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis ○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: • Kec. Iwur, Kec. Tarup, Kec. Oksibil, Kec. Oksamol, Kec. Kiwirok Timur, Kec. Batom, Kec. Mofinop, dan Kec. Murkim (Kab. Pegunungan Bintang)	• Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas
		Pengembangan Sekolah Berpola Asrama: • Kab. Jayawijaya (daerah tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (daerah sangat tertinggal dan kecamatan perbatasan prioritas) • Kab. Yahukimo (daerah sangat tertinggal) Pengembangan Sekolah Terbuka: • Kab. Tolikara (daerah sangat tertinggal) • Kab. Mamberamo Tengah (daerah sangat tertinggal) • Kab. Yalimo (daerah sangat tertinggal) • Kab. Yahukimo (daerah sangat tertinggal) • Kab. Lanny Jaya (daerah sangat tertinggal)	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua, seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, dan SMK, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual Wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Nduga (daerah sangat tertinggal) • Kab. Pegunungan Bintang (daerah sangat tertinggal) Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari: • Kab. Jayawijaya (daerah tertinggal) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan	○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Pegunungan
		Provinsi Papua Pegunungan • Kab. Jayawijaya (tradisi dan budaya Lembah Baliem)	• Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Lembah Baliem, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, benda budaya, serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal, serta digitalisasi pemasaran untuk memperluas pasar ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan: • Seluruh Kab./Kota	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; serta pembinaan terkait layanan primer dan rujukan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Penyediaan moda transportasi mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		Pengendalian Penyakit Malaria: • Kab. Jayawijaya	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Tolikara • Kab. Nduga • Kab. Lanny Jaya • Kab. Mamberamo Tengah • Kab. Yalimo • Kab. Yahukimo Pengendalian Penyakit TBC: • Kab. Pegunungan Bintang • Kab. Yalimo Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Pegunungan	kesehatan, peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC, serta layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
		Kawasan Konservasi: • TN Lorentz (Kab. Jayawijaya, Kab. Yahukimo, Kab. Nduga, dan Kab. Lanny Jaya) • TN Mamberamo Foja (Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Yalimo, dan Kab. Tolikara)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
		Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Pegunungan Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • Lanny Jaya	• Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, penerapan *nature-based solutions*, serta retrofit atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, serta pemulihan ekosistem perairan
		Provinsi Papua Pegunungan	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Towe Hitam–Oksibil, Jayapura–Wamena, dan Karubaga–Ilu–Muhia) ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo, serta pengembangan angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan udara perintis penumpang ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: ○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru dengan peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi dengan pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri; serta penguatan ekosistem pendukungnya, seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukungnya ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan kespro • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, dengan peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM, serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, dan pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan *output*: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru ○ Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
130	Perubahan Subbab 4.8.6 Provinsi Papua Selatan halaman 284 sampai dengan 287	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Selatan Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka.

Lokasi Prioritas	*Highlight* Indikasi Intervensi
Kawasan Pertumbuhan: • Kab. Merauke	• Pengembangan Kab. Merauke sebagai ibu kota provinsi daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Selatan, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan serta pembebasan lahan ○ Penyusunan rencana induk (masterplan), pengembangan, dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan) ○ Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pembangunan jalan strategis dan pengembangan Bandar Udara Ewer ○ Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan SPAM, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), peningkatan akses internet tetap pitalebar untuk UMKM dan fasilitas umum, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Penataan kawasan
Kawasan Pertumbuhan: • Kawasan Asmat (Kab. Asmat)	• Penyiapan kawasan Asmat, melalui: ○ Pengembangan aksesibilitas pariwisata, dengan *output*: pengembangan Bandara Ewer (Kab. Asmat) ○ Pengembangan produk kepariwisataan, dengan *output*: pendukungan *event* daerah, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual pada produk ekonomi lokal, dan pengembangan produk ekonomi lokal ○ Pengembangan sentra pariwisata, dengan *output*: pengembangan desa wisata ○ Peningkatan kapasitas SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: pelatihan dan pembekalan SDM pariwisata, serta sertifikasi SDM bidang pariwisata ○ Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: promosi terpadu secara nasional dan internasional ○ Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: pembentukan/pengembangan serta pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
Kawasan Komoditas Unggulan: (komoditas tuna-cakalang-tongkol) Sentra Produksi • Kab. Merauke	• Penyiapan pengembangan sentra produksi berbasis komoditas tuna-cakalang-tongkol, melalui: ○ Penguatan sentra produksi perikanan ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk perikanan ○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Peningkatan sarana prasarana pendukung ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi
		Kawasan Komoditas Unggulan (komoditas sagu) Sentra Produksi • Kab. Merauke (sagu) • Kab. Mappi (sagu) • Kab. Asmat (sagu)	• Penguatan sentra produksi berbasis komoditas sagu, melalui: ○ Pengembangan kawasan perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas yang mendukung penguatan pangan lokal dan hilirisasi komoditas perkebunan ○ Pengembangan tata niaga/pemasaran, dan promosi produk, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, BUMDesa, dan koperasi, serta revitalisasi pasar rakyat ○ Peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian dan regenerasi petani, dengan *output*: pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat ○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan pertanian ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi serta peningkatan penerimaan bantuan pendanaan penelitian *matching fund* (BOPTN penelitian)
		• Kab. Merauke (perikanan dan perkebunan) • Kab. Mappi (perkebunan) • Kab. Asmat (perkebunan)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM, serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK dan politeknik) dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, perkebunan, dan industri pengolahan) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan berkualitas, serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan vokasi ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Merauke	• Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Merauke yang didukung dengan kawasan transmigrasi Salor, melalui: ○ Pengembangan kawasan secara geospasial, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan infrastruktur ○ Pengembangan kawasan secara *on farm*, dengan *output*: penguatan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian ○ Pengembangan kawasan secara *off farm*, dengan *output*: penguatan integrasi hulu-hilir/rantai produksi-pemasaran dan nilai tambah produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi, dengan *output*: pengembangan model percontohan pertanian modern dan berkelanjutan, peningkatan mekanisasi pertanian, serta percontohan penerapan teknologi pertanian, termasuk *digital farming* ○ Peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital dengan *output*: pelatihan bidang komunikasi, informatika dan digital, *digital talent scholarship*, serta pelatihan keterampilan digital dasar
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Merauke* (padi dan pangan akuatik)	• Penguatan kawasan pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan tangkap, melalui: ○ Penguatan produksi, dengan *output*: penyaluran benih ikan air laut dan tawar, serta pengembangan sarana dan input produksi perikanan budi daya

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Rentan Pangan: • Kab. Boven Digoel** (padi) • Kab. Mappi** (sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan rendah dan/atau Indeks Ketahanan Pangan rentan atau sangat rentan	○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan konektivitas (jalan, pelabuhan, dan bandara) sebagai akses menuju sentra pangan lokal ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian dan perikanan untuk mendorong *ownership* petani dan nelayan pada aset dan lembaga yang telah dibentuk, serta pendampingan untuk modernisasi dan digitalisasi pertanian ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani dan nelayan yang mendukung pengembangan pangan lokal • Penguatan kawasan rentan pangan dilakukan, melalui: ○ Penguatan diversifikasi pangan, dengan *output*: pengembangan kawasan padi dan sagu, pembentukan koperasi berbasis bahan pangan, penguatan kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan, serta pemberian bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Merauke* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Mappi** • Kab. Asmat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga yang tinggi dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan pada kawasan potensial energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar dan variabel serta pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) sesuai dengan potensi daerah dan dedieselisasi, dengan *output*: pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan, melalui perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T
		Kawasan Potensial Swasembada Air: • Kab. Boven Digoel* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan pada kawasan potensial swasembada air, melalui: ○ Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, melalui: rehabilitasi DIR Sermayam dan DIR Kurik ○ Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Afirmasi Daerah Tertinggal*: • Kab. Boven Digoel (karet) • Kab. Asmat (sagu) • Kab. Mappi* (sagu) Keterangan: *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK; pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah; penyediaan infrastruktur layanan kepada kelompok dengan kesejahteraan terendah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mempermudah aksesibilitas, dengan peningkatan sarana dan prasarana, seperti penyediaan air dan sanitasi bersih, serta pemberian perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif melalui kartu kesejahteraan yang berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi berbasis pengembangan sentra perkebunan terintegrasi, dengan *output*: pengembangan desa wisata, pengembangan UMKM lokal, dan fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis ○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna ○ Pengelolaan kawasan hutan dan kawasan pesisir yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti perhutanan sosial dan pemberdayaan nelayan melalui kartu usaha
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan: PKSN dan Wilayah Pendukung • PKSN Merauke, serta Kec. Ilwayab, Tabonji, Waan, Tubang, Okaba, Malind, Naukenjerai (Kab. Merauke) • PKSN Tanah Merah, serta Kec. Kombut, Waropko, Ambatkwi (Kab. Boven Digoel) Kecamatan Perbatasan Prioritas • Kec. Agats dan Kec. Fayit (Kab. Asmat) • Kec. Minyamur (Kab. Mappi)	• Penguatan kawasan perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah dan Merauke serta kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas ○ Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan terutama di PKSN, dengan *output*: optimasi lahan termasuk revitalisasi lahan rusak menjadi produktif, penyediaan bibit unggul, pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), pengolahan pascapanen komoditas, masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, peningkatan akses pembiayaan modal, pelabuhan perikanan di lokasi SKPT yang dikelola dan operasional sesuai standar, serta layanan validasi dan verifikasi pupuk
		Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Salor dan Muting: ○ KT. Salor (Kab. Merauke) ○ KT. Muting (Kab. Merauke)
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas:	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kawasan Perdesaan Penyangga Pangan Berkelanjutan (Semangga, Tanah Miring, Kurik, dan Malind) Kab. Merauke	○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, sistem drainase; dan pengelolaan sampah berbasis 3R ○ Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan; peningkatan akses internet dan listrik; serta penyediaan moda transportasi desa ○ Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa ○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa
		Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Asmat (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kab. Mappi (Daerah Tertinggal dan Kecamatan Perbatasan Prioritas) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Merauke (PKSN Merauke) Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Boven Digoel (Daerah Tertinggal dan PKSN Tanah Merah) Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTS/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) yang diprioritaskan untuk Orang Asli Papua (OAP) ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi serta pendampingan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan dan akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum, serta penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Selatan ○ Pemberian *upskilling* dan *reskilling* kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
		Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan: • Seluruh kabupaten di Provinsi Papua Selatan Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer, serta pendayagunaan dokter spesialis di Wilayah Papua ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak, serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana, prasarana, serta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			penyediaan alat kesehatan dan obat pada puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Penyediaan moda transportasi yang mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		Pengendalian Penyakit Malaria: • Kab. Merauke • Kab. Asmat • Kab. Boven Digoel • Kab. Mappi Pengendalian Penyakit TBC: • Kab. Mappi • Kab. Boven Digoel Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Selatan	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat, dan perbekalan kesehatan; serta peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC dan layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
		Pemberantasan *Illegal, Unreported, And Unregulated* (IUU) *Fishing*: • WPP 718 (perbatasan dengan Australia)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* pada WPP 718, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan ○ Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah, serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua ○ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
		Kawasan Konservasi: • TN Lorentz (Kab. Asmat) • TN Wasur (Kab. Merauke)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi, dengan *output*: penegakan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di kawasan konservasi, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan konservasi, kebijakan pengelolaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), dan penanganan kasus tindak pidana LHK P21 ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, dan pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem
		Provinsi Papua Selatan	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, jalan trans, dan jalan 3TP, dengan *output*: penanganan jalan daerah dan pembangunan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong (Iwur–Waropko) ○ Pengembangan pelabuhan dan penyediaan jaringan pelayaran, dengan *output*: peningkatan pelayaran kapal Ro-Ro, penyelenggaraan layanan transportasi laut dan penyeberangan perintis, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Agats di Kab. Asmat, pengembangan fasilitas Pelabuhan Moor di Kab. Mappi, pembangunan fasilitas Pelabuhan Wowi di Kab. Asmat, layanan angkutan laut perintis, serta peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan penyeberangan perintis ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan Bandar Udara Ewer di Kab. Asmat, pengembangan angkutan udara perintis penumpang, pengembangan angkutan udara perintis kargo, dan pengembangan angkutan BBM pesawat udara ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan berkelanjutan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, terutama tradisi dan budaya di Kab. Asmat, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya; pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya; serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal ○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: ○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung ○ Peningkatan akses air minum serta sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* dengan berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan ○ Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan ibu dan anak, dengan *output*: penguatan puskesmas, gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta penguatan implementasi program KB ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor di luar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau dan pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui: ○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, serta pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah ulayat, dengan *output*: pendampingan penyusunan regulasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat • Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, serta penerapan *nature-based solutions*, pembangunan pengaman pantai, serta pemulihan ekosistem mangrove ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan jalur jelajah satwa, serta penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru ○ Peningkatan dan pemutakhiran data terpilah Orang Asli Papua (OAP) ○ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
131	Perubahan Subbab 4.8.7 Provinsi Papua Barat Daya halaman 287 sampai dengan 290	Sasaran Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya LPE (%) / PDRB per Kapita (Rp Juta) / Kontribusi PDRB Provinsi (%) / Tingkat Kemiskinan (%) / Rasio Gini / Indeks Modal Manusia / Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) / IKLH Daerah / TPT (%) 2025: 3,7 / 61,5 / 0,2 / 16,25–16,50 / 0,300 / 0,49 / 1,08 / 82,89 / 6,30–6,80 Keterangan: LPE: Laju Pertumbuhan Ekonomi; PDRB: Produk Domestik Regional Bruto; GRK: Gas Rumah Kaca; IKLH: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; dan TPT: Tingkat Pengangguran Terbuka. Lokasi Prioritas — *Highlight* Indikasi Intervensi Kawasan Pertumbuhan: • DPP Raja Ampat (Kab. Raja Ampat) • Pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata pada kawasan pariwisata prioritas eksisting (DPP Raja Ampat), melalui: ○ Pengembangan atraksi, dengan *output*: pendukungan *event* daerah, pengembangan desa wisata, pengembangan jejaring di destinasi pariwisata, dan pelaksanaan kegiatan (*events*) nasional dan internasional

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
			○ Pengembangan keterampilan SDM, layanan, dan tata kelola pariwisata, dengan *output*: fasilitasi sertifikasi SDM bidang pariwisata dan penyelenggaraan pelatihan vokasi
			○ Penguatan dan perluasan pemasaran pariwisata, dengan *output*: peningkatan publikasi dan promosi terpadu secara nasional dan internasional
			○ Pengembangan usaha masyarakat dan peningkatan akses pembiayaan pariwisata, dengan *output*: fasilitasi akses pembiayaan pariwisata berkualitas, penerapan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata, pengembangan UMKM, serta pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMKam
			○ Peningkatan kelestarian adat dan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: peningkatan preservasi dan resiliensi adat istiadat dan budaya nilai lokal desa, serta pelaksanaan operasi SAR
		Kawasan Pertumbuhan: • Ibu Kota Daerah Otonomi Baru dan Kota Industri, Perdagangan, dan Jasa (Kota Sorong)	• Pengembangan Kota Sorong sebagai ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya serta kota industri, perdagangan, dan jasa, melalui:
			○ Percepatan pengembangan dan penataan kawasan pusat pemerintahan ibu kota daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, dengan *output*: pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan, serta pembebasan lahan
			○ Penyusunan rencana induk (masterplan) pengembangan dan penataan kawasan perkotaan, dengan *output*: rencana induk (masterplan)
			○ Peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah
			○ Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, pembangunan SPAM, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
			○ Penataan kawasan dan peningkatan citra kota, dengan *output*: penataan kawasan, penguatan *branding* kawasan, dan penguatan promosi daya tarik kota
		Kawasan Komoditas Unggulan: (komoditas udang) Sentra Industri • Kota Sorong Sentra Produksi • Kota Sorong • Kab. Sorong Selatan • Kab. Sorong	• Penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas udang, melalui:
			○ Penguatan sentra produksi, dengan *output*: pengendalian hama terpadu dan revitalisasi lahan budi daya sesuai zonasi
			○ Pengembangan industri, tata niaga/pemasaran, promosi, dan peningkatan ekspor produk udang
			○ Peningkatan kualitas SDM dan pendampingan pengembangan industri
			○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan
			○ Peningkatan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
			○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan
		Kawasan Komoditas Unggulan: (komoditas rumput laut) Sentra Produksi • Kab. Sorong • Kota Sorong	• Penguatan sentra produksi berbasis komoditas rumput laut, melalui:
			○ Penguatan sentra produksi
			○ Pengembangan tata niaga/pemasaran dan promosi produk, dengan *output*: revitalisasi pasar rakyat
			○ Peningkatan kualitas SDM
			○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: pembangunan jalan strategis, serta perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat
			○ Peningkatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan, serta akses terhadap pembiayaan
			○ Pengembangan riset dan inovasi teknologi perikanan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		• Kab. Sorong (perikanan) • Kab. Sorong Selatan (perikanan) • Kota Sorong (perikanan dan industri) • Kab. Raja Ampat (pariwisata)	• Penguatan pendidikan tinggi STEAM serta pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, politeknik, dan pelatihan vokasi) yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah (perikanan, pariwisata, dan industri) sesuai kebutuhan DUDI, melalui: ○ Penyediaan sarana prasarana dan pelatihan pendidikan berkualitas, pembukaan pusat pelatihan keterampilan *(vocational training)* untuk pemuda (pelatihan budidaya perikanan, pertanian organik, atau manajemen wisata), revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi, revitalisasi fasilitas pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta peningkatan kapasitas SDM yang bertalenta digital ○ Pengembangan program studi, kurikulum, dan inovasi model pembelajaran perguruan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi, serta SMK yang mengacu pada kebutuhan industri ○ Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengajar/tenaga pendidik ○ Peningkatan kualitas tata kelola serta pengembangan kemitraan penyelenggara pendidikan dengan dunia kerja
		Kawasan Potensial Swasembada Pangan: • Kab. Sorong* (padi dan pangan akuatik) • Kab. Sorong Selatan* (padi dan sagu) Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki produksi pangan tinggi	• Penguatan kawasan potensial swasembada pangan berbasis pangan akuatik/*blue food* berbasis perikanan tangkap, melalui: ○ Peningkatan produksi, dengan *output*: pengembangan kawasan sagu, serta pengembangan sarana dan input produksi perikanan budidaya ○ Pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana pendukung pengembangan pangan lokal ○ Penguatan kapasitas sumber daya manusia (petani dan nelayan) ○ Penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan yang mendukung pengembangan pangan lokal
		Kawasan Potensial Swasembada Energi: • Kab. Sorong* Kawasan Rendah Elektrifikasi: • Kab. Sorong Selatan** • Kab. Raja Ampat** Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki potensi bangkitan EBT tinggi **) Indikasi lokasi yang memiliki rasio elektrifikasi rendah atau persentase rumah tangga dengan sumber penerangan utama listrik non PLN dan bukan listrik yang tinggi	• Peningkatan ketahanan energi, terutama dengan mempercepat transisi energi berbasis potensi energi baru terbarukan pada kawasan potensial swasembada energi, melalui: ○ Percepatan pengembangan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik beban dasar, dengan *output*: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), serta pembangunan sistem distribusi dan infrastruktur gardu distribusi ○ Penyediaan sarana prasarana pendukung, dengan *output*: penyediaan dan peningkatan jalan akses menuju pembangkit • Penguatan kawasan rendah elektrifikasi dilakukan, melalui: ○ Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan, dengan *output*: pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu atau berada di daerah 3T

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Kawasan Potensial Swasembada Air	• Peningkatan ketahanan air untuk memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD): ○ Kab. Sorong* ○ Kab. Tambrauw* Keterangan: *) Indikasi lokasi yang memiliki kapasitas tampungan air tinggi dan luas wilayah sungai yang besar
		Kawasan Afirmasi - Daerah Tertinggal*: • Kab. Tambrauw (ubi dan tuna-cakalang-tongkol) • Kab. Maybrat (ubi) *) Daerah tertinggal juga sudah termasuk daerah sangat tertinggal	• Percepatan pembangunan afirmatif untuk daerah tertinggal menjadi daerah berkembang, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan akses layanan pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang sesuai standar dan berbasis kondisi geografis wilayah, dengan *output*: afirmasi bantuan biaya pendidikan program studi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan wajib penempatan pada DTPK, pembinaan program afirmasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, memperluas cakupan bantuan pendidikan melalui PIP dan beasiswa khususnya penduduk miskin desil 1 dan desil 2 ○ Penguatan ekonomi lokal berbasis kearifan lokal dan inovasi melalui pengembangan sentra pertanian dan perikanan terintegrasi, dengan *output*: pengembangan UMKM lokal serta fasilitasi sosialisasi pembentukan koperasi dari kelompok strategis ○ Pemerataan penyediaan infrastruktur dasar permukiman sesuai standar, serta peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, dengan *output*: pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat ○ Pengelolaan dan pengurangan risiko bencana yang efisien dan tepat guna
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas: • Kec. Ayau dan Kec. Kepulauan Ayau (Kab. Raja Ampat) • Kec. Kwoor dan Kec. Abun (Kab. Tambrauw)	• Pengembangan kawasan perbatasan di kecamatan perbatasan prioritas, melalui: ○ Pemenuhan layanan dasar, dengan *output*: pembangunan sarana permukiman, ketenagalistrikan dan energi, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun layanan konektivitas, peningkatan akses internet dan listrik, serta pengawasan pelaksanaan BBM 1 harga ○ Penataan ruang kawasan dan penanggulangan bencana kawasan perbatasan, dengan *output*: fasilitasi kampung siaga bencana terhadap masyarakat di lokasi rawan bencana, serta fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat bidang lingkungan hidup dan bencana alam di kawasan perbatasan
		Kawasan Afirmasi Kawasan Transmigrasi	• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Klamono–Segun di Kab. Sorong: ○ KT Klamono–Segun (Kab. Sorong)
		Kawasan Afirmasi Kawasan Perdesaan Prioritas • Kab. Raja Ampat (Kawasan Perdesaan Prioritas Kabupaten Raja Ampat)	• Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas di Kab. Raja Ampat, melalui: ○ Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan, dengan *output*: peningkatan SPAM, SPALD, sistem drainase; serta pengelolaan sampah berbasis 3R ○ Peningkatan aksesibilitas desa, dengan *output*: pembangunan dan pengembangan jalan nonstatus, jembatan; peningkatan akses internet dan listrik; serta penyediaan moda transportasi desa ○ Peningkatan produktivitas perdesaan dan diversifikasi ekonomi lokal berbasis komoditas kelapa, dengan *output*: pembentukan/pengembangan dan pendampingan IKM/UMKM, koperasi, dan BUMDesa dalam pengembangan agropolitan dan produk unggulan desa

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Peningkatan kapasitas tata kelola desa, dengan *output*: fasilitasi penguatan tata kelola desa dalam pengembangan agropolitan
	Pengembangan sekolah terbuka dan sekolah berpola asrama: • Kab. Tambrauw (Daerah Tertinggal) Pengembangan sekolah berpola asrama: • Kab. Raja Ampat*(Kecamatan Perbatasan Prioritas) • Kota Sorong Pengembangan sekolah sepanjang hari: • Kab. Maybrat (Daerah Tertinggal) • Kab. Sorong Selatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan: • Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui: ○ Pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penataan guru dikdas dan dikmen, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan ○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik, dengan *output*: pemberian tunjangan khusus bagi guru dikdas dan dikmen ○ Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, dengan *output*: pemberian Program Indonesia Pintar pada siswa SD/MI/paket A/sederajat, SMP/MTs/paket B/sederajat, SMA/SMK/MA/paket C/sederajat, serta pemberian beasiswa afirmasi pendidikan menengah (ADEM) dan pendidikan tinggi (ADIK) ○ Fasilitasi daerah terkait upaya perbaikan status gizi dan pembinaan anak usia sekolah dan remaja, serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik ○ Peningkatan tata kelola pendidikan, dengan *output*: pembinaan afirmasi, serta pendampingan dan peningkatan mutu pada SD, SMP, dan SMA ○ Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan keterjangkauan satuan pendidikan, dengan *output*: pembangunan puskesmas dan sekolah di daerah terpencil dengan fasilitas memadai ○ Peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan, dengan *output*: pembinaan peningkatan kesetaraan, serta akreditasi pada satuan pendidikan kesetaraan ○ Peningkatan literasi, dengan *output*: pembinaan program literasi pada generasi muda, fasilitasi peningkatan budaya gemar membaca, dan peningkatan literasi digital ○ Penyusunan kurikulum yang kontekstual wilayah Papua, dengan *output*: penyusunan model kurikulum dan penyediaan perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual ○ Perluasan akses perguruan tinggi keagamaan, dengan *output*: revitalisasi sarana dan prasarana IAIN Sorong melalui pembiayaan SBSN ○ Pemberian bantuan pendidikan, dengan *output*: penyaluran beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) untuk Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat Daya ○ Pemberian upskilling dan reskilling kepada tenaga kependidikan dasar dan menengah pada bidang TIK, dengan *output*: pelatihan dan sertifikasi bidang TIK
	Peningkatan RS dari tipe D menjadi tipe C: • Kab. Raja Ampat Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan: • Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya	• Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, melalui: ○ Penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak dan *telemedicine*, dengan *output*: pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak serta implementasi layanan *telemedicine* ○ Pemenuhan kebutuhan dan pemerataan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP), dengan *output*: penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasyankes primer serta pendayagunaan dokter spesialis di wilayah Papua ○ Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan, dengan *output*: peningkatan sarana puskesmas, pustu, posyandu, posbindu, dan poskesdes; penyediaan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan obat; serta pembinaan terkait layanan primer dan rujukan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		Layanan Unggulan RS: Seluruh Kabupaten/Kota	○ Pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ○ Penyediaan moda transportasi yang mendukung pelayanan kesehatan bergerak sesuai kondisi geografis wilayah
		Pengendalian Penyakit Malaria: • Kab. Tambrauw • Kab. Sorong • Kab. Raja Ampat • Kota Sorong • Kab. Maybrat Pengendalian Penyakit TBC: • Kab. Sorong Selatan • Kab. Sorong • Kab. Tambrauw • Kab. Maybrat Pengendalian Penyakit Kusta dan HIV/AIDS: • Provinsi Papua Barat Daya	• Pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan, melalui: ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit TBC, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan terlatih, obat dan perbekalan kesehatan; peningkatan layanan pencegahan dan pengendalian TBC; serta layanan penemuan aktif TBC ○ Eliminasi penyakit kusta, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian kusta, pengadaan tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian kusta, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, dengan *output*: penyediaan alat dan bahan kesehatan pencegahan dan pengendalian malaria, tenaga kesehatan terlatih pencegahan dan pengendalian malaria, peningkatan layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria, serta peningkatan infrastruktur SPAM dan SPALD ○ Pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS, dengan *output*: penyediaan tenaga kesehatan pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS terlatih serta optimalisasi data
		Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) *Fishing*: • WPP 717 (perbatasan perairan dengan Palau)	• Perwujudan kedaulatan di laut terutama pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*, melalui: ○ Penguatan tata kelola dan kelembagaan ○ Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana pengawasan ○ Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam upaya pencegahan konflik sosial, dengan *output*: peningkatan peran FKUB dalam pencegahan, advokasi, dan mitigasi konflik daerah serta pendekatan hak asasi manusia dan pelibatan multipihak dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Papua ○ Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
		Kawasan Konservasi: • *Geopark* Raja Ampat, KKN dan KKD Kep. Raja Ampat, serta KKN Kep. Waigeo Sebelah Barat (Kab. Raja Ampat) • Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni (Kab. Sorong Selatan)	• Perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan konservasi, melalui: ○ Pengawasan kegiatan dan penataan ruang kawasan konservasi ○ Perlindungan dan pengelolaan ekosistem serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi, dengan *output*: optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi, penguatan perencanaan kawasan konservasi, pengendalian kebakaran di kawasan konservasi, serta intervensi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) ○ Pengelolaan pemanfaatan kawasan konservasi ○ Penguatan tata kelola keanekaragaman hayati, dengan *output*: pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat, serta penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati ○ Peningkatan sarana prasarana pengelolaan dan monitoring ekosistem ○ Pengembangan potensi *geopark* Raja Ampat, dengan *output* pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata dan fasilitasi usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	Lingkungan Hidup: • Provinsi Papua Barat Daya Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi: • Kota Sorong • Kab. Maybrat	• Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana, serta adaptasi perubahan iklim, melalui: ○ Peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim, dengan *output*: penguatan perencanaan aksi pembangunan rendah karbon, pengembangan sekolah lapang iklim tematik wilayah timur, serta fasilitasi dan pembinaan daerah dalam adaptasi perubahan iklim ○ Pengembangan sistem dan sarana prasarana pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim, dengan *output*: penyediaan bangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, pembangunan pengaman pantai, pemulihan ekosistem mangrove, penerapan *nature-based solution* dan *gray infrastructure* untuk mitigasi ancaman tsunami, serta *retrofit* atau penguatan infrastruktur publik berketahanan seismik untuk mitigasi ancaman tsunami ○ Pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, dengan *output*: penguatan kelompok perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa liar ○ Pemulihan ekosistem yang terdegradasi, dengan *output*: pemulihan lahan rusak dan kritis, pemulihan ekosistem perairan, serta reklamasi pascatambang
	Provinsi Papua Barat Daya	• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial dalam rangka peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, melalui: ○ Pembangunan dan peningkatan jalan strategis, dan jalan trans, dengan *output*: penanganan Jalan Trans Papua Merauke–Sorong, Trans Papua Merauke–Sorong–Makbon–Mega, peningkatan layanan angkutan jalan perintis, serta pembangunan jalan penghubung ke desa-desa terpencil untuk membuka akses pasar dan kebutuhan layanan dasar ○ Pengembangan pelabuhan dan jaringan pelayaran, dengan *output*: pengembangan fasilitas pelabuhan Makbon di Kab. Sorong, rehabilitasi fasilitas Pelabuhan Sausapor di Kab. Tambrauw, pembangunan fasilitas Pelabuhan Pulau Misool di Kab. Raja Ampat, peningkatan layanan angkutan laut perintis dan layanan angkutan penyeberangan perintis ○ Pengembangan bandara dan optimalisasi layanan bandara, dengan *output*: pengembangan angkutan udara perintis penumpang dan angkutan udara perintis kargo ○ Pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi dan konektivitas perkotaan ○ Peningkatan infrastruktur pembangkit listrik dan sistem penyaluran, dengan *output*: pengendalian pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan gardu induk, serta jaringan distribusi dan gardu distribusi ○ Peningkatan infrastruktur digital dan TIK, dengan *output*: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat, perluasan layanan penyiaran digital, serta pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat • Peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, melalui: ○ Peningkatan tata kelola pembangunan kebudayaan, dengan *output*: peningkatan kompetensi tenaga bidang kebudayaan dan pembinaan lembaga kebudayaan ○ Pelestarian cagar budaya, nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal, dengan *output*: fasilitasi kemitraan warisan budaya, pengelolaan koleksi, cagar budaya, dan benda budaya, serta perlindungan warisan budaya ○ Pengelolaan terpadu festival seni budaya daerah, dengan *output*: *event* prioritas bidang kebudayaan, produksi konten media kebudayaan, serta pengembangan *event* film dan musik berbasis budaya lokal

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara daerah, dengan *output*: fasilitasi penutur bahasa daerah pada program perlindungan bahasa daerah, serta *event* prioritas perlindungan bahasa dan sastra daerah • Penguatan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* serta perbaikan gizi lainnya, melalui: ○ Pendampingan secara khusus bagi pemerintah di Wilayah Papua ○ Pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan dengan fokus mencegah kasus baru melalui peningkatan konvergensi layanan yang diperlukan pada kelompok sasaran, termasuk untuk mencegah dan menangani kasus gizi kurang dan gizi buruk pada balita serta KEK pada ibu hamil ○ Pemenuhan gizi melalui pemberian makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri, serta penguatan ekosistem pendukungnya seperti pengembangan sistem dan tata kelola, sarana prasarana, dan infrastruktur pendukung ○ Peningkatan akses air minum dan sanitasi aman ○ Peningkatan sosialisasi dan informasi terkait pencegahan *stunting*, dengan *output*: penyebarluasan informasi terkait upaya perbaikan status gizi dan kampanye pencegahan *stunting* melalui berbagai media, diseminasi untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah mengenai pencegahan *stunting* dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*, serta komunikasi perubahan perilaku, terutama perilaku pemberian makan ○ Penguatan integrasi perbaikan sektor diluar kesehatan lainnya yang turut mendukung perbaikan gizi • Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, melalui: ○ Penurunan kematian ibu dan anak, dengan seluruh persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar, serta memperkuat deteksi dini faktor risiko dan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan ibu dan anak, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan PONEK-PONED, pembinaan terkait peningkatan pelayanan KIA, perluasan cakupan imunisasi lengkap bayi dan baduta, penguatan surveilans KIA, serta penguatan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi untuk mendukung penurunan AKI ○ Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembinaan, dan NSPK terkait pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia, serta KB dan Kespro • Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, melalui: ○ Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait deteksi dini dan tata laksana PTM serta kesehatan jiwa ○ Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular terutama pengendalian konsumsi produk berdampak negatif bagi kesehatan seperti produk hasil tembakau, serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak, antara lain dengan penerapan dan peningkatan tarif cukai secara bertahap, inovasi pajak, pengetatan iklan, pencantuman peringatan bergambar bahaya merokok, dan penerapan label gizi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung pola hidup sehat dan aktivitas fisik, dengan *output*: penguatan KIE, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, serta pembinaan ○ Penyehatan lingkungan, dengan *output*: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan pembinaan terkait STBM, KKS, TFU memenuhi syarat, serta kualitas air minum dan kualitas udara • Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan, melalui:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		○ Pemenuhan dan pemerataan distribusi SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, melalui peningkatan penyediaan, pendayagunaan, dan kapasitas SDM kesehatan • Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat, melalui: ○ Penguatan surveilans, pengendalian kejadian luar biasa atau wabah, dan penanganan bencana, dengan meningkatkan kapasitas laboratorium dan pos pintu masuk negara ○ Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba ○ Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi termasuk memperkuat pengawasan siber dan farmakovigilans, serta penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan • Percepatan pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat dan tanah adat/ulayat, melalui: ○ Inventarisasi, penjaminan hak, serta pelestarian adat dan tradisi masyarakat hukum adat, dengan *output*: peningkatan data inventarisasi tanah adat/ulayat, penetapan hutan adat, dan pengembangan hutan adat ○ Peningkatan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat, dengan *output*: penguatan lembaga kepercayaan dan lembaga adat, serta pemberdayaan warga komunitas adat terpencil ○ Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dilengkapi peta delineasi tanah adat/ulayat • Peningkatan *smart government*, penguatan kapasitas ASN, dan peningkatan pelayanan publik yang menjangkau hingga tingkat kampung, melalui: ○ Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan ASN pada daerah otonom baru ○ Peningkatan dan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) ○ Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di pemerintah daerah, dengan *output*: penguatan akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat, penyelesaian sengketa informasi publik, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik • Pengentasan Kemiskinan, melalui: ○ Pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dengan skema pembagian hasil yang adil ○ Penguatan regulasi untuk memastikan perusahaan pengelolaan sumber daya alam mematuhi prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
132	Perubahan alinea pertama dalam halaman 291	Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 menjadi landasan yang krusial dalam menentukan arah pembangunan negara ke depan. Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional pada periode 2025–2029 sebagai tahap awal penguatan fondasi transformasi menuju pencapaian sasaran Indonesia Emas 2045, melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan pada sumber daya manusia berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diutamakan terhadap program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		sasaran pembangunan dan prioritas nasional, khususnya yang merupakan Prioritas Utama Presiden pada tahun 2025, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Swasembada Pangan, Air, dan Energi; Pendidikan; Kesehatan; Penurunan Kemiskinan; serta Hilirisasi.
133	Perubahan alinea kedua dalam halaman 291	Dalam hal untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta dengan dilakukannya penguatan komunikasi publik dan media, salah satunya melalui penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri. Selanjutnya, untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa, melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, pendanaan akan diarahkan untuk (a) memperluas akses dan jangkauan pelayanan energi; (b) memenuhi kebutuhan pangan dan air secara berkelanjutan antara lain melalui pembangunan kawasan sentra produksi pangan serta pengembangan pangan akuatik yang bermutu dan berdaya saing; serta (c) penguatan ekosistem dan industri digital serta sektor strategis lainnya.
134	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 291	Selain itu, untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi, pendanaan diarahkan untuk (a) pengembangan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan konektivitas digital, (b) percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas, (c) pengembangan koperasi sektor produksi, serta (d) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.
135	Perubahan alinea keempat dalam halaman 291 dan alinea pertama dalam halaman 292	Kemudian, untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 akan diarahkan untuk (a) mencapai pendidikan berkualitas yang merata; (b) mewujudkan kesehatan untuk semua melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota; (c) mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		inklusif; (d) mendorong iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; serta (e) mendorong peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.
136	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman 292	Pendanaan juga difokuskan untuk pelaksanaan program-program yang menjadi Prioritas Utama Presiden antara lain program makan bergizi gratis (MBG), program pembangunan sekolah unggul, serta program revitalisasi sekolah dan madrasah. Pendanaan juga diarahkan untuk melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan fokus terhadap peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan, serta upaya integrasi ekonomi domestik dan global.
137	Perubahan alinea kedua dalam halaman 292	Selanjutnya, untuk membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, pendanaan diarahkan untuk (a) mendukung peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan, (b) mendukung terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat melalui kartu usaha produktif, (c) mendukung peningkatan kesejahteraan melalui kartu usaha afirmatif, (d) mendukung perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara, (e) mendukung peningkatan penyediaan hunian baru melalui fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), serta (f) mendukung peningkatan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa.
138	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 292	Dalam hal untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan diarahkan untuk (a) supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak, serta sistem politik yang fungsional; (b) mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani dengan meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total *reward* berbasis kinerja aparatur sipil negara; (c) masyarakat yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) transformasi digital layanan publik prioritas; serta (e) optimalisasi pendapatan negara melalui ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.
139	Penambahan alinea setelah	Kemudian, untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	alinea ketiga dalam halaman 292	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 akan diarahkan untuk penguatan karakter dan jati diri bangsa, mendorong kemaslahatan masyarakat beragama dan berkebudayaan maju, dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.
140	Perubahan Tabel 5.1 dalam halaman 292 dan halaman 293	Tabel 5.1 Alokasi pada Prioritas Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional	Alokasi (Rp. Miliar)
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1.170,1
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	193.737,1
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	40.785,9
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	328.315,7
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	25.750,8
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	206.321,9
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	12.924,6
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	90.058,9

Catatan:
1) Pagu belanja kementerian/lembaga dan struktur pada RKP 2025 dimutakhirkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029;
2) Sesuai dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, sebuah proyek dapatmendukung lebih dari satu PN;
3) Prioritas Nasional mencakup rincian belanja kementerian/lembaga dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, belum mencakup rincian Transfer ke Daerah dan dukungan Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara/Swasta);
4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres No mor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

141	Perubahan alinea kedua dalam halaman 293 dan alinea pertama dalam halaman 294	Kebijakan belanja kementerian/lembaga merupakan bagian dari kebijakan belanja pemerintah yang diarahkan agar semakin meningkat kualitasnya, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan untuk belanja kementerian/lembaga, antara lain (1) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; (2) pemanfaatan belanja kementerian/lembaga sesuai dengan tema

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025; (3) penguatan belanja modal sebagai salah satu sumber pertumbuhan dan transformasi ekonomi; (4) harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan belanja kementerian/lembaga dengan transfer ke daerah; serta (5) pemanfaatan sumber dana rupiah murni dan nonrupiah murni bersifat saling melengkapi untuk mencapai target prioritas nasional.
142	Penghapusan alinea kedua dalam halaman 294	(dihapus)
143	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 294	Dalam rangka menjaga kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperlukan penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2025 dengan fokus sebagai berikut (1) pemenuhan kewajiban pemerintah seperti pensiun, akuntabilitas pengelolaan utang, serta dukungan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk pembangunan infrastruktur; (2) memperkuat tujuan dan kepentingan nasional serta antisipasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) pelaksanaan subsidi yang secara umum diarahkan agar mulai beralih dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima, serta diarahkan untuk stabilisasi harga, menjaga daya beli, mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta petani; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global.
144	Perubahan alinea keempat dalam halaman 294 dan alinea pertama dalam halaman 295	Kebijakan transfer ke daerah juga diarahkan agar mengacu pada kaidah-kaidah yang telah diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun pokok-pokok kebijakan Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(2) memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being*; (3) pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mempercepat konvergensi antardaerah antara lain melalui Dana Desa; (5) memperbaiki mekanisme penyaluran transfer ke daerah guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.
145	Penambahan alinea setelah alinea kedua dalam halaman 295	Kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak diarahkan untuk (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak; (2) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak yang penggunaannya telah ditentukan; (3) menyempurnakan pengaturan mengenai fleksibilitas penggunaan dan penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sehingga mencakup juga petani cengkeh dan buruh tani cengkeh; (4) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak berbasis kinerja (10 persen alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula); (5) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja masing-masing daerah. Alokasi kinerja diberikan maksimal untuk daerah dengan capaian kinerja maksimal, dan sebagian untuk daerah dengan capaian kinerja yang tidak maksimal, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Dana Bagi Hasil PPh dan PBB menggunakan kinerja optimalisasi penerimaan pajak; (b) Dana Bagi Hasil CHT menggunakan kinerja terkait cukai hasil tembakau, meliputi kinerja penerimaan cukai, kinerja tembakau, kinerja pengelolaan dampak kesehatan, dan kinerja pelaporan serta penyerapan sisa Dana Bagi Hasil CHT. Kebijakan Dana Bagi Hasil SDA diarahkan untuk:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil SDA melalui perluasan Forum Akuntabilitas Dana Bagi Hasil SDA; (2) mempertajam kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil SDA berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta penanganan dampak eksternalitas negatif; (3) optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil SDA yang ditentukan penggunaannya melalui penyempurnaan regulasi serta penguatan monitoring dan evaluasi; (4) mendorong kinerja daerah melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil SDA berbasis kinerja sebesar 10 persen serta penyaluran Dana Bagi Hasil SDA yang memperhatikan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (5) perhitungan alokasi formula berdasarkan kepada proporsi daerah penghasil, daerah pengolah, daerah berbatasan langsung dengan daerah penghasil serta kabupaten/kota lainnya dalam satu provinsi; (6) alokasi kinerja berdasarkan capaian kinerja setiap daerah dengan mempertimbangkan kinerja pemeliharaan lingkungan hidup dengan indikator yang digunakan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Kebijakan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit diarahkan untuk: (1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; (2) memperkuat monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; (3) mendorong kinerja daerah melalui penyaluran dan alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit berbasis kinerja (10 persen alokasi kinerja dan 90 persen alokasi formula). Alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 4 (empat) persen dari perkiraan penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar atas produk kelapa sawit dan turunannya pada tahun 2024, dengan alokasi minimum sebesar Rp500 juta per daerah.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
146	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 295 dan alinea pertama dalam halaman 296	Arah Kebijakan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 adalah (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Umum di antaranya kebijakan *hold harmless* sampai 2027; (2) memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum. (3) menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah; (4) meningkatkan kualitas tata kelola *earmarking* Dana Alokasi Umum; (5) melanjutkan kebijakan penyaluran Dana Alokasi Umum berbasis kinerja.
147	Penambahan alinea setelah alinea pertama dalam halaman 296	Alokasi Dana Alokasi Umum untuk setiap daerah dibagi menjadi bagian Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya. Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya untuk setiap daerah terdiri dari: (1) Dana Alokasi Umum dukungan penggajian PPPK; (2) Dana Alokasi Umum dukungan pendanaan kelurahan; (3) Dana Alokasi Umum dukungan bidang pendidikan; (4) Dana Alokasi Umum dukungan bidang kesehatan; dan (5) Dana Alokasi Umum dukungan bidang pekerjaan umum.
148	Penghapusan alinea kedua dalam halaman 296	(dihapus)
149	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 296 dan alinea pertama dalam halaman 297	Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025, adalah: (1) mendukung penguatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan perempuan dan anak; (2) mendorong pencapaian target Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi biru serta melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri; (3) menguatkan kualitas pelaksanaan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(4) menerapkan *matching* program antara kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus Fisik dengan sumber pendanaan lainnya (APBN dan Non-APBN), sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran; (5) meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi Dana Alokasi Khusus Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi; serta (6) mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan publik.
150	Perubahan alinea kedua dalam halaman 297	Bidang Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2025 antara lain: (1) Dana Alokasi Khusus Fisik untuk layanan dasar, mencakup bidang: (a) pendidikan (termasuk subbidang perpustakaan daerah), (b) kesehatan (termasuk subbidang keluarga berencana), (c) air minum, (d) sanitasi, (e) irigasi, (f) konektivitas (subbidang jalan), dan (g) perlindungan perempuan dan anak. (2) Dana Alokasi Khusus Fisik dengan tema tertentu, yaitu: (a) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu, mencakup bidang: (i) air minum, (ii) sanitasi, (iii) perumahan dan permukiman; (b) Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional mencakup bidang: (i) pangan pertanian, (ii) konektivitas (subbidang jalan dan subbidang transportasi perairan, (iii) irigasi, dan (iv) pangan akuatik; (c) Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri, mencakup bidang: (i) industri kecil dan menengah, (ii) perdagangan, (iii) konektivitas (subbidang jalan), (iv) air minum, dan (v) sanitasi.
151	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 297	Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk: (1) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya, serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(2) mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM Kesehatan; (4) peningkatan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; (5) mendukung penguatan ekosistem kawasan Industri.
152	Penghapusan alinea keempat dalam halaman 297	(dihapus)
153	Perubahan alinea pertama dalam halaman 298	Arah kebijakan Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: (1) meningkatkan konektivitas daerah melalui dukungan penyediaan transportasi umum massal yang menjadi prioritas pembangunan nasional; (2) melanjutkan penguatan sentra pertanian di dataran tinggi (*upland*) berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani; (3) mendukung kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan; (4) mendukung pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pasca bencana alam; (5) melanjutkan penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi serta sinergi antar kementerian/lembaga untuk mendorong capaian *output* yang optimal.
154	Perubahan alinea kedua dalam halaman 298	Jenis Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut: (1) Pinjaman luar negeri yang diterushibahkan, yaitu: (a) Mass Rapid Transit (MRT) Project; (b) The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (*upland*). (2) Hibah luar negeri yang diterushibahkan, yaitu:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(a) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL).
155	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 298 dan alinea pertama dalam halaman 299	Arah Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur tahun 2025 diarahkan untuk: (1) mendorong prioritas penggunaan Dana Otonomi Khusus, untuk: (a) penurunan kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, dan sanitasi lingkungan; (b) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan; (c) mendukung capaian Rencana Induk dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. (2) meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otonomi Khusus melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan; (3) meningkatkan kualitas SDM pengelola Dana Otonomi Khusus terutama di Daerah Otonom Baru, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan; (4) penggunaan Dana Tambahan Infrastruktur untuk Daerah Otonom Baru diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran, meliputi infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi listrik, infrastruktur jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur sanitasi lingkungan.
156	Penghapusan alinea keempat dalam halaman 299	(dihapus)
157	Perubahan alinea kelima dalam halaman 299 dan alinea pertama dalam	Dalam mendukung arah kebijakan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2025, maka perlu dilakukan beberapa rekomendasi dalam perbaikan dan penguatan tata kelola sebagai berikut: (a) penguatan perencanaan penggunaan Dana Otonomi Khusus yang diselaraskan melalui perencanaan pusat sampai ke dokumen perencanaan daerah (Rencana

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	halaman 300	Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus); (b) persiapan penyusunan dokumen Rencana Induk Otonomi Khusus Aceh dikonsultasikan dan dikoordinasikan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional guna mendukung pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang selaras dan sinkron dengan cita-cita pembangunan nasional dan daerah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Aceh yang berlandaskan budaya dan syariat Islam; (c) penguatan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan adil; (d) perkuatan koordinasi, kerja sama, serta kemitraan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan kementerian/lembaga mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring evaluasi dan pembinaan; (e) perbaikan fokus, kualitas, serta prioritas penggunaan bidang-bidang anggaran khususnya dalam rangka persiapan usainya penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh pada tahun 2028; (f) perencanaan alokasi Dana Otonomi Khusus sesuai bidang yang ditentukan dan selaras dengan isu strategis Provinsi Aceh terutama mengatasi kemiskinan yang tinggi, memperbaiki standar hidup layak, menurunkan prevalensi *stunting* bagi bayi, serta meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh masyarakat; (g) peningkatan pengawasan pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui perencanaan penggunaan dan otonomi khusus hingga melalui pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil.
158	Perubahan alinea kedua dalam halaman 300	Secara khusus pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Papua tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut (1) Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (satu persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional) diarahkan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik terutama pada Orang Asli Papua (OAP) hingga ke tingkat kampung, peningkatan kesejahteraan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Orang Asli Papua (OAP), penguatan lembaga keagamaan dan adat, peningkatan pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat dan penataan tanah adat/ulayat, peningkatan perlindungan dan pelestarian budaya lokal, peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim, penguatan ketenteraman dan ketahanan wilayah dan harmoni sosial, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah; (2) Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan (1,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional) diarahkan untuk: (i) belanja pendidikan (minimal 30 persen), terutama untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan yang kontekstual Papua seperti sekolah terbuka, sekolah sepanjang hari, dan sekolah berpola asrama, melalui pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP); pemberian intensif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; pemberian bantuan pendidikan serta makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; peningkatan tata kelola pendidikan; penyediaan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan; peningkatan penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan; peningkatan literasi; penyusunan kurikulum yang kontekstual Wilayah Papua; serta penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan pada potensi keunggulan wilayah sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); (ii) belanja kesehatan (minimal 20 persen), terutama untuk mendukung peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, melalui pendayagunaan tenaga kesehatan dan tenaga medis dengan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP); penguatan tata kelola pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*) dan *telemedicine*; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, termasuk sarana, prasarana, dan alat kesehatan; pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan; penguatan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* serta pemenuhan makanan bergizi seimbang; penurunan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		kematian ibu dan bayi; serta pengendalian penyakit menular dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (tuberkulosis, malaria, kusta, filariasis, frambusia, dan HIV/AIDS); serta (iii) pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama untuk mendukung penguatan sentra produksi dan penyiapan pengembangan ekosistem sentra industri berbasis komoditas unggulan; pengembangan ekosistem dan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas destinasi wisata prioritas dan rintisan; penguatan ketahanan pangan berbasis pangan lokal; pemberdayaan masyarakat kampung termasuk melalui pengembangan koperasi, UMKM, IKM, dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam); peningkatan wirausaha produktif yang memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP); dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal; (3) dana tambahan infrastruktur (DTI), diarahkan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, terutama yang mendukung peningkatan aksesibilitas dan konektivitas intra dan antarwilayah, serta pengembangan kawasan perkotaan prioritas, ibu kota daerah otonom baru, dan kawasan lainnya; (4) tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi otonomi khusus diarahkan untuk belanja pendidikan (35 persen), belanja kesehatan dan perbaikan gizi (25 persen), belanja infrastruktur (30 persen), serta belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat (10 persen), terutama dalam rangka penguatan budaya lokal dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat adat.
159	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 300	Mengingat arahan penggunaan Dana Otonomi Khusus akan mempertimbangkan aspek kinerja, pemanfaatannya perlu sejalan dengan koridor percepatan pembangunan Wilayah Papua dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing provinsi dan kabupaten/kota secara bertahap sesuai Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029, dengan dukungan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua.
160	Perubahan alinea pertama	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
	dalam halaman 301	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta selain kewenangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, (2) kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Kebijakan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025: (1) mengarahkan penggunaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengacu kepada rencana induk keistimewaan dan difokuskan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas UMKM, peningkatan penyediaan layanan dasar publik, serta mengurangi penggunaan untuk belanja birokrasi penunjang, administrasi, dan pengawasan; (2) meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Belanja K/L serta sinergi dengan sumber pendanaan lainnya untuk memastikan pencapaian prioritas nasional dengan mempertimbangkan prioritas daerah; (3) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang inovatif, partisipatif, dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.
161	Perubahan alinea kedua dalam halaman 301 dan alinea pertama dalam halaman 302	Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Kebijakan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut: (1) mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui: (a) penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 persen untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan; (b) penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		(c) peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk *stunting*; (d) dukungan program ketahanan pangan; (e) pengembangan potensi dan keunggulan desa; (f) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; (g) pembangunan, termasuk infrastruktur desa berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau (h) program sektor prioritas lainnya di desa. (2) mendanai operasional pemerintah desa paling tinggi 3 persen dari pagu Dana Desa setiap desa; (3) mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa; (4) meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (a) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (b) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (c) pengalokasian insentif untuk desa yang berkinerja baik; (d) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya; (e) penguatan peran supra desa (pemerintah provinsi/kabupaten/kota/kecamatan) dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan dana desa. (5) meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi; (6) sinergi penggunaan dana desa dengan sumber pendanaan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
162	Perubahan alinea kedua dalam halaman 302	Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu, antara lain berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 meliputi: (1) melanjutkan kebijakan pemberian Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan; (2) kinerja tahun sebelumnya meliputi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (3) indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan pencapaian target prioritas nasional; (4) mendorong peran Dana Insentif Fiskal untuk meningkatkan kemandirian daerah, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain; (5) melanjutkan pemberian Dana Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020.
163	Penambahan subbab 5.2.4 setelah alinea kedua dalam halaman 302	5.2.4 Pembiayaan Investasi (*below the line*) melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Optimalisasi pemanfaatan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara dalam komponen pembiayaan anggaran diarahkan untuk mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendorong peran Badan Usaha Milik Negara melalui penguatan penciptaan nilai (*value creation*). Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Badan Usaha Milik Negara, memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai *agent of development*, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap penerimaan negara dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, manajemen risiko serta memperhitungkan *return* yang akan diberikan oleh Badan Usaha Milik Negara terhadap negara. Pembiayaan investasi juga difokuskan pada optimalisasi potensi *Sovereign Wealth Fund* (SWF), Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan *Special Mission Vehicle* (SMV) untuk percepatan hilirisasi, pengembangan pasar keuangan, dan inovasi skema pembiayaan.
164	Perubahan alinea kedua dalam halaman 303	Pendanaan bersumber dari pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi, peluang alih teknologi, praktik baik internasional, penyiapan konsep baru (*piloting*), serta sebagai pengungkit pemanfaatan sumber dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		skema pendanaan lainnya (*blended finance*). Pada tahun 2025, pinjaman luar negeri akan digunakan, antara lain untuk (1) mendukung pembiayaan sistem pertahanan dan keamanan negara, (2) mendukung terwujudnya ketahanan pangan menuju swasembada pangan, (3) pengembangan energi baru terbarukan, (4) peningkatan konektivitas digital, (5) perluasan jaringan irigasi, (6) memperkuat sinergi pembangunan jaringan transportasi darat dan laut termasuk pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor, (7) pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan bertalenta, (8) perluasan layanan kesehatan berkualitas, (9) infrastruktur produksi perikanan, (10) pembiayaan perumahan berwawasan hijau untuk masyarakat berpenghasilan rendah, (11) pembangunan pusat data untuk mendukung transformasi digital termasuk reformasi tata kelola pemerintahan, serta (12) penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini bencana.
165	Perubahan alinea ketiga dalam halaman 303	Pinjaman dalam negeri akan digunakan utamanya pada kegiatan yang dapat mendukung pengembangan industri dalam negeri, seperti infrastruktur dan peruntukan lain yang diatur oleh ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk mendukung industri pertahanan nasional. Dalam RKP Tahun 2025, pinjaman dalam negeri difokuskan antara lain untuk mendukung pembiayaan sistem pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, pinjaman dalam negeri akan dimanfaatkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan sarana prasarana perikanan dalam rangka pengembangan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru.
166	Perubahan alinea keempat dalam halaman 303	Surat Berharga Syariah Negara digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan proyek/kegiatan penyediaan layanan umum dan layanan dasar pada berbagai prioritas. Dalam RKP Tahun 2025, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai sumber pendanaan akan difokuskan, antara lain untuk (1) mendukung pembiayaan keberlanjutan pembangunan infrastruktur; (2) perkuatan pendidikan, sains, dan teknologi; (3) penguatan sistem peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (4) penyediaan rumah layak untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, pemanfaatan pendanaan Surat Berharga Syariah Negara sebagai pembiayaan proyek dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dukungan terhadap penguatan ekonomi dan keuangan syariah serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan (*blended financing*).

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
167	Perubahan alinea kedua dalam halaman 304	Pada Tahun Anggaran 2025, proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dengan penanggung jawab proyek kerja sama kementerian/lembaga yang direncanakan melaksanakan tahapan transaksi dan konstruksi mencakup 28 proyek untuk optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik, penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola, serta reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Selain itu, terdapat beberapa proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang direncanakan dapat mulai beroperasi pada akhir tahun 2025, yaitu *proving ground* (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor) dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi I.
168	Penambahan Suplemen Penekanan Kebijakan Pembangunan Tahun 2025	**PENEKANAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025** **1. Tema, Sasaran, dan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2025** 1.1. Tema Pembangunan Selama 78 tahun kemerdekaan, berbagai kemajuan telah berhasil dicapai oleh Bangsa Indonesia. Namun demikian, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle income trap) yang diwarnai dengan kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Sehingga cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik, ditetapkan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

tema RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

1.2. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Indikator	Target 2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0 (1,90 PPP)
Rasio Gini (nilai)	0,379 – 0,382
Indeks Modal Manusia (nilai)	0,56
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	35,53
Nilai Tukar Petani (kumulatif)	115 – 120
Nilai Tukar Nelayan (kumulatif)	105 – 108

1.3. Prioritas Pembangunan

Wujud prioritas pembangunan adalah manifestasi dari upaya pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden Asta Cita yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional selama periode 2025-2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025 2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP.

Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Pada

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

RKP Tahun 2025 digunakan Prioritas Nasional sebagai penjabaran dari Misi Presiden sebagai berikut.

Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam operasionalisasi Asta Cita, disusun strategi prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang meliputi (1) pertumbuhan tinggi berkelanjutan, (2) penurunan kemiskinan, (3) peningkatan kualitas SDM, serta didukung dengan (4) fondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, dan reformasi birokrasi dengan berprinsip pada Pancasila dan asas demokrasi. Strategi tersebut dituangkan ke dalam Prioritas Nasional, yang kemudian menjadi landasan perumusan strategi di tingkat wilayah dalam menyatukan arah pembangunan nasional (pusat dan daerah). Untuk menjaga pencapaian hasil pembangunan, dilaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, visualisasi kerangka pikir pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2025 disampaikan pada gambar berikut ini.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

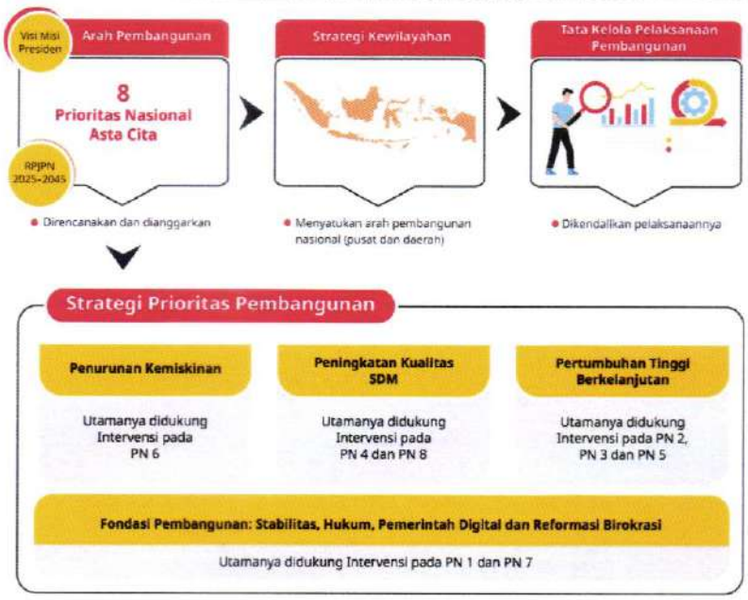

2. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

1. Urgensi Menurunkan Tingkat Kemiskinan
   a. Penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan di angka 9 persen selama periode 2018-2023;
   b. Pada tahun 2024, penerima bantuan sosial yang tepat sasaran hanya 41,56 persen;
   c. Tanpa upaya dan komitmen yang kuat, kemiskinan menjadi ancaman bagi masa depan kemajuan Bangsa Indonesia;
   d. Disparitas kemiskinan wilayah masih menjadi tantangan, tercermin dari persentase penduduk miskin perdesaan sebesar 11,34 persen pada September 2024, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,66 persen);
   e. Masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas nasional.
2. Strategi yang Dilakukan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

a. Pembentukan Data Tunggal melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);

b. Digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan; dan

c. Peningkatan pendapatan.

3. Keadaan yang ingin diwujudkan adalah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 7-8 persen pada tahun 2025.

4. Mitigasi Risiko

Dalam melaksanakan strategi kebijakan Penurunan Tingkat Kemiskinan diperlukan upaya mitigasi risiko di antaranya

(a) penguatan sinergi antar instansi yang diarahkan pada kolaborasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program;

(b) tata kelola dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penargetan dan perencanaan program; dan

(c) penguatan mekanisme graduasi penerima bantuan sosial agar penduduk miskin dan rentan dapat bertransisi secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih mandiri dan sejahtera.

2.1. Kartu Kesejahteraan

2.1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mengurangi kesenjangan sosial, mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang tergolong miskin dan rentan. Pada saat ini, program bantuan sosial dan subsidi menjadi intervensi utama dalam upaya mengurangi beban ekonomi yang dihadapi oleh kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada bantuan langsung untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan berbagai program sosial agar lebih efisien, inklusif, dan tepat sasaran. Dengan mengatasi fragmentasi program, strategi ini memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat khususnya yang berada dalam kondisi rentan mendapatkan manfaat secara optimal, baik dalam bentuk subsidi layanan dasar, program pemberdayaan, maupun skema perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Walaupun demikian, program-program bantuan sosial yang saat ini berjalan masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan lebih lanjut, seperti:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		1. Peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial, baik yang diberikan kepada keluarga maupun individu. Akurasi penyaluran bantuan sosial masih sering mengalami ketidaktepatsasaran, baik untuk keluarga/individu yang berada di tingkat kesejahteraan rendah ataupun tinggi; 2. Integrasi program bantuan sosial dengan program penanganan risiko bencana dan krisis iklim untuk menghadapi kondisi darurat; 3. Pengembangan model penyaluran bantuan sosial yang terdigitalisasi dan berorientasi pada kebutuhan penduduk miskin dan rentan; 4. Pengembangan mekanisme graduasi untuk setiap program bantuan sosial; 5. Mekanisme pengendalian, pendampingan, dan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan sosial yang lebih optimal dan bermakna; 6. Akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar yang berkualitas untuk keluarga penerima manfaat program bantuan sosial. Untuk mendukung penguatan program bantuan sosial dalam mengatasi kemiskinan, Kartu Kesejahteraan yang hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dan subsidi keluarga, pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, energi, dan rehabilitasi sosial, yang mencakup program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PIP-KIP, PBI-JKN, Sembako, Bantuan Peras, Subsidi Pupuk dan Energi, BLT Desa, ATENSI, dan program-program lainnya. 2.1.2. Sasaran dan Target Digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi serta memperluas inklusi dan literasi keuangan. Target penyaluran bantuan sosial yang adaptif dan terdigitalisasi pada tahun 2025 diantaranya tergambarkan melalui: 1. Persentase keluarga miskin-rentan menerima bantuan sosial non-tunai sebesar 65%; 2. Persentase korban bencana mendapat bansos kebencanaan sebesar 8%;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		3. Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera sebanyak 400.000 keluarga. 2.1.3. Intervensi Arah kebijakan dalam penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan: 1. Peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial dan subsidi melalui pengembangan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta mekanisme pemutakhiran dan validasi data di daerah untuk meningkatkan akurasi bantuan sosial; 2. Perbaikan mekanisme penyaluran dan pengendalian bantuan sosial dilakukan melalui perluasan pemanfaatan sistem perbankan, pengembangan mekanisme penyaluran yang terintegrasi lintas program dan lembaga, serta pengembangan Pemeta Data Pusat (*Central Mapper*); 3. Pelaksanaan program dilakukan agar lebih responsif melalui penyediaan bantuan dan layanan sosial yang inklusif, termasuk melalui penguatan peran desa dan kolaborasi non pemerintah melalui penerapan model Desa Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera, serta pengembangan Sekolah Rakyat sebagai layanan pendidikan, pengasuhan, dan pemberdayaan yang afirmatif untuk memastikan tidak ada kelompok penduduk yang tertinggal; 4. Penguatan kualitas pendampingan melalui pemberian insentif, peningkatan kapasitas, dan dukungan logistik bagi petugas lapangan yang bekerja di wilayah dengan tantangan geografis dan sosial tinggi untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Penekanan intervensi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan: 1. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memperoleh bantuan sosial Sembako; 2. Keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat; 3. Penduduk penerima bantuan iuran PBI JKN; 4. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PPBU) dan Bukan Pekerja (BP) penerima kontribusi bantuan iuran; 5. Mahasiswa yang mendapatkan KIP Kuliah; 6. Siswa SD/Paket A yang mendapatkan Program Indonesia Pintar;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		7. Siswa SMP/Paket B yang mendapatkan Program Indonesia Pintar; 8. Siswa SMK yang mendapatkan Program Indonesia Pintar. 2.1.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Program Kartu Kesejahteraan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan fokus wilayah Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kementerian/Lembaga yang berperan dalam penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan, antara lain: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 8. Kementerian Ketenagakerjaan 9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 11. Kementerian Kesehatan 12. Kementerian Agama 13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum 14. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 15. Kementerian Perindustrian 16. Kementerian Koperasi 17. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 19. Kementerian Perhubungan 20. Kementerian Pertanian 21. Kementerian Komunikasi dan Digital Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif 22. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 23. Otoritas Jasa Keuangan 24. Bank Indonesia

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		25. Badan Pusat Statistik 26. Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2.2. Kartu Usaha Afirmatif 2.2.1. Latar Belakang Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat merupakan pilar utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi harus dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, agar mereka dapat keluar dari kemiskinan dan mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Upaya ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi yang kokoh melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, fasilitasi pasar, serta regulasi yang kondusif. Sebagai bagian dari strategi ini, RPJMN 2025–2029 menghadirkan Kartu Usaha Afirmatif sebagai instrumen utama dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan Kartu Usaha Afirmatif: 1. Memberikan penguatan kapasitas, pendampingan motivasi, akses terhadap sumber daya produktif, serta pendampingan dan kemudahan dalam mengembangkan wirausaha bagi kelompok miskin dan rentan yang telah menerima bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan. 2. Mengakses peluang kerja dan kewirausahaan yang lebih mandiri. Pemerintah mengintegrasikan berbagai program berbasis potensi lokal dan industri strategis, dengan mengandalkan sinergi antara Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan UMKM sebagai acuan utama agar program pemberdayaan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Berbagai kementerian/lembaga telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi pelatihan, penguatan kapasitas, akses permodalan, dan pendampingan yang tersebar di berbagai sektor. Namun, program pemberdayaan belum efektif menjawab permasalahan utama dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan yang bertujuan untuk kemandirian dan mengurangi kemiskinan, yaitu: 1. Standar kegiatan pengembangan usaha yang ada belum menjadi pedoman Kementerian Lembaga sehingga terjadi redudansi pengembangan antar K/L;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		2. Penargetan yang belum tepat sasaran kepada kelompok miskin dan rentan; 3. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dan rentan dan memiliki ketergantungan terhadap bantuan sosial; 4. Intervensi pemberdayaan yang diberikan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 5. Proses pendampingan yang belum optimal dikarenakan masa pendampingan yang singkat dan tidak berkelanjutan. 2.2.2. Sasaran dan Target Peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan penerima kartu yang tergambarkan melalui indikator penerima Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha/bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak 1 juta jiwa pada tahun 2025. 2.2.3. Intervensi Dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan penerima kartu usaha afirmatif, dilakukan intervensi sebagai berikut: 1. Penguatan ekosistem kewirausahaan, termasuk kesempatan penguatan kapasitas dan pendampingan yang afirmatif; 2. Peningkatan akses pekerjaan yang layak pada kelompok miskin dan rentan; 3. Fasilitasi digitalisasi usaha; 4. Penyediaan akses pembiayaan dan aset produktif yang inklusif dan afirmatif; 5. Integrasi dengan perlindungan sosial melalui Kartu Kesejahteraan untuk percepatan graduasi. 2.2.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Program kartu usaha afirmatif dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan fokus wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya. Kementerian/Lembaga yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan penerima kartu usaha afirmatif: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		3. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 4. Kementerian Sosial 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Dalam Negeri 7. Kementerian Ketenagakerjaan 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kementerian Kehutanan 10. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 12. Kementerian Pertanian 13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 14. Kementerian Pemuda dan Olahraga 15. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2.3. Kartu Usaha Produktif 2.3.1. Latar Belakang Kartu Usaha Produktif merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama dalam hal akses pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan usaha. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sebagai berikut 1. Belum adanya pedoman yang menjadi standar dalam pelaksanaan program kewirausahaan; 2. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai rujukan penyaluran program berbasis data, khususnya yang ditargetkan untuk pelaku usaha; 3. Kurangnya koordinasi antara program pemerintah dan non-pemerintah; 4. Belum terintegrasinya akses informasi terkait pengembangan usaha yang membantu memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		5. Keterampilan tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM. 2.3.2. Sasaran dan Target Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah yang tergambar oleh proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target tahun 2025 mencapai 4,1 persen. 2.3.3. Intervensi Dalam rangka mewujudkan penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah, dilakukan intervensi sebagai berikut 1. Penyusunan regulasi pengembangan kewirausahaan nasional; 2. Penyusunan standardisasi program pengembangan wirausaha. 2.3.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Program kartu usaha produktif dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kementerian/Lembaga yang berperan dalam penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah antara lain: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kementerian Koperasi 4. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 7. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 8. Kementerian Komunikasi dan Digital 9. Kementerian Kelautan dan Perikanan 10. Kementerian Ketenagakerjaan 11. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12. Kementerian Perindustrian 13. Kementerian Keuangan 14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

15. Badan Standardisasi Nasional
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.4. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kebutuhan Kerangka Regulasi dan Kelembagaan dalam mewujudkan penurunan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Perpres Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
2. Rancangan Perpres Perlindungan Sosial Adaptif-Kartu Kesejahteraan;
3. Rancangan Perpres Kewirausahaan-Kartu Usaha;
4. Rancangan Permen terkait Pelaksanaan Uji Coba Kartu Usaha-Kartu Sejahtera dan Digitalisasi Bantuan Sosial;
5. Rancangan Permen terkait Pelaksanaan Project Management Office (PMO) atau Kelembagaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha;
6. Pembentukan Kelembagaan DTSEN.

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020). Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

1. Urgensi Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
    a. Satu dari lima balita Indonesia mengalami stunting yang dapat menghambat tumbuh kembang (2023)
    b. Tingginya kasus dan risiko penyakit:
        i. Insidensi TB Indonesia 387 kasus per 100.000 penduduk, peringkat ke-2 tertinggi di dunia (2023)
        ii. Prevalensi obesitas dewasa meningkat dari 21,7% (2018) menjadi 23,4% (2023)
        iii. Beban ganda penyakit, dimana penyakit menular (infeksius) masih ada sementara penyakit tidak menular (degeneratif dan kronis) seperti kanker,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

jantung, stroke, dan gangguan ginjal mengalami peningkatan

c. Peringkat PISA naik, namun pencapaian skor masih di bawah rata-rata negara OECD. Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022 368,99.

i. Membaca: peringkat 71

ii. Matematika: peringkat 70

iii. Sains: peringkat 67

d. Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi, terutama jenjang pendidikan menengah

e. Partisipasi pendidikan anak usia dini masih rendah (APK PAUD 2024 = 36,03 persen, Persentase Anak Kelas 1 SD Pernah PAUD 2024 = 63,81). Padahal usia 0-6 tahun merupakan usia optimal perkembangan otak manusia.

f. Tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan menengah masih belum optimal (APK SMA/SMK/MA/sederajat 86,34 persen)

2. Strategi yang Dilakukan

a. Pemberian Makan Bergizi Gratis;

b. Pencegahan dan penurunan stunting;

c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis;

d. Penuntasan tuberkulosis (TBC);

e. Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota;

f. Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah berkualitas;

g. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.

3. Keadaan yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) dari 0,54 (2023) menjadi 0,56 pada tahun 2025.

4. Mitigasi Risiko

Dalam meningkatkan kualitas SDM, terdapat beberapa fokus prioritas diantaranya Pemberian Makan Bergizi Gratis, Pencegahan dan Penurunan Stunting, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Penuntasan tuberkulosis (TBC),

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Pemenuhan RS Lengkap Berkualitas, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas, Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul, yang dalam pelaksanaannya perlu diperlukan pengelolaan risiko secara kolaboratif antar Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Badan Lainnya yang terkait. Beberapa upaya mitigasi risiko yang perlu dilakukan antara lain: a. Penyusunan dan Sinergi Regulasi Pendukung Program Sebagai upaya percepatan pelaksanaan dan untuk memastikan ketercapaian sasaran program, diperlukan dasar berupa kebijakan, regulasi, dan NSPK. Penyusunan dokumen tersebut perlu dilakukan secara inklusif khususnya yang terkait dengan program prioritas Pelaksanaan Pemberian Makan Bergizi Gratis, Pencegahan dan Percepatan Penurunan *Stunting*, Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas, serta Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul. b. Integrasi dan Sinkronisasi Data Antarinstansi Mitigasi risiko ini antarinstansi perlu dilakukan untuk penguatan proses perencanaan dan peningkatan efisiensi serta efektivitas pemanfaatan sumber daya. Hal ini meliputi penetapan target dan sasaran, penetapan kriteria penerima manfaat, serta penyiapan sumber daya (ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan lainnya). c. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Program Penguatan tata kelola yang didukung oleh kelembagaan program dan melibatkan pemangku kepentingan secara inklusif, dapat mendorong keberlanjutan dan ketercapaian sasaran kegiatan prioritas. d. Peningkatan Edukasi dan Pemahaman Pelaksanaan Program Peningkatan edukasi dan promosi pelaksanaan program secara terpadu, komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam kegiatan prioritas. e. Pemantauan dan Evaluasi Program secara *Real Time* Menggunakan Sistem Informasi yang Terintegrasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi secara *Real Time* dapat mendukung pemantauan dan evaluasi program dalam hal memastikan kesesuaian *output* program, ketepatan penggunaan anggaran, dan ketepatan waktu pelaksanaan program.

f. Diversifikasi Pendanaan Program

Kebutuhan pembangunan manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan pendanaan dalam jumlah signifikan dan penyelenggaraan yang berkelanjutan. Maka diperlukan diversifikasi pendanaan dengan pembagian output untuk tiap-tiap sumber pendanaan.

3.1 Pemberian Makan Bergizi Gratis

3.1.1 Latar Belakang

Masalah gizi di Indonesia masih terjadi pada seluruh siklus hidup, terutama pada kelompok rentan. Oleh karena itu, pemenuhan asupan gizi yang berkualitas melalui pemberian makan bergizi diharapkan dapat memiliki daya ungkit tinggi dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Akan tetapi masih terdapat permasalahan gizi di Indonesia, mencakup:

1. Pada kelompok rentan (anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita) kondisi permasalahan gizi seperti underweight, wasting, stunting, anemia, dan kurang energi kronis masih tinggi.
2. Masih kurangnya kualitas asupan gizi sesuai dengan kebutuhan harian dan pola makan, termasuk kurangnya konsumsi buah dan sayur.
3. Keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terkait asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan.

3.1.2 Intervensi

Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025 diselenggarakan melalui intervensi sebagai berikut.

1. pemberian makan bergizi kepada peserta didik seluruh jenjang termasuk santri;
2. pemberian makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita;
3. promosi dan edukasi tentang gizi dan pangan;
4. pelatihan tenaga penjamah makanan sesuai standar;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		5. penyusunan standar tentang sistem, tata kelola, dan manajemen risiko pemenuhan gizi; 6. pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi; 7. pembangunan satuan pelayanan/dapur makan bergizi; serta 8. fasilitasi dan peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi. Implementasi Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan pada 1. anak sekolah di seluruh jenjang pendidikan; 2. santri di pesantren dan sekolah keagamaan lain; 3. ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita berstatus gizi normal; serta 4. ibu hamil dan anak balita bermasalah gizi. Program Makan Bergizi Gratis diberikan sesuai dengan prinsip gizi seimbang, beragam, aman, dan sesuai dengan preferensi lokal, dengan kandungan 20-25 persen (dalam bentuk sarapan) dan 30-35 persen (dalam bentuk makan siang) dari angka kecukupan gizi harian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Sebagai dukungan implementasi program Makan Bergizi Gratis agar berjalan dengan baik, dirumuskan program pendukung yang meliputi: 1. Edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat; 2. Pengukuran antropometri; 3. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi; 4. Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan; 5. Pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku; 6. Penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan; 7. Pengelolaan limbah dan sampah; 8. Penyediaan infrastruktur pendukung (listrik, transportasi, dan telekomunikasi); 9. Pemberdayaan masyarakat, petani, peternak lokal, UMKM, koperasi, dan BUMDesa. 3.1.3 Sasaran dan Target Target utama tahun 2025 yang dicapai melalui pemberian makan bergizi dan penguatan ekosistem pendukung, seperti tabel di bawah ini.

Indikator	Target 2025
Ibu hamil mendapatkan makanan bergizi	10%
Ibu menyusui mendapatkan makanan bergizi	11%
Anak balita mendapatkan makanan bergizi	11%
Anak sekolah di seluruh jenjang mendapatkan makanan bergizi	24%
Santri mendapatkan makanan bergizi	2%
Ibu hamil menyusui, pengasuh balita, siswa, & santri dengan skor literasi gizi baik	50%
Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	1 sistem
Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	5000 unit
Petugas penjamah makanan mendapatkan pelatihan mencapai	100%

3.1.4 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Program MBG dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis:

1. Badan Gizi Nasional
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Pertanian
6. Badan Pangan Nasional
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan
8. Kementerian Koperasi
9. Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
10. Badan Pengawas Obat dan Makanan
11. Kementerian Pekerjaan Umum
12. Kementerian Lingkungan Hidup
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Pemerintah daerah

3.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam mendukung percepatan penyelenggaraan program MBG, saat ini sedang disusun draf Instruksi Presiden (Inpres) Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis untuk mewujudkan pelaksanaan program yang tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan. Draf Inpres berisi instruksi kepada 37 Kementerian/Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang meliputi:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

1. Perencanaan dan penganggaran kegiatan pendukung program MBG;
2. Integrasi lokasi kegiatan pendukung dengan lokasi penyelenggaraan program MBG;
3. Menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang relevan dan *real time* melalui sistem informasi yang terintegrasi; serta
4. Melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam rangka merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program secara rutin, berkala, dan terpadu.

3.2 Pencegahan dan Penurunan *Stunting*

3.2.1 Latar Belakang

Pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *stunting* masih dihadapkan dengan beberapa tantangan, antara lain:

1. Prevalensi *stunting* balita yang masih tinggi (21,5%) (SKI,2023)
2. Intervensi pencegahan *stunting* perlu diperkuat (menurunkan KEK pada ibu hamil dan *wasting* pada balita)
3. Pencapaian target pada intervensi pencegahan stunting belum tercapai

3.2.2 Intervensi

Pencegahan dan penurunan *stunting* tahun 2025 diselenggarakan melalui intervensi sebagai berikut.

1. Pemenuhan intervensi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, mencakup:
   a. Secara umum (meliputi seluruh sasaran: ibu hamil, baduta, balita, remaja, calon pengantin, keluarga, dan masyarakat)
   b. Secara khusus, dengan menguatkan deteksi dini masalah gizi sebelum stunting (ibu hamil KEK; serta balita dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, gizi kurang, dan gizi buruk) diikuti dengan tata laksana dan pendampingan
2. Penguatan konvergensi melalui perbaikan tata kelola, yang mendorong
   a. Analisis situasi berbasis karakteristik kewilayahan

b. Perencanaan dan penganggaran berdasarkan konteks lokal dengan memanfaatkan hasil analisis situasi

c. Integrasi berbagai sistem, kebijakan, dan situasi yang ada

d. Penguatan pemantauan dan evaluasi sebagai umpan balik

3.2.3 Sasaran dan Target

Target utama tahun 2025 yang dicapai pencegahan dan penurunan stunting tergambar di bawah ini.

Indikator	Target 2025
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) balita	18,8%
Wasting (gizi kurang & gizi buruk) pada balita	8%
Bayi lahir prematur (<37 minggu)	11%
Ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	15%
Bayi <6 bulan mendapat ASI eksklusif	73%
Bayi usia 6 bulan mendapat ASI eksklusif	61%
Anak usia 6 – 23 bulan mendapatkan MPASI	73%
Balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	50%
Keluarga sasaran mendapat pendampingan 1000 HPK	75%

3.2.1 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Pencegahan dan penurunan *stunting* dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi. Karena seluruh daerah sudah menjadi lokasi fokus, penguatan analisis situasi perlu didorong untuk memperkuat perencanaan penganggaran berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pencegahan dan penurunan *stunting* yaitu:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
3. Kementerian Pekerjaan Umum
4. Kementerian Sosial
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
7. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
8. Sekretariat Wakil Presiden

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

9. Kementerian PPN/Bappenas
10. Kementerian Keuangan
11. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
12. Kementerian Agama
13. Kementerian Pertanian
14. Kementerian Kelautan dan Perikanan
15. Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital
16. Badan Pangan Nasional
17. Badan Gizi Nasional
18. Badan Pengawas Obat dan Makanan
19. Badan Riset dan Inovasi Nasional
20. Pemerintah Daerah
21. Nonpemerintah

3.2.4 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Kebutuhan Kerangka Regulasi dalam mewujudkan pencegahan dan penurunan *stunting* adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Perpres tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* yang menjadi dasar hukum upaya perbaikan pencegahan dan penurunan *stunting* (arah kebijakan, strategi, sampai perbaikan tata kelola).

3.3 Pemeriksaan Kesehatan Gratis

3.3.1 Latar Belakang

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat, deteksi dini, pencegahan penyakit, dan mengurangi potensi beban anggaran pengendalian penyakit, terutama dari risiko penyakit katastropik. Semakin awal suatu kondisi penyakit diketahui, maka semakin minim biaya yang diperlukan, serta semakin baik prognosis untuk sembuh total.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, proporsi kasus kematian yang dapat dicegah akibat penyakit menular dan tidak menular di Indonesia cukup tinggi; pada kelompok usia bayi (96,8 persen), anak-anak (76,4 persen), remaja (63,9 persen), dewasa (72,6 persen), dan lansia (73,5 persen).

Kasus kematian yang dapat dicegah tersebut dapat dideteksi lebih dini dengan pemeriksaan kesehatan rutin. Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa

1. Penduduk yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan untuk penyakit tidak menular masih terbatas (39,8 persen)

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

2. Pada kelompok penduduk usia di atas 20 tahun, masih banyak yang belum pernah melakukan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular antara lain
   a. lingkar perut (80,82 persen)
   b. gula darah (62,6 persen)
   c. kolesterol (61,6 persen)
   d. berat badan (36,61 persen)
   e. tekanan darah (32,6 persen)

3.3.2 Intervensi

Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis dilaksanakan melalui intervensi berbasis siklus hidup, yaitu (a) bayi baru lahir (2 hari); (b) balita dan anak usia prasekolah (1-6 tahun); (c) usia sekolah dan remaja (7-17 tahun); (d) dewasa (18-59 tahun); serta (e) lansia (>60 tahun). Momentum implementasi Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, antara lain:

1. Pemeriksaan Kesehatan Gratis ulang tahun untuk kelompok usia 0-6 tahun dan 18 tahun ke atas yang dilaksanakan mulai Februari 2025;
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis sekolah pada kelompok usia 7-17 tahun yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, mulai Juli 2025; dan
3. Pemeriksaan Kesehatan Gratis khusus ibu hamil dan balita dilaksanakan sesuai jadwal di puskesmas dan posyandu.

Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Petunjuk Teknis PKG Hari Ulang Tahun yang ditetapkan melalui KMK No. HK.01.07/Menkes/33/2025 dan menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 4, 3, 2, organisasi profesi, institusi pendidikan kesehatan dan pihak terkait lainnya.

Intervensi penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis tahun 2025 diselenggarakan melalui:

1. Skrining sesuai kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia dengan dukungan penyediaan BMHP skrining kesehatan, pemeriksaan sampel skrining bayi baru lahir, tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir, dan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA.
2. Penguatan sistem dan tata kelola pemeriksaan kesehatan gratis, antara lain mencakup sosialisasi PKG, pengembangan NSPK PKG, pembinaan terhadap puskesmas penyelenggara PKG, pengembangan sistem data, dan

peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang penyelenggaraan PKG.

3.3.3 Sasaran dan Target

Pelaksanaan PKG diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit. Penyelenggaraan program PKG tahun 2025 diupayakan untuk mencapai target berikut:

Sasaran	Target 2025
Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	36%
Kab/kota cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	40%
Penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	65%
Penerima pemeriksaan gratis kelompok usia balita dan anak usia prasekolah	50%
Penduduk penerima pemeriksaan gratis kelompok usia sekolah & remaja	20%
Penerima pemeriksaan gratis kelompok usia dewasa	35%
Penduduk penerima pemeriksaan gratis kelompok lanjut usia	50%

3.3.4 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Program pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota. Kementerian Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan program pemeriksaan gratis, antara lain:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kementerian Kesehatan
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Dalam Negeri
6. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Kementerian Agama
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
9. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
11. Kementerian Ketenagakerjaan
12. Kementerian Komunikasi dan Digital

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

13. Tentara Nasional Indonesia
14. Kepolisian Republik Indonesia
15. Pemerintah daerah

3.3.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program PKG, saat ini tengah disusun draf Inpres Penyelenggaraan Program Hasil Terbaik Cepat Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui keterpaduan dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kerjasama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam rancangan Inpres ini, terdapat 18 Menteri, 6 Kepala Lembaga, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang mendapat instruksi untuk mengambil langkah-langkah sesuai tusi dan kewenangannya dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program PKG, yakni a) pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, serta SDM kesehatan; b) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program PKG; c) strategi komunikasi program PKG; dan d) sinergi lintas sektor.

3.4 Penuntasan TBC

3.4.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu tantangan utama kesehatan di Indonesia dengan beban kasus yang tinggi. Berdasarkan Global TB Report WHO 2024, Indonesia menempati peringkat kedua dengan insidensi TBC tertinggi di dunia. Pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan TBC melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategis guna mencapai target penurunan insidensi TBC sebanyak 329 orang per 100.000 penduduk (2025) menjadi 190 orang per 100.000 penduduk (2029).

3.4.2 Intervensi

Fokus utama penuntasan TBC tahun 2025 pada peningkatan penemuan kasus secara masif, akses pengobatan, serta penguatan upaya pencegahan. Upaya kunci penuntasan TBC dilakukan melalui:

1. Peningkatan skrining dan deteksi dini melalui perluasan skrining aktif, pemanfaatan teknologi digital, serta optimalisasi laboratorium dengan metode diagnostik cepat;
2. Pemberian layanan berbasis pasien (*patient-centered care*), perluasan akses terhadap obat TBC Resisten Obat (TBC RO), serta penerapan pendekatan berbasis komunitas dalam pemantauan kepatuhan pengobatan;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		3. Peningkatan dukungan sosial dan ekonomi dengan skema insentif bagi pasien TBC dan keluarga yang terdampak; 4. Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan dan integrasi layanan TBC ke dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 5. Peningkatan peran sektor nonkesehatan dalam pengendalian faktor risiko, termasuk penguatan kebijakan lingkungan kerja sehat, pengendalian TBC di kelompok risiko tinggi seperti lembaga pemasyarakatan, panti asuhan dan pesantren, serta perbaikan hunian dan sanitasi layak di daerah endemis. Intervensi penuntasan TBC tahun 2025 diselenggarakan melalui: 1. Pencegahan kasus, yang tergambar dari cakupan pemberian obat terapi pencegahan tuberkulosis pada kontak serumah, dilaksanakan melalui a. pendampingan lembaga pelaksana uji klinis vaksin TB; b. penanggulangan TB di lapas, pesantren dan tempat kerja; c. NSPK percepatan target eliminasi TB d. pemenuhan obat, alat dan bahan pencegahan dan pengendalian TBC 2. Penemuan kasus, yang tergambar dari cakupan penemuan kasus TBC, dilaksanakan melalui: a. layanan penemuan aktif TBC dan *skrining mobile* TBC b. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam tata laksana kasus c. integrasi layanan TB dengan program pencegahan penyakit di layanan primer (diabetes, HIV) d. Integrasi SITB untuk pencatatan kasus dan kepatuhan pengobatan, termasuk dengan fasyankes swasta 3. Pengobatan TBC, yang tergambar dari angka keberhasilan pengobatan TBC dan persentase pasien TBC yang memulai pengobatan, dilaksanakan melalui: a. penyediaan obat dan perbekalan TB; b. penguatan riset regimen pengobatan pendek untuk TBC; c. pemberian insentif bagi pasien TB kategori miskin, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berhasil meningkatkan angka penyelesaian pengobatan.

3.4.3 Sasaran dan Target

Dalam rangka percepatan eliminasi TBC, target utama tahun 2025 meliputi:

Sasaran	Target 2025
Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	72%
Angka keberhasilan pengobatan TBC	90%
Cakupan penemuan kasus TBC	90%
Pasien TBC yang memulai pengobatan	95%

3.4.4 Lokasi dan K/L/D Instansi Pelaksana

Program penuntasan TBC dilaksanakan di seluruh provinsi, dengan fokus pada 359 kabupaten/kota di 38 provinsi. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam program penuntasan TBC adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Ketenagakerjaan
6. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
7. Kementerian Sosial
8. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
9. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
11. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
13. Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan
15. Pemerintah daerah

3.5 Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota

3.5.1 Latar Belakang

Berdasarkan data awal Kementerian Kesehatan, 78 persen rumah sakit sudah mencapai status akreditasi tertinggi, yaitu paripurna. Namun, pasca dilakukan reviu dan peninjauan kembali terhadap hasil akreditasi dan serta rekalibrasi capaian

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		berdasarkan rancangan standar baru yang dikembangkan Kementerian Kesehatan, hanya terdapat 37 persen RS yang terakreditasi paripurna. Tantangan pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota, diantaranya: 1. Ketimpangan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis; 2. Kondisi tingkat pemenuhan standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum merata; serta 3. Ketersediaan kapasitas layanan unggulan rumah sakit yaitu kanker, jantung, stroke, ginjal, serta kesehatan ibu dan anak masih belum merata. 3.5.2 Intervensi Program pembangunan rumah sakit berkualitas di kabupaten diterjemahkan sebagai peningkatan kapasitas Rumah Sakit Daerah di kabupaten/kota untuk pemenuhan standar nasional serta dapat memberikan layanan berkualitas yang digambarkan berdasarkan kriteria berkualitas, antara lain: 1. Tersedianya sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memenuhi standar minimal 80 persen; 2. Mampu menyediakan layanan unggulan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak; 3. Tersedianya tenaga kesehatan spesialis dasar dan spesialis penunjang untuk layanan unggulan; 4. Telah mencapai standar akreditasi paripurna; serta 5. Meningkatnya tata kelola kemandirian keuangan khususnya bagi RS Pemerintah. Intervensi penyelenggaraan Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota tahun 2025 diselenggarakan melalui: 1. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan RS Daerah untuk mencapai standar minimal 80%; 2. Peningkatan RS kelas D menjadi kelas C; 3. Jejaring pengampuan dan sistem rujukan berbasis kompetensi untuk layanan unggulan RS; 4. Pembinaan kesiapan akreditasi RS; 5. Pembinaan RS BLU Pemerintah yang ditingkatkan kemandiriannya; dan

6. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan RS untuk layanan unggulan RS di seluruh kabupaten/kota.

3.5.3 Sasaran dan Target

Dalam rangka Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota, target utama tahun 2025 meliputi:

Sasaran	Target 2025
Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	8%
Persentase Provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	40%
Persentase Kab/Kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan Kesehatan Ibu-Anak, Kanker, Jantung, Stroke, Ginjal sesuai standar	20%
Kab/Kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	22 Kab/Kota
Persentase RS Pemerintah Daerah yang memenuhi Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar	45%

3.5.4 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Pelaksanaan program pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota ditargetkan untuk seluruh provinsi. Kementerian/Lembaga pelaksana program pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Kementerian Keuangan
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

3.5.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Untuk mendukung program Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/Kota membutuhkan pemutakhiran regulasi teknis tentang rumah sakit yang akan mengatur terkait standar tipe Rumah Sakit berbasis kompetensi layanan (termasuk standar sumber daya manusia yang perlu tersedia), serta sistem rujukan yang saat ini sedang dikembangkan (layanan kanker, jantung, strok, uronefrologi dan kesehatan ibu-anak).

3.6 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas

3.6.1 Latar Belakang

Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif serta memastikan satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah memiliki fasilitas yang memadai guna mendukung proses pembelajaran yang efektif. Fokus utama revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, yaitu

1. memperbaiki ruang kelas dan ruang nonkelas yang rusak, serta
2. pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan.

Pelaksanaan revitalisasi mengikuti prinsip ketuntasan untuk memastikan seluruh kegiatan pembelajaran memiliki sarana dan prasarana yang memadai di satuan pendidikan, serta mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

Aspek geografis Indonesia menjadi salah satu tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, di antaranya penyediaan satuan pendidikan, akses jalan, jembatan, ketersediaan listrik, dan internet. Kondisi prasarana pendidikan yang kurang memadai berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan, kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Tantangan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas:

1. 29.830 Desa/Kelurahan tidak memiliki TK/RA/BA
2. 302 Kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA
3. 727 Kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA
4. 3.153 Sekolah tidak memiliki listrik
5. 22.373 Sekolah tidak memiliki internet
6. 2.458 Sekolah tidak memiliki listrik dan internet
7. 23,97 persen Ruang Kelas Berada pada kondisi rusak sedang dan berat

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

3.6.2 Intervensi

Untuk mewujudkan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas, dapat dilaksanakan melalui

1. Revitalisasi prasarana pendidikan dan pembangunan satuan pendidikan baru serta
2. Revitalisasi sarana satuan pendidikan.

Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

1. Perencanaan revitalisasi

   Sasaran revitalisasi diidentifikasi berdasarkan data pokok pendidikan yang berlaku pada sekolah dan madrasah. Data kerusakan yang telah diidentifikasi, kemudian diverifikasi dan dipertajam berdasarkan kriteria kelayakan sesuai dengan hasil pembahasan multilateral meeting. Selanjutnya, verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kembali validasi data dan kondisi kerusakan yang ada di lapangan. Hasil verifikasi kemudian ditetapkan menjadi daftar sasaran pembangunan.

2. Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan

   Pelaksanaan revitalisasi mencakup perbaikan struktur, kualitas material dan estetika ruang kelas untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan. Revitalisasi juga memastikan ketersediaan dan kelayakan sarana dasar penunjang kegiatan belajar mengajar, serta sarana spesifik seperti peralatan laboratorium, peralatan TIK, koleksi buku perpustakaan, peralatan praktik dan alat peraga edukasi

3. Pemanfaatan dan pengendalian

   Satuan pendidikan yang telah direvitalisasi kemudian diserahkan kembali pada pengelola aset untuk dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik untuk proses belajar mengajar.

3.6.3 Sasaran dan Target

Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas sebagai upaya mendukung tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas, di antaranya ditunjukkan pada tabel berikut.

Indikator	Target 2025
Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	31,14%
Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	46,08%

3.6.4 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Penentuan lokasi revitalisasi sekolah/madrasah mempertimbangkan satuan pendidikan dengan kondisi terdapat minimal satu massa bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang dengan memberi afirmasi pada daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, wilayah Papua, dan daerah dengan partisipasi rendah. Selain itu, memberikan keberpihakan pada Kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan, terutama PAUD, dan/atau SD Negeri di desa/kelurahan yang belum tersedia pelayanan PAUD (TK/RA/BA) untuk dibangun pelayanan Satu Atap (SATAP) PAUD-SD.

3.7 Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

3.7.1 Latar Belakang

Penyiapan sumber daya manusia unggul dalam mewujudkan Indonesia Emas masih menghadapi tantangan, meliputi

1. Kurangnya wadah bagi peserta didik berprestasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan daya saing pada level lanjut;
2. Masih sedikitnya peserta didik yang berpartisipasi pada ajang prestasi di tingkat global;
3. Belum tersedianya sistem yang memadai untuk mempersiapkan peserta didik bersaing di tingkat global; dan
4. Masih terbatasnya implementasi pendidikan menengah berbasis *Science, Technology, Engineering, and Mathematics.*

Ekosistem sekolah unggul bertujuan untuk memberikan wadah bagi peserta didik yang memiliki kualitas unggul dan daya saing tinggi, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan dalam mencetak pemimpin masa depan menuju Indonesia Emas 2045.

Tiga pilar utama pengembangan ekosistem sekolah unggul, yaitu pilar penyeimbang, pilar inkubator pemimpin, serta pilar akademik dan pengabdian masyarakat. Pengembangan ekosistem sekolah unggul terdiri dari:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		1. Pembangunan sekolah unggul baru, bertujuan a. Membuka akses yang lebih luas bagi talenta-talenta unggul untuk dapat meningkatkan prestasi peserta didik di tingkat nasional dan internasional b. Meningkatkan daya saing peserta didik untuk dapat diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. 2. Sekolah unggul transformasi, bertujuan a. Memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah existing yang memiliki peserta didik bertalenta unggul untuk dapat diterima perguruan tinggi terbaik dunia di bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. 3.7.2 Intervensi Sekolah unggul baru dibangun pada jenjang pendidikan menengah yang akan menampung lebih kurang 160 peserta didik sekolah menengah atas per tahun. Pembangunan ditargetkan selesai dalam waktu satu tahun beserta dengan penyediaan sarana penunjang, sehingga dapat segera beroperasi pada tahun berikutnya. Tahapan intervensi sekolah unggul pada tahun 2025 mencakup: 1. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah unggul baru Satuan pendidikan dilengkapi dengan ruang kelas, laboratorium ilmu pengetahuan alam dan multimedia terpadu, perpustakaan terpadu dengan koleksi buku lengkap, lapangan olahraga, ruang penunjang lain (unit kesehatan sekolah, perkantoran, dan lainnya), serta bus transportasi untuk operasional peserta didik di lingkungan sekolah. 2. Pembinaan sekolah unggul transformatif Intervensi Sekolah unggul transformasi berupa pembinaan peserta didik, pelatihan guru, dan pelatihan manajemen sekolah. Pembinaan Sekolah Unggul Transformatif dilakukan melalui: a. Penerapan kurikulum berkarakteristik unggul yang diselaraskan dengan kebutuhan perguruan tinggi terbaik dunia b. Program persiapan khusus untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi terbaik dunia

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

c. Bimbingan pengembangan karier peserta didik

d. Kerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis.

3. Pengembangan karakter dan kepemimpinan

Sekolah Unggul juga menanamkan keterampilan nonteknis melalui:

a. Penyelenggaraan program kepemimpinan siswa

b. Penguatan nilai-nilai Pancasila dan keagamaan

c. Pelibatan peserta didik dalam kegiatan pengembangan komunitas masyarakat

d. Penyelenggaraan *student well being* program

e. Pengembangan kedisiplinan dan kebhinekaan di asrama.

Ketiga intervensi diharapkan akan meningkatkan peluang lulusan diterima di perguruan tinggi terbaik dunia pada bidang-bidang unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, melalui penguatan lima aspek utama, yaitu penjalinan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi, persiapan akademik, pengemasan citra diri dan pemilihan perguruan tinggi, pemenuhan komponen persyaratan pendaftaran, serta persiapan keberangkatan. Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul melalui tahapan:

1. persiapan dan penyelenggaraan sekolah unggul,
2. pembangunan sekolah unggul,
3. pembinaan sekolah unggul transformasi, serta
4. pendampingan sekolah unggul untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan mitra strategis.

3.7.3 Sasaran dan Target

Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul sebagai upaya mendukung terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global. Di tahun 2025 target pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul adalah sebagai berikut.

Indikator	Target 2025
Jumlah sekolah unggul baru yang terbangun	4 unit
Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	12 unit

3.7.4 Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Pelaksanaan program Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul diprioritaskan bagi daerah dengan jumlah siswa yang diterima di 100 Perguruan Tinggi Terbaik Dunia melalui Beasiswa Indonesia Maju (BIM) masih rendah dan daerah dengan jumlah siswa yang pernah mengikuti kompetisi di tingkat internasional masih rendah.

4. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan 1995. Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. Hal tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.

1. Urgensi Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan
   a. Indonesia memiliki 81 dokumen proyek investasi yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer*) dengan total nilai ~US$15.9 miliar, meliputi enam sektor prioritas dan berlokasi di seluruh Indonesia
   b. Indonesia memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis sampai dengan tahun 2040 dengan estimasi investasi pada 28 komoditas sebesar US$618.0 miliar
   c. Potensi ekspor yang belum terealisasi:
      i. Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit sebesar US$12 miliar
      ii. Produk Kendaraan Bermotor sebesar US$4,8 miliar
      iii. Produk Komponen Elektronik sebesar US$2 miliar
   d. Sumatera Selatan penghasil kopi terbesar. Ekspor kopi nasional mencapai US$929 juta pada 2023.
   e. Riau penghasil kelapa terbesar. Ekspor olahan kelapa nasional mencapai US$892 juta pada 2023.
   f. Indonesia produsen ke-2 rumput laut dunia, mencapai 9,75 juta ton, namun ekspor baru mencapai US$433,71 juta berupa rumput laut kering, karagenan, dan agar-

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		agar, terdapat potensi diversifikasi (biostimulan, *biofuel*, dan *bioplastic*)
		2. Strategi yang Dilakukan
		a. Pengembangan hilirisasi dan industrialisasi di sektor padat karya, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
		b. Percepatan transformasi digital melalui penguatan ekonomi digital, dan peningkatan konektivitas digital, serta perwujudan pemerintahan digital yang transparan, inklusif dan efisien
		c. Mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan, pengembangan pangan akuatik (*blue food*); pengembangan pangan hewani; serta pengembangan pangan lokal dan nabati
		d. Mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta penguatan implementasi transisi energi berkeadilan
		e. Mewujudkan ketahanan air melalui konservasi sumber daya air, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir; penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS; serta pengembangan terpadu pesisir utara Jawa
		f. Pembangunan 3 juta rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman, akses konektivitas, kesesuaian terhadap tata ruang, serta keamanan bermukim dan sensitif terhadap bencana dan iklim
		3. Keadaan yang Ingin Diwujudkan
		a. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,30 persen
		b. *Trajectory* pertumbuhan ekonomi dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025—2029 sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8,00 persen
		c. Peningkatan Gross National Income per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$5.410 atau bertahan pada kategori *upper-middle income countries* di tahun 2025
		4. Mitigasi Risiko
		Dalam menjalankan berbagai strategi yang mendukung pertumbuhan tinggi berkelanjutan, diperlukan langkah mitigasi risiko secara kolaboratif diantaranya penyusunan dan sinergi regulasi pendukung program, kemudahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		perizinan, pemanfaatan teknologi termasuk teknologi ramah lingkungan, kesiapan SDM, pelibatan masyarakat setempat dan pemerintah daerah.
		4.1. Hilirisasi dan Industrialisasi
		4.1.1. Latar Belakang
		Hilirisasi menjadi kunci bagi peningkatan nilai tambah dan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Indonesia memiliki beragam kekayaan alam strategis yang dapat menjadi modalitas utama untuk membangun kembali industri pengolahan (reindustrialisasi) melalui program hilirisasi. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia diantaranya
		1. Kekayaan sumber daya alam berbasis tambang (nikel, tembaga, bauksit, timah, minyak bumi, gas bumi, *iron ore*, dan pasir silika)
		2. Sumber daya alam berbasis hayati (kelapa sawit, kelapa, sagu dan singkong, rumput laut, dan hasil perikanan).
		3. Produksi *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar ke-1 dunia sebesar 68,7% dari total produksi CPO dunia
		4. Cadangan bijih nikel terbesar ke-1 dunia yang mencapai 5,24 miliar ton
		Berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029 diperlukan penguatan hilirisasi atas 15 komoditas prioritas yang berpotensi memberikan tambahan PDB sebesar US$141.83 miliar dan menyerap 1,17 juta tenaga kerja baru selama tahun 2025-2029
		4.1.2. Sasaran dan Target
		Sasaran utama hilirisasi adalah terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan dengan indikator pencapaian berupa rasio PDB industri pengolahan yang ditargetkan mencapai 20,8 persen pada tahun 2025.
		4.1.3. Intervensi
		Kebijakan industrialisasi dilakukan atas 5 (lima) pilar, yaitu:
		1. Pengembangan industri prioritas sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, yang mencakup industri berbasis sumber daya alam unggulan (nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, sagu dan singkong, rumput laut, serta hasil perikanan), industri dasar, industri padat karya terampil, industri padat teknologi dan inovasi, serta jasa industri;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		2. Pengembangan produk dan jasa industri yang berdaya saing ekspor melalui peningkatan standar, akses, dan partisipasi dalam global value chain, serta mendukung ekspansi global; 3. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai rantai pasok melalui pembangunan dan revitalisasi sentra, peningkatan kapasitas dan akses, serta pengembangan kemitraan; 4. Aglomerasi Industri pada KI/KEK Prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dengan penataan dan penyediaan infrastruktur serta sarana penunjang, penyiapan SDM, dan penguatan rantai pasok; 5. Fasilitas fiskal/non-fiskal serta akses pembiayaan menuju transisi industri hijau dengan penerapan ekonomi sirkular, serta pengembangan *eco industrial park*. Fokus Implementasi hilirisasi pada Prioritas Nasional 2, melalui Program Prioritas Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Pada Prioritas Nasional 5, melalui Program Prioritas Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor, dan Program Prioritas Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK sebagai Pusat Pertumbuhan Baru. Sebagai upaya pencapaian sasaran Hilirisasi, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. 1. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru. Komoditas perikanan (ikan tuna, ikan cakalang, ikan tongkol, udang, dan ikan tilapia) komoditas kelautan (garam). Pada tahun 2025, Kegiatan Prioritas Utama adalah Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain pendampingan pengolahan garam dalam negeri; sarana niaga garam rakyat yang diserahkan ke masyarakat/pemda; pendampingan penerapan industri 4.0; serta pemetaan potensi biofarmakologi. Target pada tahun 2025 adalah, volume produksi garam sebesar 2,25 juta ton, nilai produktivitas lahan garam rakyat mencapai 83 ton/ha, utilisasi industri pengolahan garam industri hingga mencapai 52,5 persen, utilisasi industri pengolahan hasil laut hingga 45%, dan realisasi penanaman modal

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		asing/modal dalam negeri untuk hilirisasi garam senilai 7,38 triliun rupiah.
		2. Pengembangan Hilirisasi Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor.
		Hilirisasi prioritas adalah nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak dan gas bumi menjadi industri kimia, *iron ore* (industri logam dasar besi-baja), serta pasir silika (industri semikonduktor). Seluruh komoditas unggulan utama termasuk ke dalam Kegiatan Prioritas Utama.
		a. Pengembangan Hilirisasi Komoditas Nikel, Tembaga, Bauksit, dan Timah
		Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain fasilitasi pembangunan smelter/pemurnian/pengolahan nikel, tembaga, bauksit dan timah; pendampingan fasilitasi investasi bagi investor; penyusunan peta jalan dekarbonisasi industri logam dasar dan fasilitasi penerapan standar industri hijau; pengembangan purwarupa hasil riset dan inovasi hilirisasi sumber daya alam tidak terbarukan; serta promosi investasi pada forum investasi internasional.
		Target pada tahun 2025 adalah nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi nikel, tembaga, bauksit dan timah sebesar 102,33 triliun rupiah serta kapasitas produksi industri olahan nikel, tembaga, bauksit dan timah mencapai 41,25 juta ton/tahun.
		b. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
		Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain purwarupa hasil riset dan inovasi budidaya tanaman; penyusunan standar kualitas dan spesifikasi teknis atas bahan baku dan/atau komoditas turunan kelapa sawit; pembentukan Lembaga Sertifikasi (LS) ISPO Sawit Hilir; pengembangan standar obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang mendukung penanganan *stunting*; fasilitasi *prototyping* produk *betacarotene* dan *tocopherol* alami berbasis minyak sawit; fasilitasi registrasi obat bahan alam dan suplemen kesehatan; purwarupa hasil riset dan inovasi hilirisasi produk pertanian; pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua berbahan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		dasar kelapa sawit; kebijakan penyerapan produk biofuel untuk kebutuhan domestik; serta perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia terkait sektor isu pertanian, keamanan dan ketahanan pangan. Target pada tahun 2025 adalah produksi CPO dan CPKO sebesar 53,02 juta ton, peningkatan ragam produk hilir sawit mencapai 208 produk, rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku sebesar 92,3 persen, serta nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi kelapa sawit sebesar 1,49 triliun rupiah. c. Pengembangan Hilirisasi Kelapa Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain pemeliharaan dan operasionalisasi kebun sumber benih dan *nursery*; pengembangan kawasan kelapa; penyediaan sarana dan prasarana pengolahan tanaman perkebunan; penyediaan sarana pascapanen tanaman perkebunan; harmonisasi kebijakan hulu-hilir untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri; bimbingan teknis dalam rangka pengembangan produk, teknik produksi, kemasan, dan sertifikasi; pendampingan pembiayaan bagi usaha mikro; pengembangan purwarupa hasil riset dan inovasi hilirisasi produk pertanian; fasilitasi penyelesaian masalah terkait investasi/penanaman modal; serta promosi investasi pada forum investasi internasional. Target pada tahun 2025 produktivitas kelapa mencapai 1,13 ton per hektar, produksi kelapa mencapai 2,88 juta ton, nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi kelapa sebesar 392,21 miliar rupiah, serta utilisasi industri pengolahan kelapa mencapai 55 persen. d. Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku melalui penyaluran bibit unggul rumput laut kultur jaringan dan sarana budidaya rumput laut ke masyarakat; promosi usaha dan investasi industri rumput laut; penumbuhan eksportir produk rumput laut, serta rekomendasi tata kelola bidang budidaya rumput laut dan kerjasama pemasaran rumput laut.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Target pada tahun 2025 volume produksi rumput laut menjadi 11,64 juta ton, nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi rumput laut menjadi 510,0 miliar rupiah, serta utilisasi industri pengolahan rumput laut ditargetkan mencapai 53,76 persen.
		e. Pengembangan Industri Kimia Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain fasilitasi hilirisasi investasi strategis di bidang minyak dan gas bumi; fasilitasi investor dalam rangka pembangunan fasilitas *coal to ammonia* di Kutai Timur; purwarupa hasil riset dan inovasi teknologi energi berkelanjutan; penyusunan peta jalan dekarbonisasi industri kimia dan fasilitasi penerapan standar industri hijau untuk penerapan dekarbonisasi dan ekonomi sirkular; penyusunan kebijakan pemanfaatan hidrogen hijau dan ammonia hijau; serta pendampingan implementasi Industri 4.0 di sektor industri kimia dan bahan galian non logam. Target pada tahun 2025 kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batubara menjadi 60,23 juta ton, nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi minyak bumi mencapai 34,45 triliun rupiah, serta nilai realisasi penanaman modal asing/ penanaman modal dalam negeri hilirisasi gas bumi mencapai 20,23 triliun rupiah.
		f. Pengembangan industri logam dasar Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain penyusunan kebijakan pembinaan BUMN dalam rangka hilirisasi komoditas tambang; harmonisasi kebijakan dalam rangka mendukung ketersediaan bahan baku; penanganan kasus *trade remedy* dan hambatan teknis perdagangan; fasilitasi percepatan rencana proyek di bidang industri manufaktur; serta penyusunan peta jalan dekarbonisasi industri logam dasar dan fasilitasi penerapan standar industri hijau untuk penerapan dekarbonisasi dan ekonomi sirkular. Target pada tahun 2025 pertumbuhan PDB industri logam dasar sebesar 9,01 persen, utilisasi industri logam dasar mencapai 59 persen, serta nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja mencapai 10,17 triliun rupiah.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		g. Pembangunan industri semikonduktor Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain bimbingan teknis dan fasilitasi temu bisnis dalam rangka pengembangan industri komponen elektronika; kajian peluang bisnis untuk hilirisasi silika menjadi wafer silikon; pengembangan purwarupa hasil riset dan inovasi material komposit untuk aplikasi pertahanan dan satelit; serta penjajakan investor pada forum investasi internasional. Target pada tahun 2025 pertumbuhan PDB industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 3,0 persen serta nilai realisasi penanaman modal asing/penanaman modal dalam negeri hilirisasi pasir silika mencapai 1,42 triliun rupiah. 3. Pada Program Prioritas Pengembangan Aglomerasi Industri di KI/KEK Prioritas Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru Terdapat 24 KI/KEK yang tersebar di seluruh Indonesia, dimana 17 KI/KEK berlokasi di luar Jawa, mendekat dengan sumber daya alam unggulan daerah. Kegiatan Prioritas Utama, yaitu Pengembangan KEK Sei Mangkei (fokus hilirisasi kelapa sawit), Pengembangan KIT Batang (fokus hilirisasi nikel, pasir silika dan industri aneka), serta Pengembangan KI Weda Bay (fokus hilirisasi nikel). Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain preservasi jembatan yang mendukung KI Weda Bay; fasilitasi dan pendampingan investasi bagi perusahaan industri (*tenant*) dan pengelola kawasan industri/kawasan ekonomi khusus, termasuk percepatan penyelesaian masalah strategis; pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Dumai-Sei Mangkei; serta identifikasi awal potensi kemitraan rantai pasok industri besar dan sedang di KEK Sei Mangkei dan KIT Batang dengan industri kecil dan menengah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik. Target pada tahun 2025 nilai investasi (PMA/PMDN) di KEK Sei Mangkei, KIT Batang dan KI Weda Bay sebesar 359,66 triliun rupiah. 4.1.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Pelaksanaan hilirisasi dilakukan secara nasional dan disesuaikan dengan sumber daya alam unggulan yang dimiliki

oleh masing-masing daerah. Indikasi lokasi hilirisasi untuk setiap komoditas prioritas adalah sebagai berikut.

PENGEMBANGAN 24 KI/KEK SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN BARU YANG MENDUKUNG HILIRISASI

Pengembangan KI/KEK didesain secara komprehensif dengan dukungan multisektor, termasuk penataan luar kawasan dan penguatan rantai pasok. Sehingga terbangun KI/KEK yang efisien dan memberikan *multiplier effect* terhadap perekonomian sekitar

Komoditas Hilirisasi	Indikasi Lokasi
Nikel	Jawa Barat, Jawa Tengah (KIT Batang), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah (KI Morowali, KI Stardust, KI Huabao), Sulawesi Tenggara (KI IPIP, KI Konawe), Sulawesi Selatan, Maluku Utara (KI Weda Bay, KI Pulau Obi, KI Buli)
Tembaga	Jawa Timur (KEK JIIPE Gresik), NTB (KI Sumbawa Barat), Papua Tengah
Bauksit	Sumatera Utara, Kep. Riau (KEK Galang Batang), Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Barat (KI Ketapang Bangun Sarana), Kalimantan Utara (KI KIPI)
Timah	Kep Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
Minyak dan Gas Bumi (Industri Kimia)	Banten (KI KIEC), Jawa Barat, Jawa Tengah (KI Seafer), Jawa Timur (KI iSentra@Lamongan, KEK JIIPE Gresik), Kalimantan Timur, Kalimantan Utara (KI KIPI), Aceh (KEK Arun Lhokseumawe), Sumatera Selatan, Papua Barat (KI Fakfak)
Besi dan Baja	Sumatera Utara, Banten (KI KIEC), Jawa Barat, Jawa Tengah (KI Seafer), Jawa Timur (KEK JIIPE Gresik), Sulawesi Tengah
Pasir Silika (Industri Semikonduktor)	Kepulauan Riau, Jawa Barat
Kelapa Sawit	Aceh, Sumatera Utara (KEK Sei Mangkei), Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Banten (KIT Wilmar), Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat

Komoditas Hilirisasi	Indikasi Lokasi
Kelapa	Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kep. Riau, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara
Rumput Laut	Kep. Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan (KI Takalar), Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya
Ikan Tuna, Cakalang, Tongkol, Tilapia, dan Udang	Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kep. Riau, Riau, Papua, Papua Selatan (tidak terbatas pada lokasi tersebut)
Garam	Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo

Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan hilirisasi dan industrialisasi, antara lain

1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan
6. Kementerian Pekerjaan Umum
7. Badan Riset dan Inovasi Nasional
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Pemerintah Daerah
10. Badan Usaha Milik Negara (terutama yang bertindak sebagai pengelola KI/KEK)
11. Pelaku Industri Swasta

4.2. Transformasi Digital

4.2.1. Latar Belakang

Transformasi digital merupakan upaya strategis untuk meningkatkan daya saing nasional di tingkat global serta membentuk ekosistem digital yang mampu meningkatkan nilai tambah aktivitas ekonomi, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui implementasi pemerintahan digital. Selain itu, transformasi digital juga bertujuan menciptakan kondisi sosial kemasyarakatan yang kondusif dengan memanfaatkan data, informasi, pengetahuan, dan kemajuan teknologi digital.

Tuntutan era globalisasi dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta inklusivitas di berbagai bidang diperlukan

percepatan pembangunan nasional melalui pemanfaatan teknologi di berbagai sektor strategis sebagai manifestasi pelaksanaan transformasi digital. Dalam mewujudkan transformasi digital diperlukan pengembangan sumber daya manusia (SDM) digital, literasi digital, regulasi yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta riset dan pengembangan yang inovatif.

4.2.2. Sasaran dan Target

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pengembangan ekonomi digital untuk mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.

Indikator	Target 2025
Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	6,10
Indeks Transfomasi Digital Nasional (ITDN)	50,80
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00
Kontribusi Ekonomi Digital terhadap PDB	8-9 persen

4.2.3. Intervensi

Arah kebijakan dan strategi transformasi digital yang menitikberatkan pada kesadaran tentang pentingnya keberadaan dan pemanfaatan data melalui pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), informasi, pengetahuan, serta pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur serta teknologi digital. Terkait hal tersebut dirumuskan kebijakan dan intervensi serta fokus implementasi terkait transformasi digital

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan digital;
2. Mendorong pembangunan dan penguatan pusat data beserta ekosistemnya yang handal dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi bagi kemajuan transformasi digital;
4. Mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital (termasuk aplikasi dan *superapps*), serta literasi digital secara luas;
5. Membangun kedaulatan digital dengan meningkatkan keamanan dan perlindungan data pribadi serta mewujudkan ruang digital yang kondusif;
6. Mendorong penguatan industri teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri; serta

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		7. Membangun dan mengembangkan tata kelola (regulasi, organisasi, SDM, dan pendanaan) di pusat dan daerah. Fokus Implementasi transformasi digital pada Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas Ekonomi Digital, Prioritas Nasional 3 melalui Program Prioritas Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik, serta Prioritas Nasional 7 melalui Program Prioritas Pemerintah Digital. Sebagai upaya pencapaian sasaran Transformasi Digital, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan sebagai berikut. 1. Ekonomi Digital Pengembangan SDM digital dan digitalisasi masyarakat, difokuskan pada penguatan ekonomi dan industri digital, termasuk sektor strategis lainnya yang dilaksanakan melalui Pengembangan Digitalisasi Perdagangan dan pengembangan digitalisasi di sektor strategis lainnya. 2. Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik Peningkatan dan pemanfaatan ruang digital seperti penyusunan Kebijakan Pengentasan Judi Online, Kebijakan Pengendalian Ruang Digital untuk Anak dan penanganan konten negatif yang beredar pada ruang digital, Peningkatan infrastruktur pendukung layanan publik digital seperti Pengembangan Pusat Data Nasional. 3. Pemerintah Digital Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas melalui pengembangan layanan publik prioritas berbasis digital seperti penggunaan teknologi baru untuk mendukung layanan publik yang efektif dan efisien 4.2.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Pelaksanaan kebijakan ini berlokasi di pusat dan dilakukan secara nasional. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Transformasi Digital antara lain: 1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 4. Kementerian Komunikasi dan Digital

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		5. Kementerian Perdagangan 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Pertanian 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 9. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 10. Kementerian Pariwisata 11. Kementerian Kesehatan 12. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah 13. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 14. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 15. Badan Riset dan Inovasi Nasional 16. Badan Pusat Statistik 17. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia 18. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 4.2.5. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan Untuk mendukung pelaksanaan Transformasi Digital dibutuhkan pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini bertugas untuk memastikan pelindungan data pribadi masyarakat dalam era digital, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya. 4.3. Swasembada Pangan 4.3.1. Latar Belakang Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi pilar utama pembangunan nasional. Pembangunan pangan harus holistik dan terintegrasi agar pemenuhan pangan dan gizi penduduk dapat terjamin dengan baik dan berkualitas. Jumlah penduduk dan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh menuntut adanya peningkatan kuantitas serta kualitas pangan. Ketersediaan dan aksesibilitas pangan secara berkelanjutan dan stabil antar-wilayah dan antar-waktu menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Perubahan iklim dan kondisi geopolitik global mendorong Indonesia untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui produksi dalam negeri. Swasembada pangan dikembangkan untuk menopang ketahanan nasional dan kemandirian bangsa melalui pengembangan *eco-region* sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, sehat, bergizi dan beragam dengan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

pendekatan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan *nexus*/keterkaitan pangan-energi-air.

4.3.2. Sasaran dan Target

Swasembada Pangan dalam kerangka besar ditujukan untuk mendukung terwujudnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan- energi-air yang diindikasikan dengan

Indikator	Target 2025
Indikator Utama	
Indeks Ketahanan Pangan	73,2
Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,20%
Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis Lumbung Pangan	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	97,3
Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	94
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21
Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan	
Pertumbuhan Nilai Tambah per Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,5%
Indeks Kesejahteraan Petani	0,7445

4.3.3. Intervensi

Swasembada pangan diarahkan untuk:

1. memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri melalui pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani (*agroforestry*), revitalisasi tambak, serta penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi;
2. meningkatkan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan kelembagaan logistik pangan;
3. menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh penduduk agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif;
4. mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman;
5. meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/ pembudidaya ikan/petani hutan;
6. membangun sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan *nature-based solutions*, pengelolaan bentang lahan terpadu, *piloting* bantuan langsung petani, kesehatan tanah (*soil health*), dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif. Intervensi kebijakan swasembada pangan mencakup 1. pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; 2. penguatan cadangan pangan; 3. pengembangan pangan akuatik (*blue food*), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; 4. penganekaragaman konsumsi pangan; 5. pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; 6. fortifikasi dan biofortifikasi pangan; 7. penanganan kerawanan pangan; 8. pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; 9. penguatan produksi komoditas pertanian dan perikanan berorientasi nilai tambah; 10. pengembangan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan. Highlight utama dari intervensi prioritas pembangunan Swasembada Pangan pada tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/Lumbung Pangan terintegrasi melalui pendekatan geospasial, *on-farm*, dan *off-farm*. Pengembangan akan diarahkan untuk meningkatkan luas panen serta produksi bahan pangan utama, melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain Survei Investigasi dan Desain (SID), cetak sawah untuk peningkatan luas baku sawah, optimasi lahan untuk meningkatkan indeks pertanaman, peningkatan produktivitas dengan penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian (irigasi perpompaan, benih, pupuk,

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		pestisida, dan alat mesin pertanian), serta peningkatan kapasitas petani. Target pada Tahun 2025, target sawah yang dicetak adalah 225.000 hektare, dengan target tahap awal seluas 125.000 hektare. Target pelaksanaan cetak sawah di Provinsi Kalimantan Tengah 100.000 hektare (tahap awal 12.500 hektare), Provinsi Sumatera Selatan 50.000 hektare (tahap awal 47.500 hektare), Provinsi Papua Selatan 20.000 hektare (tahap awal 17.500 hektare), Provinsi Kalimantan Selatan 52.800 hektare (tahap awal 45.300 hektare), dan Provinsi Bengkulu 2.200 hektare 2. Pengembangan Pangan Hewani mendukung pemenuhan daging dan susu sapi. 3. Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati melalui produksi bahan pangan berbasis kearifan lokal. 4. Pengembangan Varietas Padi Fortifikasi dan Biofortifikasi melalui peningkatan aksesibilitas produk beras dengan kandungan *zinc* tinggi mendukung upaya penanganan *stunting* 5. Pengembangan Pangan Akuatik dilaksanakan dalam rangka penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat dan pemenuhan bahan baku industri pengolahan. Pembangunan Swasembada Pangan akan dilaksanakan melalui pendanaan APBN. APBD, DAK, serta investasi sektor Swasta. 4.3.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Pelaksanaan pembangunan Swasembada Pangan dilakukan secara nasional, terutama untuk pengembangan pangan lokal, nabati, hewani, dan akuatik serta fortifikasi dan biofortifikasi pangan. Sebagian besar pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan pada tahun 2025 akan dilaksanakan di Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan didukung pada provinsi-provinsi lainnya. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Program Swasembada Pangan antara lain 1. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 2. Kementerian Pertanian 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Badan Pangan Nasional 5. Kementerian Pekerjaan Umum

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		6. Kementerian Kehutanan 7. Kementerian Transmigrasi 8. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Kementerian Koperasi 10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 11. Badan Riset dan Inovasi Nasional 12. Badan Urusan Logistik 13. Pemerintah Daerah. 4.3.5. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan Untuk mendukung pelaksanaan Swasembada Pangan dibutuhkan Rancangan Peraturan Presiden untuk mengarahkan perencanaan pangan nasional ke arah kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. 4.4. Swasembada Energi 4.4.1. Latar Belakang Negara yang kuat memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang mampu melindungi serta menjaga kedamaian dalam wilayahnya. Kemandirian bangsa mencerminkan kemampuan suatu negara untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada negara lain. Bagi Indonesia, penting untuk mencapai swasembada dalam sektor-sektor krusial, termasuk pangan, energi, dan air, yang menjadi pilar utama keberlanjutan bangsa. Khusus untuk sektor energi, Indonesia berfokus pada swasembada energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan. Pemerintah berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan energi melalui pengembangan sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengurangan ketergantungan pada energi fosil. Upaya pencapaian dituangkan dalam Prioritas Nasional 2, dengan Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan pasokan energi 2. Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi 3. Penguatan implementasi transisi energi. 4.4.2. Sasaran dan Target Sasaran dan target pada swasembada energi di tahun 2025 sebagai berikut.

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

No	Indikator	Target 2025
1	Indeks Ketahanan Energi	6,77
2	Pasokan energi primer (MTOE)	312
3	Konsumsi Energi Final per Kapita (TOE per Kapita)	0,750
4	Porsi EBT dalam Bauran Energi (persen)	20
5	Intensitas Energi Primer (SBM/miliar Rp)	147,7

4.4.3. Intervensi

Highlight utama pada intervensi program prioritas pembangunan Swasembada Energi Tahun 2025 dijabarkan melalui 3 (tiga) Kegiatan Prioritas Utama sebagai berikut.

1. Peningkatan Pasokan Energi

   Peningkatan cadangan dan produktivitas energi, produksi dan pemanfaatan mineral logam dan batubara, peningkatan P3DN dan TKDN subsektor pertambangan batubara, penyediaan fasilitas pengembangan dan pemanfaatan batubara di dalam negeri

2. Perluasan Akses dan Jangkauan Layanan Energi

   Meningkatkan infrastruktur distribusi gas bumi; perluasan penyaluran BBM; pengendalian pembangkit listrik, pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, serta jaringan distribusi; memperketat pengawasan terhadap subsidi energi

3. Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan

   diversifikasi energi termasuk pengembangan PLTN, penguatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, pengembangan ekosistem energi bersih, implementasi *Energy Transition Mechanism* (ETM), perluasan pemanfaatan *biofuel*, efisiensi dan konservasi energi

4.4.4. Lokasi dan K/L/D Instansi Pelaksana

Perwujudan swasembada energi dilakukan secara nasional, meliputi kawasan swasembada energi, kawasan perkotaan dan perdesaan, wilayah provinsi penghasil energi (pengolahan migas dan pertambangan), wilayah 3T, dan beberapa lokasi proyek strategis nasional bidang energi. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Swasembada Energi, antara lain

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 8. Kementerian Keuangan 9. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 10. Kementerian Ketenagakerjaan 11. Kementerian Koperasi 12. Kementerian Pertanian 13. Badan Pengawasan Tenaga Nuklir 14. Badan Riset dan Inovasi Nasional 15. Pemerintah Daerah 16. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 4.5. Swasembada Air 4.5.1. Latar Belakang Swasembada air bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Program ini menjadi sangat penting mengingat air merupakan kebutuhan dasar yang esensial untuk kehidupan manusia dan memiliki dampak terhadap perekonomian. Namun, dalam mencapai swasembadai air masih terdapat tantangan antara lain 1. Pada tahun 2045, 55% PDB diperkirakan akan dihasilkan oleh wilayah sungai yang menghadapi *water stress* di musim kemarau 2. Ekstraksi air tanah secara berlebihan akibat terbatasnya sumber air permukaan 3. Alih fungsi dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan Apabila kondisi tersebut tidak ditangani, terdapat 7,3% PDB Indonesia akan hilang pada tahun 2045. 1. Permasalahan tampungan air:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

a. Kapasitas tampung Indonesia adalah 59,59 m3/kapita dan masih tertinggal dari negara-negara yang memiliki variabilitas musim serupa.

b. Tampungan air Indonesia menurun hingga lebih dari 20% pada tahun 2025 akibat tingkat sedimentasi yang tinggi.

2. Permasalahan pemenuhan kebutuhan air:

a. Cakupan layanan dari bendungan masih terbatas pada 16,06% dari area irigasi permukaan dan 23,06% dari total kapasitas air baku terbangun.

b. Cakupan pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum juga masih rendah, terdapat kapasitas idle sebesar 26.663 l/detik dan *non-revenue water* sebesar 33,9%.

3. Risiko daya rusak air

a. Penurunan luas tutupan lahan yang mampu menahan air sekitar 6,54% pada periode 2012-2022 dan adanya lahan kritis seluas 12,7 juta hektare

b. Perubahan intensitas curah hujan rata-rata menyebabkan kejadian bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun.

c. Hanya 60% Kabupaten/Kota memiliki infrastruktur pengolahan akhir air limbah domestik (IPAL atau IPLT)

d. Sebanyak 25% kab/kota yang memiliki operator layanan air limbah domestik.

4.5.2. Sasaran dan Target

Sasaran dan target tahun 2025 pada program Swasembada Air adalah sebagai berikut.

No	Sasaran	Target 2025
1	Indeks ketahanan air nasional	3,50
2	Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	59,31
3	Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk (persen)	53,01
4	Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi (persen)	61,61
5	Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk (persen)	15,6
6	Efisiensi pemanfaatan air irigasi (USD/m^3)	0,34
7	Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air (persen)	12

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

No	Sasaran	Target 2025
8	Rumah tangga dengan akses air minum aman (persen)	33
9	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (persen)	12,5
10	Rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka (persen)	2,5
11	Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan (juta hektar)	12,65
12	Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan (unit)	60

4.5.3. Intervensi

Program Swasembada Air tahun 2025 diselenggarakan melalui intervensi sebagai berikut

1. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air dalam rangka peningkatan ketersediaan air, melalui: peningkatan pola operasi dan keamanan bendungan, pembangunan bendungan terintegrasi pengembangan kawasan, optimalisasi BMN kawasan waduk, revitalisasi danau dan situ, peningkatan program resapan air, rehabilitasi daerah tangkapan air, serta pembangunan tampungan air untuk pertanian, peternakan, air minum, dan energi terbarukan.
2. Penyediaan pasokan air berkelanjutan sebagai tumpuan pengembangan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional serta pertumbuhan sektor produktif, melalui: percepatan pembangunan infrastruktur pertanian, penyediaan air untuk daerah terpencil dan sulit air yang tidak memiliki sumber air permukaan, inisiasi *water accounting* melalui modernisasi irigasi untuk mendorong efisiensi sehingga membuka potensi realokasi air untuk penggunaan lain, pemanfaatan inovasi digital dalam pemantauan kinerja layanan irigasi, menjaga neraca air pada tingkat wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit/kritis/tertekan, tindak lanjut pemanfaatan air baku dan irigasi dari bendungan terbangun, melanjutkan dan menyempurnakan kawasan sentra produksi pangan, serta pengembangan penyediaan air *source to tap*.
3. Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir, melalui: peningkatan jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan dan dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir, peningkatan jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala, serta pengawasan kualitas air minum.
4. Pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana, melalui: revitalisasi

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

sungai, integrasi pengelolaan air di wilayah perkotaan (air minum, sanitasi, drainase banjir), integrasi pendekatan struktural dan non-struktural (*nature based solution*, pemanfaatan prasarana publik sebagai retensi banjir sementara, penataan sempadan sungai), pemanfaatan teknologi untuk penguatan *early warning system*, pengamanan terpadu wilayah perkotaan pesisir terintegrasi pengembangan kawasan, serta percepatan persiapan *giant sea wall*.

5. Konservasi sumber daya air sebagai upaya untuk menjaga kondisi dan fungsi sumber daya air secara berkelanjutan sehingga air tersedia dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan mendatang, melalui: perlindungan dan pelestarian sumber air; pengawetan air; peningkatan kapasitas, kelembagaan, data, dan informasi; pengendalian pencemaran dan pengelolaan kualitas air; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem mangrove; serta penyelamatan mata air kritis.

6. Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur SPALD dan meningkatkan keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD, melalui: pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; peningkatan, optimalisasi, dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik; pemantauan dan inspeksi kualitas sistem pengelolaan air limbah domestik; serta pengembangan manajemen layanan sanitasi (air limbah domestik).

4.5.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana

Lokasi prioritas perwujudan swasembada air adalah kawasan metropolitan, perkotaan, strategis, dan ibukota provinsi, kawasan sulit air, bencana kekeringan, dan terpencil (3T), serta 108 DAS prioritas. Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan Swasembada Air, antara lain

1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
4. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian 8. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, serta BUMN/BUMD. 4.6. Pembangunan 3 Juta Rumah 4.6.1. Latar Belakang Aspek ketahanan bangunan dan kondisi sanitasi yang buruk menjadi faktor utama penyebab ketidaklayakan sebuah hunian. Apabila kondisi ini tidak ditangani secara komprehensif maka akan menyebabkan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh yang diperkirakan mencapai 77 ribu hektar di tahun 2024. Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan dan penyediaan rumah 1. Akses rumah layak huni secara nasional hanya sebanyak 65,25 persen, dimana 63,83 persen berada di perdesaan dan 66,26 persen berada di perkotaan (BPS, 2024); 2. Masih terdapat 34,75% persen rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak; 3. Sebanyak 82,47 persen rumah dibangun secara mandiri yang mana sebanyak 37,10 persen diantaranya tidak layak huni (BPS, 2022); 4. Masih terdapat kebutuhan rumah milik untuk sekitar 13,5% rumah tangga, termasuk diantaranya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah. Tantangan dalam pelaksanaan program perumahan: 1. Masih rendahnya penyediaan akses rumah layak huni yang terjangkau dan terintegrasi dengan infrastruktur dasar permukiman dan konektivitas; 2. Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah (provinsi dan kab/kota) dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah; 3. Terbatasnya fasilitas pembiayaan perumahan yang disertai penjaminan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap untuk pembelian rumah pertama serta

pembiayaan bagi masyarakat yang membangun maupun meningkatkan kualitas rumahnya secara mandiri;

Kenaikan harga rumah yang tidak sebanding dengan peningkatan kemampuan finansial masyarakat juga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses rumah layak huni.

4.6.2. Sasaran dan Target

Sasaran dan target pembangunan 3 juta rumah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

No	Sasaran dan Indikator	Target 2025
Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		
1	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (persen)	67,00
2	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi (unit/tahun)	314.124
3	Jumlah unit rumah baru yang terbangun (unit/tahun)	476
4	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya (unit/tahun)	38.504
5	Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (unit/tahun)	0
6	Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa) (unit/tahun)	1.944
7	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan (rumah tangga/tahun)	273.200
8	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (rekomendasi kebijakan)	1
9	Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (ha/tahun)	177,84

4.6.3. Intervensi

Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman dengan segmentasi yang perlu dilayani mencakup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) termasuk generasi milenial dan generasi Z, masyarakat miskin dan rentan.

Penyediaan perumahan juga perlu dilengkapi dengan:

1. infrastruktur dasar permukiman (air minum aman, air limbah, persampahan, jalan, drainase lingkungan, dan lainnya);
2. Akses konektivitas;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		3. Sesuai dengan tata ruang dan keamanan bermukim yang sensitif terhadap isu ketahanan bencana dan iklim. Hal ini dapat dilaksanakan melalui: 1. Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU); 2. Pengembangan perumahan publik vertikal yang terpadu; 3. Pengembangan fasilitasi pembiayaan perumahan; 4. Penguatan ekosistem perumahan; 5. Peremajaan dan penanganan permukiman kumuh yang terpadu. Dalam upaya meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dilaksanakan melalui penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan, jalan, drainase dan transportasi publik). Setiap intervensi akan didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang didukung oleh basis data perumahan. Pendekatan berbasis kinerja akan menjadi landasan pelaksanaan program bersama dengan Pemerintah Daerah dan mitra pembangunan lainnya. Untuk itu, perluasan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi aspek krusial dalam pengembangan skema kolaborasi program nasional dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa. Pelaksanaan penyediaan rumah tahun 2025 akan dipenuhi melalui skema sebagai berikut 1. Perkotaan a. penyediaan hunian tapak dan vertikal untuk kepemilikan rumah pertama yang didukung dengan fasilitasi kemudahan pembiayaan perumahan; b. penyediaan hunian sewa terutama vertikal; c. peningkatan kualitas hunian; d. penyediaan maupun optimalisasi lahan melalui konsolidasi tanah vertikal dan pengembangan kawasan permukiman berbasis *Transit Oriented Development* (TOD); e. penanganan permukiman kumuh secara terpadu, melalui *Urban Renewal*. 2. Perdesaan a. pembangunan hunian baru, termasuk pengembangan perumahan berkelompok;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		b. peningkatan kualitas hunian; c. stimulan pembiayaan dan bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau peningkatan kualitas hunian yang dilakukan secara mandiri; d. penyediaan skema kemudahan pembiayaan secara bertahap diantaranya melalui mikro kredit dan KPR Swadaya; e. penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa akan diposisikan sebagai pemangku kepentingan utama. Penanganan kumuh tapak akan dibagi menjadi dua yaitu jika skala besar akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Sedangkan, untuk bukan skala besar akan menggunakan dukungan CSR. 3. Pesisir a. stimulan pembiayaan dan bantuan konsultasi teknis melalui klinik rumah untuk pembangunan atau peningkatan kualitas hunian yang dilakukan secara mandiri; b. pembangunan hunian baru; c. peningkatan kualitas hunian; d. penanganan permukiman kumuh mencakup pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali; e. penyediaan strategi skema kemudahan pembiayaan secara bertahap diantaranya melalui mikro kredit dan KPR Swadaya Pemberdayaan masyarakat di kawasan kumuh dan pesisir melalui skema pembiayaan swadaya mikro pesisir; f. penanganan permukiman kumuh secara terpadu; g. pengembangan perumahan skala besar; h. pembangunan PSU Kawasan Permukiman; i. pengembangan usaha rumah modular; j. fasilitasi penyediaan lahan kawasan permukiman. 4. Penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelola perumahan a. penegakan aspek tata ruang dan keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim; b. kemudahan perizinan;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		c. perlindungan konsumen melalui penguatan regulasi (Revisi Permen PUPR, Masukan teknis Rapermen PKP, dan pengelolaan sistem informasi);
		d. peningkatan kepastian bermukim;
		e. pengembangan pembiayaan dan pendanaan alternatif seperti, Dana CSR, Re-desain FLPP, Skema *Build-to-Order*, *Off-take Guarantee*, Dana Desa;
		f. penegakan kebijakan hunian berimbang;
		g. insentif fiskal dengan kondisi tertentu;
		h. menerbitkan regulasi yang mendukung penyediaan perumahan dan kawasan permukiman seperti: Raperpres penugasan Perum Perumnas dan *Build-to-Order*, Rapermen *Housing Queue*, Revisi Kepmen Harga Jual, Revisi PMK Pemanfaatan BMN, dan Revisi Permen PUPR ARSAP, Permenpera RP3KP, dan Permen PUPR Bantuan Perumahan.
		5. Optimalisasi peran setiap pemangku kepentingan pendukung penyelenggaraan perumahan
		a. Perumnas sebagai pelaksana dan pengelola program Pemerintah terkait perumahan;
		b. BP Tapera sebagai pengelola dana Tapera dan FLPP;
		c. PT SMF dalam membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan, dan instansi lainnya sesuai ketentuan;
		d. menggunakan forum CSR Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk berkontribusi pada pencapaian target 3 juta rumah;
		e. kerja sama untuk pengelolaan tanah-tanah wakaf untuk penyediaan perumahan;
		f. penyediaan lahan yang dapat digunakan untuk penyediaan perumahan seperti dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, Kementerian Keuangan, dan Kejaksaan Agung;
		g. insentif perpajakan berupa kebijakan perpanjangan PPNDTP 100% pada Januari-Juni 2025 dan PPNDTP 50% pada Juli-Desember 2025 untuk rumah 0-2 Miliar;
		h. mengoptimalkan proses *prototype* desain dan kemudahan perizinan serta penghapusan pajak dari pemerintah daerah melalui SKB 3 Menteri dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum;

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		i. dukungan regulasi terkait dengan AMDAL dan Revisi Permen KLHK No.4 Tahun 2024; j. dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk kemudahan perizinan usaha dan kepastian proses perizinan; k. dukungan OJK untuk kemudahan akses pembiayaan dan payung hukum untuk mendukung program *Rent To Own*; dan l. melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pokja PKP. 4.6.4. Lokasi dan K/L/D Pelaksana Untuk mencapai target 3 Juta Rumah, akan dilaksanakan melalui kolaborasi pendanaan yang mencakup: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk Belanja K/L 2. Subsidi Perumahan dan Dana Transfer 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 4. Dana TAPERA dan Kredit Mikro PT SMF 5. Pengembang 6. CSR dan Masyarakat Selain itu, telah di identifikasi beberapa investasi asing yang akan masuk seperti Pemerintah Uni Emirat Arab dan Pemerintah China. Dari sisi penyediaan lahan, pemerintah berupaya melakukan identifikasi lahan yang dapat dioptimalisasi menjadi hunian seperti tanah terlantar dan aset lahan pemerintah yang dapat ditingkatkan intensitas bangunannya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan identifikasi potensi kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pencapaian target 3 juta rumah pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025		
		Lokasi	Pihak/Sumber Pendanaan	Jumlah Unit
		Perdesaan	Rumah Khusus (APBN)	1.013.232
			Rumah Umum Subsidi	
			Rumah Komersial	
			Swadaya Masyarakat (Pembangunan Baru)	
			CSR (Pembangunan Baru)	
			Pendanaan Lainnya (Pembangunan Baru)	
			BSPS (APBN)	
			APBD Prov.	
			APBD Kab.	
			APBDes	
			CSR (Peningkatan Kualitas)	
			Swadaya Masyarakat (Peningkatan Kualitas)	
			Pendanaan Lainnya (Peningkatan Kualitas)	
		Perkotaan	Rumah Susun (APBN)	387.175
			BSPS (APBN)	
			DAK Perumahan	
			K/L Lainnya	
			Rumah Swadaya (APBD)	
			Rusunawa (APBD)	
			Lainnya (APBD)	
			FLPP	
			TAPERA	
			Pengembang	
			CSR	
			Masyarakat	
		Pesisir	DAK Tematik PPKT	1.000.000
			Penanganan Kumuh Tapak	
			Pembiayaan Mikro	
			Klinik PKP	
			Pengembang Non-FLPP	
			Penanganan Kumuh Tapak	
			Penanganan Kumuh Vertikal	
			Kementerian/Lembaga	
			Hunian Berimbang	
			Penanganan Kumuh 6 Lokasi	
			Penanganan Sanitasi Rumah	
			BSPS Pesisir	
			Rumah Susun	
			Bantuan PSU	
		Total Program		2.400.407

4.6.5. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

Beberapa regulasi yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian target 3 juta rumah, diantaranya:

1. Revisi Peraturan untuk Percepatan Pembentukan BP3;
2. Rancangan Peraturan Presiden penugasan Perum Perumnas dan *Build-to-Order*;
3. Rancangan Peraturan Menteri tentang *Housing Queue*;
4. Revisi Keputusan Menteri tentang Harga Jual;
5. Revisi Peraturan Menteri Keuangan Pemanfaatan BMN;
6. Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ARSAP;
7. Revisi Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang RP3KP;
8. Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bantuan Perumahan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan melakukan percepatan terhadap pembentukan Badan Percepatan Penyediaan Perumahan berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2021. BP3 diharapkan dapat menjadi memfasilitasi pengelolaan dana konversi hunian berimbang.

5. Fondasi Pembangunan

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Hal ini bermakna pondasi pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga pada ketahanan negara yang kokoh. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, birokrasi sebagai motor penggerak berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel dengan layanan publik berkualitas. Dengan demikian negara benar-benar menjamin kehidupan masyarakat dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Urgensi Fondasi Pembangunan
   a. Pertahanan keamanan di Indonesia memiliki beberapa masalah seperti

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

i. Dinamika geoekonomi di tingkat global, termasuk fenomena *friendshoring* dan *nearshoring*

ii. Masih adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia

iii. Ancaman pada wilayah ALKI yang menjadi jalur strategis perairan

b. Sistem birokrasi di Indonesia masih menghadapi kendala berupa

i. Keterpaduan antara layanan publik belum optimal

ii. Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif

iii. Akses pelayanan publik belum memadai

2. Strategi yang Dilakukan

a. Bidang Pertahanan Keamanan mencakup

i. Pembangunan postur pertahanan;

ii. Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan;

iii. Komponen cadangan dan komponen pendukung.

b. Bidang Reformasi Birokrasi mencakup

i. Implementasi program pemerintah digital untuk mendukung reformasi birokrasi dan tata kelola yang lebih baik;

ii. Transformasi tata kelola pelayanan publik pembangunan;

3. Keadaan yang Ingin Diwujudkan

a. Kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

b. Tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel, dengan tolok ukur keberhasilannya berupa Indeks Pelayanan Publik sebesar 3,68 (2025) dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional sebesar 70,00 (2025)

c. Pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien. Hal ini tergambar pada nilai Indeks SPBE sebesar 3,00 (2025)

5.1. Pertahanan Keamanan

5.1.1. Sasaran dan Target

Fondasi pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi juga pada ketahanan negara yang kokoh. Untuk mengawal keberhasilan langkah tersebut telah dirumuskan sasaran pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut.

No	Sasaran dan Indikator	Target 2025
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan		
1	Persentase Pemenuhan Pembangunan Kekuatan Pokok TNI	30.3
2	*Ranking* Industri Pertahanan (SIPRI Top 100)	<100
3	Persentase Sumber Daya Nasional yang Dimanfaatkan menjadi Kekuatan Pertahanan	100

5.1.2. Intervensi

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran kebijakan pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 2, dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan dilaksanakan melalui (a) pembangunan postur pertahanan; (b) pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, dan (c) komponen cadangan dan komponen pendukung

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2 pada tahun 2025, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arahan kebijakan sebagai berikut.

1. Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya gentar kawasan sebagai bagian dari pembangunan postur dilaksanakan melalui (a) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *Optimum Essential Force* (OEF) dalam rangak meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (b) meningkatkan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar, (c) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (d) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, dan (e) meningkatkan kesiapan Alpalhankam melalui pemeliharaan dan perawatan

2. Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui (a) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri, (b) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, serta (c) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest
3. Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung dilaksanakan melalui (a) penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan dan (b) pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara.

5.2. Reformasi Birokrasi

5.2.1. Sasaran dan Target

Birokrasi sebagai motor penggerak utama pembangunan berperan penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh, didukung transformasi digital sebagai elemen kunci. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan layanan publik yang lebih berkualitas. Untuk mewujudkan langkah-langkah tersebut, telah dirumuskan sasaran kebijakan pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut

No	Sasaran dan Indikator	Target 2025
Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel		
1	Indeks Pelayanan Publik	3,68[a]
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Rata-Rata Nasional	70,00
Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien		
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00[b]

Keterangan: a) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan sehingga target nasional disesuaikan, b) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

5.2.2. Intervensi

Arah kebijakan dalam mewujudkan sasaran kebijakan pembangunan tahun 2025 pada Prioritas Nasional 7, khususnya dalam penguatan reformasi birokrasi sebagai fondasi pembangunan dilaksanakan melalui (1) pemerintah digital dan (2) transformasi tata kelola pelayanan publik pembangunan.

Sebagai langkah konkret dalam upaya pencapaian sasaran kebijakan pembangunan lingkup reformasi birokrasi, dilakukan serangkaian intervensi kebijakan sebagaimana berikut:

1. Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien dilaksanakan melalui (a) penguatan tata kelola pemerintah digital, (b) penguatan teknologi pemerintah digital, (c) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara, (d) transformasi digital layanan publik prioritas dan (e) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.
2. Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel dilaksanakan melalui (a) tata kelola pelayanan publik, (b) penguatan manajemen kinerja pembangunan, dan (c) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.

Lebih lanjut, sebagai bentuk upaya untuk mendukung penguatan akuntabilitas kinerja dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serangkaian intervensi guna mengakselerasi pencapaian reformasi birokrasi dengan melakukan (a) penyempurnaan kebijakan dan regulasi melalui penyusunan grand design dan peta jalan Reformasi Birokrasi (RB), (b) penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), (c) penguatan implementasi kebijakan manajemen risiko pembangunan serta (d) penyederhanaan mekanisme perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui sistem terintegrasi.

6. Proyek Strategis Nasional dan Kegiatan Prioritas Utama

Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		berkualitas dan berkelanjutan, serta mendorong pemerataan pembangunan. Sesuai dengan prioritas Presiden, Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan sebelumnya ditambahkan dengan: Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis, Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat, Proyek Strategis Nasional Koperasi Merah Putih, Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan, Proyek-Proyek Strategis Nasional yang mendukung pengentasan kemiskinan, dan Proyek-Proyek Strategis Nasional dalam rangka pengelolaan sampah. 1. Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya perbaikan gizi, memperkuat ketahanan pangan serta kualitas pendidikan dan partisipasi siswa dan santri. Selain itu, Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penurunan kemiskinan. Komponen utama proyek strategis nasional ini adalah pemberian makan bergizi didukung dengan ekosistem pendukung yang melibatkan kementerian, lembaga, mitra pembangunan dan masyarakat. Sasaran penerima manfaat Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis adalah anak sekolah pada seluruh jenjang pendidikan, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Untuk memastikan efektivitas program, penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis harus diperkuat dengan penyelenggaraan edukasi gizi dan promosi perubahan perilaku hidup sehat, pengukuran antropometri, penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan, penjaminan keamanan pangan dan higienitas makanan, pengelolaan limbah dan sampah, penyediaan infrastruktur listrik, transportasi, dan telekomunikasi, serta pemberdayaan masyarakat, petani, dan peternak lokal serta nelayan. Proyek Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis akan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di 38 provinsi 2. Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat Proyek Strategis Nasional Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan pendidikan berkualitas berbasis asrama, mencakup jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, rentan (desil 1–2), penyandang disabilitas, serta anak-anak yang tidak atau belum bersekolah. Proyek Strategis Nasional ini

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		menekankan pendidikan formal yang disertai penanaman karakter, kepemimpinan, dan ketangguhan melalui pengembangan sarana prasarana, kurikulum yang komprehensif, tenaga pendidik yang inklusif, serta pengasuhan yang optimal. Pelaksanaan program dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Kementerian Pekerjaan Umum, serta didukung oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan pemerintah daerah. 3. Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Proyek Strategis Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa/kelurahan, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Proyek strategis nasional ini dilaksanakan di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Koperasi akan menjalankan usaha seperti sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan/*cold storage*, logistik, serta usaha lain yang disesuaikan dengan potensi lokal. Tahun 2025 difokuskan pada pembentukan koperasi, pemetaan potensi usaha, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, serta penyusunan peta jalan sebagai dasar pengembangan program. Selanjutnya, tahun 2026–2029 diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, penguatan kelembagaan dan kemitraan koperasi dengan berbagai pihak. Proyek ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi serta kementerian/lembaga lainnya bersama pemerintah daerah. 4. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan bertujuan untuk membangun ekosistem digitalisasi pembelajaran di sekolah dengan menyediakan perangkat dan infrastruktur pendukung. Komponen utama dalam proyek strategis nasional ini meliputi penyediaan *smartboard*, laptop, media penyimpanan konten (misalnya *external harddisk drive*), serta akses internet satelit dan panel surya untuk satuan pendidikan yang tidak terhubung ke internet dan/atau akses listrik. Selain itu, proyek strategis nasional ini juga mencakup penyediaan konten pembelajaran berkualitas melalui platform digital yang sudah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025
		Kementerian Agama yang dirancang untuk mendukung proses belajar-mengajar secara interaktif dan sesuai dengan perkembangan zaman serta berfokus pada kebutuhan belajar siswa. Untuk memastikan efektivitas digitalisasi pendidikan, diselenggarakan pelatihan berjenjang mulai dari pembekalan fasilitator nasional sampai dengan guru di tingkat satuan pendidikan. Proyek Strategis Nasional Digitalisasi Pendidikan akan menyasar satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kementerian Agama di 38 provinsi. 5. Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan melalui integrasi Program Kartu Kesejahteraan dan Program Kartu Usaha Afirmatif untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Proyek strategis nasional ini mencakup dua pilar utama yaitu Program Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan tunai, barang, dan subsidi tepat sasaran (seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, subsidi energi, dan transportasi murah). Pilar kedua adalah Program Kartu Usaha Afirmatif yang bertujuan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan ketenagakerjaan, vokasi, kewirausahaan, pendampingan teknis dan manajerial, serta akses terhadap pasar dan permodalan. Program strategis nasional ini dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya, dengan menggunakan satu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai rujukan. Proyek Strategis Nasional Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan bersinergi dengan program prioritas nasional lainnya antara lain Makan Bergizi Gratis, Penyediaan Perumahan, Hilirisasi Industri, Sekolah Rakyat, dan Swasembada Pangan. Pelaksanaan pengentasan kemiskinan dilakukan di seluruh Indonesia dengan provinsi prioritas Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. 6. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu Perencanaan dan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pada periode RPJMN Tahun 2020–2024, instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik telah terbangun di dua kota, yaitu

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025

Surabaya dan Surakarta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 menargetkan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik di 10 kota lainnya, yaitu DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu juga akan dilaksanakan di kota-kota lain yang diprioritaskan pada kota-kota dengan kapasitas timbulan sampah di atas 1.000 ton/hari. Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu mencakup pembangunan instalasi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Selain itu juga membuka opsi penerapan teknologi pengolahan sampah lainnya yang ramah lingkungan, serta memperluas cakupan lokasi proyek sesuai dengan tingkat urgensi dan kriteria kelayakan teknis, lingkungan, dan ekonomi. Untuk mendukung keberlanjutan, Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Terpadu perlu disertai perbaikan tata kelola mulai dari sinergi perencanaan, program prioritas perubahan perilaku, regulasi, peningkatan kapasitas operator, membentuk kelembagaan yang sesuai, penegakan hukum, dan pendanaan yang berkelanjutan baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai dengan rencana, pemerintah memberikan kemudahan dalam bentuk perijinan maupun selain perijinan menurut peraturan perundangan. Pemerintah juga melakukan langkah-langkah pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaannya serta menyelenggarakan manajemen risiko pembangunan nasional pada proyek strategis nasional.

Selain pelaksanaan proyek strategis nasional, upaya penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan tinggi berkelanjutan, juga didukung oleh beberapa kegiatan prioritas utama. Hal tersebut merupakan kebijakan yang mengintegrasikan kontribusi dari berbagai pihak baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, swasta dan *stakeholders* lainnya, yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

No	Kegiatan Prioritas Utama RKP Tahun 2025
1	Penguatan Pers Dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend To Invest*

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah
		4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan
		5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan
		6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya
		7	Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)
		8	Pengembangan Pangan Hewani
		9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati
		10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan
		11	Peningkatan Penyediaan Energi
		12	Perluasan Akses Dan Jangkauan Pelayanan Energi
		13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan
		14	Konservasi Sumber Daya Air
		15	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir
		16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS
		17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa
		18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital
		19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital Serta Sektor Strategis Lainnya
		20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan
		21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, Serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik
		22	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau
		23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut
		24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan
		25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut
		27	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital
		28	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya
		29	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi
		30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
		31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena
		32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
		33	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo
		34	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim
		35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
		36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Yang Berkualitas (PHTC)
		37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
		38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul
		39	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, *In-Service Training*), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja
		40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi
		41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi
		42	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya
		43	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi
		44	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga
		45	Penurunan Kematian Ibu dan Anak

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		46	Pencegahan dan Penurunan *Stunting*
		47	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis
		48	Pemberian Makan Bergizi Untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
		49	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi
		50	Penuntasan TBC
		51	Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*
		52	Investasi Pelayanan Kesehatan Primer
		53	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses
		54	Produksi dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
		55	Pengembangan Hilirisasi Nikel
		56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga
		57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit
		58	Pengembangan Hilirisasi Timah
		59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
		60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa
		61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut
		62	Pengembangan Industri Kimia
		63	Pembangunan Industri Semikonduktor
		64	Pengembangan Industri Dirgantara
		65	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
		66	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja
		67	Pengembangan Kek Sei Mangkei
		68	Pengembangan KIT Batang
		69	Pengembangan KI Weda Bay
		70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan

No	Perihal Perubahan	Pemutakhiran RKP Tahun 2025	
		71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif
		72	Peningkatan Kemandirian Melalui Kartu Usaha Afirmatif
		73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan Ibu Kota Nusantara
		74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU
		75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa
		76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
		77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN
		78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas
		79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan
		80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
		81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa
		82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan
		83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 257144 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

MATRIKS PEMBANGUNAN
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

SK No 154161 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS PEMBANGUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025

SASARAN PEMBANGUNAN PEMUTAKHIRAN RKP TAHUN 2025

Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
01 - Pertumbuhan ekonomi	persen	5,03	5,3	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02 - GNI Per Kapita	USD	4.810	5.410	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03 - Kontribusi PDB Maritim	persen	7,9 (2022)	8,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
04 - Kontribusi PDB manufaktur	persen	18,98	20,8	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05 - Tingkat Kemiskinan	persen	8,57	7,0 – 8,0	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06 - Tingkat Kemiskinan Ekstrem	persen	1,47	0[a]	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
07 - Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	9,03	4,5 – 5,0	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

SK No 120313 C

Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Koordinator/ Pengampu
08 - Rasio gini		0,381	0,379 - 0,382	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
09 - Kontribusi PDRB KTI	persen	20,9	21,4	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
10 - Nilai Tukar Petani (Kumulatif)		119,62	115 - 120	018 - Kementerian Pertanian
11 - Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif)		101,88	105 - 108	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
12 - *Global Power Index*	peringkat	34 (2023)	33	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
13 - Indeks Modal Manusia		0,54 (2023)	0,56	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
14 - Penurunan intensitas emisi GRK	persen	34,09 (2022)	35,53	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
15 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		72,54 (2023)	76,49	131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan

Keterangan: a) Target menggunakan US$ 1,90 PPP, sedangkan apabila menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5–1 persen.

PRIORITAS NASIONAL 1: MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01 PN: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	01 - Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	01 - Indeks Demokrasi Indonesia		79,51 (2023)	81,69–85,23	1.170.120,0	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Hak Asasi Manusia		2,70 (2023)	2,75		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.01 PP: Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional	01 - Menguatnya Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kebebasan		77,46 (2023)	84,12–87,76	474.805,5	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila		77,73 (2023)	79,37		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
01.01.01 KP: Penguatan Wawasan Ideologi Pancasila di Kalangan Penyelenggara Negara	01 - Terwujudnya internalisasi, institusionalisasi, dan aktualisasi ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara	01 - Jaminan kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara		84,87 (2023)	82,33–87,01	131.183,5	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Persentase implementasi Peta Jalan Pembinaan Ideologi Pancasila	persen	- (indikator baru)	40		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.01.01.01 PRO-P: Internalisasi dan Institusionalisasi Pancasila							
01.01.01.02 PRO-P: Aktualisasi Pancasila							
01.01.01.03 PRO-P: Pemantapan Kebijakan Pelaksanaan Pancasila pada Penyelenggaraan Negara							
01.01.02 KP: Pelaksanaan Gerakan Nasional KITA BERSAUDARA	01 - Meningkatnya kohesivitas sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat multikultural yang berwawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila	01 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 1 Ketuhanan yang Maha Esa		78,32 (2023)	80	311.349,9	122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		02 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 2 Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		81,46 (2023)	83		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		03 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 3 Persatuan Indonesia		81,18 (2023)	83		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		04 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 4 Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan		79,35 (2023)	81		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Indeks Aktualisasi Pancasila - Pengamalan Sila 5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		68,33 (2023)	70		122 - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
		06 - Persentase konten komunikasi publik yang dapat memperkuat kohesivitas sosial berlandaskan nilai-nilai Pancasila	persen	- (indikator baru)	70		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.01.02.01 PRO-P: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat							
01.01.02.02 PRO-P: Penguatan Kohesivitas Sosial melalui Pengembangan Ekosistem Teknologi Informasi Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila							
01.01.02.03 PRO-P: Peningkatan Semangat Persatuan, Kesatuan, dan Kebangsaan pada Generasi Muda							
01.01.03 KP: Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah	01 - Meningkatnya kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah	01 - Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional		82,88 (2023)	85,34–89,87	32.272,1	064 - Lembaga Ketahanan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.01.03.01 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Pengaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah							
01.01.03.02 PRO-P: Penyelenggaraan *Training of Trainers* Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan							
01.02 PP: Penguatan Komunikasi Publik dan Media	01 - Terciptanya ekosistem komunikasi, kebebasan pers dan media massa yang berintegritas	01 - Indeks Kemerdekaan Pers		69,36	70,00	451.506,6	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Indeks Keterbukaan Informasi Publik		75,65	76,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik		69,80 (2023)	71		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01 KP: Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	01 - Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri	01 - Kualitas siaran televisi yang memenuhi standar berlaku		3,15	3,18	208.216,7	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Persentase penurunan kejadian intervensi dan kekerasan pers	persen	65,8	66,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase independensi pers dari kelompok kepentingan yang kuat	persen	65,69	66,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase jumlah perusahaan pers dan media massa yang memiliki tata kelola baik	persen	63,74	64,00		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase peningkatan kepatuhan terhadap etika pers	persen	70,12	70,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase peningkatan akses pers dan media bagi kelompok rentan	persen	69,08	69,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		07 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jurnalistik dan pers	orang	2.015	690		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Lembaga Pers							
01.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Etika Insan Pers							
01.02.01.03 PRO-P: Penyehatan Media Arus Utama							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.02.02 KP: Penguatan Sistem Komunikasi dan Kesetaraan Masyarakat atas Informasi Publik	01 - Terbangunnya sistem komunikasi dan jaminan kesetaraan hak masyarakat atas informasi publik	01 - Jumlah kebijakan yang mendukung implementasi SKPN	dokumen	11	1	243.289,8	059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		02 - Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang kominfo yang bertalenta digital	orang	118.284	40.100		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		03 - Persentase akses dan diseminasi informasi publik kepada masyarakat	persen	77,48	77,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		04 - Persentase partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik	persen	75,68	77,73		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		05 - Persentase badan publik dalam tata kelola informasi publik yang baik	persen	76,25	76,50		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
		06 - Persentase jaminan hukum atas akses informasi publik	persen	79,92	80,17		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Persentase kepatuhan badan publik dalam menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik	persen	76,33	76,58		059 - Kementerian Komunikasi dan Digital
01.02.02.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Sistem Komunikasi Publik dan Pembangunan Nasional							
01.02.02.02 PRO-P: Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik							
01.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang Bertalenta Digital							
01.03 PP: Penguatan Lembaga Demokrasi	01 - Terwujudnya lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi		76,46 (2023)	79,46–82,90	8.405,2	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
01.03.01 KP: Penguatan Fungsi Legislasi Lembaga Legislatif	01 - Terwujudnya kinerja lembaga legislatif yang semakin meningkat sebagai pilar demokrasi	01 - Kinerja lembaga legislatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi		53,92 (2023)	55,59–58,84	8.405,2	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.03.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Organisasi Lembaga Legislatif							
01.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan Proses Demokrasi di Daerah							
01.03.02 KP: Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	01 - Terwujudnya kinerja penyelenggara pemilu yang semakin meningkat dalam mendukung demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial	01 - Persentase hasil penindakan pelanggaran pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel a)	persen	- (indikator baru)	0	0,0	115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM Lembaga Pelaksana Pemilu							
01.03.02.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu							
01.04 PP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	01 - Terwujudnya partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat	01 - Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Kesetaraan		83,74 (2023)	81,55–85,08	158.000,0	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.04.01 KP: Penyediaan Dana Abadi dan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	01 - Terwujudnya penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan dalam menjalankan peran advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan berkategori baik	daerah	- (indikator baru)	12	3.500,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
01.04.01.01 PRO-P: Penyusunan Regulasi Dana Abadi Organisasi Kemasyarakatan							
01.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM, Kelembagaan, dan Lingkungan Pendukung Masyarakat Sipil							
01.04.02 KP: Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	01 - Terwujudnya penguatan jaminan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik untuk menjalankan peran pemberdayaan dan kontrol sosial	01 - Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan pendidikan pemilih	orang	- (indikator baru)	55.300	154.500,0	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	orang	900	16.590		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
01.04.02.01 PRO-P: Penguatan Kesetaraan Akses Kelompok Rentan pada Sektor Politik							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.04.02.02 PRO-P: Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu							
01.05 PP: Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM	01 - Terwujudnya regulasi dan kelembagaan berperspektif HAM serta perlindungan HAM terutama tapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Indeks HAM Dimensi Hak Sipil dan Politik		2,60 (2023)	2,65	77.402,7	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Indeks HAM Dimensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya		2,80 (2023)	2,85		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.01 KP: Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif, dan Berperspektif Gender	01 - Terwujudnya kebijakan dan kelembagaan yang berperspektif hak asasi manusia, humanis, inklusif, dan gender	01 - Persentase K/L/D dan masyarakat yang mendapatkan penguatan HAM	persen	- (indikator baru)	50,05	26.704,5	136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
		02 - Jumlah kebijakan diskriminatif yang ditindaklanjuti	kebijakan	10	10		074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
01.05.01.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia, Humanis, Inklusif, dan Gender							
01.05.01.02 PRO-P: Pendidikan HAM bagi Aktor Negara dan Nonnegara							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
01.05.02 KP: Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Penghapusan Praktik Diskriminasi	01 - Terwujudnya Perlindungan HAM dan penghapusan praktik diskriminasi terutama tetapi tidak terbatas pada kelompok rentan	01 - Tingkat efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	37,6 (2023)	39,6	50.698,1	074 - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
		03 - Persentase capaian aksi RANHAM	persen	81,7	75		136 - Kementerian Hak Asasi Manusia
01.05.02.01 PRO-P: Pelaksanaan Perlindungan HAM dan Penghapusan Praktik Diskriminasi							
01.05.02.02 PRO-P: Penguatan Mekanisme Penanganan Pengaduan HAM pada K/L/D							

Keterangan: a) Penghitungan indikator hanya dilakukan pada tahun tahapan pemilu.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL 2: MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02 PN: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01 - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan	01 - Asia Power Index (*Diplomatic Influence*)		65,6	65,7	193.737.059,8	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Asia Power Index (*Military Capability*)		15,7	16		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		03 - Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	persen	62,8 (2020)	67,5		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		04 - *Global Cybersecurity Index*		100	100		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
		05 - Indeks Keamanan Laut Nasional		59	60		034 - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Pangan (IKP)		71,2	73,2		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
		02 - Pertumbuhan PDB pertanian, kehutanan, dan perikanan	persen	0,67	2,20		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Energi		6,64	6,77		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatkan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan nexus pangan, energi dan air (FEW Nexus)	01 - Indeks Ketahanan Air Nasional		3,48 (2022)	3,50		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	05 - Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	01 - Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (Peringkat GIEI)	peringkat	3 (2023)	3		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Indonesia Blue Economy Index (IBEI)		34,25 (2023)	38,76		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		03 - Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	peringkat	45 (2023)	43		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	06 - Terwujudnya transformasi ekonomi hijau	01 - Indeks Ekonomi Hijau		60,37 (2023)	68,34		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		73,53	76,49		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,35 (2020)	0,44		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01 PP: Pembangunan Postur Pertahanan	01 - Terwujudnya pondasi kemampuan pertahanan berdaya gentar kawasan	01 - Persentase pemenuhan pembangunan kekuatan pokok TNI	persen	30,3	30,3	44.738.971,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01 KP: Melanjutkan Program Penguatan Postur Pertahanan dengan Konsep Optimum Essential Force dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Menjaga Kedaulatan NKRI	01 - Terwujudnya kelanjutan program penguatan postur pertahanan dengan konsep *optimum essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI	01 - Persentase pemenuhan alutsista	persen	30,3	30,3	41.706.192,8	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.01.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Strategis Luar Negeri							
02.01.01.02 PRO-P: Pengadaan Alutsista Integratif							
02.01.01.03 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Darat							
02.01.01.04 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Laut							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.01.05 PRO-P: Pengadaan Alutsista Matra Udara							
02.01.01.06 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan							
02.01.02 KP: Meningkatkan Kekuatan TNI di Daerah Perbatasan dan Pulau Terluar	01 - Terwujudnya peningkatan kekuatan TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar	01 - Persentase penurunan pelanggaran terhadap kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa	persen	51,3	40	0,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pertahanan Perbatasan							
02.01.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarpras Pendukung Pertahanan di Perbatasan							
02.01.03 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi dan Memperkuat Kapabilitas Badan Pertahanan Siber	01 - Terwujudnya penguatan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber	01 - Persentase pemenuhan peralatan siber	persen	67,5	67,5	10.010,1	012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.03.01 PRO-P: Pengadaan Alutsista Siber							
02.01.03.02 PRO-P: Pendidikan dan Latihan							
02.01.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit	01 - Persentase pemenuhan sarpras rumah dinas	persen	69,42	69,42	1.208.133,9	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.04.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Prajurit							
02.01.04.02 PRO-P: Pendidikan Tinggi Pertahanan							
02.01.05 KP: Meningkatkan Kesiapan Alpalhankam melalui Pemeliharaan dan Perawatan	01 - Terwujudnya peningkatan kesiapan alpalhankam melalui pemeliharaan dan perawatan	01 - Persentase pemenuhan harwat alutsista	persen	49,7	49,7	1.814.634,4	012 - Kementerian Pertahanan
02.01.05.01 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Darat							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.01.05.02 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Laut							
02.01.05.03 PRO-P: Harwat Alutsista Matra Udara							
02.02 PP: Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	01 - Terwujudnya industri pertahanan yang sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing	01 - *Ranking* industri pertahanan (SIPRI top 100)	peringkat	>100	<100	9.308.631,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01 KP: Mempercepat Peningkatan Kemampuan Industri Strategis Nasional dalam Memenuhi Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri	01 - Terwujudnya percepatan peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi TNI/Polri	01 - Persentase peningkatan kemampuan industri pertahanan	persen	60	68	19.890,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.01.01 PRO-P: Litbang Alpalhankam							
02.02.01.02 PRO-P: First Article							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.02.02 KP: Meningkatkan Komitmen untuk Menggunakan Produk-produk Industri Strategis Nasional dan Mendayagunakan Sebesar Mungkin Kapasitas Industri Strategis Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri	01 - Persentase pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alpalhankam yang melibatkan industri pertahanan	persen	100	100	9.288.741,2	012 - Kementerian Pertahanan
02.02.02.01 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Pertahanan Negara							
02.02.02.02 PRO-P: Pengadaan Alpalhankam Industri Pertahanan bidang Keamanan Negara							
02.02.03 KP: Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema *Spend to Invest*	01 - Terwujudnya transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema *spend to invest*	01 - Persentase perjanjian Imbal Dagang Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) yang terlaksana dalam pengadaan alpalhankam luar negeri	persen	100	100	0,0	012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.02.03.01 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Darat							
02.02.03.02 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Laut							
02.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Alpalhankam *Spend to Invest* Matra Udara							
02.03 PP: Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung	01 - Terwujudnya penguatan komponen cadangan dan komponen pendukung	01 - Persentase sumber daya nasional yang dimanfaatkan menjadi kekuatan pertahanan	persen	100	100	112.488,0	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.01 KP: Penguatan Konsep dan Praktik Wawasan Nusantara bagi Seluruh Rakyat Indonesia dan Memperkuat Komponen Cadangan	01 - Terwujudnya penguatan konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat komponen cadangan	01 - Persentase kader bela negara yang telah terbentuk	persen	- (indikator baru)	10	108.312,4	012 - Kementerian Pertahanan
		02 - Persentase kelulusan komponen cadangan dengan nilai baik	persen	100	100		012 - Kementerian Pertahanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.03.01.01 PRO-P: Bela Negara							
02.03.01.02 PRO-P: Pembangunan Komcad							
02.03.02 KP: Pembinaan Komponen Pendukung untuk Penguatan Pertahanan Negara	01 - Terwujudnya pembinaan komponen pendukung untuk penguatan pertahanan negara	01 - Persentase penataan dan pembinaan komponen pendukung	persen	- (indikator baru)	100	4.175,6	012 - Kementerian Pertahanan
02.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Komduk							
02.03.02.02 PRO-P: Penataan Komduk							
02.04 PP: Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya sistem deteksi dini yang mampu mendukung keamanan negara	01 - *Fragile State Index*		63,7	62,8	268.465,6	050 - Badan Intelijen Negara
		02 - *Global Terrorism Index*		3,99	3,95		113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.01 KP: Melakukan Sinergi Pendekatan Sejarah, Budaya, Kearifan Lokal, dan Sosial Ekonomi, Serta Paham Kebhinekaan di Daerah-daerah yang Rawan Konflik Serta Rentan Isu Separatisme	01 - Terwujudnya sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme	01 - Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam aspek wawasan kebangsaan pada wilayah konflik dan rentan	kegiatan	5	5	1.800,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
02.04.01.01 PRO-P: Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Aspek Wawasan Kebangsaan pada Wilayah Konflik dan Rentan							
02.04.02 KP: Penguatan Kapabilitas Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Dalam Negeri	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan dalam negeri	01 - Cakupan deteksi dini intelijen	persen	100	100	203.728,0	050 - Badan Intelijen Negara
02.04.02.01 PRO-P: Penguatan Operasi Intelijen dan Kontra Intelijen							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.02.02 PRO-P: Penguatan SDM Intelijen							
02.04.03 KP: Koordinasi Sinergi Antar Instrumen Pertahanan dan Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Aksi Terorisme	01 - Meningkatnya sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme	01 - Persentase instansi yang berpartisipasi dalam sinergisitas penanggulangan terorisme	persen	97,8	100	28.164,4	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.03.01 PRO-P: Kolaborasi dan Penguatan Instrumen Penanggulangan Terorisme							
02.04.03.02 PRO-P: Penguatan Kesiapsiagaan Nasional							
02.04.04 KP: Penguatan Kontra Radikalisasi	01 - Terwujudnya penguatan kontra radikalisasi	01 - Indeks Risiko Terorisme (Target)		51,87	51,77	20.314,3	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.04.01 PRO-P: Penguatan Intelijen dan Kontra Terorisme							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.04.05 KP: Penguatan Deradikalisasi Terorisme	01 - Terwujudnya penguatan deradikalisasi terorisme	01 - Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)		30,01	29,91	13.355,1	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.05.01 PRO-P: Deradikalisasi Terorisme							
02.04.06 KP: Penguatan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis	01 - Terwujudnya penguatan pusat analisis dan pengendalian krisis	01 - Persentase peningkatan kemampuan pusat analisis dan pengendalian krisis	persen	30	40	1.104,0	113 - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
02.04.06.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Pusat Analisis dan Pengendalian Krisis (Terorisme)							
02.05 PP: Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya interaksi dan transaksi siber, persandian, dan sinyal yang aman	01 - Indeks Keamanan dan Ketahanan Siber		- (indikator baru)	0,69	559.182,4	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.01 KP: Memperkuat Keamanan Teknologi Informasi Telekomunikasi	01 - Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana keamanan siber, sandi, dan sinyal nasional	01 - Persentase pemanfaatan inovasi hasil perekayasaan di bidang keamanan siber dan sandi	persen	- (indikator baru)	33	523.982,8	051 - Badan Siber dan Sandi Negara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.05.01.01 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.01.02 PRO-P: Sertifikasi Produk Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.02 KP: Pengembangan SDM, Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terpenuhinya SDM keamanan siber dan sandi nasional	01 - Rata-Rata Competency Gap Index (CGI) SDM siber dan sandi	persen	- (indikator baru)	16	3.895,8	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.02.01 PRO-P: Pelatihan dan Peningkatan Profesionalisme SDM Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Budaya Keamanan, Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.03 KP: Penguatan Kelembagaan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	01 - Terwujudnya kelembagaan keamanan siber dan sandi nasional	01 - Nilai kematangan keamanan siber PSE		2,59	2,77	26.889,5	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
		02 - Nilai kematangan penyelenggara persandian		- (indikator baru)	3		051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.03.01 PRO-P: Kebijakan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.05.03.02 PRO-P: Kerjasama Antar Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.03.03 PRO-P: Peningkatan Maturitas Lembaga Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.04 KP: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal Strategis	01 - Terwujudnya operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis yang efektif	01 - Indeks Kesiapsiagaan dan Ketahanan Siber Nasional		- (indikator baru)	0,70	4.414,3	051 - Badan Siber dan Sandi Negara
02.05.04.01 PRO-P: Operasi Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.05.04.02 PRO-P: Penanganan Kejahatan Siber, Sandi, dan Sinyal							
02.06 PP: Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi	01 - Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia	01 - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut		67	74,5	1.247.691,0	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut		48	58,5		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut		67	67,5		119 - Badan Keamanan Laut

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut		33	33,2		119 - Badan Keamanan Laut
		05 - Indeks Survei dan Pemetaan Hidro-Oseanografi		54,22	54,22		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.01 KP: Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Terwujudnya penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	01 - Persentase kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut	persen	25	50	405,0	119 - Badan Keamanan Laut
02.06.01.01 PRO-P: Kerja Sama Keamanan Laut							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.01.02 PRO-P: Kerja Sama Patroli Internasional							
02.06.02 KP: Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli		68	68,2	323.960,6	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase pemenuhan postur Bakamla RI	persen	5,19	7		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - Indeks Kesiapan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP		80.00	80.00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.02.01 PRO-P: Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut							
02.06.02.02 PRO-P: Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut							
02.06.02.03 PRO-P: Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.03 KP: Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point*	01 - Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut, ALKI, dan *choke point*	01 - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan		68	68,1	873.267,2	119 - Badan Keamanan Laut
		02 - Persentase kesesuaian rencana patroli nasional	persen	100	100		119 - Badan Keamanan Laut
		03 - Indeks Operasi Armada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		91.00	92.00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.06.03.01 PRO-P: Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut							
02.06.03.02 PRO-P: Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat							
02.06.04 KP: Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut	01 - Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut	01 - Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan	persen	4,2	4,2	47.537,0	119 - Badan Keamanan Laut
02.06.04.01 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.06.04.02 PRO-P: Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel							
02.06.05 KP: Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Modernisasi Peralatan dan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Hidro-Oseanografi	01 - Terwujudnya pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan hidro-oseanografi	01 - Persentase realisasi rencana luas wilayah perairan Indonesia (pedalaman, kepulauan, teritorial, ZEE, dan landas kontinen) yang diperbarui melalui surta hidrografi dan oseanografi	persen	54,22	54,22	2.521,2	012 - Kementerian Pertahanan
		02 - Persentase pemenuhan peralatan dan sarpras penyelenggaraan hidro oseanografi	persen	42,1	42,1		012 - Kementerian Pertahanan
02.06.05.01 PRO-P: Survei dan Pemetaan							
02.06.05.02 PRO-P: Pengadaan Alat dan Sarpras Hidros							
02.07 PP: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	01 - Terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban yang terkendali dan kondusif	01 - Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3,39	3,80	19.498,6	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.07.01 KP: Melakukan Peningkatan Kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan Pengamanan Objek Vital	01 - Terwujudnya aparat keamanan yang memiliki kemampuan Penanganan Konflik Sosial dan pengamanan objek vital sesuai dengan standar dan humanis	01 - Indeks Harkamtibmas		67,5	67,6	12.636,8	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.01.01 PRO-P: Pengamanan Konflik Sosial yang Profesional dan Humanis							
02.07.01.02 PRO-P: Pengamanan Obyek Vital							
02.07.02 KP: Melakukan Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana	01 - Terwujudnya penyelesaian tindak pidana oleh Polri secara efektif, efisien dan tepat sasaran	01 - *Crime Rate*	per 100.000 penduduk	43	40	6.861,8	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - *Clearance Rate* Tindak Pidana	persen	74	75		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.07.02.01 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Transnasional							
02.07.02.02 PRO-P: Penyelesaian Tindak Pidana Konvensional							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.08 PP: Profesionalisme Pelayanan Kepolisian	01 - Terwujudnya profesionalisme pelayanan kepolisian	01 - Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian		85,77	86,00	773.876,5	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01 KP: Melakukan Peningkatan Kesiapan Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	01 - Terpenuhinya kebutuhan almatsus dan sarana prasarana Polri dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga kepolisian	01 - Tingkat pemenuhan *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE)	persen	- (indikator baru)	80	770.905,4	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.01.01 PRO-P: Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian							
02.08.01.02 PRO-P: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Layanan Kepolisian							
02.08.02 KP: Melakukan Peningkatan Kualitas dan Digitalisasi Layanan Kepolisian	01 - Terwujudnya peningkatan layanan kepolisian yang berkualitas dan mudah diakses yang didukung oleh teknologi terbaru	01 - Indeks SPBE		3,00	3,40	1.530,9	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan Polri	persen	85,1	86		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Kepolisian							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.08.02.02 PRO-P: Digitalisasi Layanan Kepolisian							
02.08.03 KP: Melakukan Peningkatan Jumlah dan Proporsi Polwan	01 - Terwujudnya kesetaraan gender di lingkungan Polri melalui penyesuaian rasio jumlah SDM dan pembaharuan *work arrangement*	01 - Jumlah pusat pendidikan Polwan	unit	1	1	0,0	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
		02 - Jumlah kapasitas pusat pendidikan Polwan	orang	805	900		060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.03.01 PRO-P: Rekrutmen Personil Polri Berbasis Gender							
02.08.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Penunjang Karier bagi Polwan							
02.08.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan Pelatihan Anggota Polri	01 - Terwujudnya SDM Polri yang memiliki standar kompetensi tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri	01 - Indeks Profesionalitas SDM Polri		- (indikator baru)	70,5	1.440,2	060 - Kepolisian Negara Republik Indonesia
02.08.04.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tematik Personil Polri							
02.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Personil Polri							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09 PP: Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi	01 - Terpeliharanya hubungan internasional yang kondusif dengan terselenggaranya diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi	01 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Perbatasan Negara		- (indikator baru)	0,546	635.094,6	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Pengaruh dan Peran di Dunia Internasional		4,97 (2023)	4,10 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional		4,07 (2024)	4,10 (Skala 5)		011 - Kementerian Luar Negeri
		04 - Indeks Efektivitas Diplomasi Ekonomi		75	76		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.01 KP: Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema *Good Neighbour Policy*	01 - Terlaksananya percepatan penyelesaian perjanjian batas maritim dan darat Indonesia dengan negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*	01 - Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga		52,43	69,75	15.623,8	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Kemajuan Penyelesaian Perundingan Penegasan Batas Darat Negara		61,13	63,00		010 - Kementerian Dalam Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.01.01 PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara							
02.09.01.02 PRO-P: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara							
02.09.02 KP: Penguatan Kepemimpinan di Tingkat Global melalui Peran Aktif dalam Fora dan Organisasi Internasional, Pembangunan Postur Diplomasi, serta Pelibatan Diaspora Indonesia	01 - Meningkatnya peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia dalam forum dan organisasi internasional, terbangunnya postur diplomasi, serta meningkatnya pelibatan diaspora Indonesia	01 - Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama multilateral	persen	75	75	3.557,5	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase gagasan, prakarsa, atau rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri regional dan/atau multilateral	persen	75	75		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Persentase keberhasilan pencalonan Indonesia/wakil Indonesia pada posisi strategis di organisasi internasional	persen	75	75		011 - Kementerian Luar Negeri
		04 - Angka pembangunan postur diplomasi		0	5		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase peningkatan akses dan fasilitas bagi diaspora Indonesia	persen	15	20		011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.02.01 PRO-P: Penguatan kepemimpinan Indonesia dalam Organisasi/Fora Kerja Sama Internasional, serta Peran Aktif dalam Perdamaian Dunia							
02.09.02.02 PRO-P: Strategi Pembangunan Postur Diplomasi							
02.09.02.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Partisipasi Diaspora dalam Agenda Pembangunan Nasional melalui Pemberian Insentif							
02.09.03 KP: Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	01 - Menguatnya kerja sama pembangunan internasional	01 - Persentase kebijakan di bidang kerja sama pembangunan internasional Indonesia yang telah sesuai dengan prioritas nasional	persen	0	20	98.192,5	011 - Kementerian Luar Negeri
02.09.03.01 PRO-P: Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan Internasional							
02.09.03.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kerja Sama Pembangunan Internasional							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.04 KP: Penguatan Diplomasi Ekonomi	01 - Terwujudnya penguatan diplomasi ekonomi	01 - Persentase kesepakatan kerjasama terkait diplomasi ekonomi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam negeri	persen	75	80	44.684,0	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Persentase keberhasilan promosi, pembentukan norma, dan kesepakatan diplomasi ekonomi terutama pada sektor prioritas	persen	75	80		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan	PTA/FTA/CEPA	19	23		090 - Kementerian Perdagangan
02.09.04.01 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang adaptif							
02.09.04.02 PRO-P: Diplomasi Ekonomi yang strategis dengan mitra utama							
02.09.04.03 PRO-P: Diplomasi Ekonomi dengan negara tetangga, perbatasan, regional, dan sub regional							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.09.05 KP: Kerja Sama Internasional tentang Ketenagakerjaan dan Pergerakan Tenaga Kerja Terampil	01 - Terwujudnya perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang untuk perluasan kesempatan kerja dengan keahlian menengah dan tinggi	01 - Jumlah kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan tenaga kerja terampil	kesepakatan	0	7	189.604,9	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
02.09.05.01 PRO-P: Mengembangkan dan Memperkuat Proses Migrasi Tenaga Kerja Berbasis Kawasan							
02.09.05.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja							
02.09.06 KP: Proses Aksesi Indonesia ke OECD	01 - Terwujudnya aksesi Indonesia ke OECD	01 - Persentase pemenuhan pelaksanaan penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen *initial memorandum* kepada Sekretariat OECD (2024-2025)	persen	- (indikator baru)	100	283.432,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Persentase dokumen *initial memorandum* yang selesai proses reviu dari Komite OECD (2025-2028)	persen	- (indikator baru)	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang mendukung percepatan keanggotaan Indonesia ke OECD (2025- 2029)	persen	- (indikator baru)	0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.09.06.01 PRO-P: Penilaian mandiri, penyusunan dan penyampaian dokumen *Initial Memorandum* kepada Sekretariat OECD							
02.09.06.02 PRO-P: Penyelesaian proses reviu Initial Memorandum dari Komite OECD							
02.09.06.03 PRO-P: Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD							
02.10 PP: Swasembada Pangan	01 - Meningkatnya ketersediaan pangan secara berkelanjutan berbasis lumbung pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	91,4	97,3	99.454.546,6	125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, dan penanganan kerawanan pangan	01 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi		93,5	94		125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	persen	8,27	7,21		131 - Kementerian Koordinator Bidang Pangan
	03 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan tata kelola sistem pangan	01 - Pertumbuhan nilai tambah per tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	persen	3,4 (2022)	3,5		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Indeks Kesejahteraan Petani (IKP)		0,693 (2023)	0,7445		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Kalimantan Tengah	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Kalimantan Tengah	ton	23.578	196.984	270.343,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Kalimantan Tengah	ha	2.042 (2023)	146.806		018 - Kementerian Pertanian
02.10.01.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.01.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							
02.10.01.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah							
02.10.02 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Utara	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen hortikultura di KSPP Sumatera Utara	01 - Peningkatan produksi hortikultura KSPP Sumatera Utara	ton	481	500	0,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen hortikultura KSPP Sumatera Utara	ha	16,02	150		018 - Kementerian Pertanian
02.10.02.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							
02.10.02.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							
02.10.02.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Utara							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.03 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Sumatera Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Sumatera Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Sumatera Selatan	ton	- (indikator baru)	65.724	551.042,8	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Sumatera Selatan	ha	- (indikator baru)	28.568		018 - Kementerian Pertanian
02.10.03.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.03.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.03.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Sumatera Selatan							
02.10.04 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	33.624	1.041,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	10.930		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Nusa Tenggara Timur	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ton	- (indikator baru)	49.100		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Nusa Tenggara Timur	ha	- (indikator baru)	9.048		018 - Kementerian Pertanian
02.10.04.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.04.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.04.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Nusa Tenggara Timur							
02.10.05 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/ Lumbung Pangan Papua	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen jagung di KSPP Papua	01 - Peningkatan produksi jagung KSPP Papua	ton	- (indikator baru)	1.310	0,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen jagung KSPP Papua	ha	- (indikator baru)	189		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.05.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.05.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.05.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua							
02.10.06 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	01 - Meningkatnya produksi dan luas panen padi di KSPP Papua Selatan	01 - Peningkatan produksi beras KSPP Papua Selatan	ton	- (indikator baru)	109.308	2.126,0	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Peningkatan luas panen padi KSPP Papua Selatan	ha	- (indikator baru)	75.621		018 - Kementerian Pertanian
02.10.06.01 PRO-P: Geospasial KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							
02.10.06.02 PRO-P: *On Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							
02.10.06.03 PRO-P: *Off Farm* KSPP/Lumbung Pangan Papua Selatan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.07 KP: Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	01 - Peningkatan produksi bahan pangan utama	01 - Lahan baku sawah yang dicetak	ribu ha	- (indikator baru)	42	16.422.470,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Luas lahan sawah yang ditingkatkan indeks pertanaman	ribu ha	- (indikator baru)	6,9		018 - Kementerian Pertanian
02.10.07.01 PRO-P: Peningkatan Luas Lahan Pertanian (Ekstensifikasi)							
02.10.07.02 PRO-P: Peningkatan Daya Guna Lahan Pertanian (Intensifikasi)							
02.10.07.03 PRO-P: Infrastruktur Pendukung KSPP/Lumbung Pangan Lainnya							
02.10.08 KP: Penguatan Cadangan Pangan	01 - Terjaganya cadangan pangan nasional	01 - Jumlah pengelolaan cadangan pangan beras	juta ton	1,17	3-3,5	11.136,3	125 - Badan Pangan Nasional
02.10.08.01 PRO-P: Pengelolaan Cadangan Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.08.02 PRO-P: Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan							
02.10.09 KP: Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	01 - Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	01 - Volume produksi ikan budi daya	juta ton	6,20 (2023)	6,75	977.942,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi perikanan tangkap	juta ton	7,75 (2023)	6,19		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.09.01 PRO-P: Pengembangan Input Produksi Perikanan Budi Daya							
02.10.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budi Daya							
02.10.09.03 PRO-P: Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan Perikanan Budi Daya dan Revitalisasi Tambak Rakyat							
02.10.09.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Mendukung Transformasi Perikanan Budi daya							
02.10.09.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Perikanan Tangkap serta Kampung/Sentra Nelayan							
02.10.09.06 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha KP							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.09.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pendampingan/Penyuluhan Masyarakat KP							
02.10.09.08 PRO-P: Peningkatan Perlindungan terhadap Pelaku Usaha KP							
02.10.09.09 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan, Sistem Rantai Dingin, dan Logistik Perikanan							
02.10.10 KP: Pengembangan Pangan Hewani	01 - Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	01 - Produksi daging	juta ton	4,90 (2023)	4,96	384.387,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi telur	juta ton	6,89 (2023)	7,43		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi susu	ribu ton	837,22 (2023)	855,57		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	01 - Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	persen	- (indikator baru)	80		127 - Badan Karantina Indonesia
02.10.10.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Input Peternakan							
02.10.10.02 PRO-P: Implementasi Praktik Peternakan Modern							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.10.03 PRO-P: Penguatan Pasca Panen dan Hilirisasi Produk Hasil Ternak							
02.10.10.04 PRO-P: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan Pendekatan Satu Kesehatan							
02.10.11 KP: Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	01 - Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	01 - Produksi padi	juta ton	53,14	54,45	7.000.723,5	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi jagung	juta ton	19,99	21,48		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi aneka kacang	ribu ton	516,11	540,28		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi buah dan sayur	juta ton	28,82	30,66		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi sorghum	ribu ton	17,34	18,21		018 - Kementerian Pertanian
		07 - Produksi ubi jalar	ton	1.430.341	1.517.449		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi kedelai	ton	349.099	370.359		018 - Kementerian Pertanian
		09 - Produksi hasil hutan bukan kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	ton	388.049	450.000		143 - Kementerian Kehutanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.11.01 PRO-P: Input dan Pendukung Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.02 PRO-P: *On Farm* Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.03 PRO-P: *Off Farm* Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati							
02.10.11.04 PRO-P: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat							
02.10.12 KP: Penganekaragaman Konsumsi Pangan	01 - Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia	01 - Konsumsi buah dan sayur	gram/kapita/hari	244,6	245,33	57.490,0	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Konsumsi pangan hewani	gram/kapita/hari	124,5	129,11		125 - Badan Pangan Nasional
		03 - Konsumsi umbi-umbian	gram/kapita/hari	41,1	53,40		125 - Badan Pangan Nasional
		04 - Konsumsi ikan masyarakat	kg/kap/tahun	25,07 (2023)	26,26		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.10.12.001 PRO-P: Analisis dan Fasilitasi Penganekaragaman Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.12.002 PRO-P: Promosi dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat							
02.10.13 KP: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	01 - Meningkatnya kualitas keamanan pangan	01 - Indeks Keamanan Pangan Segar		60	61	384.015,3	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Persentase hasil kelautan dan perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	persen	0	70,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	persen	- (indikator baru)	40		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase komoditas produk peternakan siap edar yang memenuhi persyaratan mutu	persen	0	100		018 - Kementerian Pertanian
		05 – Persentase komoditas produk hewan yang memenuhi persyaratan keamanan	persen	90	90,5		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Terkendalinya penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan	01 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		02 - Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		03 - Persentase wilayah terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	persen	- (indikator baru)	85		127 - Badan Karantina Indonesia
		04 - Persentase wilayah/kawasan terkendali dari penyakit hewan	persen	80,5	70		018 - Kementerian Pertanian
02.10.13.01 PRO-P: Pengawasan Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan							
02.10.13.02 PRO-P: Pengujian Kualitas Mutu dan Keamanan Pangan							
02.10.13.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.13.04 PRO-P: Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan							
02.10.14 KP: Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	01 - Meningkatnya konsumsi bahan pangan terfortifikasi/biofortifikasi	01 - Jumlah komoditas yang wajib terfortifikasi	komoditas	3	3	2.341,2	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Persentase beras fortifikasi dalam program bantuan pangan	persen	0	20		125 - Badan Pangan Nasional
02.10.14.001 PRO-P: Fasilitasi Produksi dan Distribusi Pangan Terfortifikasi							
02.10.14.002 PRO-P: Pengembangan Kawasan Padi Biofortifikasi							
02.10.15 KP: Penanganan Kerawanan Pangan	01 - Menurunnya daerah rentan rawan pangan	01 - Persentase daerah rentan rawan pangan	persen	12	16,7	43.884.400,1	125 - Badan Pangan Nasional
		02 - Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan	persen	4,5	3,75		125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		Pangan/*Food Insecurity Experience Scale* (FIES)					
02.10.15.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan							
02.10.15.02 PRO-P: Intervensi Kerawanan Pangan							
02.10.16 KP: Pengembangan Kelembagaan Ekonomi, Regenerasi Sumber Daya Manusia, Riset, Inovasi, Modernisasi dan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan yang Adaptif dan Inklusif	01 - Ditumbuhkan dan dikembangkannya kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam	01 - Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang terfasilitasi	lembaga	120	125	29.321.643,1	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Jumlah kelembagaan ekonomi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang terfasilitasi	lembaga	15	4		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	02 - Meningkatnya persentase petani muda	01 - Persentase petani muda terhadap jumlah petani	persen	21,93 (2023)	22,03		018 - Kementerian Pertanian
02.10.16.01 PRO-P: Riset dan Inovasi yang Adaptif dan Inklusif							
02.10.16.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.16.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Kewirausahaan							
02.10.16.04 PRO-P: Pengembangan Satu Data Pangan							
02.10.16.05 PRO-P: Implementasi Bantuan Langsung Petani							
02.10.17 KP: Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah	01 - Meningkatnya nilai tambah bahan baku industri prioritas	01 - Produksi tanaman obat	ton	526.889 (2023)	529.523,45	160.036,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi vanili	ton	1.579 (2023)	1.582		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Produksi lada	ton	64.279 (2023)	64.408		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produksi pala	ton	41.444 (2023)	41.527		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produksi florikultura	ribu tangkai	679.328,585 (2023)	597.622,499		018 - Kementerian Pertanian
		06 - Produksi cengkeh	ton	133.408 (2023)	133.570		018 - Kementerian Pertanian
		07 - Produksi kopi	ton	758.725 (2023)	780.957		018 - Kementerian Pertanian
		08 - Produksi tebu	ton	31.045.342 (2023)	36.813.539		018 - Kementerian Pertanian
		09 - Produksi karet	ton	2.240.826 (2023)	2.496.364		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		10 - Produksi kakao	ton	632.117 (2023)	632.787		018 - Kementerian Pertanian
		11 - Produksi teh	ton	116.506 (2023)	116.555		018 - Kementerian Pertanian
		12 - Pertumbuhan PDB tanaman perkebunan	persen	1,73 (2023)	1,94		018 - Kementerian Pertanian
		13 - Pertumbuhan PDB tanaman hortikultura	persen	- 0,31 (2023)	1,36		018 - Kementerian Pertanian
02.10.17.01 PRO-P: Input dan Pendukung Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.17.02 PRO-P: *On Farm* Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.17.03 PRO-P: *Off Farm* Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah							
02.10.18 KP: Pengembangan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	01 - Meningkatnya implementasi praktik budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Indeks Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi Budi Daya Pertanian Berkelanjutan		0	3,0	23.408,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Proporsi lahan pertanian di bawah kriteria lahan produktif dan berkelanjutan	persen	10,46 (2021)	11,0		018 - Kementerian Pertanian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	persen	73,4	75		018 - Kementerian Pertanian
	02 - Meningkatnya nilai tambah dan ketertelusuran produk budi daya pertanian berkelanjutan	01 - Persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian	persen	1,45 (2022)	1,47		018 - Kementerian Pertanian
	03 - Terjaganya sumber daya genetik komoditas produksi pertanian	01 - Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	varietas dan/atau galur	28 (2021)	30		018 - Kementerian Pertanian
		02 - Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia	aksesi	4.675,0 (2021)	4.700		018 - Kementerian Pertanian
02.10.18.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan							
02.10.18.02 PRO-P: Pengembangan Nilai Tambah dan Ketertelusuran Produk Pertanian Berkelanjutan							

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.10.18.03 PRO-P: Konservasi Komoditas Pertanian dan Praktik Budi Daya Pertanian Berkelanjutan							
02.11 PP: Swasembada Energi	01 - Meningkatnya ketersediaan energi	01 - Pasokan energi primer	MTOE	273	312	4.767.173,8	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan energi	01 - Konsumsi energi final per kapita	TOE per kapita	0,640	0,750		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya pemanfaatan energi bersih	01 - Porsi EBT dalam bauran energi primer	persen	13,2 (2023)	20,0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Intensitas energi primer	SBM/miliar rupiah	149,1	147,7		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01 KP: Peningkatan Penyediaan Energi	01 - Meningkatnya pasokan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah *lifting* minyak bumi	ribu BOPD	605,5	605	15.645,5	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi	01 - Jumlah *lifting* gas bumi	ribu BOEPD	964	1.005		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

SK No 120366 C

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri	01 - Jumlah produksi batu bara	juta ton	775,20	717		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Realisasi kebutuhan batu bara dalam negeri	persen	120	100		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.01.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan dan Produktivitas Energi							
02.11.01.02 PRO-P: Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri							
02.11.02 KP: Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	01 - Meningkatnya akses terhadap gas bumi	01 - Jumlah sambungan rumah jaringan gas kota	kumulatif, sambungan rumah	947.995	100.000	76.326,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah panjang pipa transmisi dan distribusi gas bumi yang difasilitasi	km	22.478	22.550		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	02 - Meningkatnya akses terhadap BBM	01 - Jumlah volume penyaluran BBM bersubsidi	juta kl	17	19,41		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Jumlah volume penyaluran BBM nonsubsidi	juta kl	- (indikator baru)	35,16		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	03 - Meningkatnya akses terhadap listrik	01 - Jumlah pelanggan listrik (kumulatif)	ribu pelanggan	92.494	95.256		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya keterjangkauan energi	01 - Deviasi harga jual eceran BBM	persen	0	0		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Disparitas harga jual eceran BBM (jenis BBM tertentu)	persen	- (indikator baru)	49		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Disparitas harga jual eceran bensin (jenis BBM khusus penugasan)	persen	- (indikator baru)	22		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.02.01 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Gas Bumi							
02.11.02.02 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan BBM							
02.11.02.03 PRO-P: Peningkatan Penyaluran dan Layanan Listrik							
02.11.02.04 PRO-P: Pengawasan dan Penyaluran Energi yang Disubsidi							
02.11.03 KP: Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	01 - Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan	01 - Konsumsi *biofuel*	juta kl	11,30	13,50	4.675.201,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Produksi listrik energi terbarukan	GWH	44.706,80	50.739		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya efisiensi energi	01 - Penurunan intensitas energi final	SBM/miliar rupiah	0,98	0,97		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
02.11.03.01 PRO-P: Diversifikasi Menuju Energi Bersih							
02.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pembangkit Listrik Energi Terbarukan							
02.11.03.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Pendukung Energi Bersih							
02.11.03.04 PRO-P: Perluasan Pemanfaatan Biofuel							
02.11.03.05 PRO-P: Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi							
02.12 PP: Swasembada Air	01 - Terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan dan produktif	01 - Kapasitas tampungan air	m^3/kapita	59,59	59,31	24.776.302,0	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rasio kapasitas air baku terpasang terhadap kebutuhan penduduk	persen	53,34	53,01		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase luas baku sawah fungsional beririgasi	persen	61,55	61,61		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Rasio luas layanan irigasi yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk	persen	15,6	15,6		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Efisiensi pemanfaatan air irigasi	USD/m^3	0,31	0,34		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Persentase luas kawasan prioritas yang dilindungi dari daya rusak air	persen	0	12		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi aman	01 - Rumah tangga dengan akses air minum aman	persen	11,80 (2020)	33		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	persen	10,21 (2023)	12,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka	persen	4,2 (2023)	2,5		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.01 KP: Pembangunan dan Pengelolaan Tampungan Air	01 - Meningkat dan terjaganya kapasitas tampungan air yang dapat dimanfaatkan	01 - Jumlah kumulatif tampungan air yang dikelola	unit (kumulatif)	1.563	1.563	4.632.562,0	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah bendungan yang selesai dibangun	unit (kumulatif)	47 (2015-2024)	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah embung dan tampungan air lainnya yang dibangun	unit (kumulatif)	1.391 (2015-2024)	13		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah tampungan air alami yang direvitalisasi	unit (kumulatif)	19	20		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Jumlah bendungan yang direhabilitasi	unit (kumulatif)	2	10		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.01.01 PRO-P: Pembangunan Tampungan Air							
02.12.01.02 PRO-P: Rehabilitasi dan revitalisasi tampungan air							
02.12.01.03 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Tampungan Air							
02.12.02 KP: Penyediaan Pasokan Air Berkelanjutan	01 - Meningkatnya pasokan air berkelanjutan dan produktivitas penggunaan air	01 - Rasio kapasitas air baku bersumber dari bendungan terhadap potensinya	persen	35	35	90.049,7	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat dengan neraca air tidak dalam kondisi kritis/defisit	wilayah sungai	50	50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah kapasitas prasarana air baku yang dikelola	m^3/detik (kumulatif)	75,03	78,78		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun	m^3/detik (kumulatif)	46,7 (2015-2024)	0,37		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana air baku yang direhabilitasi	m^3/detik (kumulatif)	1,44	0,84		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Luas layanan irigasi yang dikelola	ha (kumulatif)	3.142.532	3.142.532		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07 - Jumlah luas layanan irigasi yang dibangun untuk pertanian multikomoditas	ha (kumulatif)	134.118 (2020-2024)	10.000		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		08 - Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	ha (kumulatif)	1.078.057 (2020-2024)	75.864		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		09 - Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi	milyar m^3	58,32	55,40		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.02.01 PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Metropolitan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Strategis							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.02.02 PRO-P: Penyediaan Air Baku Kawasan Sulit Air, Bencana Kekeringan, dan Kawasan Terpencil							
02.12.02.03 PRO-P: Penyediaan Air Baku Bersumber dari Bendungan							
02.12.02.04 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi di Kawasan Sentra Produksi Pangan							
02.12.02.05 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi untuk Mendukung Ketahanan Pangan Lokal							
02.12.02.06 PRO-P: Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi yang Bersumber dari Bendungan							
02.12.02.07 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Penyediaan Pasokan Air							
02.12.02.08 PRO-P: Pengelolaan Pemanfaatan Air Tanah							
02.12.03 KP: Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air	01 - Meningkatnya ketahanan metropolitan dan wilayah sungai terhadap potensi risiko daya rusak air	01 - Rasio potensi reduksi banjir oleh bendungan	persen	36	38	2.489.515,4	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air	ha (kumulatif)	37.754 (2020-2024)	3.600		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah infrastruktur pengendali daya rusak air yang dikelola	unit (kumulatif)	549	549		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Panjang jaringan infrastruktur pengendali daya rusak air yang dioperasi dan dipelihara	km (kumulatif)	1.784	1.784		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		05 - Kapasitas prasarana pengendali lahar dan sedimen	juta m^3	1,57	0,35		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		06 - Jumlah kawasan yang menerapkan pendekatan terpadu struktural dan non-struktural	kawasan (kumulatif)	- (indikator baru)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		07 - Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan sistem informasi sumber daya air	wilayah sungai (kumulatif)	- (indikator baru)	19		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.03.01 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Metropolitan Strategis							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.03.02 PRO-P: Pengendalian Banjir di Kawasan Perkotaan							
02.12.03.03 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Pulau Kecil							
02.12.03.04 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air di Kawasan Strategis Ekonomi dan Daerah Berisiko Daya Rusak Air Tinggi							
02.12.03.05 PRO-P: Penyempurnaan Tata Kelola Infrastruktur Pengelolaan Risiko Banjir							
02.12.04 KP: Konservasi Sumber Daya Air	01 - Terwujudnya kuantitas air secara berkelanjutan melalui peningkatan tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS)	01 - Luasan lahan kritis dalam DAS yang dipulihkan	juta ha	12,7	12,65	8.830.716,6	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kualitas ekosistem perairan darat	01 - Jumlah mata air yang dipertahankan dan diselamatkan	unit	175	60		143 - Kementerian Kehutanan
02.12.04.01 PRO-P: Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air							

SK No 120357 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.04.02 PRO-P: Pengawetan Air							
02.12.04.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas, Kelembagaan, Data, dan Informasi							
02.12.04.04 PRO-P: Rehabilitasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove							
02.12.04.05 PRO-P: Penyelamatan Mata Air Kritis							
02.12.04.06 PRO-P: Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Kualitas Air							
02.12.05 KP: Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir	01 - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	persen	24 (2020)	39,20	1.221.774,1	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas SPAM terbangun	liter/detik	281.045	281.795		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Akses air minum jaringan perpipaan	persen	19.76 (2023)	31		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Persentase *Non Revenue Water* (NRW) PDAM	persen	33 (2023)	32		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala	01 - Kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kabupaten/kota kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat kabupaten/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	persen	65 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
02.12.05.01 PRO-P: Pengembangan SPAM							
02.12.05.02 PRO-P: Pengelolaan SPAM							
02.12.05.03 PRO-P: Pengawasan Kualitas Air Minum							
02.12.06 KP: Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	01 - Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	01 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPLT dan berfungsi dengan baik	kab/kota	196	211	2.366.094,8	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas IPAL yang terbangun	sambungan rumah	684.782 (2023)	684.782		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Rumah Tangga yang memiliki tangki septik dan disedot secara berkala	persen	9,35 (2023)	11		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD	01 - Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemantauan baku mutu lingkungan pada IPLT dan IPAL	persen	0	0		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - *Idle capacity* IPLT	persen	75,27 (2023)	70		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - *Idle capacity* IPAL	persen	65 (2023)	64		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah kab/kota yang melaksanakan LLTT	kab/kota	19 (2023)	21		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.06.001 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat							
02.12.06.002 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat							
02.12.06.003 PRO-P: Peningkatan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
02.12.06.004 PRO-P: Pemantauan dan Inspeksi Kualitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
02.12.06.005 PRO-P: Pengembangan Manajemen Layanan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.07 KP: Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Berorientasi pada Keberlanjutan	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan air minum dan sanitasi (air limbah domestik)	01 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki Jakstra SPAM	provinsi dan kab/kota	15 Provinsi dan 103 Kab/Kota	18 Provinsi dan 178 Kab/Kota	136.367,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki RISPAM termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	21 Provinsi dan 505 Kab/Kota	23 Provinsi dan 508 Kab/Kota		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki dokumen perencanaan sanitasi (RSP/SSK) yang termutakhirkan	provinsi dan kab/kota	278 (2023)	300		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah BUMD air minum yang memiliki dokumen RPAM	BUMN air minum	121	176		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan air minum dan sanitasi (air limbah domestik) yang aman dan berkelanjutan	01 - BUMD air minum berkinerja sehat	persen	65,39 (2023)	74		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah BUMD air minum yang mengelola layanan air limbah domestik	BUMD air minum	5 (2023)	7		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Tersedianya landasan regulasi dan pedoman penyelenggaraan air minum dan air limbah domestik	01 - Jumlah NSPK air minum yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah NSPK air limbah domestik yang tersusun/termutakhirkan dan telah ditetapkan (kumulatif)	NSPK	0	1		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
02.12.07.001 PRO-P: Penyusunan dan Sinkronisasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) melalui P3AM dan PPSP							
02.12.07.002 PRO-P: Penguatan Kelembagaan dan Pengaturan Air Baku, Air Minum, dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							
02.12.07.003 PRO-P: Reformasi Kebijakan Tarif Air Baku, Air Minum, dan Air Limbah Domestik							
02.12.07.004 PRO-P: Penyusunan dan Pendampingan Pengaturan dan NSPK Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.08 KP: Penguatan Peran Masyarakat dan Ekosistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Inovasi dan Kolaborasi	01 - Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan air minum dan ALD	01 - Kabupaten/kota yang mendeklarasikan 5 pilar STBM	kab/kota	4 (2023)	30	77.203,6	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Berkembangnya ekosistem air minum dan sanitasi berbasis inovasi	01 - Jumlah proyek yang mendapatkan fasilitasi pengembangan teknologi dan pengelolaan peralatan bidang air minum (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah proyek pengembangan dan piloting teknologi sistem pengelolaan air limbah domestik (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air minum yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	8	10		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		04 - Jumlah proyek pembiayaan kreatif infrastruktur air limbah domestik yang siap dikerjasamakan (kumulatif)	proyek	0 (2023)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.08.001 PRO-P: Kampanye dan Edukasi Masyarakat untuk Mendorong Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Aman							
02.12.08.002 PRO-P: Pengembangan Manajemen Data Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik) yang Terintegrasi							
02.12.08.003 PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Teknologi Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							
02.12.08.004 PRO-P: Pengembangan Model Bisnis, Skema Kerjasama, SDM, dan Pasar Air Minum dan Sanitasi (Air Limbah Domestik)							
02.12.09 KP: Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	01 - Meningkatkan ketahanan terhadap daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	01 - Luas kawasan yang terlindungi dari risiko daya rusak air di Pesisir Utara Jawa	ha(kumulatif)	3.577 (2020-2024)	200	4.932.018,6	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Kapasitas prasarana air baku yang dibangun di Pesisir Utara Jawa	m^3/detik (kumulatif)	2,98 (2020-2024)	0,2		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya layanan air minum dan sanitasi di Pesisir Utara Jawa	01 - Akses air minum jaringan perpipaan di Pesisir Utara Jawa	persen	30	31,5		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPAL/IPLT) dan berfungsi dengan baik di Pesisir Utara Jawa	kab/kota (kumulatif)	32	32		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.12.09.01 PRO-P: Pengendalian Daya Rusak Air							
02.12.09.02 PRO-P: Penyediaan Air Baku dan Air Minum							
02.12.09.03 PRO-P: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik							
02.12.09.04 PRO-P: Pemantauan Penurunan Muka Tanah							
02.12.09.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup							
02.12.09.06 PRO-P: Pengembangan Kawasan							
02.13 PP: Ekonomi Syariah	01 - Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi	01 - Kontribusi PDB syariah	persen	46,72 (2023)	49,04	503.320,3	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.01 KP: Industri Halal dan UMKM Halal	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri dan UMKM halal	01 - Persentase peningkatan daya saing industri yang memproduksi produk halal	persen	- (indikator baru)	4,46	15.915,5	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Pertumbuhan pariwisata ramah muslim	persen	20,41 (2023)	10,28		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri Makanan Minuman Halal							
02.13.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri Farmasi dan Kosmetik Halal							
02.13.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri Fesyen Muslim							
02.13.01.04 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim							
02.13.01.05 PRO-P: Penguatan Halal *Value Chain*							
02.13.01.06 PRO-P: Penguatan Promosi Industri Halal							
02.13.02 KP: Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional	01 - Meningkatnya ekspor produk halal berdaya saing global dan menguatnya kerjasama ekonomi syariah internasional	01 - Nilai ekspor halal/PDB	persen	3,69 (2023)	3,73	2.134,8	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.13.02.01 PRO-P: Penguatan Ekspor Halal							
02.13.02.02 PRO-P: Penguatan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional							
02.13.03 KP: Ekosistem Halal	01 - Menguatnya ekosistem halal pendukung pertumbuhan ekonomi syariah	01 - Jumlah produk tersertifikasi halal	produk	2.172.106	7.000.000	393.382,9	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
02.13.03.01 PRO-P: Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal							
02.13.03.02 PRO-P: Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal							
02.13.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Ekosistem Halal							
02.13.03.04 PRO-P: Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal							
02.13.03.05 PRO-P: Pengembangan Riset Pendukung Ekosistem Halal							
02.13.03.06 PRO-P: Pengembangan Penghitungan PDB Syariah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.13.04 KP: Keuangan Syariah	01 - Meningkatnya peran keuangan syariah mendukung perekonomian nasional	01 - Aset keuangan syariah/PDB	persen	42,67	45,38	3.617,4	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.04.01 PRO-P: Penguatan Perbankan Syariah							
02.13.04.02 PRO-P: Penguatan Pasar Modal Syariah							
02.13.04.03 PRO-P: Penguatan IKNB Syariah							
02.13.05 KP: Dana Sosial Syariah	01 - Meningkatnya peran dana sosial syariah mendukung perekonomian dan perlindungan sosial nasional	01 - ZIS-DSKL/PDB	persen	0,155 (2023)	0,169	88.269,7	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
		02 - Aset wakaf uang/PDB	persen	0,011 (2023)	0,016		Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
02.13.05.01 PRO-P: Akselerasi Bauran ZISWAF dan Keuangan Syariah							
02.13.05.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Literasi ZISWAF							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14 PP: Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi digital dalam mendukung kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	01 - Kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	persen	8	8-9	500.654,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
02.14.001 KP: Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	01 - Meningkatnya jumlah SDM digital	01 - Peningkatan tenaga kerja sektor TIK (kumulatif)	persen	3	3,21	227.470,9	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Proporsi remaja dan dewasa Usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)	persen	79 (2023)	83		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
02.14.001.001 PRO-P: Pengembangan SDM Digital dan Digitalisasi Masyarakat							
02.14.001.002 PRO-P: Penguatan Infrastruktur dan Pelindungan Keamanan Data							
02.14.001.003 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital							
02.14.001.004 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Pendanaan dan Iklim Bisnis							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatnya pengembangan ekonomi dan industri digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Bisnis		39,12 (2022)	40,215	273.183,2	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Tingkat kesuksesan startup digital nasional (*success rate startup digital)*	persen	- (indikator baru)	6		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 *Readiness Index* (INDI 4.0) > 3.0	perusahaan	74 (2023)	87		019 - Kementerian Perindustrian
		04 - Kontribusi sektor informasi dan komunikasi terhadap PDB	persen	4,3	4,3		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
02.14.002.001 PRO-P: Pengembangan Industri dan Perangkat Digital							
02.14.002.002 PRO-P: Penguatan Pengembangan Ekonomi Digital UMKM							
02.14.002.003 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Perdagangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.14.002.004 PRO-P: Pengembangan Keuangan dan Perbankan Digital							
02.14.002.005 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pertanian dan Perikanan							
02.14.002.006 PRO-P: Pengembangan Media Digital							
02.14.002.007 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Transportasi dan Pariwisata							
02.14.002.008 PRO-P: Pelayanan Kesehatan Digital							
02.14.002.009 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Pendidikan							
02.14.002.010 PRO-P: Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah							
02.14.002.011 PRO-P: Pengembangan Digitalisasi Sektor Energi dan Lingkungan							
02.15 PP: Ekosistem Ekonomi Sirkular	01 - Meningkatkan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material	01 - Tingkat input material sirkular	persen	9	9,2	231.281,1	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau	perusahaan (kumulatif)	140	152	23.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	persen	10	10		019 - Kementerian Perindustrian
02.15.01.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Industri dalam Penerapan Ekonomi Sirkular							
02.15.01.02 PRO-P: Penerapan Industri Hijau							
02.15.02 KP: Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	01 - Mengurangi susut pangan pada rantai pasok pangan	01 - Persentase penurunan susut pangan	persen	3	3–5	57.477,1	018 - Kementerian Pertanian
	02 - Mengurangi sisa pangan dari pelaku usaha dan konsumen, serta meningkatkan pangan layak konsumsi yang dapat diselamatkan dan dimanfaatkan kembali	02 - Persentase pangan yang terselamatkan	persen	1,44	3–5		125 - Badan Pangan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.02.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Standar Susut dan Sisa Pangan							
02.15.02.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pangan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan							
02.15.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Kerjasama Penyelamatan Pangan							
02.15.03 KP: Pengembangan Produk Ramah Lingkungan	01 - Meningkatkan jumlah produk yang menerapkan prinsip berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang bersertifikasi ramah lingkungan	produk ramah lingkungan (kumulatif)	51	70	109.637,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.03.01 PRO-P: Pengembangan Labelisasi, Standarisasi, dan Riset Produk Ramah Lingkungan							
02.15.03.02 PRO-P: Penerapan Konstruksi Berkelanjutan dan Bangunan Gedung Hijau							
02.15.03.03 PRO-P: Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Prinsip Berkelanjutan							
02.15.04 KP: Penguatan Ekosistem Daur Ulang	01 - Peningkatan kapasitas dan tingkat daur ulang	01 - Persentase sampah yang didaur ulang	persen	13	16	40.666,3	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.15.04.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan, Teknologi dan Fasilitas Pengelolaan Sampah dengan Prinsip Sirkular							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.15.04.02 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha, Bank Sampah, dan Kelompok Masyarakat dalam Penerapan Ekonomi Sirkular							
02.16 PP: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik	01 - Meningkatnya upaya pencegahan kerusakan serta konservasi ekosistem dan spesies	01 - Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati		0,40 (2020)	0,51	614.932,3	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan		0,31 (2020)	0,37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya upaya pengelolaan sumber daya genetik keanekaragaman hayati secara berkelanjutan	01 - Jumlah model pengelolaan sumber daya genetik termasuk *digital sequence information* pada sumber daya genetik	model	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.01 KP: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem serta Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi	01 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	01 - Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	unit	294 (2023)	304	85.797,9	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	nilai	49,56 (2023)	50,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Persentase luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	persen	8,98 (2023)	9,23		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
	04 - Meningkatnya pengelolaan areal preservasi	01 - Luas areal preservasi yang dikembangkan	ha	- (indikator baru)	258.000		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah unit pengelola taman kehati yang difasilitasi perencanaan dan pengelolaannya	unit	2	2		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem melalui pengembangan geopark	01 - Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark	unit (kumulatif)	10	12		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
	06 - Meningkatnya pemulihan ekosistem terdegradasi	01 - Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	ha	29.734,22	20.000		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.01.01 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.01.02 PRO-P: Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil							
02.16.01.03 PRO-P: Pengelolaan Areal Preservasi							
02.16.01.04 PRO-P: Pengelolaan Geologi untuk Mendukung Keanekaragaman Ekosistem							
02.16.01.05 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Darat yang Terdegradasi							
02.16.01.06 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Perairan Darat, Pesisir, dan Laut yang Terdegradasi							
02.16.01.07 PRO-P: Identifikasi Tipe, Luasan, dan Status Keterancaman Ekosistem							
02.16.02 KP: Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	01 - Berkurangnya status keterancaman spesies	01 - Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies		0,75	0,75	104.746,2	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	01 - Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area karantina Indonesia	persen	- (indikator baru)	81		127 - Badan Karantina Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.02.01 PRO-P: Pemantauan, Penyelamatan, dan Penanganan Konflik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan							
02.16.02.02 PRO-P: Pengembangbiakan dan Konservasi Keragaman Genetik Spesies Tumbuhan, Satwa Liar, dan Biota Perairan							
02.16.02.03 PRO-P: Pemberantasan Perburuan dan Perdagangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar, serta IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing*							
02.16.02.04 PRO-P: Pengendalian Jenis Asing Invasif, Vektor Penyakit, dan Zoonosis							
02.16.03 KP: Penguatan Tata Kelola Keanekaragaman Hayati	01 - Meningkatnya tata kelola keanekaragaman hayati	01 - Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	kelompok masyarakat (kumulatif)	- (indikator baru)	200	28.238,0	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi implementasi konvensi keanekaragaman hayati dan protokol/kebijakan turunannya di Indonesia	dokumen	1	1		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah lembaga yang dibina dan dievaluasi di bidang keanekaragaman hayati	lembaga	- (indikator baru)	10		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Jumlah inovasi dan teknologi terkait keanekaragaman hayati	inovasi	50 (2023)	100		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
02.16.03.01 PRO-P: Pelibatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.02 PRO-P: Integrasi Data dan Pengayaan IPTEK Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.03 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati							
02.16.03.04 PRO-P: Mobilisasi Pendanaan Inovatif, Dukungan Swasta, dan Insentif Positif untuk Keanekaragaman Hayati							
02.16.04 KP: Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	miliar rupiah	25,96	26	34.322,7	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi, dan/atau *appendix CITES*	nilai	62,40 (2023)	68,30		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	persen	- (indikator baru)	60		127 - Badan Karantina Indonesia
	02 - Meningkatnya pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan	01 - Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	juta ha (kumulatif)	2,0	2,1		143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	miliar rupiah	204	209		143 - Kementerian Kehutanan
02.16.04.01 PRO-P: Pemanfaatan Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan Secara Berkelanjutan							
02.16.04.02 PRO-P: Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon, Air, dan Panas Bumi Secara Berkelanjutan							
02.16.04.03 PRO-P: Pengelolaan Wisata Alam dan Wisata Bahari Secara Berkelanjutan							

SK No 120395 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.16.05 KP: Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik	01 - Meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik secara berkelanjutan	01 - Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	produk (kumulatif)	10	15	361.827,5	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Jumlah penerapan bioteknologi yang dimanfaatkan untuk pengembangan bioprospeksi	produk	25	50		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya pengelolaan keamanan hayati *(biosafety dan biosecurity)*	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan keamanan hayati *(biosafety dan biosecurity)*	rekomendasi kebijakan (kumulatif)	40	44		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.16.05.01 PRO-P: Pengembangan Bioprospeksi, Bioteknologi, serta Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik							
02.16.05.02 PRO-P: Pengelolaan Keamanan Hayati *(Biosafety and Biosecurity)*							
02.17 PP: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	01 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air	01 - Indeks Kualitas Air (IKA)		54,78	72,02	679.890,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	01 - Indeks Kualitas Udara (IKU)		90,13	78,53		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	01 - Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)		81,67	81,02		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	01 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)		61,95	77,97		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	05 - Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan	persen	30	30		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	06 - Terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	01 - Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	persen	0,564	0,567		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	01 - Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	01 - Ketersediaan status mutu DAS dan danau	data	188	190	299.785,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas air permukaan	01 - Jumlah sungai dan danau yang mengalami peningkatan status mutu	lokasi	1	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air	kab/kota	- (indikator baru)	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri	01 - Jumlah industri yang memenuhi kualitas air limbah sesuai baku mutu	industri	3.235	2.940		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.01.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Danau							
02.17.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Air melalui Pengelolaan Air Limbah							
02.17.01.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Air							
02.17.01.04 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Air di Sektor Industri							
02.17.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas Udara di Kab/Kota	01 - Meningkatnya pengelolaan kualitas udara	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor udara	kab/kota	- (indikator baru)	5	26.100,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan emisi udara di industri, prasarana, dan jasa	01 - Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi udara	industri	3.345	2.940		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.02.01 PRO-P: Pemantauan Kualitas Udara di Kab/Kota							
02.17.02.02 PRO-P: Pengendalian Pencemaran Udara di Kab/Kota serta Sektor Industri, Prasarana, dan Jasa							
02.17.03 KP: Peningkatan Pengelolaan Kualitas dan Kesehatan Air Laut	01 - Meningkatnya pemulihan kualitas ekosistem pesisir dan laut yang terkontaminasi	01 - Luasan pesisir dan laut terkontaminasi dan rusak yang terpulihkan	m^2	21.311 m^2	5.000	7.990,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri dan atau pelabuhan yang membuang air limbah ke laut yang memenuhi baku mutu air limbah	pelabuhan/industri	36	36		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		03 - Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan skor IRLH sektor air laut	provinsi	- (indikator baru)	37		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.03.01 PRO-P: Pengelolaan Kualitas Air Laut							
02.17.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Ekosistem Laut dan Pesisir							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.04 KP: Peningkatan Kualitas Lahan	01 - Meningkatnya luasan lahan rusak yang dipulihkan	01 - Indeks Kualitas Tutupan Lahan		61,96	77,98	74.772,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya pengelolaan kerusakan lahan	01 - Jumlah kab/kota yang mengalami peningkatan IRLH sektor lahan	kab/kota	- (indikator baru)	15		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Meningkatnya jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan	01 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan lahan (KLH)	industri	170	113		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	04 - Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	01 - Persentase RDTR yang siap terintegrasi dengan OSS	persen	5,85	9,86		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		02 - Persentase Penerbitan konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	persen	70,38	73,88		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
02.17.04.01 PRO-P: Pemulihan Ekosistem Mangrove dan Lahan Rusak							
02.17.04.02 PRO-P: Implementasi Program Indonesia Hijau dan PROPER Sektor Lahan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.04.03 PRO-P: Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang							
02.17.05 KP: Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	01 - Meningkatnya ketersediaan data dan informasi karakteristik ekosistem gambut	01 - Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)		69,94	64,15	64.123,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah industri yang memenuhi kriteria pengendalian kerusakan ekosistem gambut	industri	401	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.05.01 PRO-P: Pengelolaan Data dan Informasi Ekosistem Gambut							
02.17.05.02 PRO-P: Pemulihan Lahan Gambut							
02.17.06 KP: Pengelolaan B3, Limbah B3, dan Limbah Radioaktif	01 - Meningkatnya jumlah B3 yang dikelola	01 - Jumlah B3 yang dikelola	ton	6.220.572	6.002.005	20.261,6	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah limbah B3 dan non-B3 yang dikelola	01 - Jumlah limbah B3 dan non-B3 yang dikelola	ton	62.508.066	65.153.500		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Meningkatnya jumlah limbah radioaktif yang dikelola	01 - Jumlah fasilitas limbah radioaktif yang dikelola	fasilitas	- (indikator baru)	2		085 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir
02.17.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan B3							
02.17.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 dan non-B3							
02.17.06.03 PRO-P: Peningkatan Pengelolaan Limbah Radioaktif							
02.17.07 KP: Penguatan Kelembagaan, Pengendalian, Penerbitan dan Penegakan Hukum LHK dan Penataan Ruang	01 - Meningkatnya jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi	01 - Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	usaha/kegiatan/izin	80	260	108.797,4	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Menurunnya tingkat kerawanan kawasan hutan	01 - Luas kawasan hutan yang diamankan	ha	4.589.460 ha (2023)	800.000		143 - Kementerian Kehutanan
	03 - Meningkatnya penyelesaian tindak pidana dan perdata, dan sengketa terkait lingkungan hidup dan kehutanan	01 - Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	perkara	14	29		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	04 - Meningkatnya Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal	01 - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang	persen	50	52		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
	05 - Meningkatnya sarana dan prasarana dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di pusat dan daerah	01 - Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program	layanan	- (indikator baru)	18		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.17.07.01 PRO-P: Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, Aparat Pengawas, Penyidik dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Tata Ruang							
02.17.07.02 PRO-P: Pengawasan Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK							
02.17.07.03 PRO-P: Pengawasan Usaha Kelautan dan Perikanan							
02.17.07.04 PRO-P: Penanganan Perkara Bidang LHK yang Diselesaikan							
02.17.07.05 PRO-P: Layanan Pengujian Laboratorium dan Standar Pengelolaan SDA dan Lingkungan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.07.06 PRO-P: Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
02.17.07.07 PRO-P: Penertiban Pemanfaatan Ruang							
02.17.08 KP: Penguatan Instrumen Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup	01 - Meningkatnya kualitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya pengamanan lingkungan hidup *(environmental safeguard)*	01 - Persentase rekomendasi kebijakan terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah dengan ekosistem rentan	provinsi/kab/kota	24	48	78.060,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya kualitas kebijakan rencana dan/atau program yang mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan	01 - Persentase KRP yang menerapkan perlindungan LH untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (hijau)	persen	100	100		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	03 - Peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan hidup	01 - Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan	persen	63	65		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.17.08.01 PRO-P: Penerapan dan Penguatan RPPLH							
02.17.08.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas KRP dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
02.17.08.04 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan dampak Lingkungan Hidup Usaha dan Kegiatan							
02.18 PP: Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir	01 - Meningkatnya IKPS Nasional	01 - Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		54,70	58	538.398,2	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.18.01 KP: Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	01 - Meningkatnya Sampah yang dikelola	01 - Persentase Sampah yang dikelola	persen	39,01	51,21	8.550,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
	02 - Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	01 - Jumlah Kabupaten/kota dengan Kepala Keluarga yang melakukan pengelolaan sampah secara terstandar (pilar 4 STBM)	kabupaten/kota	4 (2023)	30		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.18.01.01 PRO-P: Penguatan Kebijakan, Pendanaan, dan Kelembagaan Pengelolaan Sampah							
02.18.01.02 PRO-P: Pengembangan Data dan Sistem Informasi Persampahan							
02.18.01.03 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Sistem Pengelolaan Sampah							
02.18.01.04 PRO-P: Pengembangan Inovasi dan Standarisasi Teknologi Tepat Guna Pengelolaan Sampah							
02.18.01.05 PRO-P: Perubahan Perilaku untuk Pemilahan Sampah							
02.18.02 KP: Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	01 - Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	01 - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	persen	15 (13 terdaur ulang) (2022)	24 (16 terdaur ulang)	529.848,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - TPA/LUR yang dioperasikan secara *sanitary landfill* / tingkat pengontrolan penuh	unit	- (indikator baru)	0		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif)	ton	744,6	18		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.18.02.01 PRO-P: Penyediaan dan Optimalisasi Fasilitas Pengolahan Sampah							
02.18.02.02 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah							
02.18.02.03 PRO-P: Pembinaan dan Pengawasan TPA *Sanitary Landfill*							
02.18.02.04 PRO-P: Pengelolaan Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
02.18.02.05 PRO-P: Penanganan Sampah dari Badan Air							
02.19 PP: Pembangunan Rendah Karbon	01 - Menurunnya emisi GRK	01 - Persentase penurunan emisi GRK (kumulatif)	persen	17,47 (2023)	18,37	897.648,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase penurunan emisi GRK (tahunan)	persen	28,53 (2023)	26,67		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.19.01 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Energi	01 - Menurunnya emisi GRK Sektor Energi	01 - Reduksi emisi GRK sektor energi	juta ton CO_2-Eq	142	164	770.767,1	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.01.01 PRO-P: Pengembangan Energi Rendah Karbon							
02.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Konservasi Energi							
02.19.01.03 PRO-P: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan							
02.19.02 KP: Penurunan Emisi GRK Sektor Berbasis Lahan	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor lahan	01 - Reduksi emisi GRK sektor hutan	juta ton CO_2-Eq	- (indikator baru)	410,80	24.982,9	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Reduksi emisi GRK sektor pertanian	juta ton CO_2-Eq	- (indikator baru)	6,27		018 - Kementerian Pertanian
02.19.02.01 PRO-P: Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan							
02.19.02.02 PRO-P: Restorasi dan Pencegahan Degradasi Lahan Gambut							
02.19.02.03 PRO-P: Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan							
02.19.02.04 PRO-P: Implementasi Pertanian Berkelanjutan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.03 KP: Peningkatan Cadangan Karbon di Ekosistem Karbon Biru	01 - Meningkatnya nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	01 - Nilai kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi		0	55	13.453,3	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.19.03.01 PRO-P: Rehabilitasi Mangrove							
02.19.03.02 PRO-P: Rehabilitasi Lamun							
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	juta ton CO_2-Eq	6,75 (2022)	6,75	4.206,0	019 - Kementerian Perindustrian
02.19.04.01 PRO-P: Peningkatan Implementasi Standar Industri Hijau							
02.19.04.02 PRO-P: Kebijakan dan Capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Sektor IPPU							
02.19.05 KP: Penguatan Aksi Penurunan Emisi GRK di Sektor Pengelolaan Limbah	01 - Menurunnya emisi GRK sektor pengelolaan limbah	01 - Reduksi emisi GRK sektor limbah	juta ton CO_2-Eq	10,39	14,13	9.000,0	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.19.05.01 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Pusat							
02.19.05.02 PRO-P: Pengurangan Emisi GRK Sektor Pengelolaan Limbah Cair Domestik oleh Pemerintah Pusat							
02.19.06 KP: Penguatan Tata Kelola dan Faktor Pendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi GRK serta Nilai Ekonomi Karbon	01 - Meningkatkan tata kelola dan kegiatan pendukung pencapaian target penurunan emisi GRK	01 - Jumlah data informasi yang ter-register dan terverifikasi	sektor	5	5	75.238,7	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
		02 - Jumlah kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung nilai ekonomi karbon	kebijakan	2	5		144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
02.19.06.01 PRO-P: Pemutakhiran Inventarisasi, Verifikasi, serta Registrasi Emisi GRK							
02.19.06.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Sumber Daya							
02.19.06.03 PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Mekanisme Perdagangan Karbon (termasuk Bursa Karbon) di Tingkat Internasional, Nasional dan Daerah)							
02.20 PP: Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs*	01 - Meningkatnya proporsi tenaga kerja hijau	01 - Proporsi tenaga kerja hijau	persen	2,62 (2023)	2,70–2,73	527.902,2	026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.20.01 KP: Pengembangan Ekosistem Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs*	01 - Berkembangnya ekosistem pekerjaan hijau/*green jobs*	01 - Jumlah kebijakan yang spesifik mendukung pekerjaan hijau/*green jobs*	kebijakan	- (indikator baru)	1	72.249,7	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Menguatnya peran asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/*green jobs*	01 - Jumlah kerja sama yang melibatkan asosiasi dan DUDIKA dalam pengembangan pekerjaan hijau/*green jobs*	kerja sama	- (indikator baru)	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.01.01 PRO-P: Penyadartahuan tentang Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs*							
02.20.01.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Regulasi tentang Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs*							
02.20.01.03 PRO-P: Pembangunan Data/Informasi tentang Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs* dan Keterampilan Hijau							
02.20.01.04 PRO-P: Pengembangan Kerja Sama/Kemitraan dalam Ekosistem Pekerjaan Hijau/ *Green Jobs*							
02.20.01.05 PRO-P: Pemagangan dan Penyediaan Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur Pelatihan oleh DUDIKA Hijau							
02.20.01.06 PRO-P: Fasilitasi Hubungan Industrial dan Pelindungan Pekerja Hijau							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.20.02 KP: Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Hijau	01 - Meningkatnya kompetensi tenaga kerja hijau	01 - Jumlah tenaga kerja yang dikembangkan kompetensi hijaunya	orang	120.000 (2023)	300.000	455.652,6	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Jumlah Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pekerjaan hijau/*green jobs* yang ditetapkan	dokumen	- (indikator baru)	1		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
02.20.02.01 PRO-P: Pengembangan Standar Kompetensi Hijau							
02.20.02.02 PRO-P: Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Hijau dan Metode Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.04 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Hijau bagi Tenaga Pengajar/Guru/Instruktur							
02.20.02.05 PRO-P: Pelaksanaan Pendidikan/Pelatihan Hijau							
02.20.02.06 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Sertifikasi Kompetensi Hijau							

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21 PP: Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatnya aktivitas ekonomi hijau di sektor kehutanan	01 - Nilai pemanfaatan sumber daya hutan berkelanjutan	triliun rupiah	122,2	134,74	330.375,4	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01 KP: Peningkatan Produktivitas Hutan	01 - Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kehutanan secara berkelanjutan	01 - Nilai PNBP fungsional kehutanan	triliun rupiah	7,16	7,72	47.928,4	143 - Kementerian Kehutanan
		02 - Nilai ekspor produk kehutanan	miliar USD	15,01	15,42		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.01.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Produk Kehutanan Kayu							
02.21.01.02 PRO-P: Diversifikasi Produk Kehutanan (Non Kayu)							
02.21.02 KP: Pengembangan Produk Bioekonomi Hutan melalui Agroforestri	01 - Meningkatkan potensi pengembangan produk bioekonomi hutan	01 - Nilai investasi sektor kehutanan	triliun rupiah	- (indikator baru)	0,24	47.525,8	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Percontohan Bioekonomi berbasis Agroforestri							
02.21.02.02 PRO-P: Riset dan Teknologi untuk Mendukung Peningkatan Nilai Tambah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21.02.03 PRO-P: Pengembangan Akses Pasar, Investasi, dan Infrastruktur Pendukung							
02.21.03 KP: Penguatan Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari	01 - Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	unit	1.467	1.022	12.186,9	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pemerintah							
02.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pengelola - Pelaku Bisnis							
02.21.04 KP: Penguatan Prakondisi Pengelolaan Hutan Lestari	01 - Menguatnya kepastian legalitas dan legitimasi kawasan hutan	01 - Desa yang menggunakan data dan informasi batas kawasan hutan sebagai rujukan dalam peta wilayah desa	desa	- (indikator baru)	528	81.861,7	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.04.01 PRO-P: Penguatan Perencanaan dan Kepastian Hukum Kawasan Hutan							
02.21.04.02 PRO-P: Penguatan Pengendalian Kawasan Hutan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.21.05 KP: Peningkatan Fungsi Sosial Kawasan Hutan	01 - Menguatnya peran masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan	01 - Kelompok masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	kelompok masyarakat	14.774	15.574	15.964,3	143 - Kementerian Kehutanan
	02 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan	01 - Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	miliar rupiah	1.400	1.900		143 - Kementerian Kehutanan
02.21.05.01 PRO-P: Pengembangan Hasil Hutan Berbasis Masyarakat untuk Ketahanan Pangan, Energi, dan Air							
02.21.05.02 PRO-P: Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan							
02.21.06 KP: Perlindungan dan Pengamanan Hutan	01 - Meningkatnya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan	01 - Penurunan laju deforestasi	juta ha/tahun	0,120	0,111	124.908,3	143 - Kementerian Kehutanan
02.21.06.01 PRO-P: Peningkatan Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan							
02.21.06.02 PRO-P: Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22 PP: Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Sumber Pertumbuhan Baru	01 - Meningkatnya nilai tambah sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Ekonomi		22,19 (2023)	24,43	2.250.736,3	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	02 - Meningkatnya perlindungan kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - IBEI Pilar Lingkungan		31,27 (2023)	33,79		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
	03 - Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia sektor ekonomi biru	01 - IBEI Pilar Sosial		55,19 (2023)	57,23		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
02.22.01 KP: Penguatan Tata Kelola Ekonomi Biru	01 - Memperkuat tata kelola ekonomi biru	01 - Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut dan zonasi pesisir	persen	91,17	13,6	193.332,4	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		81,00	82,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Indeks Pembangunan Pulau-Pulau Kecil		0,45	0,49		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada pada batas biologis yang aman	persen	≤80	≤80		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.01.01 PRO-P: Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut							
02.22.01.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penangkapan Ikan Terukur dan Perizinan Usaha Perikanan							
02.22.01.03 PRO-P: Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan							
02.22.01.04 PRO-P: Penguatan Sistem Teknologi Informasi, Kerja Sama, dan Tata Kelola Pendidikan Kelautan dan Perikanan							
02.22.01.05 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Industri, Wisata Bahari, dan Jasa Kelautan Berkelanjutan							
02.22.01.06 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Kawasan Konservasi							
02.22.01.07 PRO-P: Pemanfaatan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil/Terluar							
02.22.02 KP: Peningkatan Pengelolaan Konservasi Perairan dan Ekosistem Pesisir	01 - Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	01 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang efektif dikelola (kumulatif)	juta ha	16,5	18,5	294.045,2	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil	juta ha	29,2	30		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
02.22.02.02 PRO-P: Pemanfaatan Data dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.03 PRO-P: Peningkatan Sarana Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.04 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.02.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan Pengelola Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil							
02.22.03 KP: Peningkatan Produktivitas Perikanan yang Terintegrasi, Modern, dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kelautan dan perikanan	01 - Pertumbuhan PDB perikanan (ADHK)	persen	5,49 (2023)	4,00–6,00	1.274.285,8	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Volume produksi ikan	juta ton	13,95 (2023)	12,94		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Volume produksi olahan perikanan	juta ton	3,62 (2023)	3,71		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		04 - PDB perikanan	triliun rupiah	554,04 (2023)	595,06		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi ikan Tuna Cakalang Tongkol (TCT)	juta rupiah	220.600	604.200		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		06 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tilapia	juta rupiah	77.361	447.260		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
		07 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi udang	juta rupiah	659.210	397.550		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.03.02 PRO-P: Pengelolaan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap							
02.22.03.03 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Kluster Komoditas Ikan Budidaya Berbasis Kawasan							
02.22.03.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas, Mutu, dan Daya Saing Hasil Perikanan							
02.22.03.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan							
02.22.03.08 PRO-P: Perluasan Pasar Produk Perikanan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.03.09 PRO-P: Penguatan Logistik dan Sistem Rantai Dingin Produk Perikanan							
02.22.04 KP: Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut	01 - Volume produksi garam	juta ton	2	2,25	17.000,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Produktivitas lahan garam rakyat	ton/ha	83	83		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		03 - Utilisasi industri pengolahan garam industri	persen	50	52.50		019 - Kementerian Perindustrian
		04 - Utilisasi industri pengolahan hasil laut	persen	41,93	45		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi garam	juta rupiah	2.280.864	7.379.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal
02.22.04.01 PRO-P: Pengembangan Garam Industri Terintegrasi							
02.22.04.02 PRO-P: Penguatan Sarana dan Prasarana Industri Garam							
02.22.04.03 PRO-P: Pengembangan Produk Olahan Laut dan Bioprospeksi Sumber Daya Kelautan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.05 KP: Penguatan Industri Transportasi Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah industri galangan kapal pendukung transportasi penyebrangan	01 - Volume reparasi kapal	ribu DWT (kumulatif)	9,5 (Jan–Nov 2024)	11,2	8.182,2	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Volume produksi pembuatan kapal	ribu DWT(kumulatif)	0,98	1,1		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai ekspor industri perkapalan	ribu USD	830,89	686,42		019 - Kementerian Perindustrian
02.22.05.01 PRO-P: Pengembangan Industri Galangan Kapal sebagai Industri Berteknologi Tinggi							
02.22.05.02 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Bahan Baku Industri Perkapalan							
02.22.05.03 PRO-P: Pengembangan Mutu dan Daya Saing Industri Perkapalan							
02.22.06 KP: Pengembangan Pariwisata Berbasis Bahari dan Danau	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan	01 - Prioritisasi destinasi pariwisata prioritas berbasis bahari dan danau	lokasi destinasi pariwisata bahari	0	10	240.242,3	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Jumlah wisatawan nusantara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu perjalanan	7.797,76 (2023)	13.686,56		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah wisatawan mancanegara di destinasi bahari dan danau prioritas	ribu kunjungan	8.344,92 (2023)	12.204,23		147 - Kementerian Pariwisata
02.22.06.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Bahari							
02.22.06.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Sektor Pariwisata Bahari							
02.22.06.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Investasi Sektor Pariwisata Bahari							
02.22.06.04 PRO-P: Peningkatan *Branding Coral Triangle* Indonesia							
02.22.06.05 PRO-P: Penguatan Sektor Pendukung Pariwisata Bahari							
02.22.07 KP: Pengembangan Iptek, Inovasi, dan SDM Ekonomi Biru	01 - Meningkatnya hasil dan pemanfaatan riset, Sumber Daya Manusia di sektor Biru	01 - Pusat inovasi berbasis maritim	unit (kumulatif)	0	0	223.648,5	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan KP yang terserap di dunia usaha, dunia industri, dan/atau dunia kerja	persen	74,17 (2023)	75		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
02.22.07.01 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Kelautan dan Perikanan							
02.22.07.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Maritim, Kelautan dan Perikanan							
02.22.07.03 PRO-P: Penguatan Riset di Bidang Maritim, Kelautan dan Perikanan							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 3: MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03 PN: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01 - Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan	01 - Stok infrastruktur terhadap PDB	persen	43,00 (2019)	46,50	40.785.856,3	132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
	02 - Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB	01 - Total aset sektor keuangan/PDB	persen	170,5 (2023)	188,5		Otoritas Jasa Keuangan
	03 - Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas	01 - Proporsi penciptaan lapangan kerja formal	persen	24,50	35,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	04 - Meningkatnya nilai tambah pariwisata	01 - Rasio PDB pariwisata	persen	3,60 (2022)	4,20–4,30		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Devisa pariwisata	miliar USD	16,71	17,10–18,30		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	05 - Meningkatnya proporsi PDB ekonomi kreatif	01 - Proporsi PDB ekonomi kreatif	persen	6,77 (2023)	7,3–7,9		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01 PP: Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda	01 - Meningkatnya konektivitas dan layanan multimoda melalui integrasi transportasi darat, laut dan udara	01 - Waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional	jam per 100 km	1,90	1,89	35.606.671,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Persentase keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	persen	98,20 (2023)	98		107 - Badan SAR Nasional
		03 - Jumlah perjalanan kereta api	juta perjalanan	0,86	0,92		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - *On time performance* penerbangan	persen	73,78	80		022 - Kementerian Perhubungan
		05 - Peningkatan volume angkutan laut (kumulatif angka dasar tahun 2022)	persen	5,6 (2023)	6		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah penumpang angkutan kereta api	juta penumpang	501	519		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Volume angkutan penyeberangan	juta kendaraan	11,5 (2023)	11,6		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan	juta penumpang	685 (2023)	850		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		09 - Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan	persen	53,68 (2023)	65		022 - Kementerian Perhubungan
		10 - Peningkatan pemenuhan SDM transportasi yang kompeten	persen	85,5 (2023)	85,5		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.01 KP: Pengembangan Konektivitas jalan pada Jalur Utama dan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan	01 - Meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan mendukung pertumbuhan dan pemerataan	01 - Tingkat aksesibilitas jalan jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan	km per 100 km^2	2,70	2,76	22.248.355,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Panjang jalan tol yang beroperasi (kumulatif angka dasar tahun 2020)	km	933 (2020–2024)	1176		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten /kota	persen	95/69/55	94/71/56/82		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.01.01 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Lintas Utama Pulau							
03.01.01.02 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan/Jembatan Non Lintas Utama							
03.01.01.03 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan Mendukung Kawasan Strategis Nasional							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.01.04 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan Mendukung Simpul Transportasi dan/atau Terintegrasi dengan *Hinterland*							
03.01.01.05 PRO-P: Penanganan Konektivitas Jalan mendukung Wilayah Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.01.06 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Jalan Berkeselamatan							
03.01.01.09 PRO-P: Penanganan Jalan Daerah							
03.01.01.10 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Jalan							
03.01.02 KP: Pengembangan KA Penumpang Antar Kota dan Penguatan KA Angkutan Barang	01 - Terwujudnya KA penumpang antar kota dan penguatan KA angkutan barang yang andal	01 - Panjang jalur KA yang beroperasi	km (kumulatif)	6.880 (2023)	6.928	2.795.392,2	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jalur KA yang menggunakan persinyalan elektrik	persen	63 (2023)	65		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Kondisi jalur KA sesuai standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2	persen	93,85 (2023)	94		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.02.01 PRO-P: Pembangunan Jalur Kereta Api Antarkota							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.02.02 PRO-P: Peningkatan, Perawatan, dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api Mendukung Keandalan dan Keselamatan							
03.01.02.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Nonkomersil Kereta Api							
03.01.02.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Kereta Api							
03.01.03 KP: Pengembangan Jaringan Pelabuhan Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan pelabuhan yang terpadu	01 - Pelabuhan yang ditingkatkan kapasitasnya (kumulatif angka dasar 2020)	lokasi	72	97	4.965.367,9	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Penumpang angkutan laut nonkomersil	ribu penumpang	1.297	1.342		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Muatan barang angkutan laut nonkomersil	ton	986.594	725.132		022 - Kementerian Perhubungan
		04 - Tingkat keandalan kenavigasian	persen	92,33 (2023)	95,35		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.03.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut							
03.01.03.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Mendukung Kawasan Prioritas							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.03.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut Mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.03.05 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Laut Penumpang dan Barang Nonkomersil							
03.01.03.06 PRO-P: Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran Laut							
03.01.03.08 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Laut							
03.01.04 KP: Pengembangan Jaringan Bandara Terpadu	01 - Terwujudnya jaringan bandara yang terpadu untuk mendukung konektivitas wilayah	01 - Bandara yang dibangun dan dikembangkan (Kumulatif)	lokasi	100 (2020–2023)	116 (2020–2025)	1.429.792,7	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Jumlah layanan nonkomersil angkutan udara penumpang dan kargo	layanan	309	295		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Persentase kepatuhan keamanan penerbangan	persen	83,49	77		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.04.01 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara							
03.01.04.02 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Prioritas							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.04.03 PRO-P: Pembangunan dan Pengembangan Bandara Mendukung Kawasan Tertinggal dan Perbatasan							
03.01.04.04 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Angkutan Udara Penumpang							
03.01.04.05 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Nonkomersil Kargo Udara							
03.01.04.06 PRO-P: Keselamatan dan Keamanan Penerbangan							
03.01.04.07 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Udara							
03.01.05 KP: Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	01 - Terwujudnya konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkualitas	01 - Pelabuhan penyeberangan yang beroperasi	lokasi, kumulatif	230 (2023)	235	2.090.324,0	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Terminal penumpang yang beroperasi	lokasi, kumulatif	113 (2023)	115		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Lokasi rawan kecelakaan yang ditangani	lokasi	71	59		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.05.01 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.05.02 PRO-P: Pembangunan Sarana Angkutan Penyeberangan							
03.01.05.03 PRO-P: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Jalan, Multimoda, dan Angkutan Penyeberangan Nonkomersil ke Daerah 3TP							
03.01.05.04 PRO-P: Peningkatan Keselamatan Angkutan Darat							
03.01.05.05 PRO-P: Pengembangan/Pembangunan Simpul Konektivitas Darat							
03.01.05.06 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Darat							
03.01.06 KP: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan	01 - Terwujudnya sistem angkutan umum massal perkotaan yang efisien	01 - Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan (kumulatif)	kota	6 (2020–2023)	10 (2020–2025)	1.107.077,9	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	juta penumpang/hari	1,4 (2023)	1,42		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	juta penumpang/hari	2,989 (2023)	2,825		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Infrastruktur jalan perkotaan yang dibangun (kumulatif)	km (kumulatif)	51,50 (2020–2024)	54,50 (2020–2025)		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
03.01.06.01 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan							
03.01.06.02 PRO-P: Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel							
03.01.06.03 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan							
03.01.06.04 PRO-P: Jalan Perkotaan							
03.01.07 KP: Pengembangan SDM untuk Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM transportasi yang berdaya saing	01 - Tingkat lulusan SDM transportasi yang bersertifikat kompetensi	persen	92 (2023)	92	398.755,1	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Tingkat penyerapan lulusan pembentukan SDM transportasi	persen	85,1 (2023)	70		022 - Kementerian Perhubungan
03.01.07.01 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Vokasi SDM Transportasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.01.07.02 PRO-P: Pemenuhan Infrastruktur Penunjang SDM Transportasi							
03.01.07.03 PRO-P: Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi							
03.01.07.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pengembangan SDM Transportasi							
03.01.08 KP: Peningkatan Layanan Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Transportasi	01 - Meningkatnya layanan pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi	01 - Persentase pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	persen	42,10 (2023)	44,59	571.606,2	107 - Badan SAR Nasional
		02 - Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih (kumulatif angka dasar tahun 2020)	orang, kumulatif	5.155 (2020–2023)	12.558		107 - Badan SAR Nasional
03.01.08.01 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan (SAR)							
03.01.08.02 PRO-P: Peningkatan SDM Pencarian dan Pertolongan (SAR)							
03.01.08.03 PRO-P: Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02 PP: Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik	01 - Meningkatnya pembangunan TIK di tingkat nasional	01 - Indeks Pembangunan TIK (IPTIK) Nasional	-	5,90 (2023)	6,10	2.522.076,6	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
	02 - Meningkatnya transformasi digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)	-	49,20 (2022)	50,80		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
	03 - Meningkatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas	01 - Konsumsi listrik per kapita	kwh	1.411	1.464		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.01 KP: Penguatan Infrastruktur Telekomunikasi, Pos dan Penyiaran	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas di bidang telekomunikasi, pos dan penyiaran	01 - Jangkauan jaringan fiber optik per kecamatan	persen	70,53 (2023)	78	1.662.601,2	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - *Integrated Index for Postal Development* (2IPD)	-	50 (2022)	60		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Jangkauan penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*) per populasi	persen	73,44 (2023)	74		117 - Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
		04 - Jangkauan penyiaran radio terestrial per populasi	persen	70 (2023)	73		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Jangkauan jaringan pitalebar bergerak (*mobile broadband*) per populasi	persen	97,16 (2023)	97,30		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		06 - Pelanggan terlayani jaringan pitalebar tetap (*fixed broadband*) terhadap total rumah tangga	persen	20,82 (2023)	30		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		07 - Pengguna internet	persen	79,50	81,10		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		08 - Pertumbuhan pengakses *streaming* siaran radio digital	persen	31 (2023)	35		116 - Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
	02 - Meningkatnya kualitas internet pitalebar (*broadband*) nasional	01 - Kecepatan internet jaringan pitalebar tetap (*fixed broadband*)	Mbps	32,10	37		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Kecepatan internet jaringan pitalebar bergerak (*mobile broadband*)	Mbps	38,91 (2023)	50		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Rasio harga layanan jaringan pitalebar tetap terhadap pendapatan per kapita	persen	8,41 (2021)	4,50		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.01.001 PRO-P: Pemerataan Jaringan Telekomunikasi dan Akses Internet Cepat							
03.02.01.002 PRO-P: Pemerataan dan Pemenuhan Layanan Pos dan Logistik Digital							
03.02.01.003 PRO-P: Perluasan Layanan Penyiaran Digital dan Multiplatform							
03.02.01.004 PRO-P: Pengembangan Regulasi dan Pendanaan Dukungan Infrastruktur Digital							
03.02.01.005 PRO-P: Pengelolaan dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi dan Satelit							
03.02.02 KP: Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	01 - Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital	01 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Masyarakat		51,75 (2022)	52,065	343.176,6	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Indeks Transformasi Digital Nasional Pilar Pemerintah		51,13 (2022)	53,67		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		03 - Kapasitas pusat data per kapita	watt per kapita	0,74	0,85		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		04 - Indeks Ruang Digital Kondusif		- (indikator baru)	3		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.02.001 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pendukung Layanan Publik Digital							
03.02.02.002 PRO-P: Peningkatan Layanan Masyarakat dan Pemanfaatan Ruang Digital							
03.02.02.003 PRO-P: Pengembangan Regulasi, Kelembagaan, Tata Kelola, dan Pendanaan							
03.02.02.004 PRO-P: Riset dan Pengembangan Ekosistem Digital							
03.02.02.005 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Superplatform							
03.02.02.006 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*							
03.02.03 KP: Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Beban Dasar dan Variabel	01 - Terbangunnya infrastruktur pembangkit listrik yang andal	01 - Kapasitas pembangkit listrik (kumulatif angka dasar tahun 2024)	GW	100,69	103,9	51.357,7	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Penurunan emisi pembangkitan listrik	juta ton CO_2	16,94	16,41		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Produksi tenaga listrik	GWh	339.459	363.044		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.03.01 PRO-P: Pembangunan Pembangkit Listrik Beban Dasar dan Variabel serta Sistem Penyimpanan Energi							
03.02.03.02 PRO-P: Pengubahan Bahan Bakar Pembangkit Listrik yang Rendah Karbon							
03.02.04 KP: Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	01 - Meningkatnya kapasitas infrastruktur jaringan tenaga listrik	01 - Panjang jaringan transmisi tenaga listrik	kms	11.146,44	2.152	115.964,3	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - Kapasitas gardu induk	MVA	12.276,5	1.510		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Panjang jaringan distribusi tenaga listrik	kms	18.014,07	11.714		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		04 - Kapasitas gardu distribusi	MVA	2.368,74	1.949		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		05 - Rasio elektrifikasi nasional	persen	99,83	99,85		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		06 - SAIDI / SAIFI Nasional	(jam / pelanggan/tahun) / (kali / pelanggan/tahun)	5,34 / 3,23 (2023)	5,38 / 4,07		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		07 - Susut jaringan	persen	8,69 (TW III 2024)	8,72		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.02.04.01 PRO-P: Pembangunan Jaringan Transmisi dan Interkoneksi Dalam dan Antar Pulau (*Super Grid*)							
03.02.04.02 PRO-P: Pembangunan Jaringan Distribusi dan Terisolasi serta Listrik Pedesaan							
03.02.04.03 PRO-P: Digitalisasi Infrastruktur Ketenagalistrikan							
03.02.05 KP: Perluasan Jangkauan Infrastruktur Tenaga Listrik	01 - Meningkatnya jangkauan infrastruktur tenaga listrik	01 - SPKLU dan *private charging station* terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	3.202	5.810	348.976,8	020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		02 - SPBKLU terpasang (kumulatif angka dasar tahun 2023)	unit	1.902	2.070		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		03 - Koneksi tenaga listrik tambahan yang berkualitas	unit	155.429	130.000		020 - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
03.02.05.01 PRO-P: Pengembangan Koneksi Tenaga Listrik							
03.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur SPKLU dan SPBKLU							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03 PP: Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	01 - Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja formal	01 - Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	persen	0,97	1,10	1.463.774,4	149 - Kementerian Koperasi
		02 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	persen	3,06	3,10		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		03 - Rasio kewirausahaan	persen	3,08	3,10		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.01 KP: Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	01 - Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi	01 - Proporsi volume usaha koperasi sektor produksi terhadap total volume usaha koperasi	persen	7,24	8,35	77.932,5	149 - Kementerian Koperasi
03.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Usaha Koperasi							
03.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi							
03.03.01.03 PRO-P: Penguatan Kapasitas SDM dan Reputasi Koperasi							
03.03.01.04 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Koperasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03.02 KP: Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Sumber Daya Produktif	01 - Meningkatnya kapasitas usaha dan akses UMKM pada sumber daya produktif	01 - Proporsi UMKM yang memiliki izin usaha	persen	18,64	19,50	190.912,3	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
		02 - Proporsi kredit UMKM terhadap kredit perbankan	persen	19,00	21,60		150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Teknologi, Riset, dan Inovasi							
03.03.02.02 PRO-P: Perluasan Akses dan Inovasi Pembiayaan							
03.03.02.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan dan Akses Pasar							
03.03.02.04 PRO-P: Formalisasi Usaha serta Standardisasi dan Sertifikasi Produk							
03.03.02.05 PRO-P: Penyusunan Konsep dan Kebijakan UMKM Berkelanjutan							
03.03.03 KP: Pengembangan Kewirausahaan	01 - Meningkatnya jumlah orang berusaha dibantu buruh tetap	01 - Rasio pelaku usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	persen	18,99	19,17	1.194.929,6	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
03.03.03.01 PRO-P: Integrasi dan Pemanfaatan Basis Data Tunggal UMKM dan Koperasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.03.03.02 PRO-P: Integrasi Layanan Usaha							
03.03.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja UMKM							
03.03.03.04 PRO-P: Inkubasi dan Pendampingan Wirausaha Inklusif dan Berkelanjutan							
03.04 PP: Pendalaman Sektor Keuangan	01 - Peningkatan pendalaman sektor keuangan	01 - Aset perbankan/PDB	persen	57,2 (2023)	66,9	204.848,3	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Aset dana pensiun/PDB	persen	7,3 (2023)	8,0		Otoritas Jasa keuangan
		03 - Aset asuransi/PDB	persen	9,0 (2023)	9,1		Otoritas Jasa Keuangan
		04 - Kapitalisasi pasar modal/PDB	persen	55,9 (2023)	57,8		Otoritas Jasa Keuangan
		05 - Total kredit/PDB	persen	33,9 (2023)	37,8		Otoritas Jasa Keuangan
		06 - Inklusi keuangan	persen	88,7 (2023)	91,0		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.01 KP: Penguatan Peran Perbankan	01 - Meningkatnya peran perbankan	01 - Total DPK/PDB	persen	40,5 (2023)	43,0	18.852,5	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Rasio kredit UMKM terhadap total kredit	persen	20,55 (2023)	21,58		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.01.001 PRO-P: Keberagaman Produk Perbankan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.04.01.002 PRO-P: Kredit Sektor Produktif							
03.04.01.003 PRO-P: Kredit Penyediaan Perumahan							
03.04.01.004 PRO-P: Kredit Sektor Berkelanjutan							
03.04.02 KP: Penguatan Peran Sektor Keuangan Nonbank	01 - Memperkuat peran sektor keuangan nonbank	01 - Densitas dana pensiun	juta rupiah	0,98 (2023)	1,05	799,8	Otoritas Jasa Keuangan
		02 - Penetrasi asuransi	persen	2,8 (2023)	2,9		Otoritas Jasa Keuangan
		03 - Nilai transaksi saham/PDB	persen	16,0 (2023)	19,8		Otoritas Jasa Keuangan
03.04.02.001 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Dana Pensiun							
03.04.02.002 PRO-P: Penetrasi dan Densitas Asuransi							
03.04.02.003 PRO-P: Pendalaman Pasar Modal							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.04.03 KP: Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan	01 - Meningkatnya inklusi dan literasi keuangan	01 - Indeks Literasi Keuangan	persen	51,20 (2023)	57,25	185.196,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
03.04.03.001 PRO-P: Literasi dan Edukasi Keuangan							
03.04.03.002 PRO-P: Perlindungan Konsumen							
03.04.03.003 PRO-P: Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah							
03.04.03.004 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat							
03.04.03.005 PRO-P: Fasilitasi Intermediasi dan Saluran Distribusi							
03.04.03.006 PRO-P: Infrastruktur dan Teknologi Informasi Keuangan							
03.04.03.007 PRO-P: Ekosistem Pendukung Sektor Keuangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05 PP: Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan	01 - Pengeluaran wisatawan mancanegara	USD/kunjungan	1.239 (2023)	1.220	720.640,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Tenaga kerja pariwisata	juta orang	22,89 (2022)	25,75		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Indeks Pembangunan Pariwisata (Travel & Tourism Development Index, *terbit bienial tahun genap)	peringkat (xx besar)	22	22*		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Kunjungan wisatawan mancanegara	juta kunjungan	11,57 (2023)	14,0–15,0		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Perjalanan wisatawan nusantara	juta perjalanan	852,80 (2023)	1.084		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	19.976.019,1 (2023)	22.023.561,06	254.925,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	miliar rupiah	10.878,30 (2018)	23.672,34		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Devisa pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta USD	334 (2018)	718,37		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Jawa Tengah)	orang	2.925.715 (2022)	3.280.514		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	juta rupiah	955.099,60 (2023)	1.191.228,32		147 - Kementerian Pariwisata
		06 - Tenaga kerja pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (DIY)	orang	439.029 (2022)	454.432		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.01.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi Berbasis Pelestarian Kearifan Budaya Jawa dan Ziarah, termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi, di Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.01.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.01.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan							
03.05.02 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Bali	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Bali	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bali	juta rupiah	54.683.173,97 (2023)	60.288.199,30	88.330,3	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bali	miliar rupiah	101.325,81 (2023)	123.500,99		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bali	juta USD	9.364,00 (2019)	12.665,99		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bali	orang	622.432 (2022)	644.270		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bali	juta rupiah	7.547.919,45 (2023)	9.413.987,20		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.02.001 PRO-P: Penataan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata Sarbagita							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.02.002 PRO-P: Pengembangan Transportasi Umum Ramah Lingkungan Bali							
03.05.02.003 PRO-P: Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Bali Utara							
03.05.02.004 PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Bali							
03.05.02.005 PRO-P: Pengembangan SDM dan Kebudayaan Bali							
03.05.02.006 PRO-P: Promosi dan *Branding* Bali sebagai Destinasi Terbaik di Dunia							
03.05.03 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif Kepulauan Riau	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Kepulauan Riau	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Kepulauan Riau	juta rupiah	6.301.872,6 (2023)	6.947.814,54	39.656,2	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Kepulauan Riau	miliar rupiah	5.413,10 (2019)	5.819,81		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Kepulauan Riau	juta USD	2.001,1 (2019)	2.870,43		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Kepulauan Riau	orang	236.159 (2022)	294.642		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Kepulauan Riau	juta rupiah	2.355.111,35 (2023)	2.937.364,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Batam-Bintan							
03.05.03.002 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim dan Wisata Kesehatan							
03.05.03.003 PRO-P: Penguatan Identitas KTA Batam, Bintan, dan Natuna							
03.05.03.004 PRO-P: Akselerasi Ekonomi Biru di Natuna							
03.05.03.005 PRO-P: Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial Kepulauan Riau							
03.05.03.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata dan Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau							
03.05.03.007 PRO-P: Pengembangan Sistem Transportasi Ramah Lingkungan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.04 KP: Penguatan Destinasi Regeneratif *Greater* Jakarta	01 - Meningkatnya kesesuaian kualitas daya dukung dan daya tampung pariwisata, serta kualitas rantai pasok pariwisata Jakarta	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum *greater* Jakarta	juta rupiah	191.980.855,2 (2023)	211.658.892,86	16.896,6	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara *greater* Jakarta	miliar rupiah	367.760,29 (2023)	421.993,70		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Jakarta	juta USD	2.291,8 (2019)	3.439,37		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (DKI)	orang	1.479.227 (2022)	1.537.529		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (Jawa Barat)	orang	4.978.804 (2022)	5.591.063		147 - Kementerian Pariwisata
		06 - Tenaga kerja pariwisata *greater* Jakarta (Banten)	orang	1.230.545 (2022)	1.523.452		147 - Kementerian Pariwisata
		07 - Investasi sektor pariwisata *greater* Jakarta	juta rupiah	12.650.725,3 (2023)	14.130.860,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.04.001 PRO-P: Transformasi Jakarta sebagai Kota Global							
03.05.04.002 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.04.003 PRO-P: Pengurangan Emisi dan Pengelolaan Lingkungan							
03.05.04.004 PRO-P: Penguatan Destinasi Wisata Urban dan MICE							
03.05.04.005 PRO-P: Pengarusutamaan Pariwisata Berkelanjutan							
03.05.04.006 PRO-P: Pengembangan SDM Pariwisata Berstandar Internasional							
03.05.05 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Lombok-Gili Tramena	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	2.206.361,02 (2023)	2.432.513,02	59.966,1	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Lombok-Gili Tramena	miliar rupiah	5.666,50 (2018)	14.850,43		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta USD	290 (2018)	800,60		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Lombok-Gili Tramena	orang	428.952 (2022)	544.460		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Lombok-Gili Tramena	juta rupiah	4.488.604,30 (2023)	5.598.319,34		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.05.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.003 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Lombok-Gili Tramena							
03.05.05.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.06 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Manado-Likupang	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Manado-Likupang	juta rupiah	2.573.717,65 (2023)	2.837.523,71	5.016,5	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Manado-Likupang	miliar rupiah	6.491,89 (2019)	8.982,47		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Manado-Likupang	juta USD	139(2019)	267,09		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Manado-Likupang	orang	208.674 (2022)	219.919		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Manado-Likupang	juta rupiah	774.326,55 (2023)	965.762,85		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.06.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Manado-Likupang							
03.05.06.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Manado-Likupang							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.06.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Manado-Likupang							
03.05.06.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Manado-Likupang							
03.05.06.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							
03.05.07 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata Kelola di destinasi pariwisata Bangka-Belitung	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bangka Belitung	juta rupiah	3.281.893,64 (2023)	3.614.153,73	39.792,4	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Bangka Belitung	miliar rupiah	2.455,23 (2019)	13.161,89		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bangka Belitung	juta USD	23,90 (2019)	41,54		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bangka Belitung	orang	98.106 (2022)	109.216		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bangka Belitung	juta rupiah	527.458,60 (2023)	657.861,88		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.07.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Bangka-Belitung							
03.05.07.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bangka-Belitung							
03.05.07.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bangka-Belitung							
03.05.07.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.08 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Danau Toba	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Danau Toba	juta rupiah	2.193.003,64 (2022)	2.417.786,51	64.278,0	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Danau Toba	miliar rupiah	1.021 (2018)	2.048,41		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Danau Toba	juta USD	73,1 (2018)	163,91		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Danau Toba	orang	1.118.911 (2022)	1.199.556		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Danau Toba	juta rupiah	411.336,50 (2023)	513.030,98		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.08.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Danau Toba							
03.05.08.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Danau Toba							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.08.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Danau Toba							
03.05.08.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Danau Toba							
03.05.09 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Raja Ampat	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Raja Ampat	juta rupiah	14.636,37 (2022)	18.196,50	1.396,0	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Raja Ampat	miliar rupiah	195,67 (2022)	290,40		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata dari Raja Ampat	juta USD	5 (2019)	42,44		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Raja Ampat	orang	7.542 (2022)	9.054		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Raja Ampat	juta rupiah	12.575,05 (2023)	15.683,97		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.09.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Raja Ampat							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.09.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Raja Ampat							
03.05.09.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Penunjang Pariwisata Raja Ampat							
03.05.09.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Raja Ampat							
03.05.09.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Raja Ampat							
03.05.09.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Raja Ampat							
03.05.09.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Raja Ampat							
03.05.10 KP: Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing kepariwisataan Labuan Bajo	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Labuan Bajo	juta rupiah	38.850 (2023)	42.889,25	6.269,8	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Labuan Bajo	miliar rupiah	974,49	1.175,23		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Labuan Bajo	juta USD	161 (2019)	283,52		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Tenaga kerja pariwisata Labuan Bajo	orang	251.887 (2023)	304.910		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	juta rupiah	532.233,85 (2023)	663.817,72		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.10.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Labuan Bajo							
03.05.10.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Labuan Bajo							
03.05.10.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Labuan Bajo							
03.05.10.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Labuan Bajo							
03.05.10.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Labuan Bajo							
03.05.10.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Labuan Bajo							
03.05.10.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Labuan Bajo							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.11 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Bromo-Tengger-Semeru	juta rupiah	17.501.425,28 (2023)	19.273.275,88	119.541,1	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara di Bromo-Tengger-Semeru	miliar rupiah	838,7	1.112,12		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta USD	4,0 (2019)	7,21		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	orang	3.493.968 (2022)	3.954.841		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Bromo-Tengger-Semeru	juta rupiah	778.773,45 (2023)	971.309,16		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.11.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.11.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Bromo-Tengger-Semeru							
03.05.11.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							
03.05.12 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Wakatobi	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Wakatobi	juta rupiah	35.525,73 (2023)	39.122,37	21.521,6	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Wakatobi	miliar rupiah	108	132,95		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Wakatobi	juta USD	7,44	9,38		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Wakatobi	orang	209.447 (2022)	243.687		147 - Kementerian Pariwisata

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Investasi sektor pariwisata Wakatobi	juta rupiah	31.376,65 (2023)	45.520,70		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.12.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Wakatobi							
03.05.12.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Wakatobi							
03.05.12.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Wakatobi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.13 KP: Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	01 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas terkait aksesibilitas, amenitas, dan tata kelola di destinasi pariwisata Morotai	01 - PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum Morotai	juta rupiah	2.584,92 (2023)	2.849,87	3.050,5	147 - Kementerian Pariwisata
		02 - Pendapatan dari wisatawan nusantara Morotai	miliar rupiah	103,92 (2022)	159,98		147 - Kementerian Pariwisata
		03 - Devisa pariwisata Morotai	juta USD	0,69	0,78		147 - Kementerian Pariwisata
		04 - Tenaga kerja pariwisata Morotai	orang	73.603 (2022)	82.835		147 - Kementerian Pariwisata
		05 - Investasi sektor pariwisata Morotai	juta rupiah	1.151,65 (2023)	49.626,20		147 - Kementerian Pariwisata
03.05.13.001 PRO-P: Aksesibilitas Pariwisata Morotai							
03.05.13.002 PRO-P: Pengembangan Atraksi termasuk *Event* Berkualitas dan Warisan Geologi Morotai							
03.05.13.003 PRO-P: Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Amenitas Pariwisata Morotai							
03.05.13.004 PRO-P: Pengembangan Keterampilan SDM dan Layanan Pariwisata Morotai							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.05.13.005 PRO-P: Pemasaran Pariwisata Morotai							
03.05.13.006 PRO-P: Pengembangan Industri, Usaha Masyarakat, dan Investasi Pariwisata Morotai							
03.05.13.007 PRO-P: Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Morotai							
03.05.13.008 PRO-P: Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus							
03.06 PP: Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual	01 - Meningkatnya kinerja sektor ekonomi kreatif	01 - Laju pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	persen	5,30 (2022)	5,3–5,5	267.844,6	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif	persen	-11,07 (2023)	4,9–5,2		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		03 - Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	juta orang	24,92 (2023)	25,55		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		04 - Pertumbuhan investasi ekonomi kreatif	persen	31,94 (2023)	5,3–7,3		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.01 KP: Penguatan Ekosistem Pemampu Ekonomi Kreatif	01 - Meningkatnya investasi ekonomi kreatif	01 - Nilai investasi ekonomi kreatif	triliun rupiah	89,33 (2023)	123,85–136,28	43.074,7	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
03.06.01.01 PRO-P: Penguatan Data Ekonomi Kreatif							
03.06.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Pemangku Kepentingan Ekonomi Kreatif							
03.06.01.03 PRO-P: Fasilitasi Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif							
03.06.01.04 PRO-P: Penguatan Komersialisasi Kekayaan Intelektual							
03.06.01.05 PRO-P: Pelindungan Hasil Kreativitas							
03.06.01.06 PRO-P: Penguatan Jejaring dan Integrasi Rantai Pasok Ekonomi Kreatif							
03.06.02 KP: Penguatan Ekosistem Film, Animasi, Video, dan Musik	01 - Meningkatnya kinerja subsektor film, animasi, video, dan musik	01 - Pertumbuhan PDB subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	2,72 (2022)	6,8–7,5	150.259,2	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor film, animasi, video, dan musik	persen	-8,00 (2020)	6,7–11,9		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor film, animasi, video, dan musik	ribu orang	188 (2022)	203		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.02.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.02.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Film, Animasi, Video, dan Musik							
03.06.03 KP: Penguatan Ekosistem Fesyen dan Kriya	01 - Meningkatnya kinerja subsektor fesyen dan kriya	01 - Pertumbuhan PDB subsektor fesyen dan kriya	persen	7,76 (2022)	5,3–8,0	28.400,0	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor fesyen dan kriya	persen	-12,01 (2023)	3,5		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor fesyen dan kriya	ribu orang	9.107 (2022)	9.836		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.03.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Fesyen dan Kriya							
03.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	01 - Meningkatnya kinerja subsektor aplikasi dan gim	01 - Pertumbuhan PDB subsektor aplikasi dan gim	persen	2,58 (2022)	6,7–7,0	36.650,7	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor aplikasi dan gim	persen	152,41 (2021)	6,0–10,0		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor aplikasi dan gim	ribu orang	152 (2022)	187		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.04.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.04.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.04.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.04.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.04.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.04.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Aplikasi dan Gim							
03.06.05 KP: Penguatan Ekosistem Kuliner	01 - Meningkatnya kinerja subsektor kuliner	01 - Pertumbuhan PDB subsektor kuliner	persen	8,61 (2022)	5,3–8,8	9.460,0	148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
		02 - Pertumbuhan ekspor subsektor kuliner	persen	-2,47 (2023)	5,2–5,4		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah tenaga kerja subsektor kuliner	ribu orang	13.435 (2022)	14.048		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
03.06.05.01 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi Subsektor Kuliner							
03.06.05.02 PRO-P: Pengembangan Pendidikan Subsektor Kuliner							
03.06.05.03 PRO-P: Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan Subsektor Kuliner							
03.06.05.04 PRO-P: Penyediaan Infrastruktur Subsektor Kuliner							
03.06.05.05 PRO-P: Pengembangan Sistem Pemasaran Subsektor Kuliner							
03.06.05.06 PRO-P: Pengembangan Insentif Subsektor Kuliner							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 4: MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04 PN: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	01 - Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	01 - Rata-rata nilai PISA: membaca; matematika; sains		359; 366; 383 (2022)	396; 404; 416	328.315.722,0	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,22	9,33		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Harapan lama sekolah	tahun	13,21	13,32		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	persen	66,30 (2023)	66,78		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	persen	10,15 (2023)	11,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional: literasi membaca; numerasi		63,06; 55,92 (2024)	64,89; 57,36		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya kesehatan untuk semua	01 - Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	72,13 (2023)	74,43		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Angka kelahiran total (*total fertility rate*)	rata-rata kelahiran per wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun	2,11	2,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	03 - Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	01 - Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,447 (2023)	0,430		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		69,51 (2023)	72,89		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Pembangunan Pemuda		60,59 (2023)	65,16		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Indeks Pembangunan Gender		91,85	92,02–92,11		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		05 - Indeks Perlindungan Anak		68,29 (2023)	70,19		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		06 - Mobilitas penduduk lanjut usia	persen	92,94 (2023)	94		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		07 - Mobilitas penduduk penyandang disabilitas	persen	68,42 (2023)	69		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	04 - Menguatnya iptek, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja	01 - Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,91	4,50–5,00		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Peringkat Indeks Inovasi Global	peringkat	54	53		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	05 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia dan budaya berolahraga di masyarakat	01 - Peringkat pada *SEA Games*	peringkat	3 (2023)	2–4		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	persen	9,04	10,36–11,45		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.01 PP: Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan dengan percepatan wajib belajar 13 tahun yang berkualitas (1 tahun pendidikan pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	01 - Tingkat penyelesaian jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat	persen	67,07	67,44	45.231.624,4	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Jumlah anak tidak sekolah usia 6-18 tahun	anak tidak sekolah	3.777.202	3.622.785		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		03 - Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB/sederajat yang pernah mengikuti PAUD	persen	63,81	64,39		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.01.01 KP: Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	01 - Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	36,03	36,61	933.971,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.01.01.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Satuan PAUD							
04.01.01.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Afirmatif untuk PAUD							
04.01.02 KP: Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	01 - Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	26,67	31,14	21.196.086,4	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	persen	42,09	46,08		025 - Kementerian Agama
04.01.02.01 PRO-P: Revitalisasi Prasarana Pendidikan dan Pembangunan Satuan Pendidikan Baru (PHTC)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.01.02.02 PRO-P: Revitalisasi Sarana Pendidikan (PHTC)							
04.01.03 KP: Penyaluran Bantuan Pendidikan yang Tepat Sasaran	01 - Terwujudnya perluasan kesempatan belajar untuk peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin	01 - Rasio APK SMA/SMK/MA/sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya		0,765	0,788	22.916.824,6	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Tingkat penyelesaian pendidikan MA/Ulya/SMTK/SMAK/Uta ma Widyalaya/Uttama Dhammasekha	persen	68,63	70,48		025 - Kementerian Agama
04.01.03.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah							
04.01.03.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bagi Peserta Didik Kurang Mampu							
04.01.03.03 PRO-P: Penyediaan Beasiswa Prestasi dan Beasiswa Afirmasi							
04.01.04 KP: Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	01 - Tercapainya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	01 - Jumlah anak tidak sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan nonformal	anak	- (indikator baru)	496.810	184.741,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	anak	261.197	261.297		025 - Kementerian Agama
04.01.04.01 PRO-P: Pembinaan dalam Pencegahan Anak Tidak Sekolah							
04.01.04.02 PRO-P: Penanganan Anak Tidak Sekolah							
04.02 PP: Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	01 - Terwujudnya kualitas pengajaran dan pembelajaran yang efektif	01 - Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 46,57; b. 41,42	a. 50,55; b. 43,52	6.861.877,7	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indeks karakter, indeks iklim keamanan sekolah, dan indeks inklusivitas dan kebinekaan pada kategori baik	persen	33,03 (2023)	33,24		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - *Early Childhood Development Index* (ECDI)		87,70	88,30		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
		04 - Persentase lulusan sekolah unggul baru dan sekolah unggul transformasi yang diterima di perguruan tinggi terbaik luar atau dalam negeri	persen	- (indikator baru)	70		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.01 KP: Pengembangan Inovasi Pembelajaran dengan Memanfaatkan Teknologi Digital dan Penerapan Pedagogi Modern (PTCK)	01 - Terwujudnya pembelajaran yang inovatif, serta meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik	01 - Persentase satuan pendidikan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	15,69	16,56	364.949,0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memanfaatkan komputer dan internet untuk tujuan pembelajaran	persen	30,50	32,24		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.01.01 PRO-P: Pemanfaatan Platform Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi							
04.02.01.02 PRO-P: Penyediaan Akses Listrik dan Internet untuk Satuan Pendidikan							
04.02.02 KP: Penciptaan Ekosistem Satuan Pendidikan yang Mendukung Proses Pembelajaran Berkualitas, termasuk Peningkatan Kecakapan Literasi Kelas Awal, serta Penguatan Karakter dan *Wellbeing* Peserta Didik dan Pendidik	01 - Terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan mampu mengembangkan kompetensi sebagai masyarakat yang aktif	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang memiliki program terkait peningkatan kualitas lingkungan belajar	persen	18,15	36,30	359.529,7	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang ramah anak	persen	10,08	20,05		025 - Kementerian Agama
04.02.02.01 PRO-P: Penguatan Pendidikan Karakter yang Dilaksanakan pada Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik dan Pendidik							
04.02.02.02 PRO-P: Peningkatan Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ASN Maupun Non ASN dalam Bentuk Finansial dan Nonfinansial							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.02.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi bagi Peserta Didik							
04.02.03 KP: Pemantapan Sistem Asesmen Komprehensif	01 - Terwujudnya peserta didik yang kompeten dan mampu mengaplikasikan materi-materi pembelajaran	01 - Persentase peserta didik satuan pendidikan formal dan nonformal yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 68,13; b. 62,51 (2023)	a. 68,62; b. 67,35	344.918,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi tingkat nasional: a. literasi membaca; dan b. numerasi	persen	a. 58,07; b. 50,91 (2023)	a. 59,30; b. 52,55		025 - Kementerian Agama
04.02.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Asesmen dan Pengujian Pendidikan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.03.03 PRO-P: Pengembangan Kebijakan dan Model Asesmen Pendidikan							
04.02.04 KP: Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI)	01 - Terwujudnya tumbuh kembang anak usia dini secara optimal dalam mendukung kualitas belajar anak	01 - Persentase kab/kota yang menerapkan PAUD-HI	persen	50,19	64,79	3.412.504,2	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.02.04.01 PRO-P: Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan PAUD-HI							
04.02.04.02 PRO-P: Penguatan Pendidikan, Pengasuhan, Peningkatan Gizi dan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Dini							
04.02.05 KP: Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama dan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa	01 - Tercapainya peningkatan kualitas dan pemahaman ilmu agama pada peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan	01 - Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	persen	41,96	54,93	60.745,9	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase pemenuhan kebutuhan guru pendidikan agama pada satuan pendidikan	persen	54,67	62,08		025 - Kementerian Agama
04.02.05.01 PRO-P: Peningkatan Kompetensi pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Agama							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.05.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Pemberdayaan Kualitas bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan							
04.02.05.03 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pembelajaran Agama							
04.02.06 KP: Penerapan Kurikulum yang Kontekstual Berpusat pada Peserta Didik serta Fokus pada Karakter dan Kompetensi Esensial	01 - Terwujudnya pembelajaran yang memuat aspek mendasar dan relevan dengan kebutuhan saat ini dan masa depan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	83,94	87,96	234.654,1	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang menerapkan kurikulum yang kontekstual berpusat pada peserta didik serta fokus pada karakter dan kompetensi esensial	persen	50,21	53,52		025 - Kementerian Agama
04.02.06.01 PRO-P: Penyediaan Buku dan Bahan Ajar yang Berkualitas							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.06.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran yang Adaptif							
04.02.06.03 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Model Pembelajaran Adaptif							
04.02.07 KP: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	01 - Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	01 - Jumlah unit sekolah unggul baru yang beroperasi	unit	- (indikator baru)	- (indikator baru)	2.000.000,0	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah sekolah unggul transformasi yang terbina	unit	- (indikator baru)	12		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.02.07.01 PRO-P: Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul							
04.02.07.02 PRO-P: Pembinaan Sekolah Unggul Transformasi							
04.02.08 KP: Revitalisasi Pendidikan Nonformal	01 - Tercapainya peningkatan mutu pendidikan luar sekolah dan menjamin pendidikan kesetaraan sebanding dengan pendidikan formal	01 - Persentase satuan pendidikan nonformal yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	22,01	24,43	84.575,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.02.08.01 PRO-P: Penyediaan Layanan Pendidikan Nonformal							
04.02.08.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Pendidikan Nonformal							
04.03 PP: Pemenuhan Layanan Pendidikan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan yang Berkualitas	01 - Terwujudnya layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas	01 - Persentase peserta didik yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyelesaikan pendidikan setara formal	persen	56,00	65,00	350.357,2	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase satuan pendidikan formal pesantren yang memperoleh hasil asesmen minimal jayyid	persen	- (indikator baru)	10,00		025 - Kementerian Agama
04.03.01 KP: Peningkatan kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Meningkatnya kualitas pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang dinilai dan dievaluasi mutunya	persen	- (indikator baru)	30,00	277.390,5	025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.03.01.01 PRO-P: Penyediaan Bantuan Operasional Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.01.02 PRO-P: Penyediaan Bantuan Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Berbasis Kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Keagamaan							
04.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Bantuan Sarana Prasarana untuk Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.02 KP: Rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terpenuhinya rekognisi lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase lulusan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan rekognisi	persen	32	55	34.983,1	025 - Kementerian Agama
04.03.02.01 PRO-P: Pembinaan Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.02.02 PRO-P: Pembinaan Keagamaan untuk Peserta Didik							
04.03.03 KP: Penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Terwujudnya penguatan penjaminan mutu pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan	01 - Persentase satuan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang mendapatkan pendampingan	persen	- (indikator baru)	10,00	37.983,6	025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Akreditasi Satuan Pendidikan Keagamaan							
04.03.03.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Mutu pada Satuan Pendidikan							
04.04 PP: Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pemerataan Guru		36,91	35,91	21.813.310,0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan yang memiliki indikator kualitas pembelajaran dengan kategori baik	persen	35,21 (2023)	41,63		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
04.04.01 KP: Reformasi Pendidikan Keguruan melalui Penguatan LPTK dan Revitalisasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)	01 - Menguatnya mutu lembaga pelaksana pendidikan tenaga kependidikan dan profesi guru	01 - Proporsi perguruan tinggi LPTK yang terakreditasi	persen	94,24 (2022)	96,4	658.288,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi PPG yang terakreditasi unggul	persen	0 (2022)	1,25		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan profesional	01 - Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal	persen	57,94	71,50		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase guru dan tenaga kependidikan yang profesional pada madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan	persen	38,91 (2023)	51,17		025 - Kementerian Agama
04.04.01.01 PRO-P: Revitalisasi LPTK dan Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan PPG							
04.04.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidik melalui Sertifikasi Profesi							
04.04.02 KP: Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, *in-service training*), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	01 - Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran	01 - Persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memiliki indeks pemerataan guru dengan kategori baik	persen	32,61	40,22	21.155.021,9	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase provinsi yang memiliki indeks pemerataan guru madrasah dengan kategori baik	persen	80,00	80,85		025 - Kementerian Agama

SK No 120497 C

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.04.02.01 PRO-P: Pemenuhan dan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
04.04.02.02 PRO-P: Pemenuhan Kesejahteraan Afirmatif Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Memenuhi Kekurangan Guru							
04.04.02.03 PRO-P: Perencanaan dan Kebijakan Penyediaan Guru ASN							
04.04.02.04 PRO-P: Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
04.04.02.05 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Guru Agama Berbasis Kinerja							
04.04.02.06 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Kinerja							
04.04.02.07 PRO-P: Pendampingan Pembelajaran untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
04.05 PP: Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan	01 - Terselenggaranya sistem tata kelola pendidikan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, serta reputasi kelembagaan pendidikan	01 - Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	persen	62,80	64,06	1.407.991,2	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase satuan pendidikan dengan akreditasi minimal B	persen	64,94 (2023)	67,16		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.05.01 KP: Penguatan Manajemen Kepemimpinan Lembaga Pendidikan	01 - Terwujudnya lembaga pendidikan yang ideal, mandiri, dan berintegritas	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	54,06 (2023)	59,47	62.149,5	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	persen	41,79	42,50		025 - Kementerian Agama
04.05.01.02 PRO-P: Pendampingan dalam Peningkatan Kualitas untuk Kepala Satuan Pendidikan							
04.05.02 KP: Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan Khususnya Terkait Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	01 - Terwujudnya kolaborasi yang bersinergi dan berkualitas dalam peningkatan mutu pendidikan	01 - Persentase daerah (provinsi dan kab/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	persen	42,75	57,61	626.029,6	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.05.02.01 PRO-P: Pembinaan Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Pendidikan							
04.05.02.02 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pendidikan							
04.05.03 KP: Penguatan Sistem Penjaminan Mutu	01 - Terwujudnya pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan	01 - Persentase satuan pendidikan formal dan nonformal yang diakreditasi sesuai SNP	persen	89,67 (2023)	98,65	719.812,1	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
		02 - Persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang diakreditasi sesuai SNP	persen	30,48	33,81		025 - Kementerian Agama
04.05.03.01 PRO-P: Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Peningkatan Penjaminan Mutu							
04.05.03.02 PRO-P: Penyediaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Data Pendidikan							
04.05.03.03 PRO-P: Percepatan Akreditasi Lembaga Pendidikan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06 PP: Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas yang Merata dan Pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics* (STEAM)	01 - Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan berkembangnya STEAM di pendidikan tinggi	01 - Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi	persen	31,45 (2023)	33,94	18.810.467,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Persentase lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan: a. total; b. karyawan atau wirausaha;	persen	a. 59,86 (2022); b. 81,87 (2022)	a. 62,16; b. 83,59		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Proporsi mahasiswa baru berkuliah di prodi STEM terakreditasi unggul	persen	23,6 (2020)	28,8		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Proporsi mahasiswa baru yang berkuliah di perguruan tinggi berkualitas	persen	92,6 (2020)	93,7		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase dosen yang menduduki jabatan lektor/lektor kepala/guru besar	persen	40,67 (2022)	43,70		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		06 - Proporsi tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi bidang STEM	persen	28,13 (2023)	29,04		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.01 KP: Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	01 - Meningkatnya relevansi dan partisipasi pendidikan tinggi	01 - Rasio APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran keluarga (20% termiskin dan 20% terkaya)		0,33 (2023)	0,46	18.318.331,4	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah provinsi dengan APK PT di atas 31%	provinsi	22 (2023)	23		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Rata-rata masa tunggu lulusan pendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan	bulan	13 (2023)	12,5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Rasio *outbound* per *inbound* mahasiswa	persen	6,50 (2018)	7,20		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Persentase mahasiswa yang berkegiatan di luar program studi	persen	31,99 (2023)	32,99		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.01.01 PRO-P: Penyaluran Bantuan Pembiayaan Pendidikan Tinggi yang Tepat Sasaran							
04.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi							
04.06.01.03 PRO-P: Inovasi dan Perluasan Layanan Pendidikan Tinggi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.01.04 PRO-P: Penguatan Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Tinggi							
04.06.01.05 PRO-P: Pendidikan Karakter, Peningkatan Kemampuan Interpersonal dan Mobilitas Akademik Mahasiswa							
04.06.02 KP: Pengembangan STEAM	01 - Menguatnya bidang STEAM di perguruan tinggi	01 - Proporsi program studi STEM	persen	43,5 (2022)	47,7	80.112,3	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi program studi terakreditasi unggul a. total b. STEM c. Non STEM	persen	a. 14,97; b. 14,90; c. 15,02 (2022)	a. 16,93; b.16,87; c.16,98		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.02.01 PRO-P: Restrukturisasi dan Penataan Program Studi							
04.06.02.02 PRO-P: Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Berbasis STEAM							
04.06.03 KP: Penguatan Otonomi Perguruan Tinggi Sebagai Rumah Masyarakat Ilmiah	01 - Meningkatnya kualitas kelembagaan perguruan tinggi untuk mendukung penguatan otonomi perguruan tinggi sebagai rumah masyarakat ilmiah	01 - Proporsi perguruan tinggi terakreditasi	persen	59,55 (2022)	63,64	51.005,0	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah perguruan tinggi yang terpetakan berdasarkan keunggulannya	perguruan tinggi	11 (2023)	12		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.03.01 PRO-P: Akreditasi Perguruan Tinggi							
04.06.03.02 PRO-P: Fasilitasi dan Rekomendasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perguruan Tinggi							
04.06.03.03 PRO-P: Penguatan kampus Sehat, Aman, Nyaman, dan Inklusif							
04.06.03.04 PRO-P: Akselerasi Implementasi Diferensiasi Misi Perguruan Tinggi							
04.06.04 KP: Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Dosen	01 - Terwujudnya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan pemerataan distribusi dosen	01 - Persentase dosen berkualifikasi S3: a. total b. STEM c. Non STEM	persen	a. Total: 18,18 (2021); b. STEM: 16,01 (2021); c. Non STEM: 19,93 (2021)	a. Total: 21,56; b. STEM: 19,08; c. Non STEM: 23,54	361.018,4	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi dosen yang memiliki sertifikat dosen	persen	50,12 (2023)	51,29		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kapasitas	orang	16.551 (2023)	17.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualifikasi Akademik Dosen melalui Beasiswa Gelar							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.06.04.02 PRO-P: Tata Kelola dan Peningkatan Jenjang Karier Dosen							
04.06.04.03 PRO-P: Peningkatan dan Reorientasi Keterampilan Dosen							
04.07 PP: Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tenaga Kerja	01 - Terwujudnya tenaga kerja yang produktif dan berdaya saing yang relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan vokasi yang bekerja 1 tahun setelah kelulusan	persen	42,18	44,88	3.603.142,9	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	persen	1,63 (2023)	3,30		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.01 KP: Penguatan Pendidikan Menengah Vokasi	01 - Terwujudnya lulusan pendidikan menengah vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase angkatan kerja lulusan pendidikan menengah vokasi setahun terakhir yang bekerja/berwirausaha	persen	12,86	13,42	1.246.728,3	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
04.07.01.01 PRO-P: Penerapan Kurikulum dan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi Berbasis Industri							
04.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Pemerataan Pendidik pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.07.01.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Siswa pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi							
04.07.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana pada Satuan Pendidikan Menengah Vokasi (DAK)							
04.07.02 KP: Penguatan Pendidikan Tinggi Vokasi	01 - Meningkatnya lulusan pendidikan tinggi vokasi yang produktif dan berdaya saing serta relevan dengan kebutuhan industri	01 - Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi setahun terakhir yang: a. bekerja; b. berwirausaha	persen	a. 74,25; b. 4,29 (2023)	a. 74,50; b. 4,50	1.245.930,5	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.07.02.01 PRO-P: Relevansi Kurikulum dan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi							
04.07.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Mobilitas Dosen dan Instruktur PT Vokasi							
04.07.02.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa PT Vokasi							
04.07.02.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana PT Vokasi							
04.07.02.05 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Sektor Strategis							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.07.03 KP: Penguatan Pelatihan Vokasi	01 - Terwujudnya kegiatan pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan yang produktif dan sesuai kebutuhan industri bagi lulusan vokasi	01 - Persentase lulusan pelatihan vokasi setahun terakhir yang bekerja atau berwirausaha	persen	41,86 (2023)	44	956.737,3	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.03.01 PRO-P: Pelatihan Vokasi di Sektor Strategis							
04.07.03.02 PRO-P: Pemagangan Industri di Dalam dan Luar Negeri							
04.07.03.03 PRO-P: Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja							
04.07.03.04 PRO-P: Fasilitasi dan Bantuan Lembaga Pelatihan Vokasi							
04.07.03.05 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Instruktur dan Pelatih							
04.07.04 KP: Penguatan Produktivitas Berbasis Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif	01 - Terciptanya iklim ketenagakerjaan yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja	01 - Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi	persen	62,13 (2023)	62,97	153.746,8	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	7.120.907 (2023)	13.289.510		026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan	perusahaan	530.809 (2023)	447.352		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
04.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kerja Sama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
04.07.04.02 PRO-P: Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
04.07.04.03 PRO-P: Iklim Ketenagakerjaan yang Mendukung Pasar Kerja Fleksibel, Responsif Gender dan Inklusif							
04.07.04.04 PRO-P: Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja							
04.08 PP: Peningkatan Kontribusi Iptek dan Inovasi dalam Pembangunan Nasional	01 - Meningkatnya proporsi anggaran iptek dan inovasi terhadap PDB untuk mendukung pembangunan nasional	01 - Pengeluaran iptek dan inovasi	persen PDB	0,28 (2020)	0,30	5.121.798,4	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Proporsi anggaran litbang non pemerintah/ swasta	persen	12,5 (2020)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Jumlah perguruan tinggi yang masuk ke dalam peringkat *THE Impact Ranking SDGs*: a. Top 300; b. Top 600; c. Top 1000	perguruan tinggi	a. 8; b. 11; c. 22 (2023)	a. 8; b. 12; c. 22		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.01 KP: Penguatan kapasitas Iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya kualitas SDM iptek dan inovasi	01 - Jumlah SDM iptek (dosen, peneliti dan perekayasa) per juta penduduk	SDM iptek per juta penduduk	1.242	1.267	1.655.568,1	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Proporsi SDM iptek kualifikasi s3 dengan reputasi top 100 dunia di bidangnya	persen	- (indikator baru)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Proporsi jumlah SDM iptek dengan H Index ≥ 10	persen	0,12	0,15		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		04 - Jumlah Kekayaan Intelektual (KI) per 100 periset	KI/100 periset	1,62	4,56		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kualitas infrastruktur iptek dan inovasi	01 - Jumlah infrastruktur iptek strategis yang dibangun	infrastruktur	8	1		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.01.01 PRO-P: SDM Iptek yang Mengikuti Pendidikan S3							
04.08.01.02 PRO-P: SDM Iptek dan Inovasi yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas yang Mendukung Kegiatan Iptek dan Inovasi							

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.01.03 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Iptek dan Inovasi Strategis							
04.08.01.04 PRO-P: Pengembangan Skema Rekrutmen dan Jenjang Karier SDM Iptek							
04.08.01.05 PRO-P: Pengembangan Skema Insentif SDM Iptek, Lembaga Riset, dan Industri							
04.08.02 KP: Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi	01 - Jumlah lembaga pengelola penelitian, inovasi dan pengabdian masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	- (indikator baru)	5	1.781.459,5	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
	02 - Meningkatnya peran BRIDA dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah BRIDA/ ekosistem daerah yang beroperasi optimal	lembaga	- (indikator baru)	2		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	03 - Meningkatnya peran *Science Techno Park* (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah *Science Techno Park* (STP) yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	5	5		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Jumlah *Science Techno Park* (STP) baru yang dikembangkan di luar Jawa	lembaga	- (indikator baru)	0		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah penerimaan STP berbasis iptek dan inovasi	milyar rupiah	- (indikator baru)	50		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Jumlah *startup* binaan yang produktif	*startup*	- (indikator baru)	2		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		05 - Jumlah *hub* tematik yang dikembangkan di BRIN	lembaga	- (indikator baru)	0		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		06 - Jumlah penerimaan dari pemanfaatan iptek dan inovasi di BRIN	milyar rupiah	- (indikator baru)	20		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	04 - Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas	01 - Jumlah *hub* iptekin di K/L yang mengampu bidang prioritas yang dibentuk	lembaga	- (indikator baru)	0		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
04.08.02.01 PRO-P: Pengembangan Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat							
04.08.02.02 PRO-P: Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemanfaatan Iptek dan Inovasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.02.03 PRO-P: Pengembangan Layanan dan Fasilitasi BRIDA/Ekosistem Daerah							
04.08.02.04 PRO-P: Pengembangan *Hub* Inovasi Sektoral dan Tematik							
04.08.02.05 PRO-P: Pengembangan Kapasitas *Science Techno Park* (STP)							
04.08.02.06 PRO-P: *Start up* yang Mendapatkan Fasilitasi Inkubasi							
04.08.03 KP: Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi secara masif di berbagai Bidang termasuk Pengawasan Ketenaganukliran	01 - Meningkatnya pemanfaatan iptek dan inovasi	01 - Jumlah produk hasil iptek dan inovasi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat pada bidang-bidang prioritas	produk	- (indikator baru)	25	879.464,7	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
	02 - Meningkatnya kerjasama iptek dan inovasi dengan mitra/ industri	01 - Jumlah kerjasama pemanfaatan iptek dan inovasi strategis dengan industri/badan usaha pada bidang-bidang prioritas	kerjasama	- (indikator baru)	25		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.03.01 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pangan							
04.08.03.02 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Energi							
04.08.03.03 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Pertahanan dan Keamanan							
04.08.03.04 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Sumber Daya Air							
04.08.03.05 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Industri Manufaktur yang Mendukung Hilirisasi SDA							
04.08.03.06 PRO-P: Pemanfaatan Hasil Riset Bidang Kesehatan							
04.08.03.07 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kebencanaan dan Lingkungan Hidup							
04.08.03.08 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kebijakan, Sosial Humaniora, dan Kebudayaan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.03.09 PRO-P: Pemanfaatan Riset Bidang Kelautan							
04.08.03.10 PRO-P: Kerjasama Iptek dan Inovasi dengan Mitra/Industri							
04.08.03.11 PRO-P: Pengawasan Tenaga Nuklir							
04.08.04 KP: Penguatan perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan dan berdaya saing	01 - Terwujudnya perguruan tinggi yang memiliki penelitian berdampak, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wilayah setempat	01 - Indeks *QS International Research Network Collaboration*		14,29 (2023)	19,35	805.306,2	139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		02 - Sitasi internasional perguruan tinggi Indonesia; a. rasio sitasi; b. *h-index*		a. 0,42; b. 318 (2023)	a. 1,88; b. 318		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		03 - Jumlah paten *granted* dari perguruan tinggi	paten	15.465 (2023)	17.500		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
		04 - Jumlah riset dan inovasi yang dimanfaatkan DUDI/masyarakat	produk	75.669 (2023)	82.000		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.08.04.01 PRO-P: Pengembangan Pusat Keunggulan dan Peningkatan Produktivitas Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi							
04.08.04.02 PRO-P: Peningkatan Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Riset dan Inovasi Perguruan Tinggi							
04.09 PP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya talenta riset inovasi, seni budaya, dan olahraga yang memperoleh rekognisi di tingkat nasional dan internasional	01 - Jumlah SDM iptek yang mendapatkan rekognisi internasional	orang	95	99	1.152.222,1	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional	karya seni budaya	15 (2023)	15		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat regional/internasional	persen	73,38 (2023)	76–80		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Peringkat pada *Asian Youth Games*	peringkat	15 (2013)	13–15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Peringkat pada *Asian Youth Para Games*	peringkat	5 (2021)	3–5		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.01 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	01 - Meningkatnya rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya serta penyelenggaraan ajang dan non ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia	01 - Jumlah talenta seni budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	talenta seni budaya	97 (2023)	111	738.871,3	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah festival dan pameran seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	festival dan pameran seni budaya	6	7		140 - Kementerian Kebudayaan
		03 - Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	persen	31,49	32,76		140 - Kementerian Kebudayaan
04.09.01.01 PRO-P: Pembinaan Talenta Seni Budaya							
04.09.01.02 PRO-P: Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya							
04.09.01.03 PRO-P: Pemberian Penghargaan untuk Talenta Seni Budaya							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.02 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	01 - Terciptanya SDM Iptek yang memiliki kompetensi tingkat internasional	01 - Rasio SDM iptek per satu juta penduduk	SDM iptek per 1 juta penduduk	1.151 (2023)	1.265	141.813,4	124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		02 - Jumlah SDM Iptek masuk ke dalam pemeringkatan *World's Top 2% Scientists*	orang	95 (2023)	99		124 - Badan Riset dan Inovasi Nasional
		03 - Raihan olimpiade sains dan teknologi dunia atau sejenis di tingkat pelajar dan mahasiswa	peraih	100 (2023)	144		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.09.02.01 PRO-P: Memperluas Kumpulan Bakat (*Talent Pool*) dan akuisisi Talenta Riset dan Inovasi							
04.09.02.02 PRO-P: Memperkuat Pembinaan serta Fasilitasi Talenta Riset dan Inovasi							
04.09.02.03 PRO-P: Meningkatkan Sarana Prasarana Esensial Manajemen Talenta							
04.09.02.04 PRO-P: Meningkatkan Sinergi Pendanaan dan Tata Kelola Kelembagaan Riset dan Inovasi							
04.09.02.05 PRO-P: Meningkatkan Apresiasi Talenta Riset dan Inovasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.09.03 KP: Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	01 - Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global	01 - Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandardisasi	provinsi	16 (2023)	18	146.453,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kab/kota dengan PPLP yang terbentuk	kab/kota	24 (2023)	29		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	persen	- (indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	persen	- (indikator baru)	15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Jumlah perolehan medali pada *Asian Youth Games*	medali	1 emas/2 perak/2 perunggu (2013)	1–2		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Jumlah perolehan medali pada *Asian Youth Para Games*	medali	12 emas/11 perak/14 perunggu (2021)	12-15		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.09.03.01 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga							
04.09.03.02 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga							
04.09.04 KP: Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)	01 - Terwujudnya tata kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) yang akuntabel dan berkelanjutan	01 - Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional (MTN)	rekomendasi kebijakan	1 (2023)	1	125.084,3	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.09.04.01 PRO-P: Penguatan Basis Data Terpadu MTN							
04.09.04.02 PRO-P: Penguatan Sinergi Pelaksanaan MTN							
04.10 PP: Penguatan Budaya Literasi untuk Kreativitas dan Inovasi	01 - Terwujudnya masyarakat literat untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan daya cipta	01 - Nilai dimensi budaya literasi IPK		60,49 (2023)	63,24	357.367,9	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.10.01 KP: Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan	01 - Terwujudnya layanan perpustakaan yang berkualitas untuk menguatkan budaya literasi, kreativitas dan inovasi	01 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		69,42 (2023)	73,50	273.185,4	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.01.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Literasi yang Berkualitas dan Merata							
04.10.01.02 PRO-P: Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial							
04.10.02 KP: Peningkatan Budaya Kegemaran Membaca	01 - Meningkatnya budaya kegemaran membaca	01 - Tingkat kegemaran membaca		66,67 (2023)	73,00	84.182,5	057 - Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
04.10.02.01 PRO-P: Pembiasaan Kegemaran Membaca							
04.10.02.02 PRO-P: Penguatan Komunitas dan Penggerak Literasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11 PP: Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	01 - Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat berbasis siklus hidup melalui penguatan edukasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan intervensi perbaikan gizi sesuai standar, serta mencegah kematian dini dan meningkatkan harapan hidup sehat	01 - Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	189 (2020)	122	76.693.477,6	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka kematian balita	per 1.000 kelahiran hidup	19,83 (2020)	15,00		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek)	persen	21,50 (2023)	18,8		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Prevalensi remaja putri anemia	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase lanjut usia yang mandiri	persen	74,30 (2023)	75		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB *Modern* (*proportion of demand satisfied by modern methods*)	persen	83,9	84,7		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	persen	- (indikator baru)	36		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01 KP: Penurunan kematian ibu dan anak	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi	01 - Persentase persalinan di fasyankes	persen	87,2 (2023)	88	96.453,9	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	persen	19,45 (2023)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase kab/kota dengan *CFR direct obstetric* (eklampsi & pendarahan *postpartum*) < 1%	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase *antenatal care* (ANC) 6 kali (K6)	persen	- (indikator baru)	80		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Cakupan *antenatal care* (ANC) sesuai standar (12T)	persen	- (indikator baru)	63		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Persentase anemia pada ibu hamil	persen	27,7 (2023)	26		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase calon pengantin yang mendapat *skrinung* kesehatan	persen	49,2 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Rate* (ASFR 15-19)	kelahiran hidup per 1000 perempuan	18	18		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		10 - Cakupan KF lengkap sesuai standar	persen	26,8 (2023)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		11 - Persentase KB pasca persalinan	persen	48,9	57		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		12 - Angka kematian neonatal	per 1.000 kelahiran hidup	9,30 (2020)	9,2		024 - Kementerian Kesehatan
		13 - Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	16,85 (2020)	12,62		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		14 - Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap sesuai standar	persen	90,77 (2023)	91		024 - Kementerian Kesehatan
		15 - Cakupan imunisasi bayi lengkap	persen	75 (2023)	80		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.01.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Pelayanan Kegawatdaruratan Ibu & Anak							
04.11.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Promotif & Preventif Ibu & Anak							
04.11.01.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Penurunan Kematian Ibu dan Anak							
04.11.02 KP: Pencegahan dan penurunan *stunting*	01 - Pencegahan dan penurunan *stunting* melalui pendekatan spesifik dan sensitif	01 - Prevalensi *wasting* (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita	persen	8,5 (2023)	8	73.123.134,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase bayi lahir *premature* (<37 minggu)	persen	11,1 (2023)	11		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase ibu hamil kurang energi kronis (KEK)	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif	persen	68,6 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif	persen	55,5 (2023)	61		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase anak usia 6-23 bulan mendapatkan MPASI	persen	60,9 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan	persen	24 (2023)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Persentase keluarga sasaran yang mendapat pendampingan 1000 hari pertama kehidupan (HPK)	persen	74,2	75		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.11.02.01 PRO-P: Penguatan Intervensi Spesifik *Stunting*							
04.11.02.02 PRO-P: Penguatan Intervensi Sensitif *Stunting*							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11.03 KP: Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro	01 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah	01 - Persentase remaja putri yang mengkonsumsi TTD	persen	61,3 (2023)	65	255.289,0	024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia produktif	01 - Persentase tempat kerja formal melaksanakan kesehatan kerja	persen	- (indikator baru)	25		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah pos upaya kesehatan kerja (Pos UKK) yang terbentuk di tempat kerja informal	pos	10.200 (2023)	15.000		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes melaksanakan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
	03 - Meningkatnya pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia	01 - Persentase lansia yang mendapatkan *skrining* kesehatan sesuai standar	persen	47,22 (2022)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas santun lansia	persen	69	70		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase RS yang memberikan layanan geriatri terpadu	persen	11,01 (2023)	20		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase lanjut usia dengan ketergantungan sedang, berat, dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP)	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
	04 - Meningkatnya pelayanan KB dan kespro	01 - Angka prevalensi kontrasepsi *modern/ modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR)	persen	61,7	61,8		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need* KB)	persen	11,1	10,5		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	persen	25,5	25,7		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04 - Persentase puskesmas mampu pelayanan KB MKJP	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.11.03.01 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Sekolah							
04.11.03.02 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Usia Produktif							
04.11.03.03 PRO-P: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Bagi Lansia							
04.11.03.04 PRO-P: Peningkatan Pelayanan KB & Kespro							
04.11.04 KP: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	01 - Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa, dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	01 - Persentase kab/kota dengan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis >80%	persen	- (indikator baru)	40	3.218.600,0	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia bayi baru lahir	persen	- (indikator baru)	65		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia balita dan anak usia pra sekolah	persen	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia sekolah dan remaja	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok usia dewasa	persen	- (indikator baru)	35		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase penduduk penerima pemeriksaan kesehatan gratis kelompok lanjut usia	persen	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
04.11.04.01 PRO-P: Skrining Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia							
04.11.04.02 PRO-P: Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis							
04.12 PP: Pemberian Makan Gratis untuk Pemenuhan Gizi	01 - Terlaksananya pemberian makan bergizi gratis bagi anak balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah untuk mencapai pemenuhan gizi	01 - Persentase balita dengan status gizi normal berdasarkan BB/PB atau BB/TB	persen	87,3 (2023)	87,99	62.986.535,5	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase anak usia sekolah dengan status gizi normal berdasarkan IMT/U	persen	75,03 (2023)	75,28		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Tingkat kehadiran siswa dan santri yang mendapatkan makan bergizi gratis	persen	- (indikator baru)	91		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	persen	- (indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.01 KP: Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	01 - Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Persentase ibu hamil yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	10	51.575.250,0	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Persentase ibu menyusui yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	11		128 - Badan Gizi Nasional
		04 - Persentase siswa PAUD (TK/RA/BA/sederajat) yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Persentase siswa SD/MI/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		06 - Persentase siswa SMP/MTs/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		07 - Persentase siswa SMA/MA/SMK/sederajat yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		08 - Persentase siswa SLB yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	24		128 - Badan Gizi Nasional
		09 - Persentase santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	persen	- (indikator baru)	2		128 - Badan Gizi Nasional
		10 - Persentase ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh balita dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50		128 - Badan Gizi Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		11 - Persentase siswa dan santri dengan skor literasi gizi baik	persen	- (indikator baru)	50		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.01.01 PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita							
04.12.01.02 PRO-P: Penyediaan Makanan Bergizi Gratis bagi Siswa dan Santri							
04.12.01.03 PRO-P: Promosi dan Edukasi Gizi dan Pangan							
04.12.02 KP: Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	01 - Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	01 - Sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	sistem	- (indikator baru)	1	11.411.285,5	128 - Badan Gizi Nasional
		02 - Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi yang sesuai standar	unit	- (indikator baru)	5.000		128 - Badan Gizi Nasional
		03 - Persentase petugas penjamah makanan yang mendapatkan pelatihan	persen	- (indikator baru)	100		128 - Badan Gizi Nasional
04.12.02.01 PRO-P: Pengembangan Sistem dan Tata Kelola Pelayanan Makanan Bergizi							
04.12.02.02 PRO-P: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Makanan Bergizi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.12.02.03 PRO-P: Penguatan Intervensi Pendukung Pemberian Makan Bergizi							
04.13 PP: Pengendalian Penyakit dan Pembudayaan Hidup Sehat	01 - Meningkatnya Pengendalian Penyakit melalui upaya pencegahan, penemuan kasus, dan penuntasan pengobatan	01 - Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	387 (2023)	329	12.541.800,4	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan eliminasi kusta	kab/kota	6	11		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Desa endemis *schistosomiasis* yang mencapai eliminasi	desa	16 (2023)	18		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Insidensi HIV	per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,10 (2023)	0,09		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Kab/kota dengan eliminasi malaria	kab/ kota	389 (2023)	425		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase diabetes dalam pengendalian	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase hipertensi dalam pengendalian	persen	18,9	20		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Kab/kota yang mencapai target pra-eliminasi kanker leher rahim	kab/kota	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Prevalensi depresi di umur ≥15 tahun	persen	1,4 (2023)	1,4		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Kab/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan budaya hidup sehat, serta pembangunan berwawasan kesehatan	01 - Prevalensi obesitas >18 tahun	persen	23,4 (2023)	23,4		024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase merokok pada penduduk 10-21 tahun	persen	12,4 (2023)	12,4		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01 KP: Penuntasan TBC	01 - Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan	01 - Cakupan penemuan kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)	persen	81	90	8.766.289,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Angka keberhasilan pengobatan TBC (*TB Succes Rate*)	persen	84	90		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	pengobatan TBC sampai tuntas	03 - Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	persen	19,2	72		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan (*Enrollment TBC*)	persen	90	95		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan TBC							
04.13.01.02 PRO-P: Intensifikasi Penemuan Kasus							
04.13.01.03 PRO-P: Pengobatan TBC							
04.13.02 KP: Eliminasi Penyakit Kusta & *Schistosomiasis*	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit kusta & *schistosomiasis*	01 - Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	persen	84,36	86	305.772,1	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase Penderita kusta menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	persen	84,97 (2023)	90		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	persen	9,60	<5		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Cakupan pemberian obat pencegahan masal (POPM) untuk *schistosomiasis*	persen	83,6 (2023)	87,2		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.02.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit Kusta							
04.13.02.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit *Schistosomiasis*							
04.13.03 KP: Pengendalian penyakit menular lainnya	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit menular lainnya	01 - ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ART	persen	70 (2023)	90	732.513,3	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota yang mencapai *Positivity Rate* (PR) malaria <5%	kab/kota	333 (2023)	405		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.03.01 PRO-P: Pengendalian Penyakit HIV/AIDS							
04.13.03.02 PRO-P: Pengendalian Penyakit Malaria							
04.13.04 KP: Pengendalian penyakit tidak	01 - Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular	01 - Jumlah kab/kota yang melakukan *skrining* DM > 60%	kab/kota	32	52	293.123,0	024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa		02 - Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persen	- (indikator baru)	5		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase perempuan dengan DNA HPV positif yang dilakukan tindak lanjut dengan IVA/Kolposkopi/PAPs sesuai protokol	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase perempuan dengan lesi pra kanker leher rahim yang mendapatkan pengobatan sesuai dengan protokol	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Cakupan imunisasi HPV	persen	6	90		024 - Kementerian Kesehatan
	02 - Meningkatnya pengendalian gangguan jiwa	01 - Cakupan *skrining* kesehatan jiwa	persen	6 (2023)	10		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Tata Laksana Kasus PTM							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.04.03 PRO-P: Peningkatan Upaya Kesehatan Jiwa							
04.13.05 KP: Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM	01 - Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM	01 - Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	persen	62,6 (2023)	65	183.858,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penduduk dengan literasi kesehatan	persen	36,3 (2023)	38,3		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase penduduk yang menerapkan perilaku hidup sehat	persen	15 (2023)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR	kab/kota	367	397		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota yang melakukan pelayanan UBM	kab/kota	228 (2023)	276		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase puskesmas yang memberikan layanan farmakoterapi untuk UBM	persen	- (indikator baru)	3		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	persen	- (indikator baru)	75		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.05.01 PRO-P: Tata Kelola Gerakan Masyarakat Hidup Sehat							
04.13.05.02 PRO-P: Pengendalian Konsumsi Rokok							
04.13.05.03 PRO-P: Aktivitas Fisik							
04.13.05.04 PRO-P: Pangan Sehat							
04.13.06 KP: Penyehatan Lingkungan	01 - Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan	01 - Kab/kota dengan kualitas air minum yang memenuhi syarat	kab/kota	65 (2023)	100	2.260.243,8	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan kualitas udara dalam ruang yang memenuhi syarat (kab/kota)	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Kab/kota sanitasi total berbasis masyarakat	kab/kota	4 (2023)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/kota sehat	kab/kota	136	182		024 - Kementerian Kesehatan
04.13.06.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Sistem dalam Penyehatan Lingkungan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.13.06.02 PRO-P: Perubahan Perilaku *Hygiene* dan Sanitasi							
04.13.06.03 PRO-P: Penyediaan Akses Air Bersih & Sanitasi							
04.13.06.04 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lingkungan							
04.14 PP: Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan	01 - Meningkatnya kapasitas ketahanan kesehatan untuk melindungi penduduk dari ancaman kedaruratan kesehatan, termasuk penyakit *emerging* dan *re-emerging*, dengan meningkatkan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons secara efektif dan cepat	01 - Persentase kab/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/wabah	persen	37,16 (2023)	40	2.402.037,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk negara yang dikendalikan	persen	90 (2023)	94		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Jumlah KLB keracunan pangan	kejadian	291	250		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Jumlah kab/kota eliminasi rabies	kab/kota	418	430		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (imunisasi rutin lengkap)	persen	62 (TW III 2024)	65		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	72,5		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase RS Pemerintah yang patuh memberikan antibiotik sistemik empirik sesuai standar	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.01 KP: Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana	01 - Meningkatnya pengendalian KLB/ wabah dan penanganan bencana dengan fokus pada penguatan sistem surveilans, laboratorium, & pos pintu masuk negara	01 - Kab/kota yang merespons sinyal SKDR <24 jam minimal 80%	kab/kota	452 (2023)	462	1.577.717,9	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase laboratorium kesmas tingkat 2-5 yang dikembangkan sesuai standar berdasarkan stratanya	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase pintu masuk yang melaksanakan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	persen	70 (2023)	73		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Persentase pintu masuk yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/wabah	persen	40 (2023)	47		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota endemis yang melaksanakan upaya preventif promotif rabies	kab/kota	- (indikator baru)	110		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Jumlah kab/kota yang mampu menekan kasus positif rabies pada hewan	kab/kota	- (indikator baru)	100		018 - Kementerian Pertanian
04.14.01.01 PRO-P: Penguatan Surveilans & Pengendalian KLB/Wabah/ Penanganan Bencana							
04.14.01.02 PRO-P: Penguatan Laboratorium							
04.14.01.03 PRO-P: Penguatan Pos Pintu Masuk Negara							
04.14.01.04 PRO-P: Pengendalian Penyakit Rabies							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.14.02 KP: Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba	01 - Persentase kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	persen	61,96 (TW II 2024)	65	726.837,7	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase penurunan kekosongan (*stock out*) obat dan vaksin di fasyankes	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	persen	- (indikator baru)	91		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase RS yang mengimplementasikan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA)	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase FKTP yang mengimplementasikan penggunaan antibiotik rasional	persen	- (indikator baru)	30		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Penyediaan Sediaan Farmasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.14.02.02 PRO-P: Penggunaan Obat Rasional							
04.14.02.03 PRO-P: Pengendalian Resistensi Antimikroba							
04.14.03 KP: Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Meningkatnya kapasitas sistem ketahanan kesehatan melalui penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi	01 - Kab/kota dengan tempat pengelolaan pangan siap saji memenuhi syarat	kab/kota	- (indikator baru)	50	97.481,6	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Kab/kota dengan persentase pangan olahan siap saji memenuhi syarat (POSS)	kab/kota	- (indikator baru)	50		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase kab/kota pangan aman	persen	13 (2023)	14		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		04 - Persentase pangan olahan yang aman dan bermutu	persen	77,8 (2023)	78		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		05 - Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	persen	73,3 (2023)	75		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase obat yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	90		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		07 - Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	65		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		08 - Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	68		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		09 - Persentase kosmetik yang aman dan bermutu	persen	- (indikator baru)	62		063 - Badan Pengawas Obat Dan Makanan
		10 - Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat pengujian dan penandaan	persen	- (indikator baru)	94		024 - Kementerian Kesehatan
04.14.03.01 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Pangan							
04.14.03.02 PRO-P: Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi & Alat Kesehatan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15 PP: Penguatan Pelayanan Kesehatan dan Tata Kelola	01 - Meningkatnya pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif di hingga tingkat desa, pendekatan khusus pelayanan bagi daerah sulit akses, pemberdayaan masyarakat dan swasta, serta meningkatkan kualitas pendanaan kesehatan	01 - Persentase kab/kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar	persen	1,17 (2023)	20	63.354.907,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persen	28	28		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persen	37	38		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persen	- (indikator baru)	17		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	persen	- (indikator baru)	67		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	98,42	98,6		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		07 - Persentase belanja kesehatan *out of pocket* masyarakat berpengeluaran 40% terbawah	persen	4,0 (2023)	3,98		024 - Kementerian Kesehatan

Priontas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		08 - Pengeluaran kesehatan total per kapita	juta	2,1 (2023)	2,2		024 - Kementerian Kesehatan
		09 - Persentase provinsi dan kab/kota yang menyelaraskan perencanaan pembangunan dan mencapai target tahunan pembangunan	persen	- (indikator baru)	20		024 - Kementerian Kesehatan
		10 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	46,72	50		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.01 KP: Investasi pelayanan kesehatan primer	01 - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	01 - Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar	persen	<30	30	1.425.244,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan minimal 75% posyandu siklus hidup yang aktif	persen	18	25		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar	persen	18,5	40		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tatalaksana kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	30	50		024 - Kementerian Kesehatan
		06 - Persentase puskesmas yang ramah penyandang disabilitas	persen	30	35		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Peran Puskesmas							
04.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Unit Pelayanan Kesehatan di Tingkat Desa/Kelurahan dan Peningkatan Peran Kader Kesehatan							
04.15.01.03 PRO-P: Pengembangan Layanan Kesehatan Primer yang Inklusif							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.02 KP: Pembangunan RS lengkap berkualitas di kab/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	01 - Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak	01 - Persentase provinsi dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	31,5	40	12.285.915,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase kab/kota dengan RS yang memenuhi kapasitas pelayanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, ginjal sesuai standar	persen	7,8	20		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase RS yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu)	persen	- (indikator baru)	8		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Kab/kota dengan wilayah berciri kepulauan yang dilayani RS kapal sesuai standar	kab/kota	26 (2023)	27		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah kab/kota dengan akses sulit yang menerapkan skema/pendekatan khusus dalam pemenuhan pelayanan kesehatan berkualitas	kab/kota	65	75		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase RS pemerintah daerah yang memenuhi ketersediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	persen	40	45		024 - Kementerian Kesehatan
		07 - Kab/kota dengan RSUD tipe D yang ditingkatkan menjadi tipe C	kab/kota	- (indikator baru)	22		024 - Kementerian Kesehatan
		08 - Jumlah RS Pemerintah yang memenuhi tingkat maturitas kemandirian	RS	3	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.02.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan							
04.15.02.02 PRO-P: Pengembangan Layanan Unggulan Berbasis Kompetensi							
04.15.02.03 PRO-P: Penguatan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan di Daerah Sulit Akses							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.03 KP: Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	01 - Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah	01 - Jumlah kab/kota dengan SDM kesehatan puskesmas sesuai standar	kab/kota	- (indikator baru)	19	263.093,2	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan jenis dokter spesialis pada RS sesuai standar	kab/kota	- (indikator baru)	270		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Rasio dokter spesialis	per 1.000 penduduk	- (indikator baru)	0,19		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	persen	- (indikator baru)	15		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Persentase lulusan program studi kesehatan terakreditasi unggul	persen	- (indikator baru)	14,82		139 - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
04.15.03.01 PRO-P: Peningkatan Produksi SDM Kesehatan							
04.15.03.02 PRO-P: Peningkatan Pendayagunaan SDM Kesehatan							
04.15.03.03 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.04 KP: Penguatan JKN dan pendanaan kesehatan	01 - Memperkuat kapasitas JKN dan pendanaan kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN	persen	76,5 (2023)	80	48.982.260,0	BPJS Kesehatan
		02 - Jumlah kepesertaan segmen PBI	juta jiwa	96,7 (2023)	96,8		027 - Kementerian Sosial
		03 - Tingkat kepuasan publik atas layanan jaminan kesehatan nasional	persen	- (indikator baru)	85		BPJS Kesehatan
		04 - Kesehatan keuangan aset dana jaminan sosial kesehatan	angka	2,92 (Prognosis 2024)	1,5–6		BPJS Kesehatan
		05 - Persentase pertumbuhan belanja kesehatan dari sektor publik	persen	11,9 (2023)	5		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.04.01 PRO-P: Penguatan Kepesertaan JKN							
04.15.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola JKN							
04.15.04.03 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendanaan kesehatan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.05 KP: Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan	01 - Menguatnya tata kelola, data, informasi dan teknologi kesehatan dalam mendukung pembangunan kesehatan	01 - Persentase provinsi dan kab/kota yang sudah mengintegrasikan indikator prioritas nasional kesehatan dalam dokumen perencanaan daerah	persen	- (indikator baru)	70	398.394,3	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Persentase provinsi yang memiliki kualitas data rutin yang baik untuk indikator pembangunan kesehatan	persen	- (indikator baru)	10		024 - Kementerian Kesehatan
		03 - Persentase sistem informasi Kesehatan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	persen	49	60		024 - Kementerian Kesehatan
		04 - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan *online* nasional	persen	15	20		024 - Kementerian Kesehatan
		05 - Jumlah layanan berbasis kedokteran presisi	layanan	2	4		024 - Kementerian Kesehatan
04.15.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Kesehatan							

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.15.05.02 PRO-P: Penguatan Data dan Informasi							
04.15.05.03 PRO-P: Peningkatan Pemanfaatan dan Inovasi Teknologi Kesehatan							
04.16 PP: Peningkatan Ketangguhan Keluarga	01 - Menguatnya ketangguhan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak individu dalam keluarga dan mendorong terbentuknya modal sosial	01 - Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		62,4	64,1	377.964,5	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	tahun	22,3	22,4		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.01 KP: Penguatan Institusi Keluarga untuk Penanaman Nilai-Nilai, Moral, Integritas Karakter, dan Pengembangan Psikososial Anak	01 - Menguatnya kemampuan keluarga dalam penanaman nilai moral, etika, integritas, karakter dan pengembangan psikososial anak	01 - Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini	persen	54,31 (2023)	55,66	16.540,0	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase ayah yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak dan pendampingan remaja	persen	39,7 (2023)	45		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan edukasi pra nikah	persen	39,7 (2022)	45		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		04 - Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja		84,60	85,20		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		05 - Prevalensi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam 12 bulan terakhir	persen	20,50	19,76		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada 12 bulan terakhir	persen	9,02	8,82		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.16.01.01 PRO-P: Penyiapan Kehidupan Berkeluarga							
04.16.01.02 PRO-P: Penguatan Kualitas Pengasuhan dalam Keluarga							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.16.01.03 PRO-P: Peningkatan Pemahaman dan Kapasitas Keluarga dalam Menjalankan Fungsinya							
04.16.02 KP: Penyediaan Fasilitas Pendukung Keluarga dalam Melaksanakan Fungsi Utama Keluarga	01 - Meningkatnya fasilitas pendukung dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan fungsi keluarga	01 - Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera yang terjangkau	persen	65,97 (2023)	70	155.935,6	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		02 - Persentase Tempat Penitipan Anak (TPA) yang menerima pendampingan pengasuhan	persen	- (indikator baru)	10		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.02.01 PRO-P: Penyediaan fasilitas dan lingkungan pendukung keluarga							
04.16.02.02 PRO-P: Pusat Layanan Konsultasi dan Konseling Keluarga							
04.16.03 KP: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum, serta Afirmasi bagi Keluarga Rentan	01 - Terjaminnya aspek legalitas, hukum dan ekonomi bagi keluarga rentan	01 - Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga		54,00	55,41	205.488,9	068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Indeks Kerentanan Keluarga		8,5	8,6		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
04.16.03.01 PRO-P: Pemenuhan Hak Sipil dan Hukum Bagi Keluarga							
04.16.03.02 PRO-P: Penguatan Keluarga Rentan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga							
04.17 PP: Peningkatan Kualitas Perlindungan Anak	01 - Terpenuhinya hak dan perlindungan anak	01 - Indeks Pemenuhan Hak Anak		65,58 (2023)	67,57	872.074,1	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Indeks Perlindungan Khusus Anak		79,91 (2023)	81,44		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	persen	94,03 (2024)	96		010 - Kementerian Dalam Negeri
		04 - Persentase anak berusia 13-17 tahun yang mengalami salah satu bentuk kekerasan fisik, emosional atau seksual dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki : 31,11 perempuan: 36,31	laki-laki : 25,37 perempuan: 31,6		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		05 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan dan memperoleh layanan	persen	2,37	2,41		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.01 KP: Pemenuhan Hak Anak Secara Universal dan Penguatan Resiliensi Anak	01 - Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif, meningkatnya kapasitas dan resiliensi anak serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola pemenuhan hak anak	01 - Cakupan kepesertaan aktif JKN usia 0-17 tahun	persen	70	72,5	14.232,8	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
		02 - Jumlah kab/kota dengan peringkat dalam kab/kota layak anak (KLA)	kab/kota	KLA: 0; utama: 19; nindya: 76; madya: 130; pratama: 135; (2023)	KLA: 0; utama: 20; nindya : 77; madya: 132; pratama: 140		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang beranggapan mendapatkan dukungan keluarga	persen	77,89	78,03		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Proporsi anak usia 13-17 tahun yang mengalami masalah kesehatan jiwa selama 30 hari terakhir	persen	7,28	7,06		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Jumlah kab/kota yang sudah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan	kab/kota	280 (2023)	325		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.17.01.01 PRO-P: Peningkatan Lingkungan Ramah Anak dan Penguatan Resiliensi untuk Pemenuhan Hak Anak Secara Universal							
04.17.01.02 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Pemenuhan Hak Anak Secara Universal							
04.17.02 KP: Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak dan Perlakuan Salah Lainnya	01 - Meningkatnya pencegahan dan penanganan serta menguatnya kelembagaan dan tata kelola tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	01 - Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	persen	5,90	5,61	857.841,3	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka pekerja anak usia 5-17 tahun	persen	1,72 (2023)	1,67		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		03 - Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	46,81	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual non-kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 2,18; perempuan: 2,17	laki-laki: 1,56; perempuan: 2,09		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan seksual kontak dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 1,83; perempuan: 2,67	laki-laki:1,42; perempuan: 2,25		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan terakhir	persen	laki-laki: 27,03; perempuan: 33,07	laki-laki: 21,98; perempuan: 28,52		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Persentase anak usia 13-17 tahun yang mendapatkan perlakuan tidak layak dari orang tua dan kerabat lainnya dalam 12 bulan terakhir	persen	12,64	12,42		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.17.02.01 PRO-P: Pencegahan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan, dan Perlakuan Salah Lainnya terhadap Anak							
04.17.02.02 PRO-P: Penanganan Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
04.17.02.03 PRO-P: Penguatan Data, Koordinasi dan Kapasitas Kelembagaan terkait Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan Anak, dan Perlakuan Salah Lainnya							
04.18 PP: Peningkatan Kualitas Pemuda	01 - Meningkatnya kualitas pemuda dan partisipasi aktifnya di bidang ekonomi, sosial, dan politik	01 - Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/sederajat atau lebih tinggi	persen	62,2 (2023)	66,74	283.522,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Angka kesakitan pemuda	persen	6,24 (2023)	5,99		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase remaja perempuan berusia 16–18 tahun yang hamil	persen	12,63 (2023)	11,63		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase usia muda (16-30 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	persen	25,8 (2023)	24,13		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		05 - Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	persen	70,49 (2023)	75,79		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.01 KP: Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko	01 - Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda	01 - Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	persen	15,82 (2023)	25,49	28.502,0	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	persen	96,74 (2023)	96,96		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda yang merokok	persen	24,75 (2023)	23,88		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Persentase pemuda berolahraga	persen	30,32 (2023)	38,92		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.18.01.1 PRO-P: Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka							
04.18.01.2 PRO-P: Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda							
04.18.01.3 PRO-P: Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda							
04.18.02 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi aktif dalam ketenagakerjaan	01 - Persentase pemuda pekerja tidak penuh	persen	32,46 (2023)	31	210.138,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Rasio kewirausahaan pemuda	persen	1,16 (2023)	1,33		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	persen	16,66 (2023)	17,82		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	persen	66,08 (2023)	66,3		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.02.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda							
04.18.02.2 PRO-P: Peningkatan Kewirausahaan Pemuda							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.18.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	01 - Meningkatnya partisipasi dan kepemimpinan pemuda dalam berbagai bidang kehidupan khususnya partisipasi aktif di bidang sosial dan politik	01 - Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	persen	5,44 (2023)	5,65	44.882,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	persen	1,44 (2023)	1,48		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.18.03.1 PRO-P: Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda							
04.18.03.2 PRO-P: Peningkatan Inklusivitas dan Kesetaraan Gender Pemuda							
04.19 PP: Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan	01 - Meningkatnya kesetaraan gender, kualitas hidup, dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunnya kekerasan terhadap perempuan	01 - Proporsi perempuan kawin/pernah kawin 15-49 tahun yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	persen	0,126 (2023)	0,103	567.125,5	024 - Kementerian Kesehatan
		02 - Proporsi anggota legislatif	persen	laki-laki: 78,10; perempuan: 21,90	laki-laki: 77,55; perempuan: 22,45		076 - Komisi Pemilihan Umum
		03 - Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA	persen	laki-laki: 42,62; perempuan: 37,60 (2023)	laki-laki: 43,41; perempuan: 38,89		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	56,42	56,30–58,80		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		05 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	persen	6,6	6,3		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		06 - Pengeluaran per kapita laki-laki dan perempuan	ribu rupiah	laki-laki: 16.736; perempuan: 9.579 (2023)	laki-laki: 16.891; perempuan: 9.920		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		07 - Jumlah K/L/D yang memperoleh PPE	lembaga	K/L: 3; provinsi: 2; kab/kota: 3	K/L: 4; provinsi: 3; kab/kota: 5		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.01 KP: Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan	01 - Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan	01 - Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun	persen	0,258 (2023)	0,255	2.397,8	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Angka partisipasi kasar SMA/SMK/sederajat	persen	87,29	87,40		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.01.01 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Reproduksi							
04.19.01.02 PRO-P: Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan							
04.19.02 KP: Penguatan Kapasitas dan Kemandirian, serta Peningkatan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	01 - Meningkatnya kapasitas, kemandirian, kepemimpinan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan, didukung oleh penguatan kebijakan, akses sumber daya, dan norma sosial budaya yang mendorong partisipasi bermakna perempuan dalam pembangunan	01 - Persentase perempuan di jabatan tinggi pratama dan madya	persen	pratama 14; madya 16	pratama 14,5; madya 16,5	147.120,0	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase perempuan di posisi managerial	persen	35,02	38,68		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase perempuan kepala desa	persen	5,76	6,26		010 - Kementerian Dalam Negeri
04.19.02.01 PRO-P: Peningkatan *Agency* dan Representasi Perempuan Dalam Lembaga Masyarakat dan Partai Politik							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.02.02 PRO-P: Peningkatan *Agency* dan Representasi Perempuan dalam Birokrasi dan Jabatan Publik							
04.19.03 KP: Peningkatan Partisipasi Aktif Perempuan di Ekonomi dan Ketenagakerjaan	01 - Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap peluang kerja, dan ekosistem kewirausahaan serta penguatan kebijakan yang ramah perempuan dan keluarga	01 - Persentase kesenjangan upah laki-laki dan perempuan	persen	22,09	21	38.037,0	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Rasio kewirausahaan perempuan	persen	1,70 (2023)	1,79		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Indeks Literasi Digital	persen	laki-laki: 3,56; perempuan: 3,52 (2023)	laki-laki: 3,62; perempuan: 3,60		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
04.19.03.01 PRO-P: Perluasan Kesempatan Kerja dan Pemajuan Kewirausahaan Perempuan							
04.19.03.02 PRO-P: Penguatan Lingkungan Kerja yang Ramah Perempuan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.04 KP: Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan Bebas dari Kekerasan	01 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan melalui penguatan tata kelola, kelembagaan, data, koordinasi lintas sektor, serta kesadaran dan perubahan norma sosial budaya	01 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain	persen	3,70	3,59	362.798,8	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir	persen	5,7	5,54		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KTP) di ruang publik dalam 12 bulan terakhir	persen	18	17,35		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		04 - Persentase perempuan yang tidak setuju atas sikap pemukulan	persen	75,41	77,51		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		05 - Prevalensi perempuan yang mengalami P2GP	persen	46,3	43,86		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Persentase perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang mendapat layanan komprehensif	persen	49,25 (2023)	85		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		07 - Jumlah perempuan korban kekerasan (termasuk TPPO) yang dilaporkan melalui SIMFONI PPA	orang	26.161 (2023)	28.777–30.085		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04.19.04.01 PRO-P: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan							
04.19.04.02 PRO-P: Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan							
04.19.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan	01 - Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dalam pembangunan	01 - Persentase anggaran responsif gender	persen	K/L: 4,04 ; prov/kab/kota :10	K/L: 5,20 ; prov/kab/kota : 11,2	16.771,9	047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		02 - Persentase RO/sub kegiatan responsif gender	persen	K/L: 3.80	K/L: 4,00		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		03 - Persentase daerah yang memiliki dan melaksanakan rencana aksi kesetaraan gender	persen	- (indikator baru)	prov: 7; kab/kota: 0		047 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.19.05.01 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Pusat							
04.19.05.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan PUG dalam Proses Pembangunan di Daerah							
04.20 PP: Peningkatan Kesetaraan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat	01 - Indeks Kesejahteraan Sosial untuk penduduk lanjut usia		- (indikator baru)	59,67	2.204.329,9	027 - Kementerian Sosial
		02 - Indeks Kesejahteraan Sosial untuk penyandang disabilitas		- (indikator baru)	38,42		027 - Kementerian Sosial
04.20.01 KP: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	01 - Pemenuhan akses layanan dasar dan perlindungan dari kekerasan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia	01 - Persentase penyandang disabilitas yang tidak mengalami tindak kekerasan	persen	99,55 (2023)	99,60	2.135.053,4	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase lansia yang mendapatkan pendampingan	persen	8,19	10		068 - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
		03 - Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	persen	12,33	13,08		138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.20.01.01 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Penyandang Disabilitas							
04.20.01.02 PRO-P: Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan terhadap Hak Lanjut Usia							
04.20.02 KP: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan Lansia dalam Proses Pembangunan	01 - Terwujudnya inklusivitas lansia dan penyandang disabilitas dalam kebijakan pembangunan	01 - Persentase pemprov yang melibatkan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan	persen	73 (2023)	75	69.276,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase pemprov yang melibatkan lansia dalam penyusunan kebijakan	persen	18 (2023)	30		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
04.20.02.01 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan							
04.20.02.02 PRO-P: Penguatan Prinsip dan Pendekatan Inklusi Sosial bagi Lansia dalam Proses Pembangunan							
04.21 PP: Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	01 - Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional	01 - Jumlah perolehan medali pada *SEA Games*	medali	87 emas/80 perak/109 perunggu (2023)	87 emas/80 perak/109 perunggu	1.306.885,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.01 KP: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul	01 - Terbinanya olahragawan talenta unggul yang berprestasi di tingkat regional dan internasional	01 - Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade	orang	150 (2023)	180	690.414,4	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	100 (2023)	100		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade	orang	182 (2023)	500		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		04 - Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade	orang	22 (2023)	120		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.01.01 PRO-P: Pengembangan Tata Kelola Pembinaan Olahraga Prestasi							
04.21.01.02 PRO-P: Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.02 KP: Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional	01 - Terbinanya tenaga dan organisasi keolahragaan berstandar nasional dan internasional	01 - Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikasi internasional	orang	250 (2023)	250	40.364,0	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	orang	50 (2023)	50		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		03 - Jumlah organisasi keolahragaan berbasis olimpiade dan paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	lembaga	18 (2023)	18		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.02.01 PRO-P: Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional							
04.21.02.02 PRO-P: Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.03 KP: Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01 - Terwujudnya sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional yang ramah disabilitas	01 - Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	lembaga	11 (2023)	11	340.080,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade	lembaga	548 (2023)	548		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.21.03.01 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga							
04.21.03.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi Sarana Olahraga							
04.21.04 KP: Peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/kompetisi olahraga	01 - Meningkatnya partisipasi dan penyelenggaraan *event*/festival/kompetisi olahraga kelas dunia	01 - *Event* kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20	236.026,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	kegiatan	18 (2023)	20		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.21.04.01 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan *Event*/Festival/Kompetisi Olahraga Nasional							
04.21.04.02 PRO-P: Partisipasi dan Penyelenggaraan *Event*/Festival/Kompetisi Olahraga Regional dan Internasional							
04.22 PP: Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	01 - Meningkatnya budaya berolahraga di masyarakat	01 - Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	persen	25,92 (2021)	36,71	14.902,7	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01 KP: Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	01 - Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga melalui pengembangan olahraga pendidikan dan penyandang disabilitas	01 - Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	48,76 (2021)	69,06	7.698,6	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	persen	8,24 (2021)	11,67		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.01.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Pendidikan							
04.22.01.02 PRO-P: Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
04.22.02 KP: Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	01 - Meningkatkan partisipasi masyarakat berolahraga dan industri olahraga	01 - Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	persen	100	100	7.204,1	092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
		02 - Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	persen	3,29	3,59		092 - Kementerian Pemuda dan Olahraga
04.22.02.01 PRO-P: Pengembangan Olahraga Masyarakat							
04.22.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Olahraga							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 5: MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05 PN: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan	01 - Rasio PDB industri pengolahan	persen	18,98	20,80	25.750.834,5	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
	02 - Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya logistik	persen PDB	14,29 (2022)	13,52		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Pembentukan modal tetap bruto	persen PDB	29,3 (2023)	29,4		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		03 - Ekspor barang dan jasa	persen PDB	21,7 (2023)	21,7		090 - Kementerian Perdagangan
05.01 PP: Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan prioritas	01 - Pertumbuhan PDB industri pengolahan	persen	4,43	5,50	2.147.817,6	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.01 KP: Pengembangan Hilirisasi Nikel	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri nikel	01 - Kapasitas produksi industri olahan nikel	juta ton/tahun	27,44	33,64	35.710,8	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi nikel	juta rupiah	113.770.000	44.100.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.01.01 PRO-P: Pengembangan Industri *Stainless Steel*							
05.01.01.02 PRO-P: Pengembangan Industri *Nickel Sulfate*, Katoda, dan *Battery Precursor* Berbasis Nikel							
05.01.01.03 PRO-P: Pengembangan Industri *Battery Pack* Berbasis NMC (Nikel-Mangan-Kobalt)							
05.01.01.04 PRO-P: Tata Kelola Industri Nikel serta Ketersediaan Bahan Baku dan Energi							
05.01.01.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Nikel							
05.01.01.06 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.02 KP: Pengembangan Hilirisasi Tembaga	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri tembaga	01 - Kapasitas produksi industri olahan tembaga	ribu ton/tahun	375	1.195	13.631,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi tembaga	juta rupiah	45.720.000	45.933.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.02.01 PRO-P: Tata Kelola Industri Tembaga dan Ketersediaan Bahan Baku							
05.01.02.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Tembaga							
05.01.02.03 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri tembaga							
05.01.03 KP: Pengembangan Hilirisasi Bauksit	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri bauksit	01 - Kapasitas produksi industri olahan bauksit	juta ton/tahun	5,02	6,27	3.050,9	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi bauksit	juta rupiah	10.790.000	11.782.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.03.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Bauksit							
05.01.03.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir/Antara Olahan Bauksit							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.03.03 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Bauksit							
05.01.03.04 PRO-P: Harmonisasi Kebijakan Industri Bauksit							
05.01.04 KP: Pengembangan Hilirisasi Timah	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah dan daya saing industri timah	01 - Kapasitas produksi industri olahan timah	ribu ton/tahun	136,9	142,1	7.250,0	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi timah	juta rupiah	500.000	510.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.04.01 PRO-P: Tata Kelola Industri dan Ketersediaan Bahan Baku Industri Timah							
05.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Timah							
05.01.04.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi Tinggi untuk Pengolahan Timah							
05.01.04.04 PRO-P: Dekarbonasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Timah							
05.01.04.05 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk Timah di Pasar Domestik dan Global							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.05 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi kelapa sawit	01 - Produksi kelapa sawit	ton	235.421.494 (2023)	239.646.870	42.664,6	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Ragam produk hilir sawit	produk	193	208		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi bahan baku (CPO dan CPKO)	ton	52.087.006 (2023)	53.021.870		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku	persen	92,0	92,3		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa sawit	juta rupiah	44.090.000	1.489.335		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit dan Kualitas Bahan Baku							
05.01.05.02 PRO-P: *Sustainability* dan *Traceability*							
05.01.05.03 PRO-P: Pengembangan Industri *Biofuel*							
05.01.05.04 PRO-P: Pengembangan Industri Oleokimia							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.05.05 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Sawit							
05.01.05.06 PRO-P: *Rebranding* Produk Sawit Indonesia yang Berkelanjutan							
05.01.06 KP: Pengembangan Hilirisasi Kelapa	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas, produksi, dan utilisasi industri kelapa	01 - Produktivitas kelapa	ton/hektar	1,12 (2023)	1,13	117.488,5	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Produksi kelapa	ton	2.836.201 (2023)	2.880.690		018 - Kementerian Pertanian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi kelapa	juta rupiah	4.492.915	392.210		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Utilisasi industri pengolahan kelapa	persen	40	55		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.06.01 PRO-P: Perbaikan Data Perkelapaan (Budi Daya dan Pengolahan)							
05.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Produksi dan Penyebaran Benih Unggul							
05.01.06.03 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Kelapa							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.06.04 PRO-P: Peningkatan Diversifikasi Produk dan Daya Saing Produk							
05.01.06.05 PRO-P: Peningkatan Sentra IKM Pengolahan Kelapa							
05.01.06.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Industri Pengolahan Kelapa							
05.01.06.07 PRO-P: Integrasi Rantai Pasok di Dalam Negeri dan Ekspor							
05.01.06.08 PRO-P: Peningkatan Riset dan Inovasi Kelapa							
05.01.07 KP: Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	01 - Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri rumput laut	01 - Volume produksi rumput laut	juta ton	10,81	11,64	45.146,0	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi rumput laut	juta rupiah	230.000	510.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		03 - Utilisasi industri pengolahan rumput laut	persen	49,51	53,76		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.07.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Bahan Baku melalui Peningkatan Produktivitas Budi Daya Rumput Laut							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.07.02 PRO-P: Pengembangan Industri dan Hilirisasi Rumput Laut							
05.01.07.03 PRO-P: Penelitian dan Pengembangan Budi Daya Rumput Spesies Baru dan Inovasi Teknologi untuk Diversifikasi Produk Rumput Laut (Karagenan, Agar-agar, Biostimulan, Nutraseutikal, Pakan Ternak)							
05.01.07.04 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Kelembagaan							
05.01.07.05 PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Investasi							
05.01.08 KP: Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan diversifikasi sagu dan singkong	01 - Produksi sagu	ton	393.284 (2023)	393.623	1.225.799,4	018 - Kementerian Pertanian
		02 - Kapasitas produksi pati sagu	ton/tahun	60.000	100.000		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Produksi ubi kayu	ton	16.764.227 (2023)	17.270.926		018 - Kementerian Pertanian
		04 - Produktivitas sagu	ton/hektar	2,97 (2023)	3,12		018 - Kementerian Pertanian
		05 - Produktivitas ubi kayu	ton/hektar	27,11 (2023)	27,81		018 - Kementerian Pertanian
05.01.08.01 PRO-P: Jaminan Kepastian Bahan Baku Sagu dan Singkong							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.08.02 PRO-P: Pengembangan Industri Hilir Sagu dan Singkong							
05.01.08.03 PRO-P: Fasilitasi Akses Pasar Produk Olahan Sagu dan Singkong							
05.01.09 KP: Pengembangan Industri Kimia	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah industri kimia	01 - Kapasitas produksi industri kimia dasar berbasis minyak, gas, dan batu bara	ribu ton	59.783,45	60.234,97	27.686,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Pertumbuhan PDB bahan kimia dan barang dari bahan kimia	persen	-0,98 (2023)	6,08		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi minyak bumi	juta rupiah	17.460.000,00	34.453.998,13		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi gas bumi	juta rupiah	16.114.108,34	20.234.887,79		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.09.01 PRO-P: Mega Proyek Industri Kimia Dasar							
05.01.09.02 PRO-P: Revitalisasi Industri Pupuk untuk Mendukung Swasembada Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.09.03 PRO-P: Gasifikasi Batubara							
05.01.09.04 PRO-P: Dekarbonisasi Industri dan Ekonomi Sirkular di Industri Kimia							
05.01.09.05 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Pengembangan Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.09.06 PRO-P: Peningkatan Daya Saing Sektor Industri Kimia dan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.09.07 PRO-P: Pengembangan Produk Sektor Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam							
05.01.10 KP: Pembangunan Industri Semikonduktor	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri semikonduktor	01 - Pertumbuhan PDB industri barang logam: komputer, barang elektronik, optik; dan peralatan listrik	Persen	6,16	3	27.706,7	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi pasir silika	juta rupiah	1.290.000	1.419.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.10.01 PRO-P: Penyiapan Rantai Pasok Industri Semikonduktor							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.10.02 PRO-P: Peningkatan SDM Industri Semikonduktor							
05.01.10.03 PRO-P: Riset dan Pengembangan Semikonduktor							
05.01.11 KP: Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri kosmetik dan farmasi	01 - Pertumbuhan PDB industri farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional	persen	1,85 (2023)	11,48	41.983,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis obat (termasuk vaksin dan produk biologi) yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	43	50		024 - Kementerian Kesehatan
05.01.11.01 PRO-P: Penguatan Industri Bahan Baku Kosmetik dan Farmasi							
05.01.11.02 PRO-P: Pemanfaatan PBJ Pemerintah untuk Utilisasi Kapasitas Industri Farmasi							
05.01.11.03 PRO-P: Harmonisasi dan Pemenuhan Standar Internasional							
05.01.11.04 PRO-P: Implementasi Perpres Jamu							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.11.05 PRO-P: Pengembangan Riset dan Inovasi serta Adopsi Teknologi							
05.01.11.06 PRO-P: *Branding* Kosmetik Halal untuk Perluasan Pasar Ekspor							
05.01.11.07 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Kosmetik dan Farmasi							
05.01.12 KP: Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)	01 - Persentase produksi kendaraan listrik roda empat terhadap total produksi kendaraan roda empat	persen	0,94 (2023)	1,00	12.012,5	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.12.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok Industri di Dalam Negeri (termasuk IKM)							
05.01.12.02 PRO-P: Pengembangan Infrastruktur Pengisian Daya							
05.01.12.03 PRO-P: Pengembangan Ekosistem Industri EV							
05.01.12.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular pada Industri Baterai							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.13 KP: Pengembangan Industri Dirgantara	01 - Terwujudnya pertumbuhan industri dirgantara	01 - Utilisasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya	persen	50	50	13.055,9	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.13.01 PRO-P: Penguatan Industri Pesawat Terbang, Komponen, dan Rantai Pasok Kedirgantaraan							
05.01.13.02 PRO-P: Peningkatan SDM, Riset dan Inovasi Kedirgantaraan							
05.01.13.03 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kedirgantaraan							
05.01.13.04 PRO-P: Peningkatan Jasa Kedirgantaraan							
05.01.13.05 PRO-P: Pengembangan dan Pemanfaatan Satelit							
05.01.14 KP: Pengembangan Industri Mesin dan Perlengkapan	01 - Terwujudnya peningkatan daya saing industri mesin dan perlengkapan	01 - Pertumbuhan PDB industri mesin dan perlengkapan	persen	-0,42	1,5	46.378,5	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Proporsi jenis alkes yang dapat diproduksi dalam negeri	persen	56	60		024 - Kementerian Kesehatan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.14.01 PRO-P: Pengembangan Industri EBT							
05.01.14.02 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Kesehatan							
05.01.14.03 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Pertanian							
05.01.14.04 PRO-P: Pengembangan Industri Alat Berat dan Mesin Perkakas							
05.01.14.05 PRO-P: Adopsi Teknologi, *Smart Manufacturing*, dan Pemanfaatan Riset/Inovasi di Industri Mesin dan Perlengkapan							
05.01.15 KP: Peningkatan Industri Makanan dan Minuman	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil pada industri makanan minuman	01 - Pertumbuhan PDB industri makanan dan minuman	persen	5,90	5,43	51.788,3	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.15.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok IKM dan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku/Penolong di Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.02 PRO-P: Peningkatan Penerapan Standardisasi di Industri Makanan dan Minuman							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.15.03 PRO-P: Peningkatan Adopsi Teknologi dan Pemanfaatan Riset/Inovasi Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.04 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular dan Industri Hijau di Industri Makanan dan Minuman							
05.01.15.05 PRO-P: Fasilitasi Pengembangan Industri dan Peningkatan Daya Saing Produk Makanan dan Minuman							
05.01.16 KP: Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	01 - Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri tekstil dan produk tekstil	01 - Pertumbuhan PDB industri tekstil dan pakaian jadi	persen	4,26	3,50	331.640,7	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Produktivitas tenaga kerja industri TPT	juta rupiah/orang/tahun	55,29	60,34		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Penyerapan tenaga kerja industri TPT	orang	3.975.905	3.918.787		019 - Kementerian Perindustrian
05.01.16.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok							
05.01.16.02 PRO-P: Penguatan SDM dan Kebijakan Ketenagakerjaan yang Kondusif							
05.01.16.03 PRO-P: Penyediaan Energi Bersih dan Terbarukan yang Andal dan Bersaing							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.16.04 PRO-P: Adopsi Teknologi 4.0 dan Teknologi Rendah Emisi							
05.01.16.05 PRO-P: Optimalisasi Riset dan Inovasi							
05.01.16.06 PRO-P: Peningkatan Akses terhadap Lembaga Pembiayaan							
05.01.16.07 PRO-P: Pengembangan *Sustainable Textile* dan Tekstil Budaya Lokal							
05.01.16.08 PRO-P: Penguatan *Branding* Produk Tekstil dan Peningkatan Ekspor							
05.01.16.09 PRO-P: Peningkatan Pangsa Pasar di *e-Commerce* dan Pemanfaatan PBJ							
05.01.16.10 PRO-P: Kebijakan Tata Niaga Impor dan Pemberantasan Impor Ilegal							
05.01.17 KP: Pengembangan Industri Alas Kaki	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas industri alas kaki	01 - Pertumbuhan PDB industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki	persen	6,83	3,80	51.506,6	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.17.01 PRO-P: Penguatan Rantai Pasok dan Kualitas Bahan Baku							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.17.02 PRO-P: Adopsi Teknologi di Industri Alas Kaki untuk Peningkatan Efisiensi							
05.01.17.03 PRO-P: Penerapan Ekonomi Sirkular di Industri Alas Kaki							
05.01.17.04 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Daya Saing dan Ekspor Industri Alas Kaki							
05.01.18 KP: Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	01 - Terwujudnya peningkatan produktivitas dan daya saing industri logam dasar besi dan baja	01 - Pertumbuhan PDB industri logam dasar	persen	13,34	9,01	46.066,5	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Utilisasi industri logam dasar	persen	76,76	59		019 - Kementerian Perindustrian
		03 - Nilai realisasi PMA/PMDN hilirisasi industri logam dasar besi dan baja	juta rupiah	9.600.000	10.166.000		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.01.18.01 PRO-P: Ketersediaan Bahan Baku Industri Logam Dasar yang Berkualitas dan Kompetitif							
05.01.18.02 PRO-P: Kepastian Pasokan dan Harga Energi untuk Industri Logam Dasar							
05.01.18.03 PRO-P: Peningkatan Utilisasi Kapasitas Terpasang Industri Besi-Baja							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.01.18.04 PRO-P: Pengembangan Industri *Special Steel*							
05.01.18.05 PRO-P: Penerapan Dekarbonisasi Industri di Industri Logam Dasar							
05.01.18.06 PRO-P: Optimalisasi Penerapan Standardisasi di Industri Logam Dasar							
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	persen	2,72 (2016)	3,12	7.250,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.01.19.01 PRO-P: Tata Kelola Kebijakan Jasa Industri							
05.01.19.02 PRO-P: Pendampingan Pelaku Jasa Industri							
05.01.19.03 PRO-P: Fasilitasi Kemitraan Jasa Industri							
05.02 PP: Pengembangan Aglomerasi Industri di	01 - Terwujudnya aglomerasi industri di	01 - Rasio PDRB industri pengolahan di provinsi	persen	51,00	51,30	262.696,4	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
KI/KEK Prioritas sebagai Pusat Pertumbuhan Baru	KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru	KI/KEK prioritas terhadap PDB industri pengolahan					
05.02.01 KP: Pembangunan KEK Arun Lhokseumawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KEK Arun Lhokseumawe	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	triliun rupiah	0,55	0,80	2.600,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.01.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.01.02 PRO-P: Perizinan KEK Arun Lhokseumawe							
05.02.01.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.01.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.01.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.02 KP: Pengembangan KEK Sei Mangkei	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Sei Mangkei	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	triliun rupiah	5,50	6,03	18.991,3	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.02.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.02.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Pengolahan Persampahan/Limbah, Air Bersih)							
05.02.02.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.02.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.02.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM (APBN dan DAK)							
05.02.03 KP: Pengembangan KEK Galang Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK Galang Batang	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	triliun rupiah	2,40	13,80	24.500,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.03.01 PRO-P: Perizinan KI/KEK Galang Batang							
05.02.03.02 PRO-P: Penataan Ruang KI/KEK Galang Batang							
05.02.03.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.03.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi							
05.02.03.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.03.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.03.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.05 KP: Pengembangan KEK Gresik	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI/KEK JIIPE Gresik	01 - Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	triliun rupiah	21,70	22,80	40.723,5	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.02.05.01 PRO-P: Penataan Ruang KEK Gresik							
05.02.05.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.05.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.05.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.05.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.06 KP: Pengembangan KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Bintan Inti Industrial Estate	triliun rupiah	1,65	1,73	3.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.06.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.06.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi)							
05.02.06.05 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.06.06 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.06.07 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.07 KP: Pengembangan KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan	triliun rupiah	5,99	5,99	13.905,0	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		industri di KI Krakatau Industrial Estate Cilegon					
05.02.07.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Krakatau Industrial Estate Cilegon							
05.02.07.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.07.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.07.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.07.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.08 KP: Pengembangan KIT Wilmar	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Wilmar	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Wilmar	triliun rupiah	13,02	13,14	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.08.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.08.02 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.08.03 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.08.04 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.09 KP: Pengembangan KIT Batang	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KIT Batang	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KIT Batang	triliun rupiah	3,77	4,14	850,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.09.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.09.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.09.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.09.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.09.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.10 KP: Pembangunan KI Seafer	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Seafer	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Seafer	triliun rupiah	0,73	0,73	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.10.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.10.02 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Energi							
05.02.10.03 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.10.04 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.10.05 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.10.06 PRO-P: Perizinan KI Seafer							
05.02.11 KP: Pembangunan KI iSentra @Lamongan	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI iSentra @Lamongan	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI iSentra @Lamongan	triliun rupiah	1,18	1,37	0,0	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.11.01 PRO-P: Perizinan KI iSentra @Lamongan							
05.02.11.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.11.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana pendukung (Energi, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.11.04 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.11.05 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.11.06 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.12 KP: Pembangunan KI Ngawi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Ngawi	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ngawi	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	270,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.12.01 PRO-P: Perizinan KI Ngawi							
05.02.12.02 PRO-P: Penataan Ruang KI Ngawi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.12.04 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.12.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi dan Air Bersih)							
05.02.12.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.12.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.12.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.13 KP: Pengembangan KI KBS (Ketapang Bangun Sarana)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	01 -Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Ketapang Bangun Sarana (KBS)	triliun rupiah	2,22	2,31	8.863,6	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.13.01 PRO-P: Penataan Ruang dan Fasilitasi Perizinan untuk Perluasan Kawasan							
05.02.13.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.13.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.13.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.13.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.13.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.14 KP: Pengembangan KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI)	triliun rupiah	2,24	4,30	1.317,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.14.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.14.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.14.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.14.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.14.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.15 KP: Pembangunan KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Pomalaa Industry Park	triliun rupiah	1,05	1,05	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.15.01 PRO-P: Perizinan KI Indonesia Pomalaa Industry Park							
05.02.15.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.15.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan							
05.02.15.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.15.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.15.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.15.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.16 KP: Pengembangan KI Konawe	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Konawe	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Konawe	triliun rupiah	305,94	305,96	1.500,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.16.01 PRO-P: Penataan Ruang KI Konawe							
05.02.16.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.16.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Kesehatan, Perumahan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.16.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.16.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.16.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.17 KP: Pengembangan KI Stardust	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Stardust	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Stardust	triliun rupiah	0,33	0,48	1.700,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.17.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.17.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Energi, Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.17.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.17.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.17.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.18 KP: Pembangunan KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP)	triliun rupiah	6,99	9,16	19.989,2	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.18.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.18.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.18.06 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.18.07 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.18.08 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM (APBN dan DAK)							
05.02.19 KP: Pengembangan KI Morowali	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Morowali	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Morowali	triliun rupiah	466,71	467,46	123.986,8	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.19.01 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.19.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.19.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.19.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.19.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.20 KP: Pembangunan KI Sumbawa Barat	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Sumbawa Barat	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Sumbawa Barat	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.20.02 PRO-P: Perizinan KI Sumbawa Barat							
05.02.20.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Sumbawa Barat							
05.02.20.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.20.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.20.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.20.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.20.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.21 KP: Pengembangan KI Pulau Obi	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Pulau Obi	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Pulau Obi	triliun rupiah	0,01	2,53	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.21.03 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.21.04 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.21.08 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.21.09 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.21.10 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.22 KP: Pengembangan KI Weda Bay	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Weda Bay	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Weda Bay	triliun rupiah	346,33	349,49	0,0	019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.22.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.22.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.22.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.22.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.22.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.23 KP: Pembangunan KI Buli	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Buli	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Buli	triliun rupiah	0,01	0,21	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.23.01 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.23.02 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan							
05.02.23.03 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih, dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.23.07 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							
05.02.23.08 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.23.09 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.02.24 KP: Pembangunan KI Fakfak	01 - Terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KI Fakfak	01 - Nilai investasi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri di KI Fakfak	triliun rupiah	- (tahap persiapan)	- (tahap persiapan)	0,0	019 - Kementerian Perindustrian
05.02.24.02 PRO-P: Perizinan KI Fakfak							
05.02.24.03 PRO-P: Penataan Ruang KI Fakfak							
05.02.24.05 PRO-P: Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Jalan/Jembatan dan Konektivitas Simpul Transportasi							
05.02.24.06 PRO-P: Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung (Perumahan, Kesehatan, Air Bersih dan Pengolahan Persampahan/Limbah)							
05.02.24.10 PRO-P: Peningkatan Investasi Kawasan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.02.24.11 PRO-P: Pengembangan Kemitraan Usaha dan Rantai Pasok							
05.02.24.12 PRO-P: Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan SDM							
05.03 PP: Optimalisasi Backbone Integrasi Ekonomi dan Perkuatan Sistem Logistik Nasional	02 - Menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Biaya transportasi logistik terhadap PDB	persen	8,79 (2022)	8,27	22.526.386,0	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
		02 - Rata-rata waktu perputaran di pelabuhan	hari	1,8	1,7		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
05.03.01 KP: Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan *Backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik	01 - Menguatnya infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik	01 - Biaya transportasi logistik pada angkutan darat selain angkutan rel terhadap PDB	persen	2,66	2,50	22.133.430,8	022 - Kementerian Perhubungan
		02 - Biaya transportasi logistik pada angkutan laut terhadap PDB	persen	1,02	0,96		022 - Kementerian Perhubungan
		03 - Biaya transportasi logistik pada angkutan udara terhadap PDB	persen	0,89	0,84		022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Biaya transportasi logistik pada angkutan rel terhadap PDB	persen	0,04	0,03		022 - Kementerian Perhubungan
		05 - Biaya transportasi logistik pada angkutan sungai danau dan penyeberangan terhadap PDB	persen	0,10	0,09		022 - Kementerian Perhubungan
		06 - Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar	lokasi (kumulatif)	6	7		022 - Kementerian Perhubungan
		07 - Kinerja bongkar muat pada pelabuhan utama petikemas	box/ship/jam	21 (2023)	31		022 - Kementerian Perhubungan
		08 - Jumlah bandara primer/utama yang ditingkatkan kapasitasnya	lokasi	18 (2023)	22		022 - Kementerian Perhubungan
		09 - Volume angkutan barang transportasi udara pada bandara primer/utama	juta ton	1.391	1.419		022 - Kementerian Perhubungan
05.03.01.01 PRO-P: Standarisasi Fasilitas Pelabuhan, Bandara, serta Terminal							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.03.01.02 PRO-P: Pengembangan Konektivitas Jalan dan Kereta Api Terintegrasi dengan Simpul Utama dan *Hinterland*							
05.03.01.03 PRO-P: Penyediaan Layanan Angkutan Logistik							
05.03.01.04 PRO-P: Tata Kelola Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Logistik							
05.03.01.05 PRO-P: Pengembangan Sarana Penunjang Logistik, termasuk Rantai Berpendingin							
05.03.02 KP: Penguatan Integrasi dan Digitalisasi Layanan Logistik	01 - Menguatnya integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik serta dan digitalisasi pada layanan logistik	01 - Waktu penahanan (*dwell time*) di pelabuhan selama fase impor	hari	2,85	2,90–2,85	5.839,9	015 - Kementerian Keuangan
05.03.02.01 PRO-P: Penguatan Integrasi pada Sistem dan Proses Bisnis Logistik							
05.03.02.02 PRO-P: Percepatan Adopsi Teknologi Digital pada Layanan Penyedia Jasa Logistik							
05.03.03 KP: Peningkatan Daya	01 - Meningkatnya daya saing sumber daya	01 - Indeks peningkatan SDM transportasi		110,10	85,5	387.115,3	022 - Kementerian Perhubungan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
Saing Sumber Daya Manusia dan Penyedia Jasa Logistik	manusia dan penyedia jasa logistik dalam negeri	02 - Pertumbuhan sektor pos logistik	persen	9,16	9,5		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
05.03.03.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia di Bidang Logistik							
05.03.03.02 PRO-P: Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik							
05.04 PP: Peningkatan Investasi untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	01 - Meningkatnya realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global	01 - Nilai PMA dan PMDN	triliun rupiah	1.714,2	1.905,6	224.574,1	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01 KP: Peningkatan Investasi Swasta Prioritas sebagai Pendorong Transformasi Ekonomi	01 - Meningkatnya investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi	01 - Nilai PMA/PMDN sektor sekunder	triliun rupiah	721,3	855,9	140.677,4	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Persentase realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	(persen total nilai PMA/PMDN)	47,5	48,3		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Nilai PMA/PMDN kawasan pusat pertumbuhan	triliun rupiah	253,4 (2023)	307,1		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		04 - Nilai realisasi penanaman modal di bidang hilirisasi	triliun rupiah	407,8	521,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.01.01 PRO-P: Percepatan Transformasi Digital pada Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha di Sektor Industri dan Non Industri							
05.04.01.02 PRO-P: Penyusunan Informasi Investasi Proyek Prioritas Strategis pada Sektor-Sektor Pendorong Transformasi Ekonomi							
05.04.01.03 PRO-P: Transformasi Kebijakan Ekosistem Investasi dan Hilirisasi yang Terintegrasi							
05.04.01.04 PRO-P: Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Investasi dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan							
05.04.01.05 PRO-P: Peningkatan Kemitraan Usaha Nasional untuk Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM							
05.04.01.06 PRO-P: Penguatan Transformasi Digital melalui Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Pelayanan dan Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah Pusat-Pusat							
05.04.02 KP: Peningkatan Investasi yang Berorientasi Ekspor dan mendukung Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya Investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global	01 - Nilai PMA berorientasi ekspor	triliun rupiah	115,4 (2023)	171,6	76.028,7	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
		02 - Nilai PMDN berorientasi ekspor	triliun rupiah	41,2 (2023)	60,4		065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
05.04.02.01 PRO-P: Percepatan Layanan Pendampingan Perizinan Berusaha untuk Investasi Luar Negeri (FDI/PMA) Strategis							
05.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Fasilitasi *Outward Investment* dan Penguatan Kerjasama Penanaman Modal untuk Pengembangan Rantai Nilai Global							
05.04.02.03 PRO-P: Penguatan Promosi Penanaman Modal untuk Mendorong Hilirisasi dan Industrialisasi di Pusat-Pusat Pertumbuhan							
05.04.03 KP: Peningkatan Investasi dalam Infrastruktur Konektivitas dan Logistik	01 - Meningkatnya investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik	01 - Kontribusi realisasi investasi luar Jawa	persen	52,2	52,1	7.868,0	065 - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.04.03.01 PRO-P: Percepatan Strategi dan Rencana Proyek Penanaman Modal dalam Rangka Penciptaan Pusat-Pusat Pertumbuhan							
05.04.03.02 PRO-P: Peningkatan Promosi Kegiatan di Kawasan Nasional IKN pada Forum Bisnis dan Investasi Internasional							
05.05 PP: Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia	Persen	1,11 (2023)	1,12	589.360,4	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor jasa Indonesia	miliar USD	23,10 (2022)	29,93		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	Persen	0,81 (2022)	0,99		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah	triliun rupiah	1.622 (2022)	1.803		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.01 KP: Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik,	01 - Meningkatnya nilai pembelian perdagangan antar wilayah per pulau	01 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sumatera	triliun rupiah	205 (2022)	217	276.020,7	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Jawa	triliun rupiah	1.059 (2022)	1.158		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
Antardaerah, dan dengan Global		03 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Bali-Nusra	triliun rupiah	51 (2022)	93		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Kalimantan	triliun rupiah	121 (2022)	144		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Sulawesi	triliun rupiah	135 (2022)	138		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Pulau Papua-Maluku	triliun rupiah	51 (2022)	55		090 - Kementerian Perdagangan
	02 - Meningkatnya kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB Provinsi per pulau	01 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sumatera	persen	11,63 (2022)	12,10		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Jawa	persen	12,48 (2022)	13,31		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Bali-Nusra	persen	9,23 (2022)	10,06		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Kalimantan	persen	10,12 (2022)	10,65		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Sulawesi	persen	10,78 (2022)	11,98		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Kontribusi perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB di Pulau Papua-Maluku	persen	10,63 (2022)	11,95		090 - Kementerian Perdagangan
	03 - Meningkatnya nilai ekspor barang per pulau	01 - Nilai ekspor barang di Pulau Sumatera	miliar rupiah	1.159.400 (2022)	1.352.500		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang di Pulau Jawa	miliar rupiah	1.542.700 (2022)	1.953.800		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang di Pulau Bali-Nusra	miliar rupiah	51.700 (2022)	76.200		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang di Pulau Kalimantan	miliar rupiah	961.500 (2022)	1.127.400		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang di Pulau Sulawesi	miliar rupiah	429.700 (2022)	551.400		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Nilai ekspor barang di Pulau Papua-Maluku	miliar rupiah	257.700 (2022)	321.200		090 - Kementerian Perdagangan
	04 - Meningkatnya diversifikasi ekspor per pulau	01 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sumatera		0,42 (2022)	0,30		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Jawa		0,09 (2022)	0,05		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Bali-Nusra		0,37 (2022)	0,27		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Kalimantan		0,60 (2022)	0,45		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Sulawesi		0,53 (2022)	0,39		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Indeks Diversifikasi Ekspor di Pulau Papua-Maluku		0,74 (2022)	0,60		090 - Kementerian Perdagangan
	05 - Meningkatnya jumlah usaha *e-commerce* per pulau	01 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Sumatera	unit kumulatif	330.700 (2022)	482.800		090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Jawa	unit kumulatif	2.288.300 (2022)	3.340.800		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Bali-Nusra	unit kumulatif	125.300 (2022)	183.000		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Kalimantan	unit kumulatif	132.000 (2022)	192.700		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Sulawesi	unit kumulatif	109.700 (2022)	160.100		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Jumlah usaha *e-commerce* di Pulau Papua-Maluku	unit kumulatif	10.100 (2022)	14.700		090 - Kementerian Perdagangan
	06 - Terciptanya stabilisasi harga komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	01 - Koefisien variasi (*coefficient of variation*) harga pangan kumulatif komoditas pangan pokok antar waktu dan antar wilayah	persen	- (indikator baru)	20–25		125 - Badan Pangan Nasional
05.05.01.001 PRO-P. Integrasi Informasi Keunggulan Daerah serta Data Permintaan dan Penawaran Setiap Daerah							
05.05.01.002 PRO-P. Promosi Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.01.003 PRO-P: Kerja sama Antardaerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik dan Antardaerah							
05.05.01.004 PRO-P: Peningkatan Kualitas SDM Daerah untuk Mendorong Ekspor							
05.05.01.005 PRO-P: Stabilisasi Harga Bahan Pangan dengan Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardaerah							
05.05.01.006 PRO-P: Pelatihan Ekspor dan Adaptasi Bisnis *E-Commerce* bagi Pelaku UMKM di Daerah							
05.05.01.007 PRO-P: Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk Mendorong Perdagangan Domestik, Antardaerah dan Ekspor							
05.05.01.008 PRO-P: Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah							
05.05.01.009 PRO-P: Kebijakan Perdagangan untuk Mendorong Digitalisasi Perdagangan							
05.05.02 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Berteknologi Menengah Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi di pasar global	01 - Kontribusi ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi Indonesia terhadap total ekspor produk Indonesia	persen	22,67 (2022)	24,98	73.456,5	090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi terhadap dunia	persen	0,65 (2022)	0,72		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Nilai ekspor barang-barang berkategori hijau (*environmental goods*)	miliar USD	8,59 (2022)	17,09		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	persen	11,95	5,6		019 - Kementerian Perindustrian
05.05.02.001 PRO-P: Pengembangan Pasar Ekspor Indonesia							
05.05.02.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk Teknologi Menengah Tinggi							
05.05.02.003 PRO-P: Fasilitasi Sertifikasi Produk dan Perlindungan HKI untuk Mendorong Ekspor Barang dan Jasa							
05.05.02.004 PRO-P: Pendampingan dalam Rangka Mendorong Perdagangan Hijau yang Berkelanjutan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.02.005 PRO-P: Optimalisasi *Market Intelligence* untuk Produk Ekspor Barang dan Jasa							
05.05.02.006 PRO-P: Pengamanan Pasar Ekspor							
05.05.03 KP: Peningkatan Ekspor Produk Industri Penyerap Tenaga Kerja Tinggi	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi	01 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi terhadap dunia	persen	1,35 (2022)	1,43	25.412,4	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Jumlah pelaku usaha yang melakukan ekspor	pelaku usaha (kumulatif)	20.533 (2022)	22.354		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Persentase usaha *e-commerce* yang melakukan ekspor	Persen	0,85 (2022)	1,06		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.03.001 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Eksportir							
05.05.03.002 PRO-P: Promosi Ekspor Produk UMKM dan Produk Penyerap Tenaga Kerja Tinggi							
05.05.03.003 PRO-P: Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Sistem Pengupahan Produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.03.004 PRO-P: Integrasi Informasi dan Mekanisme Ekspor							
05.05.03.005 PRO-P: *Business Matching* untuk Mendorong Kemitraan dalam Rantai Nilai Global							
05.05.03.006 PRO-P: Fasilitasi Pembiayaan dan Asuransi Perdagangan Internasional							
05.05.04 KP: Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA	01 - Meningkatnya pangsa ekspor produk pertanian, perikanan dan industri berbasis SDA di pasar global	01 - Nilai Ekspor hasil perikanan	miliar USD	5,63 (2023)	6,25	36.279,6	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		02 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk pertanian terhadap dunia	persen	2,96 (2022)	3,28		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Kontribusi pangsa pasar ekspor produk industri berbasis sumber daya alam terhadap dunia	persen	2,38 (2022)	2,59		090 - Kementerian Perdagangan
		04 - Diversifikasi produk industri berbasis SDA yang diolah		0,294 (2023)	0,286		019 - Kementerian Perindustrian
		05 - Jumlah produk industri berbasis SDA yang diolah yang berdaya saing	produk	179 (2022)	208		019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		06 - Nilai ekspor rumput laut	juta USD	433,72 (2023)	574,00		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
		07 - Proporsi ekspor produk olahan rumput laut	persen	34,31	46,5		032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
05.05.04.001 PRO-P: Kebijakan dan Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.002 PRO-P: Promosi Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.003 PRO-P: Kerja Sama untuk Peningkatan Ekspor Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Berbasis SDA							
05.05.04.004 PRO-P: Peningkatan Fasilitas Perdagangan di Kawasan Perbatasan							
05.05.05 KP: Peningkatan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	01 - Meningkatnya ekspor jasa dan produk kreatif	01 - Nilai ekspor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi	miliar USD	2,37 (2022)	2,82	21.812,0	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Nilai ekspor jasa bisnis lainnya	miliar USD	5,93 (2022)	8,46		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor ekonomi kreatif	miliar USD	23,96 (2023)	26,44		148 - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Nilai perdagangan komoditas digital	miliar USD	9,27 (2022)	10,86		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.05.001 PRO-P: Perluasan Akses Informasi Pasar Potensial dan *Buyer* untuk Ekspor Jasa dan Produk Kreatif							
05.05.05.002 PRO-P: Koordinasi Kebijakan dan Penyediaan Data Perdagangan Sektor Jasa dan Produk Kreatif yang Terintegrasi							
05.05.05.003 PRO-P: Perundingan Perdagangan dan Kerja sama Perdagangan Jasa							
05.05.05.004 PRO-P: Penguatan SDM dan Pendampingan Pengembangan Perdagangan Jasa							
05.05.05.005 PRO-P: Promosi Ekspor Jasa dan Produk Kreatif							
05.05.06 KP: Peningkatan Rantai Nilai Produk Elektronik dan Otomotif termasuk *Electric Vehicle* (EV)	01 - Meningkatnya partisipasi sektor elektronik Indonesia dalam rantai nilai regional di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara dan sektor otomotif Indonesia termasuk *electric vehicle* (EV) dalam rantai nilai global	01 - Tingkat partisipasi produk elektronik Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	42,00 (2022)	35,00	19.557,6	019 - Kementerian Perindustrian
		02 - Tingkat partisipasi produk otomotif termasuk *electric vehicle* (EV) Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global	persen	23,00 (2022)	19,00		019 - Kementerian Perindustrian

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.06.001 PRO-P: Sinkronisasi SNI Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia dengan Standar Internasional							
05.05.06.002 PRO-P: Kerja Sama untuk Penurunan Hambatan Tarif dan Non-Tarif Produk Ekspor Indonesia							
05.05.06.003 PRO-P: Pemantauan NTM yang Diterapkan Indonesia untuk Produk Otomotif dan Elektronik Indonesia							
05.05.06.004 PRO-P: Penyelenggaraan Forum Bisnis dan *Business Matching* bagi Pelaku Ekspor Indonesia untuk Masuk dalam Rantai Pasok Global							
05.05.06.005 PRO-P: Fasilitasi Pelayanan Ekspor dan Impor yang Terintegrasi							
05.05.07 KP: Peningkatan Utilisasi FTA/CEPA untuk Mendorong Partisipasi dalam Rantai Nilai Global	01 - Meningkatnya pemanfaatan atau utilisasi FTA/CEPA untuk mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global	01 - Nilai Ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam RCEP	miliar USD	172,8 (2023)	184,9	30.273,2	090 - Kementerian Perdagangan
		02 - Nilai ekspor barang ke negara-negara yang tergabung dalam ASEAN	miliar USD	53,1 (2023)	56,8		090 - Kementerian Perdagangan
		03 - Nilai ekspor barang ke negara-negara EFTA dalam rangka utilisasi Indonesia-EFTA CEPA	miliar USD	2,8 (2023)	3,0		090 - Kementerian Perdagangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Nilai ekspor barang ke Australia dalam rangka utilisasi IA-CEPA	miliar USD	3,2 (2023)	3,4		090 - Kementerian Perdagangan
		05 - Nilai ekspor barang ke Jepang dalam rangka utilisasi IJEPA	miliar USD	20,8 (2023)	22,2		090 - Kementerian Perdagangan
		06 - Nilai ekspor barang ke UAE dalam rangka utilisasi IUAE-CEPA	miliar USD	2,6 (2023)	2,8		090 - Kementerian Perdagangan
		07 - Nilai ekspor barang ke Korea dalam rangka utilisasi IK-CEPA	miliar USD	10,3 (2023)	11,0		090 - Kementerian Perdagangan
		08 - Nilai ekspor barang ke Chile dalam rangka utilisasi Indonesia-Chile CEPA	miliar USD	0,31 (2023)	0,33		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.07.001 PRO-P: Sosialisasi dan Penyediaan Informasi Digital Terkait Aturan Perdagangan, Peluang Bisnis, dan Lainnya							
05.05.07.002 PRO-P: Peninjauan dan Sinkronisasi Regulasi Perdagangan Dalam Negeri untuk Mengoptimalisasi Utilisasi FTA/CEPA							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.07.003 PRO-P: Pengembangan *Exporter Tools* untuk Meningkatkan Kapasitas Eksportir di antaranya Informasi Pasar, Persiapan Ekspor, Strategi Pemasaran, Logistik, Akses - Manajemen Keuangan, dan Manajemen Risiko							
05.05.07.004 PRO-P: Peningkatan Jumlah dan Kapasitas dari Perwakilan Perdagangan							
05.05.07.005 PRO-P: Peningkatan Kesepakatan dan Proses Ratifikasi Perundingan Perdagangan							
05.05.08 KP: Peningkatan Kualitas Produk, Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen	01 - Meningkatnya daya saing produk Indonesia terstandardisasi	01 - Persentase produk ekspor Indonesia yang ber-SNI	persen	3,109 (2023)	3,3	106.548,5	084 - Badan Standardisasi Nasional
		02 - Persentase produk ber-SNI	persen	10	10		084 - Badan Standardisasi Nasional
	04 - Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat	01 - Indeks Persaingan Usaha		4,87/7,00 (2022)	5,35/7,00		108 - Komisi Pengawas Persaingan Usaha
	05 - Meningkatnya keberdayaan konsumen	01 - Indeks Keberdayaan Konsumen		53,23 (2022)	63		090 - Kementerian Perdagangan
05.05.08.001 PRO-P: Pengembangan Standar Nasional Produk dalam rangka Pengamanan Pasar Domestik dan Pemenuhan Standar Pasar Ekspor							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.05.08.002 PRO-P: Penguatan Akreditasi, Kalibrasi, Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi							
05.05.08.003 PRO-P: Percepatan Penerapan dan Pemberlakuan secara wajib Standar Produk dan Tata Kelola Ekosistem Standarisasi							
05.05.08.004 PRO-P: Penciptaan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat							
05.05.08.005 PRO-P: Pemberdayaan Konsumen							
05.06 PP: Optimalisasi Investasi Strategis Danantara	01 - Meningkatnya investasi strategis	01 - Jumlah nilai investasi strategis	triliun rupiah	- (indikator baru)	100	0,0	Danantara
05.06.01 KP: Pengelolaan Portofolio dan Tujuan Investasi Strategis	01 - Optimalisasi portofolio investasi strategis	01 - *Return on Investment* (ROI)	persen	- (indikator baru)	6,0	0,0	Danantara
05.06.01.01 PRO-P: Portofolio							
05.06.01.02 PRO-P: Tujuan Investasi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
05.06.02 KP: Peningkatan Investasi Strategis pada Sektor Prioritas	01 - Meningkatnya investasi strategis pada sektor prioritas	01 - Jumlah investasi strategis sektor prioritas yang mencapai *financial close*	proyek	- (indikator baru)	2	0,0	Danantara
05.06.02.01 PRO-P: Pertambangan, Energi, Pangan dan air							
05.06.02.02 PRO-P: Infrastruktur dan Perumahan							
05.06.02.03 PRO-P: Teknologi, Industri Strategis dan Kesehatan							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 6: MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06 PN: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	01 - Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan	01 - Proporsi penduduk kelas menengah	persen	17,13	17,50	206.321.902,9	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Tingkat kemiskinan	persen	8,57	7,0–8,0		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Tingkat kemiskinan ekstrem	persen	1,47	0[a)]		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		04 - Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	persen	9,07 (2023)	10		026 - Kementerian Ketenagakerjaan
	02 - Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	persen	65,25	67,00		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri	persen	22,85	23,29		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	04 - Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	01 - Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional	persen	56,56 (2022)	57,29		132 - Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
06.01 PP: Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi	01 - Tersedianya data dalam satu sistem yang efisien, tepat, dan efektif untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program pembangunan	01 - Persentase data sosial ekonomi keluarga Indonesia yang termutakhir dan terpilah secara berkala	persen	30	40	196.842,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
06.01.01 KP: Tata Kelola Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01 - Terbangunnya sistem interoperabilitas data antar kementerian/lembaga	01 - Persentase K/L yang sistem datanya terhubung dengan sistem Regsosek	persen	7	40	105.660,5	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.01.01.001 PRO-P: Pengelolaan Sistem Data							
06.01.01.002 PRO-P: Monitoring dan Pemutakhiran Data							
06.01.01.003 PRO-P: Pengelolaan Data dan Regulasi							
06.01.01.004 PRO-P: Integrasi Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan Data Administrasi Kependudukan dan Statistik Hayati							
06.01.02 KP: Pemanfaatan Sistem Registrasi Sosial Ekonomi	01 - Terselenggaranya pemanfaatan data yang optimal untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional	01 - Persentase K/L yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60	91.182,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan data Regsosek melalui SEPAKAT	persen	30	60		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
06.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Sektoral							
06.01.02.02 PRO-P: Penataan Sumber Daya Manusia							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.01.02.03 PRO-P: Integrasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati							
06.02 PP: Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif	01 - Terwujudnya integrasi bantuan sosial dan jaminan sosial yang inklusif dan adaptif dalam menghadapi bencana alam, bencana sosial, serta dampak perubahan iklim	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dan jaminan sosial	persen	64,75 (2023)	68	157.977.493,2	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	persen	29,77 (semester I)	32,15		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		03 - Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	keluarga per tahun	- (indikator baru)	1,5 juta		027 - Kementerian Sosial
06.02.01 KP: Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	01 - Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi	01 - Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial non-tunai	persen	60 (2023)	65	155.303.007,5	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial kebencanaan	persen	7 (2023)	8		027 - Kementerian Sosial

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera	keluarga per tahun	10 ribu	400 ribu		027 - Kementerian Sosial
06.02.01.01 PRO-P: Bantuan Keluarga, Pendidikan dan Kesehatan							
06.02.01.02 PRO-P: Bantuan Energi dan Pangan							
06.02.01.03 PRO-P: Layanan Sosial dan Bantuan Kebencanaan							
06.02.02 KP: Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Terlaksananya reformasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional	01 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	10,63 (semester I)	14,01	21.888,9	026 - Kementerian Ketenagakerjaan
		02 - Persentase cakupan kepesertaan Pekerja Penerima Upah (PPU) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional	persen	52,39 (semester I)	54,18		026 - Kementerian Ketenagakerjaan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Jumlah kebijakan peningkatan kualitas program dan manfaat jaminan sosial secara inklusif	rekomendasi kebijakan	3 (2023)	3		134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.02.02.01 PRO-P: Perluasan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nasional secara Inklusif							
06.02.02.02 PRO-P: Penguatan Program dan Kelembagaan Jaminan Sosial Nasional							
06.02.03 KP: Pengembangan Ekonomi Perawatan (*Care Economy*)	01 - Meluasnya pemberian layanan keperawatan	01 - Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi	persen	25	28	2.652.596,7	027 - Kementerian Sosial
		02 - Persentase tenaga SDM kesejahteraan sosial/pendamping perawatan yang tersertifikasi	persen	37	40		027 - Kementerian Sosial
06.02.03.01 PRO-P: Penyediaan Layanan Pengasuhan bagi Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Rentan Lain							
06.02.03.02 PRO-P: Penguatan Kapasitas Perawatan Masyarakat							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.03 PP: Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif	01 - Terciptanya lapangan kerja dari peningkatan wirausaha yang inovatif dan berkelanjutan	01 - Persentase penduduk berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	persen	73,8	74,1	1.827.987,4	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		02 - Persentase penerima reforma agraria yang meningkat kesejahteraannya	persen	4,96	14,98		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.01 KP: Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	01 - Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	01 - Proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap	persen	3,90 (2023)	4,10	760.772,2	150 - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
06.03.01.01 PRO-P: Penatakelolaan Kartu Usaha							
06.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing							
06.03.02 KP: Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Afirmatif	01 - Meningkatnya kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif	01 - Jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan	jiwa per tahun	- (indikator baru)	1.000.000	731.100,8	027 - Kementerian Sosial

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.03.02.01 PRO-P: Penguatan Kapasitas Kerja							
06.03.02.02 PRO-P: Penguatan Kewirausahaan Afirmatif							
06.03.03 KP: Reforma Agraria	01 - Terlaksananya reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah, serta meningkatkan kemandirian masyarakat penerima Tanah Obyek Reforma Agraria	01 - Persentase rumah tangga miskin yang memiliki aset lahan	persen	46,16	40	336.114,3	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		02 - Persentase petani/nelayan penerima Reforma Agraria	persen	46,64	42		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
		03 - Penurunan Indeks Gini Ketimpangan Pemilikan Tanah untuk Petani/Nelayan		0,0057	0,0006		056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
06.03.03.01 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria							
06.03.03.02 PRO-P: Pelaksanaan Penataan Akses (Pemberdayaan Masyarakat) Reforma Agraria							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04 PP: Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan	01 - Meningkatnya peran wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional	persen	44,13 (2022)	44,35	10.058.628,7	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan	skor	44,61 (2023)	44,81		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah metropolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non-Wilayah Metropolitan terhadap PDB nasional	persen	6,97 (2022)	7,47		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	skor	48,36 (2023)	48,66		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01 KP: Pembangunan Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya peran wilayah metropolitan KBI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan KBI terhadap PDB nasional	persen	40,75 (2022)	40,93	9.102.213,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KBI	skor	45,86 (2023)	46,16		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Meningkatnya peran wilayah metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan KTI terhadap PDB nasional	persen	3,38 (2022)	3,42		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Wilayah Metropolitan KTI	skor	42,74 (2023)	43,04		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
06.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Medan							
06.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang							
06.04.01.03 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Jakarta							
06.04.01.04 PRO-P: Pemantapan Wilayah Metropolitan Bandung							
06.04.01.05 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Semarang							
06.04.01.06 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Surabaya							
06.04.01.07 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Denpasar							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04.01.08 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin							
06.04.01.09 PRO-P: Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan Makassar							
06.04.01.10 PRO-P: Pengembangan Wilayah Metropolitan Manado							
06.04.02 KP: Pembangunan Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan	01 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah metropolitan KBI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI terhadap PDB nasional	persen	3,83 (2022)	3,89	956.415,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KBI	skor	49,81 (2023)	50,11		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
	02 - Meningkatnya peran perkotaan non-wilayah Metropolitan KTI sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Proporsi kontribusi PDRB perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI terhadap PDB nasional	persen	3,15 (2022)	3,57		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Skor Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) Rerata Perkotaan Non-Wilayah Metropolitan KTI	skor	47,20 (2023)	47,50		145 - Kementerian Pekerjaan Umum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.04.02.01 PRO-P: Penyiapan Perkotaan yang Berpotensi Menjadi Wilayah Metropolitan							
06.04.02.02 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Besar							
06.04.02.03 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Sedang							
06.04.02.04 PRO-P: Pembangunan Kawasan Perkotaan Kecil							
06.05 PP: Pembangunan Ibu Kota Nusantara	01 - Mengembangkan kota berkelanjutan di dunia	01 - Indeks Kota Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara		47,79	48,29	18.127.753,6	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan	01 - Laju pertumbuhan PDRB Pulau Kalimantan	persen	5,4	5,8		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	03 - Mewujudkan simbol identitas nasional	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat Ibu Kota Nusantara		61,35	62,85		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.01 KP: Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	01 - Terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya	01 - Luas area kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya yang terbangun	ha	715,32	800–850	17.820.869,6	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pembangunan gedung/perkantoran di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	20		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	23	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		05 - Indeks Aksesibilitas dan Konektivitas Kawasan Ibu Kota Nusantara		0,65	0,74		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	02 - Terselenggaranya pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	01 - Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara	orang	- (indikator baru)	1.700–4.100		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Cakupan layanan kota cerdas kawasan Ibu Kota Nusantara	persen	- (indikator baru)	25		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.01.01 PRO-P: Perencanaan dan Penataan Ruang Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara dan Sekitarnya							
06.05.01.02 PRO-P: Pembangunan Gedung/Perkantoran di Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.03 PRO-P: Pembangunan Hunian/Rumah Tangga Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.04 PRO-P: Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.05 PRO-P: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.06 PRO-P: Pemindahan ASN/Hankam ke Ibu Kota Nusantara							
06.05.01.07 PRO-P: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Cerdas Ibu Kota Nusantara							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.02 KP: Pembangunan Sosial, *Superhub* Ekonomi, dan Pengelolaan Lingkungan Ibu Kota Nusantara	01 - Terwujudnya pengembangan *superhub* ekonomi Ibu Kota Nusantara dan wilayah sekitar	01 - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah di Ibu Kota Nusantara	persen	1,58	1,88	306.884,0	126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Realisasi nilai investasi sektor swasta di Ibu Kota Nusantara	triliun rupiah	58,41	60		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Rencana klaster superhub ekonomi IKN yang disiapkan	klaster	1	1		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
	02 - Terwujudnya pembangunan sosial dan sumberdaya manusia di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase masyarakat sejahtera	persen	8,91	9,50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Persentase pelayanan kesehatan yang memenuhi standar di Ibu Kota Nusantara	persen	55	63		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Persentase satuan pendidikan yang memenuhi SNP (standar nasional pendidikan) di Ibu Kota Nusantara	persen	65	70		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Ibu Kota Nusantara	01 - Persentase pengelolaan kawasan lindung Ibu Kota Nusantara	persen	17	18		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		02 - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Ibu Kota Nusantara		70,72	71,22		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		03 - Indeks Risiko Bencana Ibu Kota Nusantara		104,00	100,80		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
		04 - Luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian berkelanjutan	ha	- (indikator baru)	50		126 - Otorita Ibu Kota Nusantara
06.05.02.01 PRO-P: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.02 PRO-P: Peningkatan Investasi di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.03 PRO-P: Pengembangan *Superhub* Ekonomi Ibu Kota Nusantara dan Wilayah Sekitar							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.05.02.04 PRO-P: Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.05 PRO-P: Pembangunan Kesehatan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.06 PRO-P: Pembangunan Pendidikan di Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.07 PRO-P: Penyelenggaraan Kawasan Lindung dan Kehutanan Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.08 PRO-P: Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Ibu Kota Nusantara							
06.05.02.09 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan Ibu Kota Nusantara							
06.06 PP: Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman	01 - Meningkatkan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi	unit per tahun	769.078	314.124	2.179.313,5	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.01 KP: Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	01 - Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	01 - Jumlah unit rumah baru yang terbangun	unit per tahun	4.311	476	1.005.584,5	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya	unit per tahun	150.202	38.504		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas	unit per tahun	43.008	0		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.01.01 PRO-P: Fasilitasi Pembangunan Rumah Baru							
06.06.01.02 PRO-P: Pengembangan Perumahan dan Permukiman							
06.06.01.03 PRO-P: Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah							
06.06.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan pada Perumahan Tapak							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.02 KP: Pengembangan Perumahan Publik Vertikal yang Terpadu	01 - Meningkatnya perumahan publik vertikal yang disediakan secara terpadu	01 - Jumlah penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu (milik dan sewa)	unit per tahun	1.320	1.944	945.761,9	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02 - Jumlah unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas hunian vertikal	unit per tahun	- (indikator baru)	0		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.02.01 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Milik							
06.06.02.02 PRO-P: Penyediaan Hunian Publik Vertikal Sewa							
06.06.02.03 PRO-P: Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum, Air Limbah Domestik, dan Persampahan di Hunian Publik Vertikal							
06.06.03 KP: Pengembangan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan	01 - Meningkatnya pelaksanaan bantuan kemudahan dan fasilitasi pembiayaan perumahan	01 - Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan	rumah tangga per tahun	570.237	273.200	16.000,0	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.03.01 PRO-P: Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Perumahan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.03.02 PRO-P: Fasilitasi dan Penyaluran Subsidi/ Bantuan Pembiayaan Perumahan							
06.06.03.03 PRO-P: Fasilitasi Kerja sama Pembiayaan Perumahan dengan Berbagai Instansi							
06.06.03.04 PRO-P: Penyiapan Proyek Kerja sama dan Investasi Perumahan							
06.06.04 KP: Penguatan Ekosistem Perumahan	01 - Terciptanya ekosistem perumahan yang mendukung tersedianya hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	01 - Jumlah kab/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	kab/kota	514	514	100.836,2	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen	rekomendasi kebijakan	1	1		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.04.01 PRO-P: Implementasi Standar Keandalan Bangunan							
06.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Peran dan Kapasitas Pelaku Pembangunan Perumahan							
06.06.04.03 PRO-P: Perlindungan Konsumen Perumahan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.06.04.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Publik							
06.06.04.05 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Hunian Privat							
06.06.05 KP: Peremajaan dan Penanganan Permukiman Kumuh yang Terpadu	01 - Meningkatnya permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	01 - Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	ha per tahun	198,98	177,84	111.130,9	146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.06.05.01 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kota							
06.06.05.02 PRO-P: Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu Skala Kawasan							
06.07 PP: Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	01 - Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	01 - Persentase desa mandiri KTI dan KBI	persen	KTI: 7,42 KBI: 15,42	KTI: 7,74 KBI: 15,55	15.953.884,0	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.01 KP: Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	01 - Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	01 - Rumah tangga perdesaan dengan akses air minum aman	persen	18,9 (2023)	22	2.993.759,8	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		02 - Rumah tangga perdesaan dengan akses sanitasi aman	persen	4,77	6		145 - Kementerian Pekerjaan Umum
		03 - Persentase desa yang mendapatkan layanan kesehatan	persen	25,99	26,12		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		04 - Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	persen	24,62	24,81		146 - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
06.07.01.01 PRO-P: Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa							
06.07.01.02 PRO-P: Peningkatan Utilitas Dasar Desa							
06.07.01.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas Desa							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.02 KP: Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan Desa	01 - Meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan melalui transformasi aktivitas dan pemberdayaan ekonomi desa	01 - Persentase bagi hasil BUMDes terhadap PADes	persen	3,97	4,02	123.976,1	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	02 - Mengembangkan kawasan perdesaan sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal	01 - Jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) dengan status berdaya saing	kawasan	3	4		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
	03 - Menguatkan ketahanan masyarakat desa terhadap kondisi sosial masyarakat dan pelestarian lingkungan desa	01 - Persentase desa berketahanan iklim	persen	33,73	34,73		151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.02.01 PRO-P: Transformasi Ekonomi Lokal Desa							
06.07.02.02 PRO-P: Transformasi Ketahanan Sosial Desa							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.02.03 PRO-P: Transformasi Pelestarian Lingkungan Desa							
06.07.02.04 PRO-P: Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan							
06.07.03 KP: Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	01 - Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintah dan pemberdayaan pembangunan desa secara adaptif	01 - Persentase desa yang menerapkan layanan berbasis digital	persen	74 (2022)	76	1.505.423,5	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
		02 - Jumlah desa yang menginisiasi kerja sama desa	desa	- (indikator baru)	90		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Jumlah desa yang menerapkan administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	desa	- (indikator baru)	150		010 - Kementerian Dalam Negeri
06.07.03.01 PRO-P: Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa							
06.07.03.02 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Desa							
06.07.03.03 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Data Desa							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.04 KP: Pembangunan Daerah Tertinggal	01 - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pada daerah tertinggal	01 - Persentase daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju	persen	- (indikator baru)	16,67	7.048.255,6	151 - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
06.07.04.01 PRO-P: Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.02 PRO-P: Pengembangan Komoditas Unggulan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.03 PRO-P: Peningkatan Konektivitas di Daerah Tertinggal							
06.07.04.04 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Dasar di Daerah Tertinggal							
06.07.04.05 PRO-P: Pengembangan Pariwisata Rintisan di Daerah Tertinggal							
06.07.04.06 PRO-P: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna di Daerah Tertinggal							
06.07.04.07 PRO-P: Pembangunan Berketahanan Iklim di Daerah Tertinggal							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.05 KP: Transformasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	01 - Menjadi beranda terdepan negara dengan meningkatkan integrasi dan kerjasama antar negara maupun antar wilayah	01 - Persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal di 204 kecamatan perbatasan prioritas	persen	21,46	19,87	890.144,1	111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		02 - Persentase desa maju dan mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan	persen	44,38	45,56		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		03 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan		0,52	0,56		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
		04 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan di 204 kecamatan perbatasan prioritas		0,64	0,68		111 - Badan Nasional Pengelola Perbatasan
06.07.05.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Dasar di Kawasan Perbatasan							
06.07.05.02 PRO-P: Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perbatasan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.05.03 PRO-P: Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana di Kawasan Perbatasan							
06.07.05.04 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kawasan Perbatasan							
06.07.06 KP: Transformasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi	01 - Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal	01 - Persentase desa maju dan desa mandiri di 45 kawasan transmigrasi	persen	52,88	55,49	1.846.602,7	152 - Kementerian Transmigrasi
		02 - Nilai Rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi		0,425	0,450		152 - Kementerian Transmigrasi
		03 - Persentase peningkatan pendapatan per kapita masyarakat di 45 kawasan transmigrasi	persen	0,90	1,10		152 - Kementerian Transmigrasi
		04 - Persentase dukungan kegiatan kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/masyarakat/badan usaha yang dilaksanakan di 45 kawasan transmigrasi	persen	37,5	40		152 - Kementerian Transmigrasi
06.07.06.01 PRO-P: Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Aksesibilitas Logistik							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.06.02 PRO-P: Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasi							
06.07.06.03 PRO-P: Redistribusi Aset (Tanah) Transmigrasi							
06.07.06.04 PRO-P: Penataan Persebaran Penduduk dan Penyediaan Tenaga Terampil							
06.07.07 KP: Tata Kelola Pendampingan/ Penyuluhan	01 - Meningkatnya kapasitas pendamping pembangunan	01 - Jumlah kementerian/lembaga yang menerapkan SKKNI dalam peningkatan kapasitas pendamping pembangunan	kementerian/ lembaga	4	4	1.545.722,2	134 - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
06.07.07.01 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Keluarga Berencana							
06.07.07.02 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Pertanian							
06.07.07.03 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kehutanan							
06.07.07.04 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Sosial							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
06.07.07.05 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kesehatan							
06.07.07.06 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Kewirausahaan							
06.07.07.07 PRO-P: Pendamping Pembangunan Lingkup Perikanan							

Keterangan: a) Target menggunakan US$ 1,90 PPP sedangkan apabila menggunakan US$ 2,15 PPP target tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2025 adalah 0,5–1 persen.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 7: MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07 PN: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	01 - Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional	01 - Indeks Pembangunan Hukum		0,68 (2023)	0,69	12.924.554,7	130 - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
		02 - Indeks Persepsi Korupsi		37	38		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Integritas Partai Politik		62,83	63,00–64,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	01 - Indeks Reformasi Birokrasi Nasional [a]		69,98	71,38		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		93	93,5		011 - Kementerian Luar Negeri

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba	01 - Angka Prevalensi Penyalahaguna Narkotika	poin	1,73	1,70		066 - Badan Narkotika Nasional
	04 - Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan	01 - *Return on Asset* (ROA) BUMN	persen	3,14 (2023)	3,21		041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
	05 - Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	01 - Rasio pendapatan negara terhadap PDB	persen	12,84	12,36		015 - Kementerian Keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	06 - Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,5±1,0		035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.01 PP: Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	01 - Terwujudnya partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional	01 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kaderisasi		64,98	65,00–66,99	557.311,9	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Keuangan		61,42	61,50–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		03 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Kode Etik		61,85	62,00–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		04 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Demokrasi Internal		61,11	61,50–63,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		05 - Indeks Integritas Partai Politik Dimensi Rekrutmen		67,47	68,00–69,99		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
	02 - Terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas	01 - Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu		61,72	64,85		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
	03 - Terwujudnya penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat	01 - Jumlah daerah dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berkategori "Sangat Baik"	daerah	- (indikator baru)	150		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01 KP: Penguatan Tata Kelola Partai Politik dan Pendidikan Politik	01 - Terwujudnya kelembagaan partai politik yang berbasis nilai serta pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel	01 - Persentase parpol yang tepat waktu menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol setelah diaudit oleh BPK kepada Mendagri	persen	100 (2023)	100	137.889,1	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Persentase parpol penerima bantuan keuangan parpol dari APBN yang memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik	persen	100	100		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.01.01 PRO-P: Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keuangan Partai Politik							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.01.01.03 PRO-P: Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Politik untuk Kader Partai Politik dan Masyarakat							
07.01.02 KP: Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	01 - Terselenggaranya pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	01 - Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi Penduduk Wajib KTP	persen	6,67	10	171.113,2	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.01.02.01 PRO-P: Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional							
07.01.02.02 PRO-P: Peningkatan Kuantitas Layanan Administrasi Kependudukan							
07.01.03 KP: Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang transformatif	01 - Persentase kepuasan masyarakat atas kinerja KPU	persen	- (indikator baru)	72	163.189,6	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu [b]		76,96	0 (tidak dihitung)		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu							
07.01.03.03 PRO-P: Perbaikan Regulasi Kepemiluan							
07.01.04 KP: Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	01 - Terwujudnya sistem pemilu yang inklusif dan partisipatif	01 - Persentase daftar pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif	persen	- (indikator baru)	95	85.120,0	076 - Komisi Pemilihan Umum
		02 - Persentase kualitas pengawasan data pemilih berkelanjutan	persen	- (indikator baru)	80		115 - Badan Pengawas Pemilihan Umum
07.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih							
07.01.04.02 PRO-P: Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih							
07.02 PP: Reformasi Hukum	01 - Terwujudnya regulasi yang adaptif dan taat azas, akses keadilan yang merata, serta masyarakat yang patut hukum	01 - Indeks Materi Hukum		0,60 (2023)	0,51	384.379,1	135 - Kementerian Hukum
		02 - Indeks Budaya Hukum		0,81 (2023)	0,83		135 - Kementerian Hukum

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.02.01 KP: Mendirikan Pusat Legislasi Nasional	01 - Terwujudnya sistem regulasi yang adaptif dan taat asas	01 - Indeks Kualitas Peraturan Perundang-undangan		3,70	3,26	6.921,8	135 - Kementerian Hukum
07.02.01.01 PRO-P: Penguatan Kelembagaan Regulasi							
07.02.01.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Regulasi							
07.02.02 KP: Transformasi Akses terhadap Keadilan	01 - Terwujudnya layanan akses terhadap keadilan yang substansial terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan	01 - Indeks Perlindungan Saksi dan Korban		- (indikator baru)	81	179.879,5	123 - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		02 - Persentase pemberian bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi	persen	84,4 (2023)	88,2		135 - Kementerian Hukum
07.02.02.01 PRO-P: Pemenuhan Layanan Akses terhadap Keadilan							
07.02.02.02 PRO-P: Penguatan Kebijakan Transformasi Akses terhadap Keadilan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.02.03 KP: Penguatan Budaya Hukum	01 - Terwujudnya program literasi hukum dan pemberdayaan hukum masyarakat yang inklusif	01 - Tingkat kepatutan hukum masyarakat		0,67 (2023)	0,72	106.763,8	135 - Kementerian Hukum
		02 - Tingkat kepatutan hukum lembaga hukum		0,95 (2023)	0,94		135 - Kementerian Hukum
07.02.03.01 PRO-P: Penguatan Pemberdayaan Hukum Masyarakat							
07.02.03.02 PRO-P: Penguatan Budaya Hukum Penyelenggara Negara							
07.02.04 KP: Pembangunan Hukum Sektor Strategis	01 - Memperkuat pembangunan sektor strategis yang berlandaskan hukum	01 - Persentase penyelesaian kasus pertanahan	persen	58,03	50	90.813,9	056 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
07.02.04.01 PRO-P: Penegakan dan Pelayanan Hukum							
07.02.04.02 PRO-P: Penyusunan Kebijakan							
07.03 PP: Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga dan penegakan hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Indeks Kelembagaan Hukum		0,73 (2023)	0,76	107.309,7	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Indeks Penegakan Hukum		0,64 (2023)	0,73		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.03.01 KP: Penguatan Kelembagaan Hukum	01 - Terwujudnya lembaga penegak hukum yang berintegritas, profesional, transparan, dan akuntabel	01 - Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum		0,73 (2023)	0,69	40.880,9	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.03.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Kekuasaan Kehakiman							
07.03.01.02 PRO-P: Penguatan Lembaga Hukum di Bidang Pelayanan, Penerapan, dan Pembangunan Hukum							
07.03.02 KP: Penerapan dan Penegakan Hukum	01 - Terwujudnya penegakan hukum yang adil, tidak tebang-pilih, transparan, berintegritas, dan profesional	01 - Tingkat implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum	persen	56,7 (2023)	58,7	66.428,8	129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
		02 - Persentase penyelesaian eksekusi putusan perdata	persen	54	35		005 - Mahkamah Agung
07.03.02.01 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Pidana Terpadu dengan Dukungan TI dan Berperspektif Restoratif							
07.03.02.02 PRO-P: Penerapan dan Penegakan Hukum Perdata yang Berkepastian							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.04 PP: Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*	01 - Terwujudnya efektivitas dan integrasi kebijakan bidang penuntutan di Kejaksaan RI dan Jaksa Agung sebagai pengacara negara	01 - Persentase peningkatan pengendalian perkara	persen	- (indikator baru)	61	517.174,1	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Persentase kecukupan, kesesuaian, dan pengembangan SDM Kejaksaan	persen	- (indikator baru)	60		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01 KP: Penguatan kelembagaan Kejaksaan	01 - Terwujudnya sistem penuntutan yang integratif	01 - Persentase penanganan perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai	persen	- (indikator baru)	61	499.219,9	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
07.04.01.01 PRO-P: Pengendali Perkara							
07.04.01.02 PRO-P: *Advocaat Generaal*							
07.04.02 KP: Peningkatan Jumlah, Profesionalisme, dan Kesejahteraan Jaksa	01 - Terwujudnya kualitas dan kuantitas jaksa yang proporsional	01 - Tingkat kecukupan personil jaksa	persen	98,02	98,20	17.954,2	006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		02 - Tingkat pengembangan kapasitas personil jaksa	persen	10,65	50		006 - Kejaksaan Republik Indonesia
		03 - Tingkat kesesuaian pengelolaan SDM jaksa	persen	77,6	80		006 - Kejaksaan Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.04.02.01 PRO-P: Pemenuhan Sarana Prasarana dan Teknologi Informasi							
07.04.02.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi							
07.05 PP: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	01 - Terwujudnya sistem antikorupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis	01 - Indeks Integritas Nasional		71,53	74,52	39.513,9	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		02 - Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,85	3,97		093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
		03 - Indeks Efektivitas Kinerja Rezim Anti Pencucian Uang		5,37 (2022)	5,52		129 - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
07.05.01 KP: Penguatan Kelembagaan Gerakan Pemberantasan Korupsi secara Lebih Sistematis	01 - Terwujudnya pelembagaan gerakan pemberantasan korupsi lebih sistematis	01 - Nilai dimensi internal (Indeks Integritas Nasional)		72,34	81,30	13.495,2	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.01.01 PRO-P: Penguatan Lembaga Penegak Hukum Pemberantas Korupsi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.05.01.02 PRO-P: Gerakan Pemberantasan Korupsi Lebih Sistematis							
07.05.02 KP: Pemberantasan Korupsi yang Bersifat Preventif melalui Edukasi dan Gerakan Budaya Antikorupsi	01 - Terciptanya peningkatan kesadaran antikorupsi	01 - Nilai dimensi persepsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi)		3,76	3,84	4.450,7	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.02.01 PRO-P: Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi							
07.05.02.02 PRO-P: Gerakan Budaya Antikorupsi							
07.05.03 KP: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	01 - Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat	01 - Nilai dimensi eksternal (Indeks Integritas Nasional)		86,44	89,17	5.846,3	093 - Komisi Pemberantasan Korupsi
07.05.03.01 PRO-P: Revitalisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi							
07.05.03.02 PRO-P: Sistem Pencegahan Korupsi di Sektor Peningkatan Hajat Hidup Orang Banyak dan Perlindungan Sumber Daya Publik							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.05.04 KP: Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	01 - Terwujudnya strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada pengejaran aset tindak pidana	01 - Persentase capaian implementasi Stranas TPPU	persen	75	80	15.721,7	078 - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
07.05.04.01 PRO-P: Integrasi Pencegahan TPPU							
07.05.04.02 PRO-P: Optimalisasi Pemberantasan TPPU							
07.06 PP: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	01 - Terciptanya upaya holistik dan terintegratif dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba yang dilakukan baik ditingkat pusat, provinsi, dan kab/kota	01 - Indeks P4GN		63,6	63,6	136.719,9	066 - Badan Narkotika Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.01 KP: Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Bahaya Narkoba, dan Pengembangan Keterampilan Hidup Sehat, terutama Dimulai dari Keluarga dan Sekolah	01 - Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	01 - Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap Penyalahgunaan Narkotika		58,56	59,00	39.083,5	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.01.01 PRO-P: Peningkatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika							
07.06.01.02 PRO-P: Peningkatan Keterampilan Masyarakat dan Budaya Hidup Sehat di Kawasan Rawan Narkotika							
07.06.02 KP: Optimalisasi Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	01 - Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi dalam rangka meningkatkan kepulihan penyalahguna narkotika	01 - Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi		3,53	3,57	39.223,4	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.02.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Layanan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.02.02 PRO-P: Memperkuat Lembaga Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba							
07.06.03 KP: Meningkatkan Program Deteksi Dini Penyalahgunaan di Kalangan Pelajar dan Mahasiswa	01 - Terciptanya generasi penerus bangsa yang bebas dari ancaman perilaku negatif yang bisa menghambat potensinya	01 - Indeks Ketahanan Diri Remaja		52,70	60	3.683,4	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.03.01 PRO-P: Peningkatan Pengetahuan Bahaya Narkotika di Kalangan Anak Usia Sekolah							
07.06.03.02 PRO-P: Penguatan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Satuan Pendidikan							
07.06.04 KP: Meningkatkan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Pemberantasan Narkoba	01 - Terlaksananya penanganan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan UU yang berlaku	01 - *Clearance rate* tindak pidana narkotika	persen	89	90	18.057,8	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.04.01 PRO-P: Peningkatan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Narkoba							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.06.04.02 PRO-P: Peningkatan Akurasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika							
07.06.06 KP: Meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Intelijen P4GN	01 - Meningkatnya kemampuan deteksi dini dan pemetaan terhadap potensi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika	01 - Persentase jumlah provinsi yang memiliki kemampuan intelijen minimal	persen	- (indikator baru)	7	36.671,8	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.06.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Intelijen dalam Rangka P4GN							
07.06.06.02 PRO-P: Peningkatan Data dan Informasi Intelijen P4GN							
07.06.07 KP: Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika	01 - Meningkatnya pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	01 - Jumlah perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	perkara	20	25	0,0	066 - Badan Narkotika Nasional
07.06.07.01 PRO-P: Pengungkapan Kasus TPPU Narkotika dari TPA Narkotika yang Berpotensi TPPU							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07 PP: Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Indeks Sistem Merit ASN		0,54 (2023)	0,61	477.344,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01 KP: Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep *Total Reward* Berbasis Kinerja ASN	01 - Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif	01 - Aspek penggajian, penghargaan dan disiplin Indeks Sistem Merit	persen	67	67	4.800,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek manajemen kinerja Indeks Sistem Merit	persen	61	61		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.01.01 PRO-P: Penerapan Manajemen Penghargaan dan Pengakuan bagi ASN							
07.07.01.02 PRO-P: Penerapan Sistem Manajemen Kinerja ASN							
07.07.02 KP: Penguatan Sistem Manajemen Talenta ASN	01 - Terwujudnya sistem manajemen talenta ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi	01 - Aspek perencanaan kebutuhan Indeks Sistem Merit	persen	78,45 (2023)	78,45	5.600,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Aspek pengadaan Indeks Sistem Merit	persen	78,91 (2023)	78,91		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.02.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Manajemen Talenta ASN							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.02.02 PRO-P: Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN							
07.07.02.03 PRO-P: Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan ASN							
07.07.02.04 PRO-P: Penerapan Standardisasi Jabatan dan Standar Kompetensi ASN							
07.07.03 KP: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN yang Mendorong Kemudahan Akses Belajar	01 - Terwujudnya penerapan pengembangan kompetensi ASN yang berkualitas	01 - Aspek pengembangan karier Indeks Sistem Merit	persen	33,57 (2023)	33,57	408.487,9	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.03.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Pengembangan Kompetensi							
07.07.03.02 PRO-P: Penerapan Pengembangan Kompetensi ASN							
07.07.03.03 PRO-P: Pemberian Beasiswa Pendidikan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.04 KP: Digitalisasi Manajemen ASN	01 - Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Aspek sistem informasi Indeks Sistem Merit	persen	57,2 (2023)	57,2	47.873,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.04.001 PRO-P: Penguatan Platform Digital Manajemen ASN							
07.07.04.02 PRO-P: Pengembangan dan Pemeliharaan *Backend Services* Platform Digital Manajemen ASN							
07.07.05 KP: Penerapan Budaya Kerja yang Mendorong Peningkatan Integritas ASN	01 - Terbangunnya perilaku ASN yang beretika	01 - Indeks BerAkhlak	persen	61,1 (2023)	61,1	8.583,1	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.07.05.01 PRO-P: Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Budaya Kerja							
07.07.05.02 PRO-P: Peningkatan Integritas dan Budaya Kerja ASN							
07.07.06 KP: Penerapan dan Evaluasi Kebijakan Manajemen ASN	01 - Terwujudnya penerapan dan evaluasi manajemen ASN yang berkualitas	01 - Jumlah instansi pemerintah yang Indeks Sistem Merit minimal "Baik"	instansi pemerintah	98	98	2.000,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.07.06.01 PRO-P: Penerapan Kebijakan Sistem Merit							
07.07.06.02 PRO-P: Evaluasi Manajemen ASN							
07.08 PP: Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan	01 - Terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel	01 - Indeks Pelayanan Publik		4,02	3,68	250.198,5	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Nilai akuntabilitas kinerja rata-rata nasional		64,91 (2023)	70		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.08.01 KP: Tata Kelola Pelayanan Publik	01 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	01 - Indeks Pelayanan Publik K/L		4,39	3,9	47.845,8	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		02 - Indeks Pelayanan Publik Provinsi		3,97	3,64		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Indeks Pelayanan Publik Kabupaten		3,67	3,51		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		04 - Indeks Pelayanan Publik Kota		4,05	3,96		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
	02 - Terwujudnya pengawasan eksternal pelayanan publik	01 - Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	persen	57,41	38,15		110 - Ombudsman Republik Indonesia
07.08.01.01 PRO-P: Penguatan Kerangka Regulasi Tata Kelola Pelayanan Publik							
07.08.01.02 PRO-P: Penguatan Pelayanan Publik Inklusif dan Terpadu							
07.08.01.03 PRO-P: Penguatan Pengawasan Eksternal Pelayanan Publik							
07.08.01.04 PRO-P: Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik							
07.08.02 KP: Penguatan Manajemen Kinerja Pembangunan	01 - Terwujudnya kinerja pembangunan yang akuntabel dan berintegritas	01 - Persentase instansi pemerintah (K/L) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	97,62	97	33.390,6	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		02 - Persentase instansi pemerintah (provinsi) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	100	100		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		03 - Persentase instansi pemerintah (kab/kota) dengan nilai akuntabilitas kinerja baik (kategori "B" ke atas)	persen	75,79	76		048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		04 - Nilai kinerja pengadaan		58	49,88		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		05 - Tingkat penerapan tata kelola pengadaan		57	59,96		106 - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		06 - Persentase kegiatan prioritas utama dengan kinerja baik	persen	66,30	70		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		07 - Tingkat pemanfaatan data statistik	persen	- (indikator baru)	65		054 - Badan Pusat Statistik
		08 - Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		2,35	2,35		054 - Badan Pusat Statistik
07.08.02.01 PRO-P: Penguatan Ekosistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah							
07.08.02.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah							
07.08.02.03 PRO-P: Penyediaan Data Pembangunan							
07.08.03 KP: Sinergi Pengendalian dan Pengawasan Program Pembangunan Nasional	01 - Terwujudnya sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional	01 - Persentase K/L dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	47,57	168.962,1	089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		02 - Persentase provinsi dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	39,47		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase kab/kota dengan maturitas SPIP terintegrasi dengan karakteristik berbasis terdefinisi	persen	- (indikator baru)	9,84		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		04 - Tingkat pemanfaatan hasil pengawasan intern dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	predikat	- (indikator baru)	Optimal		089 - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		05 - Tingkat pemanfaatan hasil pengendalian program prioritas presiden dalam penyelenggaraan pembangunan nasional	persen	- (indikator baru)	30		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.08.03.01 PRO-P: Pengendalian Program Prioritas Presiden							
07.08.03.02 PRO-P: Pengendalian Intern dan Pengawasan Pembangunan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09 PP: Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan dengan memperhatikan tipologi kewilayahan serta penguatan fondasi keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah	01 - Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat		72,01 (2023)	73	265.680,8	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)		83,75 (Persentase capaian penerapan SPM di daerah tahun 2023)	88		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB (*local tax ratio*)	persen PDRB	1,20 (Data Anggaran APBD 2024)	1,25		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01 KP: Harmonisasi Hubungan Pusat dan Daerah	01 - Terwujudnya harmonisasi kewenangan pusat dan daerah yang optimal	01 - Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat berkategori sangat baik	provinsi	13 (2023)	17	168.600,0	010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.01.01 PRO-P: Penyiapan Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah							
07.09.01.02 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Multi Aktor di Daerah							
07.09.01.03 PRO-P: Optimalisasi Sinergi Pemerintahan Pusat dan Daerah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09.02 KP: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	01 - Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintah daerah dengan memperhatikan tipologi kewilayahan	01 - Provinsi dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berkategori tuntas paripurna	provinsi	2 (2023)	5	73.362,4	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Kabupaten/kota dengan Indeks Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) setidaknya berkategori tuntas madya	kabupaten/kota	28 (2023)	152		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Daerah dengan Indeks Inovasi Daerah (IID) berkategori sangat inovatif (prov, kab, kota)	daerah (prov/kab/kota)	75 (2023)	82		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.02.01 PRO-P: Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai Urusan Wajib Pemerintah Daerah							
07.09.02.02 PRO-P: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah							
07.09.02.03 PRO-P: Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.09.03 KP: Penguatan Fondasi Keuangan Daerah	01 - Terwujudnya keuangan daerah dengan pendapatan daerah yang optimal, belanja daerah yang berkualitas, dan pemanfaatan pendanaan alternatif yang meningkat	01 - Jumlah daerah dengan proporsi pajak daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	300	23.718,4	010 - Kementerian Dalam Negeri
		02 - Jumlah daerah dengan proporsi retribusi daerah terhadap PAD meningkat	daerah (prov/kab/kota)	300 (estimasi 2024)	300		010 - Kementerian Dalam Negeri
		03 - Pertumbuhan penerimaan pajak daerah	persen	6,81	6,10		015 - Kementerian Keuangan
		04 - Jumlah provinsi yang memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik	provinsi	4	19		010 - Kementerian Dalam Negeri
		05 - Jumlah daerah yang memanfaatkan instrumen pendanaan alternatif	daerah (prov/kab/kota)	7	2		010 - Kementerian Dalam Negeri
07.09.03.01 PRO-P: Optimalisasi Potensi Pendapatan Daerah							
07.09.03.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Belanja Daerah							
07.09.03.03 PRO-P: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pendanaan Alternatif Daerah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10 PP: Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif dan efisien	01 - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		3,12	3,00[1]	1.523.786,0	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01 KP: Penguatan Tata Kelola Pemerintah Digital	01 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang transformatif	01 - Jumlah kebijakan pemerintah digital yang ditetapkan	kebijakan	- (indikator baru)	4	3.517,4	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.01.01 PRO-P: Kebijakan Pemerintah Digital							
07.10.01.02 PRO-P: Kedaulatan Sistem Pemerintah Digital							
07.10.01.03 PRO-P: Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital							
07.10.01.04 PRO-P: Pengembangan Proses Bisnis Tematik dalam Arsitektur Pemerintah Digital							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10.02 KP: Penguatan Teknologi Pemerintah Digital	01 - Tersedianya teknologi pemerintah digital yang berkualitas dan tangguh	01 - Persentase instansi K/L/Prov yang terhubung dengan JIP	persen	- (indikator baru)	90	35.663,0	059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
		02 - Persentase K/L/D yang mengimplementasikan SPLP	persen	- (indikator baru)	5		059 - Kementerian Komunikasi Dan Digital
07.10.02.01 PRO-P: Penguatan Infrastruktur Pemerintah Digital							
07.10.02.02 PRO-P: Penguatan Aplikasi Pemerintah Digital							
07.10.02.03 PRO-P: Penguatan Keamanan Siber Pemerintah							
07.10.03 KP: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN	01 - Terwujudnya ASN yang berkompetensi dan berbudaya digital dalam pelaksanaan pemerintah digital	01 - Persentase ASN dengan kompetensi digital optimal	persen	- (indikator baru)	50	77.537,9	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.03.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Digital ASN							
07.10.03.02 PRO-P: Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas Digital ASN							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.10.03.03 PRO-P: Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital							
07.10.04 KP: Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	01 - Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	01 - Jumlah layanan publik prioritas yang terintegrasi dalam portal pelayanan publik	layanan	- (indikator baru)	10	1.279.941,7	048 - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
07.10.04.01 PRO-P: Pengembangan Layanan Publik Prioritas berbasis Digital							
07.10.04.02 PRO-P: Penguatan Tata Kelola Layanan Perizinan Berusaha							
07.10.04.03 PRO-P: Penguatan Layanan Administrasi Pemerintahan							
07.10.04.04 PRO-P: Transformasi Pelayanan Pertanahan							
07.10.05 KP: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	01 - Tersedianya data pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk interoperabilitas dan lintas instansi yang mendukung layanan digital nasional	01 - Nilai Indeks Satu Data Indonesia		- (indikator baru)	51-70	127.126,0	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia	persen	- (indikator baru)	8		083 - Badan Informasi Geospasial

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul	persen	- (indikator baru)	4		083 - Badan Informasi Geospasial
		04 - Persentase IGT yang termanfaatkan	persen	- (indikator baru)	4		083 - Badan Informasi Geospasial
07.10.05.01 PRO-P: Tata Kelola Data							
07.10.05.02 PRO-P: Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan							
07.10.05.03 PRO-P: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik							
07.10.05.04 PRO-P: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar							
07.11 PP: Peningkatan Produktivitas BUMN	01 - Meningkatnya produktivitas BUMN	01 - *Profit Margin Ratio* (PMR) BUMN	persen	11,15 (2023)	10,50	11.673,5	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.01 KP: Peningkatan Daya Saing BUMN	01 - Meningkatnya daya saing BUMN	01 - *Total Asset Turnover* BUMN	kali (x)	0,282 (2023)	0,305	9.710,9	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.11.01.01 PRO-P: Kinerja BUMN							
07.11.01.02 PRO-P: Ekonomi Berkelanjutan							
07.11.01.03 PRO-P: Ketahanan Energi dan Pangan							
07.11.01.04 PRO-P: Transformasi Digital							
07.11.01.05 PRO-P: Infrastruktur Konektivitas							
07.11.01.06 PRO-P: Pariwisata dan Budaya							
07.11.01.07 PRO-P: Pembiayaan Sektor Strategis							
07.11.02 KP: Peningkatan Efisiensi Peran BUMN dalam Penugasan Pemerintah	01 - Meningkatnya efisiensi peran BUMN dalam penugasan pemerintah	01 - Peringkat risiko komposit BUMN minimal 3	persen	- (indikator baru)	60,9	1.962,6	041 - Kementerian Badan Usaha Milik Negara
07.11.02.01 PRO-P: Efisiensi Peran BUMN pada Program Perintis							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.11.02.02 PRO-P: Penguatan Peran BUMN dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan							
07.12 PP: Optimalisasi Pendapatan Negara	01 - Tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi	01 - Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB	persen PDB	10,08	10,24	218.848,5	015 - Kementerian Keuangan
	02 - Terwujudnya peningkatan PNBP yang optimal dan tidak bergantung pada SDA	01 - Rasio PNBP (persen PDB)	persen PDB	2,62	2,11		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	01 - Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	01 - Persentase penambahan WP hasil ekstensifikasi berdasarkan target kinerja organisasi	persen	90	90	207.680,5	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh WP badan dan orang pribadi berdasarkan target yang ditetapkan	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
		03 - Indeks Kinerja Kebijakan Penerimaan Negara	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.12.01.01 PRO-P: Implementasi Sistem Informasi Inti Perpajakan (*core tax*) dan Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Stakeholder Terkait, Menuju Data-Driven							
07.12.01.02 PRO-P: Simplifikasi Proses Bisnis dan Kelembagaan serta Penguatan Kebijakan							
07.12.01.03 PRO-P: Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan (termasuk *Sin Tax*)							
07.12.01.04 PRO-P: Peningkatan Kepatuhan Perpajakan							
07.12.02 KP: Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	01 - Terciptanya dukungan PNBP yang optimal	01 - Rasio capaian PNBP terhadap target yang ditetapkan (persen)	persen	90–100	90–100	11.168,0	015 - Kementerian Keuangan
07.12.02.01 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Migas							
07.12.02.02 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan SDA Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.12.02.03 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Penerimaan Non-SDA							
07.12.02.04 PRO-P: Pembenahan Tata Kelola Pengelolaan Aset							
07.12.02.05 PRO-P: Inovasi Layanan Berbasis IT untuk Meningkatkan Kepatuhan							
07.13 PP: Optimalisasi Belanja Negara	01 - Terwujudnya dukungan belanja negara yang optimal untuk mendorong produktivitas dan mencapai tujuan pembangunan	01 - Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara		86	86	22.246,5	015 - Kementerian Keuangan
07.13.01 KP: Peningkatan Efektivitas Belanja Pemerintah Pusat	01 - Meningkatnya alokasi Belanja Negara yang produktif	01 - Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah		84	85	17.754,6	015 - Kementerian Keuangan
07.13.01.01 PRO-P: Percepatan Reformasi Subsidi Tepat Sasaran							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.13.01.02 PRO-P: Tata Kelola Belanja Negara untuk Penyiapan Landasan Transformasi							
07.13.01.03 PRO-P: Kebijakan Tata Kelola Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan							
07.13.01.04 PRO-P: Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Terintegrasi							
07.13.02 KP: Optimalisasi Kualitas Belanja TKD	01 - Meningkatnya kualitas belanja TKD untuk mendukung transformasi ekonomi	01 - Tingkat sinkronisasi perencanaan penganggaran belanja pemerintah pusat dan TKD	persen	100	100	4.491,9	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Alokasi TKD untuk infrastruktur	triliun rupiah	70,4	55,6		015 - Kementerian Keuangan
		03 - Persentase kinerja hibah daerah	persen	75	75		015 - Kementerian Keuangan
07.13.02.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah							
07.13.02.02 PRO-P: Kebijakan dan Mekanisme Sinkronisasi Belanja TKD dan Belanja K/L							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.14 PP: Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan	01 - Terwujudnya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi	01 - Rasio defisit APBN terhadap PDB dalam batas aman	persen PDB	2,29	2,53	31.720,6	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang menjamin Keberlanjutan Fiskal	persen PDB	39,36	39,15		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01 KP: Optimalisasi Sumber-Sumber Pembiayaan Utang yang Menjaga Kesinambungan Fiskal	01 - Terciptanya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan	01 - Imbal hasil (*yield*) SBN	persen	7,0	6,8–7,2	21.407,9	015 - Kementerian Keuangan
		02 - Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara	persen	100	100		015 - Kementerian Keuangan
07.14.01.01 PRO-P: Optimalisasi Portofolio Pembiayaan							
07.14.01.02 PRO-P: Peraturan Mengenai Pengelolaan Pembiayaan Luar Negeri dan Dalam Negeri							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.14.02 KP: Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pembiayaan Non Utang yang Inovatif	01 - Meningkatnya pemanfaatan skema pendanaan inovatif	01 - Jumlah peraturan KPBU yang ditetapkan	peraturan	1	1	10.312,7	055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		02 - Jumlah sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan	sistem informasi	1	1		055 - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
07.14.02.01 PRO-P: Penyempurnaan Peraturan Mengenai Skema KPBU							
07.14.02.02 PRO-P: Sistem Informasi Terintegrasi Pendanaan KPBU dan Pendanaan Inovasi Lainnya							
07.15 PP: Pengendalian Inflasi	01 - Terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi	01 - Tingkat Inflasi	persen	1,57	2,5±1,0	8.059.042,2	035 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
07.15.01 KP: Pengendalian Komponen Inflasi Harga Bergejolak	01 - Terjaganya komponen inflasi harga bergejolak	01 - Inflasi harga bergejolak	persen	0,12	3,00-5,00	8.059.042,2	125 - Badan Pangan Nasional
07.15.01.01 PRO-P: Stabilisasi dan Pengawasan Harga Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.15.01.02 PRO-P: Pengembangan Jaringan Irigasi							
07.15.01.03 PRO-P: Peningkatan Ketersediaan Pangan Dalam Negeri							
07.15.01.04 PRO-P: Sarana dan Prasarana Penyimpanan Produk							
07.15.01.05 PRO-P: Peningkatan Teknologi Pertanian							
07.15.01.06 PRO-P: Pemenuhan Pembiayaan dan Perlindungan Usaha Pertanian							
07.15.01.07 PRO-P: Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan							
07.15.01.08 PRO-P: Sarana Logistik dan Distribusi Pangan							
07.15.01.09 PRO-P: Infrastruktur dan Layanan Transportasi							
07.15.01.10 PRO-P: Ketersediaan Data Inflasi dan Harga Pangan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.15.01.11 PRO-P: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Inflasi							
07.15.01.12 PRO-P: Sinergi Perumusan Kebijakan Pengendalian Inflasi							
07.16 PP: Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia	01 - Terwujudnya pelindungan WNI, termasuk pekerja migran Indonesia	01 - Persentase penyelesaian kasus WNI di luar negeri	persen	85	87	321.604,5	011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.01 KP: Penguatan Pelindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia	01 - Meningkatnya proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	01 - Proporsi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum	persen	55,56 (2023)	60	99.942,6	104 - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
07.16.01.01 PRO-P: Persiapan Keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia							
07.16.01.02 PRO-P: Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
07.16.02 KP: Pelindungan dan Pelayanan WNI, termasuk PMI di Luar Negeri yang Integratif	01 - Terintegrasinya dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) , termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri	01 - Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri		96	96	221.661,9	011 - Kementerian Luar Negeri
		02 - Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri		97,5	98		011 - Kementerian Luar Negeri
		03 - Indeks Diplomasi Pelindungan WNI di Luar Negeri		98,5	98,7		011 - Kementerian Luar Negeri
07.16.02.01 PRO-P: Tata Kelola dan Diplomasi Pelayanan dan Pelindungan							
07.16.02.02 PRO-P: Penanganan Kasus WNI di Luar Negeri							

Keterangan: a) Angka *baseline* dan target merupakan proyeksi nilai Reformasi Birokrasi nasional tahun 2024 dan akan dimutakhirkan, b) Penghitungan indikator hanya dilakukan pada tahun tahapan pemilu, c) Instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital sehingga target nasional disesuaikan.

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRIORITAS NASIONAL 8: MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08 PN: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	01 - Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	01 - Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)		62,85 (2021)	65,49	90.058.877,2	036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
	02 - Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	01 - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB	persen	0,140 (2022)	0,137		036 - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
08.01 PP: Penguatan Kerukunan Umat Beragama dan Layanan Keagamaan Transformatif untuk Mewujudkan Kehidupan Beragama Maslahat	01 - Terwujudnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah dalam kehidupan beragama, serta layanan keagamaan yang transformatif	01 - Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)		76,47	76,77	3.891.423,8	025 - Kementerian Agama
		02 - Indeks Layanan Keagamaan		86,51 (2024)	87,11		025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.01 KP: Penguatan Moderasi Beragama dan Kualitas Layanan Bimbingan Keagamaan	01 - Meningkatnya moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan	01 - Nilai Layanan Penyuluhan Agama		84,52 (2024)	84,63	287.848,1	025 - Kementerian Agama
		02 - Nilai Aspek Penerimaan terhadap Perbedaan Sosial (agama dan etnis)		61,78 (2021)	64,39		025 - Kementerian Agama
		03 - Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan	persen	27	35		025 - Kementerian Agama
		04 - Persentase rumah tangga yang mendapatkan bimbingan keagamaan keluarga	persen	0,5 (2022)	0,7		025 - Kementerian Agama
08.01.01.01 PRO-P: Peningkatan Literasi Keagamaan							
08.01.01.02 PRO-P: Peningkatan Bimbingan Keagamaan Keluarga							
08.01.01.03 PRO-P: Peningkatan Layanan Bimbingan Perkawinan (Calon Pengantin)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.02 KP: Jaminan Hak Beragama serta Kehidupan Beragama yang Harmonis dan Rukun	01 - Meningkatnya jaminan kebebasan beragama dan kehidupan beragama yang harmonis serta rukun	01 - Persentase rekomendasi *Early Warning System* (keagamaan) yang di tindaklanjuti	persen	10	25	223.421,0	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi	persen	24	30		025 - Kementerian Agama
08.01.02.01 PRO-P: Pencegahan, Advokasi, dan Mitigasi Konflik							
08.01.02.02 PRO-P: Pembinaan Kerukunan Umat Beragama							
08.01.02.03 PRO-P: Penyelenggaraan *Event* Keagamaan							
08.01.03 KP: Peningkatan Peran Tokoh Agama, Lembaga Agama, dan Lembaga Sosial Keagamaan	01 - Menguatnya peran dan kerjasama tokoh agama dan lembaga agama/sosial keagamaan dalam mewujudkan layanan keagamaan yang inklusif	01 - Persentase lembaga agama dan lembaga sosial keagamaan yang memenuhi standar pengelolaan	persen	40 (2024)	43	143.489,5	025 - Kementerian Agama

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.03.01 PRO-P: Peningkatan Peran Lembaga Agama dan Keagamaan dalam Pembangunan							
08.01.03.02 PRO-P: Peningkatan Partisipasi Tokoh Agama dalam Pembangunan							
08.01.04 KP: Peningkatan Sarana dan Prasarana Peribadatan	01 - Tersedianya sarpras peribadatan yang memenuhi standar	01 - Persentase sarana prasarana peribadatan yang memenuhi standar	persen	66,69	67,35	348.978,5	025 - Kementerian Agama
08.01.04.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Rumah Ibadah & Sarpras Peribadatan lainnya							
08.01.04.02 PRO-P: Penyediaan Kitab Suci yang Sahih dan Merata							
08.01.05 KP: Transformasi Layanan Keagamaan yang Berkualitas, Merata, dan Inklusif di Kantor Urusan Agama (KUA)	01 - Meningkatnya kualitas layanan KUA secara merata, inklusif, dan transformatif	01 - Indeks Kepuasan Layanan KUA		85,53 (2024)	85,64	1.050.055,6	025 - Kementerian Agama
08.01.05.01 PRO-P: Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana KUA							
08.01.05.02 PRO-P: Pengembangan Inovasi Layanan KUA (Sosial, Ekonomi, dan Keagamaan)							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.06 KP: Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang Transparan, Akuntabel, Aman, dan Nyaman	01 - Meningkatnya kualitas layanan haji dan umrah yang transparan, akuntabel, aman, dan nyaman	01 - Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI): (a) Layanan haji dalam negeri; (b) Layanan haji luar negeri		90,45 (2022); 88,20 (2024)	91,00; 88,25	1.296.907,7	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase nilai pertumbuhan perolehan nilai manfaat dana haji	persen	10,4	12,2		Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
		03 - Persentase lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A): (a) Lembaga penyelenggara haji khusus; (b) Lembaga penyelenggara umrah	persen	82; 96 (2024)	82,05; 96,01		025 - Kementerian Agama
08.01.06.01 PRO-P: Revitalisasi Sarpras Layanan Ibadah Haji dan Umrah							
08.01.06.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Ibadah Haji							
08.01.06.03 PRO-P: Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Haji Khusus dan Umrah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.07 KP: Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	01 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jaminan produk halal yang profesional	01 - Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal		88,56 (2024)	90,98	399.088,9	142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
		02 - Tingkat literasi produk dan jasa halal	persen	34,08	42,09		142 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
08.01.07.01 PRO-P: Penguatan Literasi Produk Halal							
08.01.07.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal							
08.01.07.03 PRO-P: Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal							
08.01.08 KP: Pengembangan Dana Sosial Keagamaan Produktif	01 - Meningkatnya pengembangan dana sosial keagamaan produktif untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat	01 - Persentase penduduk miskin yang menerima manfaat dana sosial keagamaan untuk peningkatan kesejahteraan	persen	1 (2024)	2	141.634,5	025 - Kementerian Agama
		02 - Persentase lembaga dana sosial keagamaan yang akuntabel dan profesional	persen	78 (2024)	81		025 - Kementerian Agama
08.01.08.01 PRO-P: Revitalisasi Dana Sosial Keagamaan untuk Pengentasan Kemiskinan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.01.08.02 PRO-P: Peningkatan Kualitas Lembaga Filantropi Keagamaan							
08.02 PP: Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa	01 - Terwujudnya masyarakat yang berkarakter dan berkebudayaan maju	01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)		57,13 (2023)	58,39	2.165.116,3	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01 KP: Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	01 - Terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang kokoh berlandaskan nilai-nilai Pancasila	01 - Persentase penduduk yang mengikuti gotong royong dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya	persen	36,00 (2023)	36,71	417.381,0	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.01.01 PRO-P: Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, dan Berkeadaban							
08.02.01.02 PRO-P: Penguatan Etika Politik dan Pemerintahan untuk Melembagakan Sistem Demokrasi yang Substantif dan Partisipatif, serta Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Terintegrasi, dan Berorientasi Pelayanan							
08.02.01.03 PRO-P: Penguatan Etika Ekonomi dan Bisnis sebagai Landasan Transformasi Ekonomi untuk Mendorong Produktivitas dan Daya Saing Bangsa							
08.02.01.04 PRO-P: Penguatan Etika Hukum yang Berkeadilan untuk Menjamin Kepastian Hukum yang Mengedepankan Nilai-Nilai Kemanusiaan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.01.05 PRO-P: Penguatan Etika Keilmuan untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Kreatif, dan Inovatif							
08.02.01.06 PRO-P: Penguatan etika lingkungan sebagai pondasi pembangunan yang berkelanjutan							
08.02.02 KP: Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	01 - Terwujudnya pengelolaan terpadu warisan budaya yang efektif dan berkelanjutan	01 - Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan	persen	58 (2024)	60	534.451,1	140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.02.01 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan							
08.02.02.02 PRO-P: Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi, dan Kearifan Lokal							
08.02.02.03 PRO-P: Revitalisasi Manuskrip							
08.02.02.04 PRO-P: Pengembangan Budaya Bahari							
08.02.02.05 PRO-P: Revitalisasi Jalur Rempah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.03 KP: Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	01 - Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	persen	0,43 (2023)	0,49	606.407,2	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah kawasan pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)	Kawasan	1	1		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.03.01 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah Berkelas Internasional							
08.02.03.02 PRO-P: Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan Kebudayaan							
08.02.04 KP: Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	01 - Terpenuhinya hak berkebudayaan dan kebebasan berekspresi, serta pemberdayaan masyarakat hukum adat	01 - Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	persen	1,58 (2024)	1,67	119.792,8	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah wilayah adat yang dikembangkan dalam pemajuan kebudayaan	wilayah adat	3	3		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.04.01 PRO-P: Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.04.02 PRO-P: Pelindungan Hutan Adat dan Tanah Ulayat							
08.02.04.03 PRO-P: Penguatan dan Pengelolaan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional, dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil							
08.02.05 KP: Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	01 - Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia	01 - Indeks Pembangunan Kebahasaan		45,82 (2022)	51,31	256.647,0	138 - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
08.02.05.01 PRO-P: Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia							
08.02.05.02 PRO-P: Pengembangan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional							
08.02.05.03 PRO-P: Pelestarian Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah							
08.02.06 KP: Transformasi Kearsipan untuk Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa dan Tata Kelola Pemerintahan	01 - Terwujudnya kearsipan yang transformatif untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan	01 - Indeks Budaya Tertib Arsip		70,24	72,40	40.304,0	087 - Arsip Nasional Republik Indonesia
		02 - Indeks Memori Kolektif Bangsa		69,10	71,65		087 - Arsip Nasional Republik Indonesia

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.02.06.01 PRO-P: Pengembangan Budaya Tertib Arsip							
08.02.06.02 PRO-P: Perluasan Layanan Kearsipan untuk Publik							
08.02.06.03 PRO-P: Pengembangan Pusat Khazanah Kearsipan Nusantara							
08.02.07 KP: Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	01 - Meningkatnya rekognisi global atas kebudayaan Indonesia	01 - Jumlah warisan budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia	unit	2	3	190.133,1	140 - Kementerian Kebudayaan
		02 - Jumlah rumah budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif)	rumah budaya	10 (2017)	11		140 - Kementerian Kebudayaan
08.02.07.01 PRO-P: Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia							
08.02.07.02 PRO-P: Promosi dan Pertukaran Budaya							
08.02.07.03 PRO-P: Penguatan Kerja Sama Kebudayaan							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03 PP: Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada empat sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan)	persen	0,995 (2023)	0,135	81.302.087,1	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.01 KP: Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut	01 - Peningkatan Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	01 - Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil		- (indikator baru)	55	751.395,8	032 - Kementerian Kelautan dan Perikanan
08.03.01.01 PRO-P: Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh							
08.03.01.02 PRO-P: Peningkatan Ketahanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim							
08.03.01.03 PRO-P: Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai							
08.03.01.04 PRO-P: Penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Rambu Suar							
08.03.02 KP: Pengelolaan Sumber Daya Air Adaptif Iklim	01 - Meningkatnya Keakurasian Modifikasi Cuaca	01 - Persentase akurasi keberhasilan modifikasi cuaca	persen	- (indikator baru)	82	12.682.756,0	075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.02.01 PRO-P: Pembangunan Tampungan Air							
08.03.02.02 PRO-P: Revitalisasi Tampungan Air							
08.03.02.03 PRO-P: Pembangunan Pengendalian Banjir							
08.03.02.04 PRO-P: Pengendalian Lahar/Sedimen							
08.03.02.05 PRO-P: Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air							
08.03.03 KP: Pengembangan dan Implementasi Pertanian Ramah Iklim	01 - Menurunnya potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim pada sektor pertanian	01 - Persentase penurunan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim terhadap PDB (%) pada sektor pertanian	persen	0,248 (2023)	0,091	15.320.542,9	018 - Kementerian Pertanian
08.03.03.01 PRO-P: Pembangunan Embung atau Tampungan Air Skala Kecil Lainnya							
08.03.03.02 PRO-P: Irigasi Pertanian							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.03.03 PRO-P: Optimasi Lahan Pertanian							
08.03.03.04 PRO-P: Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim							
08.03.03.05 PRO-P: Penyediaan Pupuk dan Saprodi Pertanian							
08.03.03.06 PRO-P: Pengembangan, Pengelolaan, dan Modernisasi Jaringan Irigasi							
08.03.03.07 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Petani terkait Informasi Iklim							
08.03.04 KP: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Sensitif Iklim	01 - Menurunnya persentase Kejadian Penyakit Sensitif Iklim	01 - Persentase penurunan kejadian penyakit sensitif iklim	persen	- (indikator baru)	10	3.520.271,5	024 - Kementerian Kesehatan
08.03.04.01 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit DBD							
08.03.04.02 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Malaria							
08.03.04.03 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Kejadian Penyakit Pneumonia							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.03.04.04 PRO-P: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Diare							
08.03.04.05 PRO-P: Pengendalian Vektor dan Penyebaran Penyakit Sensitif Iklim							
08.03.04.06 PRO-P: Peningkatan Kesehatan Lingkungan							
08.03.05 KP: Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas untuk Pembangunan Berketahanan Iklim	01 - Meningkatnya Tata Kelola dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Target Pembangunan Berketahanan iklim	01 - Persentase aksi pendukung ketahanan iklim yang dilaksanakan di lokasi prioritas	persen	- (indikator baru)	10	49.027.120,8	144 - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
08.03.05.01 PRO-P: Penyediaan Informasi Pendukung Peningkatan Ketahanan Iklim							
08.03.05.02 PRO-P: Peningkatan Kapasitas SDM untuk Ketahanan Iklim							
08.03.05.03 PRO-P: Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Iklim							
08.03.05.04 PRO-P: Peningkatan Tata Kelola Pemerintah							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04 PP: Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna	01 - Menurunnya tingkat risiko bencana nasional	01 - Persentase penurunan nilai indeks risiko bencana nasional	persen	1,54 (2023)	1,2	2.700.250,1	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01 KP: Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi	01 - Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi bencana	01 - Persentase daerah yang memiliki tingkat kapasitas penanggulangan bencana minimal pada kategori sedang	persen	62 (2023)	67	544.153,6	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.01.01 PRO-P: Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Penanggulangan Bencana							
08.04.01.02 PRO-P: Pengembangan Mitigasi Bencana melalui Riset dan Inovasi							
08.04.01.03 PRO-P: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Penanggulangan Bencana							
08.04.01.04 PRO-P: Penyediaan Logistik dan Peralatan sesuai Standar Penanggulangan Bencana							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.02 KP: Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana	01 - Meningkatnya penyelenggaraan layanan peringatan dini dan keandalan respons saat terjadi bencana	01 - Persentase cakupan layanan peringatan dini di daerah berisiko bencana	persen	6,00	6,10	1.779.391,4	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
		02 - Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana ke publik	menit	3	< 3		075 - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
		03 - Persentase daerah yang menetapkan status keadaan darurat bencana dan menerima intervensi sesuai standar	persen	75	100		103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.02.01 PRO-P: Pendampingan Penanganan Kedaruratan Bencana							
08.04.02.02 PRO-P: Pelayanan Peringatan Dini Multiancaman Bencana							
08.04.03 KP: Pemenuhan Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	01 - Meningkatnya Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	01 - Persentase daerah pasca bencana masif yang ditangani	persen	100	100	47.233,4	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.03.01 PRO-P: Pemulihan Kehidupan Masyarakat Pascabencana							
08.04.03.02 PRO-P: Pemulihan Ekonomi Terintegrasi Pascabencana							
08.04.04 KP: Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana	01 - Meningkatnya resiliensi masyarakat terhadap bencana	01 - Persentase desa berketahanan bencana multipihak	persen	10,31	10,49	52.458,2	103 - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
08.04.04.01 PRO-P: Peningkatan Kemampuan Adaptif Masyarakat dalam Menghadapi Bencana							
08.04.04.02 PRO-P: Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana							
08.04.05 KP: Peningkatan Infrastruktur Berketahanan Bencana	01 - Meningkatnya infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	01 - Rasio kabupaten/kota yang menerapkan infrastruktur berketahanan bencana di lokasi prioritas bencana	persen	- (indikator baru)	19	277.013,5	145 - Kementerian Pekerjaan Umum
08.04.05.01 PRO-P: Peningkatan Keandalan Bangunan Berketahanan Bencana							
08.04.05.02 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Pengendali Daya Rusak Air							

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline* 2024	Target 2025	Alokasi (Rp. Juta)	Instansi Koordinator/ Pengampu
08.04.05.03 PRO-P: Peningkatan Infrastruktur Mitigasi Bencana Geologi							

Catatan:

(1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari satu Prioritas Nasional; (2) Prioritas Nasional mencakup rincian Belanja K/L, belum mencakup rincian Dana Alokasi Khusus (DAK), Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Badan Usaha (BUMN/Swasta); (3) Perubahan rincian dan pendanaan proyek Belanja K/L pada tahun pelaksanaan dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan; (4) Dapat terjadi perubahan alokasi dan target sesuai efisiensi anggaran berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Lydia Silvanna Djaman

SK No 154152 S